



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 2020



TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2019



**WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2004 Nomor 159 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 33 Seri D);

12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 51 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
dan  
WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. neraca;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan arus kas;
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah / perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan.....	Rp	1.765.760.418.492,27	
Belanja .....	<u>Rp</u>	<u>1.734.593.335.861,34</u>	
Surplus.....	Rp		31.167.082.630,93
<b>b. Pembiayaan</b>			
- Penerimaan ..	Rp	226.448.050.491,52	
- Pengeluaran .	<u>Rp</u>	<u>37.275.000.000,00</u>	
Surplus.....	Rp		189.173.050.491,52
c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Rp		220.340.133.122,45

### Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp10.991.929.105,27 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan	Rp	1.754.768.489.387,00
2. Realisasi	<u>Rp</u>	<u>1.765.760.418.492,27</u> -
Selisih lebih	Rp	10.991.929.105,27

- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp209.346.821.285,18 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Belanja	Rp	1.943.940.157.146,52
2. Realisasi	<u>Rp</u>	<u>1.734.593.335.861,34</u>
Selisih kurang	Rp	(209.346.821.285,18)

- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ defisit sejumlah Rp220.338.750.390,45 dengan rincian sebagai berikut :

1. Defisit	Rp	(189.171.667.759,52)
2. Realisasi	<u>Rp</u>	<u>31.167.082.630,93</u>
Selisih lebih	Rp	220.338.750.390,45

- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp1.382.732,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran penerimaan pembiayaan	Rp	226.446.667.759,52
2. Realisasi	<u>Rp</u>	<u>226.448.050.491,52</u>
Selisih lebih	Rp	1.382.732,00

- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pengeluaran pembiayaan	Rp	37.275.000.000,00
2. Realisasi	<u>Rp</u>	<u>37.275.000.000,00</u>
Selisih	Rp	-

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sebesar Rp1.382.732,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pembiayaan netto	Rp	189.171.667.759,52
2. Realisasi	Rp	<u>189.173.050.491,52</u>
Selisih lebih	Rp	1.382.732,00

#### Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	226.442.324.759,52
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	226.442.324.759,52
c. SiLPA/SiKPA	Rp	<u>220.340.133.122,45</u>
d. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	220.340.133.122,45

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp	4.246.893.437.243,72
b. Jumlah kewajiban	Rp	12.009.874.122,00
c. Jumlah ekuitas	Rp	4.234.883.563.121,72

#### Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2019 adalah sebagai berikut :

##### a. Kegiatan Operasional

1. Pendapatan-LO	Rp	1.780.179.235.039,31
2. Beban-LO	Rp	<u>1.561.309.705.800,86</u>
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	Rp	218.869.529.238,45

##### b. Kegiatan Non Operasional

1. Surplus Non Operasional	Rp	159.000.000,00
2. Defisit Non Operasional	Rp	<u>-</u>
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Rp	159.000.000,00

##### c. Pos Luar Biasa

1. Pendapatan Luar Biasa	Rp	-
2. Beban Luar Biasa	Rp	<u>-</u>
Jumlah Pos Luar Biasa	Rp	-

d. Surplus/Defisit - LO 219.028.529.238,45

#### Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2019 adalah sebagai berikut :

a. Saldo kas 1 Januari 2019	Rp	226.442.324.759,52
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp	357.498.780.179,10
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp	(363.606.697.548,17)
d. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp	5.725.732,00
e. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp	-
f. Saldo akhir kas BUD dan BLUD	Rp	220.340.133.122,45
g. Setoran Ke Kas Daerah melewati tahun anggaran	Rp	50.559.818,66
h. Setoran ke Kas BLUD UPT Pusat Bisnis hasil pemeriksaan	Rp	44.692.271,22
i. Titipan Pihak Ketiga atas teater 4D dan toilet Taman Pintar	Rp	255.773.400,00
j. Saldo akhir kas per 31 Desember 2019	Rp	220.691.158.612,33

#### Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2019 adalah sebagai berikut :

a. ekuitas awal	Rp	4.084.409.554.757,17
b. surplus/defisit LO	Rp	219.028.529.238,45
c. ekuitas mutasi	Rp	(68.554.520.873,90)
d. ekuitas akhir	Rp	4.234.883.563.121,72

#### Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

#### Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran, terdiri dari :
  1. Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  2. Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

- 3. Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- 4. Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- 5. Lampiran I.5 : Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; dan
- 6. Lampiran I.6 : Rincian realisasi anggaran pendapatan daerah;
- b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III : Laporan operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan arus kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.

#### Pasal 11

Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 12

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 24 Juli 2020

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta

pada tanggal 24 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

AMAN YURIADIJAYA

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 5  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA : ( 5 , 20 / 2020 )

**LAMPIRAN I**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2019  
 (AUDITED)

Halaman 1  
 (format APBD)

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.754.768.489.387,00</b>	<b>1.765.760.418.492,27</b>	<b>10.991.929.105,27</b>	<b>100,63</b>
<b>4 1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>653.011.939.630,00</b>	<b>689.049.725.509,27</b>	<b>36.037.785.879,27</b>	<b>105,52</b>
4 1 1	Pajak Daerah	425.381.500.000,00	451.265.948.031,00	25.884.448.031,00	106,08
4 1 2	Retribusi Daerah	33.451.735.712,00	32.428.343.731,00	(1.023.391.981,00)	96,94
4 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	28.935.929.644,00	28.975.003.950,01	39.074.306,01	100,14
4 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	165.242.774.274,00	176.380.429.797,26	11.137.655.523,26	106,74
<b>4 2</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>916.460.511.482,00</b>	<b>875.308.177.702,00</b>	<b>(41.152.333.780,00)</b>	<b>95,51</b>
4 2 1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	46.213.757.482,00	28.975.322.400,00	(17.238.435.082,00)	62,70
4 2 2	Dana Alokasi Umum	699.176.894.000,00	700.372.564.000,00	1.195.670.000,00	100,17
4 2 3	Dana Alokasi Khusus	171.069.860.000,00	145.960.291.302,00	(25.109.568.698,00)	85,32
<b>4 3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>185.296.038.275,00</b>	<b>201.402.515.281,00</b>	<b>16.106.477.006,00</b>	<b>108,69</b>
4 3 1	Hibah	30.078.600.000,00	31.011.780.000,00	933.180.000,00	-
4 3 2	Dana Darurat	-	-	-	-
4 3 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	118.220.579.275,00	133.393.876.281,00	15.173.297.006,00	112,83
4 3 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	35.760.859.000,00	35.760.859.000,00	-	100,00
4 3 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	1.236.000.000,00	1.236.000.000,00	-	-
	<b>Jumlah Pendapatan Daerah</b>	<b>1.754.768.489.387,00</b>	<b>1.765.760.418.492,27</b>	<b>10.991.929.105,27</b>	<b>100,63</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.943.940.157.146,52</b>	<b>1.734.593.335.861,34</b>	<b>(209.346.821.285,18)</b>	<b>89,23</b>
<b>5 1</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>775.963.952.168,52</b>	<b>716.969.657.199,00</b>	<b>(58.994.294.969,52)</b>	<b>92,40</b>
5 1 1	Belanja Pegawai	667.465.772.253,00	623.730.246.194,00	(43.735.526.059,00)	93,45
5 1 2	Belanja Bunga	-	-	-	-
5 1 3	Belanja Subsidi	-	-	-	-
5 1 4	Belanja Hibah	85.740.983.138,00	79.389.047.945,00	(6.351.935.193,00)	92,59
5 1 5	Belanja Bantuan Sosial	12.526.580.000,00	11.551.423.000,00	(975.157.000,00)	92,22
5 1 6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	-	-	-	-
5 1 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, Partai Politik	2.002.804.587,00	1.981.246.996,00	(21.557.591,00)	98,92
5 1 8	Belanja Tidak Terduga	8.227.812.190,52	317.693.064,00	(7.910.119.126,52)	3,86
<b>5 2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1.167.976.204.978,00</b>	<b>1.017.623.678.662,34</b>	<b>(150.352.526.315,66)</b>	<b>87,13</b>
5 2 1	Belanja Pegawai	163.392.184.600,00	136.801.816.234,28	(26.590.368.365,72)	83,73
5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	617.496.329.981,00	553.387.490.228,89	(64.108.839.752,11)	89,62
5 2 3	Belanja Modal	387.087.690.397,00	327.434.372.199,17	(59.653.318.197,83)	84,59
	<b>Jumlah Belanja Daerah</b>	<b>1.943.940.157.146,52</b>	<b>1.734.593.335.861,34</b>	<b>(209.346.821.285,18)</b>	<b>89,23</b>
	<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>(189.171.667.759,52)</b>	<b>31.167.082.630,93</b>	<b>220.338.750.390,45</b>	<b>(16,48)</b>

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
<b>6 1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>226.446.667.759,52</b>	<b>226.448.050.491,52</b>	<b>1.382.732,00</b>	<b>100,00</b>
6 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	226.442.324.759,52	226.442.324.759,52	-	100,00
6 1 2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
6 1 3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-
6 1 4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6 1 5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	4.343.000,00	5.725.732,00	1.382.732,00	-
6 1 6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>226.446.667.759,52</b>	<b>226.448.050.491,52</b>	<b>1.382.732,00</b>	<b>100,00</b>
<b>6 2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>37.275.000.000,00</b>	<b>37.275.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
6 2 1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
6 2 2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	37.275.000.000,00	37.275.000.000,00	-	100,00
6 2 3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-
6 2 4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>37.275.000.000,00</b>	<b>37.275.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>189.171.667.759,52</b>	<b>189.173.050.491,52</b>	<b>1.382.732,00</b>	<b>100,00</b>
<b>6 3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)</b>	<b>-</b>	<b>220.340.133.122,45</b>	<b>220.340.133.122,45</b>	

CATATAN :

SILPA Tahun Anggaran 2019 terdiri dari :

1. SILPA Pemkot tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 176.870.665.396,34
  2. SISA KAS RSUD tahun 2019 sebesar Rp. 16.315.175.635,26
  3. SISA Kas Taman Pintar tahun 2019 sebesar Rp. 3.562.497.919,44
  4. BLUD Puskesmas tahun 2019 sebesar Rp. 5.124.325.375,60
  5. BLUD RS Pratama tahun 2019 sebesar Rp. 8.539.523.751,80
  6. UPT Pusat Bisnis tahun 2019 sebesar Rp. 1.669.279.394,65
  7. UPT Logam tahun 2019 sebesar Rp. 82.005.512,20
  8. SISA KAS DANA BOS tahun 2019 sebesar Rp. 8.176.660.137,16
- Rp. 220.340.133.122,45

**WALIKOTA YOGYAKARTA**

**ttd**

**HARYADI SUYUTI**



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**LAPORAN REALISASI APBD**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2019 DAN 2018**  
**(AUDITED)**

Halaman 1  
(format SAP)

Uraian	Reff	Anggaran 2019 Rp	Realisasi 2019 Rp	%	Realisasi 2018 Rp
<b>PENDAPATAN</b>	5.1.1				
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	5.1.1.1				
Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.a	425.381.500.000,00	451.265.948.031,00	106,08	407.573.263.422,00
Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.b	33.451.735.712,00	32.428.343.731,00	96,94	33.984.531.787,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan	5.1.1.1.c	28.935.929.644,00	28.975.003.950,01	100,14	28.032.365.012,83
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.1.1.d	165.242.774.274,00	176.380.429.797,26	106,74	197.902.915.248,31
<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>		<b>653.011.939.630,00</b>	<b>689.049.725.509,27</b>	<b>105,52</b>	<b>667.493.075.470,14</b>
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	5.1.1.2				
<b>Transfer Pemerintah Pusat - Dana</b>	5.1.1.2.a				
Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.a.1	43.688.080.000,00	27.070.845.600,00	61,96	44.728.934.290,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.1.1.2.a.2	2.525.677.482,00	1.904.476.800,00	75,40	1.949.445.407,00
Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.a.3	699.176.894.000,00	700.372.564.000,00	100,17	658.504.186.000,00
Dana Alokasi Khusus	5.1.1.2.a.4	171.069.860.000,00	145.960.291.302,00	85,32	162.523.890.048,00
<b>Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</b>		<b>916.460.511.482,00</b>	<b>875.308.177.702,00</b>	<b>95,51</b>	<b>867.706.455.745,00</b>
<b>Transfer Pemerintah Pusat Lainnya</b>	5.1.1.2.b				
Dana Otonomi Khusus	5.1.1.2.b.1	-	-	-	-
Dana Penyesuaian	5.1.1.2.b.2	65.639.459.000,00	65.318.639.000,00	99,51	42.500.000.000,00
Pendapatan Hibah	5.1.1.2.b.3	-	-	-	32.251.792.000,00
<b>Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Lainnya</b>		<b>65.639.459.000,00</b>	<b>65.318.639.000,00</b>	<b>99,51</b>	<b>74.751.792.000,00</b>
<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya</b>	5.1.1.2.c				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.c.1	118.220.579.275,00	133.393.876.281,00	112,83	126.437.432.637,38
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	5.1.1.2.c.2	1.236.000.000,00	1.236.000.000,00	100,00	531.242.000,00
Pendapatan Lainnya	5.1.1.2.c.3	-	-	-	-
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya</b>		<b>119.456.579.275,00</b>	<b>134.629.876.281,00</b>	<b>112,70</b>	<b>126.968.674.637,38</b>
<b>Jumlah Pendapatan Transfer</b>		<b>1.101.556.549.757,00</b>	<b>1.075.256.692.983,00</b>	<b>97,61</b>	<b>1.069.426.922.382,38</b>
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	5.1.1.3				
Pendapatan Hibah	5.1.1.3.a	200.000.000,00	1.454.000.000,00	727,00	-
Pendapatan Dana Darurat	5.1.1.3.b	-	-	-	-
Pendapatan Lainnya	5.1.1.3.c	-	-	-	-
<b>Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>		<b>200.000.000,00</b>	<b>1.454.000.000,00</b>	<b>727,00</b>	<b>-</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>1.754.768.489.387,00</b>	<b>1.765.760.418.492,27</b>	<b>100,63</b>	<b>1.736.919.997.852,52</b>
<b>BELANJA</b>	5.1.2				
<b>BELANJA OPERASI</b>	5.1.2.1				
Belanja Pegawai	5.1.2.1.a	830.857.956.853,00	760.532.062.428,28	91,54	767.231.708.627,85
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.b	617.496.329.981,00	553.387.490.228,89	89,62	496.351.994.037,57
Belanja Bunga	5.1.2.1.c	-	-	-	-
Belanja Subsidi	5.1.2.1.d	-	-	-	-
Belanja Hibah	5.1.2.1.e	85.740.983.138,00	79.389.047.945,00	92,59	53.665.425.050,00
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.f	12.526.580.000,00	11.551.423.000,00	92,22	7.764.735.000,00
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>		<b>1.546.621.849.972,00</b>	<b>1.404.860.023.602,17</b>	<b>90,83</b>	<b>1.325.013.862.715,42</b>
<b>BELANJA MODAL</b>	5.1.2.2				
Belanja Tanah	5.1.2.2.a	52.092.672.025,00	25.569.058.040,00	49,08	74.967.469.865,00
Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.b	108.291.387.376,00	96.719.552.169,17	89,31	103.905.673.673,95
Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.c	60.603.570.774,00	54.312.514.794,87	89,62	22.131.236.620,86
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.1.2.2.d	115.214.771.507,00	101.225.143.404,83	87,86	44.603.591.095,89
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.e	839.019.134,00	828.300.673,00	98,72	4.208.575.933,00
Belanja Modal Lainnya	5.1.2.2.f	50.046.269.581,00	48.779.803.117,30	97,47	75.276.191.867,79
<b>Jumlah Belanja Modal</b>		<b>387.087.690.397,00</b>	<b>327.434.372.199,17</b>	<b>84,59</b>	<b>325.092.739.056,49</b>

Uraian	Reff	Anggaran 2019 Rp	Realisasi 2019 Rp	%	Realisasi 2018 Rp
<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	5.1.2.3				
Belanja Tak Terduga		8.227.812.190,52	317.693.064,00	3,86	293.241.254,00
<b>Jumlah Belanja Tak Terduga</b>		<b>8.227.812.190,52</b>	<b>317.693.064,00</b>	<b>3,86</b>	<b>293.241.254,00</b>
<b>TRANSFER</b>	5.1.2.4				
<b>Transfer/Bagi Hasil ke Desa</b>	5.1.2.4.1				
Bagi Hasil Pajak	5.1.2.4.1.a	-	-	-	-
Bagi Hasil Retribusi	5.1.2.4.1.b	-	-	-	-
Bagi Hasil Lainnya	5.1.2.4.1.c	-	-	-	-
<b>Jumlah Transfer/Bagi Hasil ke Desa</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Transfer Bantuan Keuangan</b>	5.1.2.4.2				
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah	5.1.2.4.2.a	1.228.210.990,00	1.228.210.990,00	100,00	1.592.338.080,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	5.1.2.4.2.b	-	-	-	-
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	5.1.2.4.2.c	774.593.597,00	753.036.006,00	97,22	735.662.418,00
<b>Jumlah Transfer Bantuan Keuangan</b>		<b>2.002.804.587,00</b>	<b>1.981.246.996,00</b>	<b>98,92</b>	<b>2.328.000.498,00</b>
<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER</b>		<b>1.943.940.157.146,52</b>	<b>1.734.593.335.861,34</b>	<b>89,23</b>	<b>1.652.727.843.523,91</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	5.1.2.5	<b>(189.171.667.759,52)</b>	<b>31.167.082.630,93</b>	<b>(16,48)</b>	<b>84.192.154.328,61</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>	5.1.3				
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	5.1.3.1				
Penggunaan SiLPA TA 2017	5.1.3.1.a	226.442.324.759,52	226.442.324.759,52	100,00	254.103.922.554,36
Pencairan Dana Cadangan		-	-	-	8.044.288.558,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Pinjaman Dalam Negeri		-	-	-	-
Pencairan Dana Cadangan	5.1.3.1.c	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman	5.1.3.1.b	4.343.000,00	5.725.732,00	131,84	2.550.000,00
Penerimaan Piutang Daerah	5.1.3.1.d	-	-	-	-
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>		<b>226.446.667.759,52</b>	<b>226.448.050.491,52</b>	<b>100,00</b>	<b>262.150.761.112,36</b>
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	5.1.3.2				
Pembentukan Dana Cadangan	5.1.3.2.a	-	-	-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.1.3.2.b	37.275.000.000,00	37.275.000.000,00	100,00	63.861.759.721,45
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.3.2.c 5.1.3.2.d	- -	- -	- -	56.038.830.960,00 -
<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>		<b>37.275.000.000,00</b>	<b>37.275.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>119.900.590.681,45</b>
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>		<b>189.171.667.759,52</b>	<b>189.173.050.491,52</b>	<b>100,00</b>	<b>142.250.170.430,91</b>
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	5.1.3.3	<b>-</b>	<b>220.340.133.122,45</b>		<b>226.442.324.759,52</b>

\*) Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**WALIKOTA YOGYAKARTA**

ttd

**HARYADI SUYUTI**

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
 RINGKASAN LRA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI  
 TAHUN ANGGARAN 2019

KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN				BELANJA					
		Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%	Anggaran Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan (Rp)					
						Belanja Pegawai	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa, Partai Politik	Belanja Tidak Terduga	Jumlah Anggaran Belanja Tidak Langsung (Rp)
1	2	3	4	5 = 4-3	6	7	8	9	10	11	12 = 7+8+9+10+11
<b>01</b>	<b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>	<b>118.158.589.200,00</b>	<b>120.646.189.324,29</b>	<b>2.487.600.124,29</b>	<b>102,11</b>	<b>346.060.072.871,00</b>	-	-	-	-	<b>346.060.072.871,00</b>
<b>01 01</b>	<b>PENDIDIKAN</b>	-	-	-	-	<b>253.940.310.172,00</b>	-	-	-	-	<b>253.940.310.172,00</b>
01 01 01 01 01	Dinas Pendidikan	-	-	-	-	253.940.310.172,00	-	-	-	-	253.940.310.172,00
<b>01 02</b>	<b>KESEHATAN</b>	<b>116.942.828.700,00</b>	<b>119.442.999.224,29</b>	<b>2.500.170.524,29</b>	<b>102,14</b>	<b>68.650.544.686,00</b>	-	-	-	-	<b>68.650.544.686,00</b>
01 02 01 02 01	Dinas Kesehatan	35.442.828.700,00	41.321.755.198,29	5.878.926.498,29	116,59	44.178.052.722,00	-	-	-	-	44.178.052.722,00
01 02 01 02 02	Rumah Sakit Umum Daerah (RS Jogja)	81.500.000.000,00	78.121.244.026,00	(3.378.755.974,00)	95,85	24.472.491.964,00	-	-	-	-	24.472.491.964,00
<b>01 03</b>	<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	<b>1.178.760.500,00</b>	<b>1.164.890.100,00</b>	<b>(13.870.400,00)</b>	<b>98,82</b>	<b>7.340.157.733,00</b>	-	-	-	-	<b>7.340.157.733,00</b>
01 03 01 03 01	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.178.760.500,00	1.164.890.100,00	(13.870.400,00)	98,82	7.340.157.733,00	-	-	-	-	7.340.157.733,00
01 03 02 04 01	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>01 04</b>	<b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01 04 01 03 01	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>01 05</b>	<b>KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	<b>37.000.000,00</b>	<b>38.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>103,51</b>	<b>12.605.501.895,00</b>	-	-	-	-	<b>12.605.501.895,00</b>
01 05 01 05 01	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	8.317.222.390,00	-	-	-	-	8.317.222.390,00
01 05 01 05 02	Dinas Kebakaran	37.000.000,00	38.300.000,00	1.300.000,00	103,51	3.564.360.434,00	-	-	-	-	3.564.360.434,00
01 05 01 05 03	BPBD	-	-	-	-	723.919.071,00	-	-	-	-	723.919.071,00
<b>01 06</b>	<b>SOSIAL</b>	-	-	-	-	<b>3.523.558.385,00</b>	-	-	-	-	<b>3.523.558.385,00</b>
01 06 01 06 01	Dinas Sosial	-	-	-	-	3.523.558.385,00	-	-	-	-	3.523.558.385,00

KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	BELANJA								
		Anggaran Belanja Langsung Setelah Perubahan (Rp)				Jumlah Anggaran Belanja Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Belanja Tidak Langsung (Rp)			
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	Jumlah Anggaran Belanja Langsung (Rp)		Belanja Pegawai	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, Partai Politik
1	2	13	14	15	16 = 13+14+15	17 = 12+16	18	19	20	21
<b>01</b>	<b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>	<b>138.035.032.699,00</b>	<b>320.390.979.855,00</b>	<b>265.196.404.601,00</b>	<b>723.622.417.155,00</b>	<b>1.069.682.490.026,00</b>	<b>320.606.778.833,00</b>	-	-	-
<b>01 01</b>	<b>PENDIDIKAN</b>	<b>46.749.152.421,00</b>	<b>91.424.828.867,00</b>	<b>22.608.232.913,00</b>	<b>160.782.214.201,00</b>	<b>414.722.524.373,00</b>	<b>231.916.216.935,00</b>	-	-	-
01 01 01 01 01	Dinas Pendidikan	46.749.152.421,00	91.424.828.867,00	22.608.232.913,00	160.782.214.201,00	414.722.524.373,00	231.916.216.935,00	-	-	-
<b>01 02</b>	<b>KESEHATAN</b>	<b>83.081.645.898,00</b>	<b>165.920.574.832,00</b>	<b>46.851.132.775,00</b>	<b>295.853.353.505,00</b>	<b>364.503.898.191,00</b>	<b>66.104.118.566,00</b>	-	-	-
01 02 01 02 01	Dinas Kesehatan	25.772.074.148,00	109.413.273.810,00	20.657.132.775,00	155.842.480.733,00	200.020.533.455,00	42.390.443.011,00	-	-	-
01 02 01 02 02	Rumah Sakit Umum Daerah (RS Jogja)	57.309.571.750,00	56.507.301.022,00	26.194.000.000,00	140.010.872.772,00	164.483.364.736,00	23.713.675.555,00	-	-	-
<b>01 03</b>	<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	<b>534.872.432,00</b>	<b>27.835.040.373,00</b>	<b>154.029.036.246,00</b>	<b>182.398.949.051,00</b>	<b>189.739.106.784,00</b>	<b>7.190.184.372,00</b>	-	-	-
01 03 01 03 01	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	513.397.432,00	27.192.130.273,00	151.658.988.746,00	179.364.516.451,00	186.704.674.184,00	7.190.184.372,00	-	-	-
01 03 02 04 01	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	21.475.000,00	642.910.100,00	2.370.047.500,00	3.034.432.600,00	3.034.432.600,00	-	-	-	-
<b>01 04</b>	<b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>160.200.000,00</b>	<b>6.698.184.134,00</b>	<b>28.829.103.887,00</b>	<b>35.687.488.021,00</b>	<b>35.687.488.021,00</b>	-	-	-	-
01 04 01 03 01	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	160.200.000,00	6.698.184.134,00	28.829.103.887,00	35.687.488.021,00	35.687.488.021,00	-	-	-	-
<b>01 05</b>	<b>KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	<b>5.510.879.476,00</b>	<b>19.618.897.551,00</b>	<b>12.060.134.900,00</b>	<b>37.189.911.927,00</b>	<b>49.795.413.822,00</b>	<b>12.033.857.974,00</b>	-	-	-
01 05 01 05 01	Satuan Polisi Pamong Praja	5.004.825.876,00	11.357.058.551,00	837.152.500,00	17.199.036.927,00	25.516.259.317,00	7.883.794.931,00	-	-	-
01 05 01 05 02	Dinas Kebakaran	506.053.600,00	3.809.322.000,00	4.793.877.400,00	9.109.253.000,00	12.673.613.434,00	3.456.318.030,00	-	-	-
01 05 01 05 03	BPBD	-	4.452.517.000,00	6.429.105.000,00	10.881.622.000,00	11.605.541.071,00	693.745.013,00	-	-	-
<b>01 06</b>	<b>SOSIAL</b>	<b>1.998.282.472,00</b>	<b>8.893.454.098,00</b>	<b>818.763.880,00</b>	<b>11.710.500.450,00</b>	<b>15.234.058.835,00</b>	<b>3.362.400.986,00</b>	-	-	-
01 06 01 06 01	Dinas Sosial	1.998.282.472,00	8.893.454.098,00	818.763.880,00	11.710.500.450,00	15.234.058.835,00	3.362.400.986,00	-	-	-



KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	BELANJA								
		Realisasi Belanja Tidak Langsung (Rp)		Realisasi Belanja Langsung (Rp)				Jumlah Realisasi Belanja (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%
		Belanja Tidak Terduga	Jumlah Realisasi Belanja Tidak Langsung (Rp)	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	Jumlah Realisasi Belanja Langsung (Rp)			
1	2	22	23 = 18+19+20+21+22	24	25	26	27 = 24+25+26	28 = 23+27	29 = 28-17	30
<b>01</b>	<b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>	-	<b>320.606.778.833,00</b>	<b>113.720.762.925,32</b>	<b>290.714.929.526,70</b>	<b>235.889.142.199,73</b>	<b>640.324.834.651,75</b>	<b>960.931.613.484,75</b>	<b>(108.750.876.541,25)</b>	<b>89,83</b>
<b>01 01</b>	<b>PENDIDIKAN</b>	-	<b>231.916.216.935,00</b>	<b>42.457.788.120,00</b>	<b>82.144.817.388,20</b>	<b>19.168.013.024,91</b>	<b>143.770.618.533,11</b>	<b>375.686.835.468,11</b>	<b>(39.035.688.904,89)</b>	<b>90,59</b>
01 01 01 01 01	Dinas Pendidikan	-	231.916.216.935,00	42.457.788.120,00	82.144.817.388,20	19.168.013.024,91	143.770.618.533,11	375.686.835.468,11	(39.035.688.904,89)	90,59
<b>01 02</b>	<b>KESEHATAN</b>	-	<b>66.104.118.566,00</b>	<b>63.474.118.915,48</b>	<b>150.303.991.213,56</b>	<b>43.695.365.759,25</b>	<b>257.473.475.888,29</b>	<b>323.577.594.454,29</b>	<b>(40.926.303.736,71)</b>	<b>88,77</b>
01 02 01 02 01	Dinas Kesehatan	-	42.390.443.011,00	24.361.265.785,00	95.505.412.843,78	18.621.999.314,25	138.488.677.943,03	180.879.120.954,03	(19.141.412.500,97)	90,43
01 02 01 02 02	Rumah Sakit Umum Daerah (RS Jogja)	-	23.713.675.555,00	39.112.853.130,48	54.798.578.369,78	25.073.366.445,00	118.984.797.945,26	142.698.473.500,26	(21.784.891.235,74)	86,76
<b>01 03</b>	<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	-	<b>7.190.184.372,00</b>	<b>484.179.047,88</b>	<b>25.781.837.893,01</b>	<b>135.628.134.512,13</b>	<b>161.894.151.453,02</b>	<b>169.084.335.825,02</b>	<b>(20.654.770.958,98)</b>	<b>89,11</b>
01 03 01 03 01	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	7.190.184.372,00	462.704.047,88	25.232.525.879,01	133.290.551.112,13	158.985.781.039,02	166.175.965.411,02	(20.528.708.772,98)	89,00
01 03 02 04 01	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	-	-	21.475.000,00	549.312.014,00	2.337.583.400,00	2.908.370.414,00	2.908.370.414,00	(126.062.186,00)	<b>95,85</b>
<b>01 04</b>	<b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	-	-	<b>128.025.000,00</b>	<b>6.115.356.832,52</b>	<b>25.474.120.076,17</b>	<b>31.717.501.908,69</b>	<b>31.717.501.908,69</b>	<b>(3.969.986.112,31)</b>	<b>88,88</b>
01 04 01 03 01	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	-	128.025.000,00	6.115.356.832,52	25.474.120.076,17	31.717.501.908,69	31.717.501.908,69	(3.969.986.112,31)	88,88
<b>01 05</b>	<b>KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	-	<b>12.033.857.974,00</b>	<b>5.288.767.784,04</b>	<b>18.122.686.054,97</b>	<b>11.124.001.052,27</b>	<b>34.535.454.891,28</b>	<b>46.569.312.865,28</b>	<b>(3.226.100.956,72)</b>	<b>93,52</b>
01 05 01 05 01	Satuan Polisi Pamong Praja	-	7.883.794.931,00	4.782.722.009,00	11.023.380.109,57	808.201.900,00	16.614.304.018,57	24.498.098.949,57	(1.018.160.367,43)	96,01
01 05 01 05 02	Dinas Kebakaran	-	3.456.318.030,00	506.045.775,04	3.288.285.718,40	4.548.485.663,85	8.342.817.157,29	11.799.135.187,29	(874.478.246,71)	93,10
01 05 01 05 03	BPBD	-	693.745.013,00	-	3.811.020.227,00	5.767.313.488,42	9.578.333.715,42	10.272.078.728,42	(1.333.462.342,58)	88,51
<b>01 06</b>	<b>SOSIAL</b>	-	<b>3.362.400.986,00</b>	<b>1.887.884.057,92</b>	<b>8.246.240.144,44</b>	<b>799.507.775,00</b>	<b>10.933.631.977,36</b>	<b>14.296.032.963,36</b>	<b>(938.025.871,64)</b>	<b>93,84</b>
01 06 01 06 01	Dinas Sosial	-	3.362.400.986,00	1.887.884.057,92	8.246.240.144,44	799.507.775,00	10.933.631.977,36	14.296.032.963,36	(938.025.871,64)	93,84



KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	BELANJA								
		Anggaran Belanja Langsung Setelah Perubahan (Rp)				Jumlah Anggaran Belanja Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Belanja Tidak Langsung (Rp)			
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	Jumlah Anggaran Belanja Langsung (Rp)		Belanja Pegawai	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa, Partai Politik
1	2	13	14	15	16 = 13+14+15	17 = 12+16	18	19	20	21
<b>02</b>	<b>URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR</b>	<b>12.981.377.892,00</b>	<b>154.964.018.541,00</b>	<b>88.623.065.793,00</b>	<b>256.568.462.226,00</b>	<b>328.985.157.349,00</b>	<b>69.532.476.867,00</b>	-	-	-
<b>02 01</b>	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>229.575.000,00</b>	<b>5.005.278.000,00</b>	-	<b>5.234.853.000,00</b>	<b>5.234.853.000,00</b>	-	-	-	-
02 01 01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	229.575.000,00	5.005.278.000,00	-	5.234.853.000,00	5.234.853.000,00	-	-	-	-
<b>02 02</b>	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	<b>303.442.350,00</b>	<b>4.661.415.694,00</b>	<b>1.196.557.700,00</b>	<b>6.161.415.744,00</b>	<b>7.818.751.623,00</b>	<b>1.586.123.701,00</b>	-	-	-
02 02 02 02 01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	303.442.350,00	4.661.415.694,00	1.196.557.700,00	6.161.415.744,00	7.818.751.623,00	1.586.123.701,00	-	-	-
<b>02 03</b>	<b>PANGAN</b>	<b>5.550.000,00</b>	<b>1.261.745.000,00</b>	<b>158.000.000,00</b>	<b>1.425.295.000,00</b>	<b>1.425.295.000,00</b>	-	-	-	-
02 03 03 01 01	Dinas Pertanian dan Pangan	5.550.000,00	1.261.745.000,00	158.000.000,00	1.425.295.000,00	1.425.295.000,00	-	-	-	-
<b>02 04</b>	<b>PERTANAHAN</b>	<b>151.620.120,00</b>	<b>788.629.125,00</b>	<b>52.412.609.000,00</b>	<b>53.352.858.245,00</b>	<b>55.535.845.807,00</b>	<b>2.127.241.192,00</b>	-	-	-
02 04 02 04 01	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	151.620.120,00	788.629.125,00	52.412.609.000,00	53.352.858.245,00	55.535.845.807,00	2.127.241.192,00	-	-	-
<b>02 05</b>	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>1.947.458.252,00</b>	<b>28.990.953.205,00</b>	<b>9.833.708.543,00</b>	<b>40.772.120.000,00</b>	<b>54.389.944.866,00</b>	<b>13.411.200.698,00</b>	-	-	-
02 05 02 05 01	Dinas Lingkungan Hidup	1.947.458.252,00	28.990.953.205,00	9.833.708.543,00	40.772.120.000,00	54.389.944.866,00	13.411.200.698,00	-	-	-
<b>02 06</b>	<b>ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	<b>830.013.303,00</b>	<b>3.170.171.697,00</b>	<b>1.096.400.000,00</b>	<b>5.096.585.000,00</b>	<b>7.454.924.134,00</b>	<b>2.300.753.633,00</b>	-	-	-
02 06 02 06 01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	830.013.303,00	3.170.171.697,00	1.096.400.000,00	5.096.585.000,00	7.454.924.134,00	2.300.753.633,00	-	-	-
<b>02 07</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	<b>5.765.776.538,00</b>	<b>52.247.800.223,00</b>	<b>4.767.402.535,00</b>	<b>62.780.979.296,00</b>	<b>93.006.790.519,00</b>	<b>28.940.247.347,00</b>	-	-	-
02 07 02 07 01	Kecamatan Tegalrejo	334.465.524,00	4.414.264.476,00	595.415.000,00	5.344.145.000,00	8.084.907.837,00	2.649.313.917,00	-	-	-
02 07 02 07 02	Kecamatan Jetis	339.827.901,00	3.775.398.100,00	304.956.000,00	4.420.182.001,00	6.382.624.424,00	1.872.142.173,00	-	-	-
02 07 02 07 03	Kecamatan Gondokusuman	444.225.524,00	5.881.506.645,00	186.303.250,00	6.512.035.419,00	9.488.051.450,00	2.820.986.539,00	-	-	-
02 07 02 07 04	Kecamatan Danurejan	244.880.118,00	3.260.213.479,00	146.224.203,00	3.651.317.800,00	5.831.806.938,00	2.097.340.619,00	-	-	-
02 07 02 07 05	Kecamatan Gedongtengen	316.585.807,00	2.367.430.276,00	427.347.890,00	3.111.363.973,00	4.656.511.561,00	1.492.456.730,00	-	-	-
02 07 02 07 06	Kecamatan Pakualaman	395.826.868,00	1.925.281.832,00	672.644.300,00	2.993.753.000,00	4.576.944.883,00	1.494.287.935,00	-	-	-
02 07 02 07 07	Kecamatan Ngampilan	272.961.868,00	2.534.622.800,00	384.914.332,00	3.192.499.000,00	4.769.585.417,00	1.521.644.510,00	-	-	-
02 07 02 07 08	Kecamatan Wirobrajan	316.035.824,00	3.697.044.276,00	368.361.900,00	4.381.442.000,00	6.540.067.672,00	2.078.688.516,00	-	-	-
02 07 02 07 09	Kecamatan Mantriweron	293.103.956,00	3.481.837.247,00	463.429.000,00	4.238.370.203,00	6.322.281.977,00	2.033.833.961,00	-	-	-
02 07 02 07 10	Kecamatan Kraton	384.412.000,00	3.334.521.000,00	48.000.000,00	3.766.933.000,00	5.848.315.688,00	1.951.988.239,00	-	-	-
02 07 02 07 11	Kecamatan Gondomanan	299.209.500,00	2.244.992.500,00	164.124.000,00	2.708.326.000,00	4.329.112.111,00	1.499.099.327,00	-	-	-
02 07 02 07 12	Kecamatan Mergangsan	323.982.936,00	3.457.592.064,00	339.513.000,00	4.121.088.000,00	6.088.420.354,00	1.893.699.044,00	-	-	-
02 07 02 07 13	Kecamatan Umbulharjo	1.144.093.712,00	7.437.923.628,00	271.275.560,00	8.853.292.900,00	12.632.757.797,00	3.613.041.886,00	-	-	-
02 07 02 07 14	Kecamatan Kotagede	302.040.000,00	3.700.666.900,00	394.894.100,00	4.397.601.000,00	6.366.772.410,00	1.921.723.951,00	-	-	-
02 07 02 02 01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	354.125.000,00	734.505.000,00	-	1.088.630.000,00	1.088.630.000,00	-	-	-	-

KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	BELANJA								%
		Realisasi Belanja Tidak Langsung (Rp)		Realisasi Belanja Langsung (Rp)				Jumlah Realisasi Belanja (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	
		Belanja Tidak Terduga	Jumlah Realisasi Belanja Tidak Langsung (Rp)	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	Jumlah Realisasi Belanja Langsung (Rp)			
1	2	22	23 = 18+19+20+21+22	24	25	26	27 = 24+25+26	28 = 23+27	29 = 28-17	30
<b>02</b>	<b>URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR</b>	-	<b>69.532.476.867,00</b>	<b>12.315.312.675,16</b>	<b>146.595.985.544,35</b>	<b>59.828.087.368,34</b>	<b>218.739.385.587,85</b>	<b>288.271.862.454,85</b>	<b>(40.713.294.894,15)</b>	87,62
<b>02 01</b>	<b>TENAGA KERJA</b>	-	-	<b>229.575.000,00</b>	<b>4.890.867.249,00</b>	-	<b>5.120.442.249,00</b>	<b>5.120.442.249,00</b>	<b>(114.410.751,00)</b>	97,81
02 01 01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	229.575.000,00	4.890.867.249,00	-	5.120.442.249,00	5.120.442.249,00	(114.410.751,00)	97,81
<b>02 02</b>	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	-	<b>1.586.123.701,00</b>	<b>291.805.802,88</b>	<b>4.365.122.504,31</b>	<b>1.115.052.000,00</b>	<b>5.771.980.307,19</b>	<b>7.358.104.008,19</b>	<b>(460.647.614,81)</b>	94,11
02 02 02 02 01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	-	1.586.123.701,00	291.805.802,88	4.365.122.504,31	1.115.052.000,00	5.771.980.307,19	7.358.104.008,19	(460.647.614,81)	94,11
<b>02 03</b>	<b>PANGAN</b>	-	-	<b>5.450.000,00</b>	<b>1.161.237.499,16</b>	<b>157.769.000,00</b>	<b>1.324.456.499,16</b>	<b>1.324.456.499,16</b>	<b>(100.838.500,84)</b>	92,93
02 03 03 01 01	Dinas Pertanian dan Pangan	-	-	5.450.000,00	1.161.237.499,16	157.769.000,00	1.324.456.499,16	1.324.456.499,16	(100.838.500,84)	92,93
<b>02 04</b>	<b>PERTANAHAN</b>	-	<b>2.127.241.192,00</b>	<b>150.049.596,00</b>	<b>682.731.759,00</b>	<b>25.850.363.540,00</b>	<b>26.683.144.895,00</b>	<b>28.810.386.087,00</b>	<b>(26.725.459.720,00)</b>	51,88
02 04 02 04 01	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	-	2.127.241.192,00	150.049.596,00	682.731.759,00	25.850.363.540,00	26.683.144.895,00	28.810.386.087,00	(26.725.459.720,00)	51,88
<b>02 05</b>	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>	-	<b>13.411.200.698,00</b>	<b>1.817.197.833,60</b>	<b>27.725.515.517,62</b>	<b>9.239.333.586,77</b>	<b>38.782.046.937,99</b>	<b>52.193.247.635,99</b>	<b>(2.196.697.230,01)</b>	<b>95,96</b>
02 05 02 05 01	Dinas Lingkungan Hidup	-	13.411.200.698,00	1.817.197.833,60	27.725.515.517,62	9.239.333.586,77	38.782.046.937,99	52.193.247.635,99	(2.196.697.230,01)	95,96
<b>02 06</b>	<b>ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	-	<b>2.300.753.633,00</b>	<b>630.440.736,00</b>	<b>2.978.633.965,00</b>	<b>1.056.716.656,00</b>	<b>4.665.791.357,00</b>	<b>6.966.544.990,00</b>	<b>(488.379.144,00)</b>	<b>93,45</b>
02 06 02 06 01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	2.300.753.633,00	630.440.736,00	2.978.633.965,00	1.056.716.656,00	4.665.791.357,00	6.966.544.990,00	(488.379.144,00)	93,45
<b>02 07</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	-	<b>28.940.247.347,00</b>	<b>5.635.627.558,04</b>	<b>49.374.404.793,89</b>	<b>4.487.627.552,64</b>	<b>59.497.659.904,57</b>	<b>88.437.907.251,57</b>	<b>(4.568.883.267,43)</b>	<b>95,09</b>
02 07 02 07 01	Kecamatan Tegalrejo	-	2.649.313.917,00	331.373.956,00	4.213.168.356,88	525.699.312,64	5.070.241.625,52	7.719.555.542,52	(365.352.294,48)	95,48
02 07 02 07 02	Kecamatan Jetis	-	1.872.142.173,00	332.887.901,00	3.563.402.081,90	303.415.084,00	4.199.705.066,90	6.071.847.239,90	(310.777.184,10)	95,13
02 07 02 07 03	Kecamatan Gondokusuman	-	2.820.986.539,00	405.316.575,00	5.419.481.161,67	167.807.700,00	5.992.605.436,67	8.813.591.975,67	(674.459.474,33)	92,89
02 07 02 07 04	Kecamatan Danurejan	-	2.097.340.619,00	237.696.206,72	3.023.154.700,53	142.586.175,00	3.403.437.082,25	5.500.777.701,25	(331.029.236,75)	94,32
02 07 02 07 05	Kecamatan Gedongtengen	-	1.492.456.730,00	313.105.807,00	2.308.520.583,37	406.041.620,00	3.027.668.010,37	4.520.124.740,37	(136.386.820,63)	97,07
02 07 02 07 06	Kecamatan Pakualaman	-	1.494.287.935,00	395.826.868,00	1.888.814.344,00	642.104.300,00	2.926.745.512,00	4.421.033.447,00	(155.911.436,00)	96,59
02 07 02 07 07	Kecamatan Ngampilan	-	1.521.644.510,00	271.801.868,00	2.393.304.254,55	361.042.542,00	3.026.148.664,55	4.547.793.174,55	(221.792.242,45)	95,35
02 07 02 07 08	Kecamatan Wirobrajan	-	2.078.688.516,00	315.331.120,00	3.502.300.528,29	351.236.925,00	4.168.868.573,29	6.247.557.089,29	(292.510.582,71)	95,53
02 07 02 07 09	Kecamatan Mantrijeron	-	2.033.833.961,00	289.173.956,00	3.370.902.358,41	423.866.450,00	4.083.942.764,41	6.117.776.725,41	(204.505.251,59)	96,77
02 07 02 07 10	Kecamatan Kraton	-	1.951.988.239,00	354.464.780,00	3.080.388.446,59	45.119.300,00	3.479.972.526,59	5.431.960.765,59	(416.354.922,41)	92,88
02 07 02 07 11	Kecamatan Gondomanan	-	1.499.099.327,00	295.288.504,00	2.182.379.538,00	161.282.000,00	2.638.950.042,00	4.138.049.369,00	(191.062.742,00)	95,59
02 07 02 07 12	Kecamatan Mergangsan	-	1.893.699.044,00	312.722.936,00	3.242.680.650,80	313.622.584,00	3.869.026.170,80	5.762.725.214,80	(325.695.139,20)	94,65
02 07 02 07 13	Kecamatan Umbulharjo	-	3.613.041.886,00	1.141.733.704,32	6.824.395.785,54	260.284.010,00	8.226.413.499,86	11.839.455.385,86	(793.302.411,14)	93,72
02 07 02 07 14	Kecamatan Kotagede	-	1.921.723.951,00	298.903.376,00	3.645.086.583,36	383.519.550,00	4.327.509.509,36	6.249.233.460,36	(117.538.949,64)	98,15
02 07 02 02 01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	340.000.000,00	716.425.420,00	-	1.056.425.420,00	1.056.425.420,00	(32.204.580,00)	97,04

KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN				BELANJA					
		Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%	Anggaran Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan (Rp)					
						Belanja Pegawai	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa, Partai Politik	Belanja Tidak Terduga	Jumlah Anggaran Belanja Tidak Langsung (Rp)
1	2	3	4	5 = 4-3	6	7	8	9	10	11	12 = 7+8+9+10+11
<b>02 08</b>	<b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	-	-	-		<b>1.253.781.329,00</b>	-	-	-	-	<b>1.253.781.329,00</b>
02 08 02 08 01	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	-		1.253.781.329,00	-	-	-	-	1.253.781.329,00
<b>02 09</b>	<b>PERHUBUNGAN</b>	<b>8.397.402.800,00</b>	<b>8.370.065.200,00</b>	<b>(27.337.600,00)</b>	<b>99,67</b>	<b>4.064.623.631,00</b>	-	-	-	-	<b>4.064.623.631,00</b>
02 09 02 09 01	Dinas Perhubungan	8.397.402.800,00	8.370.065.200,00	(27.337.600,00)	99,67	4.064.623.631,00	-	-	-	-	4.064.623.631,00
<b>02 10</b>	<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	-	-	-		<b>3.191.150.581,00</b>	-	-	-	-	<b>3.191.150.581,00</b>
02 10 02 10 01	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	-	-	-		3.191.150.581,00	-	-	-	-	3.191.150.581,00
<b>02 11</b>	<b>KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>	<b>367.786.345,00</b>	<b>245.300.742,02</b>	<b>(122.485.602,98)</b>	<b>66,70</b>	<b>3.420.906.074,00</b>	-	-	-	-	<b>3.420.906.074,00</b>
02 11 02 11 01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	367.786.345,00	245.300.742,02	(122.485.602,98)	66,70	3.420.906.074,00	-	-	-	-	3.420.906.074,00
<b>02 12</b>	<b>PENANAMAN MODAL</b>	<b>4.722.996.353,00</b>	<b>2.958.873.500,00</b>	<b>(1.764.122.853,00)</b>	<b>62,65</b>	<b>3.209.740.940,00</b>	-	-	-	-	<b>3.209.740.940,00</b>
02 12 02 12 01	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	4.722.996.353,00	2.958.873.500,00	(1.764.122.853,00)	62,65	3.209.740.940,00	-	-	-	-	3.209.740.940,00
<b>02 13</b>	<b>KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>	-	-	-		<b>1.492.304.451,00</b>	-	-	-	-	<b>1.492.304.451,00</b>
02 13 02 13 01	Dinas Pemuda dan Olahraga	-	-	-		1.492.304.451,00	-	-	-	-	1.492.304.451,00
<b>02 14</b>	<b>STATISTIK</b>	-	-	-		-	-	-	-	-	-
02 14 02 10 01	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	-	-	-		-	-	-	-	-	-
<b>02 15</b>	<b>PERSANDIAN</b>	-	-	-		-	-	-	-	-	-
02 15 02 10 01	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	-	-	-		-	-	-	-	-	-
<b>02 16</b>	<b>KEBUDAYAAN</b>	-	-	-		<b>1.667.528.760,00</b>	-	-	-	-	<b>1.667.528.760,00</b>
02 16 02 16 01	Dinas Kebudayaan	-	-	-		1.667.528.760,00	-	-	-	-	1.667.528.760,00
<b>02 17</b>	<b>PERPUSTAKAAN</b>	-	-	-		-	-	-	-	-	-
02 17 02 18 01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	-		-	-	-	-	-	-
<b>02 18</b>	<b>KEARSIPAN</b>	-	-	-		<b>3.336.192.515,00</b>	-	-	-	-	<b>3.336.192.515,00</b>
02 18 02 18 01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	-		3.336.192.515,00	-	-	-	-	3.336.192.515,00
<b>02 19</b>	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI</b>	-	-	-		<b>738.168.178,00</b>	-	-	-	-	<b>738.168.178,00</b>
02 19 02 19 01	Kantor Kesatuan Bangsa	-	-	-		738.168.178,00	-	-	-	-	738.168.178,00

KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	BELANJA								
		Anggaran Belanja Langsung Setelah Perubahan (Rp)				Jumlah Anggaran Belanja Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Belanja Tidak Langsung (Rp)			
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	Jumlah Anggaran Belanja Langsung (Rp)		Belanja Pegawai	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa, Partai Politik
1	2	13	14	15	16 = 13+14+15	17 = 12+16	18	19	20	21
<b>02 08</b>	<b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	<b>1.122.350.200,00</b>	<b>5.863.876.460,00</b>	<b>578.013.000,00</b>	<b>7.564.239.660,00</b>	<b>8.818.020.989,00</b>	<b>1.148.137.814,00</b>	-	-	-
02 08 02 08 01	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.122.350.200,00	5.863.876.460,00	578.013.000,00	7.564.239.660,00	8.818.020.989,00	1.148.137.814,00	-	-	-
<b>02 09</b>	<b>PERHUBUNGAN</b>	<b>518.551.729,00</b>	<b>12.335.648.849,00</b>	<b>4.526.939.331,00</b>	<b>17.381.139.909,00</b>	<b>21.445.763.540,00</b>	<b>4.039.506.024,00</b>	-	-	-
02 09 02 09 01	Dinas Perhubungan	518.551.729,00	12.335.648.849,00	4.526.939.331,00	17.381.139.909,00	21.445.763.540,00	4.039.506.024,00	-	-	-
<b>02 10</b>	<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>164.499.440,00</b>	<b>11.737.919.328,00</b>	<b>8.481.099.000,00</b>	<b>20.383.517.768,00</b>	<b>23.574.668.349,00</b>	<b>2.969.096.503,00</b>	-	-	-
02 10 02 10 01	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	164.499.440,00	11.737.919.328,00	8.481.099.000,00	20.383.517.768,00	23.574.668.349,00	2.969.096.503,00	-	-	-
<b>02 11</b>	<b>KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>	<b>213.966.200,00</b>	<b>7.544.366.800,00</b>	<b>370.350.000,00</b>	<b>8.128.683.000,00</b>	<b>11.549.589.074,00</b>	<b>3.272.777.137,00</b>	-	-	-
02 11 02 11 01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	213.966.200,00	7.544.366.800,00	370.350.000,00	8.128.683.000,00	11.549.589.074,00	3.272.777.137,00	-	-	-
<b>02 12</b>	<b>PENANAMAN MODAL</b>	<b>450.411.532,00</b>	<b>3.194.275.668,00</b>	<b>477.392.800,00</b>	<b>4.122.080.000,00</b>	<b>7.331.820.940,00</b>	<b>3.053.773.661,00</b>	-	-	-
02 12 02 12 01	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	450.411.532,00	3.194.275.668,00	477.392.800,00	4.122.080.000,00	7.331.820.940,00	3.053.773.661,00	-	-	-
<b>02 13</b>	<b>KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>	<b>224.967.912,00</b>	<b>6.126.648.662,00</b>	<b>791.535.000,00</b>	<b>7.143.151.574,00</b>	<b>8.635.456.025,00</b>	<b>1.338.823.775,00</b>	-	-	-
02 13 02 13 01	Dinas Pemuda dan Olahraga	224.967.912,00	6.126.648.662,00	791.535.000,00	7.143.151.574,00	8.635.456.025,00	1.338.823.775,00	-	-	-
<b>02 14</b>	<b>STATISTIK</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>241.681.000,00</b>	-	<b>259.681.000,00</b>	<b>259.681.000,00</b>	-	-	-	-
02 14 02 10 01	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	18.000.000,00	241.681.000,00	-	259.681.000,00	259.681.000,00	-	-	-	-
<b>02 15</b>	<b>PERSANDIAN</b>	<b>12.375.000,00</b>	<b>653.484.000,00</b>	<b>975.270.000,00</b>	<b>1.641.129.000,00</b>	<b>1.641.129.000,00</b>	-	-	-	-
02 15 02 10 01	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	12.375.000,00	653.484.000,00	975.270.000,00	1.641.129.000,00	1.641.129.000,00	-	-	-	-
<b>02 16</b>	<b>KEBUDAYAAN</b>	<b>115.144.600,00</b>	<b>3.394.242.901,00</b>	<b>924.431.899,00</b>	<b>4.433.819.400,00</b>	<b>6.101.348.160,00</b>	<b>1.451.533.329,00</b>	-	-	-
02 16 02 16 01	Dinas Kebudayaan	115.144.600,00	3.394.242.901,00	924.431.899,00	4.433.819.400,00	6.101.348.160,00	1.451.533.329,00	-	-	-
<b>02 17</b>	<b>PERPUSTAKAAN</b>	-	<b>2.859.460.949,00</b>	<b>1.104.028.430,00</b>	<b>3.963.489.379,00</b>	<b>3.963.489.379,00</b>	-	-	-	-
02 17 02 18 01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	2.859.460.949,00	1.104.028.430,00	3.963.489.379,00	3.963.489.379,00	-	-	-	-
<b>02 18</b>	<b>KEARSIPAN</b>	<b>31.591.760,00</b>	<b>2.915.716.436,00</b>	<b>849.351.055,00</b>	<b>3.796.659.251,00</b>	<b>7.132.851.766,00</b>	<b>3.217.862.927,00</b>	-	-	-
02 18 02 18 01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	31.591.760,00	2.915.716.436,00	849.351.055,00	3.796.659.251,00	7.132.851.766,00	3.217.862.927,00	-	-	-
<b>02 19</b>	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI</b>	<b>876.083.956,00</b>	<b>1.970.704.544,00</b>	<b>79.977.500,00</b>	<b>2.926.766.000,00</b>	<b>3.664.934.178,00</b>	<b>675.399.126,00</b>	-	-	-
02 19 02 19 01	Kantor Kesatuan Bangsa	876.083.956,00	1.970.704.544,00	79.977.500,00	2.926.766.000,00	3.664.934.178,00	675.399.126,00	-	-	-

KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	BELANJA								
		Realisasi Belanja Tidak Langsung (Rp)		Realisasi Belanja Langsung (Rp)				Jumlah Realisasi Belanja (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%
		Belanja Tidak Terduga	Jumlah Realisasi Belanja Tidak Langsung (Rp)	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	Jumlah Realisasi Belanja Langsung (Rp)			
1	2	22	23 = 18+19+20+21+22	24	25	26	27 = 24+25+26	28 = 23+27	29 = 28-17	30
02 08	<b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	-	1.148.137.814,00	1.109.218.638,00	5.470.645.098,00	571.653.300,00	7.151.517.036,00	8.299.654.850,00	(518.366.139,00)	94,12
02 08 02 08 01	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	1.148.137.814,00	1.109.218.638,00	5.470.645.098,00	571.653.300,00	7.151.517.036,00	8.299.654.850,00	(518.366.139,00)	94,12
02 09	<b>PERHUBUNGAN</b>	-	4.039.506.024,00	502.367.690,32	11.445.812.502,64	3.851.829.124,93	15.800.009.317,89	19.839.515.341,89	(1.606.248.198,11)	92,51
02 09 02 09 01	Dinas Perhubungan	-	4.039.506.024,00	502.367.690,32	11.445.812.502,64	3.851.829.124,93	15.800.009.317,89	19.839.515.341,89	(1.606.248.198,11)	92,51
02 10	<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	-	2.969.096.503,00	146.470.052,00	11.133.310.696,00	8.026.052.216,00	19.305.832.964,00	22.274.929.467,00	(1.299.738.882,00)	94,49
02 10 02 10 01	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	-	2.969.096.503,00	146.470.052,00	11.133.310.696,00	8.026.052.216,00	19.305.832.964,00	22.274.929.467,00	(1.299.738.882,00)	94,49
02 11	<b>KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>	-	3.272.777.137,00	184.160.802,88	7.076.158.224,00	365.346.800,00	7.625.665.826,88	10.898.442.963,88	(651.146.110,12)	94,36
02 11 02 11 01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	3.272.777.137,00	184.160.802,88	7.076.158.224,00	365.346.800,00	7.625.665.826,88	10.898.442.963,88	(651.146.110,12)	94,36
02 12	<b>PENANAMAN MODAL</b>	-	3.053.773.661,00	398.419.117,44	2.922.145.605,68	470.380.000,00	3.790.944.723,12	6.844.718.384,12	(487.102.555,88)	93,36
02 12 02 12 01	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	-	3.053.773.661,00	398.419.117,44	2.922.145.605,68	470.380.000,00	3.790.944.723,12	6.844.718.384,12	(487.102.555,88)	93,36
02 13	<b>KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>	-	1.338.823.775,00	214.763.446,00	5.873.489.893,00	750.897.000,00	6.839.150.339,00	8.177.974.114,00	(457.481.911,00)	94,70
02 13 02 13 01	Dinas Pemuda dan Olahraga	-	1.338.823.775,00	214.763.446,00	5.873.489.893,00	750.897.000,00	6.839.150.339,00	8.177.974.114,00	(457.481.911,00)	94,70
02 14	<b>STATISTIK</b>	-	-	13.000.000,00	232.943.200,00	-	245.943.200,00	245.943.200,00	(13.737.800,00)	94,71
02 14 02 10 01	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	-	-	13.000.000,00	232.943.200,00	-	245.943.200,00	245.943.200,00	(13.737.800,00)	94,71
02 15	<b>PERSANDIAN</b>	-	-	10.725.000,00	638.187.733,00	946.312.242,00	1.595.224.975,00	1.595.224.975,00	(45.904.025,00)	97,20
02 15 02 10 01	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	-	-	10.725.000,00	638.187.733,00	946.312.242,00	1.595.224.975,00	1.595.224.975,00	(45.904.025,00)	97,20
02 16	<b>KEBUDAYAAN</b>	-	1.451.533.329,00	107.333.954,00	3.128.919.446,00	920.055.800,00	4.156.309.200,00	5.607.842.529,00	(493.505.631,00)	91,91
02 16 02 16 01	Dinas Kebudayaan	-	1.451.533.329,00	107.333.954,00	3.128.919.446,00	920.055.800,00	4.156.309.200,00	5.607.842.529,00	(493.505.631,00)	91,91
02 17	<b>PERPUSTAKAAN</b>	-	-	-	2.843.381.181,08	1.103.643.255,00	3.947.024.436,08	3.947.024.436,08	(16.464.942,92)	99,58
02 17 02 18 01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	-	2.843.381.181,08	1.103.643.255,00	3.947.024.436,08	3.947.024.436,08	(16.464.942,92)	99,58
02 18	<b>KEARSIPAN</b>	-	3.217.862.927,00	30.123.492,00	2.811.623.519,97	837.803.135,00	3.679.550.146,97	6.897.413.073,97	(235.438.692,03)	96,70
02 18 02 18 01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	3.217.862.927,00	30.123.492,00	2.811.623.519,97	837.803.135,00	3.679.550.146,97	6.897.413.073,97	(235.438.692,03)	96,70
02 19	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI</b>	-	675.399.126,00	838.583.956,00	1.840.855.157,00	77.252.160,00	2.756.691.273,00	3.432.090.399,00	(232.843.779,00)	93,65
02 19 02 19 01	Kantor Kesatuan Bangsa	-	675.399.126,00	838.583.956,00	1.840.855.157,00	77.252.160,00	2.756.691.273,00	3.432.090.399,00	(232.843.779,00)	93,65

KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN				BELANJA					
		Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%	Anggaran Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan (Rp)					
						Belanja Pegawai	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa, Partai Politik	Belanja Tidak Terduga	Jumlah Anggaran Belanja Tidak Langsung (Rp)
1	2	3	4	5 = 4-3	6	7	8	9	10	11	12 = 7+8+9+10+11
<b>03</b>	<b>URUSAN PILIHAN</b>	<b>37.690.330.096,00</b>	<b>38.897.789.729,30</b>	<b>1.207.459.633,30</b>	<b>103,20</b>	<b>14.088.011.263,00</b>	-	-	-	-	<b>14.088.011.263,00</b>
<b>03 01</b>	<b>PERTANIAN</b>	<b>448.851.000,00</b>	<b>476.075.700,00</b>	<b>27.224.700,00</b>	<b>106,07</b>	<b>4.061.367.754,00</b>	-	-	-	-	<b>4.061.367.754,00</b>
03 01 03 01 01	Dinas Pertanian dan Pangan	448.851.000,00	476.075.700,00	27.224.700,00	106,07	4.061.367.754,00	-	-	-	-	4.061.367.754,00
<b>03 02</b>	<b>PARIWISATA</b>	<b>15.864.520.200,00</b>	<b>15.812.548.000,10</b>	<b>(51.972.199,90)</b>	<b>99,67</b>	<b>2.326.470.850,00</b>	-	-	-	-	<b>2.326.470.850,00</b>
03 02 03 02 01	Dinas Pariwisata	15.864.520.200,00	15.812.548.000,10	(51.972.199,90)	99,67	2.326.470.850,00	-	-	-	-	2.326.470.850,00
<b>03 03</b>	<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 03 03 01 01	Dinas Pertanian dan Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>03 04</b>	<b>PERDAGANGAN</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 04 03 05 01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>03 05</b>	<b>PERINDUSTRIAN</b>	<b>21.376.958.896,00</b>	<b>22.609.166.029,20</b>	<b>1.232.207.133,20</b>	<b>105,76</b>	<b>7.700.172.659,00</b>	-	-	-	-	<b>7.700.172.659,00</b>
03 05 03 05 01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	21.376.958.896,00	22.609.166.029,20	1.232.207.133,20	105,76	7.700.172.659,00	-	-	-	-	7.700.172.659,00
<b>03 06</b>	<b>TRANSMIGRASI</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 06 02 11 01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>04</b>	<b>URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>1.581.857.187.293,00</b>	<b>1.590.695.960.099,66</b>	<b>8.838.772.806,66</b>	<b>100,56</b>	<b>234.900.992.996,00</b>	<b>85.740.983.138,00</b>	<b>12.526.580.000,00</b>	<b>2.002.804.587,00</b>	<b>8.227.812.190,52</b>	<b>343.399.172.911,52</b>
<b>04 01</b>	<b>PERENCANAAN</b>	-	-	-	-	<b>3.023.686.101,00</b>	-	-	-	-	<b>3.023.686.101,00</b>
04 01 04 01 01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	3.023.686.101,00	-	-	-	-	3.023.686.101,00
<b>04 02</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 02 04 01 01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>04 03</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	-	-	-	-	<b>10.878.114.961,00</b>	-	-	-	-	<b>10.878.114.961,00</b>
04 03 04 03 01	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 03 04 03 01A	Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	-	948.350.383,00	-	-	-	-	948.350.383,00
04 03 04 03 01B	Bagian Hukum	-	-	-	-	918.057.008,00	-	-	-	-	918.057.008,00
04 03 04 03 01C	Bagian Protokol	-	-	-	-	3.557.559.739,00	-	-	-	-	3.557.559.739,00
04 03 04 03 01D	Bagian Umum	-	-	-	-	1.089.690.513,00	-	-	-	-	1.089.690.513,00
04 03 04 03 01E	Bagian Perekonomian, Pengembangan PAD dan Kerjasama	-	-	-	-	1.060.356.507,00	-	-	-	-	1.060.356.507,00
04 03 04 03 01F	Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan	-	-	-	-	655.238.675,00	-	-	-	-	655.238.675,00
04 03 04 03 01G	Bagian Organisasi	-	-	-	-	1.195.013.993,00	-	-	-	-	1.195.013.993,00
04 03 04 03 01H	Bagian Layanan Pengadaan	-	-	-	-	1.453.848.143,00	-	-	-	-	1.453.848.143,00



KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	BELANJA								
		Anggaran Belanja Langsung Setelah Perubahan (Rp)				Jumlah Anggaran Belanja Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Belanja Tidak Langsung (Rp)			
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	Jumlah Anggaran Belanja Langsung (Rp)		Belanja Pegawai	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa, Partai Politik
1	2	13	14	15	16 = 13+14+15	17 = 12+16	18	19	20	21
<b>03</b>	<b>URUSAN PILIHAN</b>	<b>8.297.185.402,00</b>	<b>62.264.867.788,00</b>	<b>11.362.926.610,00</b>	<b>81.924.979.800,00</b>	<b>96.012.991.063,00</b>	<b>13.237.635.981,00</b>	-	-	-
<b>03 01</b>	<b>PERTANIAN</b>	<b>284.039.560,00</b>	<b>3.155.935.808,00</b>	<b>2.600.902.632,00</b>	<b>6.040.878.000,00</b>	<b>10.102.245.754,00</b>	<b>3.645.775.624,00</b>	-	-	-
03 01 03 01 01	Dinas Pertanian dan Pangan	284.039.560,00	3.155.935.808,00	2.600.902.632,00	6.040.878.000,00	10.102.245.754,00	3.645.775.624,00	-	-	-
<b>03 02</b>	<b>PARIWISATA</b>	<b>5.061.509.292,00</b>	<b>25.584.960.708,00</b>	<b>4.119.757.600,00</b>	<b>34.766.227.600,00</b>	<b>37.092.698.450,00</b>	<b>2.255.898.590,00</b>	-	-	-
03 02 03 02 01	Dinas Pariwisata	5.061.509.292,00	25.584.960.708,00	4.119.757.600,00	34.766.227.600,00	37.092.698.450,00	2.255.898.590,00	-	-	-
<b>03 03</b>	<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	-	<b>2.617.559.255,00</b>	<b>279.090.745,00</b>	<b>2.896.650.000,00</b>	<b>2.896.650.000,00</b>	-	-	-	-
03 03 03 01 01	Dinas Pertanian dan Pangan	-	2.617.559.255,00	279.090.745,00	2.896.650.000,00	2.896.650.000,00	-	-	-	-
<b>03 04</b>	<b>PERDAGANGAN</b>	<b>1.061.516.230,00</b>	<b>21.554.321.337,00</b>	<b>3.802.140.633,00</b>	<b>26.417.978.200,00</b>	<b>26.417.978.200,00</b>	-	-	-	-
03 04 03 05 01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.061.516.230,00	21.554.321.337,00	3.802.140.633,00	26.417.978.200,00	26.417.978.200,00	-	-	-	-
<b>03 05</b>	<b>PERINDUSTRIAN</b>	<b>1.890.120.320,00</b>	<b>9.139.145.680,00</b>	<b>561.035.000,00</b>	<b>11.590.301.000,00</b>	<b>19.290.473.659,00</b>	<b>7.335.961.767,00</b>	-	-	-
03 05 03 05 01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.890.120.320,00	9.139.145.680,00	561.035.000,00	11.590.301.000,00	19.290.473.659,00	7.335.961.767,00	-	-	-
<b>03 06</b>	<b>TRANSMIGRASI</b>	-	<b>212.945.000,00</b>	-	<b>212.945.000,00</b>	<b>212.945.000,00</b>	-	-	-	-
03 06 02 11 01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	212.945.000,00	-	212.945.000,00	212.945.000,00	-	-	-	-
<b>04</b>	<b>URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>4.078.588.607,00</b>	<b>79.876.463.797,00</b>	<b>21.905.293.393,00</b>	<b>105.860.345.797,00</b>	<b>449.259.518.708,52</b>	<b>220.353.354.513,00</b>	<b>79.389.047.945,00</b>	<b>11.551.423.000,00</b>	<b>1.981.246.996,00</b>
<b>04 01</b>	<b>PERENCANAAN</b>	<b>130.295.840,00</b>	<b>3.188.850.540,00</b>	<b>1.179.192.620,00</b>	<b>4.498.339.000,00</b>	<b>7.522.025.101,00</b>	<b>2.921.511.525,00</b>	-	-	-
04 01 04 01 01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	130.295.840,00	3.188.850.540,00	1.179.192.620,00	4.498.339.000,00	7.522.025.101,00	2.921.511.525,00	-	-	-
<b>04 02</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	<b>520.350.000,00</b>	<b>725.078.000,00</b>	<b>615.000.000,00</b>	<b>1.860.428.000,00</b>	<b>1.860.428.000,00</b>	-	-	-	-
04 02 04 01 01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	520.350.000,00	725.078.000,00	615.000.000,00	1.860.428.000,00	1.860.428.000,00	-	-	-	-
<b>04 03</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	<b>1.621.018.156,00</b>	<b>14.509.291.498,00</b>	<b>7.389.579.346,00</b>	<b>23.519.889.000,00</b>	<b>34.398.003.961,00</b>	<b>10.121.345.981,00</b>	-	-	-
04 03 04 03 01	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 03 04 03 01A	Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	80.634.000,00	1.988.941.000,00	658.280.000,00	2.727.855.000,00	3.676.205.383,00	885.996.857,00	-	-	-
04 03 04 03 01B	Bagian Hukum	554.772.450,00	1.307.630.550,00	580.400.000,00	2.442.803.000,00	3.360.860.008,00	845.595.281,00	-	-	-
04 03 04 03 01C	Bagian Protokol	222.039.800,00	4.194.944.200,00	898.770.000,00	5.315.754.000,00	8.873.313.739,00	3.306.775.065,00	-	-	-
04 03 04 03 01D	Bagian Umum	136.106.664,00	3.080.850.040,00	3.143.837.296,00	6.360.794.000,00	7.450.484.513,00	1.020.792.318,00	-	-	-
04 03 04 03 01E	Bagian Perekonomian, Pengembangan PAD dan Kerjasama	88.743.750,00	767.853.400,00	782.247.850,00	1.638.845.000,00	2.699.201.507,00	952.103.538,00	-	-	-
04 03 04 03 01F	Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan	19.450.000,00	694.680.800,00	365.224.200,00	1.079.355.000,00	1.734.593.675,00	595.403.161,00	-	-	-
04 03 04 03 01G	Bagian Organisasi	351.856.448,00	1.309.815.552,00	580.330.000,00	2.242.002.000,00	3.437.015.993,00	1.117.510.476,00	-	-	-
04 03 04 03 01H	Bagian Layanan Pengadaan	167.415.044,00	1.164.575.956,00	380.490.000,00	1.712.481.000,00	3.166.329.143,00	1.397.169.285,00	-	-	-

KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	BELANJA								
		Realisasi Belanja Tidak Langsung (Rp)		Realisasi Belanja Langsung (Rp)				Jumlah Realisasi Belanja (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%
		Belanja Tidak Terduga	Jumlah Realisasi Belanja Tidak Langsung (Rp)	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	Jumlah Realisasi Belanja Langsung (Rp)			
1	2	22	23 = 18+19+20+21+22	24	25	26	27 = 24+25+26	28 = 23+27	29 = 28-17	30
<b>03</b>	<b>URUSAN PILIHAN</b>	-	<b>13.237.635.981,00</b>	<b>6.950.097.248,84</b>	<b>56.482.656.191,22</b>	<b>10.649.909.246,95</b>	<b>74.082.662.687,01</b>	<b>87.320.298.668,01</b>	<b>(8.692.692.394,99)</b>	90,95
<b>03 01</b>	<b>PERTANIAN</b>	-	<b>3.645.775.624,00</b>	<b>283.964.546,60</b>	<b>2.996.849.913,72</b>	<b>2.515.760.568,00</b>	<b>5.796.575.028,32</b>	<b>9.442.350.652,32</b>	<b>(659.895.101,68)</b>	<b>93,47</b>
03 01 03 01 01	Dinas Pertanian dan Pangan	-	3.645.775.624,00	283.964.546,60	2.996.849.913,72	2.515.760.568,00	5.796.575.028,32	9.442.350.652,32	(659.895.101,68)	93,47
<b>03 02</b>	<b>PARIWISATA</b>	-	<b>2.255.898.590,00</b>	<b>4.082.144.485,16</b>	<b>22.488.905.699,38</b>	<b>3.663.539.740,00</b>	<b>30.234.589.924,54</b>	<b>32.490.488.514,54</b>	<b>(4.602.209.935,46)</b>	<b>87,59</b>
03 02 03 02 01	Dinas Pariwisata	-	2.255.898.590,00	4.082.144.485,16	22.488.905.699,38	3.663.539.740,00	30.234.589.924,54	32.490.488.514,54	(4.602.209.935,46)	87,59
<b>03 03</b>	<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	-	-	-	<b>2.449.176.309,72</b>	<b>277.492.745,00</b>	<b>2.726.669.054,72</b>	<b>2.726.669.054,72</b>	<b>(169.980.945,28)</b>	<b>94,13</b>
03 03 03 01 01	Dinas Pertanian dan Pangan	-	-	-	2.449.176.309,72	277.492.745,00	2.726.669.054,72	2.726.669.054,72	(169.980.945,28)	94,13
<b>03 04</b>	<b>PERDAGANGAN</b>	-	-	<b>711.443.779,00</b>	<b>20.107.991.488,00</b>	<b>3.641.318.255,95</b>	<b>24.460.753.522,95</b>	<b>24.460.753.522,95</b>	<b>(1.957.224.677,05)</b>	<b>92,59</b>
03 04 03 05 01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	711.443.779,00	20.107.991.488,00	3.641.318.255,95	24.460.753.522,95	24.460.753.522,95	(1.957.224.677,05)	92,59
<b>03 05</b>	<b>PERINDUSTRIAN</b>	-	<b>7.335.961.767,00</b>	<b>1.872.544.438,08</b>	<b>8.226.805.999,40</b>	<b>551.797.938,00</b>	<b>10.651.148.375,48</b>	<b>17.987.110.142,48</b>	<b>(1.303.363.516,52)</b>	<b>93,24</b>
03 05 03 05 01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	7.335.961.767,00	1.872.544.438,08	8.226.805.999,40	551.797.938,00	10.651.148.375,48	17.987.110.142,48	(1.303.363.516,52)	93,24
<b>03 06</b>	<b>TRANSMIGRASI</b>	-	-	-	<b>212.926.781,00</b>	-	<b>212.926.781,00</b>	<b>212.926.781,00</b>	<b>(18.219,00)</b>	<b>99,99</b>
03 06 02 11 01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	-	212.926.781,00	-	212.926.781,00	212.926.781,00	(18.219,00)	99,99
<b>04</b>	<b>URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>317.693.064,00</b>	<b>313.592.765.518,00</b>	<b>3.815.643.384,96</b>	<b>59.593.918.966,62</b>	<b>21.067.233.384,15</b>	<b>84.476.795.735,73</b>	<b>398.069.561.253,73</b>	<b>(51.189.957.454,79)</b>	<b>88,61</b>
<b>04 01</b>	<b>PERENCANAAN</b>	-	<b>2.921.511.525,00</b>	<b>128.495.840,00</b>	<b>3.037.146.453,00</b>	<b>1.144.555.400,00</b>	<b>4.310.197.693,00</b>	<b>7.231.709.218,00</b>	<b>(290.315.883,00)</b>	<b>96,14</b>
04 01 04 01 01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	2.921.511.525,00	128.495.840,00	3.037.146.453,00	1.144.555.400,00	4.310.197.693,00	7.231.709.218,00	(290.315.883,00)	96,14
<b>04 02</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	-	-	<b>519.275.000,00</b>	<b>638.951.475,00</b>	<b>615.000.000,00</b>	<b>1.773.226.475,00</b>	<b>1.773.226.475,00</b>	<b>(87.201.525,00)</b>	<b>95,31</b>
04 02 04 01 01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	519.275.000,00	638.951.475,00	615.000.000,00	1.773.226.475,00	1.773.226.475,00	(87.201.525,00)	95,31
<b>04 03</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	-	<b>10.121.345.981,00</b>	<b>1.565.263.280,32</b>	<b>13.233.665.243,30</b>	<b>7.052.542.697,75</b>	<b>21.851.471.221,37</b>	<b>31.972.817.202,37</b>	<b>(2.425.186.758,63)</b>	<b>92,95</b>
04 03 04 03 01	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 03 04 03 01A	Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	-	885.996.857,00	75.483.950,72	1.751.041.630,16	635.403.560,00	2.461.929.140,88	3.347.925.997,88	(328.279.385,12)	91,07
04 03 04 03 01B	Bagian Hukum	-	845.595.281,00	525.772.318,72	1.191.210.911,16	570.180.221,00	2.287.163.450,88	3.132.758.731,88	(228.101.276,12)	93,21
04 03 04 03 01C	Bagian Protokol	-	3.306.775.065,00	210.065.477,44	3.897.422.517,08	835.831.086,75	4.943.319.081,27	8.250.094.146,27	(623.219.592,73)	92,98
04 03 04 03 01D	Bagian Umum	-	1.020.792.318,00	136.104.444,00	2.751.303.859,36	2.935.273.400,00	5.822.681.703,36	6.843.474.021,36	(607.010.491,64)	91,85
04 03 04 03 01E	Bagian Perekonomian, Pengembangan PAD dan Kerjasama	-	952.103.538,00	88.011.474,72	742.621.820,00	763.524.455,00	1.594.157.749,72	2.546.261.287,72	(152.940.219,28)	94,33
04 03 04 03 01F	Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan	-	595.403.161,00	19.450.000,00	629.648.922,16	362.736.355,00	1.011.835.277,16	1.607.238.438,16	(127.355.236,84)	92,66
04 03 04 03 01G	Bagian Organisasi	-	1.117.510.476,00	346.147.318,72	1.217.637.904,00	574.789.000,00	2.138.574.222,72	3.256.084.698,72	(180.931.294,28)	94,74
04 03 04 03 01H	Bagian Layanan Pengadaan	-	1.397.169.285,00	164.228.296,00	1.052.777.679,38	374.804.620,00	1.591.810.595,38	2.988.979.880,38	(177.349.262,62)	94,40

KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN				BELANJA					
		Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%	Anggaran Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan (Rp)					
						Belanja Pegawai	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa, Partai Politik	Belanja Tidak Terduga	Jumlah Anggaran Belanja Tidak Langsung (Rp)
1	2	3	4	5 = 4-3	6	7	8	9	10	11	12 = 7+8+9+10+11
<b>04 04</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	-	-	-		<b>22.745.882.926,00</b>	-	-	-	-	<b>22.745.882.926,00</b>
04 04 04 04 01	Sekretariat DPRD	-	-	-		22.745.882.926,00	-	-	-	-	22.745.882.926,00
<b>04 05</b>	<b>INSPEKTORAT</b>	-	-	-		<b>3.726.299.708,00</b>	-	-	-	-	<b>3.726.299.708,00</b>
04 05 04 05 01	Inspektorat Daerah	-	-	-		3.726.299.708,00	-	-	-	-	3.726.299.708,00
<b>04 06</b>	<b>KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>	-	-	-		<b>167.611.407.093,00</b>	-	-	-	-	<b>167.611.407.093,00</b>
04 06 04 06 01	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-		167.611.407.093,00	-	-	-	-	167.611.407.093,00
<b>04 07</b>	<b>KEUANGAN</b>	<b>1.581.857.187.293,00</b>	<b>1.590.695.960.099,66</b>	<b>8.838.772.806,66</b>	<b>100,56</b>	<b>26.915.602.207,00</b>	<b>85.740.983.138,00</b>	<b>12.526.580.000,00</b>	<b>2.002.804.587,00</b>	<b>8.227.812.190,52</b>	<b>135.413.782.122,52</b>
04 07 04 07 01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	480.100.637.536,00	513.985.267.116,66	33.884.629.580,66	107,06	26.915.602.207,00	-	-	-	-	26.915.602.207,00
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD)	1.101.756.549.757,00	1.076.710.692.983,00	(25.045.856.774,00)	97,73	-	85.740.983.138,00	12.526.580.000,00	2.002.804.587,00	8.227.812.190,52	108.498.179.915,52
	<b>JUMLAH :</b>	<b>1.754.768.489.387,00</b>	<b>1.765.760.418.492,27</b>	<b>10.991.929.105,27</b>	<b>100,63</b>	<b>667.465.772.253,00</b>	<b>85.740.983.138,00</b>	<b>12.526.580.000,00</b>	<b>2.002.804.587,00</b>	<b>8.227.812.190,52</b>	<b>775.963.952.168,52</b>

KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	BELANJA								
		Anggaran Belanja Langsung Setelah Perubahan (Rp)				Jumlah Anggaran Belanja Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Belanja Tidak Langsung (Rp)			
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	Jumlah Anggaran Belanja Langsung (Rp)		Belanja Pegawai	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa, Partai Politik
1	2	13	14	15	16 = 13+14+15	17 = 12+16	18	19	20	21
04 04	SEKRETARIAT DPRD	176.003.704,00	36.602.832.596,00	505.280.000,00	37.284.116.300,00	60.029.999.226,00	22.013.597.359,00	-	-	-
04 04 04 04 01	Sekretariat DPRD	176.003.704,00	36.602.832.596,00	505.280.000,00	37.284.116.300,00	60.029.999.226,00	22.013.597.359,00	-	-	-
04 05	INSPEKTORAT	161.233.956,00	1.589.458.541,00	360.665.000,00	2.111.357.497,00	5.837.657.205,00	3.589.659.462,00	-	-	-
04 05 04 05 01	Inspektorat Daerah	161.233.956,00	1.589.458.541,00	360.665.000,00	2.111.357.497,00	5.837.657.205,00	3.589.659.462,00	-	-	-
04 06	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	754.670.564,00	10.052.536.834,00	447.314.602,00	11.254.522.000,00	178.865.929.093,00	156.565.277.956,00	-	-	-
04 06 04 06 01	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	754.670.564,00	10.052.536.834,00	447.314.602,00	11.254.522.000,00	178.865.929.093,00	156.565.277.956,00	-	-	-
04 07	KEUANGAN	715.016.387,00	13.208.415.788,00	11.408.261.825,00	25.331.694.000,00	160.745.476.122,52	25.141.962.230,00	79.389.047.945,00	11.551.423.000,00	1.981.246.996,00
04 07 04 07 01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD)	715.016.387,00	13.208.415.788,00	11.408.261.825,00	25.331.694.000,00	108.498.179.915,52	25.141.962.230,00	79.389.047.945,00	11.551.423.000,00	1.981.246.996,00
	JUMLAH :	163.392.184.600,00	617.496.329.981,00	387.087.690.397,00	1.167.976.204.978,00	1.943.940.157.146,52	623.730.246.194,00	79.389.047.945,00	11.551.423.000,00	1.981.246.996,00

KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	BELANJA								
		Realisasi Belanja Tidak Langsung (Rp)		Realisasi Belanja Langsung (Rp)				Jumlah Realisasi Belanja (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%
		Belanja Tidak Terduga	Jumlah Realisasi Belanja Tidak Langsung (Rp)	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	Jumlah Realisasi Belanja Langsung (Rp)			
1	2	22	23 = 18+19+20+21+22	24	25	26	27 = 24+25+26	28 = 23+27	29 = 28-17	30
04 04	SEKRETARIAT DPRD	-	22.013.597.359,00	163.303.704,00	20.693.393.721,67	458.879.575,00	21.315.577.000,67	43.329.174.359,67	(16.700.824.866,33)	72,18
04 04 04 04 01	Sekretariat DPRD	-	22.013.597.359,00	163.303.704,00	20.693.393.721,67	458.879.575,00	21.315.577.000,67	43.329.174.359,67	(16.700.824.866,33)	72,18
04 05	INSPEKTORAT	-	3.589.659.462,00	159.083.950,72	1.483.015.414,06	315.550.659,00	1.957.650.023,78	5.547.309.485,78	(290.347.719,22)	95,03
04 05 04 05 01	Inspektorat Daerah	-	3.589.659.462,00	159.083.950,72	1.483.015.414,06	315.550.659,00	1.957.650.023,78	5.547.309.485,78	(290.347.719,22)	95,03
04 06	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	-	156.565.277.956,00	582.165.223,04	8.530.515.149,00	440.651.750,00	9.553.332.122,04	166.118.610.078,04	(12.747.319.014,96)	92,87
04 06 04 06 01	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	-	156.565.277.956,00	582.165.223,04	8.530.515.149,00	440.651.750,00	9.553.332.122,04	166.118.610.078,04	(12.747.319.014,96)	92,87
04 07	KEUANGAN	317.693.064,00	118.381.373.235,00	698.056.386,88	11.977.231.510,59	11.040.053.302,40	23.715.341.199,87	142.096.714.434,87	(18.648.761.687,65)	88,40
04 07 04 07 01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	25.141.962.230,00	698.056.386,88	11.977.231.510,59	11.040.053.302,40	23.715.341.199,87	48.857.303.429,87	(3.389.992.777,13)	93,51
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD)	317.693.064,00	93.239.411.005,00	-	-	-	-	93.239.411.005,00	(15.258.768.910,52)	
	<b>JUMLAH :</b>	<b>317.693.064,00</b>	<b>716.969.657.199,00</b>	<b>136.801.816.234,28</b>	<b>553.387.490.228,89</b>	<b>327.434.372.199,17</b>	<b>1.017.623.678.662,34</b>	<b>1.734.593.335.861,34</b>	<b>(209.346.821.285,18)</b>	<b>89,23</b>

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,  
 ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN  
 TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR  
 MACAM URUSAN : 01.01 - PENDIDIKAN  
 ORGANISASI : 01.01.01 - DINAS PENDIDIKAN

Halaman 1

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
01.01 01.01.01 00 00 4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	-	-	-	
01.01 01.01.01 00 00 5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>414.722.524.373,00</b>	<b>375.686.835.468,11</b>	<b>(39.035.688.904,89)</b>	
01.01 01.01.01 00 00 5 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>253.940.310.172,00</b>	<b>231.916.216.935,00</b>	<b>(22.024.093.237,00)</b>	
01.01 01.01.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	253.940.310.172,00	231.916.216.935,00	(22.024.093.237,00)	
01.01 01.01.01 00 00 5 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>160.782.214.201,00</b>	<b>143.770.618.533,11</b>	<b>(17.011.595.667,89)</b>	
01.01 01.01.01 001	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>18.183.669.130,00</b>	<b>17.783.538.288,20</b>	<b>(400.130.841,80)</b>	
01.01 01.01.01 001 018	<b>Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi</b>	<b>1.055.678.000,00</b>	<b>1.046.812.000,00</b>	<b>(8.866.000,00)</b>	
01.01 01.01.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.01 01.01.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.055.678.000,00	1.046.812.000,00	(8.866.000,00)	
01.01 01.01.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
01.01 01.01.01 001 019	<b>Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>17.127.991.130,00</b>	<b>16.736.726.288,20</b>	<b>(391.264.841,80)</b>	
01.01 01.01.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	14.552.245.326,00	14.210.525.970,00	(341.719.356,00)	
01.01 01.01.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.405.160.304,00	1.367.255.668,20	(37.904.635,80)	
01.01 01.01.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	1.170.585.500,00	1.158.944.650,00	(11.640.850,00)	
01.01 01.01.01 002	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>1.192.274.000,00</b>	<b>1.129.934.130,00</b>	<b>(62.339.870,00)</b>	
01.01 01.01.01 002 022	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor</b>	<b>958.429.000,00</b>	<b>942.563.450,00</b>	<b>(15.865.550,00)</b>	
01.01 01.01.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.01 01.01.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	438.000.000,00	432.145.920,00	(5.854.080,00)	
01.01 01.01.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	520.429.000,00	510.417.530,00	(10.011.470,00)	
01.01 01.01.01 002 024	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional</b>	<b>233.845.000,00</b>	<b>187.370.680,00</b>	<b>(46.474.320,00)</b>	
01.01 01.01.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.01 01.01.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	233.845.000,00	187.370.680,00	(46.474.320,00)	
01.01 01.01.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
01.01 01.01.01 006	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>90.124.000,00</b>	<b>90.124.000,00</b>	-	
01.01 01.01.01 006 005	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD</b>	<b>90.124.000,00</b>	<b>90.124.000,00</b>	-	
01.01 01.01.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.01 01.01.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	90.124.000,00	90.124.000,00	-	
01.01 01.01.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
01.01 01.01.01 010	<b>Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>29.921.341.800,00</b>	<b>25.580.874.339,00</b>	<b>(4.340.467.461,00)</b>	
01.01 01.01.01 010 001	<b>Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SD</b>	<b>1.099.628.000,00</b>	<b>1.066.550.418,00</b>	<b>(33.077.582,00)</b>	
01.01 01.01.01 010 001 5 2 1	Belanja Pegawai	11.160.000,00	11.160.000,00	-	
01.01 01.01.01 010 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.088.468.000,00	1.055.390.418,00	(33.077.582,00)	
01.01 01.01.01 010 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
01.01 01.01.01 010 002	<b>Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD</b>	<b>26.750.437.800,00</b>	<b>22.486.050.921,00</b>	<b>(4.264.386.879,00)</b>	
01.01 01.01.01 010 002 5 2 1	Belanja Pegawai	2.386.732.345,00	982.297.100,00	(1.404.435.245,00)	
01.01 01.01.01 010 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	15.949.425.562,00	13.845.053.829,00	(2.104.371.733,00)	
01.01 01.01.01 010 002 5 2 3	Belanja Modal	8.414.279.893,00	7.658.699.992,00	(755.579.901,00)	
01.01 01.01.01 010 003	<b>Pengelolaan Prestasi Siswa SD</b>	<b>2.071.276.000,00</b>	<b>2.028.273.000,00</b>	<b>(43.003.000,00)</b>	
01.01 01.01.01 010 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.01 01.01.01 010 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2.064.431.000,00	2.028.273.000,00	(36.158.000,00)	
01.01 01.01.01 010 003 5 2 3	Belanja Modal	6.845.000,00	-	(6.845.000,00)	
01.01 01.01.01 011	<b>Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>20.939.985.900,00</b>	<b>15.846.298.447,91</b>	<b>(5.093.687.452,09)</b>	
01.01 01.01.01 011 001	<b>Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SMP</b>	<b>1.659.111.000,00</b>	<b>1.652.629.000,00</b>	<b>(6.482.000,00)</b>	
01.01 01.01.01 011 001 5 2 1	Belanja Pegawai	178.775.000,00	178.775.000,00	-	
01.01 01.01.01 011 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.480.336.000,00	1.473.854.000,00	(6.482.000,00)	
01.01 01.01.01 011 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
01.01 01.01.01 011 002	<b>Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP</b>	<b>17.903.923.000,00</b>	<b>12.979.682.347,91</b>	<b>(4.924.240.652,09)</b>	
01.01 01.01.01 011 002 5 2 1	Belanja Pegawai	1.393.435.750,00	702.838.200,00	(690.597.550,00)	
01.01 01.01.01 011 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	11.394.627.550,00	9.188.861.848,00	(2.205.765.702,00)	
01.01 01.01.01 011 002 5 2 3	Belanja Modal	5.115.859.700,00	3.087.982.299,91	(2.027.877.400,09)	
01.01 01.01.01 011 003	<b>Pengelolaan Prestasi Siswa SMP</b>	<b>1.376.951.900,00</b>	<b>1.213.987.100,00</b>	<b>(162.964.800,00)</b>	
01.01 01.01.01 011 003 5 2 1	Belanja Pegawai	51.850.000,00	34.975.000,00	(16.875.000,00)	
01.01 01.01.01 011 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.325.101.900,00	1.179.012.100,00	(146.089.800,00)	
01.01 01.01.01 011 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
01.01 01.01.01 012	<b>Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal dan PAUD</b>	<b>8.175.307.673,00</b>	<b>7.396.883.973,00</b>	<b>(778.423.700,00)</b>	
01.01 01.01.01 012 001	<b>Pengelolaan Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan</b>	<b>4.609.452.220,00</b>	<b>3.894.755.549,00</b>	<b>(714.696.671,00)</b>	
01.01 01.01.01 012 001 5 2 1	Belanja Pegawai	806.674.000,00	737.008.200,00	(69.665.800,00)	
01.01 01.01.01 012 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.444.319.400,00	1.229.028.660,00	(215.290.740,00)	
01.01 01.01.01 012 001 5 2 3	Belanja Modal	2.358.458.820,00	1.928.718.689,00	(429.740.131,00)	
01.01 01.01.01 012 002	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini</b>	<b>3.089.475.453,00</b>	<b>3.051.583.424,00</b>	<b>(37.892.029,00)</b>	
01.01 01.01.01 012 002 5 2 1	Belanja Pegawai	2.056.875.000,00	2.039.375.000,00	(17.500.000,00)	
01.01 01.01.01 012 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.032.600.453,00	1.012.208.424,00	(20.392.029,00)	
01.01 01.01.01 012 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
01.01 01.01.01 012 003	<b>Pembinaan Lembaga Pendidikan Ketrampilan</b>	<b>476.380.000,00</b>	<b>450.545.000,00</b>	<b>(25.835.000,00)</b>	
01.01 01.01.01 012 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.01 01.01.01 012 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	476.380.000,00	450.545.000,00	(25.835.000,00)	
01.01 01.01.01 012 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
01.01 01.01.01 013	<b>Program Pengembangan Pendidikan</b>	<b>82.279.511.698,00</b>	<b>75.942.965.355,00</b>	<b>(6.336.546.343,00)</b>	
01.01 01.01.01 013 001	<b>Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>	<b>1.328.973.000,00</b>	<b>1.293.449.980,00</b>	<b>(35.523.020,00)</b>	
01.01 01.01.01 013 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.01 01.01.01 013 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.328.973.000,00	1.293.449.980,00	(35.523.020,00)	
01.01 01.01.01 013 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
01.01 01.01.01 013 002	<b>Pengelolaan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>	<b>10.608.002.000,00</b>	<b>10.450.360.346,00</b>	<b>(157.641.654,00)</b>	
01.01 01.01.01 013 002 5 2 1	Belanja Pegawai	10.429.440.000,00	10.288.320.000,00	(141.120.000,00)	
01.01 01.01.01 013 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	178.562.000,00	162.040.346,00	(16.521.654,00)	
01.01 01.01.01 013 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
01.01 01.01.01 013 003	<b>Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pendidikan</b>	<b>1.632.766.000,00</b>	<b>1.420.198.330,00</b>	<b>(212.567.670,00)</b>	
01.01 01.01.01 013 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.01 01.01.01 013 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.232.766.000,00	1.097.275.350,00	(135.490.650,00)	
01.01 01.01.01 013 003 5 2 3	Belanja Modal	400.000.000,00	322.922.980,00	(77.077.020,00)	
01.01 01.01.01 013 004	<b>Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah</b>	<b>20.891.277.284,00</b>	<b>17.989.665.420,00</b>	<b>(2.901.611.864,00)</b>	
01.01 01.01.01 013 004 5 2 1	Belanja Pegawai	633.840.000,00	550.475.000,00	(83.365.000,00)	
01.01 01.01.01 013 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	20.257.437.284,00	17.439.190.420,00	(2.818.246.864,00)	
01.01 01.01.01 013 004 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
01.01 01.01.01 013 005	<b>Pengelolaan Dana BOS dan BOSDA</b>	<b>46.839.565.414,00</b>	<b>43.817.762.879,00</b>	<b>(3.021.802.535,00)</b>	
01.01 01.01.01 013 005 5 2 1	Belanja Pegawai	13.865.325.000,00	12.346.138.650,00	(1.519.186.350,00)	
01.01 01.01.01 013 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	28.352.465.414,00	26.971.297.345,00	(1.381.168.069,00)	
01.01 01.01.01 013 005 5 2 3	Belanja Modal	4.621.775.000,00	4.500.326.884,00	(121.448.116,00)	
01.01 01.01.01 013 006	<b>Pengelolaan Pendidikan Inklusi</b>	<b>978.928.000,00</b>	<b>971.528.400,00</b>	<b>(7.399.600,00)</b>	
01.01 01.01.01 013 006 5 2 1	Belanja Pegawai	382.800.000,00	375.900.000,00	(6.900.000,00)	
01.01 01.01.01 013 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	596.128.000,00	595.628.400,00	(499.600,00)	
01.01 01.01.01 013 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH :</b>	<b>414.722.524.373,00</b>	<b>375.686.835.468,11</b>	<b>(39.035.688.904,89)</b>	
	<b>SURPLUS/(DEFISIT):</b>	<b>(414.722.524.373,00)</b>	<b>(375.686.835.468,11)</b>	<b>39.035.688.904,89</b>	



URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR  
 MACAM URUSAN : 01.02 - KESEHATAN  
 ORGANISASI : 01.02.01 - DINAS KESEHATAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
01.02 01.02.01 00 00 4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>35.442.828.700,00</b>	<b>41.321.755.198,29</b>	<b>5.878.926.498,29</b>	
01.02 01.02.01 00 00 4 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>35.442.828.700,00</b>	<b>41.321.755.198,29</b>	<b>5.878.926.498,29</b>	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	<b>195.956.000,00</b>	<b>220.904.000,00</b>	<b>24.948.000,00</b>	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 2 01	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>195.956.000,00</b>	<b>220.904.000,00</b>	<b>24.948.000,00</b>	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 2 01 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	195.956.000,00	220.904.000,00	24.948.000,00	1)PD No 5/2012
	- Laboratorium Pengawasan Kualitas Air	195.956.000,00	220.904.000,00	24.948.000,00	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4	<b>Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah</b>	<b>35.246.872.700,00</b>	<b>41.100.851.198,29</b>	<b>5.853.978.498,29</b>	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19	Pendapatan BLUD Puskesmas	24.192.501.700,00	25.678.328.467,00	1.485.826.767,00	2)Perwal No 69/2013
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 01	Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 1	858.000.000,00	917.445.181,00	59.445.181,00	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 02	Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 2	590.850.000,00	666.722.318,00	75.872.318,00	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 03	Pendapatan BLUD Puskesmas Gedongtengen	1.405.762.000,00	1.450.086.067,00	44.324.067,00	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 04	Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 1	1.401.750.000,00	1.476.785.639,00	75.035.639,00	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 05	Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 2	635.471.000,00	750.606.900,00	115.135.900,00	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 06	Pendapatan BLUD Puskesmas Gondomanan	944.085.000,00	940.618.405,00	(3.466.595,00)	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 07	Pendapatan BLUD Puskesmas Jetis	2.158.445.000,00	2.468.366.677,00	309.921.677,00	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 08	Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 1	1.420.000.000,00	1.432.076.445,00	12.076.445,00	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 09	Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 2	777.791.100,00	867.517.084,00	89.725.984,00	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 10	Pendapatan BLUD Puskesmas Kraton	1.082.650.000,00	1.157.756.583,00	75.106.583,00	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 11	Pendapatan BLUD Puskesmas Mantrijeron	2.132.660.000,00	2.187.601.068,00	54.941.068,00	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 12	Pendapatan BLUD Puskesmas Mergangsan	1.678.891.000,00	1.759.944.631,00	81.053.631,00	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 13	Pendapatan BLUD Puskesmas Ngampilan	791.870.600,00	906.812.748,00	114.942.148,00	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 14	Pendapatan BLUD Puskesmas Pakualaman	618.696.000,00	694.222.526,00	75.526.526,00	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 15	Pendapatan BLUD Puskesmas Tegalrejo	2.725.363.000,00	2.783.868.741,00	58.505.741,00	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 16	Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 1	2.301.437.000,00	2.444.883.790,00	143.446.790,00	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 17	Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 2	1.071.237.000,00	1.108.730.432,00	37.493.432,00	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 18	Pendapatan BLUD Puskesmas Wirobrajan	1.597.543.000,00	1.664.283.232,00	66.740.232,00	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 20	Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama	<b>11.054.371.000,00</b>	<b>15.422.522.731,29</b>	<b>4.368.151.731,29</b>	3)Perwal No 18/2016
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 20 01	Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama	11.054.371.000,00	15.422.522.731,29	4.368.151.731,29	
01.02 01.02.01 00 00 5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>200.020.533.455,00</b>	<b>180.879.120.954,03</b>	<b>(19.141.412.500,97)</b>	
01.02 01.02.01 00 00 5 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>44.178.052.722,00</b>	<b>42.390.443.011,00</b>	<b>(1.787.609.711,00)</b>	
01.02 01.02.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	44.178.052.722,00	42.390.443.011,00	(1.787.609.711,00)	
01.02 01.02.01 00 00	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>155.842.480.733,00</b>	<b>138.488.677.943,03</b>	<b>(17.353.802.789,97)</b>	
01.02 01.02.01 00 01	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	<b>4.274.936.000,00</b>	<b>4.073.189.279,00</b>	<b>(201.746.721,00)</b>	
01.02 01.02.01 00 01 018	<b>Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi</b>	<b>294.535.000,00</b>	<b>246.373.158,00</b>	<b>(48.161.842,00)</b>	
01.02 01.02.01 00 01 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.02 01.02.01 00 01 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	294.535.000,00	246.373.158,00	(48.161.842,00)	
01.02 01.02.01 00 01 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
01.02 01.02.01 00 01 019	<b>Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>3.980.401.000,00</b>	<b>3.826.816.121,00</b>	<b>(153.584.879,00)</b>	
01.02 01.02.01 00 01 019 5 2 1	Belanja Pegawai	2.807.409.876,00	2.797.590.025,00	(9.819.851,00)	
01.02 01.02.01 00 01 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	722.771.124,00	615.327.596,00	(107.443.528,00)	
01.02 01.02.01 00 01 019 5 2 3	Belanja Modal	450.220.000,00	413.898.500,00	(36.321.500,00)	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
01.02 01.02.01 002	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>507.269.000,00</b>	<b>397.673.660,00</b>	<b>(109.595.340,00)</b>	
01.02 01.02.01 002 022	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor</b>	<b>217.000.000,00</b>	<b>215.924.434,00</b>	<b>(1.075.566,00)</b>	
01.02 01.02.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.02 01.02.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	20.968.434,00	(31.566,00)	
01.02 01.02.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	196.000.000,00	194.956.000,00	(1.044.000,00)	
01.02 01.02.01 002 024	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	<b>290.269.000,00</b>	<b>181.749.226,00</b>	<b>(108.519.774,00)</b>	
01.02 01.02.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.02 01.02.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	290.269.000,00	181.749.226,00	(108.519.774,00)	
01.02 01.02.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
01.02 01.02.01 006	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>45.095.000,00</b>	<b>45.094.000,00</b>	<b>(1.000,00)</b>	
01.02 01.02.01 006 005	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD</b>	<b>45.095.000,00</b>	<b>45.094.000,00</b>	<b>(1.000,00)</b>	
01.02 01.02.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.02 01.02.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	45.095.000,00	45.094.000,00	(1.000,00)	
01.02 01.02.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
01.02 01.02.01 014	<b>Program Pelayanan Kesehatan Dasar</b>	<b>52.089.681.545,00</b>	<b>46.015.473.436,46</b>	<b>(6.074.208.108,54)</b>	
01.02 01.02.01 014 001	<b>Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 1</b>	<b>1.102.850.277,00</b>	<b>932.473.144,00</b>	<b>(170.377.133,00)</b>	
01.02 01.02.01 014 001 5 2 1	Belanja Pegawai	481.093.550,00	474.973.727,00	(6.119.823,00)	
01.02 01.02.01 014 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	342.064.338,00	282.068.567,00	(59.995.771,00)	
01.02 01.02.01 014 001 5 2 3	Belanja Modal	279.692.389,00	175.430.850,00	(104.261.539,00)	
01.02 01.02.01 014 002	<b>Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 2</b>	<b>724.052.872,00</b>	<b>667.169.898,08</b>	<b>(56.882.973,92)</b>	
01.02 01.02.01 014 002 5 2 1	Belanja Pegawai	383.580.612,00	363.103.571,00	(20.477.041,00)	
01.02 01.02.01 014 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	266.775.375,00	235.311.127,08	(31.464.247,92)	
01.02 01.02.01 014 002 5 2 3	Belanja Modal	73.696.885,00	68.755.200,00	(4.941.685,00)	
01.02 01.02.01 014 003	<b>Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gedongtengen</b>	<b>1.536.320.697,00</b>	<b>1.362.106.081,00</b>	<b>(174.214.616,00)</b>	
01.02 01.02.01 014 003 5 2 1	Belanja Pegawai	991.474.879,00	971.036.585,00	(20.438.294,00)	
01.02 01.02.01 014 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	398.493.590,00	287.447.566,00	(111.046.024,00)	
01.02 01.02.01 014 003 5 2 3	Belanja Modal	146.352.228,00	103.621.930,00	(42.730.298,00)	
01.02 01.02.01 014 004	<b>Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman 1</b>	<b>1.535.136.489,00</b>	<b>1.255.638.760,00</b>	<b>(279.497.729,00)</b>	
01.02 01.02.01 014 004 5 2 1	Belanja Pegawai	976.600.000,00	926.312.635,00	(50.287.365,00)	
01.02 01.02.01 014 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	511.236.489,00	302.311.125,00	(208.925.364,00)	
01.02 01.02.01 014 004 5 2 3	Belanja Modal	47.300.000,00	27.015.000,00	(20.285.000,00)	
01.02 01.02.01 014 005	<b>Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman 2</b>	<b>738.526.593,00</b>	<b>659.438.538,00</b>	<b>(79.088.055,00)</b>	
01.02 01.02.01 014 005 5 2 1	Belanja Pegawai	416.433.550,00	388.953.827,00	(27.479.723,00)	
01.02 01.02.01 014 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	166.446.314,00	133.922.101,00	(32.524.213,00)	
01.02 01.02.01 014 005 5 2 3	Belanja Modal	155.646.729,00	136.562.610,00	(19.084.119,00)	
01.02 01.02.01 014 006	<b>Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondomanan</b>	<b>1.088.462.221,00</b>	<b>949.535.051,00</b>	<b>(138.927.170,00)</b>	
01.02 01.02.01 014 006 5 2 1	Belanja Pegawai	609.038.521,00	555.543.882,00	(53.494.639,00)	
01.02 01.02.01 014 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	316.660.800,00	252.326.669,00	(64.334.131,00)	
01.02 01.02.01 014 006 5 2 3	Belanja Modal	162.762.900,00	141.664.500,00	(21.098.400,00)	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
01.02 01.02.01 014 007	<b>Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Jetis</b>	<b>2.712.337.582,00</b>	<b>2.450.794.851,00</b>	<b>(261.542.731,00)</b>	
01.02 01.02.01 014 007 5 2 1	Belanja Pegawai	1.599.337.205,00	1.578.634.528,00	(20.702.677,00)	
01.02 01.02.01 014 007 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	677.300.377,00	535.296.498,00	(142.003.879,00)	
01.02 01.02.01 014 007 5 2 3	Belanja Modal	435.700.000,00	336.863.825,00	(98.836.175,00)	
01.02 01.02.01 014 008	<b>Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 1</b>	<b>1.436.908.814,00</b>	<b>1.348.717.308,00</b>	<b>(88.191.506,00)</b>	
01.02 01.02.01 014 008 5 2 1	Belanja Pegawai	817.401.773,00	782.986.298,00	(34.415.475,00)	
01.02 01.02.01 014 008 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	532.857.041,00	492.806.610,00	(40.050.431,00)	
01.02 01.02.01 014 008 5 2 3	Belanja Modal	86.650.000,00	72.924.400,00	(13.725.600,00)	
01.02 01.02.01 014 009	<b>Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 2</b>	<b>905.979.147,00</b>	<b>875.419.085,00</b>	<b>(30.560.062,00)</b>	
01.02 01.02.01 014 009 5 2 1	Belanja Pegawai	429.778.706,00	429.616.174,00	(162.532,00)	
01.02 01.02.01 014 009 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	330.810.441,00	308.906.291,00	(21.904.150,00)	
01.02 01.02.01 014 009 5 2 3	Belanja Modal	145.390.000,00	136.896.620,00	(8.493.380,00)	
01.02 01.02.01 014 010	<b>Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kraton</b>	<b>1.216.476.426,00</b>	<b>1.030.274.528,00</b>	<b>(186.201.898,00)</b>	
01.02 01.02.01 014 010 5 2 1	Belanja Pegawai	681.122.996,00	671.726.511,00	(9.396.485,00)	
01.02 01.02.01 014 010 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	421.751.430,00	255.428.232,00	(166.323.198,00)	
01.02 01.02.01 014 010 5 2 3	Belanja Modal	113.602.000,00	103.119.785,00	(10.482.215,00)	
01.02 01.02.01 014 011	<b>Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mantrijeron</b>	<b>2.331.495.640,00</b>	<b>1.908.564.421,00</b>	<b>(422.931.219,00)</b>	
01.02 01.02.01 014 011 5 2 1	Belanja Pegawai	1.235.013.450,00	1.221.336.177,00	(13.677.273,00)	
01.02 01.02.01 014 011 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	819.982.190,00	623.153.244,00	(196.828.946,00)	
01.02 01.02.01 014 011 5 2 3	Belanja Modal	276.500.000,00	64.075.000,00	(212.425.000,00)	
01.02 01.02.01 014 012	<b>Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mergangsan</b>	<b>2.859.560.720,00</b>	<b>1.880.018.805,00</b>	<b>(979.541.915,00)</b>	
01.02 01.02.01 014 012 5 2 1	Belanja Pegawai	1.229.200.000,00	1.012.469.717,00	(216.730.283,00)	
01.02 01.02.01 014 012 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	944.230.720,00	649.538.628,00	(294.692.092,00)	
01.02 01.02.01 014 012 5 2 3	Belanja Modal	686.130.000,00	218.010.460,00	(468.119.540,00)	
01.02 01.02.01 014 013	<b>Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Ngampilan</b>	<b>1.016.086.333,00</b>	<b>827.024.831,38</b>	<b>(189.061.501,62)</b>	
01.02 01.02.01 014 013 5 2 1	Belanja Pegawai	346.800.000,00	393.203.617,00	46.403.617,00	
01.02 01.02.01 014 013 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	431.747.083,00	249.117.572,38	(182.629.510,62)	
01.02 01.02.01 014 013 5 2 3	Belanja Modal	237.539.250,00	184.703.642,00	(52.835.608,00)	
01.02 01.02.01 014 014	<b>Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Pakualaman</b>	<b>907.365.147,00</b>	<b>634.548.442,00</b>	<b>(272.816.705,00)</b>	
01.02 01.02.01 014 014 5 2 1	Belanja Pegawai	342.487.950,00	338.520.831,00	(3.967.119,00)	
01.02 01.02.01 014 014 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	457.285.175,00	255.344.161,00	(201.941.014,00)	
01.02 01.02.01 014 014 5 2 3	Belanja Modal	107.592.022,00	40.683.450,00	(66.908.572,00)	
01.02 01.02.01 014 015	<b>Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Tegalorejo</b>	<b>2.845.244.468,00</b>	<b>2.775.885.175,00</b>	<b>(69.359.293,00)</b>	
01.02 01.02.01 014 015 5 2 1	Belanja Pegawai	1.880.863.430,00	1.858.098.715,00	(22.764.715,00)	
01.02 01.02.01 014 015 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	624.501.038,00	624.102.560,00	(398.478,00)	
01.02 01.02.01 014 015 5 2 3	Belanja Modal	339.880.000,00	293.683.900,00	(46.196.100,00)	
01.02 01.02.01 014 016	<b>Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 1</b>	<b>2.706.613.627,00</b>	<b>2.536.507.179,00</b>	<b>(170.106.448,00)</b>	
01.02 01.02.01 014 016 5 2 1	Belanja Pegawai	1.419.257.698,00	1.417.746.911,00	(1.510.787,00)	
01.02 01.02.01 014 016 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.081.856.021,00	968.023.428,00	(113.832.593,00)	
01.02 01.02.01 014 016 5 2 3	Belanja Modal	205.499.908,00	150.736.840,00	(54.763.068,00)	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
01.02 01.02.01 014 017	<b>Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 2</b>	<b>1.107.557.975,00</b>	<b>1.060.169.918,00</b>	<b>(47.388.057,00)</b>	
01.02 01.02.01 014 017 5 2 1	Belanja Pegawai	621.666.700,00	591.614.657,00	(30.052.043,00)	
01.02 01.02.01 014 017 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	417.741.275,00	402.187.261,00	(15.554.014,00)	
01.02 01.02.01 014 017 5 2 3	Belanja Modal	68.150.000,00	66.368.000,00	(1.782.000,00)	
01.02 01.02.01 014 018	<b>Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Wirobrajan</b>	<b>1.924.192.117,00</b>	<b>1.768.538.622,00</b>	<b>(155.653.495,00)</b>	
01.02 01.02.01 014 018 5 2 1	Belanja Pegawai	904.007.175,00	856.673.792,00	(47.333.383,00)	
01.02 01.02.01 014 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	864.743.825,00	772.278.880,00	(92.464.945,00)	
01.02 01.02.01 014 018 5 2 3	Belanja Modal	155.441.117,00	139.585.950,00	(15.855.167,00)	
01.02 01.02.01 014 019	<b>Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 1</b>	<b>1.300.399.000,00</b>	<b>1.164.685.163,00</b>	<b>(135.713.837,00)</b>	
01.02 01.02.01 014 019 5 2 1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	-	(1.550.000,00)	
01.02 01.02.01 014 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.176.609.222,00	1.059.020.713,00	(117.588.509,00)	
01.02 01.02.01 014 019 5 2 3	Belanja Modal	122.239.778,00	105.664.450,00	(16.575.328,00)	
01.02 01.02.01 014 020	<b>Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 2</b>	<b>1.148.651.000,00</b>	<b>1.070.335.542,00</b>	<b>(78.315.458,00)</b>	
01.02 01.02.01 014 020 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.02 01.02.01 014 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.068.651.000,00	991.335.542,00	(77.315.458,00)	
01.02 01.02.01 014 020 5 2 3	Belanja Modal	80.000.000,00	79.000.000,00	(1.000.000,00)	
01.02 01.02.01 014 021	<b>Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gedongtengen</b>	<b>2.011.412.000,00</b>	<b>1.779.373.545,00</b>	<b>(232.038.455,00)</b>	
01.02 01.02.01 014 021 5 2 1	Belanja Pegawai	71.110.000,00	70.110.000,00	(1.000.000,00)	
01.02 01.02.01 014 021 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.564.885.242,00	1.380.386.515,00	(184.498.727,00)	
01.02 01.02.01 014 021 5 2 3	Belanja Modal	375.416.758,00	328.877.030,00	(46.539.728,00)	
01.02 01.02.01 014 022	<b>Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman 1</b>	<b>1.603.044.000,00</b>	<b>1.343.110.165,00</b>	<b>(259.933.835,00)</b>	
01.02 01.02.01 014 022 5 2 1	Belanja Pegawai	16.460.000,00	2.940.000,00	(13.520.000,00)	
01.02 01.02.01 014 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.377.588.488,00	1.143.467.796,00	(234.120.692,00)	
01.02 01.02.01 014 022 5 2 3	Belanja Modal	208.995.512,00	196.702.369,00	(12.293.143,00)	
01.02 01.02.01 014 023	<b>Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman 2</b>	<b>1.692.616.000,00</b>	<b>1.501.706.015,00</b>	<b>(190.909.985,00)</b>	
01.02 01.02.01 014 023 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.02 01.02.01 014 023 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.381.094.727,00	1.233.108.415,00	(147.986.312,00)	
01.02 01.02.01 014 023 5 2 3	Belanja Modal	311.521.273,00	268.597.600,00	(42.923.673,00)	
01.02 01.02.01 014 024	<b>Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondomanan</b>	<b>1.352.278.000,00</b>	<b>1.276.182.423,00</b>	<b>(76.095.577,00)</b>	
01.02 01.02.01 014 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.02 01.02.01 014 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.277.278.000,00	1.201.182.423,00	(76.095.577,00)	
01.02 01.02.01 014 024 5 2 3	Belanja Modal	75.000.000,00	75.000.000,00	-	
01.02 01.02.01 014 025	<b>Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Jetis</b>	<b>1.322.550.000,00</b>	<b>1.204.212.207,00</b>	<b>(118.337.793,00)</b>	
01.02 01.02.01 014 025 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.02 01.02.01 014 025 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.216.684.300,00	1.107.243.207,00	(109.441.093,00)	
01.02 01.02.01 014 025 5 2 3	Belanja Modal	105.865.700,00	96.969.000,00	(8.896.700,00)	
01.02 01.02.01 014 026	<b>Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 1</b>	<b>858.207.000,00</b>	<b>773.973.251,00</b>	<b>(84.233.749,00)</b>	
01.02 01.02.01 014 026 5 2 1	Belanja Pegawai	28.165.000,00	27.065.000,00	(1.100.000,00)	
01.02 01.02.01 014 026 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	755.042.000,00	671.908.251,00	(83.133.749,00)	
01.02 01.02.01 014 026 5 2 3	Belanja Modal	75.000.000,00	75.000.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
01.02 01.02.01 014 027	<b>Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 2</b>	<b>799.697.400,00</b>	<b>773.280.230,00</b>	<b>(26.417.170,00)</b>	
01.02 01.02.01 014 027 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.02 01.02.01 014 027 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	774.347.200,00	749.736.085,00	(24.611.115,00)	
01.02 01.02.01 014 027 5 2 3	Belanja Modal	25.350.200,00	23.544.145,00	(1.806.055,00)	
01.02 01.02.01 014 028	<b>Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kraton</b>	<b>1.396.507.000,00</b>	<b>1.314.326.129,00</b>	<b>(82.180.871,00)</b>	
01.02 01.02.01 014 028 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.02 01.02.01 014 028 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.379.657.000,00	1.305.926.129,00	(73.730.871,00)	
01.02 01.02.01 014 028 5 2 3	Belanja Modal	16.850.000,00	8.400.000,00	(8.450.000,00)	
01.02 01.02.01 014 029	<b>Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mantrijeron</b>	<b>2.055.800.000,00</b>	<b>1.871.959.303,00</b>	<b>(183.840.697,00)</b>	
01.02 01.02.01 014 029 5 2 1	Belanja Pegawai	52.960.000,00	52.960.000,00	-	
01.02 01.02.01 014 029 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.627.490.000,00	1.484.205.203,00	(143.284.797,00)	
01.02 01.02.01 014 029 5 2 3	Belanja Modal	375.350.000,00	334.794.100,00	(40.555.900,00)	
01.02 01.02.01 014 030	<b>Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mergangsan</b>	<b>1.052.117.000,00</b>	<b>975.588.590,00</b>	<b>(76.528.410,00)</b>	
01.02 01.02.01 014 030 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.02 01.02.01 014 030 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.052.117.000,00	975.588.590,00	(76.528.410,00)	
01.02 01.02.01 014 030 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
01.02 01.02.01 014 031	<b>Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Ngampilan</b>	<b>1.109.834.000,00</b>	<b>1.010.926.163,00</b>	<b>(98.907.837,00)</b>	
01.02 01.02.01 014 031 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.02 01.02.01 014 031 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	906.994.211,00	813.781.163,00	(93.213.048,00)	
01.02 01.02.01 014 031 5 2 3	Belanja Modal	202.839.789,00	197.145.000,00	(5.694.789,00)	
01.02 01.02.01 014 032	<b>Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pakualaman</b>	<b>720.694.000,00</b>	<b>604.403.603,00</b>	<b>(116.290.397,00)</b>	
01.02 01.02.01 014 032 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.02 01.02.01 014 032 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	720.694.000,00	604.403.603,00	(116.290.397,00)	
01.02 01.02.01 014 032 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
01.02 01.02.01 014 033	<b>Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tegalrejo</b>	<b>1.607.018.000,00</b>	<b>1.291.804.309,00</b>	<b>(315.213.691,00)</b>	
01.02 01.02.01 014 033 5 2 1	Belanja Pegawai	10.400.000,00	6.240.000,00	(4.160.000,00)	
01.02 01.02.01 014 033 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.463.118.000,00	1.155.866.059,00	(307.251.941,00)	
01.02 01.02.01 014 033 5 2 3	Belanja Modal	133.500.000,00	129.698.250,00	(3.801.750,00)	
01.02 01.02.01 014 034	<b>Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 1</b>	<b>839.669.000,00</b>	<b>801.765.785,00</b>	<b>(37.903.215,00)</b>	
01.02 01.02.01 014 034 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.02 01.02.01 014 034 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	789.668.660,00	752.265.785,00	(37.402.875,00)	
01.02 01.02.01 014 034 5 2 3	Belanja Modal	50.000.340,00	49.500.000,00	(500.340,00)	
01.02 01.02.01 014 035	<b>Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 2</b>	<b>1.357.672.000,00</b>	<b>1.195.277.258,00</b>	<b>(162.394.742,00)</b>	
01.02 01.02.01 014 035 5 2 1	Belanja Pegawai	46.420.000,00	41.140.000,00	(5.280.000,00)	
01.02 01.02.01 014 035 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.251.479.000,00	1.095.759.258,00	(155.719.742,00)	
01.02 01.02.01 014 035 5 2 3	Belanja Modal	59.773.000,00	58.378.000,00	(1.395.000,00)	
01.02 01.02.01 014 036	<b>Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wirobrajan</b>	<b>1.166.349.000,00</b>	<b>1.139.739.118,00</b>	<b>(26.609.882,00)</b>	
01.02 01.02.01 014 036 5 2 1	Belanja Pegawai	203.560.000,00	203.560.000,00	-	
01.02 01.02.01 014 036 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	876.788.521,00	850.806.018,00	(25.982.503,00)	
01.02 01.02.01 014 036 5 2 3	Belanja Modal	86.000.479,00	85.373.100,00	(627.379,00)	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
01.02 01.02.01015	<b>Program Pelayanan Kesehatan Rujukan</b>	<b>38.143.082.188,00</b>	<b>31.887.556.506,05</b>	<b>(6.255.525.681,95)</b>	
01.02 01.02.01015001	<b>Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Pratama</b>	<b>16.473.381.188,00</b>	<b>12.550.426.479,05</b>	<b>(3.922.954.708,95)</b>	
01.02 01.02.01015001 5 2 1	Belanja Pegawai	6.129.361.077,00	5.308.863.605,00	(820.497.472,00)	
01.02 01.02.01015001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	8.394.020.111,00	5.476.093.964,87	(2.917.926.146,13)	
01.02 01.02.01015001 5 2 3	Belanja Modal	1.950.000.000,00	1.765.468.909,18	(184.531.090,82)	
01.02 01.02.01015002	<b>Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Pratama</b>	<b>21.669.701.000,00</b>	<b>19.337.130.027,00</b>	<b>(2.332.570.973,00)</b>	
01.02 01.02.01015002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.02 01.02.01015002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	15.038.601.000,00	12.930.915.127,00	(2.107.685.873,00)	
01.02 01.02.01015002 5 2 3	Belanja Modal	6.631.100.000,00	6.406.214.900,00	(224.885.100,00)	
01.02 01.02.01016	<b>Program Upaya Pelayanan Kesehatan</b>	<b>44.499.126.000,00</b>	<b>40.526.593.558,00</b>	<b>(3.972.532.442,00)</b>	
01.02 01.02.01016001	<b>Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan</b>	<b>3.151.135.000,00</b>	<b>3.136.282.227,00</b>	<b>(14.852.773,00)</b>	
01.02 01.02.01016001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.02 01.02.01016001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	648.897.476,00	634.047.682,00	(14.849.794,00)	
01.02 01.02.01016001 5 2 3	Belanja Modal	2.502.237.524,00	2.502.234.545,00	(2.979,00)	
01.02 01.02.01016002	<b>Pelayanan Kesehatan Khusus</b>	<b>527.781.000,00</b>	<b>498.672.760,00</b>	<b>(29.108.240,00)</b>	
01.02 01.02.01016002 5 2 1	Belanja Pegawai	14.425.000,00	14.425.000,00	-	
01.02 01.02.01016002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	378.613.476,00	369.934.910,00	(8.678.566,00)	
01.02 01.02.01016002 5 2 3	Belanja Modal	134.742.524,00	114.312.850,00	(20.429.674,00)	
01.02 01.02.01016003	<b>Pengelolaan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Kesehatan</b>	<b>39.014.613.000,00</b>	<b>35.200.887.178,00</b>	<b>(3.813.725.822,00)</b>	
01.02 01.02.01016003 5 2 1	Belanja Pegawai	9.500.000,00	9.500.000,00	-	
01.02 01.02.01016003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	39.005.113.000,00	35.191.387.178,00	(3.813.725.822,00)	
01.02 01.02.01016003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
01.02 01.02.01016004	<b>Pengelolaan Operasional Publik Safety Center 119</b>	<b>1.805.597.000,00</b>	<b>1.690.751.393,00</b>	<b>(114.845.607,00)</b>	
01.02 01.02.01016004 5 2 1	Belanja Pegawai	10.000.000,00	9.000.000,00	(1.000.000,00)	
01.02 01.02.01016004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	993.051.660,00	881.336.493,00	(111.715.167,00)	
01.02 01.02.01016004 5 2 3	Belanja Modal	802.545.340,00	800.414.900,00	(2.130.440,00)	
01.02 01.02.01017	<b>Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat</b>	<b>5.049.432.000,00</b>	<b>4.812.621.748,00</b>	<b>(236.810.252,00)</b>	
01.02 01.02.01017001	<b>Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat</b>	<b>1.511.633.000,00</b>	<b>1.466.430.609,00</b>	<b>(45.202.391,00)</b>	
01.02 01.02.01017001 5 2 1	Belanja Pegawai	650.620.000,00	650.620.000,00	-	
01.02 01.02.01017001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	861.013.000,00	815.810.609,00	(45.202.391,00)	
01.02 01.02.01017001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
01.02 01.02.01017002	<b>Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan</b>	<b>1.974.155.000,00</b>	<b>1.850.529.700,00</b>	<b>(123.625.300,00)</b>	
01.02 01.02.01017002 5 2 1	Belanja Pegawai	104.450.000,00	101.650.000,00	(2.800.000,00)	
01.02 01.02.01017002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.745.205.000,00	1.646.119.034,00	(99.085.966,00)	
01.02 01.02.01017002 5 2 3	Belanja Modal	124.500.000,00	102.760.666,00	(21.739.334,00)	
01.02 01.02.01017003	<b>Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja</b>	<b>1.162.969.000,00</b>	<b>1.117.610.204,00</b>	<b>(45.358.796,00)</b>	
01.02 01.02.01017003 5 2 1	Belanja Pegawai	37.825.000,00	23.025.000,00	(14.800.000,00)	
01.02 01.02.01017003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	593.524.000,00	563.957.204,00	(29.566.796,00)	
01.02 01.02.01017003 5 2 3	Belanja Modal	531.620.000,00	530.628.000,00	(992.000,00)	
01.02 01.02.01017004	<b>Operasional Laboratorium Kesehatan Lingkungan</b>	<b>400.675.000,00</b>	<b>378.051.235,00</b>	<b>(22.623.765,00)</b>	
01.02 01.02.01017004 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.02 01.02.01017004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	249.696.714,00	243.755.235,00	(5.941.479,00)	
01.02 01.02.01017004 5 2 3	Belanja Modal	150.978.286,00	134.296.000,00	(16.682.286,00)	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
01.02 01.02.01018	<b>Program Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan</b>	<b>9.160.919.000,00</b>	<b>8.857.785.155,52</b>	<b>(303.133.844,48)</b>	
01.02 01.02.01018001	<b>Pembinaan Regulasi Sarana Prasarana dan Sertifikasi Bidang Kesehatan</b>	<b>596.126.000,00</b>	<b>570.139.856,00</b>	<b>(25.986.144,00)</b>	
01.02 01.02.01018001 5 2 1	Belanja Pegawai	15.750.000,00	15.750.000,00	-	
01.02 01.02.01018001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	325.184.156,00	308.125.658,00	(17.058.498,00)	
01.02 01.02.01018001 5 2 3	Belanja Modal	255.191.844,00	246.264.198,00	(8.927.646,00)	
01.02 01.02.01018002	<b>Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)</b>	<b>895.869.000,00</b>	<b>850.384.678,00</b>	<b>(45.484.322,00)</b>	
01.02 01.02.01018002 5 2 1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	525.000,00	(875.000,00)	
01.02 01.02.01018002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	894.469.000,00	849.859.678,00	(44.609.322,00)	
01.02 01.02.01018002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
01.02 01.02.01018003	<b>Pengelolaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman</b>	<b>7.668.924.000,00</b>	<b>7.437.260.621,52</b>	<b>(231.663.378,48)</b>	
01.02 01.02.01018003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.02 01.02.01018003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	7.371.294.000,00	7.187.427.481,45	(183.866.518,55)	
01.02 01.02.01018003 5 2 3	Belanja Modal	297.630.000,00	249.833.140,07	(47.796.859,93)	
01.02 01.02.01019	<b>Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit</b>	<b>2.072.940.000,00</b>	<b>1.872.690.600,00</b>	<b>(200.249.400,00)</b>	
01.02 01.02.01019001	<b>Pengelolaan Surveilans dan Sistem Informasi Kesehatan</b>	<b>274.020.000,00</b>	<b>266.230.830,00</b>	<b>(7.789.170,00)</b>	
01.02 01.02.01019001 5 2 1	Belanja Pegawai	144.450.000,00	142.650.000,00	(1.800.000,00)	
01.02 01.02.01019001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	108.170.000,00	105.148.130,00	(3.021.870,00)	
01.02 01.02.01019001 5 2 3	Belanja Modal	21.400.000,00	18.432.700,00	(2.967.300,00)	
01.02 01.02.01019002	<b>Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi</b>	<b>1.215.055.000,00</b>	<b>1.047.811.700,00</b>	<b>(167.243.300,00)</b>	
01.02 01.02.01019002 5 2 1	Belanja Pegawai	51.100.000,00	51.100.000,00	-	
01.02 01.02.01019002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	926.215.000,00	758.971.700,00	(167.243.300,00)	
01.02 01.02.01019002 5 2 3	Belanja Modal	237.740.000,00	237.740.000,00	-	
01.02 01.02.01019003	<b>Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa</b>	<b>583.865.000,00</b>	<b>558.648.070,00</b>	<b>(25.216.930,00)</b>	
01.02 01.02.01019003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.02 01.02.01019003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	239.866.000,00	227.449.070,00	(12.416.930,00)	
01.02 01.02.01019003 5 2 3	Belanja Modal	343.999.000,00	331.199.000,00	(12.800.000,00)	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :</b>	<b>35.442.828.700,00</b>	<b>41.321.755.198,29</b>	<b>5.878.926.498,29</b>	
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH :</b>	<b>200.020.533.455,00</b>	<b>180.879.120.954,03</b>	<b>(19.141.412.500,97)</b>	
	<b>SURPLUS/(DEFISIT) :</b>	<b>(164.577.704.755,00)</b>	<b>(139.557.365.755,74)</b>	<b>25.020.338.999,26</b>	

Keterangan :

- 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)
- 2) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
- 3) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Pratama Yogyakarta

URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR  
 MACAM URUSAN : 01.02 - KESEHATAN  
 ORGANISASI : 01.02.02- RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
01.02 01.02.02 00 00 4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>81.500.000.000,00</b>	<b>78.121.244.026,00</b>	<b>(3.378.755.974,00)</b>	
01.02 01.02.02 00 00 4 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>81.500.000.000,00</b>	<b>78.121.244.026,00</b>	<b>(3.378.755.974,00)</b>	
01.02 01.02.02 00 00 4 1 4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	81.500.000.000,00	78.121.244.026,00	(3.378.755.974,00)	
01.02 01.02.02 00 00 4 1 4 17	Pendapatan BLUD RSUD	81.500.000.000,00	78.121.244.026,00	(3.378.755.974,00)	
01.02 01.02.02 00 00 4 1 4 17 01	Pendapatan BLUD RSUD	81.500.000.000,00	78.121.244.026,00	(3.378.755.974,00)	1)Perwal 104/2009
01.02 01.02.02 00 00 5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>164.483.364.736,00</b>	<b>142.698.473.500,26</b>	<b>(21.784.891.235,74)</b>	
01.02 01.02.02 00 00 5 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>24.472.491.964,00</b>	<b>23.713.675.555,00</b>	<b>(758.816.409,00)</b>	
01.02 01.02.02 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	24.472.491.964,00	23.713.675.555,00	(758.816.409,00)	
01.02 01.02.02 00 00	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>140.010.872.772,00</b>	<b>118.984.797.945,26</b>	<b>(21.026.074.826,74)</b>	
01.02 01.02.01 020	<i>Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja</i>	<b>140.010.872.772,00</b>	<b>118.984.797.945,26</b>	<b>(21.026.074.826,74)</b>	
01.02 01.02.01 020 001	<b>Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja</b>	<b>96.955.907.772,00</b>	<b>77.261.976.163,00</b>	<b>(19.693.931.609,00)</b>	
01.02 01.02.01 020 001 5 2 1	Belanja Pegawai	53.349.241.350,00	35.232.773.298,00	(18.116.468.052,00)	
01.02 01.02.01 020 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	40.011.666.422,00	39.297.293.131,00	(714.373.291,00)	
01.02 01.02.01 020 001 5 2 3	Belanja Modal	3.595.000.000,00	2.731.909.734,00	(863.090.266,00)	
01.02 01.02.01 020 002	<b>Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja</b>	<b>43.054.965.000,00</b>	<b>41.722.821.782,26</b>	<b>(1.332.143.217,74)</b>	
01.02 01.02.01 020 002 5 2 1	Belanja Pegawai	3.960.330.400,00	3.880.079.832,48	(80.250.567,52)	
01.02 01.02.01 020 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	16.495.634.600,00	15.501.285.238,78	(994.349.361,22)	
01.02 01.02.01 020 002 5 2 3	Belanja Modal	22.599.000.000,00	22.341.456.711,00	(257.543.289,00)	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :</b>	<b>81.500.000.000,00</b>	<b>78.121.244.026,00</b>	<b>(3.378.755.974,00)</b>	
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH :</b>	<b>164.483.364.736,00</b>	<b>142.698.473.500,26</b>	<b>(21.784.891.235,74)</b>	
	<b>SURPLUS/(DEFISIT) :</b>	<b>(82.983.364.736,00)</b>	<b>(64.577.229.474,26)</b>	<b>18.406.135.261,74</b>	

Keterangan :

- 1) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2009 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta



URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR  
 MACAM URUSAN : 01.03 - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
 ORGANISASI : 01.03.01 - DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
01.03 01.03.01 00 00 4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.178.760.500,00</b>	<b>1.164.890.100,00</b>	<b>(13.870.400,00)</b>	
01.03 01.03.01 00 00 4 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>1.178.760.500,00</b>	<b>1.164.890.100,00</b>	<b>(13.870.400,00)</b>	
01.03 01.03.01 00 00 4 1 2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	<b>777.540.500,00</b>	<b>804.092.500,00</b>	<b>26.552.000,00</b>	
01.03 01.03.01 00 00 4 1 2 01	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>766.295.500,00</b>	<b>791.072.500,00</b>	<b>24.777.000,00</b>	
01.03 01.03.01 00 00 4 1 2 01 12	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	766.295.500,00	791.072.500,00	24.777.000,00	1)PD No 7/2018
01.03 01.03.01 00 00 4 1 2 02	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>11.245.000,00</b>	<b>13.020.000,00</b>	<b>1.775.000,00</b>	
01.03 01.03.01 00 00 4 1 2 02 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	11.245.000,00	13.020.000,00	1.775.000,00	2)PD No 4/2012
01.03 01.03.01 00 00 4 1 4	<b>Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah</b>	<b>401.220.000,00</b>	<b>360.797.600,00</b>	<b>(40.422.400,00)</b>	
01.03 01.03.01 00 00 4 1 4 15	Pendapatan dari Barang Milik Daerah	401.220.000,00	360.797.600,00	(40.422.400,00)	3)Perwal No 69/2014
01.03 01.03.01 00 00 4 1 4 15 06	Sewa Gedung - Sewa Rusunawa	401.220.000,00	360.797.600,00	(40.422.400,00)	4)Perwal No 70/2014
01.03 01.03.01 00 00 5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>222.392.162.205,00</b>	<b>197.893.467.319,71</b>	<b>(24.498.694.885,29)</b>	
01.03 01.03.01 00 00 5 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>7.340.157.733,00</b>	<b>7.190.184.372,00</b>	<b>(149.973.361,00)</b>	
01.03 01.03.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	7.340.157.733,00	7.190.184.372,00	(149.973.361,00)	
01.03 01.03.01 00 00	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>215.052.004.472,00</b>	<b>190.703.282.947,71</b>	<b>(24.348.721.524,29)</b>	
01.03 01.03.01 001	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>2.625.277.812,00</b>	<b>2.315.703.476,45</b>	<b>(309.574.335,55)</b>	
01.03 01.03.01 001 018	<b>Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi</b>	<b>403.730.000,00</b>	<b>330.330.972,25</b>	<b>(73.399.027,75)</b>	
01.03 01.03.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.03 01.03.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	403.730.000,00	330.330.972,25	(73.399.027,75)	
01.03 01.03.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
01.03 01.03.01 001 019	<b>Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>2.221.547.812,00</b>	<b>1.985.372.504,20</b>	<b>(236.175.307,80)</b>	
01.03 01.03.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	476.272.432,00	426.254.047,88	(50.018.384,12)	
01.03 01.03.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.323.130.380,00	1.151.777.056,32	(171.353.323,68)	
01.03 01.03.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	422.145.000,00	407.341.400,00	(14.803.600,00)	
01.03 01.03.01 002	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>1.037.327.000,00</b>	<b>838.736.366,00</b>	<b>(198.590.634,00)</b>	
01.03 01.03.01 002 022	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor</b>	<b>255.000.000,00</b>	<b>250.526.000,00</b>	<b>(4.474.000,00)</b>	
01.03 01.03.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.03 01.03.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	255.000.000,00	250.526.000,00	(4.474.000,00)	
01.03 01.03.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
01.03 01.03.01 002 024	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	<b>782.327.000,00</b>	<b>588.210.366,00</b>	<b>(194.116.634,00)</b>	
01.03 01.03.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.03 01.03.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	782.327.000,00	588.210.366,00	(194.116.634,00)	
01.03 01.03.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
01.03 01.03.01 006	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>114.275.000,00</b>	<b>113.536.800,00</b>	<b>(738.200,00)</b>	
01.03 01.03.01 006 005	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD</b>	<b>114.275.000,00</b>	<b>113.536.800,00</b>	<b>(738.200,00)</b>	
01.03 01.03.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.03 01.03.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	39.275.000,00	39.094.800,00	(180.200,00)	
01.03 01.03.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	75.000.000,00	74.442.000,00	(558.000,00)	
01.03 01.03.01 021	<b>Program Pembangunan Gedung Pemerintah</b>	<b>48.132.539.032,00</b>	<b>42.497.005.395,07</b>	<b>(5.635.533.636,93)</b>	
01.03 01.03.01 021 001	<b>Perencanaan Teknis Gedung Pemerintah</b>	<b>2.875.882.736,00</b>	<b>2.835.866.099,84</b>	<b>(40.016.636,16)</b>	
01.03 01.03.01 021 001 5 2 1	Belanja Pegawai	6.750.000,00	6.075.000,00	(675.000,00)	
01.03 01.03.01 021 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	66.962.736,00	61.310.699,84	(5.652.036,16)	
01.03 01.03.01 021 001 5 2 3	Belanja Modal	2.802.170.000,00	2.768.480.400,00	(33.689.600,00)	
01.03 01.03.01 021 002	<b>Pembangunan Gedung Pemerintah</b>	<b>45.256.656.296,00</b>	<b>39.661.139.295,23</b>	<b>(5.595.517.000,77)</b>	
01.03 01.03.01 021 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.03 01.03.01 021 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	51.761.296,00	49.242.365,44	(2.518.930,56)	
01.03 01.03.01 021 002 5 2 3	Belanja Modal	45.204.895.000,00	39.611.896.929,79	(5.592.998.070,21)	
01.03 01.03.01 022	<b>Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</b>	<b>79.398.999.203,00</b>	<b>75.645.228.887,35</b>	<b>(3.753.770.315,65)</b>	
01.03 01.03.01 022 001	<b>Peningkatan Jalan dan Jembatan</b>	<b>29.586.402.850,00</b>	<b>28.722.049.966,81</b>	<b>(864.352.883,19)</b>	
01.03 01.03.01 022 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.03 01.03.01 022 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	28.098.560,00	23.498.530,00	(4.600.030,00)	
01.03 01.03.01 022 001 5 2 3	Belanja Modal	29.558.304.290,00	28.698.551.436,81	(859.752.853,19)	
01.03 01.03.01 022 002	<b>Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</b>	<b>11.985.566.000,00</b>	<b>10.067.831.851,54</b>	<b>(1.917.734.148,46)</b>	
01.03 01.03.01 022 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.03 01.03.01 022 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	4.573.145.116,00	3.751.798.397,12	(821.346.718,88)	
01.03 01.03.01 022 002 5 2 3	Belanja Modal	7.412.420.884,00	6.316.033.454,42	(1.096.387.429,58)	
01.03 01.03.01 022 003	<b>Pengelolaan Penerangan Jalan Umum</b>	<b>37.827.030.353,00</b>	<b>36.855.347.069,00</b>	<b>(971.683.284,00)</b>	
01.03 01.03.01 022 003 5 2 1	Belanja Pegawai	30.375.000,00	30.375.000,00	-	
01.03 01.03.01 022 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	15.770.849.695,00	15.327.510.254,00	(443.339.441,00)	
01.03 01.03.01 022 003 5 2 3	Belanja Modal	22.025.805.658,00	21.497.461.815,00	(528.343.843,00)	
01.03 01.03.01 023	<b>Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Dainase</b>	<b>48.056.098.404,00</b>	<b>37.575.570.114,15</b>	<b>(10.480.528.289,85)</b>	
01.03 01.03.01 023 001	<b>Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan dan Drainase</b>	<b>21.530.885.463,00</b>	<b>20.879.716.195,22</b>	<b>(651.169.267,78)</b>	
01.03 01.03.01 023 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.03 01.03.01 023 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	106.448.720,00	100.042.176,00	(6.406.544,00)	
01.03 01.03.01 023 001 5 2 3	Belanja Modal	21.424.436.743,00	20.779.674.019,22	(644.762.723,78)	
01.03 01.03.01 023 002	<b>Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase</b>	<b>26.525.212.941,00</b>	<b>16.695.853.918,93</b>	<b>(9.829.359.022,07)</b>	
01.03 01.03.01 023 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.03 01.03.01 023 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	3.791.401.770,00	3.559.184.262,04	(232.217.507,96)	
01.03 01.03.01 023 002 5 2 3	Belanja Modal	22.733.811.171,00	13.136.669.656,89	(9.597.141.514,11)	
01.04 01.03.01 026	<b>Program Penataan Perumahan, Permukiman dan Tata Bangunan</b>	<b>35.687.488.021,00</b>	<b>31.717.501.908,69</b>	<b>(3.969.986.112,31)</b>	
01.04 01.03.01 026 001	<b>Penataan Perumahan dan Permukiman</b>	<b>17.434.669.635,00</b>	<b>15.048.287.059,33</b>	<b>(2.386.382.575,67)</b>	
01.04 01.03.01 026 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.04 01.03.01 026 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.042.818.560,00	975.184.330,00	(67.634.230,00)	
01.04 01.03.01 026 001 5 2 3	Belanja Modal	16.391.851.075,00	14.073.102.729,33	(2.318.748.345,67)	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
01.04 01.03.01 026 002	<b>Penataan Bangunan dan Lingkungan</b>	<b>9.867.656.970,00</b>	<b>9.295.614.141,97</b>	<b>(572.042.828,03)</b>	
01.04 01.03.01 026 002 5 2 1	Belanja Pegawai	56.250.000,00	49.950.000,00	(6.300.000,00)	
01.04 01.03.01 026 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	3.536.876.970,00	3.418.269.860,00	(118.607.110,00)	
01.04 01.03.01 026 002 5 2 3	Belanja Modal	6.274.530.000,00	5.827.394.281,97	(447.135.718,03)	
01.04 01.03.01 026 003	<b>Pengelolaan Rusunawa</b>	<b>1.770.668.208,00</b>	<b>1.611.127.611,75</b>	<b>(159.540.596,25)</b>	
01.04 01.03.01 026 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.04 01.03.01 026 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	383.536.324,00	311.846.246,88	(71.690.077,12)	
01.04 01.03.01 026 003 5 2 3	Belanja Modal	1.387.131.884,00	1.299.281.364,87	(87.850.519,13)	
01.04 01.03.01 026 004	<b>Pengelolaan Air Limbah</b>	<b>6.614.493.208,00</b>	<b>5.762.473.095,64</b>	<b>(852.020.112,36)</b>	
01.04 01.03.01 026 004 5 2 1	Belanja Pegawai	103.950.000,00	78.075.000,00	(25.875.000,00)	
01.04 01.03.01 026 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.734.952.280,00	1.410.056.395,64	(324.895.884,36)	
01.04 01.03.01 026 004 5 2 3	Belanja Modal	4.775.590.928,00	4.274.341.700,00	(501.249.228,00)	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :</b>	<b>1.178.760.500,00</b>	<b>1.164.890.100,00</b>	<b>(13.870.400,00)</b>	
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH :</b>	<b>222.392.162.205,00</b>	<b>197.893.467.319,71</b>	<b>(24.498.694.885,29)</b>	
	<b>SURPLUS/(DEFISIT) :</b>	<b>(221.213.401.705,00)</b>	<b>(196.728.577.219,71)</b>	<b>24.484.824.485,29</b>	

Keterangan :

- 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Limbah Cair (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7)
- 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4)
- 3) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2014 tentang Tarif Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Grha Bina Harapan
- 4) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2014 tentang Tarif Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Cokrodirjan

URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR  
 MACAM URUSAN : 01.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
 ORGANISASI : 01.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
01.05 01.05.01 00 00 4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	-	-	-	
01.05 01.05.01 00 00 5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>25.516.259.317,00</b>	<b>24.498.098.949,57</b>	<b>(1.018.160.367,43)</b>	
01.05 01.05.01 00 00 5 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>8.317.222.390,00</b>	<b>7.883.794.931,00</b>	<b>(433.427.459,00)</b>	
01.05 01.05.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	8.317.222.390,00	7.883.794.931,00	(433.427.459,00)	
01.05 01.05.01 00 00	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>17.199.036.927,00</b>	<b>16.614.304.018,57</b>	<b>(584.732.908,43)</b>	
01.05 01.05.01 001	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>2.903.204.501,00</b>	<b>2.755.893.840,00</b>	<b>(147.310.661,00)</b>	
01.05 01.05.01 001 018	<b>Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi</b>	<b>144.400.000,00</b>	<b>142.958.756,00</b>	<b>(1.441.244,00)</b>	
01.05 01.05.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.05 01.05.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	144.400.000,00	142.958.756,00	(1.441.244,00)	
01.05 01.05.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
01.05 01.05.01 001 019	<b>Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>2.758.804.501,00</b>	<b>2.612.935.084,00</b>	<b>(145.869.417,00)</b>	
01.05 01.05.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	1.892.630.876,00	1.827.882.009,00	(64.748.867,00)	
01.05 01.05.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	726.521.125,00	652.111.175,00	(74.409.950,00)	
01.05 01.05.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	139.652.500,00	132.941.900,00	(6.710.600,00)	
01.05 01.05.01 002	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>938.411.000,00</b>	<b>902.925.130,00</b>	<b>(35.485.870,00)</b>	
01.05 01.05.01 002 022	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor</b>	<b>257.500.000,00</b>	<b>254.960.000,00</b>	<b>(2.540.000,00)</b>	
01.05 01.05.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.05 01.05.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	
01.05 01.05.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	257.500.000,00	254.960.000,00	(2.540.000,00)	
01.05 01.05.01 002 024	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	<b>680.911.000,00</b>	<b>647.965.130,00</b>	<b>(32.945.870,00)</b>	
01.05 01.05.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.05 01.05.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	640.911.000,00	619.115.130,00	(21.795.870,00)	
01.05 01.05.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	40.000.000,00	28.850.000,00	(11.150.000,00)	
01.05 01.05.01 006	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>8.228.000,00</b>	<b>5.802.600,00</b>	<b>(2.425.400,00)</b>	
01.05 01.05.01 006 005	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD</b>	<b>8.228.000,00</b>	<b>5.802.600,00</b>	<b>(2.425.400,00)</b>	
01.05 01.05.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.05 01.05.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	8.228.000,00	5.802.600,00	(2.425.400,00)	
01.05 01.05.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
01.05 01.05.01 027	<b>Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan</b>	<b>5.479.222.246,00</b>	<b>5.396.407.153,00</b>	<b>(82.815.093,00)</b>	
01.05 01.05.01 027 001	<b>Penegakan Peraturan Daerah Secara Yustisi</b>	<b>308.055.000,00</b>	<b>262.550.000,00</b>	<b>(45.505.000,00)</b>	
01.05 01.05.01 027 001 5 2 1	Belanja Pegawai	235.275.000,00	193.970.000,00	(41.305.000,00)	
01.05 01.05.01 027 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	72.780.000,00	68.580.000,00	(4.200.000,00)	
01.05 01.05.01 027 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
01.05 01.05.01 027 002	<b>Operasi Ketertiban Umum</b>	<b>5.171.167.246,00</b>	<b>5.133.857.153,00</b>	<b>(37.310.093,00)</b>	
01.05 01.05.01 027 002 5 2 1	Belanja Pegawai	241.175.000,00	240.725.000,00	(450.000,00)	
01.05 01.05.01 027 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	4.749.992.246,00	4.715.482.153,00	(34.510.093,00)	
01.05 01.05.01 027 002 5 2 3	Belanja Modal	180.000.000,00	177.650.000,00	(2.350.000,00)	
01.05 01.05.01 028	<b>Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketrentaman Masyarakat</b>	<b>3.569.478.521,00</b>	<b>3.425.682.520,57</b>	<b>(143.796.000,43)</b>	
01.05 01.05.01 028 001	<b>Pengamanan Umum dan Penjagaan Khusus</b>	<b>3.454.248.521,00</b>	<b>3.349.208.520,57</b>	<b>(105.040.000,43)</b>	
01.05 01.05.01 028 001 5 2 1	Belanja Pegawai	608.920.000,00	581.400.000,00	(27.520.000,00)	
01.05 01.05.01 028 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2.625.328.521,00	2.554.008.520,57	(71.320.000,43)	
01.05 01.05.01 028 001 5 2 3	Belanja Modal	220.000.000,00	213.800.000,00	(6.200.000,00)	
01.05 01.05.01 028 002	<b>Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat</b>	<b>115.230.000,00</b>	<b>76.474.000,00</b>	<b>(38.756.000,00)</b>	
01.05 01.05.01 028 002 5 2 1	Belanja Pegawai	39.450.000,00	9.500.000,00	(29.950.000,00)	
01.05 01.05.01 028 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	75.780.000,00	66.974.000,00	(8.806.000,00)	
01.05 01.05.01 028 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
01.05 01.05.01 029	<b>Program Pengembangan Kapasitas dan Pengkajian Peraturan Perundangan</b>	<b>480.605.594,00</b>	<b>447.066.148,00</b>	<b>(33.539.446,00)</b>	
01.05 01.05.01 029 001	<b>Peningkatan Kapasitas Pol PP</b>	<b>304.529.994,00</b>	<b>272.330.548,00</b>	<b>(32.199.446,00)</b>	
01.05 01.05.01 029 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.05 01.05.01 029 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	304.529.994,00	272.330.548,00	(32.199.446,00)	
01.05 01.05.01 029 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
01.05 01.05.01 029 002	<b>Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan</b>	<b>176.075.600,00</b>	<b>174.735.600,00</b>	<b>(1.340.000,00)</b>	
01.05 01.05.01 029 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.05 01.05.01 029 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	176.075.600,00	174.735.600,00	(1.340.000,00)	
01.05 01.05.01 029 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
01.05 01.05.01 030	<b>Program Perlindungan Masyarakat</b>	<b>3.819.887.065,00</b>	<b>3.680.526.627,00</b>	<b>(139.360.438,00)</b>	
01.05 01.05.01 030 001	<b>Pembinaan dan Mobilisasi Linmas</b>	<b>2.095.759.291,00</b>	<b>2.022.675.519,00</b>	<b>(73.083.772,00)</b>	
01.05 01.05.01 030 001 5 2 1	Belanja Pegawai	1.645.900.000,00	1.603.510.000,00	(42.390.000,00)	
01.05 01.05.01 030 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	449.859.291,00	419.165.519,00	(30.693.772,00)	
01.05 01.05.01 030 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
01.05 01.05.01 030 002	<b>Pembinaan Masyarakat dan Gerakan Kampung Panca Tertib</b>	<b>1.724.127.774,00</b>	<b>1.657.851.108,00</b>	<b>(66.276.666,00)</b>	
01.05 01.05.01 030 002 5 2 1	Belanja Pegawai	341.475.000,00	325.735.000,00	(15.740.000,00)	
01.05 01.05.01 030 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.382.652.774,00	1.332.116.108,00	(50.536.666,00)	
01.05 01.05.01 030 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH :</b>	<b>25.516.259.317,00</b>	<b>24.498.098.949,57</b>	<b>(1.018.160.367,43)</b>	
	<b>SURPLUS/(DEFISIT) :</b>	<b>(25.516.259.317,00)</b>	<b>(24.498.098.949,57)</b>	<b>1.018.160.367,43</b>	

URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR  
 MACAM URUSAN : 01.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
 ORGANISASI : 01.05.02 - DINAS KEBAKARAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
01.05 01.05.02 00 00 4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>37.000.000,00</b>	<b>38.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	
01.05 01.05.02 00 00 4 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>37.000.000,00</b>	<b>38.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	
01.05 01.05.02 00 00 4 1 2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	<b>37.000.000,00</b>	<b>38.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	
01.05 01.05.02 00 00 4 1 2 02	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>37.000.000,00</b>	<b>38.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	
01.05 01.05.02 00 00 4 1 2 02 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Mobil Pemadam Kebakaran	37.000.000,00	38.300.000,00	1.300.000,00	1)PD No 4/2012
01.05 01.05.02 00 00 5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>12.673.613.434,00</b>	<b>11.799.135.187,29</b>	<b>(874.478.246,71)</b>	
01.05 01.05.02 00 00 5 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>3.564.360.434,00</b>	<b>3.456.318.030,00</b>	<b>(108.042.404,00)</b>	
01.05 01.05.02 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	3.564.360.434,00	3.456.318.030,00	(108.042.404,00)	
01.05 01.05.02 00 00	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>9.109.253.000,00</b>	<b>8.342.817.157,29</b>	<b>(766.435.842,71)</b>	
01.05 01.05.02 001	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.312.901.000,00</b>	<b>1.234.817.392,04</b>	<b>(78.083.607,96)</b>	
01.05 01.05.02 001 018	<b>Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi</b>	<b>222.790.000,00</b>	<b>211.930.864,00</b>	<b>(10.859.136,00)</b>	
01.05 01.05.02 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.05 01.05.02 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	222.790.000,00	211.930.864,00	(10.859.136,00)	
01.05 01.05.02 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
01.05 01.05.02 001 019	<b>Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>1.090.111.000,00</b>	<b>1.022.886.528,04</b>	<b>(67.224.471,96)</b>	
01.05 01.05.02 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	506.053.600,00	506.045.775,04	(7.824,96)	
01.05 01.05.02 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	496.007.400,00	431.763.078,00	(64.244.322,00)	
01.05 01.05.02 001 019 5 2 3	Belanja Modal	88.050.000,00	85.077.675,00	(2.972.325,00)	
01.05 01.05.02 002	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>428.670.000,00</b>	<b>375.235.884,00</b>	<b>(53.434.116,00)</b>	
01.05 01.05.02 002 022	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor</b>	<b>271.070.000,00</b>	<b>267.572.000,00</b>	<b>(3.498.000,00)</b>	
01.05 01.05.02 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.05 01.05.02 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	271.070.000,00	267.572.000,00	(3.498.000,00)	
01.05 01.05.02 002 022 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
01.05 01.05.02 002 024	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	<b>157.600.000,00</b>	<b>107.663.884,00</b>	<b>(49.936.116,00)</b>	
01.05 01.05.02 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.05 01.05.02 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	157.600.000,00	107.663.884,00	(49.936.116,00)	
01.05 01.05.02 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
01.05 01.05.02 005	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>(25.000.000,00)</b>	
01.05 01.05.02 005 006	<b>Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>(25.000.000,00)</b>	
01.05 01.05.02 005 006 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.05 01.05.02 005 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	35.000.000,00	(25.000.000,00)	
01.05 01.05.02 005 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
01.05 01.05.02 006	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>63.005.000,00</b>	<b>58.788.000,00</b>	<b>(4.217.000,00)</b>	
01.05 01.05.02 006 005	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD</b>	<b>63.005.000,00</b>	<b>58.788.000,00</b>	<b>(4.217.000,00)</b>	
01.05 01.05.02 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.05 01.05.02 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	63.005.000,00	58.788.000,00	(4.217.000,00)	
01.05 01.05.02 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
01.05 01.05.02 031	<b>Program Pencegahan Kebakaran</b>	<b>2.900.518.000,00</b>	<b>2.795.094.703,85</b>	<b>(105.423.296,15)</b>	
01.05 01.05.02 031 001	<b>Pencegahan Bahaya Kebakaran</b>	<b>2.296.225.000,00</b>	<b>2.221.753.703,85</b>	<b>(74.471.296,15)</b>	
01.05 01.05.02 031 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.05 01.05.02 031 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	7.975.000,00	3.488.000,00	(4.487.000,00)	
01.05 01.05.02 031 001 5 2 3	Belanja Modal	2.288.250.000,00	2.218.265.703,85	(69.984.296,15)	
01.05 01.05.02 031 002	<b>Penyuluhan dan Edukasi Bahaya Kebakaran</b>	<b>604.293.000,00</b>	<b>573.341.000,00</b>	<b>(30.952.000,00)</b>	
01.05 01.05.02 031 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.05 01.05.02 031 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	583.793.000,00	552.876.000,00	(30.917.000,00)	
01.05 01.05.02 031 002 5 2 3	Belanja Modal	20.500.000,00	20.465.000,00	(35.000,00)	
01.05 01.05.02 032	<b>Program Penanggulangan Kebakaran</b>	<b>4.344.159.000,00</b>	<b>3.843.881.177,40</b>	<b>(500.277.822,60)</b>	
01.05 01.05.02 032 001	<b>Penanganan Kebakaran</b>	<b>833.025.000,00</b>	<b>801.197.782,40</b>	<b>(31.827.217,60)</b>	
01.05 01.05.02 032 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.05 01.05.02 032 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	833.025.000,00	801.197.782,40	(31.827.217,60)	
01.05 01.05.02 032 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
01.05 01.05.02 032 002	<b>Pengelolaan Sarana Prasarana Kebakaran</b>	<b>3.511.134.000,00</b>	<b>3.042.683.395,00</b>	<b>(468.450.605,00)</b>	
01.05 01.05.02 032 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.05 01.05.02 032 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.114.056.600,00	818.006.110,00	(296.050.490,00)	
01.05 01.05.02 032 002 5 2 3	Belanja Modal	2.397.077.400,00	2.224.677.285,00	(172.400.115,00)	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :</b>	<b>37.000.000,00</b>	<b>38.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH :</b>	<b>12.673.613.434,00</b>	<b>11.799.135.187,29</b>	<b>(874.478.246,71)</b>	
	<b>SURPLUS/(DEFISIT) :</b>	<b>(12.636.613.434,00)</b>	<b>(11.760.835.187,29)</b>	<b>875.778.246,71</b>	

## Keterangan :

- 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha  
(Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4)

URUSAN  
MACAM URUSAN  
ORGANISASI

: 01. WAJIB PELAYANAN DASAR  
: 01.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
: 01.05.03 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
01.05 01.05.03 00 00 4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	-	-	-	
01.05 01.05.03 00 00 5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>11.605.541.071,00</b>	<b>10.272.078.728,42</b>	<b>(1.333.462.342,58)</b>	
01.05 01.05.03 00 00 5 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>723.919.071,00</b>	<b>693.745.013,00</b>	<b>(30.174.058,00)</b>	
01.05 01.05.03 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	723.919.071,00	693.745.013,00	(30.174.058,00)	
01.05 01.05.03 00 00	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>10.881.622.000,00</b>	<b>9.578.333.715,42</b>	<b>(1.303.288.284,58)</b>	
01.05 01.05.03 001	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	<b>559.864.790,00</b>	<b>440.377.016,00</b>	<b>(119.487.774,00)</b>	
01.05 01.05.03 001 018	<b>Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi</b>	<b>125.620.000,00</b>	<b>115.819.288,00</b>	<b>(9.800.712,00)</b>	
01.05 01.05.03 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.05 01.05.03 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	125.620.000,00	115.819.288,00	(9.800.712,00)	
01.05 01.05.03 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
01.05 01.05.03 001 019	<b>Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>434.244.790,00</b>	<b>324.557.728,00</b>	<b>(109.687.062,00)</b>	
01.05 01.05.03 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.05 01.05.03 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	156.774.790,00	123.743.248,00	(33.031.542,00)	
01.05 01.05.03 001 019 5 2 3	Belanja Modal	277.470.000,00	200.814.480,00	(76.655.520,00)	
01.05 01.05.03 002	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	<b>818.890.000,00</b>	<b>677.867.878,00</b>	<b>(141.022.122,00)</b>	
01.05 01.05.03 002 022	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor</b>	<b>506.000.000,00</b>	<b>425.840.451,00</b>	<b>(80.159.549,00)</b>	
01.05 01.05.03 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.05 01.05.03 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	50.000.000,00	(40.000.000,00)	
01.05 01.05.03 002 022 5 2 3	Belanja Modal	416.000.000,00	375.840.451,00	(40.159.549,00)	
01.05 01.05.03 002 024	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	<b>312.890.000,00</b>	<b>252.027.427,00</b>	<b>(60.862.573,00)</b>	
01.05 01.05.03 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.05 01.05.03 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	312.890.000,00	252.027.427,00	(60.862.573,00)	
01.05 01.05.03 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
01.05 01.05.03 005	<i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	-	
01.05 01.05.03 005 006	<b>Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	-	
01.05 01.05.03 005 006 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.05 01.05.03 005 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	-	
01.05 01.05.03 005 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
01.05 01.05.03 006	<i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>	<b>1.485.000,00</b>	<b>687.750,00</b>	<b>(797.250,00)</b>	
01.05 01.05.03 006 005	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD</b>	<b>1.485.000,00</b>	<b>687.750,00</b>	<b>(797.250,00)</b>	
01.05 01.05.03 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.05 01.05.03 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.485.000,00	687.750,00	(797.250,00)	
01.05 01.05.03 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
01.05 01.05.03 033	<b>Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam</b>	<b>9.481.382.210,00</b>	<b>8.439.401.071,42</b>	<b>(1.041.981.138,58)</b>	
01.05 01.05.03 033 001	<b>Pencegahan Bahaya Bencana Alam</b>	<b>3.780.289.460,00</b>	<b>3.441.505.273,00</b>	<b>(338.784.187,00)</b>	
01.05 01.05.03 033 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.05 01.05.03 033 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2.499.289.460,00	2.168.056.273,00	(331.233.187,00)	
01.05 01.05.03 033 001 5 2 3	Belanja Modal	1.281.000.000,00	1.273.449.000,00	(7.551.000,00)	
01.05 01.05.03 033 002	<b>Penanganan Bencana Alam</b>	<b>1.480.657.750,00</b>	<b>1.370.249.616,00</b>	<b>(110.408.134,00)</b>	
01.05 01.05.03 033 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.05 01.05.03 033 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.149.657.750,00	1.058.055.616,00	(91.602.134,00)	
01.05 01.05.03 033 002 5 2 3	Belanja Modal	331.000.000,00	312.194.000,00	(18.806.000,00)	
01.05 01.05.03 033 003	<b>Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana</b>	<b>4.220.435.000,00</b>	<b>3.627.646.182,42</b>	<b>(592.788.817,58)</b>	
01.05 01.05.03 033 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.05 01.05.03 033 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	96.800.000,00	22.630.625,00	(74.169.375,00)	
01.05 01.05.03 033 003 5 2 3	Belanja Modal	4.123.635.000,00	3.605.015.557,42	(518.619.442,58)	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH :</b>	<b>11.605.541.071,00</b>	<b>10.272.078.728,42</b>	<b>(1.333.462.342,58)</b>	
	<b>SURPLUS/(DEFISIT) :</b>	<b>(11.605.541.071,00)</b>	<b>(10.272.078.728,42)</b>	<b>1.333.462.342,58</b>	

URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR  
 MACAM URUSAN : 01.06 - SOSIAL  
 ORGANISASI : 01.06.01 - DINAS SOSIAL

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
01.06 01.06.01 00 00 4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	-	-	-	
01.06 01.06.01 00 00 5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>15.234.058.835,00</b>	<b>14.296.032.963,36</b>	<b>(938.025.871,64)</b>	
01.06 01.06.01 00 00 5 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>3.523.558.385,00</b>	<b>3.362.400.986,00</b>	<b>(161.157.399,00)</b>	
01.06 01.06.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	3.523.558.385,00	3.362.400.986,00	(161.157.399,00)	
01.06 01.06.01 00 00	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>11.710.500.450,00</b>	<b>10.933.631.977,36</b>	<b>(776.868.472,64)</b>	
01.06 01.06.01 001	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.658.437.525,00</b>	<b>1.445.899.752,92</b>	<b>(212.537.772,08)</b>	
01.06 01.06.01 001 018	<b>Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi</b>	<b>315.330.000,00</b>	<b>221.534.709,00</b>	<b>(93.795.291,00)</b>	
01.06 01.06.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.06 01.06.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	315.330.000,00	221.534.709,00	(93.795.291,00)	
01.06 01.06.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
01.06 01.06.01 001 019	<b>Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>1.343.107.525,00</b>	<b>1.224.365.043,92</b>	<b>(118.742.481,08)</b>	
01.06 01.06.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	319.607.472,00	318.823.057,92	(784.414,08)	
01.06 01.06.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	628.686.173,00	525.165.386,00	(103.520.787,00)	
01.06 01.06.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	394.813.880,00	380.376.600,00	(14.437.280,00)	
01.06 01.06.01 002	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>922.788.400,00</b>	<b>753.687.596,00</b>	<b>(169.100.804,00)</b>	
01.06 01.06.01 002 022	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor</b>	<b>420.280.000,00</b>	<b>415.795.175,00</b>	<b>(4.484.825,00)</b>	
01.06 01.06.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.06 01.06.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	15.280.000,00	14.614.000,00	(666.000,00)	
01.06 01.06.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	405.000.000,00	401.181.175,00	(3.818.825,00)	
01.06 01.06.01 002 024	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	<b>502.508.400,00</b>	<b>337.892.421,00</b>	<b>(164.615.979,00)</b>	
01.06 01.06.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.06 01.06.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	494.908.400,00	330.292.421,00	(164.615.979,00)	
01.06 01.06.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	7.600.000,00	7.600.000,00	-	
01.06 01.06.01 006	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>36.460.000,00</b>	<b>33.510.000,00</b>	<b>(2.950.000,00)</b>	
01.06 01.06.01 006 005	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD</b>	<b>36.460.000,00</b>	<b>33.510.000,00</b>	<b>(2.950.000,00)</b>	
01.06 01.06.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.06 01.06.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	36.460.000,00	33.510.000,00	(2.950.000,00)	
01.06 01.06.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
01.06 01.06.01 034	<b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	<b>4.977.001.525,00</b>	<b>4.671.430.784,68</b>	<b>(305.570.740,32)</b>	
01.06 01.06.01 034 001	<b>Perlindungan Sosial</b>	<b>741.565.000,00</b>	<b>640.882.553,48</b>	<b>(100.682.446,52)</b>	
01.06 01.06.01 034 001 5 2 1	Belanja Pegawai	132.150.000,00	93.350.000,00	(38.800.000,00)	
01.06 01.06.01 034 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	609.415.000,00	547.532.553,48	(61.882.446,52)	
01.06 01.06.01 034 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
01.06 01.06.01 034 002	<b>Pengelolaan Jaminan dan Bantuan Sosial</b>	<b>1.353.188.000,00</b>	<b>1.302.627.768,16</b>	<b>(50.560.231,84)</b>	
01.06 01.06.01 034 002 5 2 1	Belanja Pegawai	475.050.000,00	470.300.000,00	(4.750.000,00)	
01.06 01.06.01 034 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	878.138.000,00	832.327.768,16	(45.810.231,84)	
01.06 01.06.01 034 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
01.06 01.06.01 034 003	<b>Pelayanan Anak di Rumah Pengasuhan Anak Wiloso Projo</b>	<b>1.142.744.000,00</b>	<b>1.047.636.980,24</b>	<b>(95.107.019,76)</b>	
01.06 01.06.01 034 003 5 2 1	Belanja Pegawai	192.900.000,00	157.263.000,00	(35.637.000,00)	
01.06 01.06.01 034 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	949.844.000,00	890.373.980,24	(59.470.019,76)	
01.06 01.06.01 034 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
01.06 01.06.01 034 004	<b>Pelayanan di Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Budhi Dharma</b>	<b>1.739.504.525,00</b>	<b>1.680.283.482,80</b>	<b>(59.221.042,20)</b>	
01.06 01.06.01 034 004 5 2 1	Belanja Pegawai	37.800.000,00	37.050.000,00	(750.000,00)	
01.06 01.06.01 034 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.690.354.525,00	1.632.883.482,80	(57.471.042,20)	
01.06 01.06.01 034 004 5 2 3	Belanja Modal	11.350.000,00	10.350.000,00	(1.000.000,00)	
01.06 01.06.01 035	<b>Program Advokasi dan Rehabilitasi Sosial</b>	<b>1.753.820.000,00</b>	<b>1.722.002.938,64</b>	<b>(31.817.061,36)</b>	
01.06 01.06.01 035 001	<b>Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial /PMKS</b>	<b>455.504.000,00</b>	<b>453.014.992,16</b>	<b>(2.489.007,84)</b>	
01.06 01.06.01 035 001 5 2 1	Belanja Pegawai	156.450.000,00	156.450.000,00	-	
01.06 01.06.01 035 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	299.054.000,00	296.564.992,16	(2.489.007,84)	
01.06 01.06.01 035 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
01.06 01.06.01 035 002	<b>Advokasi dan Pendampingan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial /PMKS</b>	<b>1.298.316.000,00</b>	<b>1.268.987.946,48</b>	<b>(29.328.053,52)</b>	
01.06 01.06.01 035 002 5 2 1	Belanja Pegawai	262.350.000,00	260.500.000,00	(1.850.000,00)	
01.06 01.06.01 035 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.035.966.000,00	1.008.487.946,48	(27.478.053,52)	
01.06 01.06.01 035 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
01.06 01.06.01 036	<b>Program Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial</b>	<b>2.361.993.000,00</b>	<b>2.307.100.905,12</b>	<b>(54.892.094,88)</b>	
01.06 01.06.01 036 001	<b>Pendataan PMKS dan PSKS</b>	<b>1.401.961.000,00</b>	<b>1.363.522.728,64</b>	<b>(38.438.271,36)</b>	
01.06 01.06.01 036 001 5 2 1	Belanja Pegawai	389.875.000,00	362.048.000,00	(27.827.000,00)	
01.06 01.06.01 036 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.012.086.000,00	1.001.474.728,64	(10.611.271,36)	
01.06 01.06.01 036 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
01.06 01.06.01 036 002	<b>Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial /PSKS</b>	<b>960.032.000,00</b>	<b>943.578.176,48</b>	<b>(16.453.823,52)</b>	
01.06 01.06.01 036 002 5 2 1	Belanja Pegawai	32.100.000,00	32.100.000,00	-	
01.06 01.06.01 036 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	927.932.000,00	911.478.176,48	(16.453.823,52)	
01.06 01.06.01 036 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH :</b>	<b>15.234.058.835,00</b>	<b>14.296.032.963,36</b>	<b>(938.025.871,64)</b>	
	<b>SURPLUS/(DEFISIT) :</b>	<b>(15.234.058.835,00)</b>	<b>(14.296.032.963,36)</b>	<b>938.025.871,64</b>	

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR  
 MACAM URUSAN : 02.02 - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
 ORGANISASI : 02.02.01 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.02 02.02.01 4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	-	-	-	
02.02 02.02.01 00 00 5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>8.907.381.623,00</b>	<b>8.414.529.428,19</b>	<b>(492.852.194,81)</b>	
02.02 02.02.01 00 00 5 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1.657.335.879,00</b>	<b>1.586.123.701,00</b>	<b>(71.212.178,00)</b>	
02.02 02.02.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	1.657.335.879,00	1.586.123.701,00	(71.212.178,00)	
02.02 02.02.01 00 00	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>7.250.045.744,00</b>	<b>6.828.405.727,19</b>	<b>(421.640.016,81)</b>	
02.02 02.02.01 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.779.199.000,00</b>	<b>1.658.426.272,87</b>	<b>(120.772.727,13)</b>	
02.02 02.02.01 001 018	<b>Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi</b>	<b>505.144.000,00</b>	<b>497.275.770,99</b>	<b>(7.868.229,01)</b>	
02.02 02.02.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.02 02.02.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	505.144.000,00	497.275.770,99	(7.868.229,01)	
02.02 02.02.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.02 02.02.01 001 019	<b>Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>1.274.055.000,00</b>	<b>1.161.150.501,88</b>	<b>(112.904.498,12)</b>	
02.02 02.02.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	107.422.350,00	106.535.802,88	(886.547,12)	
02.02 02.02.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	190.074.950,00	156.603.699,00	(33.471.251,00)	
02.02 02.02.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	976.557.700,00	898.011.000,00	(78.546.700,00)	
02.02 02.02.01 002	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>375.812.000,00</b>	<b>366.210.408,00</b>	<b>(9.601.592,00)</b>	
02.02 02.02.01 002 022	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor</b>	<b>290.800.000,00</b>	<b>286.951.000,00</b>	<b>(3.849.000,00)</b>	
02.02 02.02.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.02 02.02.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	70.800.000,00	69.910.000,00	(890.000,00)	
02.02 02.02.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	220.000.000,00	217.041.000,00	(2.959.000,00)	
02.02 02.02.01 002 024	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	<b>85.012.000,00</b>	<b>79.259.408,00</b>	<b>(5.752.592,00)</b>	
02.02 02.02.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.02 02.02.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	85.012.000,00	79.259.408,00	(5.752.592,00)	
02.02 02.02.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.02 02.02.01 006	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>136.040.000,00</b>	<b>135.298.120,00</b>	<b>(741.880,00)</b>	
02.02 02.02.01 006 005	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD</b>	<b>136.040.000,00</b>	<b>135.298.120,00</b>	<b>(741.880,00)</b>	
02.02 02.02.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.02 02.02.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	136.040.000,00	135.298.120,00	(741.880,00)	
02.02 02.02.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.02 02.02.01 039	<b>Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan</b>	<b>1.731.262.000,00</b>	<b>1.620.108.215,76</b>	<b>(111.153.784,24)</b>	
02.02 02.02.01 039 001	<b>Pembinaan Pengarusutamaan Gender</b>	<b>400.370.000,00</b>	<b>370.578.570,00</b>	<b>(29.791.430,00)</b>	
02.02 02.02.01 039 001 5 2 1	Belanja Pegawai	30.100.000,00	26.750.000,00	(3.350.000,00)	
02.02 02.02.01 039 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	370.270.000,00	343.828.570,00	(26.441.430,00)	
02.02 02.02.01 039 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.02 02.02.01 039 002	<b>Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Perempuan</b>	<b>624.607.000,00</b>	<b>603.163.295,00</b>	<b>(21.443.705,00)</b>	
02.02 02.02.01 039 002 5 2 1	Belanja Pegawai	39.300.000,00	39.000.000,00	(300.000,00)	
02.02 02.02.01 039 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	585.307.000,00	564.163.295,00	(21.143.705,00)	
02.02 02.02.01 039 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.02 02.02.01 039 003	<b>UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak/P2TP2A</b>	<b>706.285.000,00</b>	<b>646.366.350,76</b>	<b>(59.918.649,24)</b>	
02.02 02.02.01 039 003 5 2 1	Belanja Pegawai	63.000.000,00	61.200.000,00	(1.800.000,00)	
02.02 02.02.01 039 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	643.285.000,00	585.166.350,76	(58.118.649,24)	
02.02 02.02.01 039 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.02 02.02.01 040	<b>Program Perlindungan Anak</b>	<b>2.139.102.744,00</b>	<b>1.991.937.290,56</b>	<b>(147.165.453,44)</b>	
02.02 02.02.01 040 001	<b>Pembinaan Pengarusutamaan Hak Anak</b>	<b>737.605.000,00</b>	<b>677.683.000,00</b>	<b>(59.922.000,00)</b>	
02.02 02.02.01 040 001 5 2 1	Belanja Pegawai	17.700.000,00	17.700.000,00	-	
02.02 02.02.01 040 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	719.905.000,00	659.983.000,00	(59.922.000,00)	
02.02 02.02.01 040 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.02 02.02.01 040 002	<b>Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Anak</b>	<b>1.401.497.744,00</b>	<b>1.314.254.290,56</b>	<b>(87.243.453,44)</b>	
02.02 02.02.01 040 002 5 2 1	Belanja Pegawai	45.920.000,00	40.620.000,00	(5.300.000,00)	
02.02 02.02.01 040 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.355.577.744,00	1.273.634.290,56	(81.943.453,44)	
02.02 02.02.01 040 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.02.01 129	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>1.088.630.000,00</b>	<b>1.056.425.420,00</b>	<b>(32.204.580,00)</b>	
02.07 02.02.01 129 001	<b>Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan</b>	<b>592.471.000,00</b>	<b>576.144.300,00</b>	<b>(16.326.700,00)</b>	
02.07 02.02.01 129 001 5 2 1	Belanja Pegawai	82.250.000,00	72.925.000,00	(9.325.000,00)	
02.07 02.02.01 129 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	510.221.000,00	503.219.300,00	(7.001.700,00)	
02.07 02.02.01 129 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.02.01 129 002	<b>Pembinaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan</b>	<b>496.159.000,00</b>	<b>480.281.120,00</b>	<b>(15.877.880,00)</b>	
02.07 02.02.01 129 002 5 2 1	Belanja Pegawai	271.875.000,00	267.075.000,00	(4.800.000,00)	
02.07 02.02.01 129 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	224.284.000,00	213.206.120,00	(11.077.880,00)	
02.07 02.02.01 129 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH :</b>	<b>8.907.381.623,00</b>	<b>8.414.529.428,19</b>	<b>(492.852.194,81)</b>	
	<b>SURPLUS/(DEFISIT) :</b>	<b>(8.907.381.623,00)</b>	<b>(8.414.529.428,19)</b>	<b>492.852.194,81</b>	

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR  
 MACAM URUSAN : 02.04 - PERTANAHAN  
 ORGANISASI : 02.04.01 - DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.04 02.04.01 00 00 4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	-	-	-	
02.04 02.04.01 00 00 5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>58.570.278.407,00</b>	<b>31.718.756.501,00</b>	<b>(26.851.521.906,00)</b>	
02.04 02.04.01 00 00 5 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>2.182.987.562,00</b>	<b>2.127.241.192,00</b>	<b>(55.746.370,00)</b>	
02.04 02.04.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	2.182.987.562,00	2.127.241.192,00	(55.746.370,00)	
02.04 02.04.01 00 00	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>56.387.290.845,00</b>	<b>29.591.515.309,00</b>	<b>(26.795.775.536,00)</b>	
02.04 02.04.01 001	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>663.869.640,00</b>	<b>588.657.172,00</b>	<b>(75.212.468,00)</b>	
02.04 02.04.01 001 018	<b>Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi</b>	<b>146.150.000,00</b>	<b>118.328.383,00</b>	<b>(27.821.617,00)</b>	
02.04 02.04.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.04 02.04.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	146.150.000,00	118.328.383,00	(27.821.617,00)	
02.04 02.04.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.04 02.04.01 001 019	<b>Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>517.719.640,00</b>	<b>470.328.789,00</b>	<b>(47.390.851,00)</b>	
02.04 02.04.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	86.445.120,00	85.074.596,00	(1.370.524,00)	
02.04 02.04.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	221.681.520,00	214.144.693,00	(7.536.827,00)	
02.04 02.04.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	209.593.000,00	171.109.500,00	(38.483.500,00)	
02.04 02.04.01 002	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>387.897.000,00</b>	<b>365.525.026,00</b>	<b>(22.371.974,00)</b>	
02.04 02.04.01 002 022	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor</b>	<b>274.132.000,00</b>	<b>270.829.000,00</b>	<b>(3.303.000,00)</b>	
02.04 02.04.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.04 02.04.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	
02.04 02.04.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	274.132.000,00	270.829.000,00	(3.303.000,00)	
02.04 02.04.01 002 024	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	<b>113.765.000,00</b>	<b>94.696.026,00</b>	<b>(19.068.974,00)</b>	
02.04 02.04.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.04 02.04.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	113.765.000,00	94.696.026,00	(19.068.974,00)	
02.04 02.04.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.04 02.04.01 006	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>63.697.420,00</b>	<b>60.936.880,00</b>	<b>(2.760.540,00)</b>	
02.04 02.04.01 006 005	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD</b>	<b>63.697.420,00</b>	<b>60.936.880,00</b>	<b>(2.760.540,00)</b>	
02.04 02.04.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.04 02.04.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	63.697.420,00	60.936.880,00	(2.760.540,00)	
02.04 02.04.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.04 02.04.01 042	<b>Program Pengelolaan Pertanahan</b>	<b>52.237.394.185,00</b>	<b>25.668.025.817,00</b>	<b>(26.569.368.368,00)</b>	
02.04 02.04.01 042 001	<b>Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan</b>	<b>143.561.205,00</b>	<b>127.229.230,00</b>	<b>(16.331.975,00)</b>	
02.04 02.04.01 042 001 5 2 1	Belanja Pegawai	45.650.000,00	45.650.000,00	-	
02.04 02.04.01 042 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	97.911.205,00	81.579.230,00	(16.331.975,00)	
02.04 02.04.01 042 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.04 02.04.01 042 002	<b>Pemanfaatan Pertanahan</b>	<b>51.977.675.300,00</b>	<b>25.433.873.327,00</b>	<b>(26.543.801.973,00)</b>	
02.04 02.04.01 042 002 5 2 1	Belanja Pegawai	4.125.000,00	4.125.000,00	-	
02.04 02.04.01 042 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	94.666.300,00	68.763.287,00	(25.903.013,00)	
02.04 02.04.01 042 002 5 2 3	Belanja Modal	51.878.884.000,00	25.360.985.040,00	(26.517.898.960,00)	
02.04 02.04.01 042 003	<b>Penyelesaian Masalah Pertanahan</b>	<b>116.157.680,00</b>	<b>106.923.260,00</b>	<b>(9.234.420,00)</b>	
02.04 02.04.01 042 003 5 2 1	Belanja Pegawai	15.400.000,00	15.200.000,00	(200.000,00)	
02.04 02.04.01 042 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	50.757.680,00	44.283.260,00	(6.474.420,00)	
02.04 02.04.01 042 003 5 2 3	Belanja Modal	50.000.000,00	47.440.000,00	(2.560.000,00)	
01.03 02.04.01 024	<b>Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang</b>	<b>1.963.661.360,00</b>	<b>1.840.347.264,00</b>	<b>(123.314.096,00)</b>	
01.03 02.04.01 024 001	<b>Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci</b>	<b>1.027.483.620,00</b>	<b>917.695.264,00</b>	<b>(109.788.356,00)</b>	
01.03 02.04.01 024 001 5 2 1	Belanja Pegawai	18.975.000,00	18.975.000,00	-	
01.03 02.04.01 024 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	401.868.620,00	317.770.264,00	(84.098.356,00)	
01.03 02.04.01 024 001 5 2 3	Belanja Modal	606.640.000,00	580.950.000,00	(25.690.000,00)	
01.03 02.04.01 024 002	<b>Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan</b>	<b>668.011.120,00</b>	<b>662.425.900,00</b>	<b>(5.585.220,00)</b>	
01.03 02.04.01 024 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.03 02.04.01 024 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	77.098.620,00	72.226.700,00	(4.871.920,00)	
01.03 02.04.01 024 002 5 2 3	Belanja Modal	590.912.500,00	590.199.200,00	(713.300,00)	
01.03 02.04.01 024 003	<b>Pembinaan Tata Ruang</b>	<b>268.166.620,00</b>	<b>260.226.100,00</b>	<b>(7.940.520,00)</b>	
01.03 02.04.01 024 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.03 02.04.01 024 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	58.901.620,00	54.658.200,00	(4.243.420,00)	
01.03 02.04.01 024 003 5 2 3	Belanja Modal	209.265.000,00	205.567.900,00	(3.697.100,00)	
01.03 02.04.01 025	<b>Program Pengendalian Tata Ruang</b>	<b>1.070.771.240,00</b>	<b>1.068.023.150,00</b>	<b>(2.748.090,00)</b>	
01.03 02.04.01 025 001	<b>Pengendalian Tata Ruang</b>	<b>224.080.000,00</b>	<b>223.036.750,00</b>	<b>(1.043.250,00)</b>	
01.03 02.04.01 025 001 5 2 1	Belanja Pegawai	2.500.000,00	2.500.000,00	-	
01.03 02.04.01 025 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	34.550.000,00	34.441.350,00	(108.650,00)	
01.03 02.04.01 025 001 5 2 3	Belanja Modal	187.030.000,00	186.095.400,00	(934.600,00)	
01.03 02.04.01 025 002	<b>Pengawasan Tata Ruang</b>	<b>351.922.620,00</b>	<b>351.382.500,00</b>	<b>(540.120,00)</b>	
01.03 02.04.01 025 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.03 02.04.01 025 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	43.542.620,00	43.371.300,00	(171.320,00)	
01.03 02.04.01 025 002 5 2 3	Belanja Modal	308.380.000,00	308.011.200,00	(368.800,00)	
01.03 02.04.01 025 003	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Tata Ruang</b>	<b>494.768.620,00</b>	<b>493.603.900,00</b>	<b>(1.164.720,00)</b>	
01.03 02.04.01 025 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.03 02.04.01 025 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	26.948.620,00	26.844.200,00	(104.420,00)	
01.03 02.04.01 025 003 5 2 3	Belanja Modal	467.820.000,00	466.759.700,00	(1.060.300,00)	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH :</b>	<b>58.570.278.407,00</b>	<b>31.718.756.501,00</b>	<b>(26.851.521.906,00)</b>	
	<b>SURPLUS/(DEFISIT) :</b>	<b>(58.570.278.407,00)</b>	<b>(31.718.756.501,00)</b>	<b>26.851.521.906,00</b>	

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR  
 MACAM URUSAN : 02.05 - LINGKUNGAN HIDUP  
 ORGANISASI : 02.05.01 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.05 02.05.01 00 00 4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>3.462.958.000,00</b>	<b>3.820.420.597,00</b>	<b>357.462.597,00</b>	1)PD No 5/2012
02.05 02.05.01 00 00 4 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>3.462.958.000,00</b>	<b>3.820.420.597,00</b>	<b>357.462.597,00</b>	
02.05 02.05.01 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	3.462.958.000,00	3.820.420.597,00	357.462.597,00	
02.05 02.05.01 00 00 4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum	3.462.958.000,00	3.820.420.597,00	357.462.597,00	
02.05 02.05.01 00 00 4 1 2 0102	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	3.462.958.000,00	3.820.420.597,00	357.462.597,00	
02.05 02.05.01 00 00 5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>54.389.944.866,00</b>	<b>52.193.247.635,99</b>	<b>(2.196.697.230,01)</b>	
02.05 02.05.01 00 00 5 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>13.617.824.866,00</b>	<b>13.411.200.698,00</b>	<b>(206.624.168,00)</b>	
02.05 02.05.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	13.617.824.866,00	13.411.200.698,00	(206.624.168,00)	
02.05 02.05.01 00 00	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>40.772.120.000,00</b>	<b>38.782.046.937,99</b>	<b>(1.990.073.062,01)</b>	
02.05 02.05.01 001	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	<b>2.773.204.000,00</b>	<b>2.699.296.785,93</b>	<b>(73.907.214,07)</b>	
02.05 02.05.01 001 018	<b>Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi</b>	<b>175.750.000,00</b>	<b>175.399.248,00</b>	<b>(350.752,00)</b>	
02.05 02.05.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.05 02.05.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	175.750.000,00	175.399.248,00	(350.752,00)	
02.05 02.05.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.05 02.05.01 001 019	<b>Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>2.597.454.000,00</b>	<b>2.523.897.537,93</b>	<b>(73.556.462,07)</b>	
02.05 02.05.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	1.107.313.252,00	1.092.587.833,60	(14.725.418,40)	
02.05 02.05.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.295.440.160,00	1.258.965.129,33	(36.475.030,67)	
02.05 02.05.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	194.700.588,00	172.344.575,00	(22.356.013,00)	
02.05 02.05.01 002	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	<b>1.850.516.000,00</b>	<b>1.790.404.965,06</b>	<b>(60.111.034,94)</b>	
02.05 02.05.01 002 022	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor</b>	<b>285.000.000,00</b>	<b>281.523.934,76</b>	<b>(3.476.065,24)</b>	
02.05 02.05.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.05 02.05.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	285.000.000,00	281.523.934,76	(3.476.065,24)	
02.05 02.05.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.05 02.05.01 002 024	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	<b>1.565.516.000,00</b>	<b>1.508.881.030,30</b>	<b>(56.634.969,70)</b>	
02.05 02.05.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.05 02.05.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.565.516.000,00	1.508.881.030,30	(56.634.969,70)	
02.05 02.05.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.05 02.05.01 005	<i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>	<b>84.000.000,00</b>	<b>83.950.000,00</b>	<b>(50.000,00)</b>	
02.05 02.05.01 005 006	<b>Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur</b>	<b>84.000.000,00</b>	<b>83.950.000,00</b>	<b>(50.000,00)</b>	
02.05 02.05.01 005 006 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.05 02.05.01 005 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	84.000.000,00	83.950.000,00	(50.000,00)	
02.05 02.05.01 005 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.05 02.05.01 006	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>158.779.000,00</b>	<b>157.424.696,00</b>	<b>(1.354.304,00)</b>	
02.05 02.05.01 006 005	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD</b>	<b>158.779.000,00</b>	<b>157.424.696,00</b>	<b>(1.354.304,00)</b>	
02.05 02.05.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.05 02.05.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	67.178.040,00	66.924.696,00	(253.344,00)	
02.05 02.05.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	91.600.960,00	90.500.000,00	(1.100.960,00)	
02.05 02.05.01 043	<b>Program Penataan dan Pengendalian Dampak Lingkungan</b>	<b>1.714.770.000,00</b>	<b>1.644.620.230,00</b>	<b>(70.149.770,00)</b>	
02.05 02.05.01 043 001	<b>Kajian Dampak Lingkungan</b>	<b>334.287.000,00</b>	<b>284.718.976,00</b>	<b>(49.568.024,00)</b>	
02.05 02.05.01 043 001 5 2 1	Belanja Pegawai	21.325.000,00	21.325.000,00	-	
02.05 02.05.01 043 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	234.962.120,00	187.399.976,00	(47.562.144,00)	
02.05 02.05.01 043 001 5 2 3	Belanja Modal	77.999.880,00	75.994.000,00	(2.005.880,00)	
02.05 02.05.01 043 002	<b>Pengendalian Pencemaran dan Limbah B3</b>	<b>1.380.483.000,00</b>	<b>1.359.901.254,00</b>	<b>(20.581.746,00)</b>	
02.05 02.05.01 043 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.05 02.05.01 043 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.064.834.960,00	1.046.725.399,00	(18.109.561,00)	
02.05 02.05.01 043 002 5 2 3	Belanja Modal	315.648.040,00	313.175.855,00	(2.472.185,00)	
02.05 02.05.01 044	<b>Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup</b>	<b>2.662.552.000,00</b>	<b>2.578.997.299,00</b>	<b>(83.554.701,00)</b>	
02.05 02.05.01 044 001	<b>Optimalisasi Sumber Daya Lingkungan Hidup</b>	<b>1.648.796.000,00</b>	<b>1.572.861.675,00</b>	<b>(75.934.325,00)</b>	
02.05 02.05.01 044 001 5 2 1	Belanja Pegawai	11.350.000,00	11.350.000,00	-	
02.05 02.05.01 044 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.629.445.660,00	1.553.511.675,00	(75.933.985,00)	
02.05 02.05.01 044 001 5 2 3	Belanja Modal	8.000.340,00	8.000.000,00	(340,00)	
02.05 02.05.01 044 002	<b>Penataan dan Pemantauan Lingkungan</b>	<b>371.600.000,00</b>	<b>366.470.376,00</b>	<b>(5.129.624,00)</b>	
02.05 02.05.01 044 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.05 02.05.01 044 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	199.169.920,00	194.868.376,00	(4.301.544,00)	
02.05 02.05.01 044 002 5 2 3	Belanja Modal	172.430.080,00	171.602.000,00	(828.080,00)	
02.05 02.05.01 044 003	<b>Operasional Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan</b>	<b>642.156.000,00</b>	<b>639.665.248,00</b>	<b>(2.490.752,00)</b>	
02.05 02.05.01 044 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.05 02.05.01 044 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	463.159.000,00	460.668.248,00	(2.490.752,00)	
02.05 02.05.01 044 003 5 2 3	Belanja Modal	178.997.000,00	178.997.000,00	-	
02.05 02.05.01 045	<b>Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik</b>	<b>12.070.010.000,00</b>	<b>11.237.679.153,48</b>	<b>(832.330.846,52)</b>	
02.05 02.05.01 045 001	<b>Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik</b>	<b>3.491.199.000,00</b>	<b>3.297.772.520,17</b>	<b>(193.426.479,83)</b>	
02.05 02.05.01 045 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.05 02.05.01 045 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	985.999.200,00	954.027.462,00	(31.971.738,00)	
02.05 02.05.01 045 001 5 2 3	Belanja Modal	2.505.199.800,00	2.343.745.058,17	(161.454.741,83)	
02.05 02.05.01 045 002	<b>Pertamanan dan Perindang Jalan</b>	<b>8.578.811.000,00</b>	<b>7.939.906.633,31</b>	<b>(638.904.366,69)</b>	
02.05 02.05.01 045 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.05 02.05.01 045 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	5.945.405.410,00	5.585.716.883,50	(359.688.526,50)	
02.05 02.05.01 045 002 5 2 3	Belanja Modal	2.633.405.590,00	2.354.189.749,81	(279.215.840,19)	
01.03 02.05.01 046	<b>Program Pengelolaan Persampahan</b>	<b>19.458.289.000,00</b>	<b>18.589.673.808,52</b>	<b>(868.615.191,48)</b>	
01.03 02.05.01 046 001	<b>Pengurangan Sampah</b>	<b>2.215.104.000,00</b>	<b>2.056.207.737,79</b>	<b>(158.896.262,21)</b>	
01.03 02.05.01 046 001 5 2 1	Belanja Pegawai	252.470.000,00	250.485.000,00	(1.985.000,00)	
01.03 02.05.01 046 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.062.933.735,00	1.025.867.434,00	(37.066.301,00)	
01.03 02.05.01 046 001 5 2 3	Belanja Modal	899.700.265,00	779.855.303,79	(119.844.961,21)	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
01.03 02.05.01 046 002	<b>Penanganan Sampah</b>	<b>5.811.357.000,00</b>	<b>5.805.491.105,53</b>	<b>(5.865.894,47)</b>	
01.03 02.05.01 046 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.03 02.05.01 046 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	3.055.331.000,00	3.054.561.060,53	(769.939,47)	
01.03 02.05.01 046 002 5 2 3	Belanja Modal	2.756.026.000,00	2.750.930.045,00	(5.095.955,00)	
01.03 02.05.01 046 003	<b>Pemungutan Retribusi Kebersihan</b>	<b>1.365.132.000,00</b>	<b>1.335.551.154,00</b>	<b>(29.580.846,00)</b>	
01.03 02.05.01 046 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.03 02.05.01 046 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.365.132.000,00	1.335.551.154,00	(29.580.846,00)	
01.03 02.05.01 046 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
01.03 02.05.01 046 004	<b>Operasional Pembersihan dan Pengangkutan Sampah</b>	<b>10.066.696.000,00</b>	<b>9.392.423.811,20</b>	<b>(674.272.188,80)</b>	
01.03 02.05.01 046 004 5 2 1	Belanja Pegawai	555.000.000,00	441.450.000,00	(113.550.000,00)	
01.03 02.05.01 046 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	9.511.696.000,00	8.950.973.811,20	(560.722.188,80)	
01.03 02.05.01 046 004 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :</b>	<b>3.462.958.000,00</b>	<b>3.820.420.597,00</b>	<b>357.462.597,00</b>	
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH :</b>	<b>54.389.944.866,00</b>	<b>52.193.247.635,99</b>	<b>(2.196.697.230,01)</b>	
	<b>SURPLUS/(DEFISIT) :</b>	<b>(50.926.986.866,00)</b>	<b>(48.372.827.038,99)</b>	<b>2.554.159.827,01</b>	

## Keterangan :

- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum  
(Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR  
MACAM URUSAN : 02.06 - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
ORGANISASI : 02.06.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.06 02.06.01 4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	-	-	-	
02.06 02.06.01 00 00 5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>7.454.924.134,00</b>	<b>6.966.544.990,00</b>	<b>(488.379.144,00)</b>	
02.06 02.06.01 00 00 5 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>2.358.339.134,00</b>	<b>2.300.753.633,00</b>	<b>(57.585.501,00)</b>	
02.06 02.06.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	2.358.339.134,00	2.300.753.633,00	(57.585.501,00)	
02.06 02.06.01 00 00	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>5.096.585.000,00</b>	<b>4.665.791.357,00</b>	<b>(430.793.643,00)</b>	
02.06 02.06.01 001	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.014.450.000,00</b>	<b>972.367.723,00</b>	<b>(42.082.277,00)</b>	
02.06 02.06.01 001 018	<b>Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi</b>	<b>223.914.000,00</b>	<b>207.821.571,00</b>	<b>(16.092.429,00)</b>	
02.06 02.06.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.06 02.06.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	223.914.000,00	207.821.571,00	(16.092.429,00)	
02.06 02.06.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.06 02.06.01 001 019	<b>Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>790.536.000,00</b>	<b>764.546.152,00</b>	<b>(25.989.848,00)</b>	
02.06 02.06.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	161.132.800,00	159.803.736,00	(1.329.064,00)	
02.06 02.06.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	404.603.200,00	391.547.416,00	(13.055.784,00)	
02.06 02.06.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	224.800.000,00	213.195.000,00	(11.605.000,00)	
02.06 02.06.01 002	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>227.102.000,00</b>	<b>174.988.430,00</b>	<b>(52.113.570,00)</b>	
02.06 02.06.01 002 022	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor</b>	<b>67.000.000,00</b>	<b>65.859.500,00</b>	<b>(1.140.500,00)</b>	
02.06 02.06.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.06 02.06.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.950.000,00	(50.000,00)	
02.06 02.06.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	65.000.000,00	63.909.500,00	(1.090.500,00)	
02.06 02.06.01 002 024	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	<b>160.102.000,00</b>	<b>109.128.930,00</b>	<b>(50.973.070,00)</b>	
02.06 02.06.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.06 02.06.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	160.102.000,00	109.128.930,00	(50.973.070,00)	
02.06 02.06.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.06 02.06.01 005	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>8.750.000,00</b>	<b>8.670.000,00</b>	<b>(80.000,00)</b>	
02.06 02.06.01 005 006	<b>Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur</b>	<b>8.750.000,00</b>	<b>8.670.000,00</b>	<b>(80.000,00)</b>	
02.06 02.06.01 005 006 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.06 02.06.01 005 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	8.750.000,00	8.670.000,00	(80.000,00)	
02.06 02.06.01 005 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.06 02.06.01 006	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>37.696.000,00</b>	<b>29.280.900,00</b>	<b>(8.415.100,00)</b>	
02.06 02.06.01 006 005	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD</b>	<b>37.696.000,00</b>	<b>29.280.900,00</b>	<b>(8.415.100,00)</b>	
02.06 02.06.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.06 02.06.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	37.696.000,00	29.280.900,00	(8.415.100,00)	
02.06 02.06.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.06 02.06.01 047	<b>Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>2.222.523.000,00</b>	<b>1.960.932.550,00</b>	<b>(261.590.450,00)</b>	
02.06 02.06.01 047 001	<b>Pelayanan Identitas Penduduk</b>	<b>1.567.925.000,00</b>	<b>1.335.719.950,00</b>	<b>(232.205.050,00)</b>	
02.06 02.06.01 047 001 5 2 1	Belanja Pegawai	269.250.000,00	96.324.000,00	(172.926.000,00)	
02.06 02.06.01 047 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.298.675.000,00	1.239.395.950,00	(59.279.050,00)	
02.06 02.06.01 047 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.06 02.06.01 047 002	<b>Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk</b>	<b>654.598.000,00</b>	<b>625.212.600,00</b>	<b>(29.385.400,00)</b>	
02.06 02.06.01 047 002 5 2 1	Belanja Pegawai	324.450.000,00	322.663.000,00	(1.787.000,00)	
02.06 02.06.01 047 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	330.148.000,00	302.549.600,00	(27.598.400,00)	
02.06 02.06.01 047 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.06 02.06.01 048	<b>Program Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>472.724.000,00</b>	<b>440.197.658,00</b>	<b>(32.526.342,00)</b>	
02.06 02.06.01 048 001	<b>Pelayanan Kelahiran dan Kematian</b>	<b>401.214.000,00</b>	<b>370.694.481,00</b>	<b>(30.519.519,00)</b>	
02.06 02.06.01 048 001 5 2 1	Belanja Pegawai	54.000.000,00	32.400.000,00	(21.600.000,00)	
02.06 02.06.01 048 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	347.214.000,00	338.294.481,00	(8.919.519,00)	
02.06 02.06.01 048 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.06 02.06.01 048 002	<b>Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan</b>	<b>71.510.000,00</b>	<b>69.503.177,00</b>	<b>(2.006.823,00)</b>	
02.06 02.06.01 048 002 5 2 1	Belanja Pegawai	21.180.503,00	19.250.000,00	(1.930.503,00)	
02.06 02.06.01 048 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	50.329.497,00	50.253.177,00	(76.320,00)	
02.06 02.06.01 048 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.06 02.06.01 049	<b>Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data</b>	<b>1.113.340.000,00</b>	<b>1.079.354.096,00</b>	<b>(33.985.904,00)</b>	
02.06 02.06.01 049 001	<b>Kerjasama dan Inovasi Pelayanan</b>	<b>181.255.000,00</b>	<b>177.220.940,00</b>	<b>(4.034.060,00)</b>	
02.06 02.06.01 049 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.06 02.06.01 049 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	181.255.000,00	177.220.940,00	(4.034.060,00)	
02.06 02.06.01 049 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.06 02.06.01 049 002	<b>Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>932.085.000,00</b>	<b>902.133.156,00</b>	<b>(29.951.844,00)</b>	
02.06 02.06.01 049 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.06 02.06.01 049 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	125.485.000,00	122.521.000,00	(2.964.000,00)	
02.06 02.06.01 049 002 5 2 3	Belanja Modal	806.600.000,00	779.612.156,00	(26.987.844,00)	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH :</b>	<b>7.454.924.134,00</b>	<b>6.966.544.990,00</b>	<b>(488.379.144,00)</b>	
	<b>SURPLUS/(DEFISIT) :</b>	<b>(7.454.924.134,00)</b>	<b>(6.966.544.990,00)</b>	<b>488.379.144,00</b>	

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR  
 MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
 ORGANISASI : 02.07.01 - KECAMATAN TEGALREJO

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.07 02.07.01 00 00 4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>36.340.000,00</b>	<b>1.340.000,00</b>	
02.07 02.07.01 00 00 4 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>36.340.000,00</b>	<b>1.340.000,00</b>	
02.07 02.07.01 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	35.000.000,00	36.340.000,00	1.340.000,00	
02.07 02.07.01 00 00 4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum	35.000.000,00	36.340.000,00	1.340.000,00	
02.07 02.07.01 00 00 4 1 2 01 04	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - TPU Utoroloyo	35.000.000,00	36.340.000,00	1.340.000,00	1)PD No 5/2012
02.07 02.07.01 00 00 4 1 2 03	Retribusi Perizinan Tertentu	-	-	-	
02.07 02.07.01 00 00 4 1 2 03 06	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan	-	-	-	2)PD No 3/2012
02.07 02.07.01 00 00 5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>8.084.907.837,00</b>	<b>7.719.555.542,52</b>	<b>(365.352.294,48)</b>	
02.07 02.07.01 00 00 5 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>2.740.762.837,00</b>	<b>2.649.313.917,00</b>	<b>(91.448.920,00)</b>	
02.07 02.07.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	2.740.762.837,00	2.649.313.917,00	(91.448.920,00)	
02.07 02.07.01 00 00	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>5.344.145.000,00</b>	<b>5.070.241.625,52</b>	<b>(273.903.374,48)</b>	
02.07 02.07.01 001	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>804.017.000,00</b>	<b>738.858.494,00</b>	<b>(65.158.506,00)</b>	
02.07 02.07.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	104.470.000,00	104.340.495,00	(129.505,00)	
02.07 02.07.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	104.470.000,00	104.340.495,00	(129.505,00)	
02.07 02.07.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	699.547.000,00	634.517.999,00	(65.029.001,00)	
02.07 02.07.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	239.015.524,00	236.073.956,00	(2.941.568,00)	
02.07 02.07.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	321.471.476,00	270.779.883,00	(50.691.593,00)	
02.07 02.07.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	139.060.000,00	127.664.160,00	(11.395.840,00)	
02.07 02.07.01 002	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>157.415.000,00</b>	<b>144.734.800,00</b>	<b>(12.680.200,00)</b>	
02.07 02.07.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	88.955.000,00	87.582.000,00	(1.373.000,00)	
02.07 02.07.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	3.800.000,00	(100.000,00)	
02.07 02.07.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	85.055.000,00	83.782.000,00	(1.273.000,00)	
02.07 02.07.01 002 024	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	<b>68.460.000,00</b>	<b>57.152.800,00</b>	<b>(11.307.200,00)</b>	
02.07 02.07.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	68.460.000,00	57.152.800,00	(11.307.200,00)	
02.07 02.07.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.01 006	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>11.450.000,00</b>	<b>11.327.425,00</b>	<b>(122.575,00)</b>	
02.07 02.07.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	11.450.000,00	11.327.425,00	(122.575,00)	
02.07 02.07.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	11.450.000,00	11.327.425,00	(122.575,00)	
02.07 02.07.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.07 02.07.01 050	<b>Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo</b>	<b>4.371.263.000,00</b>	<b>4.175.320.906,52</b>	<b>(195.942.093,48)</b>	
02.07 02.07.01 050 001	<b>Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Tegalrejo</b>	<b>331.166.000,00</b>	<b>323.561.250,00</b>	<b>(7.604.750,00)</b>	
02.07 02.07.01 050 001 5 2 1	Belanja Pegawai	45.650.000,00	45.650.000,00	-	
02.07 02.07.01 050 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	285.516.000,00	277.911.250,00	(7.604.750,00)	
02.07 02.07.01 050 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.01 050 002	<b>Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Tegalrejo</b>	<b>188.450.000,00</b>	<b>185.279.769,00</b>	<b>(3.170.231,00)</b>	
02.07 02.07.01 050 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.01 050 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	188.450.000,00	185.279.769,00	(3.170.231,00)	
02.07 02.07.01 050 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.01 050 003	<b>Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Tegalrejo</b>	<b>484.873.000,00</b>	<b>464.544.650,00</b>	<b>(20.328.350,00)</b>	
02.07 02.07.01 050 003 5 2 1	Belanja Pegawai	24.000.000,00	24.000.000,00	-	
02.07 02.07.01 050 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	460.873.000,00	440.544.650,00	(20.328.350,00)	
02.07 02.07.01 050 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.01 050 004	<b>Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalrejo</b>	<b>520.376.000,00</b>	<b>507.901.690,00</b>	<b>(12.474.310,00)</b>	
02.07 02.07.01 050 004 5 2 1	Belanja Pegawai	3.500.000,00	3.350.000,00	(150.000,00)	
02.07 02.07.01 050 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	486.076.000,00	473.784.750,00	(12.291.250,00)	
02.07 02.07.01 050 004 5 2 3	Belanja Modal	30.800.000,00	30.766.940,00	(33.060,00)	
02.07 02.07.01 050 005	<b>Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kricak</b>	<b>592.199.000,00</b>	<b>579.891.500,00</b>	<b>(12.307.500,00)</b>	
02.07 02.07.01 050 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.01 050 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	592.199.000,00	579.891.500,00	(12.307.500,00)	
02.07 02.07.01 050 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.01 050 006	<b>Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Karangwaru</b>	<b>501.196.000,00</b>	<b>459.227.956,80</b>	<b>(41.968.043,20)</b>	
02.07 02.07.01 050 006 5 2 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	1.500.000,00	-	
02.07 02.07.01 050 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	329.196.000,00	325.082.000,00	(4.114.000,00)	
02.07 02.07.01 050 006 5 2 3	Belanja Modal	170.500.000,00	132.645.956,80	(37.854.043,20)	
02.07 02.07.01 050 007	<b>Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bener</b>	<b>476.463.000,00</b>	<b>446.770.755,84</b>	<b>(29.692.244,16)</b>	
02.07 02.07.01 050 007 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.01 050 007 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	306.463.000,00	295.930.500,00	(10.532.500,00)	
02.07 02.07.01 050 007 5 2 3	Belanja Modal	170.000.000,00	150.840.255,84	(19.159.744,16)	
02.07 02.07.01 050 008	<b>Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Tegalrejo</b>	<b>1.276.540.000,00</b>	<b>1.208.143.334,88</b>	<b>(68.396.665,12)</b>	
02.07 02.07.01 050 008 5 2 1	Belanja Pegawai	20.800.000,00	20.800.000,00	-	
02.07 02.07.01 050 008 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.255.740.000,00	1.187.343.334,88	(68.396.665,12)	
02.07 02.07.01 050 008 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>36.340.000,00</b>	<b>1.340.000,00</b>	
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH :</b>	<b>8.084.907.837,00</b>	<b>7.719.555.542,52</b>	<b>(365.352.294,48)</b>	
	<b>SURPLUS/(DEFISIT) :</b>	<b>(8.049.907.837,00)</b>	<b>(7.683.215.542,52)</b>	<b>366.692.294,48</b>	

Keterangan :

- 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)
- 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3)

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR  
 MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
 ORGANISASI : 02.07.02 - KECAMATAN JETIS

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.07 02.07.02 00 00 4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	-	-	-	
02.07 02.07.02 00 00 4 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	-	-	-	
02.07 02.07.02 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	-	-	-	
02.07 02.07.02 00 00 4 1 2 03	Retribusi Perizinan Tertentu	-	-	-	
02.07 02.07.02 00 00 4 1 2 03 06	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan	-	-	-	1)PD No 3/2012
02.07 02.07.02 00 00 5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>6.382.624.424,00</b>	<b>6.071.847.239,90</b>	<b>(310.777.184,10)</b>	
02.07 02.07.02 00 00 5 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1.962.442.423,00</b>	<b>1.872.142.173,00</b>	<b>(90.300.250,00)</b>	
02.07 02.07.02 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	1.962.442.423,00	1.872.142.173,00	(90.300.250,00)	
02.07 02.07.02 00 00	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>4.420.182.001,00</b>	<b>4.199.705.066,90</b>	<b>(220.476.934,10)</b>	
02.07 02.07.02 001	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	<b>977.776.601,00</b>	<b>949.361.715,00</b>	<b>(28.414.886,00)</b>	
02.07 02.07.02 001 018	<b>Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi</b>	<b>101.444.000,00</b>	<b>97.645.285,00</b>	<b>(3.798.715,00)</b>	
02.07 02.07.02 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.02 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	101.444.000,00	97.645.285,00	(3.798.715,00)	
02.07 02.07.02 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.02 001 019 5 2	<b>Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>876.332.601,00</b>	<b>851.716.430,00</b>	<b>(24.616.171,00)</b>	
02.07 02.07.02 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	266.867.901,00	262.547.901,00	(4.320.000,00)	
02.07 02.07.02 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	399.075.700,00	380.135.599,00	(18.940.101,00)	
02.07 02.07.02 001 019 5 2 3	Belanja Modal	210.389.000,00	209.032.930,00	(1.356.070,00)	
02.07 02.07.02 002	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	<b>197.191.000,00</b>	<b>179.613.398,75</b>	<b>(17.577.601,25)</b>	
02.07 02.07.02 002 022	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor</b>	<b>117.167.000,00</b>	<b>116.233.146,75</b>	<b>(933.853,25)</b>	
02.07 02.07.02 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.02 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	22.600.000,00	21.850.992,75	(749.007,25)	
02.07 02.07.02 002 022 5 2 3	Belanja Modal	94.567.000,00	94.382.154,00	(184.846,00)	
02.07 02.07.02 002 024	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	<b>80.024.000,00</b>	<b>63.380.252,00</b>	<b>(16.643.748,00)</b>	
02.07 02.07.02 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.02 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	80.024.000,00	63.380.252,00	(16.643.748,00)	
02.07 02.07.02 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.02 006	<i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>	<b>8.472.000,00</b>	<b>8.462.575,00</b>	<b>(9.425,00)</b>	
02.07 02.07.02 006 005	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD</b>	<b>8.472.000,00</b>	<b>8.462.575,00</b>	<b>(9.425,00)</b>	
02.07 02.07.02 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.02 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	8.472.000,00	8.462.575,00	(9.425,00)	
02.07 02.07.02 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.07 02.07.02 051	<b>Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis</b>	<b>3.236.742.400,00</b>	<b>3.062.267.378,15</b>	<b>(174.475.021,85)</b>	
02.07 02.07.02 051 001	<b>Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Jetis</b>	<b>255.360.000,00</b>	<b>226.137.800,00</b>	<b>(29.222.200,00)</b>	
02.07 02.07.02 051 001 5 2 1	Belanja Pegawai	49.860.000,00	48.440.000,00	(1.420.000,00)	
02.07 02.07.02 051 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	205.500.000,00	177.697.800,00	(27.802.200,00)	
02.07 02.07.02 051 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.02 051 002	<b>Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Jetis</b>	<b>213.682.000,00</b>	<b>213.042.438,00</b>	<b>(639.562,00)</b>	
02.07 02.07.02 051 002 5 2 1	Belanja Pegawai	1.600.000,00	1.600.000,00	-	
02.07 02.07.02 051 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	212.082.000,00	211.442.438,00	(639.562,00)	
02.07 02.07.02 051 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.01 051 003	<b>Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Jetis</b>	<b>372.224.000,00</b>	<b>368.622.000,00</b>	<b>(3.602.000,00)</b>	
02.07 02.07.01 051 003 5 2 1	Belanja Pegawai	11.850.000,00	11.850.000,00	-	
02.07 02.07.01 051 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	360.374.000,00	356.772.000,00	(3.602.000,00)	
02.07 02.07.01 051 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.02 051 004	<b>Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bumijo</b>	<b>548.867.000,00</b>	<b>541.060.147,00</b>	<b>(7.806.853,00)</b>	
02.07 02.07.02 051 004 5 2 1	Belanja Pegawai	2.600.000,00	2.600.000,00	-	
02.07 02.07.02 051 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	546.267.000,00	538.460.147,00	(7.806.853,00)	
02.07 02.07.02 051 004 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.02 051 005	<b>Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Cokrodiningratan</b>	<b>514.022.000,00</b>	<b>505.598.700,00</b>	<b>(8.423.300,00)</b>	
02.07 02.07.02 051 005 5 2 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	-	(1.200.000,00)	
02.07 02.07.02 051 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	512.822.000,00	505.598.700,00	(7.223.300,00)	
02.07 02.07.02 051 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.02 051 006	<b>Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gowongan</b>	<b>532.746.000,00</b>	<b>505.262.000,00</b>	<b>(27.484.000,00)</b>	
02.07 02.07.02 051 006 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.02 051 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	532.746.000,00	505.262.000,00	(27.484.000,00)	
02.07 02.07.02 051 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.02 051 007	<b>Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembangunan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Jetis</b>	<b>799.841.400,00</b>	<b>702.544.293,15</b>	<b>(97.297.106,85)</b>	
02.07 02.07.02 051 007 5 2 1	Belanja Pegawai	5.850.000,00	5.850.000,00	-	
02.07 02.07.02 051 007 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	793.991.400,00	696.694.293,15	(97.297.106,85)	
02.07 02.07.02 051 007 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH :</b>	<b>6.382.624.424,00</b>	<b>6.071.847.239,90</b>	<b>(310.777.184,10)</b>	
	<b>SURPLUS/(DEFISIT) :</b>	<b>(6.382.624.424,00)</b>	<b>(6.071.847.239,90)</b>	<b>310.777.184,10</b>	

Keterangan :

- 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3)



URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR  
 MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
 ORGANISASI : 02.07.03 - KECAMATAN GONDOKUSUMAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.07 02.07.03 00 00 4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	-	
02.07 02.07.03 00 00 4 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	-	
02.07 02.07.03 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	325.000,00	325.000,00	-	
02.07 02.07.03 00 00 4 1 2 03	Retribusi Perizinan Tertentu	325.000,00	325.000,00	-	
02.07 02.07.03 00 00 4 1 2 03 06	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan	325.000,00	325.000,00	-	1)PD No 3/2012
02.07 02.07.03 00 00 5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>9.488.051.450,00</b>	<b>8.813.591.975,67</b>	<b>(674.459.474,33)</b>	
02.07 02.07.03 00 00 5 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>2.976.016.031,00</b>	<b>2.820.986.539,00</b>	<b>(155.029.492,00)</b>	
02.07 02.07.03 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	2.976.016.031,00	2.820.986.539,00	(155.029.492,00)	
02.07 02.07.03 00 00	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>6.512.035.419,00</b>	<b>5.992.605.436,67</b>	<b>(519.429.982,33)</b>	
02.07 02.07.03 001	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.134.461.274,00</b>	<b>859.585.058,00</b>	<b>(274.876.216,00)</b>	
02.07 02.07.03 001 018	<b>Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi</b>	<b>99.331.000,00</b>	<b>99.077.600,00</b>	<b>(253.400,00)</b>	
02.07 02.07.03 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.03 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	99.331.000,00	99.077.600,00	(253.400,00)	
02.07 02.07.03 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.03 001 019	<b>Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>1.035.130.274,00</b>	<b>760.507.458,00</b>	<b>(274.622.816,00)</b>	
02.07 02.07.03 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	254.295.524,00	253.751.575,00	(543.949,00)	
02.07 02.07.03 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	594.531.500,00	338.948.183,00	(255.583.317,00)	
02.07 02.07.03 001 019 5 2 3	Belanja Modal	186.303.250,00	167.807.700,00	(18.495.550,00)	
02.07 02.07.03 002	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>722.068.374,00</b>	<b>668.089.415,04</b>	<b>(53.978.958,96)</b>	
02.07 02.07.03 002 022	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor</b>	<b>633.042.374,00</b>	<b>600.548.077,79</b>	<b>(32.494.296,21)</b>	
02.07 02.07.03 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.03 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	633.042.374,00	600.548.077,79	(32.494.296,21)	
02.07 02.07.03 002 022 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.03 002 024	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	<b>89.026.000,00</b>	<b>67.541.337,25</b>	<b>(21.484.662,75)</b>	
02.07 02.07.03 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.03 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	89.026.000,00	67.541.337,25	(21.484.662,75)	
02.07 02.07.03 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.03 006	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>5.385.000,00</b>	<b>5.379.000,00</b>	<b>(6.000,00)</b>	
02.07 02.07.03 006 005	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD</b>	<b>5.385.000,00</b>	<b>5.379.000,00</b>	<b>(6.000,00)</b>	
02.07 02.07.03 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.03 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	5.385.000,00	5.379.000,00	(6.000,00)	
02.07 02.07.03 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.07 02.07.03 052	<b>Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Gondokusuman</b>	<b>4.650.120.771,00</b>	<b>4.459.551.963,63</b>	<b>(190.568.807,37)</b>	
02.07 02.07.03 052 001	<b>Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gondokusuman</b>	<b>200.225.500,00</b>	<b>117.108.800,00</b>	<b>(83.116.700,00)</b>	
02.07 02.07.03 052 001 5 2 1	Belanja Pegawai	69.660.000,00	39.500.000,00	(30.160.000,00)	
02.07 02.07.03 052 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	130.565.500,00	77.608.800,00	(52.956.700,00)	
02.07 02.07.03 052 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.03 052 002	<b>Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gondokusuman</b>	<b>55.090.594,00</b>	<b>55.090.594,00</b>	<b>-</b>	
02.07 02.07.03 052 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.03 052 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	55.090.594,00	55.090.594,00	-	
02.07 02.07.03 052 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.03 052 003	<b>Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondokusuman</b>	<b>430.582.500,00</b>	<b>428.721.500,00</b>	<b>(1.861.000,00)</b>	
02.07 02.07.03 052 003 5 2 1	Belanja Pegawai	91.325.000,00	91.325.000,00	-	
02.07 02.07.03 052 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	339.257.500,00	337.396.500,00	(1.861.000,00)	
02.07 02.07.03 052 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.03 052 004	<b>Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Demangan</b>	<b>516.925.000,00</b>	<b>509.941.000,00</b>	<b>(6.984.000,00)</b>	
02.07 02.07.03 052 004 5 2 1	Belanja Pegawai	2.200.000,00	2.200.000,00	-	
02.07 02.07.03 052 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	514.725.000,00	507.741.000,00	(6.984.000,00)	
02.07 02.07.03 052 004 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.03 052 005	<b>Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kotabaru</b>	<b>527.043.000,00</b>	<b>522.732.100,00</b>	<b>(4.310.900,00)</b>	
02.07 02.07.03 052 005 5 2 1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	2.400.000,00	-	
02.07 02.07.03 052 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	524.643.000,00	520.332.100,00	(4.310.900,00)	
02.07 02.07.03 052 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.03 052 006	<b>Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Klitren</b>	<b>500.391.474,00</b>	<b>471.322.200,00</b>	<b>(29.069.274,00)</b>	
02.07 02.07.03 052 006 5 2 1	Belanja Pegawai	4.400.000,00	4.400.000,00	-	
02.07 02.07.03 052 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	495.991.474,00	466.922.200,00	(29.069.274,00)	
02.07 02.07.03 052 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.03 052 007	<b>Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Baciro</b>	<b>530.998.308,00</b>	<b>484.814.100,00</b>	<b>(46.184.208,00)</b>	
02.07 02.07.03 052 007 5 2 1	Belanja Pegawai	3.150.000,00	3.150.000,00	-	
02.07 02.07.03 052 007 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	527.848.308,00	481.664.100,00	(46.184.208,00)	
02.07 02.07.03 052 007 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.03 052 008	<b>Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Terban</b>	<b>559.415.225,00</b>	<b>548.346.000,00</b>	<b>(11.069.225,00)</b>	
02.07 02.07.03 052 008 5 2 1	Belanja Pegawai	7.840.000,00	7.240.000,00	(600.000,00)	
02.07 02.07.03 052 008 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	551.575.225,00	541.106.000,00	(10.469.225,00)	
02.07 02.07.03 052 008 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.03 052 009	<b>Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondokusuman</b>	<b>1.329.449.170,00</b>	<b>1.321.475.669,63</b>	<b>(7.973.500,37)</b>	
02.07 02.07.03 052 009 5 2 1	Belanja Pegawai	8.955.000,00	1.350.000,00	(7.605.000,00)	
02.07 02.07.03 052 009 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.320.494.170,00	1.320.125.669,63	(368.500,37)	
02.07 02.07.03 052 009 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>-</b>	
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH :</b>	<b>9.488.051.450,00</b>	<b>8.813.591.975,67</b>	<b>(674.459.474,33)</b>	
	<b>SURPLUS/(DEFISIT) :</b>	<b>(9.487.726.450,00)</b>	<b>(8.813.266.975,67)</b>	<b>674.459.474,33</b>	

Keterangan :

- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3)

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR  
 MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
 ORGANISASI : 02.07.04 - KECAMATAN DANUREJAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.07 02.07.04 00 00 4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	-	-	-	1)PD No 3/2012
02.07 02.07.04 00 00 4 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	-	-	-	
02.07 02.07.04 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	-	-	-	
02.07 02.07.04 00 00 4 1 2 03	Retribusi Perizinan Tertentu	-	-	-	
02.07 02.07.04 00 00 4 1 2 03 06	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan	-	-	-	
02.07 02.07.04 00 00 5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>5.831.806.938,00</b>	<b>5.500.777.701,25</b>	<b>(331.029.236,75)</b>	
02.07 02.07.04 00 00 5 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>2.180.489.138,00</b>	<b>2.097.340.619,00</b>	<b>(83.148.519,00)</b>	
02.07 02.07.04 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai (DAU dan PAD)	2.180.489.138,00	2.097.340.619,00	(83.148.519,00)	
02.07 02.07.04 00 00	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>3.651.317.800,00</b>	<b>3.403.437.082,25</b>	<b>(247.880.717,75)</b>	
02.07 02.07.04 01	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	<b>716.340.000,00</b>	<b>648.653.018,34</b>	<b>(67.686.981,66)</b>	
02.07 02.07.04 001 018	<b>Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi</b>	<b>123.118.000,00</b>	<b>117.597.700,00</b>	<b>(5.520.300,00)</b>	
02.07 02.07.04 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.04 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	123.118.000,00	117.597.700,00	(5.520.300,00)	
02.07 02.07.04 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.04 001 019	<b>Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>593.222.000,00</b>	<b>531.055.318,34</b>	<b>(62.166.681,66)</b>	
02.07 02.07.04 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	158.035.118,00	157.646.206,72	(388.911,28)	
02.07 02.07.04 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	333.962.679,00	274.929.936,62	(59.032.742,38)	
02.07 02.07.04 001 019 5 2 3	Belanja Modal	101.224.203,00	98.479.175,00	(2.745.028,00)	
02.07 02.07.04 002	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	<b>139.370.000,00</b>	<b>86.962.549,00</b>	<b>(52.407.451,00)</b>	
02.07 02.07.04 002 022	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor</b>	<b>62.440.000,00</b>	<b>54.610.000,00</b>	<b>(7.830.000,00)</b>	
02.07 02.07.04 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.04 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	17.440.000,00	10.503.000,00	(6.937.000,00)	
02.07 02.07.04 002 022 5 2 3	Belanja Modal	45.000.000,00	44.107.000,00	(893.000,00)	
02.07 02.07.04 002 024	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	<b>76.930.000,00</b>	<b>32.352.549,00</b>	<b>(44.577.451,00)</b>	
02.07 02.07.04 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.04 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	76.930.000,00	32.352.549,00	(44.577.451,00)	
02.07 02.07.04 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.04 006	<i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>	<b>6.397.000,00</b>	<b>6.199.000,00</b>	<b>(198.000,00)</b>	
02.07 02.07.04 006 005	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD</b>	<b>6.397.000,00</b>	<b>6.199.000,00</b>	<b>(198.000,00)</b>	
02.07 02.07.04 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.04 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	6.397.000,00	6.199.000,00	(198.000,00)	
02.07 02.07.04 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.07 02.07.04 053	<b>Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan</b>	<b>2.789.210.800,00</b>	<b>2.661.622.514,91</b>	<b>(127.588.285,09)</b>	
02.07 02.07.04 053 001	<b>Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Danurejan</b>	<b>212.964.000,00</b>	<b>171.806.300,00</b>	<b>(41.157.700,00)</b>	
02.07 02.07.04 053 001 5 2 1	Belanja Pegawai	64.000.000,00	58.000.000,00	(6.000.000,00)	
02.07 02.07.04 053 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	148.964.000,00	113.806.300,00	(35.157.700,00)	
02.07 02.07.04 053 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.04 053 002	<b>Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Danurejan</b>	<b>118.529.000,00</b>	<b>114.447.236,64</b>	<b>(4.081.763,36)</b>	
02.07 02.07.04 053 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.04 053 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	118.529.000,00	114.447.236,64	(4.081.763,36)	
02.07 02.07.04 053 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.04 053 003	<b>Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Danurejan</b>	<b>349.001.000,00</b>	<b>301.376.000,00</b>	<b>(47.625.000,00)</b>	
02.07 02.07.04 053 003 5 2 1	Belanja Pegawai	795.000,00	-	(795.000,00)	
02.07 02.07.04 053 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	348.206.000,00	301.376.000,00	(46.830.000,00)	
02.07 02.07.04 053 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.04 053 004	<b>Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryatmaja</b>	<b>508.534.000,00</b>	<b>500.127.640,00</b>	<b>(8.406.360,00)</b>	
02.07 02.07.04 053 004 5 2 1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	4.200.000,00	-	
02.07 02.07.04 053 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	504.334.000,00	495.927.640,00	(8.406.360,00)	
02.07 02.07.04 053 004 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.04 053 005	<b>Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung</b>	<b>489.907.000,00</b>	<b>478.935.438,27</b>	<b>(10.971.561,73)</b>	
02.07 02.07.04 053 005 5 2 1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	4.200.000,00	-	
02.07 02.07.04 053 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	485.707.000,00	474.735.438,27	(10.971.561,73)	
02.07 02.07.04 053 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.04 053 006	<b>Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bausaran</b>	<b>496.594.000,00</b>	<b>489.169.000,00</b>	<b>(7.425.000,00)</b>	
02.07 02.07.04 053 006 5 2 1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	4.200.000,00	-	
02.07 02.07.04 053 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	492.394.000,00	484.969.000,00	(7.425.000,00)	
02.07 02.07.04 053 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.04 053 007	<b>Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Danurejan</b>	<b>613.681.800,00</b>	<b>605.760.900,00</b>	<b>(7.920.900,00)</b>	
02.07 02.07.04 053 007 5 2 1	Belanja Pegawai	9.450.000,00	9.450.000,00	-	
02.07 02.07.04 053 007 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	604.231.800,00	596.310.900,00	(7.920.900,00)	
02.07 02.07.04 053 007 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH :</b>	<b>5.831.806.938,00</b>	<b>5.500.777.701,25</b>	<b>(331.029.236,75)</b>	
	<b>SURPLUS/(DEFISIT) :</b>	<b>(5.831.806.938,00)</b>	<b>(5.500.777.701,25)</b>	<b>331.029.236,75</b>	

Keterangan :

- 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3)

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR  
 MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
 ORGANISASI : 02.07.05 - KECAMATAN GEDONGTENGEN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.07 02.07.05 00 00 4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	-	-	-	
02.07 02.07.05 00 00 4 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	-	-	-	
02.07 02.07.05 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	-	-	-	
02.07 02.07.05 00 00 4 1 2 03	Retribusi Perizinan Tertentu	-	-	-	
02.07 02.07.05 00 00 4 1 2 03 06	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan	-	-	-	1)PD No 3/2012
02.07 02.07.05 00 00 5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>4.656.511.561,00</b>	<b>4.520.124.740,37</b>	<b>(136.386.820,63)</b>	
02.07 02.07.05 00 00 5 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1.545.147.588,00</b>	<b>1.492.456.730,00</b>	<b>(52.690.858,00)</b>	
02.07 02.07.05 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	1.545.147.588,00	1.492.456.730,00	(52.690.858,00)	
02.07 02.07.05 00 00	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>3.111.363.973,00</b>	<b>3.027.668.010,37</b>	<b>(83.695.962,63)</b>	
02.07 02.07.05 001	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>826.888.000,00</b>	<b>785.116.277,00</b>	<b>(41.771.723,00)</b>	
02.07 02.07.05 001 018	<b>Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak dari Provinsi)</b>	<b>102.102.000,00</b>	<b>98.493.286,00</b>	<b>(3.608.714,00)</b>	
02.07 02.07.05 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.05 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	102.102.000,00	98.493.286,00	(3.608.714,00)	
02.07 02.07.05 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.05 001 019	<b>Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi)</b>	<b>724.786.000,00</b>	<b>686.622.991,00</b>	<b>(38.163.009,00)</b>	
02.07 02.07.05 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	237.935.807,00	234.455.807,00	(3.480.000,00)	
02.07 02.07.05 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	338.302.303,00	323.567.564,00	(14.734.739,00)	
02.07 02.07.05 001 019 5 2 3	Belanja Modal	148.547.890,00	128.599.620,00	(19.948.270,00)	
02.07 02.07.05 002	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>343.829.500,00</b>	<b>333.105.574,00</b>	<b>(10.723.926,00)</b>	
02.07 02.07.05 002 022	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor</b>	<b>289.451.500,00</b>	<b>288.027.110,00</b>	<b>(1.424.390,00)</b>	
02.07 02.07.05 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.05 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	10.651.500,00	10.585.110,00	(66.390,00)	
02.07 02.07.05 002 022 5 2 3	Belanja Modal	278.800.000,00	277.442.000,00	(1.358.000,00)	
02.07 02.07.05 002 024	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	<b>54.378.000,00</b>	<b>45.078.464,00</b>	<b>(9.299.536,00)</b>	
02.07 02.07.05 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.05 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	54.378.000,00	45.078.464,00	(9.299.536,00)	
02.07 02.07.05 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.05 006	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>8.385.000,00</b>	<b>8.354.800,00</b>	<b>(30.200,00)</b>	
02.07 02.07.05 006 005	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD</b>	<b>8.385.000,00</b>	<b>8.354.800,00</b>	<b>(30.200,00)</b>	
02.07 02.07.05 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.05 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	8.385.000,00	8.354.800,00	(30.200,00)	
02.07 02.07.05 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.07 02.07.05 054	<b>Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen</b>	<b>1.932.261.473,00</b>	<b>1.901.091.359,37</b>	<b>(31.170.113,63)</b>	
02.07 02.07.05 054 001	<b>Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gedongtengen</b>	<b>124.203.000,00</b>	<b>119.933.000,00</b>	<b>(4.270.000,00)</b>	
02.07 02.07.05 054 001 5 2 1	Belanja Pegawai	56.400.000,00	56.400.000,00	-	
02.07 02.07.05 054 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	67.803.000,00	63.533.000,00	(4.270.000,00)	
02.07 02.07.05 054 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.05 054 002	<b>Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gedongtengen</b>	<b>94.069.973,00</b>	<b>90.820.313,00</b>	<b>(3.249.660,00)</b>	
02.07 02.07.05 054 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.05 054 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	94.069.973,00	90.820.313,00	(3.249.660,00)	
02.07 02.07.05 054 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.05 054 003	<b>Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gedongtengen</b>	<b>160.924.000,00</b>	<b>159.433.750,00</b>	<b>(1.490.250,00)</b>	
02.07 02.07.05 054 003 5 2 1	Belanja Pegawai	7.800.000,00	7.800.000,00	-	
02.07 02.07.05 054 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	153.124.000,00	151.633.750,00	(1.490.250,00)	
02.07 02.07.05 054 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.05 054 004	<b>Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pringgokusuman</b>	<b>550.988.900,00</b>	<b>545.979.000,00</b>	<b>(5.009.900,00)</b>	
02.07 02.07.05 054 004 5 2 1	Belanja Pegawai	2.250.000,00	2.250.000,00	-	
02.07 02.07.05 054 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	548.738.900,00	543.729.000,00	(5.009.900,00)	
02.07 02.07.05 054 004 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.05 054 005	<b>Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sosromenduran</b>	<b>525.488.600,00</b>	<b>517.676.900,00</b>	<b>(7.811.700,00)</b>	
02.07 02.07.05 054 005 5 2 1	Belanja Pegawai	700.000,00	700.000,00	-	
02.07 02.07.05 054 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	524.788.600,00	516.976.900,00	(7.811.700,00)	
02.07 02.07.05 054 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.05 054 006	<b>Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gedongtengen</b>	<b>476.587.000,00</b>	<b>467.248.396,37</b>	<b>(9.338.603,63)</b>	
02.07 02.07.05 054 006 5 2 1	Belanja Pegawai	11.500.000,00	11.500.000,00	-	
02.07 02.07.05 054 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	465.087.000,00	455.748.396,37	(9.338.603,63)	
02.07 02.07.05 054 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH :</b>	<b>4.656.511.561,00</b>	<b>4.520.124.740,37</b>	<b>(136.386.820,63)</b>	
	<b>SURPLUS/(DEFISIT) :</b>	<b>(4.656.511.561,00)</b>	<b>(4.520.124.740,37)</b>	<b>136.386.820,63</b>	

Keterangan :

- 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3)

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR  
 MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
 ORGANISASI : 02.07.06 - KECAMATAN PAKUALAMAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.07 02.07.06 00 00 4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	-	-	-	
02.07 02.07.06 00 00 4 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	-	-	-	
02.07 02.07.06 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	-	-	-	
02.07 02.07.06 00 00 4 1 2 03	Retribusi Perizinan Tertentu	-	-	-	
02.07 02.07.06 00 00 4 1 2 03 06	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan	-	-	-	1)PD No 3/2012
02.07 02.07.06 00 00 5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>4.576.944.883,00</b>	<b>4.421.033.447,00</b>	<b>(155.911.436,00)</b>	
02.07 02.07.06 00 00 5 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1.583.191.883,00</b>	<b>1.494.287.935,00</b>	<b>(88.903.948,00)</b>	
02.07 02.07.06 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	1.583.191.883,00	1.494.287.935,00	(88.903.948,00)	
02.07 02.07.06 00 00	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>2.993.753.000,00</b>	<b>2.926.745.512,00</b>	<b>(67.007.488,00)</b>	
02.07 02.07.06 001	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.104.453.000,00</b>	<b>1.059.446.513,00</b>	<b>(45.006.487,00)</b>	
02.07 02.07.06 001 018	<b>Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi</b>	<b>48.160.000,00</b>	<b>47.462.000,00</b>	<b>(698.000,00)</b>	
02.07 02.07.06 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.06 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	48.160.000,00	47.462.000,00	(698.000,00)	
02.07 02.07.06 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.06 001 019	<b>Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>1.056.293.000,00</b>	<b>1.011.984.513,00</b>	<b>(44.308.487,00)</b>	
02.07 02.07.06 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	255.101.868,00	255.101.868,00	-	
02.07 02.07.06 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	228.081.832,00	214.081.345,00	(14.000.487,00)	
02.07 02.07.06 001 019 5 2 3	Belanja Modal	573.109.300,00	542.801.300,00	(30.308.000,00)	
02.07 02.07.06 002	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>154.045.000,00</b>	<b>150.878.340,00</b>	<b>(3.166.660,00)</b>	
02.07 02.07.06 002 022	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor</b>	<b>101.535.000,00</b>	<b>101.303.000,00</b>	<b>(232.000,00)</b>	
02.07 02.07.06 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.06 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	
02.07 02.07.06 002 022 5 2 3	Belanja Modal	99.535.000,00	99.303.000,00	(232.000,00)	
02.07 02.07.06 002 024	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	<b>52.510.000,00</b>	<b>49.575.340,00</b>	<b>(2.934.660,00)</b>	
02.07 02.07.06 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.06 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	52.510.000,00	49.575.340,00	(2.934.660,00)	
02.07 02.07.06 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.06 006	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>11.686.000,00</b>	<b>11.685.100,00</b>	<b>(900,00)</b>	
02.07 02.07.06 006 005	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD</b>	<b>11.686.000,00</b>	<b>11.685.100,00</b>	<b>(900,00)</b>	
02.07 02.07.06 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.06 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	11.686.000,00	11.685.100,00	(900,00)	
02.07 02.07.06 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.07 02.07.06 055	<b>Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Pakualaman</b>	<b>1.723.569.000,00</b>	<b>1.704.735.559,00</b>	<b>(18.833.441,00)</b>	
02.07 02.07.06 055 001	<b>Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Pakualaman</b>	<b>152.019.000,00</b>	<b>150.883.500,00</b>	<b>(1.135.500,00)</b>	
02.07 02.07.06 055 001 5 2 1	Belanja Pegawai	109.700.000,00	109.700.000,00	-	
02.07 02.07.06 055 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	42.319.000,00	41.183.500,00	(1.135.500,00)	
02.07 02.07.06 055 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.06 055 002	<b>Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Pakualaman</b>	<b>80.693.000,00</b>	<b>79.067.659,00</b>	<b>(1.625.341,00)</b>	
02.07 02.07.06 055 002 5 2 1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	4.200.000,00	-	
02.07 02.07.06 055 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	76.493.000,00	74.867.659,00	(1.625.341,00)	
02.07 02.07.06 055 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.06 055 003	<b>Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Pakualaman</b>	<b>173.868.000,00</b>	<b>173.303.000,00</b>	<b>(565.000,00)</b>	
02.07 02.07.06 055 003 5 2 1	Belanja Pegawai	6.350.000,00	6.350.000,00	-	
02.07 02.07.06 055 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	167.518.000,00	166.953.000,00	(565.000,00)	
02.07 02.07.06 055 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.06 055 004	<b>Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purwokinanti</b>	<b>563.251.000,00</b>	<b>560.372.400,00</b>	<b>(2.878.600,00)</b>	
02.07 02.07.06 055 004 5 2 1	Belanja Pegawai	5.250.000,00	5.250.000,00	-	
02.07 02.07.06 055 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	558.001.000,00	555.122.400,00	(2.878.600,00)	
02.07 02.07.06 055 004 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.06 055 005	<b>Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gunungketur</b>	<b>492.708.000,00</b>	<b>481.334.000,00</b>	<b>(11.374.000,00)</b>	
02.07 02.07.06 055 005 5 2 1	Belanja Pegawai	7.025.000,00	7.025.000,00	-	
02.07 02.07.06 055 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	485.683.000,00	474.309.000,00	(11.374.000,00)	
02.07 02.07.06 055 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.06 055 006	<b>Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Pakualaman</b>	<b>261.030.000,00</b>	<b>259.775.000,00</b>	<b>(1.255.000,00)</b>	
02.07 02.07.06 055 006 5 2 1	Belanja Pegawai	8.200.000,00	8.200.000,00	-	
02.07 02.07.06 055 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	252.830.000,00	251.575.000,00	(1.255.000,00)	
02.07 02.07.06 055 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH :</b>	<b>4.576.944.883,00</b>	<b>4.421.033.447,00</b>	<b>(155.911.436,00)</b>	
	<b>SURPLUS/(DEFISIT) :</b>	<b>(4.576.944.883,00)</b>	<b>(4.421.033.447,00)</b>	<b>155.911.436,00</b>	

Keterangan :

- 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3)



URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR  
 MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
 ORGANISASI : 02.07.07 - KECAMATAN NGAMPILAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.07 02.07.07 00 00 4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>555.200,00</b>	<b>555.200,00</b>	-	
02.07 02.07.07 00 00 4 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>555.200,00</b>	<b>555.200,00</b>	-	
02.07 02.07.07 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	555.200,00	555.200,00	-	
02.07 02.07.07 00 00 4 1 2 03	Retribusi Perizinan Tertentu	555.200,00	555.200,00	-	
02.07 02.07.07 00 00 4 1 2 03 06	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan	555.200,00	555.200,00	-	1)PD No 3/2012
02.07 02.07.07 00 00 5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>4.769.585.417,00</b>	<b>4.547.793.174,55</b>	<b>(221.792.242,45)</b>	
02.07 02.07.07 00 00 5 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1.577.086.417,00</b>	<b>1.521.644.510,00</b>	<b>(55.441.907,00)</b>	
02.07 02.07.07 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	1.577.086.417,00	1.521.644.510,00	(55.441.907,00)	
02.07 02.07.07 00 00	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>3.192.499.000,00</b>	<b>3.026.148.664,55</b>	<b>(166.350.335,45)</b>	
02.07 02.07.07 001	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>646.835.000,00</b>	<b>623.248.772,00</b>	<b>(23.586.228,00)</b>	
02.07 02.07.07 001 018	<b>Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi</b>	<b>70.263.000,00</b>	<b>70.254.000,00</b>	<b>(9.000,00)</b>	
02.07 02.07.07 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.07 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	70.263.000,00	70.254.000,00	(9.000,00)	
02.07 02.07.07 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.07 001 019	<b>Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>576.572.000,00</b>	<b>552.994.772,00</b>	<b>(23.577.228,00)</b>	
02.07 02.07.07 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	196.701.868,00	196.701.868,00	-	
02.07 02.07.07 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	287.772.800,00	281.000.362,00	(6.772.438,00)	
02.07 02.07.07 001 019 5 2 3	Belanja Modal	92.097.332,00	75.292.542,00	(16.804.790,00)	
02.07 02.07.07 002	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>349.630.000,00</b>	<b>340.507.856,00</b>	<b>(9.122.144,00)</b>	
02.07 02.07.07 002 022	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor</b>	<b>297.340.000,00</b>	<b>290.258.156,00</b>	<b>(7.081.844,00)</b>	
02.07 02.07.07 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.07 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	4.523.000,00	4.508.156,00	(14.844,00)	
02.07 02.07.07 002 022 5 2 3	Belanja Modal	292.817.000,00	285.750.000,00	(7.067.000,00)	
02.07 02.07.07 002 024	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	<b>52.290.000,00</b>	<b>50.249.700,00</b>	<b>(2.040.300,00)</b>	
02.07 02.07.07 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.07 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	52.290.000,00	50.249.700,00	(2.040.300,00)	
02.07 02.07.07 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.07 006	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>11.516.000,00</b>	<b>11.366.000,00</b>	<b>(150.000,00)</b>	
02.07 02.07.07 006 005	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD</b>	<b>11.516.000,00</b>	<b>11.366.000,00</b>	<b>(150.000,00)</b>	
02.07 02.07.07 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.07 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	11.516.000,00	11.366.000,00	(150.000,00)	
02.07 02.07.07 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.07 02.07.07 056	<b>Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan</b>	<b>2.184.518.000,00</b>	<b>2.051.026.036,55</b>	<b>(133.491.963,45)</b>	
02.07 02.07.07 056 001	<b>Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Ngampilan</b>	<b>119.556.000,00</b>	<b>82.683.000,00</b>	<b>(36.873.000,00)</b>	
02.07 02.07.07 056 001 5 2 1	Belanja Pegawai	38.860.000,00	37.700.000,00	(1.160.000,00)	
02.07 02.07.07 056 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	80.696.000,00	44.983.000,00	(35.713.000,00)	
02.07 02.07.07 056 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.07 056 002	<b>Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Ngampilan</b>	<b>51.750.000,00</b>	<b>51.237.697,00</b>	<b>(512.303,00)</b>	
02.07 02.07.07 056 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.07 056 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	51.750.000,00	51.237.697,00	(512.303,00)	
02.07 02.07.07 056 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.07 056 003	<b>Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Ngampilan</b>	<b>220.627.000,00</b>	<b>210.791.000,00</b>	<b>(9.836.000,00)</b>	
02.07 02.07.07 056 003 5 2 1	Belanja Pegawai	11.500.000,00	11.500.000,00	-	
02.07 02.07.07 056 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	209.127.000,00	199.291.000,00	(9.836.000,00)	
02.07 02.07.07 056 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.07 056 004	<b>Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngampilan</b>	<b>527.422.000,00</b>	<b>519.963.117,00</b>	<b>(7.458.883,00)</b>	
02.07 02.07.07 056 004 5 2 1	Belanja Pegawai	4.000.000,00	4.000.000,00	-	
02.07 02.07.07 056 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	523.422.000,00	515.963.117,00	(7.458.883,00)	
02.07 02.07.07 056 004 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.07 056 005	<b>Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Notoprajan</b>	<b>553.922.000,00</b>	<b>536.586.900,00</b>	<b>(17.335.100,00)</b>	
02.07 02.07.07 056 005 5 2 1	Belanja Pegawai	7.000.000,00	7.000.000,00	-	
02.07 02.07.07 056 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	546.922.000,00	529.586.900,00	(17.335.100,00)	
02.07 02.07.07 056 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.07 056 006	<b>Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Ngampilan</b>	<b>711.241.000,00</b>	<b>649.764.322,55</b>	<b>(61.476.677,45)</b>	
02.07 02.07.07 056 006 5 2 1	Belanja Pegawai	14.900.000,00	14.900.000,00	-	
02.07 02.07.07 056 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	696.341.000,00	634.864.322,55	(61.476.677,45)	
02.07 02.07.07 056 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :</b>	<b>555.200,00</b>	<b>555.200,00</b>	<b>-</b>	
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH :</b>	<b>4.769.585.417,00</b>	<b>4.547.793.174,55</b>	<b>(221.792.242,45)</b>	
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(4.769.030.217,00)</b>	<b>(4.547.237.974,55)</b>	<b>221.792.242,45</b>	

Keterangan :

- 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3)

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR  
 MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
 ORGANISASI : 02.07.08 - KECAMATAN WIROBRAJAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.07 02.07.08 00 00 4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>37.580.000,00</b>	<b>7.580.000,00</b>	
02.07 02.07.08 00 00 4 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>37.580.000,00</b>	<b>7.580.000,00</b>	
02.07 02.07.08 00 00 4 1 2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>37.580.000,00</b>	<b>7.580.000,00</b>	
02.07 02.07.08 00 00 4 1 2 01	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>37.580.000,00</b>	<b>7.580.000,00</b>	
02.07 02.07.08 00 00 4 1 2 01 04	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - TPU Pracimoloyo	30.000.000,00	37.580.000,00	7.580.000,00	1)PD No 5 /2012
02.07 02.07.08 00 00 4 1 2 03	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	-	-	-	
02.07 02.07.08 00 00 4 1 2 03 06	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan	-	-	-	2)PD No 3/2012
02.07 02.07.08 00 00 5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>6.540.067.672,00</b>	<b>6.247.557.089,29</b>	<b>(292.510.582,71)</b>	
02.07 02.07.08 00 00 5 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>2.158.625.672,00</b>	<b>2.078.688.516,00</b>	<b>(79.937.156,00)</b>	
02.07 02.07.08 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	2.158.625.672,00	2.078.688.516,00	(79.937.156,00)	
02.07 02.07.08 00 00	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>4.381.442.000,00</b>	<b>4.168.868.573,29</b>	<b>(212.573.426,71)</b>	
02.07 02.07.08 001	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>748.374.134,00</b>	<b>711.302.988,00</b>	<b>(37.071.146,00)</b>	
02.07 02.07.08 001 018	<b>Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi</b>	<b>62.819.000,00</b>	<b>57.251.500,00</b>	<b>(5.567.500,00)</b>	
02.07 02.07.08 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.08 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	62.819.000,00	57.251.500,00	(5.567.500,00)	
02.07 02.07.08 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.08 001 019	<b>Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>685.555.134,00</b>	<b>654.051.488,00</b>	<b>(31.503.646,00)</b>	
02.07 02.07.08 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	252.535.824,00	251.871.120,00	(664.704,00)	
02.07 02.07.08 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	195.601.310,00	181.525.443,00	(14.075.867,00)	
02.07 02.07.08 001 019 5 2 3	Belanja Modal	237.418.000,00	220.654.925,00	(16.763.075,00)	
02.07 02.07.08 002	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>277.297.628,00</b>	<b>254.090.229,35</b>	<b>(23.207.398,65)</b>	
02.07 02.07.08 002 022	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor</b>	<b>207.763.628,00</b>	<b>206.359.728,00</b>	<b>(1.403.900,00)</b>	
02.07 02.07.08 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.08 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	79.319.728,00	78.277.728,00	(1.042.000,00)	
02.07 02.07.08 002 022 5 2 3	Belanja Modal	128.443.900,00	128.082.000,00	(361.900,00)	
02.07 02.07.08 002 024	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	<b>69.534.000,00</b>	<b>47.730.501,35</b>	<b>(21.803.498,65)</b>	
02.07 02.07.08 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.08 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	69.534.000,00	47.730.501,35	(21.803.498,65)	
02.07 02.07.08 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.08 006	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>15.524.200,00</b>	<b>14.941.420,00</b>	<b>(582.780,00)</b>	
02.07 02.07.08 006 005	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD</b>	<b>15.524.200,00</b>	<b>14.941.420,00</b>	<b>(582.780,00)</b>	
02.07 02.07.08 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.08 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	15.524.200,00	14.941.420,00	(582.780,00)	
02.07 02.07.08 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.07 02.07.08 057	<b>Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Wirobrajan</b>	<b>3.340.246.038,00</b>	<b>3.188.533.935,94</b>	<b>(151.712.102,06)</b>	
02.07 02.07.08 057 001	<b>Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Wirobrajan</b>	<b>247.506.000,00</b>	<b>239.073.500,00</b>	<b>(8.432.500,00)</b>	
02.07 02.07.08 057 001 5 2 1	Belanja Pegawai	50.000.000,00	49.960.000,00	(40.000,00)	
02.07 02.07.08 057 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	197.506.000,00	189.113.500,00	(8.392.500,00)	
02.07 02.07.08 057 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.08 057 002	<b>Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Wirobrajan</b>	<b>96.282.491,00</b>	<b>94.075.075,00</b>	<b>(2.207.416,00)</b>	
02.07 02.07.08 057 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.08 057 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	96.282.491,00	94.075.075,00	(2.207.416,00)	
02.07 02.07.08 057 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.08 057 003	<b>Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Wirobrajan</b>	<b>225.326.200,00</b>	<b>221.537.700,00</b>	<b>(3.788.500,00)</b>	
02.07 02.07.08 057 003 5 2 1	Belanja Pegawai	2.250.000,00	2.250.000,00	-	
02.07 02.07.08 057 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	223.076.200,00	219.287.700,00	(3.788.500,00)	
02.07 02.07.08 057 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.08 057 004	<b>Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pakuncen</b>	<b>550.416.000,00</b>	<b>540.913.500,00</b>	<b>(9.502.500,00)</b>	
02.07 02.07.08 057 004 5 2 1	Belanja Pegawai	3.750.000,00	3.750.000,00	-	
02.07 02.07.08 057 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	546.666.000,00	537.163.500,00	(9.502.500,00)	
02.07 02.07.08 057 004 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.08 057 005	<b>Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirobrajan</b>	<b>527.336.000,00</b>	<b>507.946.660,00</b>	<b>(19.389.340,00)</b>	
02.07 02.07.08 057 005 5 2 1	Belanja Pegawai	3.750.000,00	3.750.000,00	-	
02.07 02.07.08 057 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	523.586.000,00	504.196.660,00	(19.389.340,00)	
02.07 02.07.08 057 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.08 057 006	<b>Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan</b>	<b>528.937.000,00</b>	<b>521.948.270,00</b>	<b>(6.988.730,00)</b>	
02.07 02.07.08 057 006 5 2 1	Belanja Pegawai	3.750.000,00	3.750.000,00	-	
02.07 02.07.08 057 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	525.187.000,00	518.198.270,00	(6.988.730,00)	
02.07 02.07.08 057 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.08 057 007	<b>Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Wirobrajan</b>	<b>1.164.442.347,00</b>	<b>1.063.039.230,94</b>	<b>(101.403.116,06)</b>	
02.07 02.07.08 057 007 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.08 057 007 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.161.942.347,00	1.060.539.230,94	(101.403.116,06)	
02.07 02.07.08 057 007 5 2 3	Belanja Modal	2.500.000,00	2.500.000,00	-	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>37.580.000,00</b>	<b>7.580.000,00</b>	
	<b>JUMLAH BELANJADAERAH :</b>	<b>6.540.067.672,00</b>	<b>6.247.557.089,29</b>	<b>(292.510.582,71)</b>	
	<b>SURPLUS/(DEFISIT) :</b>	<b>(6.510.067.672,00)</b>	<b>(6.209.977.089,29)</b>	<b>300.090.582,71</b>	

## Keterangan :

- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum  
(Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu  
(Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3)

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR  
 MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
 ORGANISASI : 02.07.09 - KECAMATAN MANTRIJERON

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.07 02.07.09 00 00 4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>14.430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	
02.07 02.07.09 00 00 4 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>14.430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	
02.07 02.07.09 00 00 4 1 2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>14.430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	
02.07 02.07.09 00 00 4 1 2 01	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>14.430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	
02.07 02.07.09 00 00 4 1 2 01 04	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - TPU Sarilaya	14.000.000,00	14.430.000,00	430.000,00	1)PD No 5 /2012
02.07 02.07.09 00 00 4 1 2 03	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	-	-	-	
02.07 02.07.09 00 00 4 1 2 03 06	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan	-	-	-	2)PD No 3/2012
02.07 02.07.09 00 00 5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>6.322.281.977,00</b>	<b>6.117.776.725,41</b>	<b>(204.505.251,59)</b>	
02.07 02.07.09 00 00 5 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>2.083.911.774,00</b>	<b>2.033.833.961,00</b>	<b>(50.077.813,00)</b>	
02.07 02.07.09 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	2.083.911.774,00	2.033.833.961,00	(50.077.813,00)	
02.07 02.07.09 00 00	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>4.238.370.203,00</b>	<b>4.083.942.764,41</b>	<b>(154.427.438,59)</b>	
02.07 02.07.09 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>771.758.856,00</b>	<b>705.094.552,00</b>	<b>(66.664.304,00)</b>	
02.07 02.07.09 001 018	<b>Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi</b>	<b>71.254.000,00</b>	<b>71.065.100,00</b>	<b>(188.900,00)</b>	
02.07 02.07.09 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.09 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	71.254.000,00	71.065.100,00	(188.900,00)	
02.07 02.07.09 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.09 001 019	<b>Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>700.504.856,00</b>	<b>634.029.452,00</b>	<b>(66.475.404,00)</b>	
02.07 02.07.09 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	172.633.956,00	171.793.956,00	(840.000,00)	
02.07 02.07.09 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	314.568.900,00	288.496.046,00	(26.072.854,00)	
02.07 02.07.09 001 019 5 2 3	Belanja Modal	213.302.000,00	173.739.450,00	(39.562.550,00)	
02.07 02.07.09 002	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>318.090.712,00</b>	<b>302.035.266,00</b>	<b>(16.055.446,00)</b>	
02.07 02.07.09 002 022	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor</b>	<b>251.690.712,00</b>	<b>251.690.712,00</b>	-	
02.07 02.07.09 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.09 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	3.963.712,00	3.963.712,00	-	
02.07 02.07.09 002 022 5 2 3	Belanja Modal	247.727.000,00	247.727.000,00	-	
02.07 02.07.09 002 024	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	<b>66.400.000,00</b>	<b>50.344.554,00</b>	<b>(16.055.446,00)</b>	
02.07 02.07.09 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.09 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	66.400.000,00	50.344.554,00	(16.055.446,00)	
02.07 02.07.09 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.09 006	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>5.220.000,00</b>	<b>5.101.000,00</b>	<b>(119.000,00)</b>	
02.07 02.07.09 006 005	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD</b>	<b>5.220.000,00</b>	<b>5.101.000,00</b>	<b>(119.000,00)</b>	
02.07 02.07.09 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.09 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	5.220.000,00	5.101.000,00	(119.000,00)	
02.07 02.07.09 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.07 02.07.09 058	<b>Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron</b>	<b>3.143.300.635,00</b>	<b>3.071.711.946,41</b>	<b>(71.588.688,59)</b>	
02.07 02.07.09 058 001	<b>Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mantrijeron</b>	<b>202.190.000,00</b>	<b>162.190.000,00</b>	<b>(40.000.000,00)</b>	
02.07 02.07.09 058 001 5 2 1	Belanja Pegawai	66.570.000,00	64.230.000,00	(2.340.000,00)	
02.07 02.07.09 058 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	135.620.000,00	97.960.000,00	(37.660.000,00)	
02.07 02.07.09 058 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.09 058 002	<b>Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mantrijeron</b>	<b>122.755.237,00</b>	<b>121.880.237,00</b>	<b>(875.000,00)</b>	
02.07 02.07.09 058 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.09 058 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	122.755.237,00	121.880.237,00	(875.000,00)	
02.07 02.07.09 058 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.09 058 003	<b>Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mantrijeron</b>	<b>253.007.500,00</b>	<b>246.995.500,00</b>	<b>(6.012.000,00)</b>	
02.07 02.07.09 058 003 5 2 1	Belanja Pegawai	23.350.000,00	22.850.000,00	(500.000,00)	
02.07 02.07.09 058 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	227.257.500,00	221.745.500,00	(5.512.000,00)	
02.07 02.07.09 058 003 5 2 3	Belanja Modal	2.400.000,00	2.400.000,00	-	
02.07 02.07.09 058 004	<b>Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gedongkiwo</b>	<b>637.687.400,00</b>	<b>626.405.300,00</b>	<b>(11.282.100,00)</b>	
02.07 02.07.09 058 004 5 2 1	Belanja Pegawai	10.200.000,00	10.000.000,00	(200.000,00)	
02.07 02.07.09 058 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	627.487.400,00	616.405.300,00	(11.082.100,00)	
02.07 02.07.09 058 004 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.09 058 005	<b>Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryodiningrat</b>	<b>539.642.200,00</b>	<b>537.757.200,00</b>	<b>(1.885.000,00)</b>	
02.07 02.07.09 058 005 5 2 1	Belanja Pegawai	5.100.000,00	5.100.000,00	-	
02.07 02.07.09 058 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	534.542.200,00	532.657.200,00	(1.885.000,00)	
02.07 02.07.09 058 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.09 058 006	<b>Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Mantrijeron (DBH Pajak dari Provinsi)</b>	<b>537.556.400,00</b>	<b>531.050.600,00</b>	<b>(6.505.800,00)</b>	
02.07 02.07.09 058 006 5 2 1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	2.700.000,00	-	
02.07 02.07.09 058 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	534.856.400,00	528.350.600,00	(6.505.800,00)	
02.07 02.07.09 058 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.09 058 007	<b>Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mantrijeron (DBH Pajak dari Provinsi)</b>	<b>850.461.898,00</b>	<b>845.433.109,41</b>	<b>(5.028.788,59)</b>	
02.07 02.07.09 058 007 5 2 1	Belanja Pegawai	12.550.000,00	12.500.000,00	(50.000,00)	
02.07 02.07.09 058 007 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	837.911.898,00	832.933.109,41	(4.978.788,59)	
02.07 02.07.09 058 007 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>14.430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH :</b>	<b>6.322.281.977,00</b>	<b>6.117.776.725,41</b>	<b>(204.505.251,59)</b>	
	<b>SURPLUS/(DEFISIT) :</b>	<b>(6.308.281.977,00)</b>	<b>(6.103.346.725,41)</b>	<b>204.935.251,59</b>	

## Keterangan :

- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3)

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR  
 MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
 ORGANISASI : 02.07.10 - KECAMATAN KRATON

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.07 02.07.10 00 00 4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	-	-	-	
02.07 02.07.10 00 00 4 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	-	-	-	
02.07 02.07.10 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	-	-	-	
02.07 02.07.10 00 00 4 1 2 03	Retribusi Perizinan Tertentu	-	-	-	
02.07 02.07.10 00 00 4 1 2 03 06	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan	-	-	-	1) PD No 3/2012
02.07 02.07.10 00 00 5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>5.848.315.688,00</b>	<b>5.431.960.765,59</b>	<b>(416.354.922,41)</b>	
02.07 02.07.10 00 00 5 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>2.081.382.688,00</b>	<b>1.951.988.239,00</b>	<b>(129.394.449,00)</b>	
02.07 02.07.10 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai (DAU dan PAD)	2.081.382.688,00	1.951.988.239,00	(129.394.449,00)	
02.07 02.07.10 00 00	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>3.766.933.000,00</b>	<b>3.479.972.526,59</b>	<b>(286.960.473,41)</b>	
02.07 02.07.10 001	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>731.979.000,00</b>	<b>653.878.404,00</b>	<b>(78.100.596,00)</b>	
02.07 02.07.10 001 018	<b>Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi</b>	<b>103.328.000,00</b>	<b>92.530.850,00</b>	<b>(10.797.150,00)</b>	
02.07 02.07.10 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.10 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	103.328.000,00	92.530.850,00	(10.797.150,00)	
02.07 02.07.10 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.10 001 019	<b>Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>628.651.000,00</b>	<b>561.347.554,00</b>	<b>(67.303.446,00)</b>	
02.07 02.07.10 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	303.177.000,00	302.969.780,00	(207.220,00)	
02.07 02.07.10 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	302.474.000,00	237.598.474,00	(64.875.526,00)	
02.07 02.07.10 001 019 5 2 3	Belanja Modal	23.000.000,00	20.779.300,00	(2.220.700,00)	
02.07 02.07.10 002	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>131.915.000,00</b>	<b>92.425.624,00</b>	<b>(39.489.376,00)</b>	
02.07 02.07.10 002 022	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor</b>	<b>73.365.000,00</b>	<b>68.917.737,00</b>	<b>(4.447.263,00)</b>	
02.07 02.07.10 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.10 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	48.365.000,00	44.577.737,00	(3.787.263,00)	
02.07 02.07.10 002 022 5 2 3	Belanja Modal	25.000.000,00	24.340.000,00	(660.000,00)	
02.07 02.07.10 002 024	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	<b>58.550.000,00</b>	<b>23.507.887,00</b>	<b>(35.042.113,00)</b>	
02.07 02.07.10 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.10 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	58.550.000,00	23.507.887,00	(35.042.113,00)	
02.07 02.07.10 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.10 006	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>15.485.000,00</b>	<b>15.397.425,00</b>	<b>(87.575,00)</b>	
02.07 02.07.10 006 005	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD</b>	<b>15.485.000,00</b>	<b>15.397.425,00</b>	<b>(87.575,00)</b>	
02.07 02.07.10 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.10 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	15.485.000,00	15.397.425,00	(87.575,00)	
02.07 02.07.10 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.07 02.07.10 059	<b>Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton</b>	<b>2.887.554.000,00</b>	<b>2.718.271.073,59</b>	<b>(169.282.926,41)</b>	
02.07 02.07.10 059 001	<b>Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kraton</b>	<b>222.449.000,00</b>	<b>167.564.400,00</b>	<b>(54.884.600,00)</b>	
02.07 02.07.10 059 001 5 2 1	Belanja Pegawai	69.160.000,00	43.920.000,00	(25.240.000,00)	
02.07 02.07.10 059 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	153.289.000,00	123.644.400,00	(29.644.600,00)	
02.07 02.07.10 059 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.10 059 002	<b>Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kraton</b>	<b>96.188.000,00</b>	<b>94.708.957,00</b>	<b>(1.479.043,00)</b>	
02.07 02.07.10 059 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.10 059 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	96.188.000,00	94.708.957,00	(1.479.043,00)	
02.07 02.07.10 059 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.10 059 003	<b>Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kraton</b>	<b>348.384.000,00</b>	<b>332.169.700,00</b>	<b>(16.214.300,00)</b>	
02.07 02.07.10 059 003 5 2 1	Belanja Pegawai	5.475.000,00	5.475.000,00	-	
02.07 02.07.10 059 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	342.909.000,00	326.694.700,00	(16.214.300,00)	
02.07 02.07.10 059 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.10 059 004	<b>Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patehan</b>	<b>493.624.000,00</b>	<b>486.566.061,00</b>	<b>(7.057.939,00)</b>	
02.07 02.07.10 059 004 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.10 059 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	493.624.000,00	486.566.061,00	(7.057.939,00)	
02.07 02.07.10 059 004 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.10 059 005	<b>Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Panembahan</b>	<b>522.818.000,00</b>	<b>520.787.298,00</b>	<b>(2.030.702,00)</b>	
02.07 02.07.10 059 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.10 059 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	522.818.000,00	520.787.298,00	(2.030.702,00)	
02.07 02.07.10 059 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.10 059 006	<b>Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kadipaten</b>	<b>512.671.000,00</b>	<b>497.178.899,00</b>	<b>(15.492.101,00)</b>	
02.07 02.07.10 059 006 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.10 059 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	512.671.000,00	497.178.899,00	(15.492.101,00)	
02.07 02.07.10 059 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.10 059 007	<b>Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kraton</b>	<b>691.420.000,00</b>	<b>619.295.758,59</b>	<b>(72.124.241,41)</b>	
02.07 02.07.10 059 007 5 2 1	Belanja Pegawai	6.600.000,00	2.100.000,00	(4.500.000,00)	
02.07 02.07.10 059 007 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	684.820.000,00	617.195.758,59	(67.624.241,41)	
02.07 02.07.10 059 007 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH :</b>	<b>5.848.315.688,00</b>	<b>5.431.960.765,59</b>	<b>(416.354.922,41)</b>	
	<b>SURPLUS/(DEFISIT) :</b>	<b>(5.848.315.688,00)</b>	<b>(5.431.960.765,59)</b>	<b>416.354.922,41</b>	

Keterangan :

- 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3)



URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR  
 MACAM URUSAN : 02.07 -PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
 ORGANISASI : 02.07.11 - KECAMATAN GONDONAMAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.07 02.07.11 00 00 4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	-	-	-	
02.07 02.07.11 00 00 4 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	-	-	-	
02.07 02.07.11 00 00 4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum	-	-	-	
02.07 02.07.11 00 00 4 1 2 01 05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	-	-	-	1) PD No 5/2012
02.07 02.07.11 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	-	-	-	
02.07 02.07.11 00 00 4 1 2 03	Retribusi Perizinan Tertentu	-	-	-	
02.07 02.07.11 00 00 4 1 2 03 06	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan	-	-	-	2) PD No 3/2012
02.07 02.07.11 00 00 5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>4.329.112.111,00</b>	<b>4.138.049.369,00</b>	<b>(191.062.742,00)</b>	
02.07 02.07.11 00 00 5 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1.620.786.111,00</b>	<b>1.499.099.327,00</b>	<b>(121.686.784,00)</b>	
02.07 02.07.11 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	1.620.786.111,00	1.499.099.327,00	(121.686.784,00)	
02.07 02.07.11 00 00	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>2.708.326.000,00</b>	<b>2.638.950.042,00</b>	<b>(69.375.958,00)</b>	
02.07 02.07.11 001	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>581.134.000,00</b>	<b>560.951.594,00</b>	<b>(20.182.406,00)</b>	
02.07 02.07.11 001 018	<b>Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi</b>	<b>77.804.000,00</b>	<b>77.626.000,00</b>	<b>(178.000,00)</b>	
02.07 02.07.11 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.11 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	77.804.000,00	77.626.000,00	(178.000,00)	
02.07 02.07.11 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.11 001 019	<b>Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>503.330.000,00</b>	<b>483.325.594,00</b>	<b>(20.004.406,00)</b>	
02.07 02.07.11 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	186.859.500,00	184.738.504,00	(2.120.996,00)	
02.07 02.07.11 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	264.170.500,00	246.287.090,00	(17.883.410,00)	
02.07 02.07.11 001 019 5 2 3	Belanja Modal	52.300.000,00	52.300.000,00	-	
02.07 02.07.11 002	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>164.863.000,00</b>	<b>152.631.896,00</b>	<b>(12.231.104,00)</b>	
02.07 02.07.11 002 022	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor</b>	<b>111.824.000,00</b>	<b>108.982.000,00</b>	<b>(2.842.000,00)</b>	
02.07 02.07.11 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.11 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	
02.07 02.07.11 002 022 5 2 3	Belanja Modal	111.824.000,00	108.982.000,00	(2.842.000,00)	
02.07 02.07.11 002 024	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	<b>53.039.000,00</b>	<b>43.649.896,00</b>	<b>(9.389.104,00)</b>	
02.07 02.07.11 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.11 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	53.039.000,00	43.649.896,00	(9.389.104,00)	
02.07 02.07.11 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.11 006	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>4.826.000,00</b>	<b>4.826.000,00</b>	-	
02.07 02.07.11 006 005	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD</b>	<b>4.826.000,00</b>	<b>4.826.000,00</b>	-	
02.07 02.07.11 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.11 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	4.826.000,00	4.826.000,00	-	
02.07 02.07.11 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.07 02.07.11 060	<b>Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan</b>	<b>1.957.503.000,00</b>	<b>1.920.540.552,00</b>	<b>(36.962.448,00)</b>	
02.07 02.07.11 060 001	<b>Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gondomanan</b>	<b>169.571.000,00</b>	<b>166.767.000,00</b>	<b>(2.804.000,00)</b>	
02.07 02.07.11 060 001 5 2 1	Belanja Pegawai	90.700.000,00	89.200.000,00	(1.500.000,00)	
02.07 02.07.11 060 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	78.871.000,00	77.567.000,00	(1.304.000,00)	
02.07 02.07.11 060 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.11 060 002	<b>Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gondomanan</b>	<b>74.104.000,00</b>	<b>73.769.452,00</b>	<b>(334.548,00)</b>	
02.07 02.07.11 060 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.11 060 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	74.104.000,00	73.769.452,00	(334.548,00)	
02.07 02.07.11 060 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.11 060 003	<b>Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondomanan</b>	<b>270.565.000,00</b>	<b>270.557.500,00</b>	<b>(7.500,00)</b>	
02.07 02.07.11 060 003 5 2 1	Belanja Pegawai	11.000.000,00	11.000.000,00	-	
02.07 02.07.11 060 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	259.565.000,00	259.557.500,00	(7.500,00)	
02.07 02.07.11 060 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.11 060 004	<b>Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngupasan</b>	<b>513.495.000,00</b>	<b>495.382.600,00</b>	<b>(18.112.400,00)</b>	
02.07 02.07.11 060 004 5 2 1	Belanja Pegawai	5.175.000,00	5.175.000,00	-	
02.07 02.07.11 060 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	508.320.000,00	490.207.600,00	(18.112.400,00)	
02.07 02.07.11 060 004 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.11 060 005	<b>Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan</b>	<b>531.004.000,00</b>	<b>518.467.000,00</b>	<b>(12.537.000,00)</b>	
02.07 02.07.11 060 005 5 2 1	Belanja Pegawai	5.475.000,00	5.175.000,00	(300.000,00)	
02.07 02.07.11 060 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	525.529.000,00	513.292.000,00	(12.237.000,00)	
02.07 02.07.11 060 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.11 060 006	<b>Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondomanan</b>	<b>398.764.000,00</b>	<b>395.597.000,00</b>	<b>(3.167.000,00)</b>	
02.07 02.07.11 060 006 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.11 060 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	398.764.000,00	395.597.000,00	(3.167.000,00)	
02.07 02.07.11 060 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH :</b>	<b>4.329.112.111,00</b>	<b>4.138.049.369,00</b>	<b>(191.062.742,00)</b>	
	<b>SURPLUS/(DEFISIT) :</b>	<b>(4.329.112.111,00)</b>	<b>(4.138.049.369,00)</b>	<b>191.062.742,00</b>	

## Keterangan :

- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3)

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR  
 MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
 ORGANISASI : 02.07.12 - KECAMATAN MERGANGSARI

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.07 02.07.12 00 00 4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>35.230.000,00</b>	<b>5.230.000,00</b>	
02.07 02.07.12 00 00 4 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>35.230.000,00</b>	<b>5.230.000,00</b>	
02.07 02.07.12 00 00 4 1 2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>35.230.000,00</b>	<b>5.230.000,00</b>	
02.07 02.07.12 00 00 4 1 2 01	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>35.230.000,00</b>	<b>5.230.000,00</b>	
02.07 02.07.12 00 00 4 1 2 01 04	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - TPU Sasonoloyo	30.000.000,00	35.230.000,00	5.230.000,00	1)PD No 5 /2012
02.07 02.07.12 00 00 4 1 2 03	Retribusi Perizinan Tertentu	-	-	-	
02.07 02.07.12 00 00 4 1 2 03 06	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan	-	-	-	2)PD No 3/2012
02.07 02.07.12 00 00 5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>6.088.420.354,00</b>	<b>5.762.725.214,80</b>	<b>(325.695.139,20)</b>	
02.07 02.07.12 00 00 5 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1.967.332.354,00</b>	<b>1.893.699.044,00</b>	<b>(73.633.310,00)</b>	
02.07 02.07.12 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	1.967.332.354,00	1.893.699.044,00	(73.633.310,00)	
02.07 02.07.12 00 00	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>4.121.088.000,00</b>	<b>3.869.026.170,80</b>	<b>(252.061.829,20)</b>	
02.07 02.07.12 001	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>809.685.000,00</b>	<b>742.980.877,00</b>	<b>(66.704.123,00)</b>	
02.07 02.07.12 001 018	<b>Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi</b>	<b>54.895.000,00</b>	<b>47.035.000,00</b>	<b>(7.860.000,00)</b>	
02.07 02.07.12 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.12 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	54.895.000,00	47.035.000,00	(7.860.000,00)	
02.07 02.07.12 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.12 001 019	<b>Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>754.790.000,00</b>	<b>695.945.877,00</b>	<b>(58.844.123,00)</b>	
02.07 02.07.12 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	199.267.936,00	199.147.936,00	(120.000,00)	
02.07 02.07.12 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	379.981.064,00	344.926.641,00	(35.054.423,00)	
02.07 02.07.12 001 019 5 2 3	Belanja Modal	175.541.000,00	151.871.300,00	(23.669.700,00)	
02.07 02.07.12 002	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>179.025.000,00</b>	<b>147.397.818,50</b>	<b>(31.627.181,50)</b>	
02.07 02.07.12 002 022	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor</b>	<b>105.372.000,00</b>	<b>104.865.284,00</b>	<b>(506.716,00)</b>	
02.07 02.07.12 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.12 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.129.000,00	(271.000,00)	
02.07 02.07.12 002 022 5 2 3	Belanja Modal	103.972.000,00	103.736.284,00	(235.716,00)	
02.07 02.07.12 002 024	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	<b>73.653.000,00</b>	<b>42.532.534,50</b>	<b>(31.120.465,50)</b>	
02.07 02.07.12 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.12 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	73.653.000,00	42.532.534,50	(31.120.465,50)	
02.07 02.07.12 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.12 006	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>9.321.000,00</b>	<b>9.130.800,00</b>	<b>(190.200,00)</b>	
02.07 02.07.12 006 005	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD</b>	<b>9.321.000,00</b>	<b>9.130.800,00</b>	<b>(190.200,00)</b>	
02.07 02.07.12 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.12 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	9.321.000,00	9.130.800,00	(190.200,00)	
02.07 02.07.12 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.07 02.07.12 061	<b>Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan</b>	<b>3.123.057.000,00</b>	<b>2.969.516.675,30</b>	<b>(153.540.324,70)</b>	
02.07 02.07.12 061 001	<b>Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mergangsan</b>	<b>184.373.000,00</b>	<b>169.010.918,00</b>	<b>(15.362.082,00)</b>	
02.07 02.07.12 061 001 5 2 1	Belanja Pegawai	56.000.000,00	51.760.000,00	(4.240.000,00)	
02.07 02.07.12 061 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	128.373.000,00	117.250.918,00	(11.122.082,00)	
02.07 02.07.12 061 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.12 061 002	<b>Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mergangsan</b>	<b>57.913.000,00</b>	<b>56.737.708,00</b>	<b>(1.175.292,00)</b>	
02.07 02.07.12 061 002 5 2 1	Belanja Pegawai	3.200.000,00	3.200.000,00	-	
02.07 02.07.12 061 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	54.713.000,00	53.537.708,00	(1.175.292,00)	
02.07 02.07.12 061 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.12 061 003	<b>Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mergangsan</b>	<b>217.277.000,00</b>	<b>212.554.588,00</b>	<b>(4.722.412,00)</b>	
02.07 02.07.12 061 003 5 2 1	Belanja Pegawai	35.875.000,00	35.875.000,00	-	
02.07 02.07.12 061 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	181.402.000,00	176.679.588,00	(4.722.412,00)	
02.07 02.07.12 061 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.12 061 004	<b>Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Brontokusuman</b>	<b>610.216.000,00</b>	<b>598.050.400,00</b>	<b>(12.165.600,00)</b>	
02.07 02.07.12 061 004 5 2 1	Belanja Pegawai	3.300.000,00	-	(3.300.000,00)	
02.07 02.07.12 061 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	606.916.000,00	598.050.400,00	(8.865.600,00)	
02.07 02.07.12 061 004 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.12 061 005	<b>Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirogunan</b>	<b>655.382.000,00</b>	<b>626.608.000,00</b>	<b>(28.774.000,00)</b>	
02.07 02.07.12 061 005 5 2 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	6.000.000,00	-	
02.07 02.07.12 061 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	649.382.000,00	620.608.000,00	(28.774.000,00)	
02.07 02.07.12 061 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.12 061 006	<b>Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Keparakan</b>	<b>617.273.000,00</b>	<b>604.545.600,00</b>	<b>(12.727.400,00)</b>	
02.07 02.07.12 061 006 5 2 1	Belanja Pegawai	2.200.000,00	2.200.000,00	-	
02.07 02.07.12 061 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	615.073.000,00	602.345.600,00	(12.727.400,00)	
02.07 02.07.12 061 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.12 061 007	<b>Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mergangsan</b>	<b>780.623.000,00</b>	<b>702.009.461,30</b>	<b>(78.613.538,70)</b>	
02.07 02.07.12 061 007 5 2 1	Belanja Pegawai	18.140.000,00	14.540.000,00	(3.600.000,00)	
02.07 02.07.12 061 007 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	702.483.000,00	629.454.461,30	(73.028.538,70)	
02.07 02.07.12 061 007 5 2 3	Belanja Modal	60.000.000,00	58.015.000,00	(1.985.000,00)	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>35.230.000,00</b>	<b>5.230.000,00</b>	
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH :</b>	<b>6.088.420.354,00</b>	<b>5.762.725.214,80</b>	<b>(325.695.139,20)</b>	
	<b>SURPLUS/(DEFISIT) :</b>	<b>(6.058.420.354,00)</b>	<b>(5.727.495.214,80)</b>	<b>330.925.139,20</b>	

Keterangan :

- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum  
(Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu  
(Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3)

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR  
 MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
 ORGANISASI : 02.07.13 - KECAMATAN UMBULHARJO

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.07 02.07.13 00 00 4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>992.100,00</b>	<b>992.100,00</b>	-	
02.07 02.07.13 00 00 4 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>992.100,00</b>	<b>992.100,00</b>	-	
02.07 02.07.13 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	992.100,00	992.100,00	-	
02.07 02.07.13 00 00 4 1 2 03	Retribusi Perizinan Tertentu	992.100,00	992.100,00	-	
02.07 02.07.13 00 00 4 1 2 03 06	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan	992.100,00	992.100,00	-	1)PD No 3/2012
02.07 02.07.13 00 00 5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>12.632.757.797,00</b>	<b>11.839.455.385,86</b>	<b>(793.302.411,14)</b>	
02.07 02.07.13 00 00 5 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>3.779.464.897,00</b>	<b>3.613.041.886,00</b>	<b>(166.423.011,00)</b>	
02.07 02.07.13 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	3.779.464.897,00	3.613.041.886,00	(166.423.011,00)	
02.07 02.07.13 00 00	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>8.853.292.900,00</b>	<b>8.226.413.499,86</b>	<b>(626.879.400,14)</b>	
02.07 02.07.13 001	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.610.902.000,00</b>	<b>1.556.334.947,52</b>	<b>(54.567.052,48)</b>	
02.07 02.07.13 001 018	<b>Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi</b>	<b>196.970.000,00</b>	<b>191.313.398,25</b>	<b>(5.656.601,75)</b>	
02.07 02.07.13 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.13 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	196.970.000,00	191.313.398,25	(5.656.601,75)	
02.07 02.07.13 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.13 001 019	<b>Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>1.413.932.000,00</b>	<b>1.365.021.549,27</b>	<b>(48.910.450,73)</b>	
02.07 02.07.13 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	656.203.712,00	656.203.704,32	(7,68)	
02.07 02.07.13 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	576.452.728,00	537.973.834,95	(38.478.893,05)	
02.07 02.07.13 001 019 5 2 3	Belanja Modal	181.275.560,00	170.844.010,00	(10.431.550,00)	
02.07 02.07.13 002	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>297.620.500,00</b>	<b>269.942.257,50</b>	<b>(27.678.242,50)</b>	
02.07 02.07.13 002 022	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor</b>	<b>185.120.000,00</b>	<b>182.018.000,00</b>	<b>(3.102.000,00)</b>	
02.07 02.07.13 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.13 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	95.120.000,00	92.578.000,00	(2.542.000,00)	
02.07 02.07.13 002 022 5 2 3	Belanja Modal	90.000.000,00	89.440.000,00	(560.000,00)	
02.07 02.07.13 002 024	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	<b>112.500.500,00</b>	<b>87.924.257,50</b>	<b>(24.576.242,50)</b>	
02.07 02.07.13 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.13 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	112.500.500,00	87.924.257,50	(24.576.242,50)	
02.07 02.07.13 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.13 006	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>10.586.000,00</b>	<b>10.571.000,00</b>	<b>(15.000,00)</b>	
02.07 02.07.13 006 005	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD</b>	<b>10.586.000,00</b>	<b>10.571.000,00</b>	<b>(15.000,00)</b>	
02.07 02.07.13 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.13 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	10.586.000,00	10.571.000,00	(15.000,00)	
02.07 02.07.13 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.07 02.07.13 062	<b>Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo</b>	<b>6.934.184.400,00</b>	<b>6.389.565.294,84</b>	<b>(544.619.105,16)</b>	
02.07 02.07.13 062 001	<b>Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Umbulharjo</b>	<b>330.474.500,00</b>	<b>257.246.000,00</b>	<b>(73.228.500,00)</b>	
02.07 02.07.13 062 001 5 2 1	Belanja Pegawai	61.500.000,00	59.340.000,00	(2.160.000,00)	
02.07 02.07.13 062 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	268.974.500,00	197.906.000,00	(71.068.500,00)	
02.07 02.07.13 062 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.13 062 002	<b>Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Umbulharjo</b>	<b>143.042.000,00</b>	<b>142.635.084,00</b>	<b>(406.916,00)</b>	
02.07 02.07.13 062 002 5 2 1	Belanja Pegawai	400.000,00	400.000,00	-	
02.07 02.07.13 062 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	142.642.000,00	142.235.084,00	(406.916,00)	
02.07 02.07.13 062 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.13 062 003	<b>Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Umbulharjo</b>	<b>337.179.000,00</b>	<b>300.956.000,00</b>	<b>(36.223.000,00)</b>	
02.07 02.07.13 062 003 5 2 1	Belanja Pegawai	27.470.000,00	27.270.000,00	(200.000,00)	
02.07 02.07.13 062 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	309.709.000,00	273.686.000,00	(36.023.000,00)	
02.07 02.07.13 062 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.13 062 004	<b>Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Giwangan</b>	<b>585.016.000,00</b>	<b>583.476.240,00</b>	<b>(1.539.760,00)</b>	
02.07 02.07.13 062 004 5 2 1	Belanja Pegawai	60.500.000,00	60.500.000,00	-	
02.07 02.07.13 062 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	524.516.000,00	522.976.240,00	(1.539.760,00)	
02.07 02.07.13 062 004 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.13 062 005	<b>Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sorosutan</b>	<b>617.039.500,00</b>	<b>591.901.800,00</b>	<b>(25.137.700,00)</b>	
02.07 02.07.13 062 005 5 2 1	Belanja Pegawai	82.340.000,00	82.340.000,00	-	
02.07 02.07.13 062 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	534.699.500,00	509.561.800,00	(25.137.700,00)	
02.07 02.07.13 062 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.13 062 006	<b>Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pandeyan</b>	<b>501.706.500,00</b>	<b>498.412.500,00</b>	<b>(3.294.000,00)</b>	
02.07 02.07.13 062 006 5 2 1	Belanja Pegawai	57.200.000,00	57.200.000,00	-	
02.07 02.07.13 062 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	444.506.500,00	441.212.500,00	(3.294.000,00)	
02.07 02.07.13 062 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.13 062 007	<b>Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Warungboto</b>	<b>500.809.000,00</b>	<b>497.273.900,00</b>	<b>(3.535.100,00)</b>	
02.07 02.07.13 062 007 5 2 1	Belanja Pegawai	41.800.000,00	41.800.000,00	-	
02.07 02.07.13 062 007 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	459.009.000,00	455.473.900,00	(3.535.100,00)	
02.07 02.07.13 062 007 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.13 062 008	<b>Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tahunan</b>	<b>545.351.500,00</b>	<b>536.521.500,00</b>	<b>(8.830.000,00)</b>	
02.07 02.07.13 062 008 5 2 1	Belanja Pegawai	55.000.000,00	55.000.000,00	-	
02.07 02.07.13 062 008 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	490.351.500,00	481.521.500,00	(8.830.000,00)	
02.07 02.07.13 062 008 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.13 062 009	<b>Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Muja Muju</b>	<b>539.676.000,00</b>	<b>538.552.000,00</b>	<b>(1.124.000,00)</b>	
02.07 02.07.13 062 009 5 2 1	Belanja Pegawai	60.500.000,00	60.500.000,00	-	
02.07 02.07.13 062 009 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	479.176.000,00	478.052.000,00	(1.124.000,00)	
02.07 02.07.13 062 009 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.07 02.07.13 062 010	<b>Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Semaki</b>	<b>502.097.000,00</b>	<b>500.463.000,00</b>	<b>(1.634.000,00)</b>	
02.07 02.07.13 062 010 5 2 1	Belanja Pegawai	37.400.000,00	37.400.000,00	-	
02.07 02.07.13 062 010 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	464.697.000,00	463.063.000,00	(1.634.000,00)	
02.07 02.07.13 062 010 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.13 062 011	<b>Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Umbulharjo</b>	<b>2.331.793.400,00</b>	<b>1.942.127.270,84</b>	<b>(389.666.129,16)</b>	
02.07 02.07.13 062 011 5 2 1	Belanja Pegawai	3.780.000,00	3.780.000,00	-	
02.07 02.07.13 062 011 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2.328.013.400,00	1.938.347.270,84	(389.666.129,16)	
02.07 02.07.13 062 011 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :</b>	<b>992.100,00</b>	<b>992.100,00</b>	<b>-</b>	
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH :</b>	<b>12.632.757.797,00</b>	<b>11.839.455.385,86</b>	<b>(793.302.411,14)</b>	
	<b>SURPLUS/(DEFISIT) :</b>	<b>(12.631.765.697,00)</b>	<b>(11.838.463.285,86)</b>	<b>793.302.411,14</b>	

Keterangan :

- 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu  
(Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3)

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR  
 MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
 ORGANISASI : 02.07.14 - KECAMATAN KOTAGEDE

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.07 02.07.14 00 00 4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>367.000,00</b>	<b>367.000,00</b>	-	
02.07 02.07.14 00 00 4 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>367.000,00</b>	<b>367.000,00</b>	-	
02.07 02.07.14 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	367.000,00	367.000,00	-	
02.07 02.07.14 00 00 4 1 2 03	Retribusi Perizinan Tertentu	367.000,00	367.000,00	-	
02.07 02.07.14 00 00 4 1 2 03 06	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan	367.000,00	367.000,00	-	1)PD No 3/2012
02.07 02.07.14 00 00 5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>6.366.772.410,00</b>	<b>6.249.233.460,36</b>	<b>(117.538.949,64)</b>	
02.07 02.07.14 00 00 5 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1.969.171.410,00</b>	<b>1.921.723.951,00</b>	<b>(47.447.459,00)</b>	
02.07 02.07.14 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	1.969.171.410,00	1.921.723.951,00	(47.447.459,00)	
02.07 02.07.14 00 00	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>4.397.601.000,00</b>	<b>4.327.509.509,36</b>	<b>(70.091.490,64)</b>	
02.07 02.07.14 001	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>807.627.000,00</b>	<b>778.648.395,00</b>	<b>(28.978.605,00)</b>	
02.07 02.07.14 001 018	<b>Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi</b>	<b>87.502.000,00</b>	<b>85.611.150,00</b>	<b>(1.890.850,00)</b>	
02.07 02.07.14 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.14 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	87.502.000,00	85.611.150,00	(1.890.850,00)	
02.07 02.07.14 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.14 001 019	<b>Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>720.125.000,00</b>	<b>693.037.245,00</b>	<b>(27.087.755,00)</b>	
02.07 02.07.14 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	219.140.000,00	217.123.376,00	(2.016.624,00)	
02.07 02.07.14 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	315.506.900,00	301.651.319,00	(13.855.581,00)	
02.07 02.07.14 001 019 5 2 3	Belanja Modal	185.478.100,00	174.262.550,00	(11.215.550,00)	
02.07 02.07.14 002	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>271.956.000,00</b>	<b>268.457.369,00</b>	<b>(3.498.631,00)</b>	
02.07 02.07.14 002 022	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor</b>	<b>209.816.000,00</b>	<b>209.647.762,00</b>	<b>(168.238,00)</b>	
02.07 02.07.14 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.14 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	390.762,00	(9.238,00)	
02.07 02.07.14 002 022 5 2 3	Belanja Modal	209.416.000,00	209.257.000,00	(159.000,00)	
02.07 02.07.14 002 024	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	<b>62.140.000,00</b>	<b>58.809.607,00</b>	<b>(3.330.393,00)</b>	
02.07 02.07.14 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.14 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	62.140.000,00	58.809.607,00	(3.330.393,00)	
02.07 02.07.14 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.14 006	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>14.400.000,00</b>	<b>14.400.000,00</b>	-	
02.07 02.07.14 006 005	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD</b>	<b>14.400.000,00</b>	<b>14.400.000,00</b>	-	
02.07 02.07.14 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.14 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	14.400.000,00	-	
02.07 02.07.14 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.07 02.07.14 063	<b>Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede</b>	<b>3.303.618.000,00</b>	<b>3.266.003.745,36</b>	<b>(37.614.254,64)</b>	
02.07 02.07.14 063 001	<b>Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kotagede</b>	<b>256.055.000,00</b>	<b>254.315.000,00</b>	<b>(1.740.000,00)</b>	
02.07 02.07.14 063 001 5 2 1	Belanja Pegawai	74.800.000,00	73.680.000,00	(1.120.000,00)	
02.07 02.07.14 063 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	181.255.000,00	180.635.000,00	(620.000,00)	
02.07 02.07.14 063 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.14 063 002	<b>Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kotagede</b>	<b>175.971.000,00</b>	<b>175.957.679,00</b>	<b>(13.321,00)</b>	
02.07 02.07.14 063 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.14 063 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	175.971.000,00	175.957.679,00	(13.321,00)	
02.07 02.07.14 063 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.14 063 003	<b>Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kotagede</b>	<b>342.581.000,00</b>	<b>334.206.000,00</b>	<b>(8.375.000,00)</b>	
02.07 02.07.14 063 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.14 063 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	342.581.000,00	334.206.000,00	(8.375.000,00)	
02.07 02.07.14 063 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.14 063 004	<b>Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Rejowinangun</b>	<b>559.896.000,00</b>	<b>557.373.700,00</b>	<b>(2.522.300,00)</b>	
02.07 02.07.14 063 004 5 2 1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	2.700.000,00	-	
02.07 02.07.14 063 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	557.196.000,00	554.673.700,00	(2.522.300,00)	
02.07 02.07.14 063 004 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.14 063 005	<b>Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prenggan</b>	<b>560.479.000,00</b>	<b>553.419.550,00</b>	<b>(7.059.450,00)</b>	
02.07 02.07.14 063 005 5 2 1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	2.700.000,00	-	
02.07 02.07.14 063 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	557.779.000,00	550.719.550,00	(7.059.450,00)	
02.07 02.07.14 063 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.14 063 006	<b>Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purbayan</b>	<b>483.876.000,00</b>	<b>466.958.000,00</b>	<b>(16.918.000,00)</b>	
02.07 02.07.14 063 006 5 2 1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	2.700.000,00	-	
02.07 02.07.14 063 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	481.176.000,00	464.258.000,00	(16.918.000,00)	
02.07 02.07.14 063 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.14 063 007	<b>Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kotagede</b>	<b>924.760.000,00</b>	<b>923.773.816,36</b>	<b>(986.183,64)</b>	
02.07 02.07.14 063 007 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.14 063 007 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	924.760.000,00	923.773.816,36	(986.183,64)	
02.07 02.07.14 063 007 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :</b>	<b>367.000,00</b>	<b>367.000,00</b>	<b>-</b>	
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH :</b>	<b>6.366.772.410,00</b>	<b>6.249.233.460,36</b>	<b>(117.538.949,64)</b>	
	<b>SURPLUS/(DEFISIT) :</b>	<b>(6.366.405.410,00)</b>	<b>(6.248.866.460,36)</b>	<b>117.538.949,64</b>	

Keterangan :

- 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3)

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR  
 MACAM URUSAN : 02.08 - PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA SEJAHTERA  
 ORGANISASI : 02.08.01 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.08 02.08.01 4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	-	-	-	
02.08 02.08.01 00 00 5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>8.818.020.989,00</b>	<b>8.299.654.850,00</b>	<b>(518.366.139,00)</b>	
02.08 02.08.01 00 00 5 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1.253.781.329,00</b>	<b>1.148.137.814,00</b>	<b>(105.643.515,00)</b>	
02.08 02.08.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	1.253.781.329,00	1.148.137.814,00	(105.643.515,00)	
02.08 02.08.01 00 00	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>7.564.239.660,00</b>	<b>7.151.517.036,00</b>	<b>(412.722.624,00)</b>	
02.08 02.08.01 001	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>865.369.260,00</b>	<b>824.216.803,00</b>	<b>(41.152.457,00)</b>	
02.08 02.08.01 001 018	<b>Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi</b>	<b>107.840.000,00</b>	<b>107.482.979,00</b>	<b>(357.021,00)</b>	
02.08 02.08.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.08 02.08.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	107.840.000,00	107.482.979,00	(357.021,00)	
02.08 02.08.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.08 02.08.01 001 019	<b>Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>757.529.260,00</b>	<b>716.733.824,00</b>	<b>(40.795.436,00)</b>	
02.08 02.08.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	53.715.200,00	53.398.638,00	(316.562,00)	
02.08 02.08.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	494.701.060,00	460.581.886,00	(34.119.174,00)	
02.08 02.08.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	209.113.000,00	202.753.300,00	(6.359.700,00)	
02.08 02.08.01 002	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>384.799.000,00</b>	<b>361.659.567,00</b>	<b>(23.139.433,00)</b>	
02.08 02.08.01 002 022	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor</b>	<b>250.899.000,00</b>	<b>250.328.980,00</b>	<b>(570.020,00)</b>	
02.08 02.08.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.08 02.08.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	250.899.000,00	250.328.980,00	(570.020,00)	
02.08 02.08.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.08 02.08.01 002 024	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	<b>133.900.000,00</b>	<b>111.330.587,00</b>	<b>(22.569.413,00)</b>	
02.08 02.08.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.08 02.08.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	133.900.000,00	111.330.587,00	(22.569.413,00)	
02.08 02.08.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.08 02.08.01 006	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>13.920.000,00</b>	<b>13.751.000,00</b>	<b>(169.000,00)</b>	
02.08 02.08.01 006 005	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD</b>	<b>13.920.000,00</b>	<b>13.751.000,00</b>	<b>(169.000,00)</b>	
02.08 02.08.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.08 02.08.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	13.920.000,00	13.751.000,00	(169.000,00)	
02.08 02.08.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.08 02.08.01 064	<b>Program Pengendalian Penduduk</b>	<b>2.458.124.400,00</b>	<b>2.298.634.078,00</b>	<b>(159.490.322,00)</b>	
02.08 02.08.01 064 001	<b>Pengendalian Penduduk</b>	<b>295.354.400,00</b>	<b>281.080.081,00</b>	<b>(14.274.319,00)</b>	
02.08 02.08.01 064 001 5 2 1	Belanja Pegawai	10.650.000,00	10.050.000,00	(600.000,00)	
02.08 02.08.01 064 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	284.704.400,00	271.030.081,00	(13.674.319,00)	
02.08 02.08.01 064 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.08 02.08.01 064 002	<b>Pengelolaan Data, Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi</b>	<b>2.162.770.000,00</b>	<b>2.017.553.997,00</b>	<b>(145.216.003,00)</b>	
02.08 02.08.01 064 002 5 2 1	Belanja Pegawai	798.160.000,00	794.320.000,00	(3.840.000,00)	
02.08 02.08.01 064 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	995.710.000,00	854.333.997,00	(141.376.003,00)	
02.08 02.08.01 064 002 5 2 3	Belanja Modal	368.900.000,00	368.900.000,00	-	
02.08 02.08.01 065	<b>Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga</b>	<b>3.842.027.000,00</b>	<b>3.653.255.588,00</b>	<b>(188.771.412,00)</b>	
02.08 02.08.01 065 001	<b>Pelayanan Keluarga Berencana</b>	<b>2.340.162.000,00</b>	<b>2.219.891.991,00</b>	<b>(120.270.009,00)</b>	
02.08 02.08.01 065 001 5 2 1	Belanja Pegawai	18.300.000,00	17.400.000,00	(900.000,00)	
02.08 02.08.01 065 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2.321.862.000,00	2.202.491.991,00	(119.370.009,00)	
02.08 02.08.01 065 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.08 02.08.01 065 002	<b>Pembinaan Pembangunan Keluarga</b>	<b>1.501.865.000,00</b>	<b>1.433.363.597,00</b>	<b>(68.501.403,00)</b>	
02.08 02.08.01 065 002 5 2 1	Belanja Pegawai	241.525.000,00	234.050.000,00	(7.475.000,00)	
02.08 02.08.01 065 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.260.340.000,00	1.199.313.597,00	(61.026.403,00)	
02.08 02.08.01 065 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH :</b>	<b>8.818.020.989,00</b>	<b>8.299.654.850,00</b>	<b>(518.366.139,00)</b>	
	<b>SURPLUS/(DEFISIT) :</b>	<b>(8.818.020.989,00)</b>	<b>(8.299.654.850,00)</b>	<b>518.366.139,00</b>	

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR  
 MACAM URUSAN : 02.09 - PERHUBUNGAN  
 ORGANISASI : 02.09.01- DINAS PERHUBUNGAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.09 02.09.01 00 00 4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>8.397.402.800,00</b>	<b>8.370.065.200,00</b>	<b>(27.807.200,00)</b>	
02.09 02.09.01 00 00 4 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>8.397.402.800,00</b>	<b>8.370.065.200,00</b>	<b>(27.807.200,00)</b>	
02.09 02.09.01 00 00 4 1 2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	<b>8.180.097.000,00</b>	<b>7.945.781.000,00</b>	<b>(234.316.000,00)</b>	
02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 01	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>7.641.270.000,00</b>	<b>7.392.955.000,00</b>	<b>(248.315.000,00)</b>	
02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 01 05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	6.800.000.000,00	6.562.625.000,00	(237.375.000,00)	1)PD
02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 01 07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	841.270.000,00	830.330.000,00	(10.940.000,00)	No 5/2012
02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 02	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>538.827.000,00</b>	<b>552.826.000,00</b>	<b>13.999.000,00</b>	
02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 02 05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	538.827.000,00	552.826.000,00	13.999.000,00	2)PD No 4/2012
02.09 02.09.01 00 00 4 1 4	<b>Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah</b>	<b>217.305.800,00</b>	<b>424.284.200,00</b>	<b>206.508.800,00</b>	
02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 08	<b>Pendapatan Denda Retribusi</b>	<b>211.305.800,00</b>	<b>418.284.200,00</b>	<b>206.508.800,00</b>	
02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 15	<b>Pendapatan dari Barang Milik Daerah</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	-	3)Perwal No 47/2010
02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 15 01	Sewa Lahan Terminal	-	-	-	
02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 15 03	Sewa Penginapan Awak Bus Terminal	-	-	-	
02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 15 04	Sewa Hotel Terminal	-	-	-	
02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 15 01	Sewa Kantin pada Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor	6.000.000,00	6.000.000,00	-	3)Perwal No 47/2010
02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 26	Penerimaan Pendapatan Terminal	-	-	-	3)Perwal
02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 26 01	Service Charge	-	-	-	No 47/2010
02.09 02.09.01 00 00 5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>21.445.763.540,00</b>	<b>19.839.515.341,89</b>	<b>(1.606.248.198,11)</b>	
02.09 02.09.01 00 00 5 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>4.064.623.631,00</b>	<b>4.039.506.024,00</b>	<b>(25.117.607,00)</b>	
02.09 02.09.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	4.064.623.631,00	4.039.506.024,00	(25.117.607,00)	
02.09 02.09.01 00 00	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>17.381.139.909,00</b>	<b>15.800.009.317,89</b>	<b>(1.581.130.591,11)</b>	
02.09 02.09.01 001	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>2.949.909.013,00</b>	<b>2.723.779.273,32</b>	<b>(226.129.739,68)</b>	
02.09 02.09.01 001 018	<b>Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi</b>	<b>223.710.000,00</b>	<b>216.760.629,00</b>	<b>(6.949.371,00)</b>	
02.09 02.09.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.09 02.09.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	223.710.000,00	216.760.629,00	(6.949.371,00)	
02.09 02.09.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.09 02.09.01 001 019	<b>Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>2.726.199.013,00</b>	<b>2.507.018.644,32</b>	<b>(219.180.368,68)</b>	
02.09 02.09.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	418.956.729,00	408.492.690,32	(10.464.038,68)	
02.09 02.09.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.043.528.753,00	966.908.659,00	(76.620.094,00)	
02.09 02.09.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	1.263.713.531,00	1.131.617.295,00	(132.096.236,00)	
02.09 02.09.01 002	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>642.982.350,00</b>	<b>514.670.975,00</b>	<b>(128.311.375,00)</b>	
02.09 02.09.01 002 022	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>299.348.000,00</b>	<b>(652.000,00)</b>	
02.09 02.09.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.09 02.09.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	
02.09 02.09.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	300.000.000,00	299.348.000,00	(652.000,00)	
02.09 02.09.01 002 024	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	<b>342.982.350,00</b>	<b>215.322.975,00</b>	<b>(127.659.375,00)</b>	
02.09 02.09.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.09 02.09.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	342.982.350,00	215.322.975,00	(127.659.375,00)	
02.09 02.09.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.09 02.09.01 005	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>37.500.000,00</b>	<b>(7.500.000,00)</b>	
02.09 02.09.01 005 006	<b>Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>37.500.000,00</b>	<b>(7.500.000,00)</b>	
02.09 02.09.01 005 006 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.09 02.09.01 005 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	37.500.000,00	(7.500.000,00)	
02.09 02.09.01 005 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.09 02.09.01 006	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>60.220.000,00</b>	<b>59.725.000,00</b>	<b>(495.000,00)</b>	
02.09 02.09.01 006 005	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD</b>	<b>60.220.000,00</b>	<b>59.725.000,00</b>	<b>(495.000,00)</b>	
02.09 02.09.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.09 02.09.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	60.220.000,00	59.725.000,00	(495.000,00)	
02.09 02.09.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.09 02.09.01 066	<b>Program Pengelolaan Lalu Lintas</b>	<b>4.455.930.207,00</b>	<b>3.691.058.462,61</b>	<b>(764.871.744,39)</b>	
02.09 02.09.01 066 001	<b>Kajian dan Pengembangan Lalu Lintas</b>	<b>536.010.000,00</b>	<b>514.977.700,00</b>	<b>(21.032.300,00)</b>	
02.09 02.09.01 066 001 5 2 1	Belanja Pegawai	15.510.000,00	15.510.000,00	-	
02.09 02.09.01 066 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	150.500.000,00	144.340.700,00	(6.159.300,00)	
02.09 02.09.01 066 001 5 2 3	Belanja Modal	370.000.000,00	355.127.000,00	(14.873.000,00)	
02.09 02.09.01 066 002	<b>Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas</b>	<b>496.926.207,00</b>	<b>481.140.779,52</b>	<b>(15.785.427,48)</b>	
02.09 02.09.01 066 002 5 2 1	Belanja Pegawai	20.625.000,00	17.875.000,00	(2.750.000,00)	
02.09 02.09.01 066 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	254.075.407,00	246.031.779,52	(8.043.627,48)	
02.09 02.09.01 066 002 5 2 3	Belanja Modal	222.225.800,00	217.234.000,00	(4.991.800,00)	
02.09 02.09.01 066 003	<b>Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</b>	<b>3.422.994.000,00</b>	<b>2.694.939.983,09</b>	<b>(728.054.016,91)</b>	
02.09 02.09.01 066 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.09 02.09.01 066 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.730.794.000,00	1.515.620.153,16	(215.173.846,84)	
02.09 02.09.01 066 003 5 2 3	Belanja Modal	1.692.200.000,00	1.179.319.829,93	(512.880.170,07)	
02.09 02.09.01 067	<b>Program Angkutan Jalan, Pengendalian Operasional dan Keselamatan Lalu Lintas</b>	<b>2.361.168.339,00</b>	<b>2.258.163.714,96</b>	<b>(103.004.624,04)</b>	
02.09 02.09.01 067 001	<b>Penyelenggaraan Angkutan</b>	<b>256.880.000,00</b>	<b>247.214.200,00</b>	<b>(9.665.800,00)</b>	
02.09 02.09.01 067 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.09 02.09.01 067 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	99.380.000,00	91.138.200,00	(8.241.800,00)	
02.09 02.09.01 067 001 5 2 3	Belanja Modal	157.500.000,00	156.076.000,00	(1.424.000,00)	
02.09 02.09.01 067 002	<b>Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor</b>	<b>1.037.382.996,00</b>	<b>1.018.947.874,88</b>	<b>(18.435.121,12)</b>	
02.09 02.09.01 067 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.09 02.09.01 067 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	953.982.996,00	937.751.874,88	(16.231.121,12)	
02.09 02.09.01 067 002 5 2 3	Belanja Modal	83.400.000,00	81.196.000,00	(2.204.000,00)	
02.09 02.09.01 067 003	<b>Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas</b>	<b>527.128.154,00</b>	<b>521.694.152,88</b>	<b>(5.434.001,12)</b>	
02.09 02.09.01 067 003 5 2 1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	4.500.000,00	-	
02.09 02.09.01 067 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	512.728.154,00	507.294.152,88	(5.434.001,12)	
02.09 02.09.01 067 003 5 2 3	Belanja Modal	9.900.000,00	9.900.000,00	-	
02.09 02.09.01 067 004	<b>Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional di Bidang Perhubungan</b>	<b>539.777.189,00</b>	<b>470.307.487,20</b>	<b>(69.469.701,80)</b>	
02.09 02.09.01 067 004 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.09 02.09.01 067 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	509.777.189,00	440.307.487,20	(69.469.701,80)	
02.09 02.09.01 067 004 5 2 3	Belanja Modal	30.000.000,00	30.000.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.09 02.09.01 068	<b>Program Pengelolaan Perparkiran</b>	<b>6.865.930.000,00</b>	<b>6.515.111.892,00</b>	<b>(350.818.108,00)</b>	
02.09 02.09.01 068 001	<b>Operasional Penyelenggaraan Perparkiran</b>	<b>6.129.236.000,00</b>	<b>5.806.330.892,00</b>	<b>(322.905.108,00)</b>	
02.09 02.09.01 068 001 5 2 1	Belanja Pegawai	23.760.000,00	20.790.000,00	(2.970.000,00)	
02.09 02.09.01 068 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	6.105.476.000,00	5.785.540.892,00	(319.935.108,00)	
02.09 02.09.01 068 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.09 02.09.01 068 002	<b>Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran</b>	<b>736.694.000,00</b>	<b>708.781.000,00</b>	<b>(27.913.000,00)</b>	
02.09 02.09.01 068 002 5 2 1	Belanja Pegawai	35.200.000,00	35.200.000,00	-	
02.09 02.09.01 068 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	303.494.000,00	281.570.000,00	(21.924.000,00)	
02.09 02.09.01 068 002 5 2 3	Belanja Modal	398.000.000,00	392.011.000,00	(5.989.000,00)	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :</b>	<b>8.397.402.800,00</b>	<b>8.370.065.200,00</b>	<b>(27.807.200,00)</b>	
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH :</b>	<b>21.445.763.540,00</b>	<b>19.839.515.341,89</b>	<b>(1.606.248.198,11)</b>	
	<b>SURPLUS/(DEFISIT) :</b>	<b>(13.048.360.740,00)</b>	<b>(11.469.450.141,89)</b>	<b>1.578.440.998,11</b>	

Keterangan :

- 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)
- 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4)
- 3) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa dan Pendapatan Tanah/atau Bangunan Gedung Milik Pemda Untuk Kegiatan Usaha

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR  
 MACAM URUSAN : 02.10 - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
 ORGANISASI : 02.10.01 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.10 02.10.01 00 00 4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	-	-	-	
02.10 02.10.01 00 00 5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>25.475.478.349,00</b>	<b>24.116.097.642,00</b>	<b>(1.359.380.707,00)</b>	
02.10 02.10.01 00 00 5 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>3.191.150.581,00</b>	<b>2.969.096.503,00</b>	<b>(222.054.078,00)</b>	
02.10 02.10.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	3.191.150.581,00	2.969.096.503,00	(222.054.078,00)	
02.10 02.10.01 00 00 5 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>22.284.327.768,00</b>	<b>21.147.001.139,00</b>	<b>(1.137.326.629,00)</b>	
02.10 02.10.01 001	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	<b>1.361.262.000,00</b>	<b>1.244.526.552,00</b>	<b>(116.735.448,00)</b>	
02.10 02.10.01 001 018	<b>Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi</b>	<b>382.015.000,00</b>	<b>364.780.757,00</b>	<b>(17.234.243,00)</b>	
02.10 02.10.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.10 02.10.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	382.015.000,00	364.780.757,00	(17.234.243,00)	
02.10 02.10.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.10 02.10.01 001 019	<b>Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>979.247.000,00</b>	<b>879.745.795,00</b>	<b>(99.501.205,00)</b>	
02.10 02.10.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	113.449.440,00	95.420.052,00	(18.029.388,00)	
02.10 02.10.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	621.497.560,00	551.704.743,00	(69.792.817,00)	
02.10 02.10.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	244.300.000,00	232.621.000,00	(11.679.000,00)	
02.10 02.10.01 002	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	<b>341.694.000,00</b>	<b>285.591.012,00</b>	<b>(56.102.988,00)</b>	
02.10 02.10.01 002 022	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor</b>	<b>199.000.000,00</b>	<b>198.107.000,00</b>	<b>(893.000,00)</b>	
02.10 02.10.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.10 02.10.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	
02.10 02.10.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	199.000.000,00	198.107.000,00	(893.000,00)	
02.10 02.10.01 002 024	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	<b>142.694.000,00</b>	<b>87.484.012,00</b>	<b>(55.209.988,00)</b>	
02.10 02.10.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.10 02.10.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	142.694.000,00	87.484.012,00	(55.209.988,00)	
02.10 02.10.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.10 02.10.01 005	<i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>	<b>87.000.000,00</b>	<b>85.760.000,00</b>	<b>(1.240.000,00)</b>	
02.10 02.10.01 005 006	<b>Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur</b>	<b>87.000.000,00</b>	<b>85.760.000,00</b>	<b>(1.240.000,00)</b>	
02.10 02.10.01 005 006 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.10 02.10.01 005 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	87.000.000,00	85.760.000,00	(1.240.000,00)	
02.10 02.10.01 005 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.10 02.10.01 006	<i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>	<b>30.833.620,00</b>	<b>30.794.142,00</b>	<b>(39.478,00)</b>	
02.10 02.10.01 006 005	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD</b>	<b>30.833.620,00</b>	<b>30.794.142,00</b>	<b>(39.478,00)</b>	
02.10 02.10.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.10 02.10.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	30.833.620,00	30.794.142,00	(39.478,00)	
02.10 02.10.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.10 02.10.01 069	<b>Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Telematika</b>	<b>14.684.585.048,00</b>	<b>13.814.368.142,00</b>	<b>(870.216.906,00)</b>	
02.10 02.10.01 069 001	<b>Pengelolaan Aplikasi Teknologi Informasi dan Telematika</b>	<b>805.410.000,00</b>	<b>731.671.300,00</b>	<b>(73.738.700,00)</b>	
02.10 02.10.01 069 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.10 02.10.01 069 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	448.100.000,00	434.525.800,00	(13.574.200,00)	
02.10 02.10.01 069 001 5 2 3	Belanja Modal	357.310.000,00	297.145.500,00	(60.164.500,00)	
02.10 02.10.01 069 002	<b>Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Teknologi Informasi dan Telematika</b>	<b>13.442.478.000,00</b>	<b>12.768.079.742,00</b>	<b>(674.398.258,00)</b>	
02.10 02.10.01 069 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.10 02.10.01 069 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	6.225.609.200,00	5.859.694.026,00	(365.915.174,00)	
02.10 02.10.01 069 002 5 2 3	Belanja Modal	7.216.868.800,00	6.908.385.716,00	(308.483.084,00)	
02.10 02.10.01 069 003	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Smart City</b>	<b>436.697.048,00</b>	<b>314.617.100,00</b>	<b>(122.079.948,00)</b>	
02.10 02.10.01 069 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.10 02.10.01 069 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	116.797.048,00	66.924.100,00	(49.872.948,00)	
02.10 02.10.01 069 003 5 2 3	Belanja Modal	319.900.000,00	247.693.000,00	(72.207.000,00)	
02.10 02.10.01 070	<b>Program Pengelolaan Informasi dan Statistik</b>	<b>2.360.619.000,00</b>	<b>2.343.143.178,00</b>	<b>(17.475.822,00)</b>	
02.10 02.10.01 070 001	<b>Promosi Publikasi dan Kemitraan Informasi</b>	<b>2.360.619.000,00</b>	<b>2.343.143.178,00</b>	<b>(17.475.822,00)</b>	
02.10 02.10.01 070 001 5 2 1	Belanja Pegawai	29.400.000,00	29.400.000,00	-	
02.10 02.10.01 070 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2.228.058.800,00	2.210.583.178,00	(17.475.622,00)	
02.10 02.10.01 070 001 5 2 3	Belanja Modal	103.160.200,00	103.160.000,00	(200,00)	
02.10 02.10.01 071	<b>Program Peningkatan Komunikasi Publik</b>	<b>1.517.524.100,00</b>	<b>1.501.649.938,00</b>	<b>(15.874.162,00)</b>	
02.10 02.10.01 071 001	<b>Kehumasan dan Pelayanan Informasi</b>	<b>1.217.006.100,00</b>	<b>1.213.761.438,00</b>	<b>(3.244.662,00)</b>	
02.10 02.10.01 071 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.10 02.10.01 071 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.178.946.100,00	1.176.201.438,00	(2.744.662,00)	
02.10 02.10.01 071 001 5 2 3	Belanja Modal	38.060.000,00	37.560.000,00	(500.000,00)	
02.10 02.10.01 071 002	<b>Pengelolaan Keluhan dan Aduan</b>	<b>300.518.000,00</b>	<b>287.888.500,00</b>	<b>(12.629.500,00)</b>	
02.10 02.10.01 071 002 5 2 1	Belanja Pegawai	21.650.000,00	21.650.000,00	-	
02.10 02.10.01 071 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	276.368.000,00	264.858.500,00	(11.509.500,00)	
02.10 02.10.01 071 002 5 2 3	Belanja Modal	2.500.000,00	1.380.000,00	(1.120.000,00)	
02.14 02.10.01 070	<b>Program Pengelolaan Informasi dan Statistik</b>	<b>259.681.000,00</b>	<b>245.943.200,00</b>	<b>(13.737.800,00)</b>	
02.14 02.10.01 070 001	<b>Pengelolaan Informasi dan Data Statistik</b>	<b>259.681.000,00</b>	<b>245.943.200,00</b>	<b>(13.737.800,00)</b>	
02.14 02.10.01 070 001 5 2 1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	13.000.000,00	(5.000.000,00)	
02.14 02.10.01 070 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	241.681.000,00	232.943.200,00	(8.737.800,00)	
02.14 02.10.01 070 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.15 02.10.01 080	<b>Program Peningkatan Pelayanan Persandian</b>	<b>1.641.129.000,00</b>	<b>1.595.224.975,00</b>	<b>(45.904.025,00)</b>	
02.15 02.10.01 080 001	<b>Operasional Persandian dan Telekomunikasi</b>	<b>878.335.000,00</b>	<b>839.009.733,00</b>	<b>(39.325.267,00)</b>	
02.15 02.10.01 080 001 5 2 1	Belanja Pegawai	7.150.000,00	5.500.000,00	(1.650.000,00)	
02.15 02.10.01 080 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	375.605.000,00	363.522.733,00	(12.082.267,00)	
02.15 02.10.01 080 001 5 2 3	Belanja Modal	495.580.000,00	469.987.000,00	(25.593.000,00)	
02.15 02.10.01 080 002	<b>Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi</b>	<b>476.631.500,00</b>	<b>471.546.742,00</b>	<b>(5.084.758,00)</b>	
02.15 02.10.01 080 002 5 2 1	Belanja Pegawai	2.750.000,00	2.750.000,00	-	
02.15 02.10.01 080 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	95.401.500,00	93.190.500,00	(2.211.000,00)	
02.15 02.10.01 080 002 5 2 3	Belanja Modal	378.480.000,00	375.606.242,00	(2.873.758,00)	
02.15 02.10.01 080 003	<b>Pengawasan dan Pengendalian Komunikasi dan Informatika</b>	<b>286.162.500,00</b>	<b>284.668.500,00</b>	<b>(1.494.000,00)</b>	
02.15 02.10.01 080 003 5 2 1	Belanja Pegawai	2.475.000,00	2.475.000,00	-	
02.15 02.10.01 080 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	182.477.500,00	181.474.500,00	(1.003.000,00)	
02.15 02.10.01 080 003 5 2 3	Belanja Modal	101.210.000,00	100.719.000,00	(491.000,00)	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH :</b>	<b>25.475.478.349,00</b>	<b>24.116.097.642,00</b>	<b>(1.359.380.707,00)</b>	
	<b>SURPLUS/(DEFISIT):</b>	<b>(25.475.478.349,00)</b>	<b>(24.116.097.642,00)</b>	<b>1.359.380.707,00</b>	



URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR  
 MACAM URUSAN : 02.11 - KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
 ORGANISASI : 02.11.01 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.11 02.11.01 00 00 4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>367.786.345,00</b>	<b>245.300.742,02</b>	<b>(122.485.602,98)</b>	
02.11 02.11.01 00 00 4 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>367.786.345,00</b>	<b>245.300.742,02</b>	<b>(122.485.602,98)</b>	
02.11 02.11.01 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	336.000.000,00	221.723.700,00	(114.276.300,00)	
02.11 02.11.01 00 00 4 1 2 03	Retribusi Perizinan Tertentu	336.000.000,00	221.723.700,00	(114.276.300,00)	
02.11 02.11.01 00 00 4 1 2 03 06	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	336.000.000,00	221.723.700,00	(114.276.300,00)	1)PD No 5/2017
02.11 02.11.01 00 00 4 1 4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	31.786.345,00	23.577.042,02	(8.209.302,98)	
02.11 02.11.01 00 00 4 1 4 22	Pendapatan dari BUKP	31.786.345,00	23.577.042,02	(8.209.302,98)	
02.11 02.11.01 00 00 4 1 4 22 01	Pendapatan dari BUKP	31.786.345,00	23.577.042,02	(8.209.302,98)	2)Kep.Gub.No. 71/KEP/2017
	- Dana Pembinaan BUKP	18.163.626,00	13.472.595,43	(4.691.030,57)	
	- Jasa Produksi BUKP	13.622.719,00	10.104.446,59	(3.518.272,41)	
02.11 02.11.01 00 00 5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>16.997.387.074,00</b>	<b>16.231.811.993,88</b>	<b>(765.575.080,12)</b>	
02.11 02.11.01 00 00 5 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>3.420.906.074,00</b>	<b>3.272.777.137,00</b>	<b>(148.128.937,00)</b>	
02.11 02.11.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	3.420.906.074,00	3.272.777.137,00	(148.128.937,00)	
02.11 02.11.01 00 00	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>13.576.481.000,00</b>	<b>12.959.034.856,88</b>	<b>(617.446.143,12)</b>	
02.11 02.11.01 001	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.983.621.000,00</b>	<b>1.792.521.973,88</b>	<b>(191.099.026,12)</b>	
02.11 02.11.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1.049.355.000,00	916.285.373,00	(133.069.627,00)	
02.11 02.11.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.11 02.11.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.049.355.000,00	916.285.373,00	(133.069.627,00)	
02.11 02.11.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.11 02.11.01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	934.266.000,00	876.236.600,88	(58.029.399,12)	
02.11 02.11.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	106.541.200,00	106.535.802,88	(5.397,12)	
02.11 02.11.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	457.374.800,00	404.353.998,00	(53.020.802,00)	
02.11 02.11.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	370.350.000,00	365.346.800,00	(5.003.200,00)	
02.11 02.11.01 002	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>290.055.000,00</b>	<b>270.082.250,00</b>	<b>(19.972.750,00)</b>	
02.11 02.11.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	133.990.000,00	133.490.000,00	(500.000,00)	
02.11 02.11.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.11 02.11.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	133.990.000,00	133.490.000,00	(500.000,00)	
02.11 02.11.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.11 02.11.01 002 024	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	<b>156.065.000,00</b>	<b>136.592.250,00</b>	<b>(19.472.750,00)</b>	
02.11 02.11.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.11 02.11.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	156.065.000,00	136.592.250,00	(19.472.750,00)	
02.11 02.11.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.11 02.11.01 006	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>10.492.600,00</b>	<b>(7.400,00)</b>	
02.11 02.11.01 006 005	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>10.492.600,00</b>	<b>(7.400,00)</b>	
02.11 02.11.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.11 02.11.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	10.492.600,00	(7.400,00)	
02.11 02.11.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.11 02.11.01 072	<b>Program Peningkatan Kualitas Koperasi</b>	<b>1.137.871.000,00</b>	<b>1.134.249.700,00</b>	<b>(3.621.300,00)</b>	
02.11 02.11.01 072 001	<b>Pembinaan Kelembagaan Koperasi</b>	<b>785.185.000,00</b>	<b>783.653.550,00</b>	<b>(1.531.450,00)</b>	
02.11 02.11.01 072 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.11 02.11.01 072 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	785.185.000,00	783.653.550,00	(1.531.450,00)	
02.11 02.11.01 072 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.11 02.11.01 072 002	<b>Pembinaan dan Pengembangan Koperasi</b>	<b>352.686.000,00</b>	<b>350.596.150,00</b>	<b>(2.089.850,00)</b>	
02.11 02.11.01 072 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.11 02.11.01 072 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	352.686.000,00	350.596.150,00	(2.089.850,00)	
02.11 02.11.01 072 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
01.06 01.06.01 073	<b>Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah</b>	<b>4.706.636.000,00</b>	<b>4.418.319.303,00</b>	<b>(288.316.697,00)</b>	
02.11 02.11.01 073 001	<b>Kemitraan dan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil</b>	<b>995.304.000,00</b>	<b>900.503.600,00</b>	<b>(94.800.400,00)</b>	
02.11 02.11.01 073 001 5 2 1	Belanja Pegawai	62.550.000,00	41.650.000,00	(20.900.000,00)	
02.11 02.11.01 073 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	932.754.000,00	858.853.600,00	(73.900.400,00)	
02.11 02.11.01 073 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.11 02.11.01 073 002	<b>Pembinaan Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil</b>	<b>3.711.332.000,00</b>	<b>3.517.815.703,00</b>	<b>(193.516.297,00)</b>	
02.11 02.11.01 073 002 5 2 1	Belanja Pegawai	44.875.000,00	35.975.000,00	(8.900.000,00)	
02.11 02.11.01 073 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	3.666.457.000,00	3.481.840.703,00	(184.616.297,00)	
02.11 02.11.01 073 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.01 02.11.01 037	<b>Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi</b>	<b>4.242.413.000,00</b>	<b>4.141.296.089,00</b>	<b>(101.116.911,00)</b>	
02.01 02.11.01 037 001	<b>Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja</b>	<b>2.543.707.000,00</b>	<b>2.474.496.717,00</b>	<b>(69.210.283,00)</b>	
02.01 02.11.01 037 001 5 2 1	Belanja Pegawai	25.200.000,00	25.200.000,00	-	
02.01 02.11.01 037 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2.518.507.000,00	2.449.296.717,00	(69.210.283,00)	
02.01 02.11.01 037 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.01 02.11.01 037 002	<b>Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja</b>	<b>1.698.706.000,00</b>	<b>1.666.799.372,00</b>	<b>(31.906.628,00)</b>	
02.01 02.11.01 037 002 5 2 1	Belanja Pegawai	82.750.000,00	82.750.000,00	-	
02.01 02.11.01 037 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.615.956.000,00	1.584.049.372,00	(31.906.628,00)	
02.01 02.11.01 037 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.01 02.11.01 038	<b>Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja</b>	<b>992.440.000,00</b>	<b>979.146.160,00</b>	<b>(13.293.840,00)</b>	
02.01 02.11.01 038 001	<b>Pembinaan Pengembangan Pekerja dan Pengupahan</b>	<b>472.382.000,00</b>	<b>471.384.310,00</b>	<b>(997.690,00)</b>	
02.01 02.11.01 038 001 5 2 1	Belanja Pegawai	65.175.000,00	65.175.000,00	-	
02.01 02.11.01 038 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	407.207.000,00	406.209.310,00	(997.690,00)	
02.01 02.11.01 038 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.01 02.11.01 038 002	<b>Pelayanan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja</b>	<b>520.058.000,00</b>	<b>507.761.850,00</b>	<b>(12.296.150,00)</b>	
02.01 02.11.01 038 002 5 2 1	Belanja Pegawai	56.450.000,00	56.450.000,00	-	
02.01 02.11.01 038 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	463.608.000,00	451.311.850,00	(12.296.150,00)	
02.01 02.11.01 038 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
03.06 02.11.01 037	<b>Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi</b>	<b>212.945.000,00</b>	<b>212.926.781,00</b>	<b>(18.219,00)</b>	
03.06 02.11.01 037 001	<b>Penempatan Transmigrasi</b>	<b>212.945.000,00</b>	<b>212.926.781,00</b>	<b>(18.219,00)</b>	
03.06 02.11.01 037 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
03.06 02.11.01 037 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	212.945.000,00	212.926.781,00	(18.219,00)	
03.06 02.11.01 037 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :</b>	<b>367.786.345,00</b>	<b>245.300.742,02</b>	<b>(122.485.602,98)</b>	
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH :</b>	<b>16.997.387.074,00</b>	<b>16.231.811.993,88</b>	<b>(765.575.080,12)</b>	
	<b>SURPLUS/(DEFISIT) :</b>	<b>(16.629.600.729,00)</b>	<b>(15.986.511.251,86)</b>	<b>643.089.477,14</b>	

Keterangan :

- 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
- 2) Keputusan Gubernur DIY Nomor 71/KEP/2017 tentang Pembagian Laba Bersih Badan Usaha Kredit Pedesaan Tahun Buku 2017

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR  
 MACAM URUSAN : 02.12 - PENANAMAN MODAL  
 ORGANISASI : 02.12.01 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.12 02.12.01 00 00 4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>4.722.996.353,00</b>	<b>2.958.873.500,00</b>	<b>(1.764.122.853,00)</b>	
02.12 02.12.01 00 00 4 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>4.722.996.353,00</b>	<b>2.958.873.500,00</b>	<b>(1.764.122.853,00)</b>	
02.12 02.12.01 00 00 4 1 2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	<b>4.722.996.353,00</b>	<b>2.958.873.500,00</b>	<b>(1.764.122.853,00)</b>	
02.12 02.12.01 00 00 4 1 2 03	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>4.722.996.353,00</b>	<b>2.958.873.500,00</b>	<b>(1.764.122.853,00)</b>	
02.12 02.12.01 00 00 4 1 2 03 01	Retribusi izin Mendirikan Bangunan	4.722.996.353,00	2.958.873.500,00	(1.764.122.853,00)	1)PD No 3/2012
02.12 02.12.01 00 00 5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>7.331.820.940,00</b>	<b>6.844.718.384,12</b>	<b>(487.102.555,88)</b>	
02.12 02.12.01 00 00 5 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>3.209.740.940,00</b>	<b>3.053.773.661,00</b>	<b>(155.967.279,00)</b>	
02.12 02.12.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	3.209.740.940,00	3.053.773.661,00	(155.967.279,00)	
02.12 02.12.01 00 00	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>4.122.080.000,00</b>	<b>3.790.944.723,12</b>	<b>(331.135.276,88)</b>	
02.12 02.12.01 001	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>2.233.675.000,00</b>	<b>2.047.369.036,76</b>	<b>(186.305.963,24)</b>	
02.12 02.12.01 001 018	<b>Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi</b>	<b>367.557.000,00</b>	<b>367.212.120,00</b>	<b>(344.880,00)</b>	
02.12 02.12.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.12 02.12.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	367.557.000,00	367.212.120,00	(344.880,00)	
02.12 02.12.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.12 02.12.01 001 019	<b>Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>1.866.118.000,00</b>	<b>1.680.156.916,76</b>	<b>(185.961.083,24)</b>	
02.12 02.12.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	450.411.532,00	398.419.117,44	(51.992.414,56)	
02.12 02.12.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.131.313.668,00	1.000.257.799,32	(131.055.868,68)	
02.12 02.12.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	284.392.800,00	281.480.000,00	(2.912.800,00)	
02.12 02.12.01 002	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>617.195.000,00</b>	<b>504.850.365,00</b>	<b>(112.344.635,00)</b>	
02.12 02.12.01 002 022	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor</b>	<b>376.700.000,00</b>	<b>372.414.400,00</b>	<b>(4.285.600,00)</b>	
02.12 02.12.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.12 02.12.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	376.700.000,00	372.414.400,00	(4.285.600,00)	
02.12 02.12.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.12 02.12.01 002 024	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	<b>240.495.000,00</b>	<b>132.435.965,00</b>	<b>(108.059.035,00)</b>	
02.12 02.12.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.12 02.12.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	240.495.000,00	132.435.965,00	(108.059.035,00)	
02.12 02.12.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.12 02.12.01 006	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>62.248.000,00</b>	<b>62.100.180,16</b>	<b>(147.819,84)</b>	
02.12 02.12.01 006 005	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD</b>	<b>62.248.000,00</b>	<b>62.100.180,16</b>	<b>(147.819,84)</b>	
02.12 02.12.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.12 02.12.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	62.248.000,00	62.100.180,16	(147.819,84)	
02.12 02.12.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.12 02.12.01 074	<b>Program Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan</b>	<b>219.275.000,00</b>	<b>216.827.334,40</b>	<b>(2.447.665,60)</b>	
02.12 02.12.01 074 002	<b>Pelaksanaan Operasional Pelayanan Perizinan</b>	<b>111.680.000,00</b>	<b>109.380.262,08</b>	<b>(2.299.737,92)</b>	
02.12 02.12.01 074 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.12 02.12.01 074 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	111.680.000,00	109.380.262,08	(2.299.737,92)	
02.12 02.12.01 074 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.12 02.12.01 074 003	<b>Pelaksanaan Penerbitan Perizinan</b>	<b>107.595.000,00</b>	<b>107.447.072,32</b>	<b>(147.927,68)</b>	
02.12 02.12.01 074 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.12 02.12.01 074 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	107.595.000,00	107.447.072,32	(147.927,68)	
02.12 02.12.01 074 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.12 02.12.01 075	<b>Program Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan</b>	<b>35.834.000,00</b>	<b>30.664.200,00</b>	<b>(5.169.800,00)</b>	
02.12 02.12.01 075 002	<b>Pengelolaan Pengaduan Perizinan Kota Yogyakarta</b>	<b>35.834.000,00</b>	<b>30.664.200,00</b>	<b>(5.169.800,00)</b>	
02.12 02.12.01 075 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.12 02.12.01 075 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	35.834.000,00	30.664.200,00	(5.169.800,00)	
02.12 02.12.01 075 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.12 02.12.01 076	<b>Program Pengembangan Penanaman Modal</b>	<b>782.449.000,00</b>	<b>764.804.870,64</b>	<b>(17.644.129,36)</b>	
02.12 02.12.01 076 001	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan</b>	<b>251.196.000,00</b>	<b>239.290.542,16</b>	<b>(11.905.457,84)</b>	
02.12 02.12.01 076 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.12 02.12.01 076 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	113.196.000,00	105.035.542,16	(8.160.457,84)	
02.12 02.12.01 076 001 5 2 3	Belanja Modal	138.000.000,00	134.255.000,00	(3.745.000,00)	
02.12 02.12.01 076 002	<b>Pengembangan dan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal</b>	<b>377.783.000,00</b>	<b>372.576.286,16</b>	<b>(5.206.713,84)</b>	
02.12 02.12.01 076 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.12 02.12.01 076 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	322.783.000,00	317.931.286,16	(4.851.713,84)	
02.12 02.12.01 076 002 5 2 3	Belanja Modal	55.000.000,00	54.645.000,00	(355.000,00)	
02.12 02.12.01 076 003	<b>Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penyertaan Modal</b>	<b>153.470.000,00</b>	<b>152.938.042,32</b>	<b>(531.957,68)</b>	
02.12 02.12.01 076 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.12 02.12.01 076 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	153.470.000,00	152.938.042,32	(531.957,68)	
02.12 02.12.01 076 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.12 02.12.01 077	<b>Program Penguatan Regulasi dan Pengembangan Kinerja Layanan Penanaman Modal dan Perizinan</b>	<b>171.404.000,00</b>	<b>164.328.736,16</b>	<b>(7.075.263,84)</b>	
02.12 02.12.01 077 001	<b>Pengkajian dan Sosialisasi Peraturan Perizinan</b>	<b>171.404.000,00</b>	<b>164.328.736,16</b>	<b>(7.075.263,84)</b>	
02.12 02.12.01 077 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.12 02.12.01 077 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	171.404.000,00	164.328.736,16	(7.075.263,84)	
02.12 02.12.01 077 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :</b>	<b>4.722.996.353,00</b>	<b>2.958.873.500,00</b>	<b>(1.764.122.853,00)</b>	
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH :</b>	<b>7.331.820.940,00</b>	<b>6.844.718.384,12</b>	<b>(487.102.555,88)</b>	
	<b>SURPLUS/(DEFISIT) :</b>	<b>(2.608.824.587,00)</b>	<b>(3.885.844.884,12)</b>	<b>(1.277.020.297,12)</b>	

## Keterangan :

- 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3)

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR  
 MACAM URUSAN : 02.13 - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA  
 ORGANISASI : 02.13.01 - DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.13 02.13.01 00 00 4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	-	-	-	
02.13 02.13.01 00 00 5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>8.635.456.025,00</b>	<b>8.177.974.114,00</b>	<b>(457.481.911,00)</b>	
02.13 02.13.01 00 00 5 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1.492.304.451,00</b>	<b>1.338.823.775,00</b>	<b>(153.480.676,00)</b>	
02.13 02.13.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	1.492.304.451,00	1.338.823.775,00	(153.480.676,00)	
02.13 02.13.01 00 00	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>7.143.151.574,00</b>	<b>6.839.150.339,00</b>	<b>(304.001.235,00)</b>	
02.13 02.13.01 001	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>659.154.204,00</b>	<b>629.848.690,00</b>	<b>(29.305.514,00)</b>	
02.13 02.13.01 001 018	<b>Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi</b>	<b>201.900.000,00</b>	<b>190.229.510,00</b>	<b>(11.670.490,00)</b>	
02.13 02.13.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.13 02.13.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	201.900.000,00	190.229.510,00	(11.670.490,00)	
02.13 02.13.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.13 02.13.01 001 019	<b>Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>457.254.204,00</b>	<b>439.619.180,00</b>	<b>(17.635.024,00)</b>	
02.13 02.13.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	53.267.912,00	53.263.446,00	(4.466,00)	
02.13 02.13.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	294.986.292,00	283.735.734,00	(11.250.558,00)	
02.13 02.13.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	109.000.000,00	102.620.000,00	(6.380.000,00)	
02.13 02.13.01 002	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>312.050.000,00</b>	<b>279.797.663,00</b>	<b>(32.252.337,00)</b>	
02.13 02.13.01 002 022	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor</b>	<b>227.160.000,00</b>	<b>222.388.000,00</b>	<b>(4.772.000,00)</b>	
02.13 02.13.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.13 02.13.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	
02.13 02.13.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	227.160.000,00	222.388.000,00	(4.772.000,00)	
02.13 02.13.01 002 024	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	<b>84.890.000,00</b>	<b>57.409.663,00</b>	<b>(27.480.337,00)</b>	
02.13 02.13.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.13 02.13.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	84.890.000,00	57.409.663,00	(27.480.337,00)	
02.13 02.13.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.13 02.13.01 005	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.999.540,00</b>	<b>(460,00)</b>	
02.13 02.13.01 005 006	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.999.540,00</b>	<b>(460,00)</b>	
02.13 02.13.01 005 006 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.13 02.13.01 005 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.999.540,00	(460,00)	
02.13 02.13.01 005 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.13 02.13.01 078	<b>Program Pengembangan Kepemudaan</b>	<b>2.403.152.832,00</b>	<b>2.325.074.502,00</b>	<b>(78.078.330,00)</b>	
02.13 02.13.01 078 001	<b>Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan</b>	<b>2.233.537.916,00</b>	<b>2.155.459.586,00</b>	<b>(78.078.330,00)</b>	
02.13 02.13.01 078 001 5 2 1	Belanja Pegawai	67.200.000,00	59.100.000,00	(8.100.000,00)	
02.13 02.13.01 078 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2.166.337.916,00	2.096.359.586,00	(69.978.330,00)	
02.13 02.13.01 078 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.13 02.13.01 078 002	<b>Pembinaan Kelembagaan Kepemudaan</b>	<b>169.614.916,00</b>	<b>169.614.916,00</b>	-	
02.13 02.13.01 078 002 5 2 1	Belanja Pegawai	7.000.000,00	7.000.000,00	-	
02.13 02.13.01 078 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	162.614.916,00	162.614.916,00	-	
02.13 02.13.01 078 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.13 02.13.01 079	<b>Program Pengembangan Olah Raga</b>	<b>3.766.794.538,00</b>	<b>3.602.429.944,00</b>	<b>(164.364.594,00)</b>	
02.13 02.13.01 079 001	<b>Pembinaan Olah Raga Prestasi dan Masyarakat</b>	<b>2.599.483.632,00</b>	<b>2.472.740.328,00</b>	<b>(126.743.304,00)</b>	
02.13 02.13.01 079 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.13 02.13.01 079 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2.588.608.632,00	2.461.865.328,00	(126.743.304,00)	
02.13 02.13.01 079 001 5 2 3	Belanja Modal	10.875.000,00	10.875.000,00	-	
02.13 02.13.01 079 002	<b>Pembinaan Kelembagaan Keolahragaan</b>	<b>1.167.310.906,00</b>	<b>1.129.689.616,00</b>	<b>(37.621.290,00)</b>	
02.13 02.13.01 079 002 5 2 1	Belanja Pegawai	97.500.000,00	95.400.000,00	(2.100.000,00)	
02.13 02.13.01 079 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	625.310.906,00	619.275.616,00	(6.035.290,00)	
02.13 02.13.01 079 002 5 2 3	Belanja Modal	444.500.000,00	415.014.000,00	(29.486.000,00)	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH :</b>	<b>8.635.456.025,00</b>	<b>8.177.974.114,00</b>	<b>(457.481.911,00)</b>	
	<b>SURPLUS/(DEFISIT) :</b>	<b>(8.635.456.025,00)</b>	<b>(8.177.974.114,00)</b>	<b>457.481.911,00</b>	

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR  
 MACAM URUSAN : 02.16 - URUSAN KEBUDAYAAN  
 ORGANISASI : 02.16.01 - DINAS KEBUDAYAAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.16 02.16.01 00 00 4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	-	-	-	
02.16 02.16.01 00 00 5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>6.101.348.160,00</b>	<b>5.607.842.529,00</b>	<b>(493.505.631,00)</b>	
02.16 02.16.01 00 00 5 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1.667.528.760,00</b>	<b>1.451.533.329,00</b>	<b>(215.995.431,00)</b>	
02.16 02.16.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	1.667.528.760,00	1.451.533.329,00	(215.995.431,00)	
02.16 02.16.01 00 00	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>4.433.819.400,00</b>	<b>4.156.309.200,00</b>	<b>(277.510.200,00)</b>	
02.16 02.16.01 001	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>704.891.807,00</b>	<b>626.609.455,00</b>	<b>(78.282.352,00)</b>	
02.16 02.16.01 001 018	<b>Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi</b>	<b>172.040.000,00</b>	<b>138.280.245,00</b>	<b>(33.759.755,00)</b>	
02.16 02.16.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.16 02.16.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	172.040.000,00	138.280.245,00	(33.759.755,00)	
02.16 02.16.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.16 02.16.01 001 019	<b>Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>532.851.807,00</b>	<b>488.329.210,00</b>	<b>(44.522.597,00)</b>	
02.16 02.16.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	29.569.600,00	26.633.954,00	(2.935.646,00)	
02.16 02.16.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	363.850.308,00	323.351.756,00	(40.498.552,00)	
02.16 02.16.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	139.431.899,00	138.343.500,00	(1.088.399,00)	
02.16 02.16.01 002	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>366.093.920,00</b>	<b>279.498.405,00</b>	<b>(86.595.515,00)</b>	
02.16 02.16.01 002 022	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor</b>	<b>194.630.000,00</b>	<b>192.870.000,00</b>	<b>(1.760.000,00)</b>	
02.16 02.16.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.16 02.16.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	194.630.000,00	192.870.000,00	(1.760.000,00)	
02.16 02.16.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.16 02.16.01 002 024	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	<b>171.463.920,00</b>	<b>86.628.405,00</b>	<b>(84.835.515,00)</b>	
02.16 02.16.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.16 02.16.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	171.463.920,00	86.628.405,00	(84.835.515,00)	
02.16 02.16.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.16 02.16.01 006	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>14.600.000,00</b>	<b>13.786.600,00</b>	<b>(813.400,00)</b>	
02.16 02.16.01 006 005	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD</b>	<b>14.600.000,00</b>	<b>13.786.600,00</b>	<b>(813.400,00)</b>	
02.16 02.16.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.16 02.16.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	14.600.000,00	13.786.600,00	(813.400,00)	
02.16 02.16.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.16 02.16.01 081	<b>Program Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya</b>	<b>1.269.267.653,00</b>	<b>1.265.403.720,00</b>	<b>(3.863.933,00)</b>	
02.16 02.16.01 081 001	<b>Pelestarian dan Pengembangan Warisan Budaya, Pengetahuan dan Teknologi</b>	<b>272.183.200,00</b>	<b>272.052.400,00</b>	<b>(130.800,00)</b>	
02.16 02.16.01 081 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.16 02.16.01 081 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	97.183.200,00	97.092.400,00	(90.800,00)	
02.16 02.16.01 081 001 5 2 3	Belanja Modal	175.000.000,00	174.960.000,00	(40.000,00)	
02.16 02.16.01 081 002	<b>Pelestarian Tata Nilai Budaya,</b>	<b>228.656.003,00</b>	<b>228.361.370,00</b>	<b>(294.633,00)</b>	
02.16 02.16.01 081 002 5 2 1	Belanja Pegawai	2.500.000,00	2.500.000,00	-	
02.16 02.16.01 081 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	226.156.003,00	225.861.370,00	(294.633,00)	
02.16 02.16.01 081 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.16 02.16.01 081 003	<b>Pelestarian Kepurbakalaan dan Permuseuman</b>	<b>768.428.450,00</b>	<b>764.989.950,00</b>	<b>(3.438.500,00)</b>	
02.16 02.16.01 081 003 5 2 1	Belanja Pegawai	45.800.000,00	45.800.000,00	-	
02.16 02.16.01 081 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	202.628.450,00	202.437.650,00	(190.800,00)	
02.16 02.16.01 081 003 5 2 3	Belanja Modal	520.000.000,00	516.752.300,00	(3.247.700,00)	
02.16 02.16.01 082	<b>Program Pelestarian dan Pengembangan Sejarah dan Bahasa</b>	<b>1.067.302.020,00</b>	<b>1.018.578.620,00</b>	<b>(48.723.400,00)</b>	
02.16 02.16.01 082 001	<b>Pelestarian dan Pengembangan Sejarah</b>	<b>598.931.920,00</b>	<b>584.510.120,00</b>	<b>(14.421.800,00)</b>	
02.16 02.16.01 082 001 5 2 1	Belanja Pegawai	11.150.000,00	11.150.000,00	-	
02.16 02.16.01 082 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	497.781.920,00	483.360.120,00	(14.421.800,00)	
02.16 02.16.01 082 001 5 2 3	Belanja Modal	90.000.000,00	90.000.000,00	-	
02.16 02.16.01 082 002	<b>Pelestarian dan Pengembangan Bahasa dan Sastra</b>	<b>468.370.100,00</b>	<b>434.068.500,00</b>	<b>(34.301.600,00)</b>	
02.16 02.16.01 082 002 5 2 1	Belanja Pegawai	5.800.000,00	1.300.000,00	(4.500.000,00)	
02.16 02.16.01 082 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	462.570.100,00	432.768.500,00	(29.801.600,00)	
02.16 02.16.01 082 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.16 02.16.01 083	<b>Program Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Tradisi</b>	<b>1.011.664.000,00</b>	<b>952.432.400,00</b>	<b>(59.231.600,00)</b>	
02.16 02.16.01 083 001	<b>Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Film</b>	<b>368.897.800,00</b>	<b>345.026.000,00</b>	<b>(23.871.800,00)</b>	
02.16 02.16.01 083 001 5 2 1	Belanja Pegawai	17.125.000,00	16.750.000,00	(375.000,00)	
02.16 02.16.01 083 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	351.772.800,00	328.276.000,00	(23.496.800,00)	
02.16 02.16.01 083 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.16 02.16.01 083 002	<b>Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Tradisi</b>	<b>642.766.200,00</b>	<b>607.406.400,00</b>	<b>(35.359.800,00)</b>	
02.16 02.16.01 083 002 5 2 1	Belanja Pegawai	3.200.000,00	3.200.000,00	-	
02.16 02.16.01 083 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	639.566.200,00	604.206.400,00	(35.359.800,00)	
02.16 02.16.01 083 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH :</b>	<b>6.101.348.160,00</b>	<b>5.607.842.529,00</b>	<b>(493.505.631,00)</b>	
	<b>SURPLUS/(DEFISIT) :</b>	<b>(6.101.348.160,00)</b>	<b>(5.607.842.529,00)</b>	<b>493.505.631,00</b>	

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR  
 MACAM URUSAN : 02.18 - URUSAN KEARSIPAN  
 ORGANISASI : 02.18.01 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.18 02.18.01 00 00 4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	-	-	-	
02.18 02.18.01 00 00 5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>11.096.341.145,00</b>	<b>10.844.437.510,05</b>	<b>(251.903.634,95)</b>	
02.18 02.18.01 00 00 5 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>3.336.192.515,00</b>	<b>3.217.862.927,00</b>	<b>(118.329.588,00)</b>	
02.18 02.18.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	3.336.192.515,00	3.217.862.927,00	(118.329.588,00)	
02.18 02.18.01 00 00	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>7.760.148.630,00</b>	<b>7.626.574.583,05</b>	<b>(133.574.046,95)</b>	
02.18 02.18.01 001	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>2.499.572.281,00</b>	<b>2.471.106.735,97</b>	<b>(28.465.545,03)</b>	
02.18 02.18.01 001 018	<b>Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi</b>	<b>372.415.000,00</b>	<b>372.108.559,00</b>	<b>(306.441,00)</b>	
02.18 02.18.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.18 02.18.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	372.415.000,00	372.108.559,00	(306.441,00)	
02.18 02.18.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.18 02.18.01 001 019	<b>Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>2.127.157.281,00</b>	<b>2.098.998.176,97</b>	<b>(28.159.104,03)</b>	
02.18 02.18.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	29.091.760,00	27.623.492,00	(1.468.268,00)	
02.18 02.18.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.300.264.921,00	1.285.122.004,97	(15.142.916,03)	
02.18 02.18.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	797.800.600,00	786.252.680,00	(11.547.920,00)	
02.18 02.18.01 002	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>446.218.800,00</b>	<b>361.902.234,00</b>	<b>(84.316.566,00)</b>	
02.18 02.18.01 002 022	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>193.987.000,00</b>	<b>(6.013.000,00)</b>	
02.18 02.18.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.18 02.18.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	193.987.000,00	(6.013.000,00)	
02.18 02.18.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.18 02.18.01 002 024	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	<b>246.218.800,00</b>	<b>167.915.234,00</b>	<b>(78.303.566,00)</b>	
02.18 02.18.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.18 02.18.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	246.218.800,00	167.915.234,00	(78.303.566,00)	
02.18 02.18.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.18 02.18.01 005	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>14.600.000,00</b>	<b>(400.000,00)</b>	
02.18 02.18.01 005 006	<b>Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>14.600.000,00</b>	<b>(400.000,00)</b>	
02.18 02.18.01 005 006 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.18 02.18.01 005 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.600.000,00	(400.000,00)	
02.18 02.18.01 005 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.18 02.18.01 006	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>6.104.000,00</b>	<b>6.104.000,00</b>	-	
02.18 02.18.01 006 005	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD</b>	<b>6.104.000,00</b>	<b>6.104.000,00</b>	-	
02.18 02.18.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.18 02.18.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	6.104.000,00	6.104.000,00	-	
02.18 02.18.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.18 02.18.01 086	<b>Program Pengelolaan Pengembangan Kearsipan</b>	<b>327.296.030,00</b>	<b>324.368.300,00</b>	<b>(2.927.730,00)</b>	
02.18 02.18.01 086 001	<b>Pengelolaan Arsip</b>	<b>101.155.780,00</b>	<b>98.271.400,00</b>	<b>(2.884.380,00)</b>	
02.18 02.18.01 086 001 5 2 1	Belanja Pegawai	2.500.000,00	2.500.000,00	-	
02.18 02.18.01 086 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	98.655.780,00	95.771.400,00	(2.884.380,00)	
02.18 02.18.01 086 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.18 02.18.01 086 002	<b>Pengembangan Arsip</b>	<b>226.140.250,00</b>	<b>226.096.900,00</b>	<b>(43.350,00)</b>	
02.18 02.18.01 086 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.18 02.18.01 086 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	226.140.250,00	226.096.900,00	(43.350,00)	
02.18 02.18.01 086 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.18 02.18.01 087	<b>Program Perlindungan, Penyelamatan, Data dan Informasi Arsip</b>	<b>502.468.140,00</b>	<b>501.468.877,00</b>	<b>(999.263,00)</b>	
02.18 02.18.01 087 001	<b>Perlindungan dan Penyelamatan Arsip</b>	<b>169.654.580,00</b>	<b>169.455.277,00</b>	<b>(199.303,00)</b>	
02.18 02.18.01 087 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.18 02.18.01 087 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	154.004.125,00	153.804.822,00	(199.303,00)	
02.18 02.18.01 087 001 5 2 3	Belanja Modal	15.650.455,00	15.650.455,00	-	
02.18 02.18.01 087 002	<b>Data, Sistem Informasi dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional</b>	<b>332.813.560,00</b>	<b>332.013.600,00</b>	<b>(799.960,00)</b>	
02.18 02.18.01 087 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.18 02.18.01 087 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	296.913.560,00	296.113.600,00	(799.960,00)	
02.18 02.18.01 087 002 5 2 3	Belanja Modal	35.900.000,00	35.900.000,00	-	
02.17 02.18.01 084	<b>Program Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan</b>	<b>2.421.872.829,00</b>	<b>2.411.905.207,08</b>	<b>(9.967.621,92)</b>	
02.17 02.18.01 084 001	<b>Pengelolaan Perpustakaan</b>	<b>1.679.167.683,00</b>	<b>1.671.432.434,36</b>	<b>(7.735.248,64)</b>	
02.17 02.18.01 084 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.17 02.18.01 084 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.449.687.683,00	1.442.044.934,36	(7.642.748,64)	
02.17 02.18.01 084 001 5 2 3	Belanja Modal	229.480.000,00	229.387.500,00	(92.500,00)	
02.17 02.18.01 084 002	<b>Pemasyarakatan Budaya Gemar Membaca</b>	<b>742.705.146,00</b>	<b>740.472.772,72</b>	<b>(2.232.373,28)</b>	
02.17 02.18.01 084 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.17 02.18.01 084 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	705.457.246,00	703.224.872,72	(2.232.373,28)	
02.17 02.18.01 084 002 5 2 3	Belanja Modal	37.247.900,00	37.247.900,00	-	
02.17 02.18.01 085	<b>Program Pelestarian Koleksi Pustaka dan Data Informasi Perpustakaan</b>	<b>1.541.616.550,00</b>	<b>1.535.119.229,00</b>	<b>(6.497.321,00)</b>	
02.17 02.18.01 085 001	<b>Pelestarian Koleksi Pustaka dan Naskah Kuno</b>	<b>760.979.044,00</b>	<b>760.491.825,00</b>	<b>(487.219,00)</b>	
02.17 02.18.01 085 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.17 02.18.01 085 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	350.979.044,00	350.530.500,00	(448.544,00)	
02.17 02.18.01 085 001 5 2 3	Belanja Modal	410.000.000,00	409.961.325,00	(38.675,00)	
02.17 02.18.01 085 002	<b>Pengelolaan Data Sistem Informasi Perpustakaan</b>	<b>780.637.506,00</b>	<b>774.627.404,00</b>	<b>(6.010.102,00)</b>	
02.17 02.18.01 085 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.17 02.18.01 085 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	353.336.976,00	347.580.874,00	(5.756.102,00)	
02.17 02.18.01 085 002 5 2 3	Belanja Modal	427.300.530,00	427.046.530,00	(254.000,00)	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH :</b>	<b>11.096.341.145,00</b>	<b>10.844.437.510,05</b>	<b>(251.903.634,95)</b>	
	<b>SURPLUS/(DEFISIT) :</b>	<b>(11.096.341.145,00)</b>	<b>(10.844.437.510,05)</b>	<b>251.903.634,95</b>	

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR  
 MACAM URUSAN : 02.19 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI  
 ORGANISASI : 02.19.01 - KANTOR KESATUAN BANGSA

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.19 02.19.01 00 00 4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	-	-	-	
02.19 02.19.01 00 00 5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>3.664.934.178,00</b>	<b>3.432.090.399,00</b>	<b>(232.843.779,00)</b>	
02.19 02.19.01 00 00 5 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>738.168.178,00</b>	<b>675.399.126,00</b>	<b>(62.769.052,00)</b>	
02.19 02.19.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	738.168.178,00	675.399.126,00	(62.769.052,00)	
02.19 02.19.01 00 00	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>2.926.766.000,00</b>	<b>2.756.691.273,00</b>	<b>(170.074.727,00)</b>	
02.19 02.19.01 001	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>508.140.000,00</b>	<b>458.339.087,00</b>	<b>(49.800.913,00)</b>	
02.19 02.19.01 001 018	<b>Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi</b>	<b>245.500.000,00</b>	<b>206.390.061,00</b>	<b>(39.109.939,00)</b>	
02.19 02.19.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.19 02.19.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	245.500.000,00	206.390.061,00	(39.109.939,00)	
02.19 02.19.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.19 02.19.01 001 019	<b>Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>262.640.000,00</b>	<b>251.949.026,00</b>	<b>(10.690.974,00)</b>	
02.19 02.19.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	26.633.956,00	26.633.956,00	-	
02.19 02.19.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	156.028.544,00	148.062.910,00	(7.965.634,00)	
02.19 02.19.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	79.977.500,00	77.252.160,00	(2.725.340,00)	
02.19 02.19.01 002	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>68.900.000,00</b>	<b>54.657.800,00</b>	<b>(14.242.200,00)</b>	
02.19 02.19.01 002 022	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	-	
02.19 02.19.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.19 02.19.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	-	
02.19 02.19.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.19 02.19.01 002 024	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	<b>48.900.000,00</b>	<b>34.657.800,00</b>	<b>(14.242.200,00)</b>	
02.19 02.19.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.19 02.19.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	48.900.000,00	34.657.800,00	(14.242.200,00)	
02.19 02.19.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.19 02.19.01 005	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>(1.000.000,00)</b>	
02.19 02.19.01 005 006	<b>Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>(1.000.000,00)</b>	
02.19 02.19.01 005 006 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.19 02.19.01 005 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	7.000.000,00	(1.000.000,00)	
02.19 02.19.01 005 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.19 02.19.01 006	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>9.160.000,00</b>	<b>7.626.000,00</b>	<b>(1.534.000,00)</b>	
02.19 02.19.01 006 005	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD</b>	<b>9.160.000,00</b>	<b>7.626.000,00</b>	<b>(1.534.000,00)</b>	
02.19 02.19.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.19 02.19.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	9.160.000,00	7.626.000,00	(1.534.000,00)	
02.19 02.19.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.19 02.19.01 088	<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>2.332.566.000,00</b>	<b>2.229.068.386,00</b>	<b>(103.497.614,00)</b>	
02.19 02.19.01 088 001	<b>Pemantapan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>2.332.566.000,00</b>	<b>2.229.068.386,00</b>	<b>(103.497.614,00)</b>	
02.19 02.19.01 088 001 5 2 1	Belanja Pegawai	849.450.000,00	811.950.000,00	(37.500.000,00)	
02.19 02.19.01 088 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.483.116.000,00	1.417.118.386,00	(65.997.614,00)	
02.19 02.19.01 088 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH :</b>	<b>3.664.934.178,00</b>	<b>3.432.090.399,00</b>	<b>(232.843.779,00)</b>	
	<b>SURPLUS/(DEFISIT) :</b>	<b>(3.664.934.178,00)</b>	<b>(3.432.090.399,00)</b>	<b>232.843.779,00</b>	

URUSAN : 03. PILIHAN  
 MACAM URUSAN : 03.01 - PERTANIAN  
 ORGANISASI : 03.01.01 - DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
03.01 03.01.01 00 00 4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>448.851.000,00</b>	<b>476.075.700,00</b>	<b>27.224.700,00</b>	
03.01 03.01.01 00 00 4 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>448.851.000,00</b>	<b>476.075.700,00</b>	<b>27.224.700,00</b>	
03.01 03.01.01 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	448.851.000,00	476.075.700,00	27.224.700,00	
03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum	64.025.000,00	71.617.700,00	7.592.700,00	
03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 01 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	64.025.000,00	71.617.700,00	7.592.700,00	1)PD 5/2012
03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 02	Retribusi Jasa Usaha	384.826.000,00	404.458.000,00	19.632.000,00	
03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 02 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	21.000.000,00	16.560.000,00	(4.440.000,00)	2)PD 4/2012
03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 02 08	Retribusi Rumah Potong Hewan	99.960.000,00	89.685.000,00	(10.275.000,00)	2)PD 4/2012
03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 02 13	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	263.866.000,00	298.213.000,00	34.347.000,00	2)PD 4/2012
03.01 03.01.01 00 00 5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>14.424.190.754,00</b>	<b>13.493.476.206,20</b>	<b>(930.714.547,80)</b>	
03.01 03.01.01 00 00 5 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>4.061.367.754,00</b>	<b>3.645.775.624,00</b>	<b>(415.592.130,00)</b>	
03.01 03.01.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	4.061.367.754,00	3.645.775.624,00	(415.592.130,00)	
03.01 03.01.01 00 00	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>10.362.823.000,00</b>	<b>9.847.700.582,20</b>	<b>(515.122.417,80)</b>	
03.01 03.01.01 001	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	<b>2.019.567.000,00</b>	<b>1.958.694.380,60</b>	<b>(60.872.619,40)</b>	
03.01 03.01.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	254.905.000,00	248.935.650,00	(5.969.350,00)	
03.01 03.01.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
03.01 03.01.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	254.905.000,00	248.935.650,00	(5.969.350,00)	
03.01 03.01.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
03.01 03.01.01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	1.764.662.000,00	1.709.758.730,60	(54.903.269,40)	
03.01 03.01.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	266.339.560,00	266.339.546,60	(13,40)	
03.01 03.01.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.017.844.808,00	993.339.424,00	(24.505.384,00)	
03.01 03.01.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	480.477.632,00	450.079.760,00	(30.397.872,00)	
03.01 03.01.01 002	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	<b>1.645.497.000,00</b>	<b>1.592.606.125,00</b>	<b>(52.890.875,00)</b>	
03.01 03.01.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	1.509.000.000,00	1.472.885.000,00	(36.115.000,00)	
03.01 03.01.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
03.01 03.01.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	284.000.000,00	273.625.000,00	(10.375.000,00)	
03.01 03.01.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	1.225.000.000,00	1.199.260.000,00	(25.740.000,00)	
03.01 03.01.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	136.497.000,00	119.721.125,00	(16.775.875,00)	
03.01 03.01.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
03.01 03.01.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	136.497.000,00	119.721.125,00	(16.775.875,00)	
03.01 03.01.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
03.01 03.01.01 005	<i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>	<b>66.000.000,00</b>	<b>65.488.000,00</b>	<b>(512.000,00)</b>	
03.01 03.01.01 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	66.000.000,00	65.488.000,00	(512.000,00)	
03.01 03.01.01 005 006 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
03.01 03.01.01 005 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	66.000.000,00	65.488.000,00	(512.000,00)	
03.01 03.01.01 005 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
03.01 03.01.01 006	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>25.660.000,00</b>	<b>25.592.200,00</b>	<b>(67.800,00)</b>	
03.01 03.01.01 006 005	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD</b>	<b>25.660.000,00</b>	<b>25.592.200,00</b>	<b>(67.800,00)</b>	
03.01 03.01.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
03.01 03.01.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	25.660.000,00	25.592.200,00	(67.800,00)	
03.01 03.01.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
03.01 03.01.01 089	<b>Program Pembinaan Pertanian</b>	<b>2.284.154.000,00</b>	<b>2.154.194.322,72</b>	<b>(129.959.677,28)</b>	
03.01 03.01.01 089 001	<b>Pembinaan Usaha dan Budidaya Pertanian</b>	<b>1.832.218.000,00</b>	<b>1.708.307.411,40</b>	<b>(123.910.588,60)</b>	
03.01 03.01.01 089 001 5 2 1	Belanja Pegawai	17.700.000,00	17.625.000,00	(75.000,00)	
03.01 03.01.01 089 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.235.648.000,00	1.137.789.911,40	(97.858.088,60)	
03.01 03.01.01 089 001 5 2 3	Belanja Modal	578.870.000,00	552.892.500,00	(25.977.500,00)	
03.01 03.01.01 089 002	<b>Pengawasan Mutu Komoditas dan Pelayanan Pertanian</b>	<b>451.936.000,00</b>	<b>445.886.911,32</b>	<b>(6.049.088,68)</b>	
03.01 03.01.01 089 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
03.01 03.01.01 089 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	135.381.000,00	132.358.603,32	(3.022.396,68)	
03.01 03.01.01 089 002 5 2 3	Belanja Modal	316.555.000,00	313.528.308,00	(3.026.692,00)	
03.03 03.01.01 093	<b>Program Pembinaan Kehewan dan Perikanan</b>	<b>2.896.650.000,00</b>	<b>2.726.669.054,72</b>	<b>(169.980.945,28)</b>	
03.03 03.01.01 093 001	<b>Pembinaan Usaha Budidaya Kehewan dan Perikanan</b>	<b>2.113.574.000,00</b>	<b>1.965.194.109,76</b>	<b>(148.379.890,24)</b>	
03.03 03.01.01 093 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
03.03 03.01.01 093 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.967.033.255,00	1.818.787.364,76	(148.245.890,24)	
03.03 03.01.01 093 001 5 2 3	Belanja Modal	146.540.745,00	146.406.745,00	(134.000,00)	
03.03 03.01.01 093 002	<b>Pengawasan Mutu Komoditas Kehewan dan Perikanan</b>	<b>783.076.000,00</b>	<b>761.474.944,96</b>	<b>(21.601.055,04)</b>	
03.03 03.01.01 093 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
03.03 03.01.01 093 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	650.526.000,00	630.388.944,96	(20.137.055,04)	
03.03 03.01.01 093 002 5 2 3	Belanja Modal	132.550.000,00	131.086.000,00	(1.464.000,00)	
02.03 03.01.01 041	<b>Program Pembinaan Ketahanan Pangan</b>	<b>1.425.295.000,00</b>	<b>1.324.456.499,16</b>	<b>(100.838.500,84)</b>	
02.03 03.01.01 041 001	<b>Pembinaan Konsumsi, Kewaspadaan Pangan dan Penyuluhan</b>	<b>1.190.865.000,00</b>	<b>1.101.178.547,00</b>	<b>(89.686.453,00)</b>	
02.03 03.01.01 041 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.03 03.01.01 041 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.032.865.000,00	943.409.547,00	(89.455.453,00)	
02.03 03.01.01 041 001 5 2 3	Belanja Modal	158.000.000,00	157.769.000,00	(231.000,00)	
02.03 03.01.01 041 002	<b>Pembinaan Ketersediaan dan Distribusi Pangan</b>	<b>234.430.000,00</b>	<b>223.277.952,16</b>	<b>(11.152.047,84)</b>	
02.03 03.01.01 041 002 5 2 1	Belanja Pegawai	5.550.000,00	5.450.000,00	(100.000,00)	
02.03 03.01.01 041 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	228.880.000,00	217.827.952,16	(11.052.047,84)	
02.03 03.01.01 041 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :</b>	<b>448.851.000,00</b>	<b>476.075.700,00</b>	<b>27.224.700,00</b>	
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH :</b>	<b>14.424.190.754,00</b>	<b>13.493.476.206,20</b>	<b>(930.714.547,80)</b>	
	<b>SURPLUS/(DEFISIT) :</b>	<b>(13.975.339.754,00)</b>	<b>(13.017.400.506,20)</b>	<b>957.939.247,80</b>	

## Keterangan :

- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4)

URUSAN : 03. PILIHAN  
 MACAM URUSAN : 03.02 - URUSAN PARIWISATA  
 ORGANISASI : 03.02.01 - DINAS PARIWISATA

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
03.02 03.02.01 00 00 4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>15.864.520.200,00</b>	<b>15.812.548.000,10</b>	<b>14.514.617.800,00</b>	
03.02 03.02.01 00 00 4 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>15.864.520.200,00</b>	<b>15.812.548.000,10</b>	<b>14.514.617.800,00</b>	
03.02 03.02.01 00 00 4 1 2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	<b>1.089.520.200,00</b>	<b>1.028.338.000,00</b>	<b>(61.182.200,00)</b>	
03.02 03.02.01 00 00 4 1 2 02	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>1.089.520.200,00</b>	<b>1.028.338.000,00</b>	<b>(61.182.200,00)</b>	
03.02 03.02.01 00 00 4 1 2 02 05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.089.520.200,00	1.028.338.000,00	(61.182.200,00)	1)PD No 4/2012
03.02 03.02.01 00 00 4 1 4	<b>Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah</b>	<b>14.775.000.000,00</b>	<b>14.784.210.000,10</b>	<b>14.575.800.000,00</b>	
03.02 03.02.01 00 00 4 1 4 16	<b>Pendapatan BLUD Taman Pintar</b>	<b>14.775.000.000,00</b>	<b>14.784.210.000,10</b>	<b>14.575.800.000,00</b>	2)Perwal No 73/2000
03.02 03.02.01 00 00 4 1 4 16 01	Pendapatan BLUD Taman Pintar	14.775.000.000,00	14.784.210.000,10	9.210.000,10	3)Perwal No 1/2012 4)Perwal No 48/2015 5)Perwal No 66/2017
03.02 03.02.01 00 00 5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>37.092.698.450,00</b>	<b>32.490.488.514,54</b>	<b>(4.602.209.935,46)</b>	
03.02 03.02.01 00 00 5 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>2.326.470.850,00</b>	<b>2.255.898.590,00</b>	<b>(70.572.260,00)</b>	
03.02 03.02.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	2.326.470.850,00	2.255.898.590,00	(70.572.260,00)	
03.02 03.02.01 00 00	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>34.766.227.600,00</b>	<b>30.234.589.924,54</b>	<b>(4.531.637.675,46)</b>	
03.02 03.02.01 001	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.109.948.600,00</b>	<b>984.355.926,16</b>	<b>(125.592.673,84)</b>	
03.02 03.02.01 001 018	<b>Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi</b>	<b>461.147.600,00</b>	<b>360.813.915,00</b>	<b>(100.333.685,00)</b>	
03.02 03.02.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
03.02 03.02.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	461.147.600,00	360.813.915,00	(100.333.685,00)	
03.02 03.02.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
03.02 03.02.01 001 019	<b>Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>648.801.000,00</b>	<b>623.542.011,16</b>	<b>(25.258.988,84)</b>	
03.02 03.02.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	79.901.811,00	79.901.810,16	(0,84)	
03.02 03.02.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	356.958.589,00	344.988.761,00	(11.969.828,00)	
03.02 03.02.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	211.940.600,00	198.651.440,00	(13.289.160,00)	
03.02 03.02.01 002	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>300.620.000,00</b>	<b>274.006.936,00</b>	<b>(26.613.064,00)</b>	
03.02 03.02.01 002 022	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor</b>	<b>220.000.000,00</b>	<b>219.198.000,00</b>	<b>(802.000,00)</b>	
03.02 03.02.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
03.02 03.02.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	44.818.000,00	(182.000,00)	
03.02 03.02.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	175.000.000,00	174.380.000,00	(620.000,00)	
03.02 03.02.01 002 024	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	<b>80.620.000,00</b>	<b>54.808.936,00</b>	<b>(25.811.064,00)</b>	
03.02 03.02.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
03.02 03.02.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	80.620.000,00	54.808.936,00	(25.811.064,00)	
03.02 03.02.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
03.02 03.02.01 006	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>7.043.000,00</b>	<b>5.914.000,00</b>	<b>(1.129.000,00)</b>	
03.02 03.02.01 006 005	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD</b>	<b>7.043.000,00</b>	<b>5.914.000,00</b>	<b>(1.129.000,00)</b>	
03.02 03.02.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
03.02 03.02.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	7.043.000,00	5.914.000,00	(1.129.000,00)	
03.02 03.02.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
03.02 03.02.01 090	<b>Program Pengembangan dan Pemasaran Wisata</b>	<b>11.428.997.000,00</b>	<b>10.742.930.647,38</b>	<b>(686.066.352,62)</b>	
03.02 03.02.01 090 001	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata</b>	<b>1.625.651.000,00</b>	<b>1.488.561.600,00</b>	<b>(137.089.400,00)</b>	
03.02 03.02.01 090 001 5 2 1	Belanja Pegawai	42.125.000,00	34.750.000,00	(7.375.000,00)	
03.02 03.02.01 090 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.583.526.000,00	1.453.811.600,00	(129.714.400,00)	
03.02 03.02.01 090 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
03.02 03.02.01 090 002	<b>Promosi dan Pemasaran Pariwisata</b>	<b>4.195.877.000,00</b>	<b>3.947.495.997,64</b>	<b>(248.381.002,36)</b>	
03.02 03.02.01 090 002 5 2 1	Belanja Pegawai	96.550.000,00	90.500.000,00	(6.050.000,00)	
03.02 03.02.01 090 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	4.099.327.000,00	3.856.995.997,64	(242.331.002,36)	
03.02 03.02.01 090 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
03.02 03.02.01 090 003	<b>Pengelolaan Kawasan Malioboro</b>	<b>5.607.469.000,00</b>	<b>5.306.873.049,74</b>	<b>(300.595.950,26)</b>	
03.02 03.02.01 090 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
03.02 03.02.01 090 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	4.790.096.000,00	4.535.148.049,74	(254.947.950,26)	
03.02 03.02.01 090 003 5 2 3	Belanja Modal	817.373.000,00	771.725.000,00	(45.648.000,00)	
03.02 03.02.01 091	<b>Program Peningkatan Kualitas Atraksi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</b>	<b>2.743.685.000,00</b>	<b>2.604.736.200,00</b>	<b>(138.948.800,00)</b>	
03.02 03.02.01 091 001	<b>Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif</b>	<b>1.265.935.000,00</b>	<b>1.191.436.600,00</b>	<b>(74.498.400,00)</b>	
03.02 03.02.01 091 001 5 2 1	Belanja Pegawai	16.500.000,00	14.775.000,00	(1.725.000,00)	
03.02 03.02.01 091 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.249.435.000,00	1.176.661.600,00	(72.773.400,00)	
03.02 03.02.01 091 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
03.02 03.02.01 091 002	<b>Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Wisata</b>	<b>1.477.750.000,00</b>	<b>1.413.299.600,00</b>	<b>(64.450.400,00)</b>	
03.02 03.02.01 091 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
03.02 03.02.01 091 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.477.750.000,00	1.413.299.600,00	(64.450.400,00)	
03.02 03.02.01 091 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
03.02 03.02.01 092	<b>Program Pengembangan Taman Pintar</b>	<b>19.175.934.000,00</b>	<b>15.622.646.215,00</b>	<b>(3.553.287.785,00)</b>	
03.02 03.02.01 092 001	<b>Operasional Layanan BLUD Taman Pintar</b>	<b>19.175.934.000,00</b>	<b>15.622.646.215,00</b>	<b>(3.553.287.785,00)</b>	
03.02 03.02.01 092 001 5 2 1	Belanja Pegawai	4.826.432.481,00	3.862.217.675,00	(964.214.806,00)	
03.02 03.02.01 092 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	11.434.057.519,00	9.241.645.240,00	(2.192.412.279,00)	
03.02 03.02.01 092 001 5 2 3	Belanja Modal	2.915.444.000,00	2.518.783.300,00	(396.660.700,00)	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :</b>	<b>15.864.520.200,00</b>	<b>15.812.548.000,10</b>	<b>14.514.617.800,00</b>	
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH :</b>	<b>37.092.698.450,00</b>	<b>32.490.488.514,54</b>	<b>(4.602.209.935,46)</b>	
	<b>SURPLUS/(DEFISIT) :</b>	<b>(21.228.178.250,00)</b>	<b>(16.677.940.514,44)</b>	<b>19.116.827.735,46</b>	

Keterangan :

- 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4)
- 2) Peraturan Walikota Yogyakarta No 73 Tahun 2011 tentang Sewa Sarana Prasarana Di Taman Pintar
- 3) Peraturan Walikota Yogyakarta No 1 Tahun 2012 tentang Sewa Kios dan Branding di Taman Pintar Yogyakarta
- 4) Peraturan Walikota Yogyakarta No 48 Tahun 2015 tentang Besaran Tarif Layanan Program di Taman Pintar Yogyakarta
- 5) Peraturan Walikota Yogyakarta No 66 Tahun 2017 tentang Tarif Tiket per Zona di Taman Pintar Yogyakarta

URUSAN : 03. PILIHAN  
 MACAM URUSAN : 03.05 - PERINDUSTRIAN  
 ORGANISASI : 03.05.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
03.05 03.05.01 00 00 4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>21.376.958.896,00</b>	<b>22.609.166.029,20</b>	<b>5.925.765.790,00</b>	
03.05 03.05.01 00 00 4 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>21.376.958.896,00</b>	<b>22.609.166.029,20</b>	<b>5.925.765.790,00</b>	
03.05 03.05.01 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	14.089.577.359,00	14.788.015.434,00	698.438.075,00	
03.05 03.05.01 00 00 4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum	14.089.577.359,00	14.788.015.434,00	698.438.075,00	
03.05 03.05.01 00 00 4 1 2 01 06	Retribusi Pelayanan Pasar	14.089.577.359,00	14.788.015.434,00	698.438.075,00	1)PD No 5/2012 2)PD No 6/2018
03.05 03.05.01 00 00 4 1 4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	7.287.381.537,00	7.821.150.595,20	5.227.327.715,00	
03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 18	Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis	5.305.408.584,00	5.666.389.889,20	5.066.871.000,00	3)Perwal No 84/2013
03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 18 01	Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis	5.305.408.584,00	5.666.389.889,20	360.981.305,20	
03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 21	Pendapatan BLUD UPT Logam	493.423.000,00	502.276.911,00	8.853.911,00	4)Perwal No 52/2016
03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 21 01	Pendapatan BLUD UPT Logam	493.423.000,00	502.276.911,00	8.853.911,00	
03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 32	Pendapatan Bunga Retribusi	12.301.153,00	36.543.594,00	11.911.403,00	
03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 35	Pendapatan dari Pembayaran Listrik	1.476.248.800,00	1.615.940.201,00	139.691.401,00	
03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 35 01	Pendapatan dari Pembayaran Listrik Pasar	1.476.248.800,00	1.615.940.201,00	139.691.401,00	6)PD No 5/2012 7)Perwal No 20/2012
03.05 03.05.01 00 00 5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>45.708.451.859,00</b>	<b>42.447.863.665,43</b>	<b>(3.260.588.193,57)</b>	
03.05 03.05.01 00 00 5 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>7.700.172.659,00</b>	<b>7.335.961.767,00</b>	<b>(364.210.892,00)</b>	
03.05 03.05.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	7.700.172.659,00	7.335.961.767,00	(364.210.892,00)	
03.05 03.05.01 00 00	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>38.008.279.200,00</b>	<b>35.111.901.898,43</b>	<b>(2.896.377.301,57)</b>	
03.05 03.05.01 01	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	5.677.077.000,00	5.067.444.169,08	(609.632.830,92)	
03.05 03.05.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	660.884.000,00	550.366.346,00	(110.517.654,00)	
03.05 03.05.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
03.05 03.05.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	660.884.000,00	550.366.346,00	(110.517.654,00)	
03.05 03.05.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
03.05 03.05.01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	5.016.193.000,00	4.517.077.823,08	(499.115.176,92)	
03.05 03.05.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	1.829.295.320,00	1.811.719.438,08	(17.575.881,92)	
03.05 03.05.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	3.004.362.680,00	2.529.835.547,00	(474.527.133,00)	
03.05 03.05.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	182.535.000,00	175.522.838,00	(7.012.162,00)	
03.05 03.05.01 002	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	569.195.000,00	436.750.845,00	(132.444.155,00)	
03.05 03.05.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	569.195.000,00	436.750.845,00	(132.444.155,00)	
03.05 03.05.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
03.05 03.05.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	569.195.000,00	436.750.845,00	(132.444.155,00)	
03.05 03.05.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
03.05 03.05.01 005	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	-	
03.05 03.05.01 005 006	<b>Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	-	
03.05 03.05.01 005 006 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
03.05 03.05.01 005 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	-	
03.05 03.05.01 005 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
03.05 03.05.01 006	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>21.708.000,00</b>	<b>21.200.600,00</b>	<b>(507.400,00)</b>	
03.05 03.05.01 006 005	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD</b>	<b>21.708.000,00</b>	<b>21.200.600,00</b>	<b>(507.400,00)</b>	
03.05 03.05.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
03.05 03.05.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	21.708.000,00	21.200.600,00	(507.400,00)	
03.05 03.05.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
03.05 03.05.01 098	<b>Program Pembinaan Perindustrian</b>	<b>2.888.883.000,00</b>	<b>2.843.997.503,00</b>	<b>(44.885.497,00)</b>	
03.05 03.05.01 098 001	<b>Pembinaan Teknis Perindustrian</b>	<b>1.151.445.000,00</b>	<b>1.140.454.103,00</b>	<b>(10.990.897,00)</b>	
03.05 03.05.01 098 001 5 2 1	Belanja Pegawai	29.250.000,00	29.250.000,00	-	
03.05 03.05.01 098 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.122.195.000,00	1.111.204.103,00	(10.990.897,00)	
03.05 03.05.01 098 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
03.05 03.05.01 098 002	<b>Pembinaan Sarana Produksi</b>	<b>1.737.438.000,00</b>	<b>1.703.543.400,00</b>	<b>(33.894.600,00)</b>	
03.05 03.05.01 098 002 5 2 1	Belanja Pegawai	22.350.000,00	22.350.000,00	-	
03.05 03.05.01 098 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.435.088.000,00	1.401.334.400,00	(33.753.600,00)	
03.05 03.05.01 098 002 5 2 3	Belanja Modal	280.000.000,00	279.859.000,00	(141.000,00)	
03.05 03.05.01 099	<b>Program Pengembangan Industri Logam</b>	<b>2.403.438.000,00</b>	<b>2.251.755.258,40</b>	<b>(151.682.741,60)</b>	
03.05 03.05.01 099 001	<b>Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Logam</b>	<b>493.423.000,00</b>	<b>454.469.278,40</b>	<b>(38.953.721,60)</b>	
03.05 03.05.01 099 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
03.05 03.05.01 099 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	493.423.000,00	454.469.278,40	(38.953.721,60)	
03.05 03.05.01 099 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
03.05 03.05.01 099 002	<b>Optimalisasi Pelayanan UPT Logam</b>	<b>1.910.015.000,00</b>	<b>1.797.285.980,00</b>	<b>(112.729.020,00)</b>	
03.05 03.05.01 099 002 5 2 1	Belanja Pegawai	9.225.000,00	9.225.000,00	-	
03.05 03.05.01 099 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.802.290.000,00	1.691.644.880,00	(110.645.120,00)	
03.05 03.05.01 099 002 5 2 3	Belanja Modal	98.500.000,00	96.416.100,00	(2.083.900,00)	
03.04 03.05.01 094	<b>Program Pembinaan dan Pengendalian Perdagangan</b>	<b>3.478.127.000,00</b>	<b>3.376.140.603,00</b>	<b>(101.986.397,00)</b>	
03.04 03.05.01 094 001	<b>Pembinaan Usaha Perdagangan</b>	<b>2.282.892.000,00</b>	<b>2.227.934.000,00</b>	<b>(54.958.000,00)</b>	
03.04 03.05.01 094 001 5 2 1	Belanja Pegawai	12.150.000,00	12.150.000,00	-	
03.04 03.05.01 094 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2.270.742.000,00	2.215.784.000,00	(54.958.000,00)	
03.04 03.05.01 094 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
03.04 03.05.01 094 002	<b>Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan dan Industri</b>	<b>554.945.000,00</b>	<b>535.680.303,00</b>	<b>(19.264.697,00)</b>	
03.04 03.05.01 094 002 5 2 1	Belanja Pegawai	23.100.000,00	23.100.000,00	-	
03.04 03.05.01 094 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	527.045.000,00	508.380.303,00	(18.664.697,00)	
03.04 03.05.01 094 002 5 2 3	Belanja Modal	4.800.000,00	4.200.000,00	(600.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
03.04 03.05.01 094 003	<b>Penyelenggaraan Metrologi Legal</b>	<b>640.290.000,00</b>	<b>612.526.300,00</b>	<b>(27.763.700,00)</b>	
03.04 03.05.01 094 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
03.04 03.05.01 094 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	439.190.000,00	415.814.300,00	(23.375.700,00)	
03.04 03.05.01 094 003 5 2 3	Belanja Modal	201.100.000,00	196.712.000,00	(4.388.000,00)	
03.04 03.05.01 095	<b>Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan Keamanan dan Ketertiban Pasar</b>	<b>9.777.880.000,00</b>	<b>9.390.033.894,00</b>	<b>(387.846.106,00)</b>	
03.04 03.05.01 095 001	<b>Pengelolaan Kebersihan Pasar</b>	<b>5.264.235.000,00</b>	<b>5.018.854.160,00</b>	<b>(245.380.840,00)</b>	
03.04 03.05.01 095 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
03.04 03.05.01 095 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	4.961.100.866,00	4.722.721.660,00	(238.379.206,00)	
03.04 03.05.01 095 001 5 2 3	Belanja Modal	303.134.134,00	296.132.500,00	(7.001.634,00)	
03.04 03.05.01 095 002	<b>Pengelolaan Pengamanan dan Penertiban Pasar</b>	<b>2.629.373.000,00</b>	<b>2.522.071.438,00</b>	<b>(107.301.562,00)</b>	
03.04 03.05.01 095 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
03.04 03.05.01 095 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2.596.373.000,00	2.493.031.438,00	(103.341.562,00)	
03.04 03.05.01 095 002 5 2 3	Belanja Modal	33.000.000,00	29.040.000,00	(3.960.000,00)	
03.04 03.05.01 095 003	<b>Pemeliharaan Pasar-Pasar Se Kota Yogyakarta</b>	<b>1.884.272.000,00</b>	<b>1.849.108.296,00</b>	<b>(35.163.704,00)</b>	
03.04 03.05.01 095 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
03.04 03.05.01 095 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.648.051.501,00	1.616.951.646,00	(31.099.855,00)	
03.04 03.05.01 095 003 5 2 3	Belanja Modal	236.220.499,00	232.156.650,00	(4.063.849,00)	
03.04 03.05.01 096	<b>Program Penataan, Pengembangan dan Pendapatan Pasar</b>	<b>6.304.843.200,00</b>	<b>6.145.749.115,00</b>	<b>(159.094.085,00)</b>	
03.04 03.05.01 096 001	<b>Pengelolaan Pendapatan Pasar</b>	<b>232.281.000,00</b>	<b>230.111.000,00</b>	<b>(2.170.000,00)</b>	
03.04 03.05.01 096 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
03.04 03.05.01 096 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	232.281.000,00	230.111.000,00	(2.170.000,00)	
03.04 03.05.01 096 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
03.04 03.05.01 096 002	<b>Penataan Lahan dan Pedagang</b>	<b>1.038.344.000,00</b>	<b>1.022.002.000,00</b>	<b>(16.342.000,00)</b>	
03.04 03.05.01 096 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
03.04 03.05.01 096 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.038.344.000,00	1.022.002.000,00	(16.342.000,00)	
03.04 03.05.01 096 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
03.04 03.05.01 096 003	<b>Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah I</b>	<b>1.204.370.200,00</b>	<b>1.176.802.200,00</b>	<b>(27.568.000,00)</b>	
03.04 03.05.01 096 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
03.04 03.05.01 096 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.204.370.200,00	1.176.802.200,00	(27.568.000,00)	
03.04 03.05.01 096 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
03.04 03.05.01 096 004	<b>Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah II</b>	<b>906.478.000,00</b>	<b>891.627.950,00</b>	<b>(14.850.050,00)</b>	
03.04 03.05.01 096 004 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
03.04 03.05.01 096 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	906.478.000,00	891.627.950,00	(14.850.050,00)	
03.04 03.05.01 096 004 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
03.04 03.05.01 096 005	<b>Optimalisasi Pengelolaan Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta</b>	<b>1.276.507.000,00</b>	<b>1.229.832.800,00</b>	<b>(46.674.200,00)</b>	
03.04 03.05.01 096 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
03.04 03.05.01 096 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	827.507.000,00	788.252.350,00	(39.254.650,00)	
03.04 03.05.01 096 005 5 2 3	Belanja Modal	449.000.000,00	441.580.450,00	(7.419.550,00)	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
03.04 03.05.01 096 006	<b>Pengembangan Pasar Tradisional</b>	<b>1.646.863.000,00</b>	<b>1.595.373.165,00</b>	<b>(51.489.835,00)</b>	
03.04 03.05.01 096 006 5 2 1	Belanja Pegawai	37.275.000,00	37.275.000,00	-	
03.04 03.05.01 096 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.440.868.000,00	1.397.954.365,00	(42.913.635,00)	
03.04 03.05.01 096 006 5 2 3	Belanja Modal	168.720.000,00	160.143.800,00	(8.576.200,00)	
03.04 03.05.01 097	<b>Program Pengembangan Pusat Bisnis</b>	<b>6.857.128.000,00</b>	<b>5.548.829.910,95</b>	<b>(1.308.298.089,05)</b>	
03.04 03.05.01 097 001	<b>Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis</b>	<b>6.857.128.000,00</b>	<b>5.548.829.910,95</b>	<b>(1.308.298.089,05)</b>	
03.04 03.05.01 097 001 5 2 1	Belanja Pegawai	988.991.230,00	638.918.779,00	(350.072.451,00)	
03.04 03.05.01 097 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	3.461.970.770,00	2.628.558.276,00	(833.412.494,00)	
03.04 03.05.01 097 001 5 2 3	Belanja Modal	2.406.166.000,00	2.281.352.855,95	(124.813.144,05)	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :</b>	<b>21.376.958.896,00</b>	<b>22.609.166.029,20</b>	<b>5.925.765.790,00</b>	
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH :</b>	<b>45.708.451.859,00</b>	<b>42.447.863.665,43</b>	<b>(3.260.588.193,57)</b>	
	<b>SURPLUS/(DEFISIT) :</b>	<b>(24.331.492.963,00)</b>	<b>(19.838.697.636,23)</b>	<b>9.186.353.983,57</b>	

Keterangan :

- 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)
- 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6)
- 3) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Tarif Pemanfaatan Fasilitas di Pusat Perbelanjaan Beringharjo pada Dinas Pengelolaan Pasar.
- 4) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Logam Kota Yogyakarta
- 5) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2017 tentang Tarif Sewa Lahan Pasar Malam Perayaan Sekaten Tahun Dal 1951 Tahun Masehi 2017 di Kota Yogyakarta.
- 6) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)
- 7) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

URUSAN : 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  
 MACAM URUSAN : 04.01 - PERENCANAAN  
 ORGANISASI : 04.01.01 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
04.01 04.01.01 00 00 4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	-	-	-	
04.01 04.01.01 00 00 5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>9.382.453.101,00</b>	<b>9.004.935.693,00</b>	<b>(377.517.408,00)</b>	
04.01 04.01.01 00 00 5 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>3.023.686.101,00</b>	<b>2.921.511.525,00</b>	<b>(102.174.576,00)</b>	
04.01 04.01.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	3.023.686.101,00	2.921.511.525,00	(102.174.576,00)	
04.01 04.01.01 00 00	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>6.358.767.000,00</b>	<b>6.083.424.168,00</b>	<b>(275.342.832,00)</b>	
04.01 04.01.01 001	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.408.302.000,00</b>	<b>1.333.747.346,00</b>	<b>(74.554.654,00)</b>	
04.01 04.01.01 001 018	<b>Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi</b>	<b>334.775.000,00</b>	<b>334.749.234,00</b>	<b>(25.766,00)</b>	
04.01 04.01.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.01 04.01.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	334.775.000,00	334.749.234,00	(25.766,00)	
04.01 04.01.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.01 04.01.01 001 019	<b>Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>1.073.527.000,00</b>	<b>998.998.112,00</b>	<b>(74.528.888,00)</b>	
04.01 04.01.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	29.570.840,00	29.570.840,00	-	
04.01 04.01.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	387.238.540,00	337.831.872,00	(49.406.668,00)	
04.01 04.01.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	656.717.620,00	631.595.400,00	(25.122.220,00)	
04.01 04.01.01 002	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>450.884.000,00</b>	<b>391.163.441,00</b>	<b>(59.720.559,00)</b>	
04.01 04.01.01 002 022	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor</b>	<b>302.474.000,00</b>	<b>290.487.800,00</b>	<b>(11.986.200,00)</b>	
04.01 04.01.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.01 04.01.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	4.999.000,00	2.527.800,00	(2.471.200,00)	
04.01 04.01.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	297.475.000,00	287.960.000,00	(9.515.000,00)	
04.01 04.01.01 002 024	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	<b>148.410.000,00</b>	<b>100.675.641,00</b>	<b>(47.734.359,00)</b>	
04.01 04.01.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.01 04.01.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	148.410.000,00	100.675.641,00	(47.734.359,00)	
04.01 04.01.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.01 04.01.01 005	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>15.990.000,00</b>	<b>15.120.000,00</b>	<b>(870.000,00)</b>	
04.01 04.01.01 005 001	<b>Pendidikan dan Pelatihan Formal</b>	<b>15.990.000,00</b>	<b>15.120.000,00</b>	<b>(870.000,00)</b>	
04.01 04.01.01 005 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.01 04.01.01 005 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	15.990.000,00	15.120.000,00	(870.000,00)	
04.01 04.01.01 005 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.01 04.01.01 006	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>11.199.000,00</b>	<b>10.621.600,00</b>	<b>(577.400,00)</b>	
04.01 04.01.01 006 005	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD</b>	<b>11.199.000,00</b>	<b>10.621.600,00</b>	<b>(577.400,00)</b>	
04.01 04.01.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.01 04.01.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	11.199.000,00	10.621.600,00	(577.400,00)	
04.01 04.01.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
04.01 04.01.01 100	<b>Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Ekonomi</b>	<b>784.573.000,00</b>	<b>753.730.960,00</b>	<b>(30.842.040,00)</b>	
04.01 04.01.01 100 001	<b>Perencanaan dan Pengendalian Perindustrian, Perdagangan, Pertanian dan Pangan</b>	<b>59.379.000,00</b>	<b>56.802.600,00</b>	<b>(2.576.400,00)</b>	
04.01 04.01.01 100 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.01 04.01.01 100 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	59.379.000,00	56.802.600,00	(2.576.400,00)	
04.01 04.01.01 100 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.01 04.01.01 100 002	<b>Perencanaan dan Pengendalian Pariwisata, Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi</b>	<b>252.014.000,00</b>	<b>248.463.620,00</b>	<b>(3.550.380,00)</b>	
04.01 04.01.01 100 002 5 2 1	Belanja Pegawai	12.600.000,00	12.600.000,00	-	
04.01 04.01.01 100 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	114.414.000,00	110.863.620,00	(3.550.380,00)	
04.01 04.01.01 100 002 5 2 3	Belanja Modal	125.000.000,00	125.000.000,00	-	
04.01 04.01.01 100 003	<b>Perencanaan dan Pengendalian Ekonomi Daerah</b>	<b>473.180.000,00</b>	<b>448.464.740,00</b>	<b>(24.715.260,00)</b>	
04.01 04.01.01 100 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.01 04.01.01 100 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	373.180.000,00	348.464.740,00	(24.715.260,00)	
04.01 04.01.01 100 003 5 2 3	Belanja Modal	100.000.000,00	100.000.000,00	-	
04.01 04.01.01 101	<b>Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Fisik</b>	<b>610.069.000,00</b>	<b>608.234.160,00</b>	<b>(1.834.840,00)</b>	
04.01 04.01.01 101 001	<b>Perencanaan dan Pengendalian Perhubungan dan Kominfo</b>	<b>81.999.000,00</b>	<b>80.181.420,00</b>	<b>(1.817.580,00)</b>	
04.01 04.01.01 101 001 5 2 1	Belanja Pegawai	4.950.000,00	3.150.000,00	(1.800.000,00)	
04.01 04.01.01 101 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	77.049.000,00	77.031.420,00	(17.580,00)	
04.01 04.01.01 101 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.01 04.01.01 101 002	<b>Perencanaan dan Pengendalian Pekerjaan Umum dan Permukiman</b>	<b>372.421.000,00</b>	<b>372.412.120,00</b>	<b>(8.880,00)</b>	
04.01 04.01.01 101 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.01 04.01.01 101 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	372.421.000,00	372.412.120,00	(8.880,00)	
04.01 04.01.01 101 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.01 04.01.01 101 003	<b>Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup</b>	<b>155.649.000,00</b>	<b>155.640.620,00</b>	<b>(8.380,00)</b>	
04.01 04.01.01 101 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.01 04.01.01 101 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	155.649.000,00	155.640.620,00	(8.380,00)	
04.01 04.01.01 101 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.01 04.01.01 102	<b>Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Sosial</b>	<b>494.117.000,00</b>	<b>490.036.366,00</b>	<b>(4.080.634,00)</b>	
04.01 04.01.01 102 001	<b>Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan dan Kebudayaan</b>	<b>48.204.000,00</b>	<b>47.543.620,00</b>	<b>(660.380,00)</b>	
04.01 04.01.01 102 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.01 04.01.01 102 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	48.204.000,00	47.543.620,00	(660.380,00)	
04.01 04.01.01 102 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.01 04.01.01 102 002	<b>Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>400.694.000,00</b>	<b>397.281.126,00</b>	<b>(3.412.874,00)</b>	
04.01 04.01.01 102 002 5 2 1	Belanja Pegawai	61.500.000,00	61.500.000,00	-	
04.01 04.01.01 102 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	339.194.000,00	335.781.126,00	(3.412.874,00)	
04.01 04.01.01 102 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.01 04.01.01 102 003	<b>Perencanaan dan Pengendalian Aparatur</b>	<b>45.219.000,00</b>	<b>45.211.620,00</b>	<b>(7.380,00)</b>	
04.01 04.01.01 102 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.01 04.01.01 102 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	45.219.000,00	45.211.620,00	(7.380,00)	
04.01 04.01.01 102 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
04.01 04.01.01 103	<b>Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah</b>	<b>723.205.000,00</b>	<b>707.543.820,00</b>	<b>(15.661.180,00)</b>	
04.01 04.01.01 103 001	<b>Perencanaan Program Pembangunan Daerah</b>	<b>415.387.000,00</b>	<b>408.976.540,00</b>	<b>(6.410.460,00)</b>	
04.01 04.01.01 103 001 5 2 1	Belanja Pegawai	6.300.000,00	6.300.000,00	-	
04.01 04.01.01 103 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	409.087.000,00	402.676.540,00	(6.410.460,00)	
04.01 04.01.01 103 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.01 04.01.01 103 002	<b>Pengendalian Program Pembangunan Daerah</b>	<b>124.737.000,00</b>	<b>119.705.640,00</b>	<b>(5.031.360,00)</b>	
04.01 04.01.01 103 002 5 2 1	Belanja Pegawai	5.250.000,00	5.250.000,00	-	
04.01 04.01.01 103 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	119.487.000,00	114.455.640,00	(5.031.360,00)	
04.01 04.01.01 103 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.01 04.01.01 103 003	<b>Pengelolaan dan Analisa Data Perencanaan</b>	<b>183.081.000,00</b>	<b>178.861.640,00</b>	<b>(4.219.360,00)</b>	
04.01 04.01.01 103 003 5 2 1	Belanja Pegawai	10.125.000,00	10.125.000,00	-	
04.01 04.01.01 103 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	172.956.000,00	168.736.640,00	(4.219.360,00)	
04.01 04.01.01 103 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.02 04.01.01 104	<b>Program Penelitian dan Pengembangan</b>	<b>1.860.428.000,00</b>	<b>1.773.226.475,00</b>	<b>(87.201.525,00)</b>	
04.02 04.01.01 104 001	<b>Penelitian Strategis Pembangunan Daerah</b>	<b>559.041.000,00</b>	<b>533.890.190,00</b>	<b>(25.150.810,00)</b>	
04.02 04.01.01 104 001 5 2 1	Belanja Pegawai	83.250.000,00	82.175.000,00	(1.075.000,00)	
04.02 04.01.01 104 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	160.791.000,00	136.715.190,00	(24.075.810,00)	
04.02 04.01.01 104 001 5 2 3	Belanja Modal	315.000.000,00	315.000.000,00	-	
04.01 04.01.01 104 002	<b>Optimalisasi dan Pengembangan Kebijakan Penanganan Isu Strategis</b>	<b>815.759.000,00</b>	<b>772.759.500,00</b>	<b>(42.999.500,00)</b>	
04.01 04.01.01 104 002 5 2 1	Belanja Pegawai	375.500.000,00	375.500.000,00	-	
04.01 04.01.01 104 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	240.259.000,00	197.259.500,00	(42.999.500,00)	
04.01 04.01.01 104 002 5 2 3	Belanja Modal	200.000.000,00	200.000.000,00	-	
04.01 04.01.01 104 003	<b>Pemantapan Inovasi Daerah</b>	<b>485.628.000,00</b>	<b>466.576.785,00</b>	<b>(19.051.215,00)</b>	
04.01 04.01.01 104 003 5 2 1	Belanja Pegawai	61.600.000,00	61.600.000,00	-	
04.01 04.01.01 104 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	324.028.000,00	304.976.785,00	(19.051.215,00)	
04.01 04.01.01 104 003 5 2 3	Belanja Modal	100.000.000,00	100.000.000,00	-	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH :</b>	<b>9.382.453.101,00</b>	<b>9.004.935.693,00</b>	<b>(377.517.408,00)</b>	
	<b>SURPLUS/(DEFISIT) :</b>	<b>(9.382.453.101,00)</b>	<b>(9.004.935.693,00)</b>	<b>377.517.408,00</b>	



URUSAN : 04 - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  
 MACAM URUSAN : 04.03 - SEKRETARIAT DAERAH  
 ORGANISASI : 04.03.01 - SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
04.03 04.03.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	
04.03 04.03.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	34.398.003.961,00	31.972.817.202,37	(2.417.050.624,63)	
04.03 04.03.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	10.878.114.961,00	10.121.345.981,00	(748.632.846,00)	
04.03 04.03.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	10.878.114.961,00	10.121.345.981,00	(748.632.846,00)	
04.03 04.03.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	23.519.889.000,00	21.851.471.221,37	(1.668.417.778,63)	
04.03 04.03.01A	<u>BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</u>	2.727.855.000,00	2.461.929.140,88	(265.925.859,12)	
04.03 04.03.01A 001	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	756.704.000,00	643.102.783,72	(113.601.216,28)	
04.03 04.03.01A 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	297.054.000,00	225.988.873,00	(71.065.127,00)	
04.03 04.03.01A 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01A 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	297.054.000,00	225.988.873,00	(71.065.127,00)	
04.03 04.03.01A 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01A 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	459.650.000,00	417.113.910,72	(42.536.089,28)	
04.03 04.03.01A 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	26.634.000,00	26.633.950,72	(49,28)	
04.03 04.03.01A 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	134.436.000,00	109.038.400,00	(25.397.600,00)	
04.03 04.03.01A 001 019 5 2 3	Belanja Modal	298.580.000,00	281.441.560,00	(17.138.440,00)	
04.03 04.03.01A 002	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	305.210.000,00	282.405.625,00	(22.804.375,00)	
04.01 04.03.01A 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	259.700.000,00	257.376.000,00	(2.324.000,00)	
04.01 04.03.01A 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.01 04.03.01A 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	
04.01 04.03.01A 002 022 5 2 3	Belanja Modal	259.700.000,00	257.376.000,00	(2.324.000,00)	
04.03 04.03.01A 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	45.510.000,00	25.029.625,00	(20.480.375,00)	
04.03 04.03.01A 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01A 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	45.510.000,00	25.029.625,00	(20.480.375,00)	
04.03 04.03.01A 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01A 006	<i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>	8.070.000,00	6.704.000,00	(1.366.000,00)	
04.03 04.03.01A 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	8.070.000,00	6.704.000,00	(1.366.000,00)	
04.03 04.03.01A 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01A 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	8.070.000,00	6.704.000,00	(1.366.000,00)	
04.03 04.03.01A 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01A 105	<i>Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan</i>	1.657.871.000,00	1.529.716.732,16	(128.154.267,84)	
04.03 04.03.01A 105 001	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	530.658.000,00	459.953.012,16	(70.704.987,84)	
04.03 04.03.01A 105 001 5 2 1	Belanja Pegawai	36.300.000,00	32.725.000,00	(3.575.000,00)	
04.03 04.03.01A 105 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	394.358.000,00	330.642.012,16	(63.715.987,84)	
04.03 04.03.01A 105 001 5 2 3	Belanja Modal	100.000.000,00	96.586.000,00	(3.414.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
04.03 04.03.01A 105 002	<b>Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Bina Administrasi Kecamatan</b>	<b>400.078.000,00</b>	<b>368.863.300,00</b>	<b>(31.214.700,00)</b>	
04.03 04.03.01A 105 002 5 2 1	Belanja Pegawai	17.700.000,00	16.125.000,00	(1.575.000,00)	
04.03 04.03.01A 105 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	382.378.000,00	352.738.300,00	(29.639.700,00)	
04.03 04.03.01A 105 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01A 105 003	<b>Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>727.135.000,00</b>	<b>700.900.420,00</b>	<b>(26.234.580,00)</b>	
04.03 04.03.01A 105 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01A 105 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	727.135.000,00	700.900.420,00	(26.234.580,00)	
04.03 04.03.01A 105 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01B	<b><u>BAGIAN HUKUM</u></b>	<b>2.442.803.000,00</b>	<b>2.287.163.450,88</b>	<b>(155.639.549,12)</b>	
04.03 04.03.01B 001	<b><i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i></b>	<b>454.529.000,00</b>	<b>439.823.035,72</b>	<b>(14.705.964,28)</b>	
04.03 04.03.01B 001 018	<b>Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi</b>	<b>238.794.000,00</b>	<b>237.367.706,00</b>	<b>(1.426.294,00)</b>	
04.03 04.03.01B 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01B 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	238.794.000,00	237.367.706,00	(1.426.294,00)	
04.03 04.03.01B 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01B 001 019	<b>Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>215.735.000,00</b>	<b>202.455.329,72</b>	<b>(13.279.670,28)</b>	
04.03 04.03.01B 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	90.247.450,00	90.247.318,72	(131,28)	
04.03 04.03.01B 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	80.087.550,00	68.173.790,00	(11.913.760,00)	
04.03 04.03.01B 001 019 5 2 3	Belanja Modal	45.400.000,00	44.034.221,00	(1.365.779,00)	
04.03 04.03.01B 002	<b><i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i></b>	<b>184.320.000,00</b>	<b>170.177.735,00</b>	<b>(14.142.265,00)</b>	
04.03 04.03.01B 002 022	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor</b>	<b>135.000.000,00</b>	<b>132.146.000,00</b>	<b>(2.854.000,00)</b>	
04.03 04.03.01B 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01B 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	
04.03 04.03.01B 002 022 5 2 3	Belanja Modal	135.000.000,00	132.146.000,00	(2.854.000,00)	
04.03 04.03.01B 002 024	<b>Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	<b>49.320.000,00</b>	<b>38.031.735,00</b>	<b>(11.288.265,00)</b>	
04.03 04.03.01B 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01B 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	49.320.000,00	38.031.735,00	(11.288.265,00)	
04.03 04.03.01B 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01B 005	<b><i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i></b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>-</b>	
04.03 04.03.01B 005 006	<b>Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>-</b>	
04.03 04.03.01B 005 006 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01B 005 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	-	
04.03 04.03.01B 005 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01B 006	<b><i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i></b>	<b>14.705.000,00</b>	<b>13.860.800,00</b>	<b>(844.200,00)</b>	
04.03 04.03.01B 006 005	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD</b>	<b>14.705.000,00</b>	<b>13.860.800,00</b>	<b>(844.200,00)</b>	
04.03 04.03.01B 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01B 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	14.705.000,00	13.860.800,00	(844.200,00)	
04.03 04.03.01B 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
04.03 04.03.01B 106	<b>Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum</b>	<b>1.764.249.000,00</b>	<b>1.638.301.880,16</b>	<b>(125.947.119,84)</b>	
04.03 04.03.01B 106 001	<b>Peraturan Perundang-Undangan</b>	<b>641.078.000,00</b>	<b>624.216.000,00</b>	<b>(16.862.000,00)</b>	
04.03 04.03.01B 106 001 5 2 1	Belanja Pegawai	47.300.000,00	47.300.000,00	-	
04.03 04.03.01B 106 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	193.778.000,00	182.916.000,00	(10.862.000,00)	
04.03 04.03.01B 106 001 5 2 3	Belanja Modal	400.000.000,00	394.000.000,00	(6.000.000,00)	
04.03 04.03.01B 106 002	<b>Bantuan Hukum</b>	<b>657.370.000,00</b>	<b>571.139.300,00</b>	<b>(86.230.700,00)</b>	
04.03 04.03.01B 106 002 5 2 1	Belanja Pegawai	358.450.000,00	329.450.000,00	(29.000.000,00)	
04.03 04.03.01B 106 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	298.920.000,00	241.689.300,00	(57.230.700,00)	
04.03 04.03.01B 106 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01B 106 003	<b>Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah</b>	<b>465.801.000,00</b>	<b>442.946.580,16</b>	<b>(22.854.419,84)</b>	
04.03 04.03.01B 106 003 5 2 1	Belanja Pegawai	58.775.000,00	58.775.000,00	-	
04.03 04.03.01B 106 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	407.026.000,00	384.171.580,16	(22.854.419,84)	
04.03 04.03.01B 106 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01C	<b>BAGIAN PROTOKOL</b>	<b>5.315.754.000,00</b>	<b>4.943.319.081,27</b>	<b>(372.434.918,73)</b>	
04.03 04.03.01C 001	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>2.649.965.000,00</b>	<b>2.482.016.531,44</b>	<b>(167.948.468,56)</b>	
04.03 04.03.01C 001 018	<b>Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi</b>	<b>1.088.000.000,00</b>	<b>1.072.104.343,00</b>	<b>(15.895.657,00)</b>	
04.03 04.03.01C 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01C 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.088.000.000,00	1.072.104.343,00	(15.895.657,00)	
04.03 04.03.01C 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01C 001 019	<b>Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>1.561.965.000,00</b>	<b>1.409.912.188,44</b>	<b>(152.052.811,56)</b>	
04.03 04.03.01C 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	222.039.800,00	210.065.477,44	(11.974.322,56)	
04.03 04.03.01C 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	700.655.200,00	621.236.160,00	(79.419.040,00)	
04.03 04.03.01C 001 019 5 2 3	Belanja Modal	639.270.000,00	578.610.551,00	(60.659.449,00)	
04.03 04.03.01C 002	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>615.050.000,00</b>	<b>540.862.477,75</b>	<b>(74.187.522,25)</b>	
04.03 04.03.01C 002 022	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor</b>	<b>284.500.000,00</b>	<b>281.878.202,75</b>	<b>(2.621.797,25)</b>	
04.03 04.03.01C 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01C 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.657.667,00	(342.333,00)	
04.03 04.03.01C 002 022 5 2 3	Belanja Modal	259.500.000,00	257.220.535,75	(2.279.464,25)	
04.03 04.03.01C 002 024	<b>Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	<b>330.550.000,00</b>	<b>258.984.275,00</b>	<b>(71.565.725,00)</b>	
04.03 04.03.01C 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01C 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	330.550.000,00	258.984.275,00	(71.565.725,00)	
04.03 04.03.01C 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01C 005 00 5 2	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>30.400.000,00</b>	<b>24.800.000,00</b>	<b>(5.600.000,00)</b>	
04.03 04.03.01C 005 006	<b>Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur</b>	<b>30.400.000,00</b>	<b>24.800.000,00</b>	<b>(5.600.000,00)</b>	
04.03 04.03.01C 005 006 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01C 005 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	30.400.000,00	24.800.000,00	(5.600.000,00)	
04.03 04.03.01C 005 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01C 006	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>-</b>	
04.03 04.03.01C 006 005	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>-</b>	
04.03 04.03.01C 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01C 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	5.600.000,00	-	
04.03 04.03.01C 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
04.03 04.03.01C 107	<b>Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Sekda, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.014.739.000,00</b>	<b>1.890.040.072,08</b>	<b>(124.698.927,92)</b>	
04.03 04.03.01C 107 001	<b>Pemanduan Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>521.389.000,00</b>	<b>501.274.669,16</b>	<b>(20.114.330,84)</b>	
04.03 04.03.01C 107 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01C 107 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	521.389.000,00	501.274.669,16	(20.114.330,84)	
04.03 04.03.01C 107 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01C 107 002	<b>Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta</b>	<b>1.363.296.000,00</b>	<b>1.259.900.158,60</b>	<b>(103.395.841,40)</b>	
04.03 04.03.01C 107 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01C 107 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.363.296.000,00	1.259.900.158,60	(103.395.841,40)	
04.03 04.03.01C 107 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01C 107 003	<b>Pengelolaan Administrasi dan Keuangan Sekda, Asisten dan Staf Ahli</b>	<b>130.054.000,00</b>	<b>128.865.244,32</b>	<b>(1.188.755,68)</b>	
04.03 04.03.01C 107 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01C 107 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	130.054.000,00	128.865.244,32	(1.188.755,68)	
04.03 04.03.01C 107 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01D	<b><u>BAGIAN UMUM</u></b>	<b>6.360.794.000,00</b>	<b>5.822.681.703,36</b>	<b>(538.112.296,64)</b>	
04.03 04.03.01D 001	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>552.696.000,00</b>	<b>500.690.513,00</b>	<b>(52.005.487,00)</b>	
04.03 04.03.01D 001 018	<b>Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi</b>	<b>14.388.000,00</b>	<b>14.329.000,00</b>	<b>(59.000,00)</b>	
04.03 04.03.01D 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01D 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	14.388.000,00	14.329.000,00	(59.000,00)	
04.03 04.03.01D 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01D 001 019	<b>Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>538.308.000,00</b>	<b>486.361.513,00</b>	<b>(51.946.487,00)</b>	
04.03 04.03.01D 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	136.106.664,00	136.104.444,00	(2.220,00)	
04.03 04.03.01D 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	129.901.640,00	125.858.669,00	(4.042.971,00)	
04.03 04.03.01D 001 019 5 2 3	Belanja Modal	272.299.696,00	224.398.400,00	(47.901.296,00)	
04.03 04.03.01D 002	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>301.058.000,00</b>	<b>282.709.100,00</b>	<b>(18.348.900,00)</b>	
04.03 04.03.01D 002 022	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>198.253.000,00</b>	<b>(1.747.000,00)</b>	
04.03 04.03.01D 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01D 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	
04.03 04.03.01D 002 022 5 2 3	Belanja Modal	200.000.000,00	198.253.000,00	(1.747.000,00)	
04.03 04.03.01D 002 024	<b>Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	<b>101.058.000,00</b>	<b>84.456.100,00</b>	<b>(16.601.900,00)</b>	
04.03 04.03.01D 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01D 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	101.058.000,00	84.456.100,00	(16.601.900,00)	
04.03 04.03.01D 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
04.03 04.03.01D 006	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>1.740.000,00</b>	<b>1.687.000,00</b>	<b>(53.000,00)</b>	
04.03 04.03.01D 006 005	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD</b>	<b>1.740.000,00</b>	<b>1.687.000,00</b>	<b>(53.000,00)</b>	
04.03 04.03.01D 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01D 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.740.000,00	1.687.000,00	(53.000,00)	
04.03 04.03.01D 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01D 108	<b>Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtangaan</b>	<b>5.505.300.000,00</b>	<b>5.037.595.090,36</b>	<b>(467.704.909,64)</b>	
04.03 04.03.01D 108 001	<b>Pelayanan Kerumahtangaan</b>	<b>4.950.930.000,00</b>	<b>4.662.135.348,36</b>	<b>(288.794.651,64)</b>	
04.03 04.03.01D 108 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01D 108 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2.279.392.400,00	2.149.513.348,36	(129.879.051,64)	
04.03 04.03.01D 108 001 5 2 3	Belanja Modal	2.671.537.600,00	2.512.622.000,00	(158.915.600,00)	
04.03 04.03.01D 108 002	<b>Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah</b>	<b>541.770.000,00</b>	<b>363.444.742,00</b>	<b>(178.325.258,00)</b>	
04.03 04.03.01D 108 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01D 108 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	541.770.000,00	363.444.742,00	(178.325.258,00)	
04.03 04.03.01D 108 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01D 108 003	<b>Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta</b>	<b>12.600.000,00</b>	<b>12.015.000,00</b>	<b>(585.000,00)</b>	
04.03 04.03.01D 108 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01D 108 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	12.015.000,00	(585.000,00)	
04.03 04.03.01D 108 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01E	<b><u>BAGIAN PEREKONOMIAN, PENGEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN KERJASAMA</u></b>	<b>1.638.845.000,00</b>	<b>1.594.157.749,72</b>	<b>(44.687.250,28)</b>	
04.03 04.03.01E 001	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>633.232.000,00</b>	<b>624.748.595,72</b>	<b>(8.483.404,28)</b>	
04.03 04.03.01E 001 018	<b>Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi</b>	<b>221.180.000,00</b>	<b>219.853.237,00</b>	<b>(1.326.763,00)</b>	
04.03 04.03.01E 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01E 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	221.180.000,00	219.853.237,00	(1.326.763,00)	
04.03 04.03.01E 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01E 001 019	<b>Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>412.052.000,00</b>	<b>404.895.358,72</b>	<b>(7.156.641,28)</b>	
04.03 04.03.01E 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	88.743.750,00	88.011.474,72	(732.275,28)	
04.03 04.03.01E 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	132.610.400,00	130.477.854,00	(2.132.546,00)	
04.03 04.03.01E 001 019 5 2 3	Belanja Modal	190.697.850,00	186.406.030,00	(4.291.820,00)	
04.03 04.03.01E 002	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>200.347.000,00</b>	<b>183.440.754,00</b>	<b>(16.906.246,00)</b>	
04.03 04.03.01E 002 022	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor</b>	<b>156.750.000,00</b>	<b>143.950.034,00</b>	<b>(12.799.966,00)</b>	
04.03 04.03.01E 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01E 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	27.200.000,00	26.932.359,00	(267.641,00)	
04.03 04.03.01E 002 022 5 2 3	Belanja Modal	129.550.000,00	117.017.675,00	(12.532.325,00)	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
04.03 04.03.01E 002 024	<b>Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	<b>43.597.000,00</b>	<b>39.490.720,00</b>	<b>(4.106.280,00)</b>	
04.03 04.03.01E 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01E 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	43.597.000,00	39.490.720,00	(4.106.280,00)	
04.03 04.03.01E 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01E 005	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>14.750.000,00</b>	<b>(5.250.000,00)</b>	
04.03 04.03.01E 005 006	<b>Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>14.750.000,00</b>	<b>(5.250.000,00)</b>	
04.03 04.03.01E 005 006 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01E 005 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	14.750.000,00	(5.250.000,00)	
04.03 04.03.01E 005 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01E 006	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>2.794.000,00</b>	<b>2.652.000,00</b>	<b>(142.000,00)</b>	
04.03 04.03.01E 006 005	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD</b>	<b>2.794.000,00</b>	<b>2.652.000,00</b>	<b>(142.000,00)</b>	
04.03 04.03.01E 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01E 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2.794.000,00	2.652.000,00	(142.000,00)	
04.03 04.03.01E 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01E 109	<b>Program Peningkatan Perekonmian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama</b>	<b>782.472.000,00</b>	<b>768.566.400,00</b>	<b>(13.905.600,00)</b>	
04.03 04.03.01E 109 001	<b>Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>222.611.000,00</b>	<b>218.665.000,00</b>	<b>(3.946.000,00)</b>	
04.03 04.03.01E 109 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01E 109 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	57.611.000,00	55.191.250,00	(2.419.750,00)	
04.03 04.03.01E 109 001 5 2 3	Belanja Modal	165.000.000,00	163.473.750,00	(1.526.250,00)	
04.03 04.03.01E 109 002	<b>Pembinaan BUMD dan BLUD</b>	<b>308.925.000,00</b>	<b>308.774.200,00</b>	<b>(150.800,00)</b>	
04.03 04.03.01E 109 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01E 109 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	23.925.000,00	23.774.200,00	(150.800,00)	
04.03 04.03.01E 109 002 5 2 3	Belanja Modal	285.000.000,00	285.000.000,00	-	
04.03 04.03.01E 109 003	<b>Kerjasama Daerah</b>	<b>250.936.000,00</b>	<b>241.127.200,00</b>	<b>(9.808.800,00)</b>	
04.03 04.03.01E 109 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01E 109 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	238.936.000,00	229.500.200,00	(9.435.800,00)	
04.03 04.03.01E 109 003 5 2 3	Belanja Modal	12.000.000,00	11.627.000,00	(373.000,00)	
04.03 04.03.01F	<b><u>BAGIAN ADMINISTRASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN</u></b>	<b>1.079.355.000,00</b>	<b>1.011.835.277,16</b>	<b>(67.519.722,84)</b>	
04.03 04.03.01F 001	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>140.038.810,00</b>	<b>132.590.741,00</b>	<b>(7.448.069,00)</b>	
04.03 04.03.01F 001 018	<b>Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi</b>	<b>34.325.200,00</b>	<b>30.384.886,00</b>	<b>(3.940.314,00)</b>	
04.03 04.03.01F 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01F 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	34.325.200,00	30.384.886,00	(3.940.314,00)	
04.03 04.03.01F 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01F 001 019	<b>Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>105.713.610,00</b>	<b>102.205.855,00</b>	<b>(3.507.755,00)</b>	
04.03 04.03.01F 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01F 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	105.113.610,00	101.607.100,00	(3.506.510,00)	
04.03 04.03.01F 001 019 5 2 3	Belanja Modal	600.000,00	598.755,00	(1.245,00)	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
04.03 04.03.01F 002	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>360.560.200,00</b>	<b>357.841.231,00</b>	<b>(2.718.969,00)</b>	
04.03 04.03.01F 002 022	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor</b>	<b>314.624.200,00</b>	<b>312.417.600,00</b>	<b>(2.206.600,00)</b>	
04.03 04.03.01F 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01F 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	
04.03 04.03.01F 002 022 5 2 3	Belanja Modal	314.624.200,00	312.417.600,00	(2.206.600,00)	
04.03 04.03.01F 002 024	<b>Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	<b>45.936.000,00</b>	<b>45.423.631,00</b>	<b>(512.369,00)</b>	
04.03 04.03.01F 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01F 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	45.936.000,00	45.423.631,00	(512.369,00)	
04.03 04.03.01F 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01F 006	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>11.796.400,00</b>	<b>11.122.400,00</b>	<b>(674.000,00)</b>	
04.03 04.03.01F 006 005	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD</b>	<b>11.796.400,00</b>	<b>11.122.400,00</b>	<b>(674.000,00)</b>	
04.03 04.03.01F 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01F 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	11.796.400,00	11.122.400,00	(674.000,00)	
04.03 04.03.01F 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01F 110	<b>Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan</b>	<b>566.959.590,00</b>	<b>510.280.905,16</b>	<b>(56.678.684,84)</b>	
04.03 04.03.01F 110 001	<b>Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Setda</b>	<b>41.462.620,00</b>	<b>41.366.620,00</b>	<b>(96.000,00)</b>	
04.03 04.03.01F 110 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01F 110 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	41.462.620,00	41.366.620,00	(96.000,00)	
04.03 04.03.01F 110 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01F 110 002	<b>Pengendalian Administrasi dan Pelaksanaan Kegiatan</b>	<b>249.125.060,00</b>	<b>194.987.389,00</b>	<b>(54.137.671,00)</b>	
04.03 04.03.01F 110 002 5 2 1	Belanja Pegawai	14.700.000,00	14.700.000,00	-	
04.03 04.03.01F 110 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	234.425.060,00	180.287.389,00	(54.137.671,00)	
04.03 04.03.01F 110 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01F 110 003	<b>Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan</b>	<b>276.371.910,00</b>	<b>273.926.896,16</b>	<b>(2.445.013,84)</b>	
04.03 04.03.01F 110 003 5 2 1	Belanja Pegawai	4.750.000,00	4.750.000,00	-	
04.03 04.03.01F 110 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	221.621.910,00	219.456.896,16	(2.165.013,84)	
04.03 04.03.01F 110 003 5 2 3	Belanja Modal	50.000.000,00	49.720.000,00	(280.000,00)	
04.03 04.03.01G	<b><u>BAGIAN ORGANISASI</u></b>	<b>2.242.002.000,00</b>	<b>2.138.574.222,72</b>	<b>(103.427.777,28)</b>	
04.03 04.03.01G 001	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>649.355.000,00</b>	<b>628.016.396,72</b>	<b>(21.338.603,28)</b>	
04.03 04.03.01G 001 018	<b>Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi</b>	<b>222.310.000,00</b>	<b>221.521.804,00</b>	<b>(788.196,00)</b>	
04.03 04.03.01G 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01G 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	222.310.000,00	221.521.804,00	(788.196,00)	
04.03 04.03.01G 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
04.03 04.03.01G 001 019	<b>Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>427.045.000,00</b>	<b>406.494.592,72</b>	<b>(20.550.407,28)</b>	
04.03 04.03.01G 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	95.956.448,00	90.247.318,72	(5.709.129,28)	
04.03 04.03.01G 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	157.038.552,00	143.997.274,00	(13.041.278,00)	
04.03 04.03.01G 001 019 5 2 3	Belanja Modal	174.050.000,00	172.250.000,00	(1.800.000,00)	
04.03 04.03.01G 002	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>144.300.000,00</b>	<b>131.448.750,00</b>	<b>(12.851.250,00)</b>	
04.03 04.03.01G 002 022 5 2	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor</b>	<b>101.000.000,00</b>	<b>100.989.000,00</b>	<b>(11.000,00)</b>	
04.03 04.03.01G 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01G 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	
04.03 04.03.01G 002 022 5 2 3	Belanja Modal	101.000.000,00	100.989.000,00	(11.000,00)	
04.03 04.03.01G 002 024	<b>Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	<b>43.300.000,00</b>	<b>30.459.750,00</b>	<b>(12.840.250,00)</b>	
04.03 04.03.01G 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01G 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	43.300.000,00	30.459.750,00	(12.840.250,00)	
04.03 04.03.01G 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01G 005	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>24.500.000,00</b>	<b>24.500.000,00</b>	<b>-</b>	
04.03 04.03.01G 005 006	<b>Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur</b>	<b>24.500.000,00</b>	<b>24.500.000,00</b>	<b>-</b>	
04.03 04.03.01G 005 006 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01G 005 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	24.500.000,00	24.500.000,00	-	
04.03 04.03.01G 005 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01G 006	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>3.240.000,00</b>	<b>2.313.980,00</b>	<b>(926.020,00)</b>	
04.03 04.03.01G 006 005	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD</b>	<b>3.240.000,00</b>	<b>2.313.980,00</b>	<b>(926.020,00)</b>	
04.03 04.03.01G 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01G 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	3.240.000,00	2.313.980,00	(926.020,00)	
04.03 04.03.01G 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01G 111	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.420.607.000,00</b>	<b>1.352.295.096,00</b>	<b>(68.311.904,00)</b>	
04.03 04.03.01G 111 001	<b>Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur</b>	<b>419.617.000,00</b>	<b>396.410.240,00</b>	<b>(23.206.760,00)</b>	
04.03 04.03.01G 111 001 5 2 1	Belanja Pegawai	82.500.000,00	82.500.000,00	-	
04.03 04.03.01G 111 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	133.277.000,00	113.530.240,00	(19.746.760,00)	
04.03 04.03.01G 111 001 5 2 3	Belanja Modal	203.840.000,00	200.380.000,00	(3.460.000,00)	
04.03 04.03.01G 111 002	<b>Pemantapan Pelayanan Publik</b>	<b>700.868.135,00</b>	<b>658.896.736,00</b>	<b>(41.971.399,00)</b>	
04.03 04.03.01G 111 002 5 2 1	Belanja Pegawai	92.400.000,00	92.400.000,00	-	
04.03 04.03.01G 111 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	608.468.135,00	566.496.736,00	(41.971.399,00)	
04.03 04.03.01G 111 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01G 111 003	<b>Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi</b>	<b>300.121.865,00</b>	<b>296.988.120,00</b>	<b>(3.133.745,00)</b>	
04.03 04.03.01G 111 003 5 2 1	Belanja Pegawai	81.000.000,00	81.000.000,00	-	
04.03 04.03.01G 111 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	117.681.865,00	114.818.120,00	(2.863.745,00)	
04.03 04.03.01G 111 003 5 2 3	Belanja Modal	101.440.000,00	101.170.000,00	(270.000,00)	



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
04.03 04.03.01H	<b>BAGIAN LAYANAN PENGADAAN</b>	<b>1.712.481.000,00</b>	<b>1.591.810.595,38</b>	<b>(120.670.404,62)</b>	
04.03 04.03.01H 001	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>791.969.000,00</b>	<b>746.950.550,86</b>	<b>(45.018.449,14)</b>	
04.03 04.03.01H 001 018	<b>Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi</b>	<b>189.896.000,00</b>	<b>175.253.692,86</b>	<b>(14.642.307,14)</b>	
04.03 04.03.01H 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01H 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	189.896.000,00	175.253.692,86	(14.642.307,14)	
04.03 04.03.01H 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01H 001 019	<b>Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>602.073.000,00</b>	<b>571.696.858,00</b>	<b>(30.376.142,00)</b>	
04.03 04.03.01H 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	150.090.044,00	147.453.296,00	(2.636.748,00)	
04.03 04.03.01H 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	225.992.956,00	202.300.942,00	(23.692.014,00)	
04.03 04.03.01H 001 019 5 2 3	Belanja Modal	225.990.000,00	221.942.620,00	(4.047.380,00)	
04.03 04.03.01H 002	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>204.260.000,00</b>	<b>182.231.438,00</b>	<b>(22.028.562,00)</b>	
04.03 04.03.01H 002 022	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor</b>	<b>154.500.000,00</b>	<b>152.862.000,00</b>	<b>(1.638.000,00)</b>	
04.03 04.03.01H 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01H 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	
04.03 04.03.01H 002 022 5 2 3	Belanja Modal	154.500.000,00	152.862.000,00	(1.638.000,00)	
04.03 04.03.01H 002 024	<b>Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	<b>49.760.000,00</b>	<b>29.369.438,00</b>	<b>(20.390.562,00)</b>	
04.03 04.03.01H 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01H 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	49.760.000,00	29.369.438,00	(20.390.562,00)	
04.03 04.03.01H 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01H 005	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
04.03 04.03.01H 005 006	<b>Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
04.03 04.03.01H 005 006 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01H 005 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	
04.03 04.03.01H 005 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01H 006	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>8.850.000,00</b>	<b>6.340.450,00</b>	<b>(2.509.550,00)</b>	
04.03 04.03.01H 006 005	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD</b>	<b>8.850.000,00</b>	<b>6.340.450,00</b>	<b>(2.509.550,00)</b>	
04.03 04.03.01H 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01H 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	8.850.000,00	6.340.450,00	(2.509.550,00)	
04.03 04.03.01H 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.10 04.03.01H 112	<b>Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa</b>	<b>707.402.000,00</b>	<b>656.288.156,52</b>	<b>(51.113.843,48)</b>	
02.10 04.03.01H 112 001	<b>Pengelolaan Sistem Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa</b>	<b>142.116.000,00</b>	<b>128.425.677,76</b>	<b>(13.690.322,24)</b>	
02.10 04.03.01H 112 001 5 2 1	Belanja Pegawai	5.775.000,00	5.225.000,00	(550.000,00)	
02.10 04.03.01H 112 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	136.341.000,00	123.200.677,76	(13.140.322,24)	
02.10 04.03.01H 112 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.10 04.03.01H 112 002	<b>Operasional Pengadaan Barang/Jasa</b>	<b>277.518.000,00</b>	<b>273.259.245,60</b>	<b>(4.258.754,40)</b>	
02.10 04.03.01H 112 002 5 2 1	Belanja Pegawai	5.775.000,00	5.775.000,00	-	
02.10 04.03.01H 112 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	271.743.000,00	267.484.245,60	(4.258.754,40)	
02.10 04.03.01H 112 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.10 04.03.01H 112 003	<b>Pengelolaan SDM dan Advokasi Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa</b>	<b>287.768.000,00</b>	<b>254.603.233,16</b>	<b>(33.164.766,84)</b>	
02.10 04.03.01H 112 003 5 2 1	Belanja Pegawai	5.775.000,00	5.775.000,00	-	
02.10 04.03.01H 112 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	281.993.000,00	248.828.233,16	(33.164.766,84)	
02.10 04.03.01H 112 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH :</b>	<b>34.398.003.961,00</b>	<b>31.972.817.202,37</b>	<b>(2.417.050.624,63)</b>	
	<b>SURPLUS/(DEFISIT) :</b>	<b>(34.398.003.961,00)</b>	<b>(31.972.817.202,37)</b>	<b>2.417.050.624,63</b>	

URUSAN : 04 - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  
 MACAM URUSAN : 04.03 - SEKRETARIAT DAERAH  
 ORGANISASI : 04.03.01A - BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
04.03 04.03.01A 00 00 4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	-	-	-	
04.03 04.03.01A 00 00 5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>3.676.205.383,00</b>	<b>3.347.925.997,88</b>	<b>(328.279.385,12)</b>	
04.03 04.03.01A 00 00 5 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>948.350.383,00</b>	<b>885.996.857,00</b>	<b>(62.353.526,00)</b>	
04.03 04.03.01A 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	948.350.383,00	885.996.857,00	(62.353.526,00)	
04.03 04.03.01A 00 00 5 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>2.727.855.000,00</b>	<b>2.461.929.140,88</b>	<b>(265.925.859,12)</b>	
04.03 04.03.01A 001 00 5 2	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>756.704.000,00</b>	<b>643.102.783,72</b>	<b>(113.601.216,28)</b>	
04.03 04.03.01A 001 018 5 2	<b>Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi</b>	<b>297.054.000,00</b>	<b>225.988.873,00</b>	<b>(71.065.127,00)</b>	
04.03 04.03.01A 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01A 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	297.054.000,00	225.988.873,00	(71.065.127,00)	
04.03 04.03.01A 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01A 001 019 5 2	<b>Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>459.650.000,00</b>	<b>417.113.910,72</b>	<b>(42.536.089,28)</b>	
04.03 04.03.01A 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	26.634.000,00	26.633.950,72	(49,28)	
04.03 04.03.01A 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	134.436.000,00	109.038.400,00	(25.397.600,00)	
04.03 04.03.01A 001 019 5 2 3	Belanja Modal	298.580.000,00	281.441.560,00	(17.138.440,00)	
04.03 04.03.01A 002 00 5 2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>305.210.000,00</b>	<b>282.405.625,00</b>	<b>(22.804.375,00)</b>	
04.03 04.03.01A 002 022	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor</b>	<b>259.700.000,00</b>	<b>257.376.000,00</b>	<b>(2.324.000,00)</b>	
04.03 04.03.01A 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01A 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	
04.03 04.03.01A 002 022 5 2 3	Belanja Modal	259.700.000,00	257.376.000,00	(2.324.000,00)	
04.03 04.03.01A 002 024	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	<b>45.510.000,00</b>	<b>25.029.625,00</b>	<b>(20.480.375,00)</b>	
04.03 04.03.01A 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01A 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	45.510.000,00	25.029.625,00	(20.480.375,00)	
04.03 04.03.01A 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01A 006 00 5 2	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>8.070.000,00</b>	<b>6.704.000,00</b>	<b>(1.366.000,00)</b>	
04.03 04.03.01A 006 005 5 2	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD</b>	<b>8.070.000,00</b>	<b>6.704.000,00</b>	<b>(1.366.000,00)</b>	
04.03 04.03.01A 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01A 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	8.070.000,00	6.704.000,00	(1.366.000,00)	
04.03 04.03.01A 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01A 105 00 5 2	<b>Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan</b>	<b>1.657.871.000,00</b>	<b>1.529.716.732,16</b>	<b>(128.154.267,84)</b>	
04.03 04.03.01A 105 001 5 2	<b>Penyelenggaraan Pemerintahan Umum</b>	<b>530.658.000,00</b>	<b>459.953.012,16</b>	<b>(70.704.987,84)</b>	
04.03 04.03.01A 105 001 5 2 1	Belanja Pegawai	36.300.000,00	32.725.000,00	(3.575.000,00)	
04.03 04.03.01A 105 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	394.358.000,00	330.642.012,16	(63.715.987,84)	
04.03 04.03.01A 105 001 5 2 3	Belanja Modal	100.000.000,00	96.586.000,00	(3.414.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
04.03 04.03.01A 105 002 5 2	<b>Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Bina Administrasi Kecamatan</b>	<b>400.078.000,00</b>	<b>368.863.300,00</b>	<b>(31.214.700,00)</b>	
04.03 04.03.01A 105 002 5 2 1	Belanja Pegawai	17.700.000,00	16.125.000,00	(1.575.000,00)	
04.03 04.03.01A 105 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	382.378.000,00	352.738.300,00	(29.639.700,00)	
04.03 04.03.01A 105 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01A 105 003 5 2	<b>Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>727.135.000,00</b>	<b>700.900.420,00</b>	<b>(26.234.580,00)</b>	
04.03 04.03.01A 105 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01A 105 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	727.135.000,00	700.900.420,00	(26.234.580,00)	
04.03 04.03.01A 105 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN :</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>JUMLAH BELANJA:</b>	<b>3.676.205.383,00</b>	<b>3.347.925.997,88</b>	<b>(328.279.385,12)</b>	
	<b>SURPLUS/(DEFISIT) :</b>	<b>(3.676.205.383,00)</b>	<b>(3.347.925.997,88)</b>	<b>328.279.385,12</b>	

URUSAN : 04 - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  
 MACAM URUSAN : 04.03 - SEKRETARIAT DAERAH  
 ORGANISASI : 04.03.01B - BAGIAN HUKUM

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
04.03 04.03.01B 00 00 4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	-	-	-	
04.03 04.03.01B 00 00 5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>3.360.860.008,00</b>	<b>3.132.758.731,88</b>	<b>(228.101.276,12)</b>	
04.03 04.03.01B 00 00 5 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>918.057.008,00</b>	<b>845.595.281,00</b>	<b>(72.461.727,00)</b>	
04.03 04.03.01B 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	918.057.008,00	845.595.281,00	(72.461.727,00)	
04.03 04.03.01B 00 00 5 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>2.442.803.000,00</b>	<b>2.287.163.450,88</b>	<b>(155.639.549,12)</b>	
04.03 04.03.01B 001 00 5 2	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>454.529.000,00</b>	<b>439.823.035,72</b>	<b>(14.705.964,28)</b>	
04.03 04.03.01B 001 018 5 2	<b>Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi</b>	<b>238.794.000,00</b>	<b>237.367.706,00</b>	<b>(1.426.294,00)</b>	
04.03 04.03.01B 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01B 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	238.794.000,00	237.367.706,00	(1.426.294,00)	
04.03 04.03.01B 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01B 001 019 5 2	<b>Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>215.735.000,00</b>	<b>202.455.329,72</b>	<b>(13.279.670,28)</b>	
04.03 04.03.01B 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	90.247.450,00	90.247.318,72	(131,28)	
04.03 04.03.01B 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	80.087.550,00	68.173.790,00	(11.913.760,00)	
04.03 04.03.01B 001 019 5 2 3	Belanja Modal	45.400.000,00	44.034.221,00	(1.365.779,00)	
04.03 04.03.01B 002 00 5 2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>184.320.000,00</b>	<b>170.177.735,00</b>	<b>(14.142.265,00)</b>	
04.03 04.03.01B 002 022 5 2	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor</b>	<b>135.000.000,00</b>	<b>132.146.000,00</b>	<b>(2.854.000,00)</b>	
04.03 04.03.01B 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01B 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	
04.03 04.03.01B 002 022 5 2 3	Belanja Modal	135.000.000,00	132.146.000,00	(2.854.000,00)	
04.03 04.03.01B 002 024 5 2	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	<b>49.320.000,00</b>	<b>38.031.735,00</b>	<b>(11.288.265,00)</b>	
04.03 04.03.01B 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01B 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	49.320.000,00	38.031.735,00	(11.288.265,00)	
04.03 04.03.01B 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01B 005	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	-	
04.03 04.03.01B 005 006	<b>Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	-	
04.03 04.03.01B 005 006 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01B 005 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	-	
04.03 04.03.01B 005 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01B 006 00 5 2	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>14.705.000,00</b>	<b>13.860.800,00</b>	<b>(844.200,00)</b>	
04.03 04.03.01B 006 005 5 2	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD</b>	<b>14.705.000,00</b>	<b>13.860.800,00</b>	<b>(844.200,00)</b>	
04.03 04.03.01B 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01B 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	14.705.000,00	13.860.800,00	(844.200,00)	
04.03 04.03.01B 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
04.03 04.03.01B 106 00 5 2	<b>Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum</b>	<b>1.764.249.000,00</b>	<b>1.638.301.880,16</b>	<b>(125.947.119,84)</b>	
04.03 04.03.01B 106 001 5 2	<b>Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan</b>	<b>641.078.000,00</b>	<b>624.216.000,00</b>	<b>(16.862.000,00)</b>	
04.03 04.03.01B 106 001 5 2 1	Belanja Pegawai	47.300.000,00	47.300.000,00	-	
04.03 04.03.01B 106 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	193.778.000,00	182.916.000,00	(10.862.000,00)	
04.03 04.03.01B 106 001 5 2 3	Belanja Modal	400.000.000,00	394.000.000,00	(6.000.000,00)	
04.03 04.03.01B 106 002 5 2	<b>Layanan Bantuan Hukum</b>	<b>657.370.000,00</b>	<b>571.139.300,00</b>	<b>(86.230.700,00)</b>	
04.03 04.03.01B 106 002 5 2 1	Belanja Pegawai	358.450.000,00	329.450.000,00	(29.000.000,00)	
04.03 04.03.01B 106 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	298.920.000,00	241.689.300,00	(57.230.700,00)	
04.03 04.03.01B 106 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01B 106 003 5 2	<b>Penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah</b>	<b>465.801.000,00</b>	<b>442.946.580,16</b>	<b>(22.854.419,84)</b>	
04.03 04.03.01B 106 003 5 2 1	Belanja Pegawai	58.775.000,00	58.775.000,00	-	
04.03 04.03.01B 106 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	407.026.000,00	384.171.580,16	(22.854.419,84)	
04.03 04.03.01B 106 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN :</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>JUMLAH BELANJA:</b>	<b>3.360.860.008,00</b>	<b>3.132.758.731,88</b>	<b>(228.101.276,12)</b>	
	<b>SURPLUS/(DEFISIT) :</b>	<b>(3.360.860.008,00)</b>	<b>(3.132.758.731,88)</b>	<b>228.101.276,12</b>	

URUSAN : 04 - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  
 MACAM URUSAN : 04.03 - SEKRETARIAT DAERAH  
 ORGANISASI : 04.03.01C - BAGIAN PROTOKOL

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
04.03 04.03.01C 00 00 4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	-	-	-	
04.03 04.03.01C 00 00 5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>8.873.313.739,00</b>	<b>8.250.094.146,27</b>	<b>(242.648.540,00)</b>	
04.03 04.03.01C 00 00 5 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>3.557.559.739,00</b>	<b>3.306.775.065,00</b>	<b>(242.648.540,00)</b>	
04.03 04.03.01C 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	2.570.559.739,00	2.327.911.199,00	(242.648.540,00)	
	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH	987.000.000,00	978.863.866,00	(8.136.134,00)	
04.03 04.03.01C 00 00 5 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>5.315.754.000,00</b>	<b>4.943.319.081,27</b>	<b>(372.434.918,73)</b>	
04.03 04.03.01C 001 00 5 2	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>2.649.965.000,00</b>	<b>2.482.016.531,44</b>	<b>(167.948.468,56)</b>	
04.03 04.03.01C 001 018 5 2	<b>Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi</b>	<b>1.088.000.000,00</b>	<b>1.072.104.343,00</b>	<b>(15.895.657,00)</b>	
04.03 04.03.01C 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01C 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.088.000.000,00	1.072.104.343,00	(15.895.657,00)	
04.03 04.03.01C 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01C 001 019 5 2	<b>Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>1.561.965.000,00</b>	<b>1.409.912.188,44</b>	<b>(152.052.811,56)</b>	
04.03 04.03.01C 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	222.039.800,00	210.065.477,44	(11.974.322,56)	
04.03 04.03.01C 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	700.655.200,00	621.236.160,00	(79.419.040,00)	
04.03 04.03.01C 001 019 5 2 3	Belanja Modal	639.270.000,00	578.610.551,00	(60.659.449,00)	
04.03 04.03.01C 002 00 5 2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>615.050.000,00</b>	<b>540.862.477,75</b>	<b>(74.187.522,25)</b>	
04.03 04.03.01C 002 022 5 2	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor</b>	<b>284.500.000,00</b>	<b>281.878.202,75</b>	<b>(2.621.797,25)</b>	
04.03 04.03.01C 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01C 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.657.667,00	(342.333,00)	
04.03 04.03.01C 002 022 5 2 3	Belanja Modal	259.500.000,00	257.220.535,75	(2.279.464,25)	
04.03 04.03.01C 002 024 5 2	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	<b>330.550.000,00</b>	<b>258.984.275,00</b>	<b>(71.565.725,00)</b>	
04.03 04.03.01C 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01C 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	330.550.000,00	258.984.275,00	(71.565.725,00)	
04.03 04.03.01C 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01C 005 00 5 2	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>30.400.000,00</b>	<b>24.800.000,00</b>	<b>(5.600.000,00)</b>	
04.03 04.03.01C 005 006	<b>Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur</b>	<b>30.400.000,00</b>	<b>24.800.000,00</b>	<b>(5.600.000,00)</b>	
04.03 04.03.01C 005 006 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01C 005 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	30.400.000,00	24.800.000,00	(5.600.000,00)	
04.03 04.03.01C 005 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01C 006 00 5 2	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>5.600.000,00</b>	-	
04.03 04.03.01C 006 005 5 2	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>5.600.000,00</b>	-	
04.03 04.03.01C 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01C 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	5.600.000,00	-	
04.03 04.03.01C 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
04.03 04.03.01C 107 00 5 2	<b>Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah</b>	<b>2.014.739.000,00</b>	<b>1.890.040.072,08</b>	<b>(124.698.927,92)</b>	
04.03 04.03.01C 107 001 5 2	<b>Pemanduan Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>521.389.000,00</b>	<b>501.274.669,16</b>	<b>(20.114.330,84)</b>	
04.03 04.03.01C 107 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01C 107 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	521.389.000,00	501.274.669,16	(20.114.330,84)	
04.03 04.03.01C 107 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01C 107 002 5 2	<b>Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta</b>	<b>1.363.296.000,00</b>	<b>1.259.900.158,60</b>	<b>(103.395.841,40)</b>	
04.03 04.03.01C 107 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01C 107 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.363.296.000,00	1.259.900.158,60	(103.395.841,40)	
04.03 04.03.01C 107 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01C 107 003 5 2	<b>Pengelolaan Administrasi dan Keuangan Sekda, Asisten dan Staf Ahli</b>	<b>130.054.000,00</b>	<b>128.865.244,32</b>	<b>(1.188.755,68)</b>	
04.03 04.03.01C 107 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01C 107 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	130.054.000,00	128.865.244,32	(1.188.755,68)	
04.03 04.03.01C 107 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN :</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>JUMLAH BELANJA:</b>	<b>8.873.313.739,00</b>	<b>8.250.094.146,27</b>	<b>(242.648.540,00)</b>	
	<b>SURPLUS/(DEFISIT) :</b>	<b>(8.873.313.739,00)</b>	<b>(8.250.094.146,27)</b>	<b>242.648.540,00</b>	



URUSAN : 04 - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  
 MACAM URUSAN : 04.03 - SEKRETARIAT DAERAH  
 ORGANISASI : 04.03.01D - BAGIAN UMUM

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
04.03 04.03.01D 00 00 4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	-	-	-	
04.03 04.03.01D 00 00 5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>7.450.484.513,00</b>	<b>6.843.474.021,36</b>	<b>(607.010.491,64)</b>	
04.03 04.03.01D 00 00 5 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1.089.690.513,00</b>	<b>1.020.792.318,00</b>	<b>(68.898.195,00)</b>	
04.03 04.03.01D 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	1.089.690.513,00	1.020.792.318,00	(68.898.195,00)	
04.03 04.03.01D 00 00 5 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>6.360.794.000,00</b>	<b>5.822.681.703,36</b>	<b>(538.112.296,64)</b>	
04.03 04.03.01D 001 00 5 2	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>552.696.000,00</b>	<b>500.690.513,00</b>	<b>(52.005.487,00)</b>	
04.03 04.03.01D 001 018 5 2	<b>Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi</b>	<b>14.388.000,00</b>	<b>14.329.000,00</b>	<b>(59.000,00)</b>	
04.03 04.03.01D 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01D 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	14.388.000,00	14.329.000,00	(59.000,00)	
04.03 04.03.01D 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01D 001 019 5 2	<b>Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>538.308.000,00</b>	<b>486.361.513,00</b>	<b>(51.946.487,00)</b>	
04.03 04.03.01D 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	136.106.664,00	136.104.444,00	(2.220,00)	
04.03 04.03.01D 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	129.901.640,00	125.858.669,00	(4.042.971,00)	
04.03 04.03.01D 001 019 5 2 3	Belanja Modal	272.299.696,00	224.398.400,00	(47.901.296,00)	
04.03 04.03.01D 002 00 5 2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>301.058.000,00</b>	<b>282.709.100,00</b>	<b>(18.348.900,00)</b>	
04.03 04.03.01D 002 022 5 2	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>198.253.000,00</b>	<b>(1.747.000,00)</b>	
04.03 04.03.01D 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01D 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	
04.03 04.03.01D 002 022 5 2 3	Belanja Modal	200.000.000,00	198.253.000,00	(1.747.000,00)	
04.03 04.03.01D 002 024 5 2	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	<b>101.058.000,00</b>	<b>84.456.100,00</b>	<b>(16.601.900,00)</b>	
04.03 04.03.01D 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01D 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	101.058.000,00	84.456.100,00	(16.601.900,00)	
04.03 04.03.01D 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01D 006 00 5 2	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>1.740.000,00</b>	<b>1.687.000,00</b>	<b>(53.000,00)</b>	
04.03 04.03.01D 006 005 5 2	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD</b>	<b>1.740.000,00</b>	<b>1.687.000,00</b>	<b>(53.000,00)</b>	
04.03 04.03.01D 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01D 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.740.000,00	1.687.000,00	(53.000,00)	
04.03 04.03.01D 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01D 108 00 5 2	<b>Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtangaan</b>	<b>5.505.300.000,00</b>	<b>5.037.595.090,36</b>	<b>(467.704.909,64)</b>	
04.03 04.03.01D 108 001 5 2	<b>Pelayanan Kerumahtangaan</b>	<b>4.950.930.000,00</b>	<b>4.662.135.348,36</b>	<b>(288.794.651,64)</b>	
04.03 04.03.01D 108 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01D 108 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2.279.392.400,00	2.149.513.348,36	(129.879.051,64)	
04.03 04.03.01D 108 001 5 2 3	Belanja Modal	2.671.537.600,00	2.512.622.000,00	(158.915.600,00)	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
04.03 04.03.01D 108 002 5 2	<b>Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah</b>	<b>541.770.000,00</b>	<b>363.444.742,00</b>	<b>(178.325.258,00)</b>	
04.03 04.03.01D 108 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01D 108 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	541.770.000,00	363.444.742,00	(178.325.258,00)	
04.03 04.03.01D 108 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01D 108 003 5 2	<b>Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta</b>	<b>12.600.000,00</b>	<b>12.015.000,00</b>	<b>(585.000,00)</b>	
04.03 04.03.01D 108 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01D 108 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	12.015.000,00	(585.000,00)	
04.03 04.03.01D 108 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN :</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>JUMLAH BELANJA:</b>	<b>7.450.484.513,00</b>	<b>6.843.474.021,36</b>	<b>(607.010.491,64)</b>	
	<b>SURPLUS/(DEFISIT) :</b>	<b>(7.450.484.513,00)</b>	<b>(6.843.474.021,36)</b>	<b>607.010.491,64</b>	

URUSAN : 04.03 - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  
 MACAM URUSAN : 04.03 - SEKRETARIAT DAERAH  
 ORGANISASI : 04.03.01E - BAGIAN PEREKONOMIAN, PENGEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN KERJASAMA

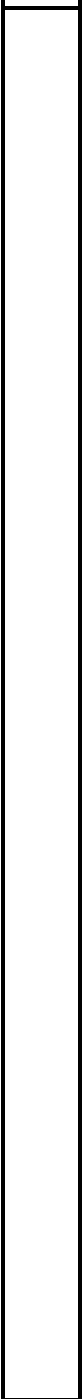
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
04.03 04.03.01E 00 00 4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	-	-	-	
04.03 04.03.01E 00 00 5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2.699.201.507,00</b>	<b>2.546.261.287,72</b>	<b>(152.940.219,28)</b>	
04.03 04.03.01E 00 00 5 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1.060.356.507,00</b>	<b>952.103.538,00</b>	<b>(108.252.969,00)</b>	
04.03 04.03.01E 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	1.060.356.507,00	952.103.538,00	(108.252.969,00)	
04.03 04.03.01E 00 00 5 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1.638.845.000,00</b>	<b>1.594.157.749,72</b>	<b>(44.687.250,28)</b>	
04.03 04.03.01E 001 00 5 2	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>633.232.000,00</b>	<b>624.748.595,72</b>	<b>(8.483.404,28)</b>	
04.03 04.03.01E 001 018 5 2	<b>Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi</b>	<b>221.180.000,00</b>	<b>219.853.237,00</b>	<b>(1.326.763,00)</b>	
04.03 04.03.01E 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01E 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	221.180.000,00	219.853.237,00	(1.326.763,00)	
04.03 04.03.01E 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01E 001 019 5 2	<b>Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>412.052.000,00</b>	<b>404.895.358,72</b>	<b>(7.156.641,28)</b>	
04.03 04.03.01E 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	88.743.750,00	88.011.474,72	(732.275,28)	
04.03 04.03.01E 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	132.610.400,00	130.477.854,00	(2.132.546,00)	
04.03 04.03.01E 001 019 5 2 3	Belanja Modal	190.697.850,00	186.406.030,00	(4.291.820,00)	
04.03 04.03.01E 002 00 5 2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>200.347.000,00</b>	<b>183.440.754,00</b>	<b>(16.906.246,00)</b>	
04.03 04.03.01E 002 022 5 2	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor</b>	<b>156.750.000,00</b>	<b>143.950.034,00</b>	<b>(12.799.966,00)</b>	
04.03 04.03.01E 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01E 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	27.200.000,00	26.932.359,00	(267.641,00)	
04.03 04.03.01E 002 022 5 2 3	Belanja Modal	129.550.000,00	117.017.675,00	(12.532.325,00)	
04.03 04.03.01E 002 024 5 2	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	<b>43.597.000,00</b>	<b>39.490.720,00</b>	<b>(4.106.280,00)</b>	
04.03 04.03.01E 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01E 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	43.597.000,00	39.490.720,00	(4.106.280,00)	
04.03 04.03.01E 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01E 005	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>14.750.000,00</b>	<b>(5.250.000,00)</b>	
04.03 04.03.01E 005 006	<b>Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>14.750.000,00</b>	<b>(5.250.000,00)</b>	
04.03 04.03.01E 005 006 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01E 005 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	14.750.000,00	(5.250.000,00)	
04.03 04.03.01E 005 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01E 006 00 5 2	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>2.794.000,00</b>	<b>2.652.000,00</b>	<b>(142.000,00)</b>	
04.03 04.03.01E 006 005 5 2	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD</b>	<b>2.794.000,00</b>	<b>2.652.000,00</b>	<b>(142.000,00)</b>	
04.03 04.03.01E 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01E 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2.794.000,00	2.652.000,00	(142.000,00)	
04.03 04.03.01E 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
04.03 04.03.01E 109 00 5 2	<b>Program Peningkatan Perekonmian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama</b>	<b>782.472.000,00</b>	<b>768.566.400,00</b>	<b>(13.905.600,00)</b>	
04.03 04.03.01E 109 001 5 2	<b>Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>222.611.000,00</b>	<b>218.665.000,00</b>	<b>(3.946.000,00)</b>	
04.03 04.03.01E 109 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01E 109 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	57.611.000,00	55.191.250,00	(2.419.750,00)	
04.03 04.03.01E 109 001 5 2 3	Belanja Modal	165.000.000,00	163.473.750,00	(1.526.250,00)	
04.03 04.03.01E 109 002 5 2	<b>Pembinaan BUMD dan BLUD</b>	<b>308.925.000,00</b>	<b>308.774.200,00</b>	<b>(150.800,00)</b>	
04.03 04.03.01E 109 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01E 109 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	23.925.000,00	23.774.200,00	(150.800,00)	
04.03 04.03.01E 109 002 5 2 3	Belanja Modal	285.000.000,00	285.000.000,00	-	
02.12 04.03.01E 109 003 5 2	<b>Kerjasama Daerah</b>	<b>250.936.000,00</b>	<b>241.127.200,00</b>	<b>(9.808.800,00)</b>	
02.12 04.03.01E 109 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.12 04.03.01E 109 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	238.936.000,00	229.500.200,00	(9.435.800,00)	
02.12 04.03.01E 109 003 5 2 3	Belanja Modal	12.000.000,00	11.627.000,00	(373.000,00)	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN :</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>JUMLAH BELANJA:</b>	<b>2.699.201.507,00</b>	<b>2.546.261.287,72</b>	<b>(152.940.219,28)</b>	
	<b>SURPLUS/(DEFISIT) :</b>	<b>(2.699.201.507,00)</b>	<b>(2.546.261.287,72)</b>	<b>152.940.219,28</b>	

URUSAN : 04.03 - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  
 MACAM URUSAN : 04.03 - SEKRETARIAT DAERAH  
 ORGANISASI : 04.03.01F - BAGIAN ADMINISTRASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)
04.03 04.03.01F 00 00 4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	-	-	-
04.03 04.03.01F 00 00 5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.734.593.675,00</b>	<b>1.607.238.438,16</b>	<b>(127.355.236,84)</b>
04.03 04.03.01F 00 00 5 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>655.238.675,00</b>	<b>595.403.161,00</b>	<b>(59.835.514,00)</b>
04.03 04.03.01F 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	655.238.675,00	595.403.161,00	(59.835.514,00)
04.03 04.03.01F 00 00 5 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1.079.355.000,00</b>	<b>1.011.835.277,16</b>	<b>(67.519.722,84)</b>
04.03 04.03.01F 001 00 5 2	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>140.038.810,00</b>	<b>132.590.741,00</b>	<b>(7.448.069,00)</b>
04.03 04.03.01F 001 018 5 2	<b>Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi</b>	<b>34.325.200,00</b>	<b>30.384.886,00</b>	<b>(3.940.314,00)</b>
04.03 04.03.01F 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-
04.03 04.03.01F 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	34.325.200,00	30.384.886,00	(3.940.314,00)
04.03 04.03.01F 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-
04.03 04.03.01F 001 019 5 2	<b>Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>105.713.610,00</b>	<b>102.205.855,00</b>	<b>(3.507.755,00)</b>
04.03 04.03.01F 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-
04.03 04.03.01F 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	105.113.610,00	101.607.100,00	(3.506.510,00)
04.03 04.03.01F 001 019 5 2 3	Belanja Modal	600.000,00	598.755,00	(1.245,00)
04.03 04.03.01F 002 00 5 2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>360.560.200,00</b>	<b>357.841.231,00</b>	<b>(2.718.969,00)</b>
04.03 04.03.01F 002 022 5 2	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor</b>	<b>314.624.200,00</b>	<b>312.417.600,00</b>	<b>(2.206.600,00)</b>
04.03 04.03.01F 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-
04.03 04.03.01F 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-
04.03 04.03.01F 002 022 5 2 3	Belanja Modal	314.624.200,00	312.417.600,00	(2.206.600,00)
04.03 04.03.01F 002 024 5 2	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	<b>45.936.000,00</b>	<b>45.423.631,00</b>	<b>(512.369,00)</b>
04.03 04.03.01F 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-
04.03 04.03.01F 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	45.936.000,00	45.423.631,00	(512.369,00)
04.03 04.03.01F 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-
04.03 04.03.01F 006 00 5 2	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>11.796.400,00</b>	<b>11.122.400,00</b>	<b>(674.000,00)</b>
04.03 04.03.01F 006 005 5 2	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD</b>	<b>11.796.400,00</b>	<b>11.122.400,00</b>	<b>(674.000,00)</b>
04.03 04.03.01F 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-
04.03 04.03.01F 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	11.796.400,00	11.122.400,00	(674.000,00)
04.03 04.03.01F 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-
04.03 04.03.01F 110 00 5 2	<b>Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan</b>	<b>566.959.590,00</b>	<b>510.280.905,16</b>	<b>(56.678.684,84)</b>
04.03 04.03.01F 110 001 5 2	<b>Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Setda</b>	<b>41.462.620,00</b>	<b>41.366.620,00</b>	<b>(96.000,00)</b>
04.03 04.03.01F 110 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-
04.03 04.03.01F 110 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	41.462.620,00	41.366.620,00	(96.000,00)
04.03 04.03.01F 110 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)
04.03 04.03.01F 110 002 5 2	<b>Pengendalian Administrasi dan Pelaksanaan Kegiatan</b>	<b>249.125.060,00</b>	<b>194.987.389,00</b>	<b>(54.137.671,00)</b>
04.03 04.03.01F 110 002 5 2 1	Belanja Pegawai	14.700.000,00	14.700.000,00	-
04.03 04.03.01F 110 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	234.425.060,00	180.287.389,00	(54.137.671,00)
04.03 04.03.01F 110 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-
04.03 04.03.01F 110 003 5 2	<b>Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan</b>	<b>276.371.910,00</b>	<b>273.926.896,16</b>	<b>(2.445.013,84)</b>
04.03 04.03.01F 110 003 5 2 1	Belanja Pegawai	4.750.000,00	4.750.000,00	-
04.03 04.03.01F 110 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	221.621.910,00	219.456.896,16	(2.165.013,84)
04.03 04.03.01F 110 003 5 2 3	Belanja Modal	50.000.000,00	49.720.000,00	(280.000,00)
	<b>JUMLAH PENDAPATAN :</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>JUMLAH BELANJA:</b>	<b>1.734.593.675,00</b>	<b>1.607.238.438,16</b>	<b>(127.355.236,84)</b>
	<b>SURPLUS/(DEFISIT) :</b>	<b>(1.734.593.675,00)</b>	<b>(1.607.238.438,16)</b>	<b>127.355.236,84</b>



**DASAR  
HUKUM**




URUSAN : 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  
 MACAM URUSAN : 04.03 - SEKRETARIAT DAERAH  
 ORGANISASI : 04.03.01G - BAGIAN ORGANISASI

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
04.03.04.03.01G 00 00 4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	-	-	-	
04.03.04.03.01G 00 00 5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>3.437.015.993,00</b>	<b>3.256.084.698,72</b>	<b>(180.931.294,28)</b>	
04.03.04.03.01G 00 00 5 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1.195.013.993,00</b>	<b>1.117.510.476,00</b>	<b>(77.503.517,00)</b>	
04.03.04.03.01G 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	1.195.013.993,00	1.117.510.476,00	(77.503.517,00)	
04.03.04.03.01G 00 00 5 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>2.242.002.000,00</b>	<b>2.138.574.222,72</b>	<b>(103.427.777,28)</b>	
04.03.04.03.01G 001 00 5 2	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>649.355.000,00</b>	<b>628.016.396,72</b>	<b>(21.338.603,28)</b>	
04.03.04.03.01G 001 018 5 2	<b>Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi</b>	<b>222.310.000,00</b>	<b>221.521.804,00</b>	<b>(788.196,00)</b>	
04.03.04.03.01G 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03.04.03.01G 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	222.310.000,00	221.521.804,00	(788.196,00)	
04.03.04.03.01G 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03.04.03.01G 001 019 5 2	<b>Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>427.045.000,00</b>	<b>406.494.592,72</b>	<b>(20.550.407,28)</b>	
04.03.04.03.01G 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	95.956.448,00	90.247.318,72	(5.709.129,28)	
04.03.04.03.01G 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	157.038.552,00	143.997.274,00	(13.041.278,00)	
04.03.04.03.01G 001 019 5 2 3	Belanja Modal	174.050.000,00	172.250.000,00	(1.800.000,00)	
04.03.04.03.01G 002 00 5 2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>144.300.000,00</b>	<b>131.448.750,00</b>	<b>(12.851.250,00)</b>	
04.03.04.03.01G 002 022 5 2	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor</b>	<b>101.000.000,00</b>	<b>100.989.000,00</b>	<b>(11.000,00)</b>	
04.03.04.03.01G 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03.04.03.01G 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	
04.03.04.03.01G 002 022 5 2 3	Belanja Modal	101.000.000,00	100.989.000,00	(11.000,00)	
04.03.04.03.01G 002 024 5 2	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	<b>43.300.000,00</b>	<b>30.459.750,00</b>	<b>(12.840.250,00)</b>	
04.03.04.03.01G 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03.04.03.01G 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	43.300.000,00	30.459.750,00	(12.840.250,00)	
04.03.04.03.01G 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03.04.03.01G 005	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>24.500.000,00</b>	<b>24.500.000,00</b>	-	
04.03.04.03.01G 005 006	<b>Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur</b>	<b>24.500.000,00</b>	<b>24.500.000,00</b>	-	
04.03.04.03.01G 005 006 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03.04.03.01G 005 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	24.500.000,00	24.500.000,00	-	
04.03.04.03.01G 005 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03.04.03.01G 006 00 5 2	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>3.240.000,00</b>	<b>2.313.980,00</b>	<b>(926.020,00)</b>	
04.03.04.03.01G 006 005 5 2	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD</b>	<b>3.240.000,00</b>	<b>2.313.980,00</b>	<b>(926.020,00)</b>	
04.03.04.03.01G 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03.04.03.01G 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	3.240.000,00	2.313.980,00	(926.020,00)	
04.03.04.03.01G 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
04.03 04.03.01G 111 00 5 2	<b>Progam Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.420.607.000,00</b>	<b>1.352.295.096,00</b>	<b>(68.311.904,00)</b>	
04.03 04.03.01G 111 001 5 2	<b>Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur</b>	<b>419.617.000,00</b>	<b>396.410.240,00</b>	<b>(23.206.760,00)</b>	
04.03 04.03.01G 111 001 5 2 1	Belanja Pegawai	82.500.000,00	82.500.000,00	-	
04.03 04.03.01G 111 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	133.277.000,00	113.530.240,00	(19.746.760,00)	
04.03 04.03.01G 111 001 5 2 3	Belanja Modal	203.840.000,00	200.380.000,00	(3.460.000,00)	
04.03 04.03.01G 111 002 5 2	<b>Pemantapan Pelayanan Publik</b>	<b>700.868.135,00</b>	<b>658.896.736,00</b>	<b>(41.971.399,00)</b>	
04.03 04.03.01G 111 002 5 2 1	Belanja Pegawai	92.400.000,00	92.400.000,00	-	
04.03 04.03.01G 111 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	608.468.135,00	566.496.736,00	(41.971.399,00)	
04.03 04.03.01G 111 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01G 111 003 5 2	<b>Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi</b>	<b>300.121.865,00</b>	<b>296.988.120,00</b>	<b>(3.133.745,00)</b>	
04.03 04.03.01G 111 003 5 2 1	Belanja Pegawai	81.000.000,00	81.000.000,00	-	
04.03 04.03.01G 111 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	117.681.865,00	114.818.120,00	(2.863.745,00)	
04.03 04.03.01G 111 003 5 2 3	Belanja Modal	101.440.000,00	101.170.000,00	(270.000,00)	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN :</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>JUMLAH BELANJA:</b>	<b>3.437.015.993,00</b>	<b>3.256.084.698,72</b>	<b>(180.931.294,28)</b>	
	<b>SURPLUS/(DEFISIT) :</b>	<b>(3.437.015.993,00)</b>	<b>(3.256.084.698,72)</b>	<b>180.931.294,28</b>	

URUSAN : 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  
 MACAM URUSAN : 04.03 - SEKRETARIAT DAERAH  
 ORGANISASI : 04.03.01G - BAGIAN LAYANAN PENGADAAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
04.03 04.03.01G 00 00 4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	-	-	-	
04.03 04.03.01G 00 00 5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>3.166.329.143,00</b>	<b>2.988.979.880,38</b>	<b>(177.349.262,62)</b>	
04.03 04.03.01G 00 00 5 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1.453.848.143,00</b>	<b>1.397.169.285,00</b>	<b>(56.678.858,00)</b>	
04.03 04.03.01G 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	1.453.848.143,00	1.397.169.285,00	(56.678.858,00)	
04.03 04.03.01G 00 00 5 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1.712.481.000,00</b>	<b>1.591.810.595,38</b>	<b>(120.670.404,62)</b>	
04.03 04.03.01G 001 00 5 2	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>791.969.000,00</b>	<b>746.950.550,86</b>	<b>(45.018.449,14)</b>	
04.03 04.03.01G 001 018 5 2	<b>Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi</b>	<b>189.896.000,00</b>	<b>175.253.692,86</b>	<b>(14.642.307,14)</b>	
04.03 04.03.01G 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01G 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	189.896.000,00	175.253.692,86	(14.642.307,14)	
04.03 04.03.01G 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01G 001 019 5 2	<b>Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>602.073.000,00</b>	<b>571.696.858,00</b>	<b>(30.376.142,00)</b>	
04.03 04.03.01G 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	150.090.044,00	147.453.296,00	(2.636.748,00)	
04.03 04.03.01G 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	225.992.956,00	202.300.942,00	(23.692.014,00)	
04.03 04.03.01G 001 019 5 2 3	Belanja Modal	225.990.000,00	221.942.620,00	(4.047.380,00)	
04.03 04.03.01G 002 00 5 2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>204.260.000,00</b>	<b>182.231.438,00</b>	<b>(22.028.562,00)</b>	
04.03 04.03.01G 002 022 5 2	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor</b>	<b>154.500.000,00</b>	<b>152.862.000,00</b>	<b>(1.638.000,00)</b>	
04.03 04.03.01G 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01G 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	
04.03 04.03.01G 002 022 5 2 3	Belanja Modal	154.500.000,00	152.862.000,00	(1.638.000,00)	
04.03 04.03.01G 002 024 5 2	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	<b>49.760.000,00</b>	<b>29.369.438,00</b>	<b>(20.390.562,00)</b>	
04.03 04.03.01G 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01G 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	49.760.000,00	29.369.438,00	(20.390.562,00)	
04.03 04.03.01G 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01G 006 00 5 2	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>8.850.000,00</b>	<b>6.340.450,00</b>	<b>(2.509.550,00)</b>	
04.03 04.03.01G 006 005 5 2	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD</b>	<b>8.850.000,00</b>	<b>6.340.450,00</b>	<b>(2.509.550,00)</b>	
04.03 04.03.01G 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01G 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	8.850.000,00	6.340.450,00	(2.509.550,00)	
04.03 04.03.01G 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.10 04.03.01G 112 00 5 2	<b>Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa</b>	<b>707.402.000,00</b>	<b>656.288.156,52</b>	<b>(51.113.843,48)</b>	
02.10 04.03.01G 112 001 5 2	<b>Pengelolaan Sistem Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa</b>	<b>142.116.000,00</b>	<b>128.425.677,76</b>	<b>(13.690.322,24)</b>	
02.10 04.03.01G 112 001 5 2 1	Belanja Pegawai	5.775.000,00	5.225.000,00	(550.000,00)	
02.10 04.03.01G 112 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	136.341.000,00	123.200.677,76	(13.140.322,24)	
02.10 04.03.01G 112 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.10 04.03.01G 112 002 5 2	<b>Operasional Pengadaan Barang/Jasa</b>	<b>277.518.000,00</b>	<b>273.259.245,60</b>	<b>(4.258.754,40)</b>	
02.10 04.03.01G 112 002 5 2 1	Belanja Pegawai	5.775.000,00	5.775.000,00	-	
02.10 04.03.01G 112 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	271.743.000,00	267.484.245,60	(4.258.754,40)	
02.10 04.03.01G 112 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.10 04.03.01G 112 003 5 2	<b>Pengelolaan SDM dan Advokasi Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa</b>	<b>287.768.000,00</b>	<b>254.603.233,16</b>	<b>(33.164.766,84)</b>	
02.10 04.03.01G 112 003 5 2 1	Belanja Pegawai	5.775.000,00	5.775.000,00	-	
02.10 04.03.01G 112 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	281.993.000,00	248.828.233,16	(33.164.766,84)	
02.10 04.03.01G 112 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN :</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>JUMLAH BELANJA:</b>	<b>3.166.329.143,00</b>	<b>2.988.979.880,38</b>	<b>(177.349.262,62)</b>	
	<b>SURPLUS/(DEFISIT) :</b>	<b>(3.166.329.143,00)</b>	<b>(2.988.979.880,38)</b>	<b>177.349.262,62</b>	

URUSAN : 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  
 MACAM URUSAN : 04.04 - SEKRETARIAT DPRD  
 ORGANISASI : 04.04.01 - SEKRETARIAT DPRD

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
04.04 04.04.01 00 00 4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	-	-	-	
04.04 04.04.01 00 00 5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>60.029.999.226,00</b>	<b>43.329.174.359,67</b>	<b>(16.700.824.866,33)</b>	
04.04 04.04.01 00 00 5 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>22.745.882.926,00</b>	<b>22.013.597.359,00</b>	<b>(732.285.567,00)</b>	
04.04 04.04.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	22.745.882.926,00	22.013.597.359,00	(732.285.567,00)	
04.04 04.04.01 00 00	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>37.284.116.300,00</b>	<b>21.315.577.000,67</b>	<b>(15.968.539.299,33)</b>	
04.04 04.04.01 001	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>4.136.841.380,00</b>	<b>2.832.931.785,96</b>	<b>(1.303.909.594,04)</b>	
04.04 04.04.01 001 018	<b>Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi</b>	<b>1.258.934.381,00</b>	<b>919.316.102,96</b>	<b>(339.618.278,04)</b>	
04.04 04.04.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.04 04.04.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.258.934.381,00	919.316.102,96	(339.618.278,04)	
04.04 04.04.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.04 04.04.01 001 019	<b>Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>2.877.906.999,00</b>	<b>1.913.615.683,00</b>	<b>(964.291.316,00)</b>	
04.04 04.04.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	159.803.704,00	159.803.704,00	-	
04.04 04.04.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2.220.323.295,00	1.302.047.779,00	(918.275.516,00)	
04.04 04.04.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	497.780.000,00	451.764.200,00	(46.015.800,00)	
04.04 04.04.01 002	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>1.045.863.420,00</b>	<b>471.089.155,00</b>	<b>(574.774.265,00)</b>	
04.04 04.04.01 002 022	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor</b>	<b>359.000.000,00</b>	<b>297.961.000,00</b>	<b>(61.039.000,00)</b>	
04.04 04.04.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.04 04.04.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	359.000.000,00	297.961.000,00	(61.039.000,00)	
04.04 04.04.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.04 04.04.01 002 024	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	<b>686.863.420,00</b>	<b>173.128.155,00</b>	<b>(513.735.265,00)</b>	
04.04 04.04.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.04 04.04.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	686.863.420,00	173.128.155,00	(513.735.265,00)	
04.04 04.04.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.04 04.04.01 005	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>333.000.000,00</b>	<b>333.000.000,00</b>	-	
04.04 04.04.01 005 006	<b>Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur</b>	<b>333.000.000,00</b>	<b>333.000.000,00</b>	-	
04.04 04.04.01 005 006 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.04 04.04.01 005 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	333.000.000,00	333.000.000,00	-	
04.04 04.04.01 005 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.04 04.04.01 006	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>18.127.000,00</b>	<b>18.126.900,00</b>	<b>(100,00)</b>	
04.04 04.04.01 006 005	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD</b>	<b>18.127.000,00</b>	<b>18.126.900,00</b>	<b>(100,00)</b>	
04.04 04.04.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.04 04.04.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	18.127.000,00	18.126.900,00	(100,00)	
04.04 04.04.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
04.04 04.04.01 113	<b>Program Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan</b>	<b>16.326.069.500,00</b>	<b>8.392.083.334,71</b>	<b>(7.933.986.165,29)</b>	
04.04 04.04.01 113 001	<b>Penyusunan Kajian Perundang-Undangan</b>	<b>200.775.000,00</b>	<b>27.205.375,00</b>	<b>(173.569.625,00)</b>	
04.04 04.04.01 113 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.04 04.04.01 113 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	193.275.000,00	20.090.000,00	(173.185.000,00)	
04.04 04.04.01 113 001 5 2 3	Belanja Modal	7.500.000,00	7.115.375,00	(384.625,00)	
04.04 04.04.01 113 002	<b>Penyelenggaraan Pembahasan Raperda/Keputusan DPRD/Peraturan DPRD</b>	<b>9.318.975.000,00</b>	<b>4.348.073.510,97</b>	<b>(4.970.901.489,03)</b>	
04.04 04.04.01 113 002 5 2 1	Belanja Pegawai	11.000.000,00	3.500.000,00	(7.500.000,00)	
04.04 04.04.01 113 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	9.307.975.000,00	4.344.573.510,97	(4.963.401.489,03)	
04.04 04.04.01 113 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.04 04.04.01 113 003	<b>Pelayanan Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD</b>	<b>6.806.319.500,00</b>	<b>4.016.804.448,74</b>	<b>(2.789.515.051,26)</b>	
04.04 04.04.01 113 003 5 2 1	Belanja Pegawai	5.200.000,00	-	(5.200.000,00)	
04.04 04.04.01 113 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	6.801.119.500,00	4.016.804.448,74	(2.784.315.051,26)	
04.04 04.04.01 113 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.04 04.04.01 114	<b>Program Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan</b>	<b>15.424.215.000,00</b>	<b>9.268.345.825,00</b>	<b>(6.155.869.175,00)</b>	
04.04 04.04.01 114 001	<b>Penyelenggaraan Pembahasan Penganggaran</b>	<b>2.751.900.000,00</b>	<b>1.518.835.816,00</b>	<b>(1.233.064.184,00)</b>	
04.04 04.04.01 114 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.04 04.04.01 114 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2.751.900.000,00	1.518.835.816,00	(1.233.064.184,00)	
04.04 04.04.01 114 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.04 04.04.01 114 002	<b>Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan DPRD</b>	<b>9.109.335.000,00</b>	<b>4.706.998.109,00</b>	<b>(4.402.336.891,00)</b>	
04.04 04.04.01 114 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.04 04.04.01 114 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	9.109.335.000,00	4.706.998.109,00	(4.402.336.891,00)	
04.04 04.04.01 114 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.04 04.04.01 114 003	<b>Pengembangan Kerjasama dan Penjaringan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>3.562.980.000,00</b>	<b>3.042.511.900,00</b>	<b>(520.468.100,00)</b>	
04.04 04.04.01 114 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.04 04.04.01 114 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	3.562.980.000,00	3.042.511.900,00	(520.468.100,00)	
04.04 04.04.01 114 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH :</b>	<b>60.029.999.226,00</b>	<b>43.329.174.359,67</b>	<b>(16.700.824.866,33)</b>	
	<b>SURPLUS/(DEFISIT) :</b>	<b>(60.029.999.226,00)</b>	<b>(43.329.174.359,67)</b>	<b>16.700.824.866,33</b>	

URUSAN : 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  
 MACAM URUSAN : 04.05 - INSPEKTORAT  
 ORGANISASI : 04.05.01 - INSPEKTORAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
04.05 04.05.01 00 00 4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	-	-	-	
04.05 04.05.01 00 00 5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>5.837.657.205,00</b>	<b>5.547.309.485,78</b>	<b>(290.347.719,22)</b>	
04.05 04.05.01 00 00 5 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>3.726.299.708,00</b>	<b>3.589.659.462,00</b>	<b>(136.640.246,00)</b>	
04.05 04.05.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	3.726.299.708,00	3.589.659.462,00	(136.640.246,00)	
04.05 04.05.01 00 00	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>2.111.357.497,00</b>	<b>1.957.650.023,78</b>	<b>(153.707.473,22)</b>	
04.05 04.05.01 001	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	<b>1.065.620.000,00</b>	<b>1.012.806.660,62</b>	<b>(52.813.339,38)</b>	
04.05 04.05.01 001 018	<b>Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi</b>	<b>368.182.000,00</b>	<b>367.087.038,00</b>	<b>(1.094.962,00)</b>	
04.05 04.05.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.05 04.05.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	368.182.000,00	367.087.038,00	(1.094.962,00)	
04.05 04.05.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.05 04.05.01 001 019	<b>Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>697.438.000,00</b>	<b>645.719.622,62</b>	<b>(51.718.377,38)</b>	
04.05 04.05.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	26.633.956,00	26.633.950,72	(5,28)	
04.05 04.05.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	375.139.044,00	354.786.012,90	(20.353.031,10)	
04.05 04.05.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	295.665.000,00	264.299.659,00	(31.365.341,00)	
04.05 04.05.01 002	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	<b>243.054.000,00</b>	<b>215.229.088,00</b>	<b>(27.824.912,00)</b>	
04.05 04.05.01 002 022	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor</b>	<b>133.000.000,00</b>	<b>115.454.000,00</b>	<b>(17.546.000,00)</b>	
04.05 04.05.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.05 04.05.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	68.000.000,00	64.203.000,00	(3.797.000,00)	
04.05 04.05.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	65.000.000,00	51.251.000,00	(13.749.000,00)	
04.05 04.05.01 002 024	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	<b>110.054.000,00</b>	<b>99.775.088,00</b>	<b>(10.278.912,00)</b>	
04.05 04.05.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.05 04.05.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	110.054.000,00	99.775.088,00	(10.278.912,00)	
04.05 04.05.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.05 04.05.01 005	<i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>	<b>121.220.000,00</b>	<b>119.887.000,00</b>	<b>(1.333.000,00)</b>	
04.05 04.05.01 005 006	<b>Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur</b>	<b>121.220.000,00</b>	<b>119.887.000,00</b>	<b>(1.333.000,00)</b>	
04.05 04.05.01 005 006 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.05 04.05.01 005 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	121.220.000,00	119.887.000,00	(1.333.000,00)	
04.05 04.05.01 005 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.05 04.05.01 006	<i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>	<b>7.624.000,00</b>	<b>7.570.240,00</b>	<b>(53.760,00)</b>	
04.05 04.05.01 006 005	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD</b>	<b>7.624.000,00</b>	<b>7.570.240,00</b>	<b>(53.760,00)</b>	
04.05 04.05.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.05 04.05.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	7.624.000,00	7.570.240,00	(53.760,00)	
04.05 04.05.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
04.05 04.05.01 115	<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Aparatur</b>	<b>449.770.000,00</b>	<b>383.251.066,00</b>	<b>(66.518.934,00)</b>	
04.05 04.05.01 115 001	<b>Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur</b>	<b>37.622.000,00</b>	<b>31.483.320,00</b>	<b>(6.138.680,00)</b>	
04.05 04.05.01 115 001 5 2 1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	1.700.000,00	-	
04.05 04.05.01 115 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	35.922.000,00	29.783.320,00	(6.138.680,00)	
04.05 04.05.01 115 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.05 04.05.01 115 002	<b>Pembinaan Kepatuhan Aparatur</b>	<b>412.148.000,00</b>	<b>351.767.746,00</b>	<b>(60.380.254,00)</b>	
04.05 04.05.01 115 002 5 2 1	Belanja Pegawai	125.300.000,00	123.150.000,00	(2.150.000,00)	
04.05 04.05.01 115 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	286.848.000,00	228.617.746,00	(58.230.254,00)	
04.05 04.05.01 115 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.05 04.05.01 116	<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset</b>	<b>50.788.000,00</b>	<b>49.955.648,00</b>	<b>(832.352,00)</b>	
04.05 04.05.01 116 001	<b>Pengawasan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset</b>	<b>31.100.000,00</b>	<b>30.494.848,00</b>	<b>(605.152,00)</b>	
04.05 04.05.01 116 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.05 04.05.01 116 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	31.100.000,00	30.494.848,00	(605.152,00)	
04.05 04.05.01 116 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.05 04.05.01 116 002	<b>Review Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Keuangan</b>	<b>19.688.000,00</b>	<b>19.460.800,00</b>	<b>(227.200,00)</b>	
04.05 04.05.01 116 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.05 04.05.01 116 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	19.688.000,00	19.460.800,00	(227.200,00)	
04.05 04.05.01 116 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.05 04.05.01 117	<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pembangunan Fisik</b>	<b>41.240.000,00</b>	<b>38.862.225,00</b>	<b>(2.377.775,00)</b>	
04.05 04.05.01 117 001	<b>Pengawasan Bidang Pembangunan Fisik</b>	<b>33.860.000,00</b>	<b>31.593.025,00</b>	<b>(2.266.975,00)</b>	
04.05 04.05.01 117 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.05 04.05.01 117 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	33.860.000,00	31.593.025,00	(2.266.975,00)	
04.05 04.05.01 117 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.05 04.05.01 117 002	<b>Review Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>7.380.000,00</b>	<b>7.269.200,00</b>	<b>(110.800,00)</b>	
04.05 04.05.01 117 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.05 04.05.01 117 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	7.380.000,00	7.269.200,00	(110.800,00)	
04.05 04.05.01 117 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.05 04.05.01 118	<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya</b>	<b>44.259.000,00</b>	<b>42.564.100,00</b>	<b>(1.694.900,00)</b>	
04.05 04.05.01 118 001	<b>Pengawasan Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya</b>	<b>23.864.000,00</b>	<b>23.248.100,00</b>	<b>(615.900,00)</b>	
04.05 04.05.01 118 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.05 04.05.01 118 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	23.864.000,00	23.248.100,00	(615.900,00)	
04.05 04.05.01 118 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.05 04.05.01 118 002	<b>Review Dokumen Akuntabilitas Kinerja</b>	<b>20.395.000,00</b>	<b>19.316.000,00</b>	<b>(1.079.000,00)</b>	
04.05 04.05.01 118 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.05 04.05.01 118 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	20.395.000,00	19.316.000,00	(1.079.000,00)	
04.05 04.05.01 118 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.05 04.05.01 128	<b>Program Peningkatan dan Evaluasi Pengawasan</b>	<b>87.782.497,00</b>	<b>87.523.996,16</b>	<b>(258.500,84)</b>	
04.05 04.05.01 128 001	<b>Penyusunan Kebijakan dan Evaluasi Hasil Pengawasan</b>	<b>87.782.497,00</b>	<b>87.523.996,16</b>	<b>(258.500,84)</b>	
04.05 04.05.01 128 001 5 2 1	Belanja Pegawai	7.600.000,00	7.600.000,00	-	
04.05 04.05.01 128 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	80.182.497,00	79.923.996,16	(258.500,84)	
04.05 04.05.01 128 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH :</b>	<b>5.837.657.205,00</b>	<b>5.547.309.485,78</b>	<b>(290.347.719,22)</b>	
	<b>SURPLUS/(DEFISIT) :</b>	<b>(5.837.657.205,00)</b>	<b>(5.547.309.485,78)</b>	<b>290.347.719,22</b>	



URUSAN : 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  
 MACAM URUSAN : 04.06 - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
 ORGANISASI : 04.06.01 - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
04.06 04.06.01 00 00 4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	-	-	-	
04.06 04.06.01 00 00 5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>178.865.929.093,00</b>	<b>166.118.610.078,04</b>	<b>(12.747.319.014,96)</b>	
04.06 04.06.01 00 00 5 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>167.611.407.093,00</b>	<b>156.565.277.956,00</b>	<b>(11.046.129.137,00)</b>	
04.06 04.06.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	167.611.407.093,00	156.565.277.956,00	(11.046.129.137,00)	
04.06 04.06.01 00 00	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>11.254.522.000,00</b>	<b>9.553.332.122,04</b>	<b>(1.701.189.877,96)</b>	
04.06 04.06.01 001	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.109.358.300,00</b>	<b>1.055.363.160,04</b>	<b>(53.995.139,96)</b>	
04.06 04.06.01 001 018	<b>Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi</b>	<b>278.655.000,00</b>	<b>273.677.585,00</b>	<b>(4.977.415,00)</b>	
04.06 04.06.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.06 04.06.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	278.655.000,00	273.677.585,00	(4.977.415,00)	
04.06 04.06.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.06 04.06.01 001 019	<b>Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>830.703.300,00</b>	<b>781.685.575,04</b>	<b>(49.017.724,96)</b>	
04.06 04.06.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	150.215.564,00	143.515.223,04	(6.700.340,96)	
04.06 04.06.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	431.805.134,00	393.829.602,00	(37.975.532,00)	
04.06 04.06.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	248.682.602,00	244.340.750,00	(4.341.852,00)	
04.06 04.06.01 002	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>319.011.500,00</b>	<b>299.896.246,00</b>	<b>(19.115.254,00)</b>	
04.06 04.06.01 002 022	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor</b>	<b>198.632.000,00</b>	<b>196.311.000,00</b>	<b>(2.321.000,00)</b>	
04.06 04.06.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.06 04.06.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	
04.06 04.06.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	198.632.000,00	196.311.000,00	(2.321.000,00)	
04.06 04.06.01 002 024	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	<b>120.379.500,00</b>	<b>103.585.246,00</b>	<b>(16.794.254,00)</b>	
04.06 04.06.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.06 04.06.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	120.379.500,00	103.585.246,00	(16.794.254,00)	
04.06 04.06.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.06 04.06.01 005	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>27.933.000,00</b>	<b>27.098.000,00</b>	<b>(835.000,00)</b>	
04.06 04.06.01 005 006	<b>Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur</b>	<b>27.933.000,00</b>	<b>27.098.000,00</b>	<b>(835.000,00)</b>	
04.06 04.06.01 005 006 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.06 04.06.01 005 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	27.933.000,00	27.098.000,00	(835.000,00)	
04.06 04.06.01 005 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.06 04.06.01 006	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>5.036.000,00</b>	<b>5.031.000,00</b>	<b>(5.000,00)</b>	
04.06 04.06.01 006 005	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD</b>	<b>5.036.000,00</b>	<b>5.031.000,00</b>	<b>(5.000,00)</b>	
04.06 04.06.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.06 04.06.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	5.036.000,00	5.031.000,00	(5.000,00)	
04.06 04.06.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
04.06 04.06.01 119	<b>Program Pengembangan Karier Aparatur Sipil Negara</b>	<b>2.071.702.000,00</b>	<b>835.233.099,00</b>	<b>(1.236.468.901,00)</b>	
04.06 04.06.01 119 001	<b>Penataan dan Rekrutmen Aparatur Sipil Negara</b>	<b>1.246.312.000,00</b>	<b>132.947.119,00</b>	<b>(1.113.364.881,00)</b>	
04.06 04.06.01 119 001 5 2 1	Belanja Pegawai	117.955.000,00	20.150.000,00	(97.805.000,00)	
04.06 04.06.01 119 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.128.357.000,00	112.797.119,00	(1.015.559.881,00)	
04.06 04.06.01 119 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.06 04.06.01 119 002	<b>Pengembangan Karier ASN</b>	<b>670.660.000,00</b>	<b>547.650.240,00</b>	<b>(123.009.760,00)</b>	
04.06 04.06.01 119 002 5 2 1	Belanja Pegawai	268.300.000,00	203.300.000,00	(65.000.000,00)	
04.06 04.06.01 119 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	402.360.000,00	344.350.240,00	(58.009.760,00)	
04.06 04.06.01 119 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.06 04.06.01 119 003	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian</b>	<b>22.330.000,00</b>	<b>22.323.740,00</b>	<b>(6.260,00)</b>	
04.06 04.06.01 119 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.06 04.06.01 119 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	22.330.000,00	22.323.740,00	(6.260,00)	
04.06 04.06.01 119 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.06 04.06.01 119 004	<b>Operasional Assesment Centre</b>	<b>132.400.000,00</b>	<b>132.312.000,00</b>	<b>(88.000,00)</b>	
04.06 04.06.01 119 004 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.06 04.06.01 119 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	132.400.000,00	132.312.000,00	(88.000,00)	
04.06 04.06.01 119 004 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.06 04.06.01 120	<b>Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian</b>	<b>627.470.000,00</b>	<b>606.619.300,00</b>	<b>(20.850.700,00)</b>	
04.06 04.06.01 120 001	<b>Mutasi Data Kepegawaian</b>	<b>98.071.000,00</b>	<b>94.813.300,00</b>	<b>(3.257.700,00)</b>	
04.06 04.06.01 120 001 5 2 1	Belanja Pegawai	54.375.000,00	51.975.000,00	(2.400.000,00)	
04.06 04.06.01 120 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	43.696.000,00	42.838.300,00	(857.700,00)	
04.06 04.06.01 120 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.06 04.06.01 120 002	<b>Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai</b>	<b>274.099.000,00</b>	<b>258.375.500,00</b>	<b>(15.723.500,00)</b>	
04.06 04.06.01 120 002 5 2 1	Belanja Pegawai	54.375.000,00	54.375.000,00	-	
04.06 04.06.01 120 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	219.724.000,00	204.000.500,00	(15.723.500,00)	
04.06 04.06.01 120 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.06 04.06.01 120 003	<b>Penatausahaan Kepegawaian</b>	<b>255.300.000,00</b>	<b>253.430.500,00</b>	<b>(1.869.500,00)</b>	
04.06 04.06.01 120 003 5 2 1	Belanja Pegawai	98.450.000,00	98.450.000,00	-	
04.06 04.06.01 120 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	156.850.000,00	154.980.500,00	(1.869.500,00)	
04.06 04.06.01 120 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.06 04.06.01 121	<b>Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara</b>	<b>7.094.011.200,00</b>	<b>6.724.091.317,00</b>	<b>(369.919.883,00)</b>	
04.06 04.06.01 121 001	<b>Analisa Kebutuhan Diklat</b>	<b>138.997.200,00</b>	<b>120.769.900,00</b>	<b>(18.227.300,00)</b>	
04.06 04.06.01 121 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.06 04.06.01 121 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	138.997.200,00	120.769.900,00	(18.227.300,00)	
04.06 04.06.01 121 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.06 04.06.01 121 002	<b>Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan</b>	<b>6.563.850.000,00</b>	<b>6.255.431.117,00</b>	<b>(308.418.883,00)</b>	
04.06 04.06.01 121 002 5 2 1	Belanja Pegawai	11.000.000,00	10.400.000,00	(600.000,00)	
04.06 04.06.01 121 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	6.552.850.000,00	6.245.031.117,00	(307.818.883,00)	
04.06 04.06.01 121 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.06 04.06.01 121 003	<b>Pengendalian dan Pengembangan Diklat</b>	<b>391.164.000,00</b>	<b>347.890.300,00</b>	<b>(43.273.700,00)</b>	
04.06 04.06.01 121 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.06 04.06.01 121 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	391.164.000,00	347.890.300,00	(43.273.700,00)	
04.06 04.06.01 121 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH :</b>	<b>178.865.929.093,00</b>	<b>166.118.610.078,04</b>	<b>(12.747.319.014,96)</b>	
	<b>SURPLUS/(DEFISIT) :</b>	<b>(178.865.929.093,00)</b>	<b>(166.118.610.078,04)</b>	<b>12.747.319.014,96</b>	

URUSAN : 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  
 MACAM URUSAN : 04.07 - KEUANGAN  
 ORGANISASI : 04.07.01 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
04.07 04.07.01 00 00 4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>480.100.637.536,00</b>	<b>513.985.267.116,66</b>	<b>33.884.629.580,66</b>	
04.07 04.07.01 00 00 4 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>480.100.637.536,00</b>	<b>513.985.267.116,66</b>	<b>33.884.629.580,66</b>	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1	<b>Hasil Pajak Daerah</b>	<b>425.381.500.000,00</b>	<b>451.265.948.031,00</b>	<b>25.884.448.031,00</b>	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01	<b>Pajak Hotel</b>	<b>152.000.000.000,00</b>	<b>161.297.192.790,00</b>	<b>9.297.192.790,00</b>	1)PD No 1/2011
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 02	Hotel Bintang Lima	29.500.000.000,00	41.456.693.174,00	11.956.693.174,00	2)PD No 5/2018
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 03	Hotel Bintang Empat	26.300.000.000,00	36.355.926.399,00	10.055.926.399,00	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 04	Hotel Bintang Tiga	42.300.000.000,00	43.044.652.512,00	744.652.512,00	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 05	Hotel Bintang Dua	29.000.000.000,00	16.438.946.977,00	(12.561.053.023,00)	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 06	Hotel Bintang Satu	13.500.000.000,00	8.530.782.478,00	(4.969.217.522,00)	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 07	Hotel Melati Tiga	2.300.000.000,00	2.917.661.459,00	617.661.459,00	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 08	Hotel Melati Dua	1.800.000.000,00	1.692.529.032,00	(107.470.968,00)	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 09	Hotel Melati Satu	6.600.000.000,00	9.646.655.426,00	3.046.655.426,00	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Rumah Kos	700.000.000,00	1.213.345.333,00	513.345.333,00	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 02	<b>Pajak Restoran</b>	<b>53.000.000.000,00</b>	<b>63.237.228.654,00</b>	<b>10.237.228.654,00</b>	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 02 01	Restoran	52.950.000.000,00	63.164.465.780,00	10.214.465.780,00	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 02 03	Katering	50.000.000,00	72.762.874,00	22.762.874,00	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03	<b>Pajak Hiburan</b>	<b>12.500.000.000,00</b>	<b>12.702.230.080,00</b>	<b>202.230.080,00</b>	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 01	Tontonan Film/Bioskop	4.300.000.000,00	4.934.475.169,00	634.475.169,00	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari dan/atau Busana	180.000.000,00	186.872.200,00	6.872.200,00	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 05	Pameran	4.066.000.000,00	3.096.930.200,00	(969.069.800,00)	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 07	Karaoke	450.000.000,00	381.933.891,00	(68.066.109,00)	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 09	Permainan Bilyar dan Bowling	50.000.000,00	55.287.496,00	5.287.496,00	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 10	Pacuan kuda dan Balap Kendaraan Bermotor	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 11	Permainan Ketangkasan	1.100.000.000,00	941.978.826,00	(158.021.174,00)	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 12	Panti Pijat Massage, Refleksi dan Mandi Uap/Spa	1.100.000.000,00	1.500.032.933,00	400.032.933,00	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 13	Pertandingan Olah Raga	50.000.000,00	334.008.073,00	284.008.073,00	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 14	Pusat Kebugaran/Fitnes Centre	1.200.000.000,00	1.270.711.292,00	70.711.292,00	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04	<b>Pajak Reklame</b>	<b>7.200.000.000,00</b>	<b>7.449.951.971,00</b>	<b>249.951.971,00</b>	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 01	Reklame Papan/Bilboard/Videotron/Megatron	6.673.950.000,00	6.619.927.369,00	(54.022.631,00)	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 02	Reklame Kain	250.000.000,00	689.606.416,00	439.606.416,00	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 03	Reklame Melekat/Stiker	50.000,00	-	(50.000,00)	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 05	Reklame Berjalan	50.000.000,00	110.880.462,00	60.880.462,00	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 06	Reklame Udara	5.000.000,00	1.743.750,00	(3.256.250,00)	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 11	Reklame Baliho	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 12	Reklame Cahaya	220.000.000,00	27.793.974,00	(192.206.026,00)	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 05	<b>Pajak Penerangan Jalan</b>	<b>51.000.000.000,00</b>	<b>52.374.696.494,00</b>	<b>1.374.696.494,00</b>	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 05 01	Pajak Penerangan Jalan PLN	51.000.000.000,00	52.374.696.494,00	1.374.696.494,00	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 07	<b>Pajak Parkir</b>	<b>3.675.000.000,00</b>	<b>3.050.479.181,00</b>	<b>(624.520.819,00)</b>	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 07 01	Pajak Parkir	3.675.000.000,00	3.050.479.181,00	(624.520.819,00)	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 08	<b>Pajak Air Tanah</b>	<b>2.500.000.000,00</b>	<b>2.546.299.969,00</b>	<b>46.299.969,00</b>	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 08 01	Pajak Air Tanah	2.500.000.000,00	2.546.299.969,00	46.299.969,00	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 09	<b>Pajak Sarang Burung Walet</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>6.650.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 09 01	Pajak Sarang Burung Walet	6.500.000,00	6.650.000,00	150.000,00	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 12	<b>Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan</b>	<b>82.500.000.000,00</b>	<b>86.550.328.189,00</b>	<b>4.050.328.189,00</b>	3)PD No 2/2011
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 12 01	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	82.500.000.000,00	86.550.328.189,00	4.050.328.189,00	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 13	<b>Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan</b>	<b>61.000.000.000,00</b>	<b>62.050.890.703,00</b>	<b>1.050.890.703,00</b>	4)PD No 8/2010
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 13 01	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	61.000.000.000,00	62.050.890.703,00	1.050.890.703,00	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
04.07 04.07.01 00 00 4 1 3	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan</b>	<b>28.935.929.644,00</b>	<b>28.975.003.950,01</b>	<b>39.074.306,01</b>	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 01	<b>Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD</b>	<b>28.935.929.644,00</b>	<b>28.975.003.950,01</b>	<b>39.074.306,01</b>	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 01 01	PD Air Minum Tirtamarta.	802.301.740,00	802.301.741,50	1,50	5)PD No 14/2012
04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 01 02	PD. BPR Bank Jogja	9.754.106.355,00	9.754.106.355,00	-	6)PD No 5/2015
04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 01 03	PT, Bank Pembangunan Daerah DIY	18.340.935.744,00	18.340.935.744,08	0,08	7)PD DIY No 1/2016
04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 01 04	Penerimaan Bagi Hasil Laba BUKP	18.071.737,00	57.146.041,43	39.074.304,43	8)Keputusan Gubernur No 71/KEP/2017
04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 01 05	PD. Jogjatama Visessa	20.514.068,00	20.514.068,00	-	9)Perwal No 68/2012
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah</b>	<b>25.783.207.892,00</b>	<b>33.744.315.135,65</b>	<b>7.961.107.243,65</b>	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 01	<b>Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan</b>	<b>563.260.000,00</b>	<b>1.102.674.651,00</b>	<b>539.414.651,00</b>	10)Permendagri
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 01 02	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	22.000.000,00	6.524.600,00	(15.475.400,00)	No 19/2016
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 01 05	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	65.500.000,00	149.429.114,00	83.929.114,00	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 01 06	Penjualan Kendaraan Dinas Empat	109.250.000,00	378.794.887,00	269.544.887,00	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 01 10	Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan	366.510.000,00	567.926.050,00	201.416.050,00	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 02	<b>Jasa Giro</b>	<b>2.070.000.000,00</b>	<b>3.044.745.330,00</b>	<b>974.745.330,00</b>	11)PP No 39/2007
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 02 01	Jasa Giro Kas Daerah	2.000.000.000,00	2.841.386.980,00	841.386.980,00	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 02 02	Jasa Giro Pemegang Kas	70.000.000,00	203.358.350,00	133.358.350,00	
<b>04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 03</b>	<b>Pendapatan Bunga Deposito</b>	<b>17.000.000.000,00</b>	<b>17.190.898.900,68</b>	<b>190.898.900,68</b>	11)PP No 39/2007
<b>04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 04</b>	<b>Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah</b>	<b>400.000,00</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	
<b>04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 06</b>	<b>Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan</b>	<b>-</b>	<b>444.576.214,65</b>	<b>444.576.214,65</b>	
<b>04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 07</b>	<b>Pendapatan Denda Pajak</b>	<b>741.323.609,00</b>	<b>2.856.472.125,00</b>	<b>2.115.148.516,00</b>	
<b>04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 10</b>	<b>Pendapatan dari Pengembalian</b>	<b>3.905.272.181,00</b>	<b>4.942.923.617,32</b>	<b>1.037.651.436,32</b>	
<b>04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 15</b>	<b>Pendapatan dari Barang Milik Daerah</b>	<b>828.836.222,00</b>	<b>1.536.251.800,00</b>	<b>707.415.578,00</b>	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 15 02	Sewa Gedung	580.836.222,00	1.292.361.800,00	711.525.578,00	12)Perwal No 31/2006
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 15 03	Pengelolaan Wisma Ngestilaras	23.000.000,00	5.000.000,00	(18.000.000,00)	13)Perwal No 47/2010
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 15 04	Pengelolaan Reksa Arcade	225.000.000,00	238.890.000,00	13.890.000,00	13)Perwal No 47/2010
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 15 05	Penerimaan dari Pihak Ketiga yang bukan Perusda	-	-	-	13)Perwal No 47/2010
<b>04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 23</b>	<b>Denda Hasil Operasi Yustisi</b>	<b>28.120.000,00</b>	<b>129.384.000,00</b>	<b>101.264.000,00</b>	
<b>04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 27</b>	<b>Jaminan Bongkar</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>368.843.986,00</b>	<b>268.843.986,00</b>	14)PD No 2/2015
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 27 01	Penerimaan Jaminan Biaya Bongkar Penyelenggaraan Reklame	100.000.000,00	368.843.986,00	268.843.986,00	15)Perwal No 20/2012
<b>04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 31</b>	<b>Pendapatan Bunga Pajak</b>	<b>545.995.880,00</b>	<b>2.126.474.511,00</b>	<b>1.580.478.631,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
04.07 04.07.01 00 00 5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>52.247.296.207,00</b>	<b>48.857.303.429,87</b>	<b>(3.389.992.777,13)</b>	
04.07 04.07.01 00 00 5 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>26.915.602.207,00</b>	<b>25.141.962.230,00</b>	<b>(1.773.639.977,00)</b>	
04.07 04.07.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	26.915.602.207,00	25.141.962.230,00	(1.773.639.977,00)	
04.07 04.07.01 00 00	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>25.331.694.000,00</b>	<b>23.715.341.199,87</b>	<b>(1.616.352.800,13)</b>	
04.07 04.07.01 001	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>7.270.330.931,00</b>	<b>6.752.121.276,52</b>	<b>(518.209.654,48)</b>	
04.07 04.07.01 001 018	<b>Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi</b>	<b>175.525.000,00</b>	<b>175.433.028,00</b>	<b>(91.972,00)</b>	
04.07 04.07.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.07 04.07.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	175.525.000,00	175.433.028,00	(91.972,00)	
04.07 04.07.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.07 04.07.01 001 019	<b>Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>7.094.805.931,00</b>	<b>6.576.688.248,52</b>	<b>(518.117.682,48)</b>	
04.07 04.07.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	136.539.387,00	136.539.386,88	(0,12)	
04.07 04.07.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	6.545.104.719,00	6.043.763.861,64	(501.340.857,36)	
04.07 04.07.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	413.161.825,00	396.385.000,00	(16.776.825,00)	
04.07 04.07.01 002	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>415.878.269,00</b>	<b>355.470.187,16</b>	<b>(60.408.081,84)</b>	
04.07 04.07.01 002 022	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor</b>	<b>159.000.000,00</b>	<b>154.858.000,00</b>	<b>(4.142.000,00)</b>	
04.07 04.07.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.07 04.07.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	
04.07 04.07.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	158.000.000,00	153.858.000,00	(4.142.000,00)	
04.07 04.07.01 002 024	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	<b>256.878.269,00</b>	<b>200.612.187,16</b>	<b>(56.266.081,84)</b>	
04.07 04.07.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.07 04.07.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	256.878.269,00	200.612.187,16	(56.266.081,84)	
04.07 04.07.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.07 04.07.01 005	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>69.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>(9.000.000,00)</b>	
04.07 04.07.01 005 006	<b>Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur</b>	<b>69.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>(9.000.000,00)</b>	
04.07 04.07.01 005 006 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.07 04.07.01 005 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	69.000.000,00	60.000.000,00	(9.000.000,00)	
04.07 04.07.01 005 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.07 04.07.01 006	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>12.825.000,00</b>	<b>12.816.950,00</b>	<b>(8.050,00)</b>	
04.07 04.07.01 006 005	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD</b>	<b>12.825.000,00</b>	<b>12.816.950,00</b>	<b>(8.050,00)</b>	
04.07 04.07.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.07 04.07.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	12.825.000,00	12.816.950,00	(8.050,00)	
04.07 04.07.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.07 04.07.01 122	<b>Program Perencanaan dan Pengendalian Anggaran</b>	<b>137.724.493,00</b>	<b>133.848.192,16</b>	<b>(3.876.300,84)</b>	
04.07 04.07.01 122 001	<b>Perencanaan Anggaran</b>	<b>109.274.493,00</b>	<b>106.710.992,16</b>	<b>(2.563.500,84)</b>	
04.07 04.07.01 122 001 5 2 1	Belanja Pegawai	6.175.000,00	6.175.000,00	-	
04.07 04.07.01 122 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	103.099.493,00	100.535.992,16	(2.563.500,84)	
04.07 04.07.01 122 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
04.07 04.07.01 122 002	<b>Pengendalian Anggaran</b>	<b>28.450.000,00</b>	<b>27.137.200,00</b>	<b>(1.312.800,00)</b>	
04.07 04.07.01 122 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.07 04.07.01 122 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	28.450.000,00	27.137.200,00	(1.312.800,00)	
04.07 04.07.01 122 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.07 04.07.01 123	<b>Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Transfer</b>	<b>56.716.000,00</b>	<b>53.757.400,00</b>	<b>(2.958.600,00)</b>	
04.07 04.07.01 123 001	<b>Pengendalian Anggaran Belanja Daerah</b>	<b>44.407.000,00</b>	<b>42.001.400,00</b>	<b>(2.405.600,00)</b>	
04.07 04.07.01 123 001 5 2 1	Belanja Pegawai	10.450.000,00	9.850.000,00	(600.000,00)	
04.07 04.07.01 123 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	33.957.000,00	32.151.400,00	(1.805.600,00)	
04.07 04.07.01 123 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.07 04.07.01 123 002	<b>Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer</b>	<b>12.309.000,00</b>	<b>11.756.000,00</b>	<b>(553.000,00)</b>	
04.07 04.07.01 123 002 5 2 1	Belanja Pegawai	5.225.000,00	4.675.000,00	(550.000,00)	
04.07 04.07.01 123 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	7.084.000,00	7.081.000,00	(3.000,00)	
04.07 04.07.01 123 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.07 04.07.01 124	<b>Program Pengelolaan Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</b>	<b>857.996.000,00</b>	<b>778.581.516,00</b>	<b>(79.414.484,00)</b>	
04.07 04.07.01 124 001	<b>Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</b>	<b>322.324.000,00</b>	<b>298.250.516,00</b>	<b>(24.073.484,00)</b>	
04.07 04.07.01 124 001 5 2 1	Belanja Pegawai	35.700.000,00	35.700.000,00	-	
04.07 04.07.01 124 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	286.624.000,00	262.550.516,00	(24.073.484,00)	
04.07 04.07.01 124 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.07 04.07.01 124 002	<b>Pengelolaan Pembiayaan dan Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD</b>	<b>535.672.000,00</b>	<b>480.331.000,00</b>	<b>(55.341.000,00)</b>	
04.07 04.07.01 124 002 5 2 1	Belanja Pegawai	34.650.000,00	34.650.000,00	-	
04.07 04.07.01 124 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	101.022.000,00	74.420.000,00	(26.602.000,00)	
04.07 04.07.01 124 002 5 2 3	Belanja Modal	400.000.000,00	371.261.000,00	(28.739.000,00)	
04.07 04.07.01 125	<b>Program Pelayanan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah</b>	<b>707.732.489,00</b>	<b>705.567.918,16</b>	<b>(2.164.570,84)</b>	
04.07 04.07.01 125 001	<b>Pelayanan Pajak Daerah</b>	<b>287.869.796,00</b>	<b>287.865.295,00</b>	<b>(4.501,00)</b>	
04.07 04.07.01 125 001 5 2 1	Belanja Pegawai	12.825.000,00	12.825.000,00	-	
04.07 04.07.01 125 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	275.044.796,00	275.040.295,00	(4.501,00)	
04.07 04.07.01 125 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.07 04.07.01 125 002	<b>Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah</b>	<b>137.345.000,00</b>	<b>135.187.931,00</b>	<b>(2.157.069,00)</b>	
04.07 04.07.01 125 002 5 2 1	Belanja Pegawai	56.500.000,00	54.750.000,00	(1.750.000,00)	
04.07 04.07.01 125 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	80.845.000,00	80.437.931,00	(407.069,00)	
04.07 04.07.01 125 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.07 04.07.01 125 003	<b>Penetapan Pajak Daerah</b>	<b>282.517.693,00</b>	<b>282.514.692,16</b>	<b>(3.000,84)</b>	
04.07 04.07.01 125 003 5 2 1	Belanja Pegawai	188.672.000,00	188.672.000,00	-	
04.07 04.07.01 125 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	93.845.693,00	93.842.692,16	(3.000,84)	
04.07 04.07.01 125 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.07 04.07.01 126	<b>Program Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah</b>	<b>2.181.306.000,00</b>	<b>2.137.641.000,00</b>	<b>(43.665.000,00)</b>	
04.07 04.07.01 126 001	<b>Pengelolaan Penagihan, Keberatan dan Pembinaan Pajak Daerah</b>	<b>334.650.000,00</b>	<b>328.401.000,00</b>	<b>(6.249.000,00)</b>	
04.07 04.07.01 126 001 5 2 1	Belanja Pegawai	213.530.000,00	207.545.000,00	(5.985.000,00)	
04.07 04.07.01 126 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	121.120.000,00	120.856.000,00	(264.000,00)	
04.07 04.07.01 126 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.07 04.07.01 126 002	<b>Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah</b>	<b>1.846.656.000,00</b>	<b>1.809.240.000,00</b>	<b>(37.416.000,00)</b>	
04.07 04.07.01 126 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.07 04.07.01 126 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.846.656.000,00	1.809.240.000,00	(37.416.000,00)	
04.07 04.07.01 126 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
04.07 04.07.01 127	<b>Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Inventarisasi Aset</b>	<b>13.622.184.818,00</b>	<b>12.725.536.759,87</b>	<b>(896.648.058,13)</b>	
04.07 04.07.01 127 001	<b>Perencanaan, Pengadaan dan Distribusi Aset</b>	<b>10.714.911.500,00</b>	<b>10.376.192.162,40</b>	<b>(338.719.337,60)</b>	
04.07 04.07.01 127 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.07 04.07.01 127 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	320.711.500,00	299.305.360,00	(21.406.140,00)	
04.07 04.07.01 127 001 5 2 3	Belanja Modal	10.394.200.000,00	10.076.886.802,40	(317.313.197,60)	
04.07 04.07.01 127 002	<b>Pemanfaatan dan Optimalisasi Aset</b>	<b>2.523.015.493,00</b>	<b>2.217.637.905,31</b>	<b>(305.377.587,69)</b>	
04.07 04.07.01 127 002 5 2 1	Belanja Pegawai	2.925.000,00	2.925.000,00	-	
04.07 04.07.01 127 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2.520.090.493,00	2.214.712.905,31	(305.377.587,69)	
04.07 04.07.01 127 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.07 04.07.01 127 003	<b>Inventarisasi Aset dan Pengelolaan Barang Persediaan</b>	<b>384.257.825,00</b>	<b>131.706.692,16</b>	<b>(252.551.132,84)</b>	
04.07 04.07.01 127 003 5 2 1	Belanja Pegawai	11.825.000,00	3.750.000,00	(8.075.000,00)	
04.07 04.07.01 127 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	329.532.825,00	86.294.192,16	(243.238.632,84)	
04.07 04.07.01 127 003 5 2 3	Belanja Modal	42.900.000,00	41.662.500,00	(1.237.500,00)	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :</b>	<b>480.100.637.536,00</b>	<b>513.985.267.116,66</b>	<b>33.884.629.580,66</b>	
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH :</b>	<b>52.247.296.207,00</b>	<b>48.857.303.429,87</b>	<b>(3.389.992.777,13)</b>	
	<b>SURPLUS/DEFISIT :</b>	<b>427.853.341.329,00</b>	<b>465.127.963.686,79</b>	<b>37.274.622.357,79</b>	

URUSAN : 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  
URUSAN PEMERINTAHAN : 04.07 - KEUANGAN  
ORGANISASI : 04.07.01 - SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
04.07 04.07.01 00 00 4	<b>PENDAPATAN PPKD</b>	<b>1.101.756.549.757,00</b>	<b>1.076.710.692.983,00</b>	<b>(24.509.375.163,00)</b>	
04.07 04.07.01 00 00 4 2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>916.460.511.482,00</b>	<b>875.308.177.702,00</b>	<b>(40.615.852.169,00)</b>	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 1	<b>Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak</b>	<b>46.213.757.482,00</b>	<b>28.975.322.400,00</b>	<b>(17.238.435.082,00)</b>	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 01	<b>Bagi Hasil Pajak</b>	<b>43.688.080.000,00</b>	<b>27.070.845.600,00</b>	<b>(16.617.234.400,00)</b>	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 01 03	Bagi Hasil Dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	38.857.895.000,00	23.314.737.000,00	(15.543.158.000,00)	Informasi resmi Kementerian Keuangan
04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 01 05	Bagi Hasil PBB Pemerintah Pusat	4.830.185.000,00	3.756.108.600,00	(1.074.076.400,00)	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 02	<b>Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam</b>	<b>2.525.677.482,00</b>	<b>1.904.476.800,00</b>	<b>(621.200.682,00)</b>	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 02 02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	2.970.000,00	1.782.000,00	(1.188.000,00)	Informasi resmi
04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 02 07	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	983.593.000,00	590.155.800,00	(393.437.200,00)	Kementerian Keuangan
04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 02 11	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	1.539.114.482,00	1.312.539.000,00	(226.575.482,00)	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 2	<b>Dana Alokasi Umum</b>	<b>699.176.894.000,00</b>	<b>700.372.564.000,00</b>	<b>1.195.670.000,00</b>	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 2 01	Dana Alokasi Umum	699.176.894.000,00	700.372.564.000,00	1.195.670.000,00	Informasi resmi
04.07 04.07.01 00 00 4 2 2 01 01	Dana Alokasi Umum	699.176.894.000,00	700.372.564.000,00	1.195.670.000,00	Kementerian Keuangan
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3	<b>Dana Alokasi Khusus</b>	<b>171.069.860.000,00</b>	<b>145.960.291.302,00</b>	<b>(24.573.087.087,00)</b>	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01	<b>Dana Alokasi Khusus Fisik</b>	<b>59.145.559.000,00</b>	<b>49.435.128.281,00</b>	<b>(9.710.430.719,00)</b>	Informasi resmi
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 02	Pelayanan Rujukan	19.722.999.000,00	17.192.622.745,00	(2.530.376.255,00)	Kementerian Keuangan
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 03	Pelayanan Kefarmasian	880.270.000,00	879.491.267,00	(778.733,00)	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 04	Keluarga Berencana	460.000.000,00	407.900.000,00	(52.100.000,00)	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 08	Lingkungan Hidup	753.310.000,00	279.390.000,00	(473.920.000,00)	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 13	Pelayanan Kesehatan Dasar	4.265.880.000,00	4.011.013.033,00	(254.866.967,00)	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 15	Perumahan dan Permukiman	3.262.144.000,00	3.211.800.000,00	(50.344.000,00)	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 16	Infrastruktur Pemerintah Daerah (Jalan)	12.616.561.000,00	10.550.208.000,00	(2.066.353.000,00)	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 17	Bidang Pendidikan	3.030.541.000,00	2.511.579.488,00	(518.961.512,00)	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 18	Pengendalian Penyakit	523.650.000,00	482.054.000,00	(41.596.000,00)	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 19	Sanitasi	3.014.116.000,00	2.477.808.148,00	(536.307.852,00)	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 20	Jalan	10.616.088.000,00	7.431.261.600,00	(3.184.826.400,00)	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02	<b>Dana Alokasi Khusus Non Fisik</b>	<b>111.924.301.000,00</b>	<b>96.525.163.021,00</b>	<b>(14.862.656.368,00)</b>	Informasi resmi
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 01	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	11.052.600.000,00	6.538.805.819,00	(4.513.794.181,00)	Kementerian Keuangan
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 02	Tunjangan Profesi Guru PNSD	81.395.549.000,00	72.251.345.280,00	(9.144.203.720,00)	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 04	Bantuan Operasional Kesehatan	10.547.000.000,00	9.852.341.533,00	(694.658.467,00)	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 05	Akreditasi Rumah Sakit	510.000.000,00	-	(510.000.000,00)	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 06	Akreditasi Puskesmas	562.320.000,00	562.320.000,00	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 07	Jaminan Persalinan	499.000.000,00	499.000.000,00	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 08	Bantuan Operasional KB	1.718.240.000,00	1.213.769.008,00	(504.470.992,00)	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 09	Pelayanan Admnduk	1.305.254.000,00	1.273.243.381,00	(32.010.619,00)	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 10	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	3.041.300.000,00	3.041.300.000,00	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 11	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	380.000.000,00	380.000.000,00	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 12	Dana Pelayanan Kepariwisataaan	913.038.000,00	913.038.000,00	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>185.296.038.275,00</b>	<b>201.402.515.281,00</b>	<b>16.106.477.006,00</b>	
04.07 04.07.01 00 00 4 3 1	<b>Pendapatan Hibah</b>	<b>30.078.600.000,00</b>	<b>31.011.780.000,00</b>	<b>933.180.000,00</b>	
04.07 04.07.01 00 00 4 3 1 01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	-	1.254.000.000,00	1.254.000.000,00	
04.07 04.07.01 00 00 4 3 1 03	Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	200.000.000,00	200.000.000,00	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 3 1 06	Hibah Dana BOSN	29.878.600.000,00	29.557.780.000,00	(320.820.000,00)	
04.07 04.07.01 00 00 4 3 2	<b>Dana Darurat</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
04.07 04.07.01 00 00 4 3 3	<b>Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya</b>	<b>118.220.579.275,00</b>	<b>133.393.876.281,00</b>	<b>15.173.297.006,00</b>	
04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01	<b>Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi</b>	<b>118.220.579.275,00</b>	<b>133.393.876.281,00</b>	<b>15.173.297.006,00</b>	
04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01 01	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	43.401.358.560,00	50.129.201.000,00	6.727.842.440,00	
04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01 03	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	24.047.766.000,00	29.834.114.000,00	5.786.348.000,00	
04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01 05	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	29.917.544.115,00	32.990.808.000,00	3.073.263.885,00	
04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01 07	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	10.620.000,00	35.818.000,00	25.198.000,00	
04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01 08	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	20.843.290.600,00	20.403.935.281,00	(439.355.319,00)	



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
04.07 04.07.01 00 00 4 3 4	<b>Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus</b>	<b>35.760.859.000,00</b>	<b>35.760.859.000,00</b>	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 3 4 01	Dana Penyesuaian	35.760.859.000,00	35.760.859.000,00	-	Informasi resmi
04.07 04.07.01 00 00 4 3 4 01 04	Dana Insentif Daerah	35.760.859.000,00	35.760.859.000,00	-	Kementerian Keuangan
04.07 04.07.01 00 00 4 3 5	<b>Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya</b>	<b>1.236.000.000,00</b>	<b>1.236.000.000,00</b>	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 3 5 01	Bantuan Keuangan dari Provinsi	1.236.000.000,00	1.236.000.000,00	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 3 5 01 01	Bantuan Keuangan dari Provinsi	1.236.000.000,00	1.236.000.000,00	-	
04.07 04.07.01 00 00 5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>108.498.179.915,52</b>	<b>93.239.411.005,00</b>	<b>(15.258.768.910,52)</b>	
04.07 04.07.01 00 00 5 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>108.498.179.915,52</b>	<b>93.239.411.005,00</b>	<b>(15.258.768.910,52)</b>	
04.07 04.07.01 00 00 5 1 2	Belanja Bunga	-	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 5 1 3	Belanja Subsidi	-	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 5 1 4	Belanja Hibah	85.740.983.138,00	79.389.047.945,00	(6.351.935.193,00)	
04.07 04.07.01 00 00 5 1 5	Belanja Bantuan Sosial	12.526.580.000,00	11.551.423.000,00	(975.157.000,00)	
04.07 04.07.01 00 00 5 1 7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota/ dan Pemerintahan Desa, Partai Politik	2.002.804.587,00	1.981.246.996,00	(21.557.591,00)	
04.07 04.07.01 00 00 5 1 8	Belanja Tidak Terduga	8.227.812.190,52	317.693.064,00	(7.910.119.126,52)	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN PPKD :</b>	<b>1.101.756.549.757,00</b>	<b>1.076.710.692.983,00</b>	<b>(24.509.375.163,00)</b>	
	<b>JUMLAH BELANJA PPKD :</b>	<b>108.498.179.915,52</b>	<b>93.239.411.005,00</b>	<b>(15.258.768.910,52)</b>	
	<b>SURPLUS/DEFISIT :</b>	<b>993.258.369.841,48</b>	<b>983.471.281.978,00</b>	<b>(9.250.606.252,48)</b>	

## Keterangan :

- 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2011 Nomor 1)
- 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2018 Nomor 5)
- 3) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaasan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2011 Nomor 2)
- 4) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang BPHTB (Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2010 Nomor 8)
- 5) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 14)
- 6) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditian Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta
- 7) Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 8) Keputusan Gubernur DIY Nomor 71/KEP/2017 tentang Pembagian Laba Bersih Badan Usaha Kredit Pedesaan Tahun Buku 2017
- 9) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2012 tentang Penggunaan Laba Pada Perusahaan Daerah Jogjatama Visesha
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- 11) Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83)
- 12) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2006 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kota Yogyakarta Untuk Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal, dan Sosial
- 13) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemerintah Daerah Untuk Kegiatan Usaha
- 14) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame.
- 15) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
04.07 04.07.01 00 00 6	<b>PEMBIAYAAN</b>				
04.07 04.07.01 00 00 6 1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>226.446.667.759,52</b>	<b>226.448.050.491,52</b>	<b>1.382.732,00</b>	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya	<b>226.442.324.759,52</b>	<b>226.442.324.759,52</b>	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 01	Pelampauan Penerimaan PAD	53.602.571.033,14	53.603.102.519,14	531.486,00	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 01 01	Pajak Daerah	9.416.763.422,00	9.416.763.422,00	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 01 02	Retribusi Daerah	596.538.491,00	596.538.491,00	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 01 03	hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18.385.338,83	18.385.338,83	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 01 04	Lain-Lain PAD Yang Sah	43.570.883.781,31	43.571.415.267,31	531.486,00	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04	Sisa Penghematan Belanja Atau Akibat Lainnya	69.431.565.259,45	69.498.282.766,45	66.717.507,00	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 01	Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung	25.681.568.793,00	25.681.568.793,00	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 02	Belanja Pegawai dari Belanja Langsung	363.668.294,63	363.668.294,63	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 03	Belanja Barang dan Jasa	10.212.361.983,14	10.279.079.490,14	66.717.507,00	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 04	Belanja Modal	10.948.838.770,68	10.948.838.770,68	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 07	Belanja Hibah	15.354.933.450,00	15.354.933.450,00	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 08	Belanja Bantuan Sosial	1.036.565.000,00	1.036.565.000,00	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 11	Belanja Tidak Terduga	5.833.628.968,00	5.833.628.968,00	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06	Sisa Belanja DAK	14.322.267.426,00	14.322.267.426,00	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 03	DAK Bidang Infrastruktur	2.599.000,00	2.599.000,00	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 11	DAK Fisik Lingkungan Hidup	4.728.000,00	4.728.000,00	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 14	DAK Fisik Infrastruktur Pemerintah Daerah	25.625.428,00	25.625.428,00	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 15	DAK Non Fisik BOP PAUD	4.494.000.000,00	4.494.000.000,00	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 16	DAK Non Fisik TPG	8.444.614.920,00	8.444.614.920,00	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 17	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan	694.658.467,00	694.658.467,00	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 18	DAK Non Fisik Akreditasi Rumah Sakit	-	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 19	DAK Non Fisik Akreditasi Puskesmas	-	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 20	DAK Non Fisik Jaminan Persalinan	-	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 21	DAK Non Fisik Bantuan Operasional KB	624.030.992,00	624.030.992,00	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 22	DAK Non Fisik Tamsil	-	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 23	DAK Non Fisik Adminduk	32.010.619,00	32.010.619,00	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 24	DAK Fisik Perdagangan	-	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 25	DAK Fisik KB	-	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 08	Sisa Belanja Dana Penyesuaian	12.221.340.231,16	12.154.091.238,16	(67.248.993,00)	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 08 01	Dana Penyesuaian BOS	6.413.442.731,16	6.346.193.738,16	(67.248.993,00)	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 08 02	Dana Penyesuaian Tamsil Guru PNSD	5.807.897.500,00	5.807.897.500,00	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09	Sisa Belanja BLUD	31.479.008.248,22	31.479.008.248,22	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 01	Silpa BLUD Taman Pintar	4.400.934.134,34	4.400.934.134,34	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 02	Silpa BLUD RSUD	15.455.907.772,26	15.455.907.772,26	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 03	Silpa BLUD UPT Pusat Bisnis	1.551.719.416,40	1.551.719.416,40	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 04	Silpa BLUD UPT 18 Puskesmas	4.368.821.546,06	4.368.821.546,06	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 05	Silpa BLUD RS Pratama	5.667.427.499,56	5.667.427.499,56	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 06	Silpa BLUD UPT Logam	34.197.879,60	34.197.879,60	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 12	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	180.108.045,00	180.108.045,00	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 12 01	Pencairan Dana Cadangan	179.508.045,00	179.508.045,00	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 12 02	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	600.000,00	600.000,00	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 13	Sisa Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	45.205.464.516,55	45.205.464.516,55	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 13 01	Sisa Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	45.205.464.516,55	45.205.464.516,55	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	4.343.000,00	5.725.732,00	1.382.732,00	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
04.07 04.07.01 00 00 6 2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>37.275.000.000,00</b>	<b>37.275.000.000,00</b>	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 2 1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 2 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	37.275.000.000,00	37.275.000.000,00	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 2 3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 2 4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	
	Jumlah Pembiayaan Netto	<b>189.171.667.759,52</b>	<b>189.173.050.491,52</b>	<b>1.382.732,00</b>	
04.07 04.07.01 00 00 6 2	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	-	<b>220.340.133.122,45</b>	<b>220.340.133.122,45</b>	

**WALIKOTA YOGYAKARTA**

ttd

**HARYADI SUYUTI**

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
 REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN  
 TAHUN ANGGARAN 2019

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN			REALISASI				BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%	
		JENIS BELANJA			JUMLAH ANGGARAN BELANJA	JENIS BELANJA					JUMLAH REALISASI BELANJA
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10-6	12
<b>01</b>	<b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>	<b>138.035.032.699,00</b>	<b>320.390.979.855,00</b>	<b>265.196.404.601,00</b>	<b>723.622.417.155,00</b>	<b>113.720.762.925,32</b>	<b>290.714.929.526,70</b>	<b>235.889.142.199,73</b>	<b>640.324.834.651,75</b>	<b>(83.297.582.503,25)</b>	<b>88,49</b>
<b>01 01</b>	<b>URUSAN PENDIDIKAN</b>	<b>46.749.152.421,00</b>	<b>91.424.828.867,00</b>	<b>22.608.232.913,00</b>	<b>160.782.214.201,00</b>	<b>42.457.788.120,00</b>	<b>82.144.817.388,20</b>	<b>19.168.013.024,91</b>	<b>143.770.618.533,11</b>	<b>(17.011.595.667,89)</b>	<b>89,42</b>
<b>01 01 01</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN</b>	<b>46.749.152.421,00</b>	<b>91.424.828.867,00</b>	<b>22.608.232.913,00</b>	<b>160.782.214.201,00</b>	<b>42.457.788.120,00</b>	<b>82.144.817.388,20</b>	<b>19.168.013.024,91</b>	<b>143.770.618.533,11</b>	<b>(17.011.595.667,89)</b>	<b>89,42</b>
<b>01 01 01 01 01 001</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>14.552.245.326,00</b>	<b>2.460.838.304,00</b>	<b>1.170.585.500,00</b>	<b>18.183.669.130,00</b>	<b>14.210.525.970,00</b>	<b>2.414.067.668,20</b>	<b>1.158.944.650,00</b>	<b>17.783.538.288,20</b>	<b>(400.130.841,80)</b>	<b>97,80</b>
01 01 01 01 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	1.055.678.000,00	-	1.055.678.000,00	-	1.046.812.000,00	-	1.046.812.000,00	(8.866.000,00)	99,16
01 01 01 01 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	14.552.245.326,00	1.405.160.304,00	1.170.585.500,00	17.127.991.130,00	14.210.525.970,00	1.367.255.668,20	1.158.944.650,00	16.736.726.288,20	(391.264.841,80)	97,72
<b>01 01 01 01 01 002</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>-</b>	<b>671.845.000,00</b>	<b>520.429.000,00</b>	<b>1.192.274.000,00</b>	<b>-</b>	<b>619.516.600,00</b>	<b>510.417.530,00</b>	<b>1.129.934.130,00</b>	<b>(62.339.870,00)</b>	<b>94,77</b>
01 01 01 01 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	438.000.000,00	520.429.000,00	958.429.000,00	-	432.145.920,00	510.417.530,00	942.563.450,00	(15.865.550,00)	98,34
01 01 01 01 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	233.845.000,00	-	233.845.000,00	-	187.370.680,00	-	187.370.680,00	(46.474.320,00)	80,13
<b>01 01 01 01 01 006</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>-</b>	<b>90.124.000,00</b>	<b>-</b>	<b>90.124.000,00</b>	<b>-</b>	<b>90.124.000,00</b>	<b>-</b>	<b>90.124.000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
01 01 01 01 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	-	90.124.000,00	-	90.124.000,00	-	90.124.000,00	-	90.124.000,00	-	100,00
<b>01 01 01 01 01 010</b>	<b>Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>2.397.892.345,00</b>	<b>19.102.324.562,00</b>	<b>8.421.124.893,00</b>	<b>29.921.341.800,00</b>	<b>993.457.100,00</b>	<b>16.928.717.247,00</b>	<b>7.658.699.992,00</b>	<b>25.580.874.339,00</b>	<b>(4.340.467.461,00)</b>	<b>85,49</b>
01 01 01 01 01 010 001	Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SD	11.160.000,00	1.088.468.000,00	-	1.099.628.000,00	11.160.000,00	1.055.390.418,00	-	1.066.550.418,00	(33.077.582,00)	96,99
01 01 01 01 01 010 002	Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD	2.386.732.345,00	15.949.425.562,00	8.414.279.893,00	26.750.437.800,00	982.297.100,00	13.845.053.829,00	7.658.699.992,00	22.486.050.921,00	(4.264.386.879,00)	84,06
01 01 01 01 01 010 003	Pengelolaan Kesiswaan SD	-	2.064.431.000,00	6.845.000,00	2.071.276.000,00	-	2.028.273.000,00	-	2.028.273.000,00	(43.003.000,00)	97,92
<b>01 01 01 01 01 011</b>	<b>Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Menengah Pertama</b>	<b>1.624.060.750,00</b>	<b>14.200.065.450,00</b>	<b>5.115.859.700,00</b>	<b>20.939.985.900,00</b>	<b>916.588.200,00</b>	<b>11.841.727.948,00</b>	<b>3.087.982.299,91</b>	<b>15.846.298.447,91</b>	<b>(5.093.687.452,09)</b>	<b>75,67</b>
01 01 01 01 01 011 001	Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SMP	178.775.000,00	1.480.336.000,00	-	1.659.111.000,00	178.775.000,00	1.473.854.000,00	-	1.652.629.000,00	(6.482.000,00)	99,61
01 01 01 01 01 011 002	Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP	1.393.435.750,00	11.394.627.550,00	5.115.859.700,00	17.903.923.000,00	702.838.200,00	9.188.861.848,00	3.087.982.299,91	12.979.682.347,91	(4.924.240.652,09)	72,50
01 01 01 01 01 011 003	Pengelolaan Kesiswaan SMP	51.850.000,00	1.325.101.900,00	-	1.376.951.900,00	34.975.000,00	1.179.012.100,00	-	1.213.987.100,00	(162.964.800,00)	88,16

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN				REALISASI				BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
		JENIS BELANJA			JUMLAH ANGGARAN BELANJA	JENIS BELANJA			JUMLAH REALISASI BELANJA		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10-6	12
<b>01 01 01 01 01 012</b>	<b>Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal dan PAUD</b>	<b>2.863.549.000,00</b>	<b>2.953.299.853,00</b>	<b>2.358.458.820,00</b>	<b>8.175.307.673,00</b>	<b>2.776.383.200,00</b>	<b>2.691.782.084,00</b>	<b>1.928.718.689,00</b>	<b>7.396.883.973,00</b>	<b>(778.423.700,00)</b>	<b>90,48</b>
01 01 01 01 01 012 001	Pengelolaan Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan	806.674.000,00	1.444.319.400,00	2.358.458.820,00	4.609.452.220,00	737.008.200,00	1.229.028.660,00	1.928.718.689,00	3.894.755.549,00	(714.696.671,00)	84,49
01 01 01 01 01 012 002	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	2.056.875.000,00	1.032.600.453,00	-	3.089.475.453,00	2.039.375.000,00	1.012.208.424,00	-	3.051.583.424,00	(37.892.029,00)	98,77
01 01 01 01 01 012 003	Pembinaan Lembaga Pendidikan Ketrampilan	-	476.380.000,00	-	476.380.000,00	-	450.545.000,00	-	450.545.000,00	(25.835.000,00)	94,58
<b>01 01 01 01 01 013</b>	<b>Program Pengembangan Pendidikan</b>	<b>25.311.405.000,00</b>	<b>51.946.331.698,00</b>	<b>5.021.775.000,00</b>	<b>82.279.511.698,00</b>	<b>23.560.833.650,00</b>	<b>47.558.881.841,00</b>	<b>4.823.249.864,00</b>	<b>75.942.965.355,00</b>	<b>(6.336.546.343,00)</b>	<b>92,30</b>
01 01 01 01 01 013 001	Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	-	1.328.973.000,00	-	1.328.973.000,00	-	1.293.449.980,00	-	1.293.449.980,00	(35.523.020,00)	97,33
01 01 01 01 01 013 002	Pengelolaan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	10.429.440.000,00	178.562.000,00	-	10.608.002.000,00	10.288.320.000,00	162.040.346,00	-	10.450.360.346,00	(157.641.654,00)	98,51
01 01 01 01 01 013 003	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pendidikan	-	1.232.766.000,00	400.000.000,00	1.632.766.000,00	-	1.097.275.350,00	322.922.980,00	1.420.198.330,00	(212.567.670,00)	86,98
01 01 01 01 01 013 004	Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah	633.840.000,00	20.257.437.284,00	-	20.891.277.284,00	550.475.000,00	17.439.190.420,00	-	17.989.665.420,00	(2.901.611.864,00)	86,11
01 01 01 01 01 013 005	Pengelolaan BOS dan BOSDA (DAK)	13.865.325.000,00	28.352.465.414,00	4.621.775.000,00	46.839.565.414,00	12.346.138.650,00	26.971.297.345,00	4.500.326.884,00	43.817.762.879,00	(3.021.802.535,00)	93,55
01 01 01 01 01 013 006	Pengelolaan Pendidikan Inklusi	382.800.000,00	596.128.000,00	-	978.928.000,00	375.900.000,00	595.628.400,00	-	971.528.400,00	(7.399.600,00)	99,24
<b>01 02</b>	<b>URUSAN KESEHATAN</b>	<b>83.081.645.898,00</b>	<b>165.920.574.832,00</b>	<b>46.851.132.775,00</b>	<b>295.853.353.505,00</b>	<b>63.474.118.915,48</b>	<b>150.303.991.213,56</b>	<b>43.695.365.759,25</b>	<b>257.473.475.888,29</b>	<b>(38.379.877.616,71)</b>	<b>87,03</b>
<b>01 02 01</b>	<b>DINAS KESEHATAN</b>	<b>25.772.074.148,00</b>	<b>109.413.273.810,00</b>	<b>20.657.132.775,00</b>	<b>155.842.480.733,00</b>	<b>24.361.265.785,00</b>	<b>95.505.412.843,78</b>	<b>18.621.999.314,25</b>	<b>138.488.677.943,03</b>	<b>(17.353.802.789,97)</b>	<b>88,86</b>
<b>01 02 01 02 01 001</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>2.807.409.876,00</b>	<b>1.017.306.124,00</b>	<b>450.220.000,00</b>	<b>4.274.936.000,00</b>	<b>2.797.590.025,00</b>	<b>861.700.754,00</b>	<b>413.898.500,00</b>	<b>4.073.189.279,00</b>	<b>(201.746.721,00)</b>	<b>95,28</b>
01 02 01 02 01 001 018	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	-	294.535.000,00	-	294.535.000,00	-	246.373.158,00	-	246.373.158,00	(48.161.842,00)	83,65
01 02 01 02 01 001 019	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	2.807.409.876,00	722.771.124,00	450.220.000,00	3.980.401.000,00	2.797.590.025,00	615.327.596,00	413.898.500,00	3.826.816.121,00	(153.584.879,00)	96,14
<b>01 02 01 02 01 002</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>-</b>	<b>311.269.000,00</b>	<b>196.000.000,00</b>	<b>507.269.000,00</b>	<b>-</b>	<b>202.717.660,00</b>	<b>194.956.000,00</b>	<b>397.673.660,00</b>	<b>(109.595.340,00)</b>	<b>78,40</b>
01 02 01 02 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	21.000.000,00	196.000.000,00	217.000.000,00	-	20.968.434,00	194.956.000,00	215.924.434,00	(1.075.566,00)	99,50
01 02 01 02 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	290.269.000,00	-	290.269.000,00	-	181.749.226,00	-	181.749.226,00	(108.519.774,00)	62,61
<b>01 02 01 02 01 006</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>-</b>	<b>45.095.000,00</b>	<b>-</b>	<b>45.095.000,00</b>	<b>-</b>	<b>45.094.000,00</b>	<b>-</b>	<b>45.094.000,00</b>	<b>(1.000,00)</b>	<b>100,00</b>
01 02 01 02 01 006 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	-	45.095.000,00	-	45.095.000,00	-	45.094.000,00	-	45.094.000,00	(1.000,00)	100,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN				REALISASI				BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
		JENIS BELANJA			JUMLAH ANGGARAN BELANJA	JENIS BELANJA			JUMLAH REALISASI BELANJA		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10-6	12
<b>01 02 01 02 01 014</b>	<b>Program Pelayanan Kesehatan Dasar</b>	<b>15.795.783.195,00</b>	<b>30.266.670.093,00</b>	<b>6.027.228.257,00</b>	<b>52.089.681.545,00</b>	<b>15.236.567.155,00</b>	<b>26.205.561.275,46</b>	<b>4.573.345.006,00</b>	<b>46.015.473.436,46</b>	<b>(6.074.208.108,54)</b>	<b>88,34</b>
01 02 01 02 01 014 001	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 1	481.093.550,00	342.064.338,00	279.692.389,00	1.102.850.277,00	474.973.727,00	282.068.567,00	175.430.850,00	932.473.144,00	(170.377.133,00)	84,55
01 02 01 02 01 014 002	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 2	383.580.612,00	266.775.375,00	73.696.885,00	724.052.872,00	363.103.571,00	235.311.127,08	68.755.200,00	667.169.898,08	(56.882.973,92)	92,14
01 02 01 02 01 014 003	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gedongtengen	991.474.879,00	398.493.590,00	146.352.228,00	1.536.320.697,00	971.036.585,00	287.447.566,00	103.621.930,00	1.362.106.081,00	(174.214.616,00)	88,66
01 02 01 02 01 014 004	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman 1	976.600.000,00	511.236.489,00	47.300.000,00	1.535.136.489,00	926.312.635,00	302.311.125,00	27.015.000,00	1.255.638.760,00	(279.497.729,00)	81,79
01 02 01 02 01 014 005	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman 2	416.433.550,00	166.446.314,00	155.646.729,00	738.526.593,00	388.953.827,00	133.922.101,00	136.562.610,00	659.438.538,00	(79.088.055,00)	89,29
01 02 01 02 01 014 006	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondomanan	609.038.521,00	316.660.800,00	162.762.900,00	1.088.462.221,00	555.543.882,00	252.326.669,00	141.664.500,00	949.535.051,00	(138.927.170,00)	87,24
01 02 01 02 01 014 007	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Jetis	1.599.337.205,00	677.300.377,00	435.700.000,00	2.712.337.582,00	1.578.634.528,00	535.296.498,00	336.863.825,00	2.450.794.851,00	(261.542.731,00)	90,36
01 02 01 02 01 014 008	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 1	817.401.773,00	532.857.041,00	86.650.000,00	1.436.908.814,00	782.986.298,00	492.806.610,00	72.924.400,00	1.348.717.308,00	(88.191.506,00)	93,86
01 02 01 02 01 014 009	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 2	429.778.706,00	330.810.441,00	145.390.000,00	905.979.147,00	429.616.174,00	308.906.291,00	136.896.620,00	875.419.085,00	(30.560.062,00)	96,63
01 02 01 02 01 014 010	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kraton	681.122.996,00	421.751.430,00	113.602.000,00	1.216.476.426,00	671.726.511,00	255.428.232,00	103.119.785,00	1.030.274.528,00	(186.201.898,00)	84,69
01 02 01 02 01 014 011	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mantriweron	1.235.013.450,00	819.982.190,00	276.500.000,00	2.331.495.640,00	1.221.336.177,00	623.153.244,00	64.075.000,00	1.908.564.421,00	(422.931.219,00)	81,86
01 02 01 02 01 014 012	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mergangsan	1.229.200.000,00	944.230.720,00	686.130.000,00	2.859.560.720,00	1.012.469.717,00	649.538.628,00	218.010.460,00	1.880.018.805,00	(979.541.915,00)	65,75
01 02 01 02 01 014 013	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Ngampilan	346.800.000,00	431.747.083,00	237.539.250,00	1.016.086.333,00	393.203.617,00	249.117.572,38	184.703.642,00	827.024.831,38	(189.061.501,62)	81,39
01 02 01 02 01 014 014	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Pakualaman	342.487.950,00	457.285.175,00	107.592.022,00	907.365.147,00	338.520.831,00	255.344.161,00	40.683.450,00	634.548.442,00	(272.816.705,00)	69,93
01 02 01 02 01 014 015	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Tegalrejo	1.880.863.430,00	624.501.038,00	339.880.000,00	2.845.244.468,00	1.858.098.715,00	624.102.560,00	293.683.900,00	2.775.885.175,00	(69.359.293,00)	97,56
01 02 01 02 01 014 016	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 1	1.419.257.698,00	1.081.856.021,00	205.499.908,00	2.706.613.627,00	1.417.746.911,00	968.023.428,00	150.736.840,00	2.536.507.179,00	(170.106.448,00)	93,72
01 02 01 02 01 014 017	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 2	621.666.700,00	417.741.275,00	68.150.000,00	1.107.557.975,00	591.614.657,00	402.187.261,00	66.368.000,00	1.060.169.918,00	(47.388.057,00)	95,72
01 02 01 02 01 014 018	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Wirobrajan	904.007.175,00	864.743.825,00	155.441.117,00	1.924.192.117,00	856.673.792,00	772.278.880,00	139.585.950,00	1.768.538.622,00	(155.653.495,00)	91,91

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN				REALISASI				BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
		JENIS BELANJA			JUMLAH ANGGARAN BELANJA	JENIS BELANJA			JUMLAH REALISASI BELANJA		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10-6	12
01 02 01 02 01 014 019	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 1	1.550.000,00	1.176.609.222,00	122.239.778,00	1.300.399.000,00	-	1.059.020.713,00	105.664.450,00	1.164.685.163,00	(135.713.837,00)	89,56
01 02 01 02 01 014 020	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 2	-	1.068.651.000,00	80.000.000,00	1.148.651.000,00	-	991.335.542,00	79.000.000,00	1.070.335.542,00	(78.315.458,00)	93,18
01 02 01 02 01 014 021	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gedongtengen	71.110.000,00	1.564.885.242,00	375.416.758,00	2.011.412.000,00	70.110.000,00	1.380.386.515,00	328.877.030,00	1.779.373.545,00	(232.038.455,00)	88,46
01 02 01 02 01 014 022	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman 1	16.460.000,00	1.377.588.488,00	208.995.512,00	1.603.044.000,00	2.940.000,00	1.143.467.796,00	196.702.369,00	1.343.110.165,00	(259.933.835,00)	83,78
01 02 01 02 01 014 023	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman 2	-	1.381.094.727,00	311.521.273,00	1.692.616.000,00	-	1.233.108.415,00	268.597.600,00	1.501.706.015,00	(190.909.985,00)	88,72
01 02 01 02 01 014 024	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondomanan	-	1.277.278.000,00	75.000.000,00	1.352.278.000,00	-	1.201.182.423,00	75.000.000,00	1.276.182.423,00	(76.095.577,00)	94,37
01 02 01 02 01 014 025	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Jetis	-	1.216.684.300,00	105.865.700,00	1.322.550.000,00	-	1.107.243.207,00	96.969.000,00	1.204.212.207,00	(118.337.793,00)	91,05
01 02 01 02 01 014 026	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 1	28.165.000,00	755.042.000,00	75.000.000,00	858.207.000,00	27.065.000,00	671.908.251,00	75.000.000,00	773.973.251,00	(84.233.749,00)	90,18
01 02 01 02 01 014 027	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 2	-	774.347.200,00	25.350.200,00	799.697.400,00	-	749.736.085,00	23.544.145,00	773.280.230,00	(26.417.170,00)	96,70
01 02 01 02 01 014 028	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kraton	-	1.379.657.000,00	16.850.000,00	1.396.507.000,00	-	1.305.926.129,00	8.400.000,00	1.314.326.129,00	(82.180.871,00)	94,12
01 02 01 02 01 014 029	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mantrijeron	52.960.000,00	1.627.490.000,00	375.350.000,00	2.055.800.000,00	52.960.000,00	1.484.205.203,00	334.794.100,00	1.871.959.303,00	(183.840.697,00)	91,06
01 02 01 02 01 014 030	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mergangsan	-	1.052.117.000,00	-	1.052.117.000,00	-	975.588.590,00	-	975.588.590,00	(76.528.410,00)	92,73
01 02 01 02 01 014 031	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Ngampilan	-	906.994.211,00	202.839.789,00	1.109.834.000,00	-	813.781.163,00	197.145.000,00	1.010.926.163,00	(98.907.837,00)	91,09
01 02 01 02 01 014 032	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pakualaman	-	720.694.000,00	-	720.694.000,00	-	604.403.603,00	-	604.403.603,00	(116.290.397,00)	83,86
01 02 01 02 01 014 033	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tegalrejo	10.400.000,00	1.463.118.000,00	133.500.000,00	1.607.018.000,00	6.240.000,00	1.155.866.059,00	129.698.250,00	1.291.804.309,00	(315.213.691,00)	80,39
01 02 01 02 01 014 034	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 1	-	789.668.660,00	50.000.340,00	839.669.000,00	-	752.265.785,00	49.500.000,00	801.765.785,00	(37.903.215,00)	95,49
01 02 01 02 01 014 035	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 2	46.420.000,00	1.251.479.000,00	59.773.000,00	1.357.672.000,00	41.140.000,00	1.095.759.258,00	58.378.000,00	1.195.277.258,00	(162.394.742,00)	88,04
01 02 01 02 01 014 036	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wirobrajan	203.560.000,00	876.788.521,00	86.000.479,00	1.166.349.000,00	203.560.000,00	850.806.018,00	85.373.100,00	1.139.739.118,00	(26.609.882,00)	97,72





KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN				REALISASI				BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
		JENIS BELANJA			JUMLAH ANGGARAN BELANJA	JENIS BELANJA			JUMLAH REALISASI BELANJA		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10-6	12
01 03	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	534.872.432,00	27.835.040.373,00	154.029.036.246,00	182.398.949.051,00	484.179.047,88	25.781.837.893,01	135.628.134.512,13	161.894.151.453,02	(20.504.797.597,98)	88,76
01 03 01	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	513.397.432,00	27.192.130.273,00	151.658.988.746,00	179.364.516.451,00	462.704.047,88	25.232.525.879,01	133.290.551.112,13	158.985.781.039,02	(20.378.735.411,98)	88,64
01 03 01 03 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	476.272.432,00	1.726.860.380,00	422.145.000,00	2.625.277.812,00	426.254.047,88	1.482.108.028,57	407.341.400,00	2.315.703.476,45	(309.574.335,55)	88,21
01 03 01 03 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	403.730.000,00	-	403.730.000,00	-	330.330.972,25	-	330.330.972,25	(73.399.027,75)	81,82
01 03 01 03 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	476.272.432,00	1.323.130.380,00	422.145.000,00	2.221.547.812,00	426.254.047,88	1.151.777.056,32	407.341.400,00	1.985.372.504,20	(236.175.307,80)	89,37
01 03 01 03 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	1.037.327.000,00	-	1.037.327.000,00	-	838.736.366,00	-	838.736.366,00	(198.590.634,00)	80,86
01 03 01 03 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	255.000.000,00	-	255.000.000,00	-	250.526.000,00	-	250.526.000,00	(4.474.000,00)	98,25
01 03 01 03 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	782.327.000,00	-	782.327.000,00	-	588.210.366,00	-	588.210.366,00	(194.116.634,00)	75,19
01 03 01 03 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	39.275.000,00	75.000.000,00	114.275.000,00	-	39.094.800,00	74.442.000,00	113.536.800,00	(738.200,00)	99,35
01 03 01 03 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	-	39.275.000,00	75.000.000,00	114.275.000,00	-	39.094.800,00	74.442.000,00	113.536.800,00	(738.200,00)	99,35
01 03 01 03 01 021	Program Pembangunan Gedung Pemerintah	6.750.000,00	118.724.032,00	48.007.065.000,00	48.132.539.032,00	6.075.000,00	110.553.065,28	42.380.377.329,79	42.497.005.395,07	(5.635.533.636,93)	88,29
01 03 01 03 01 021 001	Perencanaan Teknis Gedung Pemerintah	6.750.000,00	66.962.736,00	2.802.170.000,00	2.875.882.736,00	6.075.000,00	61.310.699,84	2.768.480.400,00	2.835.866.099,84	(40.016.636,16)	98,61
01 03 01 03 01 021 002	Pembangunan Gedung Pemerintah	-	51.761.296,00	45.204.895.000,00	45.256.656.296,00	-	49.242.365,44	39.611.896.929,79	39.661.139.295,23	(5.595.517.000,77)	87,64
01 03 01 03 01 022	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	30.375.000,00	20.372.093.371,00	58.996.530.832,00	79.398.999.203,00	30.375.000,00	19.102.807.181,12	56.512.046.706,23	75.645.228.887,35	(3.753.770.315,65)	95,27
01 03 01 03 01 022 001	Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK)	-	28.098.560,00	29.558.304.290,00	29.586.402.850,00	-	23.498.530,00	28.698.551.436,81	28.722.049.966,81	(864.352.883,19)	97,08
01 03 01 03 01 022 002	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	-	4.573.145.116,00	7.412.420.884,00	11.985.566.000,00	-	3.751.798.397,12	6.316.033.454,42	10.067.831.851,54	(1.917.734.148,46)	84,00
01 03 01 03 01 022 003	Pengelolaan Penerangan Jalan Umum	30.375.000,00	15.770.849.695,00	22.025.805.658,00	37.827.030.353,00	30.375.000,00	15.327.510.254,00	21.497.461.815,00	36.855.347.069,00	(971.683.284,00)	97,43
01 03 01 03 01 023	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase	-	3.897.850.490,00	44.158.247.914,00	48.056.098.404,00	-	3.659.226.438,04	33.916.343.676,11	37.575.570.114,15	(10.480.528.289,85)	78,19
01 03 01 03 01 023 001	Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan dan Drainase	-	106.448.720,00	21.424.436.743,00	21.530.885.463,00	-	100.042.176,00	20.779.674.019,22	20.879.716.195,22	(651.169.267,78)	96,98
01 03 01 03 01 023 002	Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase	-	3.791.401.770,00	22.733.811.171,00	26.525.212.941,00	-	3.559.184.262,04	13.136.669.656,89	16.695.853.918,93	(9.829.359.022,07)	62,94
01 03 02 04 01	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	21.475.000,00	642.910.100,00	2.370.047.500,00	3.034.432.600,00	21.475.000,00	549.312.014,00	2.337.583.400,00	2.908.370.414,00	(126.062.186,00)	95,85
01 03 02 04 01 024	Program Pembinaan Tata Ruang	18.975.000,00	537.868.860,00	1.406.817.500,00	1.963.661.360,00	18.975.000,00	444.655.164,00	1.376.717.100,00	1.840.347.264,00	(123.314.096,00)	93,72
01 03 02 04 01 024 001	Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci	18.975.000,00	401.868.620,00	606.640.000,00	1.027.483.620,00	18.975.000,00	317.770.264,00	580.950.000,00	917.695.264,00	(109.788.356,00)	89,31
01 03 02 04 01 024 002	Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan	-	77.098.620,00	590.912.500,00	668.011.120,00	-	72.226.700,00	590.199.200,00	662.425.900,00	(5.585.220,00)	99,16
01 03 02 04 01 024 003	Pembinaan Tata Ruang	-	58.901.620,00	209.265.000,00	268.166.620,00	-	54.658.200,00	205.567.900,00	260.226.100,00	(7.940.520,00)	97,04

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN				REALISASI				BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
		JENIS BELANJA			JUMLAH ANGGARAN BELANJA	JENIS BELANJA			JUMLAH REALISASI BELANJA		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10-6	12
01 03 02 04 01 025	Program Pengendalian Tata Ruang	2.500.000,00	105.041.240,00	963.230.000,00	1.070.771.240,00	2.500.000,00	104.656.850,00	960.866.300,00	1.068.023.150,00	(2.748.090,00)	99,74
01 03 02 04 01 025 001	Pengendalian Tata Ruang	2.500.000,00	34.550.000,00	187.030.000,00	224.080.000,00	2.500.000,00	34.441.350,00	186.095.400,00	223.036.750,00	(1.043.250,00)	99,53
01 03 02 04 01 025 002	Pengawasan Tata Ruang	-	43.542.620,00	308.380.000,00	351.922.620,00	-	43.371.300,00	308.011.200,00	351.382.500,00	(540.120,00)	99,85
01 03 02 04 01 025 003	Pengelolaan Data dan Informasi Tata Ruang	-	26.948.620,00	467.820.000,00	494.768.620,00	-	26.844.200,00	466.759.700,00	493.603.900,00	(1.164.720,00)	99,76
01 04	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	160.200.000,00	6.698.184.134,00	28.829.103.887,00	35.687.488.021,00	128.025.000,00	6.115.356.832,52	25.474.120.076,17	31.717.501.908,69	(3.969.986.112,31)	88,88
01 04 01	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	160.200.000,00	6.698.184.134,00	28.829.103.887,00	35.687.488.021,00	128.025.000,00	6.115.356.832,52	25.474.120.076,17	31.717.501.908,69	(3.969.986.112,31)	88,88
01 04 01 03 01 026	Program Penataan Perumahan, Permukiman dan Tata Bangunan	160.200.000,00	6.698.184.134,00	28.829.103.887,00	35.687.488.021,00	128.025.000,00	6.115.356.832,52	25.474.120.076,17	31.717.501.908,69	(3.969.986.112,31)	88,88
01 04 01 03 01 026 001	Penataan Perumahan dan Permukiman (DAK)	-	1.042.818.560,00	16.391.851.075,00	17.434.669.635,00	-	975.184.330,00	14.073.102.729,33	15.048.287.059,33	(2.386.382.575,67)	86,31
01 04 01 03 01 026 002	Penataan Bangunan dan Lingkungan	56.250.000,00	3.536.876.970,00	6.274.530.000,00	9.867.656.970,00	49.950.000,00	3.418.269.860,00	5.827.394.281,97	9.295.614.141,97	(572.042.828,03)	94,20
01 04 01 03 01 026 003	Pengelolaan Rusunawa	-	383.536.324,00	1.387.131.884,00	1.770.668.208,00	-	311.846.246,88	1.299.281.364,87	1.611.127.611,75	(159.540.596,25)	90,99
01 04 01 03 01 026 004	Pengelolaan Air Limbah	103.950.000,00	1.734.952.280,00	4.775.590.928,00	6.614.493.208,00	78.075.000,00	1.410.056.395,64	4.274.341.700,00	5.762.473.095,64	(852.020.112,36)	87,12
01 05	URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	5.510.879.476,00	19.618.897.551,00	12.060.134.900,00	37.189.911.927,00	5.288.767.784,04	18.122.686.054,97	11.124.001.052,27	34.535.454.891,28	(2.654.457.035,72)	92,86
01 05 01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	5.004.825.876,00	11.357.058.551,00	837.152.500,00	17.199.036.927,00	4.782.722.009,00	11.023.380.109,57	808.201.900,00	16.614.304.018,57	(584.732.908,43)	96,60
01 05 01 05 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.892.630.876,00	870.921.125,00	139.652.500,00	2.903.204.501,00	1.827.882.009,00	795.069.931,00	132.941.900,00	2.755.893.840,00	(147.310.661,00)	94,93
01 05 01 05 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	144.400.000,00	-	144.400.000,00	-	142.958.756,00	-	142.958.756,00	(1.441.244,00)	99,00
01 05 01 05 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	1.892.630.876,00	726.521.125,00	139.652.500,00	2.758.804.501,00	1.827.882.009,00	652.111.175,00	132.941.900,00	2.612.935.084,00	(145.869.417,00)	94,71
01 05 01 05 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	640.911.000,00	297.500.000,00	938.411.000,00	-	619.115.130,00	283.810.000,00	902.925.130,00	(35.485.870,00)	96,22
01 05 01 05 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	-	257.500.000,00	257.500.000,00	-	-	254.960.000,00	254.960.000,00	(2.540.000,00)	99,01
01 05 01 05 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	640.911.000,00	40.000.000,00	680.911.000,00	-	619.115.130,00	28.850.000,00	647.965.130,00	(32.945.870,00)	95,16
01 05 01 05 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	8.228.000,00	-	8.228.000,00	-	5.802.600,00	-	5.802.600,00	(2.425.400,00)	70,52
01 05 01 05 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	-	8.228.000,00	-	8.228.000,00	-	5.802.600,00	-	5.802.600,00	(2.425.400,00)	70,52
01 05 01 05 01 027	Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	476.450.000,00	4.822.772.246,00	180.000.000,00	5.479.222.246,00	434.695.000,00	4.784.062.153,00	177.650.000,00	5.396.407.153,00	(82.815.093,00)	98,49
01 05 01 05 01 027 001	Penegakan Peraturan Daerah Secara Yustisi	235.275.000,00	72.780.000,00	-	308.055.000,00	193.970.000,00	68.580.000,00	-	262.550.000,00	(45.505.000,00)	85,23
01 05 01 05 01 027 002	Operasi Ketertiban Umum	241.175.000,00	4.749.992.246,00	180.000.000,00	5.171.167.246,00	240.725.000,00	4.715.482.153,00	177.650.000,00	5.133.857.153,00	(37.310.093,00)	99,28

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN				REALISASI				BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
		JENIS BELANJA			JUMLAH ANGGARAN BELANJA	JENIS BELANJA			JUMLAH REALISASI BELANJA		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10-6	12
<b>01 05 01 05 01 028</b>	<b>Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat</b>	<b>648.370.000,00</b>	<b>2.701.108.521,00</b>	<b>220.000.000,00</b>	<b>3.569.478.521,00</b>	<b>590.900.000,00</b>	<b>2.620.982.520,57</b>	<b>213.800.000,00</b>	<b>3.425.682.520,57</b>	<b>(143.796.000,43)</b>	<b>95,97</b>
01 05 01 05 01 028 001	Pengamanan Umum dan Penjagaan Khusus	608.920.000,00	2.625.328.521,00	220.000.000,00	3.454.248.521,00	581.400.000,00	2.554.008.520,57	213.800.000,00	3.349.208.520,57	(105.040.000,43)	96,96
01 05 01 05 01 028 002	Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat	39.450.000,00	75.780.000,00	-	115.230.000,00	9.500.000,00	66.974.000,00	-	76.474.000,00	(38.756.000,00)	66,37
<b>01 05 01 05 01 029</b>	<b>Program Pengembangan Kapasitas dan Pengkajian Peraturan Perundangan</b>	<b>-</b>	<b>480.605.594,00</b>	<b>-</b>	<b>480.605.594,00</b>	<b>-</b>	<b>447.066.148,00</b>	<b>-</b>	<b>447.066.148,00</b>	<b>(33.539.446,00)</b>	<b>93,02</b>
01 05 01 05 01 029 001	Peningkatan Kapasitas Pol PP	-	304.529.994,00	-	304.529.994,00	-	272.330.548,00	-	272.330.548,00	(32.199.446,00)	89,43
01 05 01 05 01 029 002	Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan	-	176.075.600,00	-	176.075.600,00	-	174.735.600,00	-	174.735.600,00	(1.340.000,00)	99,24
<b>01 05 01 05 01 030</b>	<b>Program Perlindungan Masyarakat</b>	<b>1.987.375.000,00</b>	<b>1.832.512.065,00</b>	<b>-</b>	<b>3.819.887.065,00</b>	<b>1.929.245.000,00</b>	<b>1.751.281.627,00</b>	<b>-</b>	<b>3.680.526.627,00</b>	<b>(139.360.438,00)</b>	<b>96,35</b>
01 05 01 05 01 030 001	Pembinaan dan Mobilisasi Linmas	1.645.900.000,00	449.859.291,00	-	2.095.759.291,00	1.603.510.000,00	419.165.519,00	-	2.022.675.519,00	(73.083.772,00)	96,51
01 05 01 05 01 030 002	Pembinaan Masyarakat dan Gerakan Kampung Panca Tertib	341.475.000,00	1.382.652.774,00	-	1.724.127.774,00	325.735.000,00	1.332.116.108,00	-	1.657.851.108,00	(66.276.666,00)	96,16
<b>01 05 02</b>	<b>DINAS KEBAKARAN</b>	<b>506.053.600,00</b>	<b>3.809.322.000,00</b>	<b>4.793.877.400,00</b>	<b>9.109.253.000,00</b>	<b>506.045.775,04</b>	<b>3.288.285.718,40</b>	<b>4.548.485.663,85</b>	<b>8.342.817.157,29</b>	<b>(766.435.842,71)</b>	<b>91,59</b>
<b>01 05 01 05 02 001</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>506.053.600,00</b>	<b>718.797.400,00</b>	<b>88.050.000,00</b>	<b>1.312.901.000,00</b>	<b>506.045.775,04</b>	<b>643.693.942,00</b>	<b>85.077.675,00</b>	<b>1.234.817.392,04</b>	<b>(78.083.607,96)</b>	<b>94,05</b>
01 05 01 05 02 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	222.790.000,00	-	222.790.000,00	-	211.930.864,00	-	211.930.864,00	(10.859.136,00)	95,13
01 05 01 05 02 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	506.053.600,00	496.007.400,00	88.050.000,00	1.090.111.000,00	506.045.775,04	431.763.078,00	85.077.675,00	1.022.886.528,04	(67.224.471,96)	93,83
<b>01 05 01 05 02 002</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>-</b>	<b>428.670.000,00</b>	<b>-</b>	<b>428.670.000,00</b>	<b>-</b>	<b>375.235.884,00</b>	<b>-</b>	<b>375.235.884,00</b>	<b>(53.434.116,00)</b>	<b>87,53</b>
01 05 01 05 02 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	271.070.000,00	-	271.070.000,00	-	267.572.000,00	-	267.572.000,00	(3.498.000,00)	98,71
01 05 01 05 02 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	157.600.000,00	-	157.600.000,00	-	107.663.884,00	-	107.663.884,00	(49.936.116,00)	68,31
<b>01 05 01 05 02 005</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>-</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>(25.000.000,00)</b>	<b>58,33</b>
01 05 01 05 02 005 022	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	-	60.000.000,00	-	60.000.000,00	-	35.000.000,00	-	35.000.000,00	(25.000.000,00)	58,33
<b>01 05 01 05 02 006</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>-</b>	<b>63.005.000,00</b>	<b>-</b>	<b>63.005.000,00</b>	<b>-</b>	<b>58.788.000,00</b>	<b>-</b>	<b>58.788.000,00</b>	<b>(4.217.000,00)</b>	<b>93,31</b>
01 05 01 05 02 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	-	63.005.000,00	-	63.005.000,00	-	58.788.000,00	-	58.788.000,00	(4.217.000,00)	93,31
<b>01 05 01 05 02 031</b>	<b>Program Pencegahan Kebakaran</b>	<b>-</b>	<b>591.768.000,00</b>	<b>2.308.750.000,00</b>	<b>2.900.518.000,00</b>	<b>-</b>	<b>556.364.000,00</b>	<b>2.238.730.703,85</b>	<b>2.795.094.703,85</b>	<b>(105.423.296,15)</b>	<b>96,37</b>
01 05 01 05 02 031 001	Pencegahan Bahaya Kebakaran	-	7.975.000,00	2.288.250.000,00	2.296.225.000,00	-	3.488.000,00	2.218.265.703,85	2.221.753.703,85	(74.471.296,15)	96,76
01 05 01 05 02 031 002	Penyuluhan dan Edukasi Bahaya Kebakaran	-	583.793.000,00	20.500.000,00	604.293.000,00	-	552.876.000,00	20.465.000,00	573.341.000,00	(30.952.000,00)	94,88
<b>01 05 01 05 02 032</b>	<b>Program Penanggulangan Kebakaran</b>	<b>-</b>	<b>1.947.081.600,00</b>	<b>2.397.077.400,00</b>	<b>4.344.159.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.619.203.892,40</b>	<b>2.224.677.285,00</b>	<b>3.843.881.177,40</b>	<b>(500.277.822,60)</b>	<b>88,48</b>
01 05 01 05 02 032 001	Penanganan Kebakaran	-	833.025.000,00	-	833.025.000,00	-	801.197.782,40	-	801.197.782,40	(31.827.217,60)	96,18
01 05 01 05 02 032 002	Pengelolaan Sarana Prasarana Kebakaran	-	1.114.056.600,00	2.397.077.400,00	3.511.134.000,00	-	818.006.110,00	2.224.677.285,00	3.042.683.395,00	(468.450.605,00)	86,66

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN				REALISASI				BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
		JENIS BELANJA			JUMLAH ANGGARAN BELANJA	JENIS BELANJA			JUMLAH REALISASI BELANJA		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10-6	12
<b>01 05 03</b>	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>	-	<b>4.452.517.000,00</b>	<b>6.429.105.000,00</b>	<b>10.881.622.000,00</b>	-	<b>3.811.020.227,00</b>	<b>5.767.313.488,42</b>	<b>9.578.333.715,42</b>	<b>(1.303.288.284,58)</b>	<b>88,02</b>
<b>01 05 01 05 03 001</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	-	<b>282.394.790,00</b>	<b>277.470.000,00</b>	<b>559.864.790,00</b>	-	<b>239.562.536,00</b>	<b>200.814.480,00</b>	<b>440.377.016,00</b>	<b>(119.487.774,00)</b>	<b>78,66</b>
01 05 01 05 03 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	125.620.000,00	-	125.620.000,00	-	115.819.288,00	-	115.819.288,00	(9.800.712,00)	92,20
01 05 01 05 03 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	-	156.774.790,00	277.470.000,00	434.244.790,00	-	123.743.248,00	200.814.480,00	324.557.728,00	(109.687.062,00)	74,74
<b>01 05 01 05 03 002</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	-	<b>402.890.000,00</b>	<b>416.000.000,00</b>	<b>818.890.000,00</b>	-	<b>302.027.427,00</b>	<b>375.840.451,00</b>	<b>677.867.878,00</b>	<b>(141.022.122,00)</b>	<b>82,78</b>
01 05 01 05 03 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	90.000.000,00	416.000.000,00	506.000.000,00	-	50.000.000,00	375.840.451,00	425.840.451,00	(80.159.549,00)	84,16
01 05 01 05 03 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	312.890.000,00	-	312.890.000,00	-	252.027.427,00	-	252.027.427,00	(60.862.573,00)	80,55
<b>01 05 01 05 03 005</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	-	<b>20.000.000,00</b>	-	<b>20.000.000,00</b>	-	<b>20.000.000,00</b>	-	<b>20.000.000,00</b>	<b>40.000.000</b>	<b>#####</b>
01 05 01 05 03 005 022	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	-	20.000.000,00	-	20.000.000,00	-	20.000.000,00	-	20.000.000,00	40.000.000	#####
<b>01 05 01 05 03 006</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	-	<b>1.485.000,00</b>	-	<b>1.485.000,00</b>	-	<b>687.750,00</b>	-	<b>687.750,00</b>	<b>(797.250,00)</b>	<b>46,31</b>
01 05 01 05 03 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	-	1.485.000,00	-	1.485.000,00	-	687.750,00	-	687.750,00	(797.250,00)	46,31
<b>01 05 01 05 03 033</b>	<b>Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam</b>	-	<b>3.745.747.210,00</b>	<b>5.735.635.000,00</b>	<b>9.481.382.210,00</b>	-	<b>3.248.742.514,00</b>	<b>5.190.658.557,42</b>	<b>8.439.401.071,42</b>	<b>(1.041.981.138,58)</b>	<b>89,01</b>
01 05 01 05 03 033 001	Pencegahan Bahaya Bencana Alam	-	2.499.289.460,00	1.281.000.000,00	3.780.289.460,00	-	2.168.056.273,00	1.273.449.000,00	3.441.505.273,00	(338.784.187,00)	91,04
01 05 01 05 03 033 002	Penanganan Bencana Alam	-	1.149.657.750,00	331.000.000,00	1.480.657.750,00	-	1.058.055.616,00	312.194.000,00	1.370.249.616,00	(110.408.134,00)	92,54
01 05 01 05 03 033 003	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	-	96.800.000,00	4.123.635.000,00	4.220.435.000,00	-	22.630.625,00	3.605.015.557,42	3.627.646.182,42	(592.788.817,58)	85,95
<b>01 06</b>	<b>URUSAN SOSIAL</b>	<b>1.998.282.472,00</b>	<b>8.893.454.098,00</b>	<b>818.763.880,00</b>	<b>11.710.500.450,00</b>	<b>1.887.884.057,92</b>	<b>8.246.240.144,44</b>	<b>799.507.775,00</b>	<b>10.933.631.977,36</b>	<b>(776.868.472,64)</b>	<b>93,37</b>
<b>01 06 01</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>	<b>1.998.282.472,00</b>	<b>8.893.454.098,00</b>	<b>818.763.880,00</b>	<b>11.710.500.450,00</b>	<b>1.887.884.057,92</b>	<b>8.246.240.144,44</b>	<b>799.507.775,00</b>	<b>10.933.631.977,36</b>	<b>(776.868.472,64)</b>	<b>93,37</b>
<b>01 06 01 06 01 001</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>319.607.472,00</b>	<b>944.016.173,00</b>	<b>394.813.880,00</b>	<b>1.658.437.525,00</b>	<b>318.823.057,92</b>	<b>746.700.095,00</b>	<b>380.376.600,00</b>	<b>1.445.899.752,92</b>	<b>(212.537.772,08)</b>	<b>87,18</b>
01 06 01 06 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	315.330.000,00	-	315.330.000,00	-	221.534.709,00	-	221.534.709,00	(93.795.291,00)	70,25
01 06 01 06 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	319.607.472,00	628.686.173,00	394.813.880,00	1.343.107.525,00	318.823.057,92	525.165.386,00	380.376.600,00	1.224.365.043,92	(118.742.481,08)	91,16
<b>01 06 01 06 01 002</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	-	<b>510.188.400,00</b>	<b>412.600.000,00</b>	<b>922.788.400,00</b>	-	<b>344.906.421,00</b>	<b>408.781.175,00</b>	<b>753.687.596,00</b>	<b>(169.100.804,00)</b>	<b>81,68</b>
01 06 01 06 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	15.280.000,00	405.000.000,00	420.280.000,00	-	14.614.000,00	401.181.175,00	415.795.175,00	(4.484.825,00)	98,93
01 06 01 06 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	494.908.400,00	7.600.000,00	502.508.400,00	-	330.292.421,00	7.600.000,00	337.892.421,00	(164.615.979,00)	67,24

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN				REALISASI				BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
		JENIS BELANJA			JUMLAH ANGGARAN BELANJA	JENIS BELANJA			JUMLAH REALISASI BELANJA		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10-6	12
01 06 01 06 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	36.460.000,00	-	36.460.000,00	-	33.510.000,00	-	33.510.000,00	(2.950.000,00)	91,91
01 06 01 06 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	-	36.460.000,00	-	36.460.000,00	-	33.510.000,00	-	33.510.000,00	(2.950.000,00)	91,91
01 06 01 06 01 034	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	837.900.000,00	4.127.751.525,00	11.350.000,00	4.977.001.525,00	757.963.000,00	3.903.117.784,68	10.350.000,00	4.671.430.784,68	(305.570.740,32)	93,86
01 06 01 06 01 034 001	Perlindungan Sosial	132.150.000,00	609.415.000,00	-	741.565.000,00	93.350.000,00	547.532.553,48	-	640.882.553,48	(100.682.446,52)	86,42
01 06 01 06 01 034 002	Jaminan dan Bantuan Sosial	475.050.000,00	878.138.000,00	-	1.353.188.000,00	470.300.000,00	832.327.768,16	-	1.302.627.768,16	(50.560.231,84)	96,26
01 06 01 06 01 034 003	Pelayanan Anak di Rumah Pengasuhan Anak Wiloso Projo	192.900.000,00	949.844.000,00	-	1.142.744.000,00	157.263.000,00	890.373.980,24	-	1.047.636.980,24	(95.107.019,76)	91,68
01 06 01 06 01 034 004	Pelayanan di Rumah Pelayanan Lanjut Usia Budhi Dharma	37.800.000,00	1.690.354.525,00	11.350.000,00	1.739.504.525,00	37.050.000,00	1.632.883.482,80	10.350.000,00	1.680.283.482,80	(59.221.042,20)	96,60
01 06 01 06 01 035	Program Advokasi dan Rehabilitasi Sosial	418.800.000,00	1.335.020.000,00	-	1.753.820.000,00	416.950.000,00	1.305.052.938,64	-	1.722.002.938,64	(31.817.061,36)	98,19
01 06 01 06 01 035 001	Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	156.450.000,00	299.054.000,00	-	455.504.000,00	156.450.000,00	296.564.992,16	-	453.014.992,16	(2.489.007,84)	99,45
01 06 01 06 01 035 002	Advokasi dan Pendampingan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) (DBH Pajak Rokok)	262.350.000,00	1.035.966.000,00	-	1.298.316.000,00	260.500.000,00	1.008.487.946,48	-	1.268.987.946,48	(29.328.053,52)	97,74
01 06 01 06 01 036	Program Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial	421.975.000,00	1.940.018.000,00	-	2.361.993.000,00	394.148.000,00	1.912.952.905,12	-	2.307.100.905,12	(54.892.094,88)	97,68
01 06 01 06 01 036 001	Pendataan PMKS dan PSKS	389.875.000,00	1.012.086.000,00	-	1.401.961.000,00	362.048.000,00	1.001.474.728,64	-	1.363.522.728,64	(38.438.271,36)	97,26
01 06 01 06 01 036 002	Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial (PSKS)	32.100.000,00	927.932.000,00	-	960.032.000,00	32.100.000,00	911.478.176,48	-	943.578.176,48	(16.453.823,52)	98,29
02	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	12.981.377.892,00	154.964.018.541,00	88.623.065.793,00	256.568.462.226,00	12.315.312.675,16	146.595.985.544,35	59.828.087.368,34	218.739.385.587,85	(37.829.076.638,15)	85,26
02 01	URUSAN TENAGA KERJA	229.575.000,00	5.005.278.000,00	-	5.234.853.000,00	229.575.000,00	4.890.867.249,00	-	5.120.442.249,00	(114.410.751,00)	97,81
02 01 01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	229.575.000,00	5.005.278.000,00	-	5.234.853.000,00	229.575.000,00	4.890.867.249,00	-	5.120.442.249,00	(114.410.751,00)	97,81
02 01 02 11 01 037	Program Pengembangan dan Penempatan dan Transmigrasi	107.950.000,00	4.134.463.000,00	-	4.242.413.000,00	107.950.000,00	4.033.346.089,00	-	4.141.296.089,00	(101.116.911,00)	97,62
02 01 02 11 01 037 001	Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja	25.200.000,00	2.518.507.000,00	-	2.543.707.000,00	25.200.000,00	2.449.296.717,00	-	2.474.496.717,00	(69.210.283,00)	97,28
02 01 02 11 01 037 002	Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja	82.750.000,00	1.615.956.000,00	-	1.698.706.000,00	82.750.000,00	1.584.049.372,00	-	1.666.799.372,00	(31.906.628,00)	98,12
02 01 02 11 01 038	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja	121.625.000,00	870.815.000,00	-	992.440.000,00	121.625.000,00	857.521.160,00	-	979.146.160,00	(13.293.840,00)	98,66
02 01 02 11 01 038 001	Pembinaan Pengembangan Pekerja dan Pengupahan	65.175.000,00	407.207.000,00	-	472.382.000,00	65.175.000,00	406.209.310,00	-	471.384.310,00	(997.690,00)	99,79
02 01 02 11 01 038 002	Pelayanan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja	56.450.000,00	463.608.000,00	-	520.058.000,00	56.450.000,00	451.311.850,00	-	507.761.850,00	(12.296.150,00)	97,64

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN			REALISASI				BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%	
		JENIS BELANJA			JUMLAH ANGGARAN BELANJA	JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL			JUMLAH REALISASI BELANJA
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10-6	12
02 02	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	303.442.350,00	4.661.415.694,00	1.196.557.700,00	6.161.415.744,00	291.805.802,88	4.365.122.504,31	1.115.052.000,00	5.771.980.307,19	(389.435.436,81)	93,68
02 02 01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	303.442.350,00	4.661.415.694,00	1.196.557.700,00	6.161.415.744,00	291.805.802,88	4.365.122.504,31	1.115.052.000,00	5.771.980.307,19	(389.435.436,81)	93,68
02 02 02 02 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	107.422.350,00	695.218.950,00	976.557.700,00	1.779.199.000,00	106.535.802,88	653.879.469,99	898.011.000,00	1.658.426.272,87	(120.772.727,13)	93,21
02 02 02 02 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	505.144.000,00	-	505.144.000,00	-	497.275.770,99	-	497.275.770,99	(7.868.229,01)	98,44
02 02 02 02 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	107.422.350,00	190.074.950,00	976.557.700,00	1.274.055.000,00	106.535.802,88	156.603.699,00	898.011.000,00	1.161.150.501,88	(112.904.498,12)	91,14
02 02 02 02 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	155.812.000,00	220.000.000,00	375.812.000,00	-	149.169.408,00	217.041.000,00	366.210.408,00	(9.601.592,00)	97,45
02 02 02 02 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	70.800.000,00	220.000.000,00	290.800.000,00	-	69.910.000,00	217.041.000,00	286.951.000,00	(3.849.000,00)	98,68
02 02 02 02 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	85.012.000,00	-	85.012.000,00	-	79.259.408,00	-	79.259.408,00	(5.752.592,00)	93,23
02 02 02 02 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	136.040.000,00	-	136.040.000,00	-	135.298.120,00	-	135.298.120,00	(741.880,00)	99,45
02 02 02 02 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	-	136.040.000,00	-	136.040.000,00	-	135.298.120,00	-	135.298.120,00	(741.880,00)	99,45
02 02 02 02 01 039	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	132.400.000,00	1.598.862.000,00	-	1.731.262.000,00	126.950.000,00	1.493.158.215,76	-	1.620.108.215,76	(111.153.784,24)	93,58
02 02 02 02 01 039 001	Pembinaan Pengarusutamaan Gender	30.100.000,00	370.270.000,00	-	400.370.000,00	26.750.000,00	343.828.570,00	-	370.578.570,00	(29.791.430,00)	92,56
02 02 02 02 01 039 002	Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Perempuan	39.300.000,00	585.307.000,00	-	624.607.000,00	39.000.000,00	564.163.295,00	-	603.163.295,00	(21.443.705,00)	96,57
02 02 02 02 01 039 003	UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	63.000.000,00	643.285.000,00	-	706.285.000,00	61.200.000,00	585.166.350,76	-	646.366.350,76	(59.918.649,24)	91,52
02 02 02 02 01 040	Program Perlindungan Anak	63.620.000,00	2.075.482.744,00	-	2.139.102.744,00	58.320.000,00	1.933.617.290,56	-	1.991.937.290,56	(147.165.453,44)	93,12
02 02 02 02 01 040 001	Pembinaan Pengarusutamaan Hak Anak	17.700.000,00	719.905.000,00	-	737.605.000,00	17.700.000,00	659.983.000,00	-	677.683.000,00	(59.922.000,00)	91,88
02 02 02 02 01 040 002	Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Anak	45.920.000,00	1.355.577.744,00	-	1.401.497.744,00	40.620.000,00	1.273.634.290,56	-	1.314.254.290,56	(87.243.453,44)	93,77
02 03	URUSAN PANGAN	5.550.000,00	1.261.745.000,00	158.000.000,00	1.425.295.000,00	5.450.000,00	1.161.237.499,16	157.769.000,00	1.324.456.499,16	(100.838.500,84)	92,93
02 03 01	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	5.550.000,00	1.261.745.000,00	158.000.000,00	1.425.295.000,00	5.450.000,00	1.161.237.499,16	157.769.000,00	1.324.456.499,16	(100.838.500,84)	92,93
02 03 03 01 01 041	Program Pembinaan Ketahanan Pangan	5.550.000,00	1.261.745.000,00	158.000.000,00	1.425.295.000,00	5.450.000,00	1.161.237.499,16	157.769.000,00	1.324.456.499,16	(100.838.500,84)	92,93
02 03 03 01 01 041 001	Pembinaan Konsumsi, Kewaspadaan Pangan dan Penyuluhan	-	1.032.865.000,00	158.000.000,00	1.190.865.000,00	-	943.409.547,00	157.769.000,00	1.101.178.547,00	(89.686.453,00)	92,47
02 03 03 01 01 041 002	Pembinaan Ketersediaan dan Distribusi Pangan	5.550.000,00	228.880.000,00	-	234.430.000,00	5.450.000,00	217.827.952,16	-	223.277.952,16	(11.152.047,84)	95,24

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN				REALISASI				BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
		JENIS BELANJA			JUMLAH ANGGARAN BELANJA	JENIS BELANJA			JUMLAH REALISASI BELANJA		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10-6	12
<b>02 04</b>	<b>URUSAN PERTANAHAN</b>	<b>151.620.120,00</b>	<b>788.629.125,00</b>	<b>52.412.609.000,00</b>	<b>53.352.858.245,00</b>	<b>150.049.596,00</b>	<b>682.731.759,00</b>	<b>25.850.363.540,00</b>	<b>26.683.144.895,00</b>	<b>(26.669.713.350,00)</b>	<b>50,01</b>
<b>02 04 01</b>	<b>DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG</b>	<b>151.620.120,00</b>	<b>788.629.125,00</b>	<b>52.412.609.000,00</b>	<b>53.352.858.245,00</b>	<b>150.049.596,00</b>	<b>682.731.759,00</b>	<b>25.850.363.540,00</b>	<b>26.683.144.895,00</b>	<b>(26.669.713.350,00)</b>	<b>50,01</b>
<b>02 04 02 04 01 001</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>86.445.120,00</b>	<b>367.831.520,00</b>	<b>209.593.000,00</b>	<b>663.869.640,00</b>	<b>85.074.596,00</b>	<b>332.473.076,00</b>	<b>171.109.500,00</b>	<b>588.657.172,00</b>	<b>(75.212.468,00)</b>	<b>88,67</b>
02 04 02 04 01 001 018	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	-	146.150.000,00	-	146.150.000,00	-	118.328.383,00	-	118.328.383,00	(27.821.617,00)	80,96
02 04 02 04 01 001 019	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	86.445.120,00	221.681.520,00	209.593.000,00	517.719.640,00	85.074.596,00	214.144.693,00	171.109.500,00	470.328.789,00	(47.390.851,00)	90,85
<b>02 04 02 04 01 002</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>-</b>	<b>113.765.000,00</b>	<b>274.132.000,00</b>	<b>387.897.000,00</b>	<b>-</b>	<b>94.696.026,00</b>	<b>270.829.000,00</b>	<b>365.525.026,00</b>	<b>(22.371.974,00)</b>	<b>94,23</b>
02 04 02 04 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	-	274.132.000,00	274.132.000,00	-	-	270.829.000,00	270.829.000,00	(3.303.000,00)	98,80
02 04 02 04 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	113.765.000,00	-	113.765.000,00	-	94.696.026,00	-	94.696.026,00	(19.068.974,00)	83,24
<b>02 04 02 04 01 006</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>-</b>	<b>63.697.420,00</b>	<b>-</b>	<b>63.697.420,00</b>	<b>-</b>	<b>60.936.880,00</b>	<b>-</b>	<b>60.936.880,00</b>	<b>(2.760.540,00)</b>	<b>95,67</b>
02 04 02 04 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	-	63.697.420,00	-	63.697.420,00	-	60.936.880,00	-	60.936.880,00	(2.760.540,00)	95,67
<b>02 04 02 04 01 042</b>	<b>Program Pengelolaan Pertanahan</b>	<b>65.175.000,00</b>	<b>243.335.185,00</b>	<b>51.928.884.000,00</b>	<b>52.237.394.185,00</b>	<b>64.975.000,00</b>	<b>194.625.777,00</b>	<b>25.408.425.040,00</b>	<b>25.668.025.817,00</b>	<b>(26.569.368.368,00)</b>	<b>49,14</b>
02 04 02 04 01 042 001	Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan	45.650.000,00	97.911.205,00	-	143.561.205,00	45.650.000,00	81.579.230,00	-	127.229.230,00	(16.331.975,00)	88,62
02 04 02 04 01 042 002	Pemanfaatan Pertanahan	4.125.000,00	94.666.300,00	51.878.884.000,00	51.977.675.300,00	4.125.000,00	68.763.287,00	25.360.985.040,00	25.433.873.327,00	(26.543.801.973,00)	48,93
02 04 02 04 01 042 003	Penyelesaian Masalah Pertanahan	15.400.000,00	50.757.680,00	50.000.000,00	116.157.680,00	15.200.000,00	44.283.260,00	47.440.000,00	106.923.260,00	(9.234.420,00)	92,05
<b>02 05</b>	<b>URUSAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>1.947.458.252,00</b>	<b>28.990.953.205,00</b>	<b>9.833.708.543,00</b>	<b>40.772.120.000,00</b>	<b>1.817.197.833,60</b>	<b>27.725.515.517,62</b>	<b>9.239.333.586,77</b>	<b>38.782.046.937,99</b>	<b>(1.990.073.062,01)</b>	<b>95,12</b>
<b>02 05 01</b>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>1.947.458.252,00</b>	<b>28.990.953.205,00</b>	<b>9.833.708.543,00</b>	<b>40.772.120.000,00</b>	<b>1.817.197.833,60</b>	<b>27.725.515.517,62</b>	<b>9.239.333.586,77</b>	<b>38.782.046.937,99</b>	<b>(1.990.073.062,01)</b>	<b>95,12</b>
<b>02 05 02 05 01 001</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.107.313.252,00</b>	<b>1.471.190.160,00</b>	<b>194.700.588,00</b>	<b>2.773.204.000,00</b>	<b>1.092.587.833,60</b>	<b>1.434.364.377,33</b>	<b>172.344.575,00</b>	<b>2.699.296.785,93</b>	<b>(73.907.214,07)</b>	<b>97,33</b>
02 05 02 05 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	175.750.000,00	-	175.750.000,00	-	175.399.248,00	-	175.399.248,00	(350.752,00)	99,80
02 05 02 05 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	1.107.313.252,00	1.295.440.160,00	194.700.588,00	2.597.454.000,00	1.092.587.833,60	1.258.965.129,33	172.344.575,00	2.523.897.537,93	(73.556.462,07)	97,17
<b>02 05 02 05 01 002</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>-</b>	<b>1.850.516.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.850.516.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.790.404.965,06</b>	<b>-</b>	<b>1.790.404.965,06</b>	<b>(60.111.034,94)</b>	<b>96,75</b>
02 05 02 05 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	285.000.000,00	-	285.000.000,00	-	281.523.934,76	-	281.523.934,76	(3.476.065,24)	98,78
02 05 02 05 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	1.565.516.000,00	-	1.565.516.000,00	-	1.508.881.030,30	-	1.508.881.030,30	(56.634.969,70)	96,38
<b>02 05 02 05 01 005</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>-</b>	<b>84.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>84.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>83.950.000,00</b>	<b>-</b>	<b>83.950.000,00</b>	<b>(50.000,00)</b>	<b>99,94</b>
02 05 02 05 01 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	-	84.000.000,00	-	84.000.000,00	-	83.950.000,00	-	83.950.000,00	(50.000,00)	99,94

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN				REALISASI				BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
		JENIS BELANJA			JUMLAH ANGGARAN BELANJA	JENIS BELANJA			JUMLAH REALISASI BELANJA		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10-6	12
02 05 02 05 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	67.178.040,00	91.600.960,00	158.779.000,00	-	66.924.696,00	90.500.000,00	157.424.696,00	(1.354.304,00)	99,15
02 05 02 05 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	-	67.178.040,00	91.600.960,00	158.779.000,00	-	66.924.696,00	90.500.000,00	157.424.696,00	(1.354.304,00)	99,15
02 05 02 05 01 043	Program Penataan dan Pengendalian Dampak Lingkungan	21.325.000,00	1.299.797.080,00	393.647.920,00	1.714.770.000,00	21.325.000,00	1.234.125.375,00	389.169.855,00	1.644.620.230,00	(70.149.770,00)	95,91
02 05 02 05 01 043 001	Kajian Dampak Lingkungan	21.325.000,00	234.962.120,00	77.999.880,00	334.287.000,00	21.325.000,00	187.399.976,00	75.994.000,00	284.718.976,00	(49.568.024,00)	85,17
02 05 02 05 01 043 002	Pengendalian Pencemaran dan Limbah B3	-	1.064.834.960,00	315.648.040,00	1.380.483.000,00	-	1.046.725.399,00	313.175.855,00	1.359.901.254,00	(20.581.746,00)	98,51
02 05 02 05 01 044	Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	11.350.000,00	2.291.774.580,00	359.427.420,00	2.662.552.000,00	11.350.000,00	2.209.048.299,00	358.599.000,00	2.578.997.299,00	(83.554.701,00)	96,86
02 05 02 05 01 044 001	Optimalisasi Sumber Daya Lingkungan Hidup	11.350.000,00	1.629.445.660,00	8.000.340,00	1.648.796.000,00	11.350.000,00	1.553.511.675,00	8.000.000,00	1.572.861.675,00	(75.934.325,00)	95,39
02 05 02 05 01 044 002	Penataan dan Pemantauan Lingkungan	-	199.169.920,00	172.430.080,00	371.600.000,00	-	194.868.376,00	171.602.000,00	366.470.376,00	(5.129.624,00)	98,62
02 05 02 05 01 044 003	Operasional Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan	-	463.159.000,00	178.997.000,00	642.156.000,00	-	460.668.248,00	178.997.000,00	639.665.248,00	(2.490.752,00)	99,61
02 05 02 05 01 045	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik	-	6.931.404.610,00	5.138.605.390,00	12.070.010.000,00	-	6.539.744.345,50	4.697.934.807,98	11.237.679.153,48	(832.330.846,52)	93,10
02 05 02 05 01 045 001	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik	-	985.999.200,00	2.505.199.800,00	3.491.199.000,00	-	954.027.462,00	2.343.745.058,17	3.297.772.520,17	(193.426.479,83)	94,46
02 05 02 05 01 045 002	Pertamanan dan Perindang Jalan	-	5.945.405.410,00	2.633.405.590,00	8.578.811.000,00	-	5.585.716.883,50	2.354.189.749,81	7.939.906.633,31	(638.904.366,69)	92,55
02 05 02 05 01 046	Program Pengelolaan Persampahan	807.470.000,00	14.995.092.735,00	3.655.726.265,00	19.458.289.000,00	691.935.000,00	14.366.953.459,73	3.530.785.348,79	18.589.673.808,52	(868.615.191,48)	95,54
02 05 02 05 01 046 001	Pengurangan Sampah	252.470.000,00	1.062.933.735,00	899.700.265,00	2.215.104.000,00	250.485.000,00	1.025.867.434,00	779.855.303,79	2.056.207.737,79	(158.896.262,21)	92,83
02 05 02 05 01 046 002	Penanganan Sampah	-	3.055.331.000,00	2.756.026.000,00	5.811.357.000,00	-	3.054.561.060,53	2.750.930.045,00	5.805.491.105,53	(5.865.894,47)	99,90
02 05 02 05 01 046 003	Pemungutan Retribusi Kebersihan	-	1.365.132.000,00	-	1.365.132.000,00	-	1.335.551.154,00	-	1.335.551.154,00	(29.580.846,00)	97,83
02 05 02 05 01 046 004	Operasional Pembersihan dan Pengangkutan Sampah	555.000.000,00	9.511.696.000,00	-	10.066.696.000,00	441.450.000,00	8.950.973.811,20	-	9.392.423.811,20	(674.272.188,80)	93,30
02 06	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	830.013.303,00	3.170.171.697,00	1.096.400.000,00	5.096.585.000,00	630.440.736,00	2.978.633.965,00	1.056.716.656,00	4.665.791.357,00	(430.793.643,00)	91,55
02 06 01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	830.013.303,00	3.170.171.697,00	1.096.400.000,00	5.096.585.000,00	630.440.736,00	2.978.633.965,00	1.056.716.656,00	4.665.791.357,00	(430.793.643,00)	91,55
02 06 02 06 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	161.132.800,00	628.517.200,00	224.800.000,00	1.014.450.000,00	159.803.736,00	599.368.987,00	213.195.000,00	972.367.723,00	(42.082.277,00)	95,85
02 06 02 06 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	223.914.000,00	-	223.914.000,00	-	207.821.571,00	-	207.821.571,00	(16.092.429,00)	92,81
02 06 02 06 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	161.132.800,00	404.603.200,00	224.800.000,00	790.536.000,00	159.803.736,00	391.547.416,00	213.195.000,00	764.546.152,00	(25.989.848,00)	96,71
02 06 02 06 03 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	162.102.000,00	65.000.000,00	227.102.000,00	-	111.078.930,00	63.909.500,00	174.988.430,00	(52.113.570,00)	77,05
02 06 02 06 01 002 022	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	2.000.000,00	65.000.000,00	67.000.000,00	-	1.950.000,00	63.909.500,00	65.859.500,00	(1.140.500,00)	98,30
02 06 02 06 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	160.102.000,00	-	160.102.000,00	-	109.128.930,00	-	109.128.930,00	(50.973.070,00)	68,16
02 06 02 06 03 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	8.750.000,00	-	8.750.000,00	-	8.670.000,00	-	8.670.000,00	(80.000,00)	99,09
02 06 02 06 06 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	-	8.750.000,00	-	8.750.000,00	-	8.670.000,00	-	8.670.000,00	(80.000,00)	99,09



KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN				REALISASI				BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
		JENIS BELANJA			JUMLAH ANGGARAN BELANJA	JENIS BELANJA			JUMLAH REALISASI BELANJA		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10-6	12
02 06 02 06 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	37.696.000,00	-	37.696.000,00	-	29.280.900,00	-	29.280.900,00	(8.415.100,00)	77,68
02 06 02 06 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	-	37.696.000,00	-	37.696.000,00	-	29.280.900,00	-	29.280.900,00	(8.415.100,00)	77,68
02 06 02 06 01 047	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	593.700.000,00	1.628.823.000,00	-	2.222.523.000,00	418.987.000,00	1.541.945.550,00	-	1.960.932.550,00	(261.590.450,00)	88,23
02 06 02 06 01 047 001	Pelayanan Identitas Penduduk	269.250.000,00	1.298.675.000,00	-	1.567.925.000,00	96.324.000,00	1.239.395.950,00	-	1.335.719.950,00	(232.205.050,00)	85,19
02 06 02 06 01 047 002	Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk	324.450.000,00	330.148.000,00	-	654.598.000,00	322.663.000,00	302.549.600,00	-	625.212.600,00	(29.385.400,00)	95,51
02 06 02 06 01 048	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	75.180.503,00	397.543.497,00	-	472.724.000,00	51.650.000,00	388.547.658,00	-	440.197.658,00	(32.526.342,00)	93,12
02 06 02 06 01 048 001	Pelayanan Kelahiran dan Kematian	54.000.000,00	347.214.000,00	-	401.214.000,00	32.400.000,00	338.294.481,00	-	370.694.481,00	(30.519.519,00)	92,39
02 06 02 06 01 048 002	Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan	21.180.503,00	50.329.497,00	-	71.510.000,00	19.250.000,00	50.253.177,00	-	69.503.177,00	(2.006.823,00)	97,19
02 06 02 06 01 049	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	-	306.740.000,00	806.600.000,00	1.113.340.000,00	-	299.741.940,00	779.612.156,00	1.079.354.096,00	(33.985.904,00)	96,95
02 06 02 06 01 049 001	Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	-	181.255.000,00	-	181.255.000,00	-	177.220.940,00	-	177.220.940,00	(4.034.060,00)	97,77
02 06 02 06 01 049 002	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	125.485.000,00	806.600.000,00	932.085.000,00	-	122.521.000,00	779.612.156,00	902.133.156,00	(29.951.844,00)	96,79
02 07	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5.765.776.538,00	52.247.800.223,00	4.767.402.535,00	62.780.979.296,00	5.635.627.558,04	49.374.404.793,89	4.487.627.552,64	59.497.659.904,57	(3.283.319.391,43)	94,77
02 07 01	KECAMATAN TEGALREJO	334.465.524,00	4.414.264.476,00	595.415.000,00	5.344.145.000,00	331.373.956,00	4.213.168.356,88	525.699.312,64	5.070.241.625,52	(273.903.374,48)	94,87
02 07 02 07 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	239.015.524,00	425.941.476,00	139.060.000,00	804.017.000,00	236.073.956,00	375.120.378,00	127.664.160,00	738.858.494,00	(65.158.506,00)	91,90
02 07 02 07 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	104.470.000,00	-	104.470.000,00	-	104.340.495,00	-	104.340.495,00	(129.505,00)	99,88
02 07 02 07 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	239.015.524,00	321.471.476,00	139.060.000,00	699.547.000,00	236.073.956,00	270.779.883,00	127.664.160,00	634.517.999,00	(65.029.001,00)	90,70
02 07 02 07 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	72.360.000,00	85.055.000,00	157.415.000,00	-	60.952.800,00	83.782.000,00	144.734.800,00	(12.680.200,00)	91,94
02 07 02 07 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	3.900.000,00	85.055.000,00	88.955.000,00	-	3.800.000,00	83.782.000,00	87.582.000,00	(1.373.000,00)	98,46
02 07 02 07 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	68.460.000,00	-	68.460.000,00	-	57.152.800,00	-	57.152.800,00	(11.307.200,00)	83,48
02 07 02 07 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	11.450.000,00	-	11.450.000,00	-	11.327.425,00	-	11.327.425,00	(122.575,00)	98,93
02 07 02 07 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	-	11.450.000,00	-	11.450.000,00	-	11.327.425,00	-	11.327.425,00	(122.575,00)	98,93

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN				REALISASI				BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
		JENIS BELANJA			JUMLAH ANGGARAN BELANJA	JENIS BELANJA			JUMLAH REALISASI BELANJA		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10-6	12
<b>02 07 02 07 01 050</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo</b>	<b>95.450.000,00</b>	<b>3.904.513.000,00</b>	<b>371.300.000,00</b>	<b>4.371.263.000,00</b>	<b>95.300.000,00</b>	<b>3.765.767.753,88</b>	<b>314.253.152,64</b>	<b>4.175.320.906,52</b>	<b>(195.942.093,48)</b>	<b>95,52</b>
02 07 02 07 01 050 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Tegalrejo	45.650.000,00	285.516.000,00	-	331.166.000,00	45.650.000,00	277.911.250,00	-	323.561.250,00	(7.604.750,00)	97,70
02 07 02 07 01 050 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Tegalrejo	-	188.450.000,00	-	188.450.000,00	-	185.279.769,00	-	185.279.769,00	(3.170.231,00)	98,32
02 07 02 07 01 050 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Tegalrejo	24.000.000,00	460.873.000,00	-	484.873.000,00	24.000.000,00	440.544.650,00	-	464.544.650,00	(20.328.350,00)	95,81
02 07 02 07 01 050 004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalrejo	3.500.000,00	486.076.000,00	30.800.000,00	520.376.000,00	3.350.000,00	473.784.750,00	30.766.940,00	507.901.690,00	(12.474.310,00)	97,60
02 07 02 07 01 050 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kricak	-	592.199.000,00	-	592.199.000,00	-	579.891.500,00	-	579.891.500,00	(12.307.500,00)	97,92
02 07 02 07 01 050 006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Karangwaru	1.500.000,00	329.196.000,00	170.500.000,00	501.196.000,00	1.500.000,00	325.082.000,00	132.645.956,80	459.227.956,80	(41.968.043,20)	91,63
02 07 02 07 01 050 007	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bener	-	306.463.000,00	170.000.000,00	476.463.000,00	-	295.930.500,00	150.840.255,84	446.770.755,84	(29.692.244,16)	93,77
02 07 02 07 01 050 008	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Tegalrejo	20.800.000,00	1.255.740.000,00	-	1.276.540.000,00	20.800.000,00	1.187.343.334,88	-	1.208.143.334,88	(68.396.665,12)	94,64
<b>02 07 02</b>	<b>KECAMATAN JETIS</b>	<b>339.827.901,00</b>	<b>3.775.398.100,00</b>	<b>304.956.000,00</b>	<b>4.420.182.001,00</b>	<b>332.887.901,00</b>	<b>3.563.402.081,90</b>	<b>303.415.084,00</b>	<b>4.199.705.066,90</b>	<b>(220.476.934,10)</b>	<b>95,01</b>
<b>02 07 02 07 02 001</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>266.867.901,00</b>	<b>500.519.700,00</b>	<b>210.389.000,00</b>	<b>977.776.601,00</b>	<b>262.547.901,00</b>	<b>477.780.884,00</b>	<b>209.032.930,00</b>	<b>949.361.715,00</b>	<b>(28.414.886,00)</b>	<b>97,09</b>
02 07 02 07 02 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	101.444.000,00	-	101.444.000,00	-	97.645.285,00	-	97.645.285,00	(3.798.715,00)	96,26
02 07 02 07 02 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	266.867.901,00	399.075.700,00	210.389.000,00	876.332.601,00	262.547.901,00	380.135.599,00	209.032.930,00	851.716.430,00	(24.616.171,00)	97,19
<b>02 07 02 07 02 002</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>-</b>	<b>102.624.000,00</b>	<b>94.567.000,00</b>	<b>197.191.000,00</b>	<b>-</b>	<b>85.231.244,75</b>	<b>94.382.154,00</b>	<b>179.613.398,75</b>	<b>(17.577.601,25)</b>	<b>91,09</b>
02 07 02 07 02 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	22.600.000,00	94.567.000,00	117.167.000,00	-	21.850.992,75	94.382.154,00	116.233.146,75	(933.853,25)	99,20
02 07 02 07 02 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	80.024.000,00	-	80.024.000,00	-	63.380.252,00	-	63.380.252,00	(16.643.748,00)	79,20
<b>02 07 02 07 02 006</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>-</b>	<b>8.472.000,00</b>	<b>-</b>	<b>8.472.000,00</b>	<b>-</b>	<b>8.462.575,00</b>	<b>-</b>	<b>8.462.575,00</b>	<b>(9.425,00)</b>	<b>99,89</b>
02 07 02 07 02 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian	-	8.472.000,00	-	8.472.000,00	-	8.462.575,00	-	8.462.575,00	(9.425,00)	99,89

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN				REALISASI				BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
		JENIS BELANJA			JUMLAH ANGGARAN BELANJA	JENIS BELANJA			JUMLAH REALISASI BELANJA		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10-6	12
<b>02 07 02 07 02 051</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Jetis</b>	<b>72.960.000,00</b>	<b>3.163.782.400,00</b>	-	<b>3.236.742.400,00</b>	<b>70.340.000,00</b>	<b>2.991.927.378,15</b>	-	<b>3.062.267.378,15</b>	<b>(174.475.021,85)</b>	<b>94,61</b>
02 07 02 07 02 051 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Jetis	49.860.000,00	205.500.000,00	-	255.360.000,00	48.440.000,00	177.697.800,00	-	226.137.800,00	(29.222.200,00)	88,56
02 07 02 07 02 051 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Jetis	1.600.000,00	212.082.000,00	-	213.682.000,00	1.600.000,00	211.442.438,00	-	213.042.438,00	(639.562,00)	99,70
02 07 02 07 02 051 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Jetis	11.850.000,00	360.374.000,00	-	372.224.000,00	11.850.000,00	356.772.000,00	-	368.622.000,00	(3.602.000,00)	99,03
02 07 02 07 02 051 004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bumijo	2.600.000,00	546.267.000,00	-	548.867.000,00	2.600.000,00	538.460.147,00	-	541.060.147,00	(7.806.853,00)	98,58
02 07 02 07 02 051 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Cokrodingratan	1.200.000,00	512.822.000,00	-	514.022.000,00	-	505.598.700,00	-	505.598.700,00	(8.423.300,00)	98,36
02 07 02 07 02 051 006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gowongan	-	532.746.000,00	-	532.746.000,00	-	505.262.000,00	-	505.262.000,00	(27.484.000,00)	94,84
02 07 02 07 02 051 007	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Jetis	5.850.000,00	793.991.400,00	-	799.841.400,00	5.850.000,00	696.694.293,15	-	702.544.293,15	(97.297.106,85)	87,84
<b>02 07 03</b>	<b>KECAMATAN GONDOKUSUMAN</b>	<b>444.225.524,00</b>	<b>5.881.506.645,00</b>	<b>186.303.250,00</b>	<b>6.512.035.419,00</b>	<b>405.316.575,00</b>	<b>5.419.481.161,67</b>	<b>167.807.700,00</b>	<b>5.992.605.436,67</b>	<b>(519.429.982,33)</b>	<b>92,02</b>
<b>02 07 02 07 03 001</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>254.295.524,00</b>	<b>693.862.500,00</b>	<b>186.303.250,00</b>	<b>1.134.461.274,00</b>	<b>253.751.575,00</b>	<b>438.025.783,00</b>	<b>167.807.700,00</b>	<b>859.585.058,00</b>	<b>(274.876.216,00)</b>	<b>75,77</b>
02 07 02 07 03 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	99.331.000,00	-	99.331.000,00	-	99.077.600,00	-	99.077.600,00	(253.400,00)	99,74
02 07 02 07 03 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	254.295.524,00	594.531.500,00	186.303.250,00	1.035.130.274,00	253.751.575,00	338.948.183,00	167.807.700,00	760.507.458,00	(274.622.816,00)	73,47
<b>02 07 02 07 03 002</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>-</b>	<b>722.068.374,00</b>	<b>-</b>	<b>722.068.374,00</b>	<b>-</b>	<b>668.089.415,04</b>	<b>-</b>	<b>668.089.415,04</b>	<b>(53.978.958,96)</b>	<b>92,52</b>
02 07 02 07 03 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	633.042.374,00	-	633.042.374,00	-	600.548.077,79	-	600.548.077,79	(32.494.296,21)	94,87
02 07 02 07 03 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	89.026.000,00	-	89.026.000,00	-	67.541.337,25	-	67.541.337,25	(21.484.662,75)	75,87
<b>02 07 02 07 03 006</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>-</b>	<b>5.385.000,00</b>	<b>-</b>	<b>5.385.000,00</b>	<b>-</b>	<b>5.379.000,00</b>	<b>-</b>	<b>5.379.000,00</b>	<b>(6.000,00)</b>	<b>99,89</b>
02 07 02 07 03 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	-	5.385.000,00	-	5.385.000,00	-	5.379.000,00	-	5.379.000,00	(6.000,00)	99,89

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN				REALISASI				BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
		JENIS BELANJA			JUMLAH ANGGARAN BELANJA	JENIS BELANJA			JUMLAH REALISASI BELANJA		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10-6	12
<b>02 07 02 07 03 052</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Gondokusuman</b>	<b>189.930.000,00</b>	<b>4.460.190.771,00</b>	-	<b>4.650.120.771,00</b>	<b>151.565.000,00</b>	<b>4.307.986.963,63</b>	-	<b>4.459.551.963,63</b>	<b>(190.568.807,37)</b>	<b>95,90</b>
02 07 02 07 03 052 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gondokusuman	69.660.000,00	130.565.500,00	-	200.225.500,00	39.500.000,00	77.608.800,00	-	117.108.800,00	(83.116.700,00)	58,49
02 07 02 07 03 052 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gondokusuman	-	55.090.594,00	-	55.090.594,00	-	55.090.594,00	-	55.090.594,00	-	100,00
02 07 02 07 03 052 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondokusuman	91.325.000,00	339.257.500,00	-	430.582.500,00	91.325.000,00	337.396.500,00	-	428.721.500,00	(1.861.000,00)	99,57
02 07 02 07 03 052 004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Demangan	2.200.000,00	514.725.000,00	-	516.925.000,00	2.200.000,00	507.741.000,00	-	509.941.000,00	(6.984.000,00)	98,65
02 07 02 07 03 052 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kotabaru	2.400.000,00	524.643.000,00	-	527.043.000,00	2.400.000,00	520.332.100,00	-	522.732.100,00	(4.310.900,00)	99,18
02 07 02 07 03 052 006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Klitren	4.400.000,00	495.991.474,00	-	500.391.474,00	4.400.000,00	466.922.200,00	-	471.322.200,00	(29.069.274,00)	94,19
02 07 02 07 03 052 007	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Baciro	3.150.000,00	527.848.308,00	-	530.998.308,00	3.150.000,00	481.664.100,00	-	484.814.100,00	(46.184.208,00)	91,30
02 07 02 07 03 052 008	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Terban	7.840.000,00	551.575.225,00	-	559.415.225,00	7.240.000,00	541.106.000,00	-	548.346.000,00	(11.069.225,00)	98,02
02 07 02 07 03 052 009	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondokusuman	8.955.000,00	1.320.494.170,00	-	1.329.449.170,00	1.350.000,00	1.320.125.669,63	-	1.321.475.669,63	(7.973.500,37)	99,40
<b>02 07 04</b>	<b>KECAMATAN DANUREJAN</b>	<b>244.880.118,00</b>	<b>3.260.213.479,00</b>	<b>146.224.203,00</b>	<b>3.651.317.800,00</b>	<b>237.696.206,72</b>	<b>3.023.154.700,53</b>	<b>142.586.175,00</b>	<b>3.403.437.082,25</b>	<b>(247.880.717,75)</b>	<b>93,21</b>
<b>02 07 02 07 04 001</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>158.035.118,00</b>	<b>457.080.679,00</b>	<b>101.224.203,00</b>	<b>716.340.000,00</b>	<b>157.646.206,72</b>	<b>392.527.636,62</b>	<b>98.479.175,00</b>	<b>648.653.018,34</b>	<b>(67.686.981,66)</b>	<b>90,55</b>
02 07 02 07 04 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	123.118.000,00	-	123.118.000,00	-	117.597.700,00	-	117.597.700,00	(5.520.300,00)	95,52
02 07 02 07 04 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	158.035.118,00	333.962.679,00	101.224.203,00	593.222.000,00	157.646.206,72	274.929.936,62	98.479.175,00	531.055.318,34	(62.166.681,66)	89,52
<b>02 07 02 07 04 002</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>-</b>	<b>94.370.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>139.370.000,00</b>	<b>-</b>	<b>42.855.549,00</b>	<b>44.107.000,00</b>	<b>86.962.549,00</b>	<b>(52.407.451,00)</b>	<b>62,40</b>
02 07 02 07 04 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	17.440.000,00	45.000.000,00	62.440.000,00	-	10.503.000,00	44.107.000,00	54.610.000,00	(7.830.000,00)	87,46
02 07 02 07 04 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	76.930.000,00	-	76.930.000,00	-	32.352.549,00	-	32.352.549,00	(44.577.451,00)	42,05

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN				REALISASI				BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
		JENIS BELANJA			JUMLAH ANGGARAN BELANJA	JENIS BELANJA			JUMLAH REALISASI BELANJA		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10-6	12
02 07 02 07 04 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	6.397.000,00	-	6.397.000,00	-	6.199.000,00	-	6.199.000,00	(198.000,00)	96,90
02 07 02 07 04 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	-	6.397.000,00	-	6.397.000,00	-	6.199.000,00	-	6.199.000,00	(198.000,00)	96,90
02 07 02 07 04 053	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan	86.845.000,00	2.702.365.800,00	-	2.789.210.800,00	80.050.000,00	2.581.572.514,91	-	2.661.622.514,91	(127.588.285,09)	95,43
02 07 02 07 04 053 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Danurejan	64.000.000,00	148.964.000,00	-	212.964.000,00	58.000.000,00	113.806.300,00	-	171.806.300,00	(41.157.700,00)	80,67
02 07 02 07 04 053 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Danurejan	-	118.529.000,00	-	118.529.000,00	-	114.447.236,64	-	114.447.236,64	(4.081.763,36)	96,56
02 07 02 07 04 053 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Danurejan	795.000,00	348.206.000,00	-	349.001.000,00	-	301.376.000,00	-	301.376.000,00	(47.625.000,00)	86,35
02 07 02 07 04 053 004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryatmajan	4.200.000,00	504.334.000,00	-	508.534.000,00	4.200.000,00	495.927.640,00	-	500.127.640,00	(8.406.360,00)	98,35
02 07 02 07 04 053 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung	4.200.000,00	485.707.000,00	-	489.907.000,00	4.200.000,00	474.735.438,27	-	478.935.438,27	(10.971.561,73)	97,76
02 07 02 07 04 053 006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bausasran	4.200.000,00	492.394.000,00	-	496.594.000,00	4.200.000,00	484.969.000,00	-	489.169.000,00	(7.425.000,00)	98,50
02 07 02 07 04 053 007	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Danurejan	9.450.000,00	604.231.800,00	-	613.681.800,00	9.450.000,00	596.310.900,00	-	605.760.900,00	(7.920.900,00)	98,71
02 07 05	<b>KECAMATAN GEDONGTENGEN</b>	<b>316.585.807,00</b>	<b>2.367.430.276,00</b>	<b>427.347.890,00</b>	<b>3.111.363.973,00</b>	<b>313.105.807,00</b>	<b>2.308.520.583,37</b>	<b>406.041.620,00</b>	<b>3.027.668.010,37</b>	<b>(83.695.962,63)</b>	<b>97,31</b>
02 07 02 07 05 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	237.935.807,00	440.404.303,00	148.547.890,00	826.888.000,00	234.455.807,00	422.060.850,00	128.599.620,00	785.116.277,00	(41.771.723,00)	94,95
02 07 02 07 05 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	102.102.000,00	-	102.102.000,00	-	98.493.286,00	-	98.493.286,00	(3.608.714,00)	96,47
02 07 02 07 05 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	237.935.807,00	338.302.303,00	148.547.890,00	724.786.000,00	234.455.807,00	323.567.564,00	128.599.620,00	686.622.991,00	(38.163.009,00)	94,73
02 07 02 07 05 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	65.029.500,00	278.800.000,00	343.829.500,00	-	55.663.574,00	277.442.000,00	333.105.574,00	(10.723.926,00)	96,88
02 07 02 07 05 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	10.651.500,00	278.800.000,00	289.451.500,00	-	10.585.110,00	277.442.000,00	288.027.110,00	(1.424.390,00)	99,51
02 07 02 07 05 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	54.378.000,00	-	54.378.000,00	-	45.078.464,00	-	45.078.464,00	(9.299.536,00)	82,90
02 07 02 07 05 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	8.385.000,00	-	8.385.000,00	-	8.354.800,00	-	8.354.800,00	(30.200,00)	99,64
02 07 02 07 05 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	-	8.385.000,00	-	8.385.000,00	-	8.354.800,00	-	8.354.800,00	(30.200,00)	99,64

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN				REALISASI				BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
		JENIS BELANJA			JUMLAH ANGGARAN BELANJA	JENIS BELANJA			JUMLAH REALISASI BELANJA		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10-6	12
<b>02 07 02 07 05 054</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Gedongtengen</b>	<b>78.650.000,00</b>	<b>1.853.611.473,00</b>	-	<b>1.932.261.473,00</b>	<b>78.650.000,00</b>	<b>1.822.441.359,37</b>	-	<b>1.901.091.359,37</b>	<b>(31.170.113,63)</b>	<b>98,39</b>
02 07 02 07 05 054 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gedongtengen	56.400.000,00	67.803.000,00	-	124.203.000,00	56.400.000,00	63.533.000,00	-	119.933.000,00	(4.270.000,00)	96,56
02 07 02 07 05 054 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gedongtengen	-	94.069.973,00	-	94.069.973,00	-	90.820.313,00	-	90.820.313,00	(3.249.660,00)	96,55
02 07 02 07 05 054 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gedongtengen	7.800.000,00	153.124.000,00	-	160.924.000,00	7.800.000,00	151.633.750,00	-	159.433.750,00	(1.490.250,00)	99,07
02 07 02 07 05 054 004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pringgokusuman	2.250.000,00	548.738.900,00	-	550.988.900,00	2.250.000,00	543.729.000,00	-	545.979.000,00	(5.009.900,00)	99,09
02 07 02 07 05 054 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sosromenduran	700.000,00	524.788.600,00	-	525.488.600,00	700.000,00	516.976.900,00	-	517.676.900,00	(7.811.700,00)	98,51
02 07 02 07 05 054 006	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gedongtengen	11.500.000,00	465.087.000,00	-	476.587.000,00	11.500.000,00	455.748.396,37	-	467.248.396,37	(9.338.603,63)	98,04
<b>02 07 06</b>	<b>KECAMATAN PAKUALAMAN</b>	<b>395.826.868,00</b>	<b>1.925.281.832,00</b>	<b>672.644.300,00</b>	<b>2.993.753.000,00</b>	<b>395.826.868,00</b>	<b>1.888.814.344,00</b>	<b>642.104.300,00</b>	<b>2.926.745.512,00</b>	<b>(67.007.488,00)</b>	<b>97,76</b>
<b>02 07 02 07 06 001</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>255.101.868,00</b>	<b>276.241.832,00</b>	<b>573.109.300,00</b>	<b>1.104.453.000,00</b>	<b>255.101.868,00</b>	<b>261.543.345,00</b>	<b>542.801.300,00</b>	<b>1.059.446.513,00</b>	<b>(45.006.487,00)</b>	<b>95,92</b>
02 07 02 07 06 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	48.160.000,00	-	48.160.000,00	-	47.462.000,00	-	47.462.000,00	(698.000,00)	98,55
02 07 02 07 06 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	255.101.868,00	228.081.832,00	573.109.300,00	1.056.293.000,00	255.101.868,00	214.081.345,00	542.801.300,00	1.011.984.513,00	(44.308.487,00)	95,81
<b>02 07 02 07 06 002</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>-</b>	<b>54.510.000,00</b>	<b>99.535.000,00</b>	<b>154.045.000,00</b>	<b>-</b>	<b>51.575.340,00</b>	<b>99.303.000,00</b>	<b>150.878.340,00</b>	<b>(3.166.660,00)</b>	<b>97,94</b>
02 07 02 07 06 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	2.000.000,00	99.535.000,00	101.535.000,00	-	2.000.000,00	99.303.000,00	101.303.000,00	(232.000,00)	99,77
02 07 02 07 06 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	52.510.000,00	-	52.510.000,00	-	49.575.340,00	-	49.575.340,00	(2.934.660,00)	94,41
<b>02 07 02 07 06 006</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>-</b>	<b>11.686.000,00</b>	<b>-</b>	<b>11.686.000,00</b>	<b>-</b>	<b>11.685.100,00</b>	<b>-</b>	<b>11.685.100,00</b>	<b>(900,00)</b>	<b>99,99</b>
02 07 02 07 06 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	-	11.686.000,00	-	11.686.000,00	-	11.685.100,00	-	11.685.100,00	(900,00)	99,99

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN				REALISASI				BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
		JENIS BELANJA			JUMLAH ANGGARAN BELANJA	JENIS BELANJA			JUMLAH REALISASI BELANJA		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10-6	12
<b>02 07 02 07 06 055</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman</b>	<b>140.725.000,00</b>	<b>1.582.844.000,00</b>	-	<b>1.723.569.000,00</b>	<b>140.725.000,00</b>	<b>1.564.010.559,00</b>	-	<b>1.704.735.559,00</b>	<b>(18.833.441,00)</b>	<b>98,91</b>
02 07 02 07 06 055 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Pakualaman	109.700.000,00	42.319.000,00	-	152.019.000,00	109.700.000,00	41.183.500,00	-	150.883.500,00	(1.135.500,00)	99,25
02 07 02 07 06 055 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Pakualaman	4.200.000,00	76.493.000,00	-	80.693.000,00	4.200.000,00	74.867.659,00	-	79.067.659,00	(1.625.341,00)	97,99
02 07 02 07 06 055 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Pakualaman	6.350.000,00	167.518.000,00	-	173.868.000,00	6.350.000,00	166.953.000,00	-	173.303.000,00	(565.000,00)	99,68
02 07 02 07 06 055 004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purwokinanti	5.250.000,00	558.001.000,00	-	563.251.000,00	5.250.000,00	555.122.400,00	-	560.372.400,00	(2.878.600,00)	99,49
02 07 02 07 06 055 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gunungketur	7.025.000,00	485.683.000,00	-	492.708.000,00	7.025.000,00	474.309.000,00	-	481.334.000,00	(11.374.000,00)	97,69
02 07 02 07 06 055 006	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Pakualaman	8.200.000,00	252.830.000,00	-	261.030.000,00	8.200.000,00	251.575.000,00	-	259.775.000,00	(1.255.000,00)	99,52
<b>02 07 07</b>	<b>KECAMATAN NGAMPILAN</b>	<b>272.961.868,00</b>	<b>2.534.622.800,00</b>	<b>384.914.332,00</b>	<b>3.192.499.000,00</b>	<b>271.801.868,00</b>	<b>2.393.304.254,55</b>	<b>361.042.542,00</b>	<b>3.026.148.664,55</b>	<b>(166.350.335,45)</b>	<b>94,79</b>
<b>02 07 02 07 07 001</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>196.701.868,00</b>	<b>358.035.800,00</b>	<b>92.097.332,00</b>	<b>646.835.000,00</b>	<b>196.701.868,00</b>	<b>351.254.362,00</b>	<b>75.292.542,00</b>	<b>623.248.772,00</b>	<b>(23.586.228,00)</b>	<b>96,35</b>
02 07 02 07 07 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	70.263.000,00	-	70.263.000,00	-	70.254.000,00	-	70.254.000,00	(9.000,00)	99,99
02 07 02 07 07 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	196.701.868,00	287.772.800,00	92.097.332,00	576.572.000,00	196.701.868,00	281.000.362,00	75.292.542,00	552.994.772,00	(23.577.228,00)	95,91
<b>02 07 02 07 07 002</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>-</b>	<b>56.813.000,00</b>	<b>292.817.000,00</b>	<b>349.630.000,00</b>	<b>-</b>	<b>54.757.856,00</b>	<b>285.750.000,00</b>	<b>340.507.856,00</b>	<b>(9.122.144,00)</b>	<b>97,39</b>
02 07 02 07 07 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	4.523.000,00	292.817.000,00	297.340.000,00	-	4.508.156,00	285.750.000,00	290.258.156,00	(7.081.844,00)	97,62
02 07 02 07 07 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	52.290.000,00	-	52.290.000,00	-	50.249.700,00	-	50.249.700,00	(2.040.300,00)	96,10
<b>02 07 02 07 07 006</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>-</b>	<b>11.516.000,00</b>	<b>-</b>	<b>11.516.000,00</b>	<b>-</b>	<b>11.366.000,00</b>	<b>-</b>	<b>11.366.000,00</b>	<b>(150.000,00)</b>	<b>98,70</b>
02 07 02 07 07 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	-	11.516.000,00	-	11.516.000,00	-	11.366.000,00	-	11.366.000,00	(150.000,00)	98,70

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN				REALISASI				BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
		JENIS BELANJA			JUMLAH ANGGARAN BELANJA	JENIS BELANJA			JUMLAH REALISASI BELANJA		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10-6	12
<b>02 07 02 07 07 056</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Ngampilan</b>	<b>76.260.000,00</b>	<b>2.108.258.000,00</b>	-	<b>2.184.518.000,00</b>	<b>75.100.000,00</b>	<b>1.975.926.036,55</b>	-	<b>2.051.026.036,55</b>	<b>(133.491.963,45)</b>	<b>93,89</b>
02 07 02 07 07 056 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Ngampilan	38.860.000,00	80.696.000,00	-	119.556.000,00	37.700.000,00	44.983.000,00	-	82.683.000,00	(36.873.000,00)	69,16
02 07 02 07 07 056 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Ngampilan	-	51.750.000,00	-	51.750.000,00	-	51.237.697,00	-	51.237.697,00	(512.303,00)	99,01
02 07 02 07 07 056 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Ngampilan	11.500.000,00	209.127.000,00	-	220.627.000,00	11.500.000,00	199.291.000,00	-	210.791.000,00	(9.836.000,00)	95,54
02 07 02 07 07 056 004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngampilan	4.000.000,00	523.422.000,00	-	527.422.000,00	4.000.000,00	515.963.117,00	-	519.963.117,00	(7.458.883,00)	98,59
02 07 02 07 07 056 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Notoprajan	7.000.000,00	546.922.000,00	-	553.922.000,00	7.000.000,00	529.586.900,00	-	536.586.900,00	(17.335.100,00)	96,87
02 07 02 07 07 056 006	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Ngampilan	14.900.000,00	696.341.000,00	-	711.241.000,00	14.900.000,00	634.864.322,55	-	649.764.322,55	(61.476.677,45)	91,36
<b>02 07 08</b>	<b>KECAMATAN WIROBRAJAN</b>	<b>316.035.824,00</b>	<b>3.697.044.276,00</b>	<b>368.361.900,00</b>	<b>4.381.442.000,00</b>	<b>315.331.120,00</b>	<b>3.502.300.528,29</b>	<b>351.236.925,00</b>	<b>4.168.868.573,29</b>	<b>(212.573.426,71)</b>	<b>95,15</b>
<b>02 07 02 07 08 001</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>252.535.824,00</b>	<b>258.420.310,00</b>	<b>237.418.000,00</b>	<b>748.374.134,00</b>	<b>251.871.120,00</b>	<b>238.776.943,00</b>	<b>220.654.925,00</b>	<b>711.302.988,00</b>	<b>(37.071.146,00)</b>	<b>95,05</b>
02 07 02 07 08 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	62.819.000,00	-	62.819.000,00	-	57.251.500,00	-	57.251.500,00	(5.567.500,00)	91,14
02 07 02 07 08 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	252.535.824,00	195.601.310,00	237.418.000,00	685.555.134,00	251.871.120,00	181.525.443,00	220.654.925,00	654.051.488,00	(31.503.646,00)	95,40
<b>02 07 02 07 08 002</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>-</b>	<b>148.853.728,00</b>	<b>128.443.900,00</b>	<b>277.297.628,00</b>	<b>-</b>	<b>126.008.229,35</b>	<b>128.082.000,00</b>	<b>254.090.229,35</b>	<b>(23.207.398,65)</b>	<b>91,63</b>
02 07 02 07 08 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	79.319.728,00	128.443.900,00	207.763.628,00	-	78.277.728,00	128.082.000,00	206.359.728,00	(1.403.900,00)	99,32
02 07 02 07 08 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	69.534.000,00	-	69.534.000,00	-	47.730.501,35	-	47.730.501,35	(21.803.498,65)	68,64
<b>02 07 02 07 08 006</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>-</b>	<b>15.524.200,00</b>	<b>-</b>	<b>15.524.200,00</b>	<b>-</b>	<b>14.941.420,00</b>	<b>-</b>	<b>14.941.420,00</b>	<b>(582.780,00)</b>	<b>96,25</b>
02 07 02 07 08 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	-	15.524.200,00	-	15.524.200,00	-	14.941.420,00	-	14.941.420,00	(582.780,00)	96,25



KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN				REALISASI				BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
		JENIS BELANJA			JUMLAH ANGGARAN BELANJA	JENIS BELANJA			JUMLAH REALISASI BELANJA		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10-6	12
<b>02 07 02 07 08 057</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Wirobrajan</b>	<b>63.500.000,00</b>	<b>3.274.246.038,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>3.340.246.038,00</b>	<b>63.460.000,00</b>	<b>3.122.573.935,94</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>3.188.533.935,94</b>	<b>(151.712.102,06)</b>	<b>95,46</b>
02 07 02 07 08 057 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Wirobrajan	50.000.000,00	197.506.000,00	-	247.506.000,00	49.960.000,00	189.113.500,00	-	239.073.500,00	(8.432.500,00)	96,59
02 07 02 07 08 057 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Wirobrajan	-	96.282.491,00	-	96.282.491,00	-	94.075.075,00	-	94.075.075,00	(2.207.416,00)	97,71
02 07 02 07 08 057 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Wirobrajan	2.250.000,00	223.076.200,00	-	225.326.200,00	2.250.000,00	219.287.700,00	-	221.537.700,00	(3.788.500,00)	98,32
02 07 02 07 08 057 004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pakuncen	3.750.000,00	546.666.000,00	-	550.416.000,00	3.750.000,00	537.163.500,00	-	540.913.500,00	(9.502.500,00)	98,27
02 07 02 07 08 057 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirobrajan	3.750.000,00	523.586.000,00	-	527.336.000,00	3.750.000,00	504.196.660,00	-	507.946.660,00	(19.389.340,00)	96,32
02 07 02 07 08 057 006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan	3.750.000,00	525.187.000,00	-	528.937.000,00	3.750.000,00	518.198.270,00	-	521.948.270,00	(6.988.730,00)	98,68
02 07 02 07 08 057 007	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Wirobrajan	-	1.161.942.347,00	2.500.000,00	1.164.442.347,00	-	1.060.539.230,94	2.500.000,00	1.063.039.230,94	(101.403.116,06)	91,29
<b>02 07 09</b>	<b>KECAMATAN MANTRIJERON</b>	<b>293.103.956,00</b>	<b>3.481.837.247,00</b>	<b>463.429.000,00</b>	<b>4.238.370.203,00</b>	<b>289.173.956,00</b>	<b>3.370.902.358,41</b>	<b>423.866.450,00</b>	<b>4.083.942.764,41</b>	<b>(154.427.438,59)</b>	<b>96,36</b>
<b>02 07 02 07 09 001</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>172.633.956,00</b>	<b>385.822.900,00</b>	<b>213.302.000,00</b>	<b>771.758.856,00</b>	<b>171.793.956,00</b>	<b>359.561.146,00</b>	<b>173.739.450,00</b>	<b>705.094.552,00</b>	<b>(66.664.304,00)</b>	<b>91,36</b>
02 07 02 07 09 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	71.254.000,00	-	71.254.000,00	-	71.065.100,00	-	71.065.100,00	(188.900,00)	99,73
02 07 02 07 09 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	172.633.956,00	314.568.900,00	213.302.000,00	700.504.856,00	171.793.956,00	288.496.046,00	173.739.450,00	634.029.452,00	(66.475.404,00)	90,51
<b>02 07 02 07 09 002</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>-</b>	<b>70.363.712,00</b>	<b>247.727.000,00</b>	<b>318.090.712,00</b>	<b>-</b>	<b>54.308.266,00</b>	<b>247.727.000,00</b>	<b>302.035.266,00</b>	<b>(16.055.446,00)</b>	<b>94,95</b>
02 07 02 07 09 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	3.963.712,00	247.727.000,00	251.690.712,00	-	3.963.712,00	247.727.000,00	251.690.712,00	-	100,00
02 07 02 07 09 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	66.400.000,00	-	66.400.000,00	-	50.344.554,00	-	50.344.554,00	(16.055.446,00)	75,82
<b>02 07 02 07 09 006</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>-</b>	<b>5.220.000,00</b>	<b>-</b>	<b>5.220.000,00</b>	<b>-</b>	<b>5.101.000,00</b>	<b>-</b>	<b>5.101.000,00</b>	<b>(119.000,00)</b>	<b>97,72</b>
02 07 02 07 09 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	-	5.220.000,00	-	5.220.000,00	-	5.101.000,00	-	5.101.000,00	(119.000,00)	97,72

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN				REALISASI				BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
		JENIS BELANJA			JUMLAH ANGGARAN BELANJA	JENIS BELANJA			JUMLAH REALISASI BELANJA		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10-6	12
<b>02 07 02 07 09 058</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron</b>	<b>120.470.000,00</b>	<b>3.020.430.635,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>3.143.300.635,00</b>	<b>117.380.000,00</b>	<b>2.951.931.946,41</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>3.071.711.946,41</b>	<b>(71.588.688,59)</b>	<b>97,72</b>
02 07 02 07 09 058 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mantrijeron	66.570.000,00	135.620.000,00	-	202.190.000,00	64.230.000,00	97.960.000,00	-	162.190.000,00	(40.000.000,00)	80,22
02 07 02 07 09 058 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mantrijeron	-	122.755.237,00	-	122.755.237,00	-	121.880.237,00	-	121.880.237,00	(875.000,00)	99,29
02 07 02 07 09 058 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mantrijeron	23.350.000,00	227.257.500,00	2.400.000,00	253.007.500,00	22.850.000,00	221.745.500,00	2.400.000,00	246.995.500,00	(6.012.000,00)	97,62
02 07 02 07 09 058 004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gedongkiwo	10.200.000,00	627.487.400,00	-	637.687.400,00	10.000.000,00	616.405.300,00	-	626.405.300,00	(11.282.100,00)	98,23
02 07 02 07 09 058 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryodiningratan	5.100.000,00	534.542.200,00	-	539.642.200,00	5.100.000,00	532.657.200,00	-	537.757.200,00	(1.885.000,00)	99,65
02 07 02 07 09 058 006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Mantrijeron	2.700.000,00	534.856.400,00	-	537.556.400,00	2.700.000,00	528.350.600,00	-	531.050.600,00	(6.505.800,00)	98,79
02 07 02 07 09 058 007	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mantrijeron	12.550.000,00	837.911.898,00	-	850.461.898,00	12.500.000,00	832.933.109,41	-	845.433.109,41	(5.028.788,59)	99,41
<b>02 07 10</b>	<b>KECAMATAN KRATON</b>	<b>384.412.000,00</b>	<b>3.334.521.000,00</b>	<b>48.000.000,00</b>	<b>3.766.933.000,00</b>	<b>354.464.780,00</b>	<b>3.080.388.446,59</b>	<b>45.119.300,00</b>	<b>3.479.972.526,59</b>	<b>(286.960.473,41)</b>	<b>92,38</b>
<b>02 07 02 07 10 001</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>303.177.000,00</b>	<b>405.802.000,00</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>731.979.000,00</b>	<b>302.969.780,00</b>	<b>330.129.324,00</b>	<b>20.779.300,00</b>	<b>653.878.404,00</b>	<b>(78.100.596,00)</b>	<b>89,33</b>
02 07 02 07 10 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	103.328.000,00	-	103.328.000,00	-	92.530.850,00	-	92.530.850,00	(10.797.150,00)	89,55
02 07 02 07 10 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	303.177.000,00	302.474.000,00	23.000.000,00	628.651.000,00	302.969.780,00	237.598.474,00	20.779.300,00	561.347.554,00	(67.303.446,00)	89,29
<b>02 07 02 07 10 002</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>-</b>	<b>106.915.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>131.915.000,00</b>	<b>-</b>	<b>68.085.624,00</b>	<b>24.340.000,00</b>	<b>92.425.624,00</b>	<b>(39.489.376,00)</b>	<b>70,06</b>
02 07 02 07 10 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	48.365.000,00	25.000.000,00	73.365.000,00	-	44.577.737,00	24.340.000,00	68.917.737,00	(4.447.263,00)	93,94
02 07 02 07 10 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	58.550.000,00	-	58.550.000,00	-	23.507.887,00	-	23.507.887,00	(35.042.113,00)	40,15
<b>02 07 02 07 10 006</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>-</b>	<b>15.485.000,00</b>	<b>-</b>	<b>15.485.000,00</b>	<b>-</b>	<b>15.397.425,00</b>	<b>-</b>	<b>15.397.425,00</b>	<b>(87.575,00)</b>	<b>99,43</b>
02 07 02 07 10 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	-	15.485.000,00	-	15.485.000,00	-	15.397.425,00	-	15.397.425,00	(87.575,00)	99,43

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN				REALISASI				BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
		JENIS BELANJA			JUMLAH ANGGARAN BELANJA	JENIS BELANJA			JUMLAH REALISASI BELANJA		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10-6	12
<b>02 07 02 07 10 059</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton</b>	<b>81.235.000,00</b>	<b>2.806.319.000,00</b>	-	<b>2.887.554.000,00</b>	<b>51.495.000,00</b>	<b>2.666.776.073,59</b>	-	<b>2.718.271.073,59</b>	<b>(169.282.926,41)</b>	<b>94,14</b>
02 07 02 07 10 059 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kraton	69.160.000,00	153.289.000,00	-	222.449.000,00	43.920.000,00	123.644.400,00	-	167.564.400,00	(54.884.600,00)	75,33
02 07 02 07 10 059 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kraton	-	96.188.000,00	-	96.188.000,00	-	94.708.957,00	-	94.708.957,00	(1.479.043,00)	98,46
02 07 02 07 10 059 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kraton	5.475.000,00	342.909.000,00	-	348.384.000,00	5.475.000,00	326.694.700,00	-	332.169.700,00	(16.214.300,00)	95,35
02 07 02 07 10 059 004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patehan	-	493.624.000,00	-	493.624.000,00	-	486.566.061,00	-	486.566.061,00	(7.057.939,00)	98,57
02 07 02 07 10 059 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Panembahan	-	522.818.000,00	-	522.818.000,00	-	520.787.298,00	-	520.787.298,00	(2.030.702,00)	99,61
02 07 02 07 10 059 006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kadipaten	-	512.671.000,00	-	512.671.000,00	-	497.178.899,00	-	497.178.899,00	(15.492.101,00)	96,98
02 07 02 07 10 059 007	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kraton	6.600.000,00	684.820.000,00	-	691.420.000,00	2.100.000,00	617.195.758,59	-	619.295.758,59	(72.124.241,41)	89,57
<b>02 07 11</b>	<b>KECAMATAN GANDOMANAN</b>	<b>299.209.500,00</b>	<b>2.244.992.500,00</b>	<b>164.124.000,00</b>	<b>2.708.326.000,00</b>	<b>295.288.504,00</b>	<b>2.182.379.538,00</b>	<b>161.282.000,00</b>	<b>2.638.950.042,00</b>	<b>(69.375.958,00)</b>	<b>97,44</b>
<b>02 07 02 07 11 001</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>186.859.500,00</b>	<b>341.974.500,00</b>	<b>52.300.000,00</b>	<b>581.134.000,00</b>	<b>184.738.504,00</b>	<b>323.913.090,00</b>	<b>52.300.000,00</b>	<b>560.951.594,00</b>	<b>(20.182.406,00)</b>	<b>96,53</b>
02 07 02 07 11 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	77.804.000,00	-	77.804.000,00	-	77.626.000,00	-	77.626.000,00	(178.000,00)	99,77
02 07 02 07 11 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	186.859.500,00	264.170.500,00	52.300.000,00	503.330.000,00	184.738.504,00	246.287.090,00	52.300.000,00	483.325.594,00	(20.004.406,00)	96,03
<b>02 07 02 07 11 002</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	-	<b>53.039.000,00</b>	<b>111.824.000,00</b>	<b>164.863.000,00</b>	-	<b>43.649.896,00</b>	<b>108.982.000,00</b>	<b>152.631.896,00</b>	<b>(12.231.104,00)</b>	<b>92,58</b>
02 07 02 07 11 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	-	111.824.000,00	111.824.000,00	-	-	108.982.000,00	108.982.000,00	(2.842.000,00)	97,46
02 07 02 07 11 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	53.039.000,00	-	53.039.000,00	-	43.649.896,00	-	43.649.896,00	(9.389.104,00)	82,30
<b>02 07 02 07 11 006</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	-	<b>4.826.000,00</b>	-	<b>4.826.000,00</b>	-	<b>4.826.000,00</b>	-	<b>4.826.000,00</b>	-	<b>100,00</b>
02 07 02 07 11 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	-	4.826.000,00	-	4.826.000,00	-	4.826.000,00	-	4.826.000,00	-	100,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN				REALISASI				BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
		JENIS BELANJA			JUMLAH ANGGARAN BELANJA	JENIS BELANJA			JUMLAH REALISASI BELANJA		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10-6	12
<b>02 07 02 07 11 060</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Gondomanan</b>	<b>112.350.000,00</b>	<b>1.845.153.000,00</b>	-	<b>1.957.503.000,00</b>	<b>110.550.000,00</b>	<b>1.809.990.552,00</b>	-	<b>1.920.540.552,00</b>	<b>(36.962.448,00)</b>	<b>98,11</b>
02 07 02 07 11 060 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gondomanan	90.700.000,00	78.871.000,00	-	169.571.000,00	89.200.000,00	77.567.000,00	-	166.767.000,00	(2.804.000,00)	98,35
02 07 02 07 11 060 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gondomanan	-	74.104.000,00	-	74.104.000,00	-	73.769.452,00	-	73.769.452,00	(334.548,00)	99,55
02 07 02 07 11 060 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondomanan	11.000.000,00	259.565.000,00	-	270.565.000,00	11.000.000,00	259.557.500,00	-	270.557.500,00	(7.500,00)	100,00
02 07 02 07 11 060 004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngupasan	5.175.000,00	508.320.000,00	-	513.495.000,00	5.175.000,00	490.207.600,00	-	495.382.600,00	(18.112.400,00)	96,47
02 07 02 07 11 060 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan	5.475.000,00	525.529.000,00	-	531.004.000,00	5.175.000,00	513.292.000,00	-	518.467.000,00	(12.537.000,00)	97,64
02 07 02 07 11 060 006	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondomanan	-	398.764.000,00	-	398.764.000,00	-	395.597.000,00	-	395.597.000,00	(3.167.000,00)	99,21
<b>02 07 12</b>	<b>KECAMATAN MERGANGSAN</b>	<b>323.982.936,00</b>	<b>3.457.592.064,00</b>	<b>339.513.000,00</b>	<b>4.121.088.000,00</b>	<b>312.722.936,00</b>	<b>3.242.680.650,80</b>	<b>313.622.584,00</b>	<b>3.869.026.170,80</b>	<b>(252.061.829,20)</b>	<b>93,88</b>
<b>02 07 02 07 12 001</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>199.267.936,00</b>	<b>434.876.064,00</b>	<b>175.541.000,00</b>	<b>809.685.000,00</b>	<b>199.147.936,00</b>	<b>391.961.641,00</b>	<b>151.871.300,00</b>	<b>742.980.877,00</b>	<b>(66.704.123,00)</b>	<b>91,76</b>
02 07 02 07 12 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	54.895.000,00	-	54.895.000,00	-	47.035.000,00	-	47.035.000,00	(7.860.000,00)	85,68
02 07 02 07 12 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	199.267.936,00	379.981.064,00	175.541.000,00	754.790.000,00	199.147.936,00	344.926.641,00	151.871.300,00	695.945.877,00	(58.844.123,00)	92,20
<b>02 07 02 07 12 002</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>-</b>	<b>75.053.000,00</b>	<b>103.972.000,00</b>	<b>179.025.000,00</b>	<b>-</b>	<b>43.661.534,50</b>	<b>103.736.284,00</b>	<b>147.397.818,50</b>	<b>(31.627.181,50)</b>	<b>82,33</b>
02 07 02 07 12 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	1.400.000,00	103.972.000,00	105.372.000,00	-	1.129.000,00	103.736.284,00	104.865.284,00	(506.716,00)	99,52
02 07 02 07 12 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	73.653.000,00	-	73.653.000,00	-	42.532.534,50	-	42.532.534,50	(31.120.465,50)	57,75
<b>02 07 02 07 12 006</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>-</b>	<b>9.321.000,00</b>	<b>-</b>	<b>9.321.000,00</b>	<b>-</b>	<b>9.130.800,00</b>	<b>-</b>	<b>9.130.800,00</b>	<b>(190.200,00)</b>	<b>97,96</b>
02 07 02 07 12 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	-	9.321.000,00	-	9.321.000,00	-	9.130.800,00	-	9.130.800,00	(190.200,00)	97,96

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN				REALISASI				BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
		JENIS BELANJA			JUMLAH ANGGARAN BELANJA	JENIS BELANJA			JUMLAH REALISASI BELANJA		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10-6	12
<b>02 07 02 07 12 061</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan</b>	<b>124.715.000,00</b>	<b>2.938.342.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>3.123.057.000,00</b>	<b>113.575.000,00</b>	<b>2.797.926.675,30</b>	<b>58.015.000,00</b>	<b>2.969.516.675,30</b>	<b>(153.540.324,70)</b>	<b>95,08</b>
02 07 02 07 12 061 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mergangsan	56.000.000,00	128.373.000,00	-	184.373.000,00	51.760.000,00	117.250.918,00	-	169.010.918,00	(15.362.082,00)	91,67
02 07 02 07 12 061 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mergangsan	3.200.000,00	54.713.000,00	-	57.913.000,00	3.200.000,00	53.537.708,00	-	56.737.708,00	(1.175.292,00)	97,97
02 07 02 07 12 061 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mergangsan	35.875.000,00	181.402.000,00	-	217.277.000,00	35.875.000,00	176.679.588,00	-	212.554.588,00	(4.722.412,00)	97,83
02 07 02 07 12 061 004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Brontokusuman	3.300.000,00	606.916.000,00	-	610.216.000,00	-	598.050.400,00	-	598.050.400,00	(12.165.600,00)	98,01
02 07 02 07 12 061 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirogunan	6.000.000,00	649.382.000,00	-	655.382.000,00	6.000.000,00	620.608.000,00	-	626.608.000,00	(28.774.000,00)	95,61
02 07 02 07 12 061 006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Keparak	2.200.000,00	615.073.000,00	-	617.273.000,00	2.200.000,00	602.345.600,00	-	604.545.600,00	(12.727.400,00)	97,94
02 07 02 07 12 061 007	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mergangsan	18.140.000,00	702.483.000,00	60.000.000,00	780.623.000,00	14.540.000,00	629.454.461,30	58.015.000,00	702.009.461,30	(78.613.538,70)	89,93
<b>02 07 13</b>	<b>KECAMATAN UMBULHARJO</b>	<b>1.144.093.712,00</b>	<b>7.437.923.628,00</b>	<b>271.275.560,00</b>	<b>8.853.292.900,00</b>	<b>1.141.733.704,32</b>	<b>6.824.395.785,54</b>	<b>260.284.010,00</b>	<b>8.226.413.499,86</b>	<b>(626.879.400,14)</b>	<b>92,92</b>
<b>02 07 02 07 13 001</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>656.203.712,00</b>	<b>773.422.728,00</b>	<b>181.275.560,00</b>	<b>1.610.902.000,00</b>	<b>656.203.704,32</b>	<b>729.287.233,20</b>	<b>170.844.010,00</b>	<b>1.556.334.947,52</b>	<b>(54.567.052,48)</b>	<b>96,61</b>
02 07 02 07 13 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	196.970.000,00	-	196.970.000,00	-	191.313.398,25	-	191.313.398,25	(5.656.601,75)	97,13
02 07 02 07 13 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	656.203.712,00	576.452.728,00	181.275.560,00	1.413.932.000,00	656.203.704,32	537.973.834,95	170.844.010,00	1.365.021.549,27	(48.910.450,73)	96,54
<b>02 07 02 07 13 002</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>-</b>	<b>207.620.500,00</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>297.620.500,00</b>	<b>-</b>	<b>180.502.257,50</b>	<b>89.440.000,00</b>	<b>269.942.257,50</b>	<b>(27.678.242,50)</b>	<b>90,70</b>
02 07 02 07 13 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	95.120.000,00	90.000.000,00	185.120.000,00	-	92.578.000,00	89.440.000,00	182.018.000,00	(3.102.000,00)	98,32
02 07 02 07 13 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	112.500.500,00	-	112.500.500,00	-	87.924.257,50	-	87.924.257,50	(24.576.242,50)	78,15
<b>02 07 02 07 13 006</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>-</b>	<b>10.586.000,00</b>	<b>-</b>	<b>10.586.000,00</b>	<b>-</b>	<b>10.571.000,00</b>	<b>-</b>	<b>10.571.000,00</b>	<b>(15.000,00)</b>	<b>99,86</b>
02 07 02 07 13 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	-	10.586.000,00	-	10.586.000,00	-	10.571.000,00	-	10.571.000,00	(15.000,00)	99,86

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN				REALISASI				BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
		JENIS BELANJA			JUMLAH ANGGARAN BELANJA	JENIS BELANJA			JUMLAH REALISASI BELANJA		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10-6	12
<b>02 07 02 07 13 062</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo</b>	<b>487.890.000,00</b>	<b>6.446.294.400,00</b>	-	<b>6.934.184.400,00</b>	<b>485.530.000,00</b>	<b>5.904.035.294,84</b>	-	<b>6.389.565.294,84</b>	<b>(544.619.105,16)</b>	<b>92,15</b>
02 07 02 07 13 062 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Umbulharjo	61.500.000,00	268.974.500,00	-	330.474.500,00	59.340.000,00	197.906.000,00	-	257.246.000,00	(73.228.500,00)	77,84
02 07 02 07 13 062 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Umbulharjo	400.000,00	142.642.000,00	-	143.042.000,00	400.000,00	142.235.084,00	-	142.635.084,00	(406.916,00)	99,72
02 07 02 07 13 062 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Umbulharjo	27.470.000,00	309.709.000,00	-	337.179.000,00	27.270.000,00	273.686.000,00	-	300.956.000,00	(36.223.000,00)	89,26
02 07 02 07 13 062 004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Giwangan	60.500.000,00	524.516.000,00	-	585.016.000,00	60.500.000,00	522.976.240,00	-	583.476.240,00	(1.539.760,00)	99,74
02 07 02 07 13 062 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sorosutan	82.340.000,00	534.699.500,00	-	617.039.500,00	82.340.000,00	509.561.800,00	-	591.901.800,00	(25.137.700,00)	95,93
02 07 02 07 13 062 006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pandeyan	57.200.000,00	444.506.500,00	-	501.706.500,00	57.200.000,00	441.212.500,00	-	498.412.500,00	(3.294.000,00)	99,34
02 07 02 07 13 062 007	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Warungboto	41.800.000,00	459.009.000,00	-	500.809.000,00	41.800.000,00	455.473.900,00	-	497.273.900,00	(3.535.100,00)	99,29
02 07 02 07 13 062 008	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tahunan	55.000.000,00	490.351.500,00	-	545.351.500,00	55.000.000,00	481.521.500,00	-	536.521.500,00	(8.830.000,00)	98,38
02 07 02 07 13 062 009	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Muja Muju	60.500.000,00	479.176.000,00	-	539.676.000,00	60.500.000,00	478.052.000,00	-	538.552.000,00	(1.124.000,00)	99,79
02 07 02 07 13 062 010	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Semaki	37.400.000,00	464.697.000,00	-	502.097.000,00	37.400.000,00	463.063.000,00	-	500.463.000,00	(1.634.000,00)	99,67
02 07 02 07 13 062 011	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Kecamatan Umbulharjo	3.780.000,00	2.328.013.400,00	-	2.331.793.400,00	3.780.000,00	1.938.347.270,84	-	1.942.127.270,84	(389.666.129,16)	83,29
<b>02 07 14</b>	<b>KECAMATAN KOTAGEDE</b>	<b>302.040.000,00</b>	<b>3.700.666.900,00</b>	<b>394.894.100,00</b>	<b>4.397.601.000,00</b>	<b>298.903.376,00</b>	<b>3.645.086.583,36</b>	<b>383.519.550,00</b>	<b>4.327.509.509,36</b>	<b>(70.091.490,64)</b>	<b>98,41</b>
<b>02 07 02 07 14 001</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>219.140.000,00</b>	<b>403.008.900,00</b>	<b>185.478.100,00</b>	<b>807.627.000,00</b>	<b>217.123.376,00</b>	<b>387.262.469,00</b>	<b>174.262.550,00</b>	<b>778.648.395,00</b>	<b>(28.978.605,00)</b>	<b>96,41</b>
02 07 02 07 14 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	87.502.000,00	-	87.502.000,00	-	85.611.150,00	-	85.611.150,00	(1.890.850,00)	97,84
02 07 02 07 14 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	219.140.000,00	315.506.900,00	185.478.100,00	720.125.000,00	217.123.376,00	301.651.319,00	174.262.550,00	693.037.245,00	(27.087.755,00)	96,24
<b>02 07 02 07 14 002</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	-	<b>62.540.000,00</b>	<b>209.416.000,00</b>	<b>271.956.000,00</b>	-	<b>59.200.369,00</b>	<b>209.257.000,00</b>	<b>268.457.369,00</b>	<b>(3.498.631,00)</b>	<b>98,71</b>
02 07 02 07 14 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	400.000,00	209.416.000,00	209.816.000,00	-	390.762,00	209.257.000,00	209.647.762,00	(168.238,00)	99,92
02 07 02 07 14 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	62.140.000,00	-	62.140.000,00	-	58.809.607,00	-	58.809.607,00	(3.330.393,00)	94,64

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN				REALISASI				BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
		JENIS BELANJA			JUMLAH ANGGARAN BELANJA	JENIS BELANJA			JUMLAH REALISASI BELANJA		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10-6	12
02 07 02 07 14 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	14.400.000,00	-	14.400.000,00	-	14.400.000,00	-	14.400.000,00	-	100,00
02 07 02 07 14 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	-	14.400.000,00	-	14.400.000,00	-	14.400.000,00	-	14.400.000,00	-	100,00
02 07 02 07 14 063	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede	82.900.000,00	3.220.718.000,00	-	3.303.618.000,00	81.780.000,00	3.184.223.745,36	-	3.266.003.745,36	(37.614.254,64)	98,86
02 07 02 07 14 063 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kotagede	74.800.000,00	181.255.000,00	-	256.055.000,00	73.680.000,00	180.635.000,00	-	254.315.000,00	(1.740.000,00)	99,32
02 07 02 07 14 063 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kotagede	-	175.971.000,00	-	175.971.000,00	-	175.957.679,00	-	175.957.679,00	(13.321,00)	99,99
02 07 02 07 14 063 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kotagede	-	342.581.000,00	-	342.581.000,00	-	334.206.000,00	-	334.206.000,00	(8.375.000,00)	97,56
02 07 02 07 14 063 004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Rejowinangun	2.700.000,00	557.196.000,00	-	559.896.000,00	2.700.000,00	554.673.700,00	-	557.373.700,00	(2.522.300,00)	99,55
02 07 02 07 14 063 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prenggan	2.700.000,00	557.779.000,00	-	560.479.000,00	2.700.000,00	550.719.550,00	-	553.419.550,00	(7.059.450,00)	98,74
02 07 02 07 14 063 006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purbayan	2.700.000,00	481.176.000,00	-	483.876.000,00	2.700.000,00	464.258.000,00	-	466.958.000,00	(16.918.000,00)	96,50
02 07 02 07 14 063 007	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kotagede	-	924.760.000,00	-	924.760.000,00	-	923.773.816,36	-	923.773.816,36	(986.183,64)	99,89
02 07 02 02 01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	354.125.000,00	734.505.000,00	-	1.088.630.000,00	340.000.000,00	716.425.420,00	-	1.056.425.420,00	(32.204.580,00)	97,04
02 07 02 02 01 129	Program Pemberdayaan Masyarakat	354.125.000,00	734.505.000,00	-	1.088.630.000,00	340.000.000,00	716.425.420,00	-	1.056.425.420,00	(32.204.580,00)	97,04
02 07 02 02 01 129 001	Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan	82.250.000,00	510.221.000,00	-	592.471.000,00	72.925.000,00	503.219.300,00	-	576.144.300,00	(16.326.700,00)	97,24
02 07 02 02 01 129 002	Pembinaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	271.875.000,00	224.284.000,00	-	496.159.000,00	267.075.000,00	213.206.120,00	-	480.281.120,00	(15.877.880,00)	96,80
02 08	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.122.350.200,00	5.863.876.460,00	578.013.000,00	7.564.239.660,00	1.109.218.638,00	5.470.645.098,00	571.653.300,00	7.151.517.036,00	(412.722.624,00)	94,54
02 08 01	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.122.350.200,00	5.863.876.460,00	578.013.000,00	7.564.239.660,00	1.109.218.638,00	5.470.645.098,00	571.653.300,00	7.151.517.036,00	(412.722.624,00)	94,54
02 08 02 08 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	53.715.200,00	602.541.060,00	209.113.000,00	865.369.260,00	53.398.638,00	568.064.865,00	202.753.300,00	824.216.803,00	(41.152.457,00)	95,24
02 08 02 08 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	107.840.000,00	-	107.840.000,00	-	107.482.979,00	-	107.482.979,00	(357.021,00)	99,67
02 08 02 08 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	53.715.200,00	494.701.060,00	209.113.000,00	757.529.260,00	53.398.638,00	460.581.886,00	202.753.300,00	716.733.824,00	(40.795.436,00)	94,61

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN				REALISASI				BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
		JENIS BELANJA			JUMLAH ANGGARAN BELANJA	JENIS BELANJA			JUMLAH REALISASI BELANJA		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10-6	12
02 08 02 08 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	384.799.000,00	-	384.799.000,00	-	361.659.567,00	-	361.659.567,00	(23.139.433,00)	93,99
02 08 02 08 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	250.899.000,00	-	250.899.000,00	-	250.328.980,00	-	250.328.980,00	(570.020,00)	99,77
02 08 02 08 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	133.900.000,00	-	133.900.000,00	-	111.330.587,00	-	111.330.587,00	(22.569.413,00)	83,14
02 08 02 08 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	13.920.000,00	-	13.920.000,00	-	13.751.000,00	-	13.751.000,00	(169.000,00)	98,79
02 08 02 08 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	-	13.920.000,00	-	13.920.000,00	-	13.751.000,00	-	13.751.000,00	(169.000,00)	98,79
02 08 02 08 01 064	Program Pengendalian Penduduk	808.810.000,00	1.280.414.400,00	368.900.000,00	2.458.124.400,00	804.370.000,00	1.125.364.078,00	368.900.000,00	2.298.634.078,00	(159.490.322,00)	93,51
02 08 02 08 01 064 001	Pengendalian Penduduk	10.650.000,00	284.704.400,00	-	295.354.400,00	10.050.000,00	271.030.081,00	-	281.080.081,00	(14.274.319,00)	95,17
02 08 02 08 01 064 002	Pengelolaan Data, Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi	798.160.000,00	995.710.000,00	368.900.000,00	2.162.770.000,00	794.320.000,00	854.333.997,00	368.900.000,00	2.017.553.997,00	(145.216.003,00)	93,29
02 08 02 08 01 065	Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	259.825.000,00	3.582.202.000,00	-	3.842.027.000,00	251.450.000,00	3.401.805.588,00	-	3.653.255.588,00	(188.771.412,00)	95,09
02 08 02 08 01 065 001	Pelayanan Keluarga Berencana (DAK dan DBH Pajak dari Provinsi)	18.300.000,00	2.321.862.000,00	-	2.340.162.000,00	17.400.000,00	2.202.491.991,00	-	2.219.891.991,00	(120.270.009,00)	94,86
02 08 02 08 01 065 002	Pembinaan Pembangunan Keluarga	241.525.000,00	1.260.340.000,00	-	1.501.865.000,00	234.050.000,00	1.199.313.597,00	-	1.433.363.597,00	(68.501.403,00)	95,44
02 09	URUSAN PERHUBUNGAN	518.551.729,00	12.335.648.849,00	4.526.939.331,00	17.381.139.909,00	502.367.690,32	11.445.812.502,64	3.851.829.124,93	15.800.009.317,89	(1.581.130.591,11)	90,90
02 09 01	DINAS PERHUBUNGAN	518.551.729,00	12.335.648.849,00	4.526.939.331,00	17.381.139.909,00	502.367.690,32	11.445.812.502,64	3.851.829.124,93	15.800.009.317,89	(1.581.130.591,11)	90,90
02 09 02 09 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	418.956.729,00	1.267.238.753,00	1.263.713.531,00	2.949.909.013,00	408.492.690,32	1.183.669.288,00	1.131.617.295,00	2.723.779.273,32	(226.129.739,68)	92,33
02 09 02 09 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	223.710.000,00	-	223.710.000,00	-	216.760.629,00	-	216.760.629,00	(6.949.371,00)	96,89
02 09 02 09 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	418.956.729,00	1.043.528.753,00	1.263.713.531,00	2.726.199.013,00	408.492.690,32	966.908.659,00	1.131.617.295,00	2.507.018.644,32	(219.180.368,68)	91,96
02 09 02 09 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	342.982.350,00	300.000.000,00	642.982.350,00	-	215.322.975,00	299.348.000,00	514.670.975,00	(128.311.375,00)	80,04
02 09 02 09 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	-	300.000.000,00	300.000.000,00	-	-	299.348.000,00	299.348.000,00	(652.000,00)	99,78
02 09 02 09 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	342.982.350,00	-	342.982.350,00	-	215.322.975,00	-	215.322.975,00	(127.659.375,00)	62,78
02 09 02 09 01 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	45.000.000,00	-	45.000.000,00	-	37.500.000,00	-	37.500.000,00	(7.500.000,00)	83,33
02 09 02 09 01 005 005	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	-	45.000.000,00	-	45.000.000,00	-	37.500.000,00	-	37.500.000,00	(7.500.000,00)	83,33
02 09 02 09 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	60.220.000,00	-	60.220.000,00	-	59.725.000,00	-	59.725.000,00	(495.000,00)	99,18
02 09 02 09 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	-	60.220.000,00	-	60.220.000,00	-	59.725.000,00	-	59.725.000,00	(495.000,00)	99,18
02 09 02 09 01 066	Program Pengelolaan Lalu Lintas	36.135.000,00	2.135.369.407,00	2.284.425.800,00	4.455.930.207,00	33.385.000,00	1.905.992.632,68	1.751.680.829,93	3.691.058.462,61	(764.871.744,39)	82,83
02 09 02 09 01 066 001	Kajian dan Pengembangan Lalu Lintas	15.510.000,00	150.500.000,00	370.000.000,00	536.010.000,00	15.510.000,00	144.340.700,00	355.127.000,00	514.977.700,00	(21.032.300,00)	96,08
02 09 02 09 01 066 002	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	20.625.000,00	254.075.407,00	222.225.800,00	496.926.207,00	17.875.000,00	246.031.779,52	217.234.000,00	481.140.779,52	(15.785.427,48)	96,82
02 09 02 09 01 066 003	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Perhubungan	-	1.730.794.000,00	1.692.200.000,00	3.422.994.000,00	-	1.515.620.153,16	1.179.319.829,93	2.694.939.983,09	(728.054.016,91)	78,73



KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN				REALISASI				BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
		JENIS BELANJA			JUMLAH ANGGARAN BELANJA	JENIS BELANJA			JUMLAH REALISASI BELANJA		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10-6	12
<b>02 09 02 09 01 067</b>	<b>Program Angkutan Jalan, Pengendalian Operasional dan Keselamatan Lalu Lintas</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>2.075.868.339,00</b>	<b>280.800.000,00</b>	<b>2.361.168.339,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>1.976.491.714,96</b>	<b>277.172.000,00</b>	<b>2.258.163.714,96</b>	<b>(103.004.624,04)</b>	<b>95,64</b>
02 09 02 09 01 067 001	Penyelenggaraan Angkutan	-	99.380.000,00	157.500.000,00	256.880.000,00	-	91.138.200,00	156.076.000,00	247.214.200,00	(9.665.800,00)	96,24
02 09 02 09 01 067 002	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	-	953.982.996,00	83.400.000,00	1.037.382.996,00	-	937.751.874,88	81.196.000,00	1.018.947.874,88	(18.435.121,12)	98,22
02 09 02 09 01 067 003	Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas	4.500.000,00	512.728.154,00	9.900.000,00	527.128.154,00	4.500.000,00	507.294.152,88	9.900.000,00	521.694.152,88	(5.434.001,12)	98,97
02 09 02 09 01 067 004	Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional di Bidang Perhubungan	-	509.777.189,00	30.000.000,00	539.777.189,00	-	440.307.487,20	30.000.000,00	470.307.487,20	(69.469.701,80)	87,13
<b>02 09 02 09 01 068</b>	<b>Program Pengelolaan Perparkiran</b>	<b>58.960.000,00</b>	<b>6.408.970.000,00</b>	<b>398.000.000,00</b>	<b>6.865.930.000,00</b>	<b>55.990.000,00</b>	<b>6.067.110.892,00</b>	<b>392.011.000,00</b>	<b>6.515.111.892,00</b>	<b>(350.818.108,00)</b>	<b>94,89</b>
02 09 02 09 01 068 001	Operasional Penyelenggaraan Perparkiran	23.760.000,00	6.105.476.000,00	-	6.129.236.000,00	20.790.000,00	5.785.540.892,00	-	5.806.330.892,00	(322.905.108,00)	94,73
02 09 02 09 01 068 002	Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran	35.200.000,00	303.494.000,00	398.000.000,00	736.694.000,00	35.200.000,00	281.570.000,00	392.011.000,00	708.781.000,00	(27.913.000,00)	96,21
<b>02 10</b>	<b>URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>164.499.440,00</b>	<b>11.737.919.328,00</b>	<b>8.481.099.000,00</b>	<b>20.383.517.768,00</b>	<b>146.470.052,00</b>	<b>11.133.310.696,00</b>	<b>8.026.052.216,00</b>	<b>19.305.832.964,00</b>	<b>(1.077.684.804,00)</b>	<b>94,71</b>
<b>02 10 01</b>	<b>DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN</b>	<b>164.499.440,00</b>	<b>11.737.919.328,00</b>	<b>8.481.099.000,00</b>	<b>20.383.517.768,00</b>	<b>146.470.052,00</b>	<b>11.133.310.696,00</b>	<b>8.026.052.216,00</b>	<b>19.305.832.964,00</b>	<b>(1.077.684.804,00)</b>	<b>94,71</b>
<b>02 10 02 10 01 001</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>113.449.440,00</b>	<b>1.003.512.560,00</b>	<b>244.300.000,00</b>	<b>1.361.262.000,00</b>	<b>95.420.052,00</b>	<b>916.485.500,00</b>	<b>232.621.000,00</b>	<b>1.244.526.552,00</b>	<b>(116.735.448,00)</b>	<b>91,42</b>
02 10 02 10 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	382.015.000,00	-	382.015.000,00	-	364.780.757,00	-	364.780.757,00	(17.234.243,00)	95,49
02 10 02 10 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	113.449.440,00	621.497.560,00	244.300.000,00	979.247.000,00	95.420.052,00	551.704.743,00	232.621.000,00	879.745.795,00	(99.501.205,00)	89,84
<b>02 10 02 10 01 002</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>-</b>	<b>142.694.000,00</b>	<b>199.000.000,00</b>	<b>341.694.000,00</b>	<b>-</b>	<b>87.484.012,00</b>	<b>198.107.000,00</b>	<b>285.591.012,00</b>	<b>(56.102.988,00)</b>	<b>83,58</b>
02 10 02 10 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	-	199.000.000,00	199.000.000,00	-	-	198.107.000,00	198.107.000,00	(893.000,00)	99,55
02 10 02 10 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	142.694.000,00	-	142.694.000,00	-	87.484.012,00	-	87.484.012,00	(55.209.988,00)	61,31
<b>02 10 02 10 01 005</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>-</b>	<b>87.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>87.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>85.760.000,00</b>	<b>-</b>	<b>85.760.000,00</b>	<b>(1.240.000,00)</b>	<b>98,57</b>
02 10 02 10 01 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	-	87.000.000,00	-	87.000.000,00	-	85.760.000,00	-	85.760.000,00	(1.240.000,00)	98,57
<b>02 10 02 10 01 006</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>-</b>	<b>30.833.620,00</b>	<b>-</b>	<b>30.833.620,00</b>	<b>-</b>	<b>30.794.142,00</b>	<b>-</b>	<b>30.794.142,00</b>	<b>(39.478,00)</b>	<b>99,87</b>
02 10 02 10 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	-	30.833.620,00	-	30.833.620,00	-	30.794.142,00	-	30.794.142,00	(39.478,00)	99,87
<b>02 10 02 10 01 069</b>	<b>Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Telematika</b>	<b>-</b>	<b>6.790.506.248,00</b>	<b>7.894.078.800,00</b>	<b>14.684.585.048,00</b>	<b>-</b>	<b>6.361.143.926,00</b>	<b>7.453.224.216,00</b>	<b>13.814.368.142,00</b>	<b>(870.216.906,00)</b>	<b>94,07</b>
02 10 02 10 01 069 001	Pengelolaan Aplikasi Teknologi Informasi dan Telematika	-	448.100.000,00	357.310.000,00	805.410.000,00	-	434.525.800,00	297.145.500,00	731.671.300,00	(73.738.700,00)	90,84
02 10 02 10 01 069 002	Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Teknologi Informasi dan Telematika	-	6.225.609.200,00	7.216.868.800,00	13.442.478.000,00	-	5.859.694.026,00	6.908.385.716,00	12.768.079.742,00	(674.398.258,00)	94,98
02 10 02 10 01 069 003	Pengelolaan dan Pengembangan Smart City	-	116.797.048,00	319.900.000,00	436.697.048,00	-	66.924.100,00	247.693.000,00	314.617.100,00	(122.079.948,00)	72,04

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN				REALISASI				BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
		JENIS BELANJA			JUMLAH ANGGARAN BELANJA	JENIS BELANJA			JUMLAH REALISASI BELANJA		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10-6	12
02 10 02 10 01 070	Program Pengelolaan Informasi dan Statistik	29.400.000,00	2.228.058.800,00	103.160.200,00	2.360.619.000,00	29.400.000,00	2.210.583.178,00	103.160.000,00	2.343.143.178,00	(17.475.822,00)	99,26
02 10 02 10 01 070 001	Promosi Publikasi dan kemitraan Informasi	29.400.000,00	2.228.058.800,00	103.160.200,00	2.360.619.000,00	29.400.000,00	2.210.583.178,00	103.160.000,00	2.343.143.178,00	(17.475.822,00)	99,26
02 10 02 10 01 071	Program Peningkatan Komunikasi Publik	21.650.000,00	1.455.314.100,00	40.560.000,00	1.517.524.100,00	21.650.000,00	1.441.059.938,00	38.940.000,00	1.501.649.938,00	(15.874.162,00)	98,95
02 10 02 10 01 071 001	Kehumasan dan Pelayanan Informasi	-	1.178.946.100,00	38.060.000,00	1.217.006.100,00	-	1.176.201.438,00	37.560.000,00	1.213.761.438,00	(3.244.662,00)	99,73
02 10 02 10 01 071 002	Pengelolaan Keluhan dan Aduan	21.650.000,00	276.368.000,00	2.500.000,00	300.518.000,00	21.650.000,00	264.858.500,00	1.380.000,00	287.888.500,00	(12.629.500,00)	95,80
02 11	URUSAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	213.966.200,00	7.544.366.800,00	370.350.000,00	8.128.683.000,00	184.160.802,88	7.076.158.224,00	365.346.800,00	7.625.665.826,88	(503.017.173,12)	93,81
02 11 01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	213.966.200,00	7.544.366.800,00	370.350.000,00	8.128.683.000,00	184.160.802,88	7.076.158.224,00	365.346.800,00	7.625.665.826,88	(503.017.173,12)	93,81
02 11 02 11 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	106.541.200,00	1.506.729.800,00	370.350.000,00	1.983.621.000,00	106.535.802,88	1.320.639.371,00	365.346.800,00	1.792.521.973,88	(191.099.026,12)	90,37
02 11 02 11 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	1.049.355.000,00	-	1.049.355.000,00	-	916.285.373,00	-	916.285.373,00	(133.069.627,00)	87,32
02 11 02 11 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	106.541.200,00	457.374.800,00	370.350.000,00	934.266.000,00	106.535.802,88	404.353.998,00	365.346.800,00	876.236.600,88	(58.029.399,12)	93,79
02 11 02 11 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	290.055.000,00	-	290.055.000,00	-	270.082.250,00	-	270.082.250,00	(19.972.750,00)	93,11
02 11 02 11 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	133.990.000,00	-	133.990.000,00	-	133.490.000,00	-	133.490.000,00	(500.000,00)	99,63
02 11 02 11 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	156.065.000,00	-	156.065.000,00	-	136.592.250,00	-	136.592.250,00	(19.472.750,00)	87,52
02 11 02 11 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	10.500.000,00	-	10.500.000,00	-	10.492.600,00	-	10.492.600,00	(7.400,00)	99,93
02 11 02 11 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	-	10.500.000,00	-	10.500.000,00	-	10.492.600,00	-	10.492.600,00	(7.400,00)	99,93
02 11 02 11 01 072	Program Peningkatan Kualitas Koperasi	-	1.137.871.000,00	-	1.137.871.000,00	-	1.134.249.700,00	-	1.134.249.700,00	(3.621.300,00)	99,68
02 11 02 11 01 072 001	Pembinaan Kelembagaan Koperasi	-	785.185.000,00	-	785.185.000,00	-	783.653.550,00	-	783.653.550,00	(1.531.450,00)	99,80
02 11 02 11 01 072 002	Pembinaan dan Pengembangan Koperasi	-	352.686.000,00	-	352.686.000,00	-	350.596.150,00	-	350.596.150,00	(2.089.850,00)	99,41
02 11 02 11 01 073	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	107.425.000,00	4.599.211.000,00	-	4.706.636.000,00	77.625.000,00	4.340.694.303,00	-	4.418.319.303,00	(288.316.697,00)	93,87
02 11 02 11 01 073 001	Kemitraan dan Pembiayaan UMK	62.550.000,00	932.754.000,00	-	995.304.000,00	41.650.000,00	858.853.600,00	-	900.503.600,00	(94.800.400,00)	90,48
02 11 02 11 01 073 002	Pembinaan Pengembangan dan Pemberdayaan UMK	44.875.000,00	3.666.457.000,00	-	3.711.332.000,00	35.975.000,00	3.481.840.703,00	-	3.517.815.703,00	(193.516.297,00)	94,79



KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN				REALISASI				BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
		JENIS BELANJA			JUMLAH ANGGARAN BELANJA	JENIS BELANJA			JUMLAH REALISASI BELANJA		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10-6	12
02 13	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	224.967.912,00	6.126.648.662,00	791.535.000,00	7.143.151.574,00	214.763.446,00	5.873.489.893,00	750.897.000,00	6.839.150.339,00	(304.001.235,00)	95,74
02 13 01	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	224.967.912,00	6.126.648.662,00	791.535.000,00	7.143.151.574,00	214.763.446,00	5.873.489.893,00	750.897.000,00	6.839.150.339,00	(304.001.235,00)	95,74
02 13 02 13 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	53.267.912,00	496.886.292,00	109.000.000,00	659.154.204,00	53.263.446,00	473.965.244,00	102.620.000,00	629.848.690,00	(29.305.514,00)	95,55
02 13 02 13 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	201.900.000,00	-	201.900.000,00	-	190.229.510,00	-	190.229.510,00	(11.670.490,00)	94,22
02 13 02 13 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	53.267.912,00	294.986.292,00	109.000.000,00	457.254.204,00	53.263.446,00	283.735.734,00	102.620.000,00	439.619.180,00	(17.635.024,00)	96,14
02 13 02 13 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	84.890.000,00	227.160.000,00	312.050.000,00	-	57.409.663,00	222.388.000,00	279.797.663,00	(32.252.337,00)	89,66
02 13 02 13 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	-	227.160.000,00	227.160.000,00	-	-	222.388.000,00	222.388.000,00	(4.772.000,00)	97,90
02 13 02 13 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	84.890.000,00	-	84.890.000,00	-	57.409.663,00	-	57.409.663,00	(27.480.337,00)	67,63
02 13 02 13 01 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	1.999.540,00	-	1.999.540,00	(460,00)	-
02 13 02 13 01 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	1.999.540,00	-	1.999.540,00	(460,00)	-
02 13 02 13 01 078	Program Pengembangan Kepemudaan	74.200.000,00	2.328.952.832,00	-	2.403.152.832,00	66.100.000,00	2.258.974.502,00	-	2.325.074.502,00	(78.078.330,00)	96,75
02 13 02 13 01 078 001	Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan	67.200.000,00	2.166.337.916,00	-	2.233.537.916,00	59.100.000,00	2.096.359.586,00	-	2.155.459.586,00	(78.078.330,00)	96,50
02 13 02 13 01 078 002	Pembinaan Kelembagaan Kepemudaan	7.000.000,00	162.614.916,00	-	169.614.916,00	7.000.000,00	162.614.916,00	-	169.614.916,00	-	100,00
02 13 02 13 01 079	Program Pengembangan Olah Raga	97.500.000,00	3.213.919.538,00	455.375.000,00	3.766.794.538,00	95.400.000,00	3.081.140.944,00	425.889.000,00	3.602.429.944,00	(164.364.594,00)	95,64
02 13 02 13 01 079 001	Pembinaan Olah Raga Prestasi dan Masyarakat	-	2.588.608.632,00	10.875.000,00	2.599.483.632,00	-	2.461.865.328,00	10.875.000,00	2.472.740.328,00	(126.743.304,00)	95,12
02 13 02 13 01 079 002	Pembinaan Kelembagaan Keolahragaan	97.500.000,00	625.310.906,00	444.500.000,00	1.167.310.906,00	95.400.000,00	619.275.616,00	415.014.000,00	1.129.689.616,00	(37.621.290,00)	96,78
02 14	URUSAN STATISTIK	18.000.000,00	241.681.000,00	-	259.681.000,00	13.000.000,00	232.943.200,00	-	245.943.200,00	(13.737.800,00)	94,71
02 14 02 14 01	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	18.000.000,00	241.681.000,00	-	259.681.000,00	13.000.000,00	232.943.200,00	-	245.943.200,00	(13.737.800,00)	94,71
02 14 02 14 01 070	Program Pengelolaan Informasi dan Statistik	18.000.000,00	241.681.000,00	-	259.681.000,00	13.000.000,00	232.943.200,00	-	245.943.200,00	(13.737.800,00)	94,71
02 14 02 14 01 070 001	Pengelolaan Informasi dan Data Statistik	18.000.000,00	241.681.000,00	-	259.681.000,00	13.000.000,00	232.943.200,00	-	245.943.200,00	(13.737.800,00)	94,71
02 15	URUSAN PERSANDIAN	12.375.000,00	653.484.000,00	975.270.000,00	1.641.129.000,00	10.725.000,00	638.187.733,00	946.312.242,00	1.595.224.975,00	(45.904.025,00)	97,20
02 15 02 10 01	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	12.375.000,00	653.484.000,00	975.270.000,00	1.641.129.000,00	10.725.000,00	638.187.733,00	946.312.242,00	1.595.224.975,00	(45.904.025,00)	97,20
02 15 02 10 01 080	Program Peningkatan Pelayanan Persandian	12.375.000,00	653.484.000,00	975.270.000,00	1.641.129.000,00	10.725.000,00	638.187.733,00	946.312.242,00	1.595.224.975,00	(45.904.025,00)	97,20
02 15 02 10 01 080 001	Operasional Persandian dan Telekomunikasi	7.150.000,00	375.605.000,00	495.580.000,00	878.335.000,00	5.500.000,00	363.522.733,00	469.987.000,00	839.009.733,00	(39.325.267,00)	95,52
02 15 02 10 01 080 002	Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi	2.750.000,00	95.401.500,00	378.480.000,00	476.631.500,00	2.750.000,00	93.190.500,00	375.606.242,00	471.546.742,00	(5.084.758,00)	98,93
02 15 02 10 01 080 003	Pengawasan dan Pengendalian Komunikasi dan Informatika	2.475.000,00	182.477.500,00	101.210.000,00	286.162.500,00	2.475.000,00	181.474.500,00	100.719.000,00	284.668.500,00	(1.494.000,00)	99,48

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN				REALISASI				BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
		JENIS BELANJA			JUMLAH ANGGARAN BELANJA	JENIS BELANJA			JUMLAH REALISASI BELANJA		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10-6	12
<b>02 16</b>	<b>URUSAN KEBUDAYAAN</b>	<b>115.144.600,00</b>	<b>3.394.242.901,00</b>	<b>924.431.899,00</b>	<b>4.433.819.400,00</b>	<b>107.333.954,00</b>	<b>3.128.919.446,00</b>	<b>920.055.800,00</b>	<b>4.156.309.200,00</b>	<b>(277.510.200,00)</b>	<b>93,74</b>
<b>02 16 02 16 01</b>	<b>DINAS KEBUDAYAAN</b>	<b>115.144.600,00</b>	<b>3.394.242.901,00</b>	<b>924.431.899,00</b>	<b>4.433.819.400,00</b>	<b>107.333.954,00</b>	<b>3.128.919.446,00</b>	<b>920.055.800,00</b>	<b>4.156.309.200,00</b>	<b>(277.510.200,00)</b>	<b>93,74</b>
<b>02 16 02 16 01 001</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>29.569.600,00</b>	<b>535.890.308,00</b>	<b>139.431.899,00</b>	<b>704.891.807,00</b>	<b>26.633.954,00</b>	<b>461.632.001,00</b>	<b>138.343.500,00</b>	<b>626.609.455,00</b>	<b>(78.282.352,00)</b>	<b>88,89</b>
02 16 02 16 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	-	172.040.000,00	-	172.040.000,00	-	138.280.245,00	-	138.280.245,00	(33.759.755,00)	80,38
02 16 02 16 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	29.569.600,00	363.850.308,00	139.431.899,00	532.851.807,00	26.633.954,00	323.351.756,00	138.343.500,00	488.329.210,00	(44.522.597,00)	91,64
<b>02 16 02 16 01 002</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>-</b>	<b>366.093.920,00</b>	<b>-</b>	<b>366.093.920,00</b>	<b>-</b>	<b>279.498.405,00</b>	<b>-</b>	<b>279.498.405,00</b>	<b>(86.595.515,00)</b>	<b>76,35</b>
02 16 02 16 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	-	194.630.000,00	-	194.630.000,00	-	192.870.000,00	-	192.870.000,00	(1.760.000,00)	99,10
02 16 02 16 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	-	171.463.920,00	-	171.463.920,00	-	86.628.405,00	-	86.628.405,00	(84.835.515,00)	50,52
<b>02 16 02 16 01 006</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>-</b>	<b>14.600.000,00</b>	<b>-</b>	<b>14.600.000,00</b>	<b>-</b>	<b>13.786.600,00</b>	<b>-</b>	<b>13.786.600,00</b>	<b>(813.400,00)</b>	<b>94,43</b>
02 16 02 16 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	-	14.600.000,00	-	14.600.000,00	-	13.786.600,00	-	13.786.600,00	(813.400,00)	94,43
<b>02 16 02 16 01 081</b>	<b>Program Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya</b>	<b>48.300.000,00</b>	<b>525.967.653,00</b>	<b>695.000.000,00</b>	<b>1.269.267.653,00</b>	<b>48.300.000,00</b>	<b>525.391.420,00</b>	<b>691.712.300,00</b>	<b>1.265.403.720,00</b>	<b>(3.863.933,00)</b>	<b>99,70</b>
02 16 02 16 01 081 001	Pelestarian dan Pengembangan Warisan Budaya, Pengetahuan dan Teknologi (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	-	97.183.200,00	175.000.000,00	272.183.200,00	-	97.092.400,00	174.960.000,00	272.052.400,00	(130.800,00)	99,95
02 16 02 16 01 081 002	Pelestarian Tata Nilai Budaya, (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	2.500.000,00	226.156.003,00	-	228.656.003,00	2.500.000,00	225.861.370,00	-	228.361.370,00	(294.633,00)	99,87
02 16 02 16 01 081 003	Pelestarian Kepurbakalaan dan Permuseuman (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	45.800.000,00	202.628.450,00	520.000.000,00	768.428.450,00	45.800.000,00	202.437.650,00	516.752.300,00	764.989.950,00	(3.438.500,00)	99,55
<b>02 16 02 16 01 082</b>	<b>Program Pelestarian dan Pengembangan Sejarah dan Bahasa</b>	<b>16.950.000,00</b>	<b>960.352.020,00</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>1.067.302.020,00</b>	<b>12.450.000,00</b>	<b>916.128.620,00</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>1.018.578.620,00</b>	<b>(48.723.400,00)</b>	<b>95,43</b>
02 16 02 16 01 082 001	Pelestarian dan Pengembangan Sejarah (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	11.150.000,00	497.781.920,00	90.000.000,00	598.931.920,00	11.150.000,00	483.360.120,00	90.000.000,00	584.510.120,00	(14.421.800,00)	97,59
02 16 02 16 01 082 002	Pelestarian dan Pengembangan Bahasa dan Sastra (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	5.800.000,00	462.570.100,00	-	468.370.100,00	1.300.000,00	432.768.500,00	-	434.068.500,00	(34.301.600,00)	92,68
<b>02 16 02 16 01 083</b>	<b>Program Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Tradisi</b>	<b>20.325.000,00</b>	<b>991.339.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.011.664.000,00</b>	<b>19.950.000,00</b>	<b>932.482.400,00</b>	<b>-</b>	<b>952.432.400,00</b>	<b>(59.231.600,00)</b>	<b>94,15</b>
02 16 02 16 01 083 001	Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Film (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	17.125.000,00	351.772.800,00	-	368.897.800,00	16.750.000,00	328.276.000,00	-	345.026.000,00	(23.871.800,00)	93,53
02 16 02 16 01 083 002	Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Tradisi (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	3.200.000,00	639.566.200,00	-	642.766.200,00	3.200.000,00	604.206.400,00	-	607.406.400,00	(35.359.800,00)	94,50

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN				REALISASI				BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
		JENIS BELANJA			JUMLAH ANGGARAN BELANJA	JENIS BELANJA			JUMLAH REALISASI BELANJA		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10-6	12
02 17	URUSAN PERPUSTAKAAN	-	2.859.460.949,00	1.104.028.430,00	3.963.489.379,00	-	2.843.381.181,08	1.103.643.255,00	3.947.024.436,08	(16.464.942,92)	99,58
02 17 02 18 01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	-	2.859.460.949,00	1.104.028.430,00	3.963.489.379,00	-	2.843.381.181,08	1.103.643.255,00	3.947.024.436,08	(16.464.942,92)	99,58
02 17 02 18 01 084	Program Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan	-	2.155.144.929,00	266.727.900,00	2.421.872.829,00	-	2.145.269.807,08	266.635.400,00	2.411.905.207,08	(9.967.621,92)	99,59
02 17 02 18 01 084 001	Pengelolaan Perpustakaan	-	1.449.687.683,00	229.480.000,00	1.679.167.683,00	-	1.442.044.934,36	229.387.500,00	1.671.432.434,36	(7.735.248,64)	99,54
02 17 02 18 01 084 002	Pemasyarakatan Budaya Gemar Membaca	-	705.457.246,00	37.247.900,00	742.705.146,00	-	703.224.872,72	37.247.900,00	740.472.772,72	(2.232.373,28)	99,70
02 17 02 18 01 085	Program Pelestarian Koleksi Pustaka dan Data Informasi Perpustakaan	-	704.316.020,00	837.300.530,00	1.541.616.550,00	-	698.111.374,00	837.007.855,00	1.535.119.229,00	(6.497.321,00)	99,58
02 17 02 18 01 085 001	Pelestarian Koleksi Pustaka dan Naskah Kuno	-	350.979.044,00	410.000.000,00	760.979.044,00	-	350.530.500,00	409.961.325,00	760.491.825,00	(487.219,00)	99,94
02 17 02 18 01 085 002	Pengelolaan Data, Sistem Informasi Perpustakaan	-	353.336.976,00	427.300.530,00	780.637.506,00	-	347.580.874,00	427.046.530,00	774.627.404,00	(6.010.102,00)	99,23
02 18	URUSAN KEARSIPAN	31.591.760,00	2.915.716.436,00	849.351.055,00	3.796.659.251,00	30.123.492,00	2.811.623.519,97	837.803.135,00	3.679.550.146,97	(117.109.104,03)	96,92
02 18 01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	31.591.760,00	2.915.716.436,00	849.351.055,00	3.796.659.251,00	30.123.492,00	2.811.623.519,97	837.803.135,00	3.679.550.146,97	(117.109.104,03)	96,92
02 18 02 18 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	29.091.760,00	1.672.679.921,00	797.800.600,00	2.499.572.281,00	27.623.492,00	1.657.230.563,97	786.252.680,00	2.471.106.735,97	(28.465.545,03)	98,86
02 18 02 18 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	372.415.000,00	-	372.415.000,00	-	372.108.559,00	-	372.108.559,00	(306.441,00)	99,92
02 18 02 18 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	29.091.760,00	1.300.264.921,00	797.800.600,00	2.127.157.281,00	27.623.492,00	1.285.122.004,97	786.252.680,00	2.098.998.176,97	(28.159.104,03)	98,68
02 18 02 18 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	446.218.800,00	-	446.218.800,00	-	361.902.234,00	-	361.902.234,00	(84.316.566,00)	81,10
02 18 02 18 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	200.000.000,00	-	200.000.000,00	-	193.987.000,00	-	193.987.000,00	(6.013.000,00)	96,99
02 18 02 18 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	246.218.800,00	-	246.218.800,00	-	167.915.234,00	-	167.915.234,00	(78.303.566,00)	68,20
02 18 02 18 01 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	14.600.000,00	-	14.600.000,00	(400.000,00)	97,33
02 18 02 18 01 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	-	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	14.600.000,00	-	14.600.000,00	(400.000,00)	97,33
02 18 02 18 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	6.104.000,00	-	6.104.000,00	-	6.104.000,00	-	6.104.000,00	-	100,00
02 18 02 18 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	-	6.104.000,00	-	6.104.000,00	-	6.104.000,00	-	6.104.000,00	-	100,00
02 18 02 18 01 086	Program Pengelolaan Pengembangan Kearsipan	2.500.000,00	324.796.030,00	-	327.296.030,00	2.500.000,00	321.868.300,00	-	324.368.300,00	(2.927.730,00)	99,11
02 18 02 18 01 086 001	Pengelolaan Arsip	2.500.000,00	98.655.780,00	-	101.155.780,00	2.500.000,00	95.771.400,00	-	98.271.400,00	(2.884.380,00)	97,15
02 18 02 18 01 086 002	Pengembangan Arsip	-	226.140.250,00	-	226.140.250,00	-	226.096.900,00	-	226.096.900,00	(43.350,00)	99,98

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN				REALISASI				BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
		JENIS BELANJA			JUMLAH ANGGARAN BELANJA	JENIS BELANJA			JUMLAH REALISASI BELANJA		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10-6	12
02 18 02 18 01 087	Program Perlindungan, Penyelamatan, Data dan Informasi Arsip	-	450.917.685,00	51.550.455,00	502.468.140,00	-	449.918.422,00	51.550.455,00	501.468.877,00	(999.263,00)	99,80
02 18 02 18 01 087 001	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	-	154.004.125,00	15.650.455,00	169.654.580,00	-	153.804.822,00	15.650.455,00	169.455.277,00	(199.303,00)	99,88
02 18 02 18 01 087 002	Data, Sistem Informasi dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	-	296.913.560,00	35.900.000,00	332.813.560,00	-	296.113.600,00	35.900.000,00	332.013.600,00	(799.960,00)	99,76
02 19	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	876.083.956,00	1.970.704.544,00	79.977.500,00	2.926.766.000,00	838.583.956,00	1.840.855.157,00	77.252.160,00	2.756.691.273,00	(170.074.727,00)	94,19
02 19 01	KANTOR KESATUAN BANGSA	876.083.956,00	1.970.704.544,00	79.977.500,00	2.926.766.000,00	838.583.956,00	1.840.855.157,00	77.252.160,00	2.756.691.273,00	(170.074.727,00)	94,19
02 19 02 19 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	26.633.956,00	401.528.544,00	79.977.500,00	508.140.000,00	26.633.956,00	354.452.971,00	77.252.160,00	458.339.087,00	(49.800.913,00)	90,20
02 19 02 19 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	245.500.000,00	-	245.500.000,00	-	206.390.061,00	-	206.390.061,00	(39.109.939,00)	84,07
02 19 02 19 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	26.633.956,00	156.028.544,00	79.977.500,00	262.640.000,00	26.633.956,00	148.062.910,00	77.252.160,00	251.949.026,00	(10.690.974,00)	95,93
02 19 02 19 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	68.900.000,00	-	68.900.000,00	-	54.657.800,00	-	54.657.800,00	(14.242.200,00)	79,33
02 19 02 19 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	20.000.000,00	-	20.000.000,00	-	20.000.000,00	-	20.000.000,00	-	100,00
02 19 02 19 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	48.900.000,00	-	48.900.000,00	-	34.657.800,00	-	34.657.800,00	(14.242.200,00)	70,87
02 19 02 19 01 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	8.000.000,00	-	8.000.000,00	-	7.000.000,00	-	7.000.000,00	(1.000.000,00)	87,50
02 19 02 19 01 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	-	8.000.000,00	-	8.000.000,00	-	7.000.000,00	-	7.000.000,00	(1.000.000,00)	87,50
02 19 02 19 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	9.160.000,00	-	9.160.000,00	-	7.626.000,00	-	7.626.000,00	(1.534.000,00)	83,25
02 19 02 19 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	-	9.160.000,00	-	9.160.000,00	-	7.626.000,00	-	7.626.000,00	(1.534.000,00)	83,25
02 19 02 19 01 090	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	849.450.000,00	1.483.116.000,00	-	2.332.566.000,00	811.950.000,00	1.417.118.386,00	-	2.229.068.386,00	(103.497.614,00)	95,56
02 19 02 19 01 090 001	Pemantapan Ideologi dan Kewaspadaan Nasional	849.450.000,00	1.483.116.000,00	-	2.332.566.000,00	811.950.000,00	1.417.118.386,00	-	2.229.068.386,00	(103.497.614,00)	95,56
03	URUSAN PILIHAN	8.297.185.402,00	62.264.867.788,00	11.362.926.610,00	81.924.979.800,00	6.950.097.248,84	56.482.656.191,22	10.649.909.246,95	74.082.662.687,01	(7.842.317.112,99)	90,43
03 01	URUSAN PERTANIAN	284.039.560,00	3.155.935.808,00	2.600.902.632,00	6.040.878.000,00	283.964.546,60	2.996.849.913,72	2.515.760.568,00	5.796.575.028,32	(244.302.971,68)	95,96
03 01 01	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	284.039.560,00	3.155.935.808,00	2.600.902.632,00	6.040.878.000,00	283.964.546,60	2.996.849.913,72	2.515.760.568,00	5.796.575.028,32	(244.302.971,68)	95,96
03 01 03 01 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	266.339.560,00	1.272.749.808,00	480.477.632,00	2.019.567.000,00	266.339.546,60	1.242.275.074,00	450.079.760,00	1.958.694.380,60	(60.872.619,40)	96,99
03 01 03 01 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	254.905.000,00	-	254.905.000,00	-	248.935.650,00	-	248.935.650,00	(5.969.350,00)	97,66
03 01 03 01 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	266.339.560,00	1.017.844.808,00	480.477.632,00	1.764.662.000,00	266.339.546,60	993.339.424,00	450.079.760,00	1.709.758.730,60	(54.903.269,40)	96,89

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN				REALISASI				BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
		JENIS BELANJA			JUMLAH ANGGARAN BELANJA	JENIS BELANJA			JUMLAH REALISASI BELANJA		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10-6	12
03 01 03 01 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	420.497.000,00	1.225.000.000,00	1.645.497.000,00	-	393.346.125,00	1.199.260.000,00	1.592.606.125,00	(52.890.875,00)	96,79
03 01 03 01 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	284.000.000,00	1.225.000.000,00	1.509.000.000,00	-	273.625.000,00	1.199.260.000,00	1.472.885.000,00	(36.115.000,00)	97,61
03 01 03 01 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	136.497.000,00	-	136.497.000,00	-	119.721.125,00	-	119.721.125,00	(16.775.875,00)	87,71
03 01 03 01 01 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	66.000.000,00	-	66.000.000,00	-	65.488.000,00	-	65.488.000,00	(512.000,00)	-
03 01 03 01 01 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	-	66.000.000,00	-	66.000.000,00	-	65.488.000,00	-	65.488.000,00	(512.000,00)	-
03 01 03 01 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	25.660.000,00	-	25.660.000,00	-	25.592.200,00	-	25.592.200,00	(67.800,00)	99,74
03 01 03 01 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	-	25.660.000,00	-	25.660.000,00	-	25.592.200,00	-	25.592.200,00	(67.800,00)	99,74
03 01 03 01 01 089	Program Pembinaan Pertanian	17.700.000,00	1.371.029.000,00	895.425.000,00	2.284.154.000,00	17.625.000,00	1.270.148.514,72	866.420.808,00	2.154.194.322,72	(129.959.677,28)	94,31
03 01 03 01 01 089 001	Pembinaan Usaha dan Budaya Pertanian	17.700.000,00	1.235.648.000,00	578.870.000,00	1.832.218.000,00	17.625.000,00	1.137.789.911,40	552.892.500,00	1.708.307.411,40	(123.910.588,60)	93,24
03 01 03 01 01 089 002	Pengawasan Mutu Komoditas Pertanian	-	135.381.000,00	316.555.000,00	451.936.000,00	-	132.358.603,32	313.528.308,00	445.886.911,32	(6.049.088,68)	98,66
03 02	URUSAN PARIWISATA	5.061.509.292,00	25.584.960.708,00	4.119.757.600,00	34.766.227.600,00	4.082.144.485,16	22.488.905.699,38	3.663.539.740,00	30.234.589.924,54	(4.531.637.675,46)	86,97
03 02 01	DINAS PARIWISATA	5.061.509.292,00	25.584.960.708,00	4.119.757.600,00	34.766.227.600,00	4.082.144.485,16	22.488.905.699,38	3.663.539.740,00	30.234.589.924,54	(4.531.637.675,46)	86,97
03 02 03 02 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	79.901.811,00	818.106.189,00	211.940.600,00	1.109.948.600,00	79.901.810,16	705.802.676,00	198.651.440,00	984.355.926,16	(125.592.673,84)	88,68
03 02 03 02 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	461.147.600,00	-	461.147.600,00	-	360.813.915,00	-	360.813.915,00	(100.333.685,00)	78,24
03 02 03 02 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	79.901.811,00	356.958.589,00	211.940.600,00	648.801.000,00	79.901.810,16	344.988.761,00	198.651.440,00	623.542.011,16	(25.258.988,84)	96,11
03 02 03 02 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	125.620.000,00	175.000.000,00	300.620.000,00	-	99.626.936,00	174.380.000,00	274.006.936,00	(26.613.064,00)	91,15
03 02 03 02 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	45.000.000,00	175.000.000,00	220.000.000,00	-	44.818.000,00	174.380.000,00	219.198.000,00	(802.000,00)	99,64
03 02 03 02 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	80.620.000,00	-	80.620.000,00	-	54.808.936,00	-	54.808.936,00	(25.811.064,00)	67,98
03 02 03 02 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	7.043.000,00	-	7.043.000,00	-	5.914.000,00	-	5.914.000,00	(1.129.000,00)	83,97
03 02 03 02 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	-	7.043.000,00	-	7.043.000,00	-	5.914.000,00	-	5.914.000,00	(1.129.000,00)	83,97



KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN				REALISASI				BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
		JENIS BELANJA			JUMLAH ANGGARAN BELANJA	JENIS BELANJA			JUMLAH REALISASI BELANJA		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10-6	12
<b>03 02 03 02 01 '090</b>	<b>Program Pengembangan dan Pemasaran Wisata</b>	<b>138.675.000,00</b>	<b>10.472.949.000,00</b>	<b>817.373.000,00</b>	<b>11.428.997.000,00</b>	<b>125.250.000,00</b>	<b>9.845.955.647,38</b>	<b>771.725.000,00</b>	<b>10.742.930.647,38</b>	<b>(686.066.352,62)</b>	<b>94,00</b>
03 02 03 02 01 '09C 001	Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata	42.125.000,00	1.583.526.000,00	-	1.625.651.000,00	34.750.000,00	1.453.811.600,00	-	1.488.561.600,00	(137.089.400,00)	91,57
03 02 03 02 01 '09C 002	Promosi dan Pemasaran Pariwisata	96.550.000,00	4.099.327.000,00	-	4.195.877.000,00	90.500.000,00	3.856.995.997,64	-	3.947.495.997,64	(248.381.002,36)	94,08
03 02 03 02 01 '09C 003	Pengelolaan Kawasan Malioboro	-	4.790.096.000,00	817.373.000,00	5.607.469.000,00	-	4.535.148.049,74	771.725.000,00	5.306.873.049,74	(300.595.950,26)	94,64
<b>03 02 02 16 01 091</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Atraksi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>2.727.185.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.743.685.000,00</b>	<b>14.775.000,00</b>	<b>2.589.961.200,00</b>	<b>-</b>	<b>2.604.736.200,00</b>	<b>(138.948.800,00)</b>	<b>94,94</b>
03 02 02 16 01 091 001	Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	16.500.000,00	1.249.435.000,00	-	1.265.935.000,00	14.775.000,00	1.176.661.600,00	-	1.191.436.600,00	(74.498.400,00)	94,12
03 02 02 16 01 091 002	Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Wisata	-	1.477.750.000,00	-	1.477.750.000,00	-	1.413.299.600,00	-	1.413.299.600,00	(64.450.400,00)	95,64
<b>03 02 02 16 01 092</b>	<b>Program Pengembangan Taman Pintar</b>	<b>4.826.432.481,00</b>	<b>11.434.057.519,00</b>	<b>2.915.444.000,00</b>	<b>19.175.934.000,00</b>	<b>3.862.217.675,00</b>	<b>9.241.645.240,00</b>	<b>2.518.783.300,00</b>	<b>15.622.646.215,00</b>	<b>(3.553.287.785,00)</b>	<b>81,47</b>
03 02 02 16 01 092 001	Operasional Layanan BLUD Taman Pintar	4.826.432.481,00	11.434.057.519,00	2.915.444.000,00	19.175.934.000,00	3.862.217.675,00	9.241.645.240,00	2.518.783.300,00	15.622.646.215,00	(3.553.287.785,00)	81,47
<b>03 03</b>	<b>URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>-</b>	<b>2.617.559.255,00</b>	<b>279.090.745,00</b>	<b>2.896.650.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.449.176.309,72</b>	<b>277.492.745,00</b>	<b>2.726.669.054,72</b>	<b>(169.980.945,28)</b>	<b>94,13</b>
<b>03 03 01</b>	<b>DINAS PERTANIAN DAN PANGAN</b>	<b>-</b>	<b>2.617.559.255,00</b>	<b>279.090.745,00</b>	<b>2.896.650.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.449.176.309,72</b>	<b>277.492.745,00</b>	<b>2.726.669.054,72</b>	<b>(169.980.945,28)</b>	<b>94,13</b>
<b>03 03 03 01 01 093</b>	<b>Program Pembinaan Kehewan dan Perikanan</b>	<b>-</b>	<b>2.617.559.255,00</b>	<b>279.090.745,00</b>	<b>2.896.650.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.449.176.309,72</b>	<b>277.492.745,00</b>	<b>2.726.669.054,72</b>	<b>(169.980.945,28)</b>	<b>94,13</b>
03 03 03 01 01 093 001	Pembinaan Usaha Budidaya Kehewan dan Perikanan	-	1.967.033.255,00	146.540.745,00	2.113.574.000,00	-	1.818.787.364,76	146.406.745,00	1.965.194.109,76	(148.379.890,24)	92,98
03 03 03 01 01 093 002	Pengawasan Mutu Komoditas Kehewan dan Perikanan	-	650.526.000,00	132.550.000,00	783.076.000,00	-	630.388.944,96	131.086.000,00	761.474.944,96	(21.601.055,04)	97,24
<b>03 04</b>	<b>URUSAN PERDAGANGAN</b>	<b>1.061.516.230,00</b>	<b>21.554.321.337,00</b>	<b>3.802.140.633,00</b>	<b>26.417.978.200,00</b>	<b>711.443.779,00</b>	<b>20.107.991.488,00</b>	<b>3.641.318.255,95</b>	<b>24.460.753.522,95</b>	<b>(1.957.224.677,05)</b>	<b>92,59</b>
<b>03 04 01</b>	<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>	<b>1.061.516.230,00</b>	<b>21.554.321.337,00</b>	<b>3.802.140.633,00</b>	<b>26.417.978.200,00</b>	<b>711.443.779,00</b>	<b>20.107.991.488,00</b>	<b>3.641.318.255,95</b>	<b>24.460.753.522,95</b>	<b>(1.957.224.677,05)</b>	<b>92,59</b>
<b>03 04 03 05 01 094</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengendalian Perdagangan</b>	<b>35.250.000,00</b>	<b>3.236.977.000,00</b>	<b>205.900.000,00</b>	<b>3.478.127.000,00</b>	<b>35.250.000,00</b>	<b>3.139.978.603,00</b>	<b>200.912.000,00</b>	<b>3.376.140.603,00</b>	<b>(101.986.397,00)</b>	<b>97,07</b>
03 04 03 05 01 094 001	Pembinaan Usaha Perdagangan	12.150.000,00	2.270.742.000,00	-	2.282.892.000,00	12.150.000,00	2.215.784.000,00	-	2.227.934.000,00	(54.958.000,00)	97,59
03 04 03 05 01 094 002	Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan dan Industri	23.100.000,00	527.045.000,00	4.800.000,00	554.945.000,00	23.100.000,00	508.380.303,00	4.200.000,00	535.680.303,00	(19.264.697,00)	96,53
03 04 03 05 01 094 003	Penyelenggaraan Metrologi Legal	-	439.190.000,00	201.100.000,00	640.290.000,00	-	415.814.300,00	196.712.000,00	612.526.300,00	(27.763.700,00)	95,66
<b>03 04 03 05 01 095</b>	<b>Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban Pasar</b>	<b>-</b>	<b>9.205.525.367,00</b>	<b>572.354.633,00</b>	<b>9.777.880.000,00</b>	<b>-</b>	<b>8.832.704.744,00</b>	<b>557.329.150,00</b>	<b>9.390.033.894,00</b>	<b>(387.846.106,00)</b>	<b>96,03</b>
03 04 03 05 01 095 001	Pengelolaan Kebersihan Pasar	-	4.961.100.866,00	303.134.134,00	5.264.235.000,00	-	4.722.721.660,00	296.132.500,00	5.018.854.160,00	(245.380.840,00)	95,34
03 04 03 05 01 095 002	Pengelolaan Pengamanan dan Penertiban Pasar	-	2.596.373.000,00	33.000.000,00	2.629.373.000,00	-	2.493.031.438,00	29.040.000,00	2.522.071.438,00	(107.301.562,00)	95,92
03 04 03 05 01 095 003	Pemeliharaan Pasar-Pasar Se Kota Yogyakarta	-	1.648.051.501,00	236.220.499,00	1.884.272.000,00	-	1.616.951.646,00	232.156.650,00	1.849.108.296,00	(35.163.704,00)	98,13

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN				REALISASI				BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
		JENIS BELANJA			JUMLAH ANGGARAN BELANJA	JENIS BELANJA			JUMLAH REALISASI BELANJA		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10-6	12
03 04 03 05 01 096	Program Penataan, Pengembangan dan Pendapatan Pasar	37.275.000,00	5.649.848.200,00	617.720.000,00	6.304.843.200,00	37.275.000,00	5.506.749.865,00	601.724.250,00	6.145.749.115,00	(159.094.085,00)	97,48
03 04 03 05 01 096 001	Pengelolaan Pendapatan Pasar	-	232.281.000,00	-	232.281.000,00	-	230.111.000,00	-	230.111.000,00	(2.170.000,00)	99,07
03 04 03 05 01 096 002	Penataan Lahan dan Pedagang	-	1.038.344.000,00	-	1.038.344.000,00	-	1.022.002.000,00	-	1.022.002.000,00	(16.342.000,00)	98,43
03 04 03 05 01 096 003	Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah I	-	1.204.370.200,00	-	1.204.370.200,00	-	1.176.802.200,00	-	1.176.802.200,00	(27.568.000,00)	97,71
03 04 03 05 01 096 004	Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah II	-	906.478.000,00	-	906.478.000,00	-	891.627.950,00	-	891.627.950,00	(14.850.050,00)	98,36
03 04 03 05 01 096 005	Optimalisasi Pengelolaan Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta	-	827.507.000,00	449.000.000,00	1.276.507.000,00	-	788.252.350,00	441.580.450,00	1.229.832.800,00	(46.674.200,00)	96,34
03 04 03 05 01 096 006	Pengembangan Pasar Tradisional	37.275.000,00	1.440.868.000,00	168.720.000,00	1.646.863.000,00	37.275.000,00	1.397.954.365,00	160.143.800,00	1.595.373.165,00	(51.489.835,00)	96,87
03 04 03 05 01 097	Program Pengembangan Pusat Bisnis	988.991.230,00	3.461.970.770,00	2.406.166.000,00	6.857.128.000,00	638.918.779,00	2.628.558.276,00	2.281.352.855,95	5.548.829.910,95	(1.308.298.089,05)	80,92
03 04 03 05 01 097 001	Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis	988.991.230,00	3.461.970.770,00	2.406.166.000,00	6.857.128.000,00	638.918.779,00	2.628.558.276,00	2.281.352.855,95	5.548.829.910,95	(1.308.298.089,05)	80,92
03 05	URUSAN PERINDUSTRIAN	1.890.120.320,00	9.139.145.680,00	561.035.000,00	11.590.301.000,00	1.872.544.438,08	8.226.805.999,40	551.797.938,00	10.651.148.375,48	(939.152.624,52)	91,90
03 05 01	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.890.120.320,00	9.139.145.680,00	561.035.000,00	11.590.301.000,00	1.872.544.438,08	8.226.805.999,40	551.797.938,00	10.651.148.375,48	(939.152.624,52)	91,90
03 05 03 05 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.829.295.320,00	3.665.246.680,00	182.535.000,00	5.677.077.000,00	1.811.719.438,08	3.080.201.893,00	175.522.838,00	5.067.444.169,08	(609.632.830,92)	89,26
03 05 03 05 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	660.884.000,00	-	660.884.000,00	-	550.366.346,00	-	550.366.346,00	(110.517.654,00)	83,28
03 05 03 05 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	1.829.295.320,00	3.004.362.680,00	182.535.000,00	5.016.193.000,00	1.811.719.438,08	2.529.835.547,00	175.522.838,00	4.517.077.823,08	(499.115.176,92)	90,05
03 05 03 05 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	569.195.000,00	-	569.195.000,00	-	436.750.845,00	-	436.750.845,00	(132.444.155,00)	76,73
03 05 03 05 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	569.195.000,00	-	569.195.000,00	-	436.750.845,00	-	436.750.845,00	(132.444.155,00)	76,73
03 05 03 05 01 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	30.000.000,00	-	30.000.000,00	-	30.000.000,00	-	30.000.000,00	-	100,00
03 05 03 05 01 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	-	30.000.000,00	-	30.000.000,00	-	30.000.000,00	-	30.000.000,00	-	100,00
03 05 03 05 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	21.708.000,00	-	21.708.000,00	-	21.200.600,00	-	21.200.600,00	(507.400,00)	97,66
03 05 03 05 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	-	21.708.000,00	-	21.708.000,00	-	21.200.600,00	-	21.200.600,00	(507.400,00)	97,66
03 05 03 05 01 098	Program Pembinaan Perindustrian	51.600.000,00	2.557.283.000,00	280.000.000,00	2.888.883.000,00	51.600.000,00	2.512.538.503,00	279.859.000,00	2.843.997.503,00	(44.885.497,00)	98,45
03 05 03 05 01 098 001	Pembinaan Teknis Perindustrian	29.250.000,00	1.122.195.000,00	-	1.151.445.000,00	29.250.000,00	1.111.204.103,00	-	1.140.454.103,00	(10.990.897,00)	99,05
03 05 03 05 01 098 002	Pembinaan Sarana Produksi	22.350.000,00	1.435.088.000,00	280.000.000,00	1.737.438.000,00	22.350.000,00	1.401.334.400,00	279.859.000,00	1.703.543.400,00	(33.894.600,00)	98,05

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN				REALISASI				BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
		JENIS BELANJA			JUMLAH ANGGARAN BELANJA	JENIS BELANJA			JUMLAH REALISASI BELANJA		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10-6	12
03 05 03 05 01 099	Program Pengembangan Industri Logam	9.225.000,00	2.295.713.000,00	98.500.000,00	2.403.438.000,00	9.225.000,00	2.146.114.158,40	96.416.100,00	2.251.755.258,40	(151.682.741,60)	93,69
03 05 03 05 01 099 001	Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Logam	-	493.423.000,00	-	493.423.000,00	-	454.469.278,40	-	454.469.278,40	(38.953.721,60)	92,11
03 05 03 05 01 099 002	Optimalisasi Pelayanan UPT Logam	9.225.000,00	1.802.290.000,00	98.500.000,00	1.910.015.000,00	9.225.000,00	1.691.644.880,00	96.416.100,00	1.797.285.980,00	(112.729.020,00)	94,10
03 06 03 06	URUSAN TRANSMIGRASI	-	212.945.000,00	-	212.945.000,00	-	212.926.781,00	-	212.926.781,00	(18.219,00)	99,99
03 06 02 11 01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	212.945.000,00	-	212.945.000,00	-	212.926.781,00	-	212.926.781,00	(18.219,00)	99,99
03 06 02 11 01 037	Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	212.945.000,00	-	212.945.000,00	-	212.926.781,00	-	212.926.781,00	(18.219,00)	99,99
03 06 02 11 01 037 001	Penempatan Transmigrasi	-	212.945.000,00	-	212.945.000,00	-	212.926.781,00	-	212.926.781,00	(18.219,00)	99,99
04	URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	4.078.588.607,00	79.876.463.797,00	21.905.293.393,00	105.860.345.797,00	3.815.643.384,96	59.593.918.966,62	21.067.233.384,15	84.476.795.735,73	(21.383.550.061,27)	79,80
04 01	URUSAN PERENCANAAN	130.295.840,00	3.188.850.540,00	1.179.192.620,00	4.498.339.000,00	128.495.840,00	3.037.146.453,00	1.144.555.400,00	4.310.197.693,00	(188.141.307,00)	95,82
04 01 01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	130.295.840,00	3.188.850.540,00	1.179.192.620,00	4.498.339.000,00	128.495.840,00	3.037.146.453,00	1.144.555.400,00	4.310.197.693,00	(188.141.307,00)	95,82
04 01 04 01 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	29.570.840,00	722.013.540,00	656.717.620,00	1.408.302.000,00	29.570.840,00	672.581.106,00	631.595.400,00	1.333.747.346,00	(74.554.654,00)	94,71
04 01 04 01 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	334.775.000,00	-	-	-	334.749.234,00	-	-	-	-
04 01 04 01 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	29.570.840,00	387.238.540,00	656.717.620,00	1.073.527.000,00	29.570.840,00	337.831.872,00	631.595.400,00	998.998.112,00	(74.528.888,00)	93,06
04 01 04 01 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	153.409.000,00	297.475.000,00	450.884.000,00	-	103.203.441,00	287.960.000,00	391.163.441,00	(59.720.559,00)	86,75
04 01 04 01 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	4.999.000,00	297.475.000,00	302.474.000,00	-	2.527.800,00	287.960.000,00	290.487.800,00	(11.986.200,00)	96,04
04 01 04 01 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	148.410.000,00	-	148.410.000,00	-	100.675.641,00	-	100.675.641,00	(47.734.359,00)	67,84
04 01 04 01 01 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	15.990.000,00	-	15.990.000,00	-	15.120.000,00	-	15.120.000,00	(870.000,00)	94,56
04 01 04 01 01 005 001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	15.990.000,00	-	15.990.000,00	-	15.120.000,00	-	15.120.000,00	(870.000,00)	94,56
04 01 04 01 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	11.199.000,00	-	11.199.000,00	-	10.621.600,00	-	10.621.600,00	(577.400,00)	94,84
04 01 04 01 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	-	11.199.000,00	-	11.199.000,00	-	10.621.600,00	-	10.621.600,00	(577.400,00)	94,84

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN				REALISASI				BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
		JENIS BELANJA			JUMLAH ANGGARAN BELANJA	JENIS BELANJA			JUMLAH REALISASI BELANJA		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10-6	12
<b>04 01 04 01 01 100</b>	<b>Program Bidang Ekonomi</b>	<b>12.600.000,00</b>	<b>546.973.000,00</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>784.573.000,00</b>	<b>12.600.000,00</b>	<b>516.130.960,00</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>753.730.960,00</b>	<b>(30.842.040,00)</b>	<b>96,07</b>
04 01 04 01 01 100 001	Perencanaan dan Pengendalian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	-	59.379.000,00	-	59.379.000,00	-	56.802.600,00	-	56.802.600,00	(2.576.400,00)	95,66
04 01 04 01 01 100 002	Perencanaan dan Pengendalian Pariwisata dan Tenaga Kerja	12.600.000,00	114.414.000,00	125.000.000,00	252.014.000,00	12.600.000,00	110.863.620,00	125.000.000,00	248.463.620,00	(3.550.380,00)	98,59
04 01 04 01 01 100 003	Perencanaan dan Pengendalian Ekonomi Daerah	-	373.180.000,00	100.000.000,00	473.180.000,00	-	348.464.740,00	100.000.000,00	448.464.740,00	(24.715.260,00)	94,78
<b>04 01 04 01 01 101</b>	<b>Program Bidang Fisik</b>	<b>4.950.000,00</b>	<b>605.119.000,00</b>	<b>-</b>	<b>610.069.000,00</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>605.084.160,00</b>	<b>-</b>	<b>608.234.160,00</b>	<b>(1.834.840,00)</b>	<b>99,70</b>
04 01 04 01 01 101 001	Perencanaan dan Pengendalian Perhubungan dan Kominfo	4.950.000,00	77.049.000,00	-	81.999.000,00	3.150.000,00	77.031.420,00	-	80.181.420,00	(1.817.580,00)	97,78
04 01 04 01 01 101 002	Perencanaan dan Pengendalian Pekerjaan Umum dan Permukiman	-	372.421.000,00	-	372.421.000,00	-	372.412.120,00	-	372.412.120,00	(8.880,00)	100,00
04 01 04 01 01 101 003	Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	-	155.649.000,00	-	155.649.000,00	-	155.640.620,00	-	155.640.620,00	(8.380,00)	99,99
<b>04 01 04 01 01 102</b>	<b>Program Bidang Sosial</b>	<b>61.500.000,00</b>	<b>432.617.000,00</b>	<b>-</b>	<b>494.117.000,00</b>	<b>61.500.000,00</b>	<b>428.536.366,00</b>	<b>-</b>	<b>490.036.366,00</b>	<b>(4.080.634,00)</b>	<b>99,17</b>
04 01 04 01 01 102 001	Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan dan Kebudayaan	-	48.204.000,00	-	48.204.000,00	-	47.543.620,00	-	47.543.620,00	(660.380,00)	98,63
04 01 04 01 01 102 002	Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Rakyat	61.500.000,00	339.194.000,00	-	400.694.000,00	61.500.000,00	335.781.126,00	-	397.281.126,00	(3.412.874,00)	99,15
04 01 04 01 01 102 003	Perencanaan dan Pengendalian Aparatur	-	45.219.000,00	-	45.219.000,00	-	45.211.620,00	-	45.211.620,00	(7.380,00)	99,98
<b>04 01 04 01 01 103</b>	<b>Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah</b>	<b>21.675.000,00</b>	<b>701.530.000,00</b>	<b>-</b>	<b>723.205.000,00</b>	<b>21.675.000,00</b>	<b>685.868.820,00</b>	<b>-</b>	<b>707.543.820,00</b>	<b>(15.661.180,00)</b>	<b>97,83</b>
04 01 04 01 01 103 001	Perencanaan Program Pembangunan Daerah	6.300.000,00	409.087.000,00	-	415.387.000,00	6.300.000,00	402.676.540,00	-	408.976.540,00	(6.410.460,00)	98,46
04 01 04 01 01 103 002	Pengendalian Program Pembangunan Daerah	5.250.000,00	119.487.000,00	-	124.737.000,00	5.250.000,00	114.455.640,00	-	119.705.640,00	(5.031.360,00)	95,97
04 01 04 01 01 103 003	Pengelolaan dan Analisa Data Perencanaan	10.125.000,00	172.956.000,00	-	183.081.000,00	10.125.000,00	168.736.640,00	-	178.861.640,00	(4.219.360,00)	97,70
<b>04 02</b>	<b>URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	<b>520.350.000,00</b>	<b>725.078.000,00</b>	<b>615.000.000,00</b>	<b>1.860.428.000,00</b>	<b>519.275.000,00</b>	<b>638.951.475,00</b>	<b>615.000.000,00</b>	<b>1.773.226.475,00</b>	<b>(87.201.525,00)</b>	<b>95,31</b>
<b>04 02 04 01 01</b>	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>520.350.000,00</b>	<b>725.078.000,00</b>	<b>615.000.000,00</b>	<b>1.860.428.000,00</b>	<b>519.275.000,00</b>	<b>638.951.475,00</b>	<b>615.000.000,00</b>	<b>1.773.226.475,00</b>	<b>(87.201.525,00)</b>	<b>95,31</b>
<b>04 02 04 01 01 104</b>	<b>Program Bidang Penelitian dan Pengembangan</b>	<b>520.350.000,00</b>	<b>725.078.000,00</b>	<b>615.000.000,00</b>	<b>1.860.428.000,00</b>	<b>519.275.000,00</b>	<b>638.951.475,00</b>	<b>615.000.000,00</b>	<b>1.773.226.475,00</b>	<b>(87.201.525,00)</b>	<b>95,31</b>
04 02 04 01 01 104 001	Penelitian Strategis Pembangunan Daerah	83.250.000,00	160.791.000,00	315.000.000,00	559.041.000,00	82.175.000,00	136.715.190,00	315.000.000,00	533.890.190,00	(25.150.810,00)	95,50
04 02 04 01 01 104 002	Optimalisasi dan Pengembangan Kebijakan Penanganan Isu Strategis	375.500.000,00	240.259.000,00	200.000.000,00	815.759.000,00	375.500.000,00	197.259.500,00	200.000.000,00	772.759.500,00	(42.999.500,00)	94,73
04 02 04 01 01 104 003	Pemantapan Inovasi Daerah	61.600.000,00	324.028.000,00	100.000.000,00	485.628.000,00	61.600.000,00	304.976.785,00	100.000.000,00	466.576.785,00	(19.051.215,00)	96,08

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN			REALISASI			BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%		
		JENIS BELANJA			JUMLAH ANGGARAN BELANJA	JENIS BELANJA					
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA			BELANJA MODAL	JUMLAH REALISASI BELANJA
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10-6	12
04 03	URUSAN SEKRETARIAT DAERAH	1.621.018.156,00	14.509.291.498,00	7.389.579.346,00	23.519.889.000,00	1.565.263.280,32	13.233.665.243,30	7.052.542.697,75	21.851.471.221,37	(1.668.417.778,63)	92,91
04 03 04 03 01	SEKRETARIAT DAERAH	1.621.018.156,00	14.509.291.498,00	7.389.579.346,00	23.519.889.000,00	1.565.263.280,32	13.233.665.243,30	7.052.542.697,75	21.851.471.221,37	(1.668.417.778,63)	92,91
04 03 04 03 01A	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	80.634.000,00	1.988.941.000,00	658.280.000,00	2.727.855.000,00	75.483.950,72	1.751.041.630,16	635.403.560,00	2.461.929.140,88	(265.925.859,12)	90,25
04 03 04 03 01A 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	26.634.000,00	431.490.000,00	298.580.000,00	756.704.000,00	26.633.950,72	335.027.273,00	281.441.560,00	643.102.783,72	(113.601.216,28)	84,99
04 03 04 03 01A 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	297.054.000,00	-	297.054.000,00	-	225.988.873,00	-	225.988.873,00	(71.065.127,00)	76,08
04 03 04 03 01A 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	26.634.000,00	134.436.000,00	298.580.000,00	459.650.000,00	26.633.950,72	109.038.400,00	281.441.560,00	417.113.910,72	(42.536.089,28)	90,75
04 03 04 03 01A 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	45.510.000,00	259.700.000,00	305.210.000,00	-	25.029.625,00	257.376.000,00	282.405.625,00	(22.804.375,00)	92,53
04 03 04 03 01A 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	-	259.700.000,00	259.700.000,00	-	-	257.376.000,00	257.376.000,00	(2.324.000,00)	99,11
04 03 04 03 01A 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	45.510.000,00	-	45.510.000,00	-	25.029.625,00	-	25.029.625,00	(20.480.375,00)	55,00
04 03 04 03 01A 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	8.070.000,00	-	8.070.000,00	-	6.704.000,00	-	6.704.000,00	(1.366.000,00)	83,07
04 03 04 03 01A 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	-	8.070.000,00	-	8.070.000,00	-	6.704.000,00	-	6.704.000,00	(1.366.000,00)	83,07
04 03 04 03 01A 105	Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan	54.000.000,00	1.503.871.000,00	100.000.000,00	1.657.871.000,00	48.850.000,00	1.384.280.732,16	96.586.000,00	1.529.716.732,16	(128.154.267,84)	92,27
04 03 04 03 01A 105 001	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	36.300.000,00	394.358.000,00	100.000.000,00	530.658.000,00	32.725.000,00	330.642.012,16	96.586.000,00	459.953.012,16	(70.704.987,84)	86,68
04 03 04 03 01A 105 002	Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Administrasi Kecamatan	17.700.000,00	382.378.000,00	-	400.078.000,00	16.125.000,00	352.738.300,00	-	368.863.300,00	(31.214.700,00)	92,20
04 03 04 03 01A 105 003	Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat	-	727.135.000,00	-	727.135.000,00	-	700.900.420,00	-	700.900.420,00	(26.234.580,00)	96,39
04 03 04 03 01B	BAGIAN HUKUM	554.772.450,00	1.307.630.550,00	580.400.000,00	2.442.803.000,00	525.772.318,72	1.191.210.911,16	570.180.221,00	2.287.163.450,88	(155.639.549,12)	93,63
04 03 04 03 01B 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	90.247.450,00	318.881.550,00	45.400.000,00	454.529.000,00	90.247.318,72	305.541.496,00	44.034.221,00	439.823.035,72	(14.705.964,28)	96,76
04 03 04 03 01B 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	238.794.000,00	-	238.794.000,00	-	237.367.706,00	-	237.367.706,00	(1.426.294,00)	99,40
04 03 04 03 01B 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	90.247.450,00	80.087.550,00	45.400.000,00	215.735.000,00	90.247.318,72	68.173.790,00	44.034.221,00	202.455.329,72	(13.279.670,28)	93,84
04 03 04 03 01B 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	49.320.000,00	135.000.000,00	184.320.000,00	-	38.031.735,00	132.146.000,00	170.177.735,00	(14.142.265,00)	92,33
04 03 04 03 01B 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	-	135.000.000,00	135.000.000,00	-	-	132.146.000,00	132.146.000,00	(2.854.000,00)	97,89
04 03 04 03 01B 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	49.320.000,00	-	49.320.000,00	-	38.031.735,00	-	38.031.735,00	(11.288.265,00)	77,11

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN				REALISASI				BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%	
		JENIS BELANJA			JUMLAH ANGGARAN BELANJA	JENIS BELANJA			JUMLAH REALISASI BELANJA			
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL				
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10-6	12	
04 03 04 03 01B 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	25.000.000,00	-	25.000.000,00	-	25.000.000,00	-	25.000.000,00	-	-	100,00
04 03 04 03 01B 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	-	25.000.000,00	-	25.000.000,00	-	25.000.000,00	-	25.000.000,00	-	-	100,00
04 03 04 03 01B 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	14.705.000,00	-	14.705.000,00	-	13.860.800,00	-	13.860.800,00	-	(844.200,00)	94,26
04 03 04 03 01B 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	-	14.705.000,00	-	14.705.000,00	-	13.860.800,00	-	13.860.800,00	-	(844.200,00)	94,26
04 03 04 03 01B 106	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum	464.525.000,00	899.724.000,00	400.000.000,00	1.764.249.000,00	435.525.000,00	808.776.880,16	394.000.000,00	1.638.301.880,16	(125.947.119,84)	92,86	
04 03 04 03 01B 106 001	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	47.300.000,00	193.778.000,00	400.000.000,00	641.078.000,00	47.300.000,00	182.916.000,00	394.000.000,00	624.216.000,00	(16.862.000,00)	97,37	
04 03 04 03 01B 106 002	Layanan Bantuan Hukum	358.450.000,00	298.920.000,00	-	657.370.000,00	329.450.000,00	241.689.300,00	-	571.139.300,00	(86.230.700,00)	86,88	
04 03 04 03 01B 106 003	Penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah	58.775.000,00	407.026.000,00	-	465.801.000,00	58.775.000,00	384.171.580,16	-	442.946.580,16	(22.854.419,84)	95,09	
04 03 04 03 01C	<b>BAGIAN PROTOKOL</b>	<b>222.039.800,00</b>	<b>4.194.944.200,00</b>	<b>898.770.000,00</b>	<b>5.315.754.000,00</b>	<b>210.065.477,44</b>	<b>3.897.422.517,08</b>	<b>835.831.086,75</b>	<b>4.943.319.081,27</b>	<b>(372.434.918,73)</b>	<b>92,99</b>	
04 03 04 03 01C 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	222.039.800,00	1.788.655.200,00	639.270.000,00	2.649.965.000,00	210.065.477,44	1.693.340.503,00	578.610.551,00	2.482.016.531,44	(167.948.468,56)	93,66	
04 03 04 03 01C 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	1.088.000.000,00	-	1.088.000.000,00	-	1.072.104.343,00	-	1.072.104.343,00	(15.895.657,00)	98,54	
04 03 04 03 01C 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	222.039.800,00	700.655.200,00	639.270.000,00	1.561.965.000,00	210.065.477,44	621.236.160,00	578.610.551,00	1.409.912.188,44	(152.052.811,56)	90,27	
04 03 04 03 01C 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	355.550.000,00	259.500.000,00	615.050.000,00	-	283.641.942,00	257.220.535,75	540.862.477,75	(74.187.522,25)	87,94	
04 03 04 03 01C 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	25.000.000,00	259.500.000,00	284.500.000,00	-	24.657.667,00	257.220.535,75	281.878.202,75	(2.621.797,25)	99,08	
04 03 04 03 01C 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	330.550.000,00	-	330.550.000,00	-	258.984.275,00	-	258.984.275,00	(71.565.725,00)	78,35	
04 03 04 03 01C 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	30.400.000,00	-	30.400.000,00	-	24.800.000,00	-	24.800.000,00	(5.600.000,00)	81,58	
04 03 04 03 01C 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	-	30.400.000,00	-	30.400.000,00	-	24.800.000,00	-	24.800.000,00	(5.600.000,00)	81,58	
04 03 04 03 01C 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	5.600.000,00	-	5.600.000,00	-	5.600.000,00	-	5.600.000,00	-	100,00	
04 03 04 03 01C 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	-	5.600.000,00	-	5.600.000,00	-	5.600.000,00	-	5.600.000,00	-	100,00	
04 03 04 03 01C 107	Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemda	-	2.014.739.000,00	-	2.014.739.000,00	-	1.890.040.072,08	-	1.890.040.072,08	(124.698.927,92)	93,81	
04 03 04 03 01C 107 001	Pemanduan Kegiatan Walikota dan Wakil Walikota	-	521.389.000,00	-	521.389.000,00	-	501.274.669,16	-	501.274.669,16	(20.114.330,84)	96,14	
04 03 04 03 01C 107 002	Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta	-	1.363.296.000,00	-	1.363.296.000,00	-	1.259.900.158,60	-	1.259.900.158,60	(103.395.841,40)	92,42	
04 03 04 03 01C 107 003	Pemanduan Kegiatan Sekda, Asisten dan Staf Ahli	-	130.054.000,00	-	130.054.000,00	-	128.865.244,32	-	128.865.244,32	(1.188.755,68)	99,09	

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN				REALISASI				BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
		JENIS BELANJA			JUMLAH ANGGARAN BELANJA	JENIS BELANJA			JUMLAH REALISASI BELANJA		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10-6	12
<b>04 03 04 03 01D</b>	<b>BAGIAN UMUM</b>	<b>136.106.664,00</b>	<b>3.080.850.040,00</b>	<b>3.143.837.296,00</b>	<b>6.360.794.000,00</b>	<b>136.104.444,00</b>	<b>2.751.303.859,36</b>	<b>2.935.273.400,00</b>	<b>5.822.681.703,36</b>	<b>(538.112.296,64)</b>	<b>91,54</b>
<b>04 03 04 03 01D 001</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>136.106.664,00</b>	<b>144.289.640,00</b>	<b>272.299.696,00</b>	<b>552.696.000,00</b>	<b>136.104.444,00</b>	<b>140.187.669,00</b>	<b>224.398.400,00</b>	<b>500.690.513,00</b>	<b>(52.005.487,00)</b>	<b>90,59</b>
04 03 04 03 01D 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	14.388.000,00	-	14.388.000,00	-	14.329.000,00	-	14.329.000,00	(59.000,00)	99,59
04 03 04 03 01D 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	136.106.664,00	129.901.640,00	272.299.696,00	538.308.000,00	136.104.444,00	125.858.669,00	224.398.400,00	486.361.513,00	(51.946.487,00)	90,35
<b>04 03 04 03 01D 002</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>-</b>	<b>101.058.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>301.058.000,00</b>	<b>-</b>	<b>84.456.100,00</b>	<b>198.253.000,00</b>	<b>282.709.100,00</b>	<b>(18.348.900,00)</b>	<b>93,91</b>
04 03 04 03 01D 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	-	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	198.253.000,00	198.253.000,00	(1.747.000,00)	99,13
04 03 04 03 01D 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	101.058.000,00	-	101.058.000,00	-	84.456.100,00	-	84.456.100,00	(16.601.900,00)	83,57
<b>04 03 04 03 01D 006</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>-</b>	<b>1.740.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.740.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.687.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.687.000,00</b>	<b>(53.000,00)</b>	<b>96,95</b>
04 03 04 03 01D 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	-	1.740.000,00	-	1.740.000,00	-	1.687.000,00	-	1.687.000,00	(53.000,00)	96,95
<b>04 03 04 03 01D 108</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtanggaan</b>	<b>-</b>	<b>2.833.762.400,00</b>	<b>2.671.537.600,00</b>	<b>5.505.300.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.524.973.090,36</b>	<b>2.512.622.000,00</b>	<b>5.037.595.090,36</b>	<b>(467.704.909,64)</b>	<b>91,50</b>
04 03 04 03 01D 108 001	Pelayanan Kerumahtanggaan	-	2.279.392.400,00	2.671.537.600,00	4.950.930.000,00	-	2.149.513.348,36	2.512.622.000,00	4.662.135.348,36	(288.794.651,64)	94,17
04 03 04 03 01D 108 002	Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah	-	541.770.000,00	-	541.770.000,00	-	363.444.742,00	-	363.444.742,00	(178.325.258,00)	67,08
04 03 04 03 01D 108 003	Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta	-	12.600.000,00	-	12.600.000,00	-	12.015.000,00	-	12.015.000,00	(585.000,00)	95,36
<b>04 03 04 03 01E</b>	<b>BAGIAN PEREKONOMIAN, PENGEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN KERJASAMA</b>	<b>88.743.750,00</b>	<b>767.853.400,00</b>	<b>782.247.850,00</b>	<b>1.638.845.000,00</b>	<b>88.011.474,72</b>	<b>742.621.820,00</b>	<b>763.524.455,00</b>	<b>1.594.157.749,72</b>	<b>(44.687.250,28)</b>	<b>97,27</b>
<b>04 03 04 03 01E 001</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>88.743.750,00</b>	<b>353.790.400,00</b>	<b>190.697.850,00</b>	<b>633.232.000,00</b>	<b>88.011.474,72</b>	<b>350.331.091,00</b>	<b>186.406.030,00</b>	<b>624.748.595,72</b>	<b>(8.483.404,28)</b>	<b>98,66</b>
04 03 04 03 01E 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	221.180.000,00	-	221.180.000,00	-	219.853.237,00	-	219.853.237,00	(1.326.763,00)	99,40
04 03 04 03 01E 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	88.743.750,00	132.610.400,00	190.697.850,00	412.052.000,00	88.011.474,72	130.477.854,00	186.406.030,00	404.895.358,72	(7.156.641,28)	98,26
<b>04 03 04 03 01E 002</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>-</b>	<b>70.797.000,00</b>	<b>129.550.000,00</b>	<b>200.347.000,00</b>	<b>-</b>	<b>66.423.079,00</b>	<b>117.017.675,00</b>	<b>183.440.754,00</b>	<b>(16.906.246,00)</b>	<b>91,56</b>
04 03 04 03 01E 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	27.200.000,00	129.550.000,00	156.750.000,00	-	26.932.359,00	117.017.675,00	143.950.034,00	287.900.068	#####
04 03 04 03 01E 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	43.597.000,00	-	43.597.000,00	-	39.490.720,00	-	39.490.720,00	(4.106.280,00)	90,58

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN				REALISASI				BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
		JENIS BELANJA			JUMLAH ANGGARAN BELANJA	JENIS BELANJA			JUMLAH REALISASI BELANJA		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10-6	12
04 03 04 03 01E 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	20.000.000,00	-	20.000.000,00	-	14.750.000,00	-	14.750.000,00	(5.250.000,00)	73,75
04 03 04 03 01E 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	-	20.000.000,00	-	20.000.000,00	-	14.750.000,00	-	14.750.000,00	(5.250.000,00)	73,75
04 03 04 03 01E 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	2.794.000,00	-	2.794.000,00	-	2.652.000,00	-	2.652.000,00	(142.000,00)	94,92
04 03 04 03 01E 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	-	2.794.000,00	-	2.794.000,00	-	2.652.000,00	-	2.652.000,00	(142.000,00)	94,92
04 03 04 03 01E 109	Program Peningkatan Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama	-	320.472.000,00	462.000.000,00	782.472.000,00	-	308.465.650,00	460.100.750,00	768.566.400,00	(13.905.600,00)	98,22
04 03 04 03 01E 109 001	Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah	-	57.611.000,00	165.000.000,00	222.611.000,00	-	55.191.250,00	163.473.750,00	218.665.000,00	(3.946.000,00)	98,23
04 03 04 03 01E 109 002	Pembinaan BUMD dan BLUD	-	23.925.000,00	285.000.000,00	308.925.000,00	-	23.774.200,00	285.000.000,00	308.774.200,00	(150.800,00)	99,95
04 03 04 03 01E 109 003	Kerjasama Daerah	-	238.936.000,00	12.000.000,00	250.936.000,00	-	229.500.200,00	11.627.000,00	241.127.200,00	(9.808.800,00)	96,09
04 03 04 03 01F	BAGIAN ADMINISTRASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN	19.450.000,00	694.680.800,00	365.224.200,00	1.079.355.000,00	19.450.000,00	629.648.922,16	362.736.355,00	1.011.835.277,16	(67.519.722,84)	93,74
04 03 04 03 01F 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	139.438.810,00	600.000,00	140.038.810,00	-	131.991.986,00	598.755,00	132.590.741,00	(7.448.069,00)	94,68
04 03 04 03 01F 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	34.325.200,00	-	34.325.200,00	-	30.384.886,00	-	30.384.886,00	(3.940.314,00)	88,52
04 03 04 03 01F 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	-	105.113.610,00	600.000,00	105.713.610,00	-	101.607.100,00	598.755,00	102.205.855,00	(3.507.755,00)	96,68
04 03 04 03 01F 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	45.936.000,00	314.624.200,00	360.560.200,00	-	45.423.631,00	312.417.600,00	357.841.231,00	(2.718.969,00)	99,25
04 03 04 03 01F 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	-	314.624.200,00	314.624.200,00	-	-	312.417.600,00	312.417.600,00	(2.206.600,00)	99,30
04 03 04 03 01F 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	45.936.000,00	-	45.936.000,00	-	45.423.631,00	-	45.423.631,00	(512.369,00)	98,88
04 03 04 03 01F 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	11.796.400,00	-	11.796.400,00	-	11.122.400,00	-	11.122.400,00	(674.000,00)	94,29
04 03 04 03 01F 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	-	11.796.400,00	-	11.796.400,00	-	11.122.400,00	-	11.122.400,00	(674.000,00)	94,29
04 03 04 03 01F 110	Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	19.450.000,00	497.509.590,00	50.000.000,00	566.959.590,00	19.450.000,00	441.110.905,16	49.720.000,00	510.280.905,16	(56.678.684,84)	90,00
04 03 04 03 01F 110 001	Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Setda	-	41.462.620,00	-	41.462.620,00	-	41.366.620,00	-	41.366.620,00	(96.000,00)	99,77
04 03 04 03 01F 110 002	Pengendalian Administrasi dan Pelaksanaan Kegiatan	14.700.000,00	234.425.060,00	-	249.125.060,00	14.700.000,00	180.287.389,00	-	194.987.389,00	(54.137.671,00)	78,27
04 03 04 03 01F 110 003	Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan	4.750.000,00	221.621.910,00	50.000.000,00	276.371.910,00	4.750.000,00	219.456.896,16	49.720.000,00	273.926.896,16	(2.445.013,84)	99,12



KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN				REALISASI				BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
		JENIS BELANJA			JUMLAH ANGGARAN BELANJA	JENIS BELANJA			JUMLAH REALISASI BELANJA		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10-6	12
<b>04 03 04 03 01G</b>	<b>BAGIAN ORGANISASI</b>	<b>351.856.448,00</b>	<b>1.309.815.552,00</b>	<b>580.330.000,00</b>	<b>2.242.002.000,00</b>	<b>346.147.318,72</b>	<b>1.217.637.904,00</b>	<b>574.789.000,00</b>	<b>2.138.574.222,72</b>	<b>(103.427.777,28)</b>	<b>95,39</b>
<b>04 03 04 03 01G 001</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>95.956.448,00</b>	<b>379.348.552,00</b>	<b>174.050.000,00</b>	<b>649.355.000,00</b>	<b>90.247.318,72</b>	<b>365.519.078,00</b>	<b>172.250.000,00</b>	<b>628.016.396,72</b>	<b>(21.338.603,28)</b>	<b>96,71</b>
04 03 04 03 01G 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	222.310.000,00	-	222.310.000,00	-	221.521.804,00	-	221.521.804,00	(788.196,00)	99,65
04 03 04 03 01G 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	95.956.448,00	157.038.552,00	174.050.000,00	427.045.000,00	90.247.318,72	143.997.274,00	172.250.000,00	406.494.592,72	(20.550.407,28)	95,19
<b>04 03 04 03 01G 002</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>-</b>	<b>43.300.000,00</b>	<b>101.000.000,00</b>	<b>144.300.000,00</b>	<b>-</b>	<b>30.459.750,00</b>	<b>100.989.000,00</b>	<b>131.448.750,00</b>	<b>(12.851.250,00)</b>	<b>91,09</b>
<b>04 03 04 03 01G 002 022</b>	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>101.000.000,00</b>	<b>101.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100.989.000,00</b>	<b>100.989.000,00</b>	<b>(11.000,00)</b>	<b>99,99</b>
04 03 04 03 01G 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	43.300.000,00	-	43.300.000,00	-	30.459.750,00	-	30.459.750,00	(12.840.250,00)	70,35
<b>04 03 04 03 01G 005</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>-</b>	<b>24.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>24.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>24.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>24.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
04 03 04 03 01G 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	-	24.500.000,00	-	24.500.000,00	-	24.500.000,00	-	24.500.000,00	-	100,00
<b>04 03 04 03 01G 006</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>-</b>	<b>3.240.000,00</b>	<b>-</b>	<b>3.240.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.313.980,00</b>	<b>-</b>	<b>2.313.980,00</b>	<b>(926.020,00)</b>	<b>71,42</b>
04 03 04 03 01G 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	-	3.240.000,00	-	3.240.000,00	-	2.313.980,00	-	2.313.980,00	(926.020,00)	71,42
<b>04 03 04 03 01G 111</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah</b>	<b>255.900.000,00</b>	<b>859.427.000,00</b>	<b>305.280.000,00</b>	<b>1.420.607.000,00</b>	<b>255.900.000,00</b>	<b>794.845.096,00</b>	<b>301.550.000,00</b>	<b>1.352.295.096,00</b>	<b>(68.311.904,00)</b>	<b>95,19</b>
04 03 04 03 01G 111 001	Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur	82.500.000,00	133.277.000,00	203.840.000,00	419.617.000,00	82.500.000,00	113.530.240,00	200.380.000,00	396.410.240,00	(23.206.760,00)	94,47
04 03 04 03 01G 111 002	Pemantapan Pelayanan Publik	92.400.000,00	608.468.135,00	-	700.868.135,00	92.400.000,00	566.496.736,00	-	658.896.736,00	(41.971.399,00)	94,01
04 03 04 03 01G 111 003	Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi	81.000.000,00	117.681.865,00	101.440.000,00	300.121.865,00	81.000.000,00	114.818.120,00	101.170.000,00	296.988.120,00	(3.133.745,00)	98,96
<b>04 03 04 03 01H</b>	<b>BAGIAN LAYANAN PENGADAAN</b>	<b>167.415.044,00</b>	<b>1.164.575.956,00</b>	<b>380.490.000,00</b>	<b>1.712.481.000,00</b>	<b>164.228.296,00</b>	<b>1.052.777.679,38</b>	<b>374.804.620,00</b>	<b>1.591.810.595,38</b>	<b>(120.670.404,62)</b>	<b>92,95</b>
<b>04 03 04 03 01H 001</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>150.090.044,00</b>	<b>415.888.956,00</b>	<b>225.990.000,00</b>	<b>791.969.000,00</b>	<b>147.453.296,00</b>	<b>377.554.634,86</b>	<b>221.942.620,00</b>	<b>746.950.550,86</b>	<b>(45.018.449,14)</b>	<b>94,32</b>
04 03 04 03 01H 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	189.896.000,00	-	189.896.000,00	-	175.253.692,86	-	175.253.692,86	(14.642.307,14)	92,29
04 03 04 03 01H 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	150.090.044,00	225.992.956,00	225.990.000,00	602.073.000,00	147.453.296,00	202.300.942,00	221.942.620,00	571.696.858,00	(30.376.142,00)	94,95
<b>04 03 04 03 01H 002</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>-</b>	<b>49.760.000,00</b>	<b>154.500.000,00</b>	<b>204.260.000,00</b>	<b>-</b>	<b>29.369.438,00</b>	<b>152.862.000,00</b>	<b>182.231.438,00</b>	<b>(22.028.562,00)</b>	<b>89,22</b>
04 03 04 03 01H 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	-	154.500.000,00	154.500.000,00	-	-	152.862.000,00	152.862.000,00	(1.638.000,00)	98,94
04 03 04 03 01H 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	49.760.000,00	-	49.760.000,00	-	29.369.438,00	-	29.369.438,00	(20.390.562,00)	59,02

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN				REALISASI				BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%	
		JENIS BELANJA			JUMLAH ANGGARAN BELANJA	JENIS BELANJA			JUMLAH REALISASI BELANJA			
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL				
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10-6	12	
04 03 04 03 01H 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
04 03 04 03 01H 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
04 03 04 03 01H 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	8.850.000,00	-	8.850.000,00	-	6.340.450,00	-	6.340.450,00	(2.509.550,00)	71,64	
04 03 04 03 01H 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	-	8.850.000,00	-	8.850.000,00	-	6.340.450,00	-	6.340.450,00	(2.509.550,00)	71,64	
04 03 04 03 01H 112	Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	17.325.000,00	690.077.000,00	-	707.402.000,00	16.775.000,00	639.513.156,52	-	656.288.156,52	(51.113.843,48)	92,77	
04 03 04 03 01H 112 001	Pengelolaan Sistem Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa	5.775.000,00	136.341.000,00	-	142.116.000,00	5.225.000,00	123.200.677,76	-	128.425.677,76	(13.690.322,24)	90,37	
04 03 04 03 01H 112 002	Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	5.775.000,00	271.743.000,00	-	277.518.000,00	5.775.000,00	267.484.245,60	-	273.259.245,60	(4.258.754,40)	98,47	
04 03 04 03 01H 112 003	Pengelolaan SDM dan Advokasi Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa	5.775.000,00	281.993.000,00	-	287.768.000,00	5.775.000,00	248.828.233,16	-	254.603.233,16	(33.164.766,84)	88,48	
04 04	URUSAN SEKRETARIAT DPRD	176.003.704,00	36.602.832.596,00	505.280.000,00	37.284.116.300,00	163.303.704,00	20.693.393.721,67	458.879.575,00	21.315.577.000,67	(15.968.539.299,33)	57,17	
04 04 01	SEKRETARIAT DPRD	176.003.704,00	36.602.832.596,00	505.280.000,00	37.284.116.300,00	163.303.704,00	20.693.393.721,67	458.879.575,00	21.315.577.000,67	(15.968.539.299,33)	57,17	
04 04 04 04 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	159.803.704,00	3.479.257.676,00	497.780.000,00	4.136.841.380,00	159.803.704,00	2.221.363.881,96	451.764.200,00	2.832.931.785,96	(1.303.909.594,04)	68,48	
04 04 04 04 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	1.258.934.381,00	-	1.258.934.381,00	-	919.316.102,96	-	919.316.102,96	(339.618.278,04)	73,02	
04 04 04 04 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	159.803.704,00	2.220.323.295,00	497.780.000,00	2.877.906.999,00	159.803.704,00	1.302.047.779,00	451.764.200,00	1.913.615.683,00	(964.291.316,00)	66,49	
04 04 04 04 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	1.045.863.420,00	-	1.045.863.420,00	-	471.089.155,00	-	471.089.155,00	(574.774.265,00)	45,04	
04 04 04 04 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	359.000.000,00	-	359.000.000,00	-	297.961.000,00	-	297.961.000,00	(61.039.000,00)	83,00	
04 04 04 04 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	686.863.420,00	-	686.863.420,00	-	173.128.155,00	-	173.128.155,00	(513.735.265,00)	25,21	
04 04 04 04 01 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	333.000.000,00	-	333.000.000,00	-	333.000.000,00	-	333.000.000,00	-	100,00	
04 04 04 04 01 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	-	333.000.000,00	-	333.000.000,00	-	333.000.000,00	-	333.000.000,00	-	100,00	
04 04 04 04 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	18.127.000,00	-	18.127.000,00	-	18.126.900,00	-	18.126.900,00	(100,00)	100,00	
04 04 04 04 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	-	18.127.000,00	-	18.127.000,00	-	18.126.900,00	-	18.126.900,00	(100,00)	100,00	
04 04 04 04 01 113	Program Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	16.200.000,00	16.302.369.500,00	7.500.000,00	16.326.069.500,00	3.500.000,00	8.381.467.959,71	7.115.375,00	8.392.083.334,71	(7.933.986.165,29)	51,40	
04 04 04 04 01 113 001	Penyusunan Kajian Perundang-Undangan	-	193.275.000,00	7.500.000,00	200.775.000,00	-	20.090.000,00	7.115.375,00	27.205.375,00	(173.569.625,00)	13,55	
04 04 04 04 01 113 002	Penyelenggaraan Pembahasan Raperda/Keputusan DPRD/Peraturan DPRD	11.000.000,00	9.307.975.000,00	-	9.318.975.000,00	3.500.000,00	4.344.573.510,97	-	4.348.073.510,97	(4.970.901.489,03)	46,66	
04 04 04 04 01 113 003	Pelayanan Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD	5.200.000,00	6.801.119.500,00	-	6.806.319.500,00	-	4.016.804.448,74	-	4.016.804.448,74	(2.789.515.051,26)	59,02	

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN				REALISASI				BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
		JENIS BELANJA			JUMLAH ANGGARAN BELANJA	JENIS BELANJA			JUMLAH REALISASI BELANJA		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10-6	12
04 04 04 04 01 114	Program Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	-	15.424.215.000,00	-	15.424.215.000,00	-	9.268.345.825,00	-	9.268.345.825,00	(6.155.869.175,00)	60,09
04 04 04 04 01 114 001	Penyelenggaraan Pembahasan Penganggaran	-	2.751.900.000,00	-	2.751.900.000,00	-	1.518.835.816,00	-	1.518.835.816,00	(1.233.064.184,00)	55,19
04 04 04 04 01 114 002	Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan DPRD	-	9.109.335.000,00	-	9.109.335.000,00	-	4.706.998.109,00	-	4.706.998.109,00	(4.402.336.891,00)	51,67
04 04 04 04 01 114 003	Pengembangan Kerjasama dan Penjaringan Aspirasi Masyarakat	-	3.562.980.000,00	-	3.562.980.000,00	-	3.042.511.900,00	-	3.042.511.900,00	(520.468.100,00)	85,39
04 05	URUSAN INSPEKTORAT	161.233.956,00	1.589.458.541,00	360.665.000,00	2.111.357.497,00	159.083.950,72	1.483.015.414,06	315.550.659,00	1.957.650.023,78	(153.707.473,22)	92,72
04 05 01	INSPEKTORAT DAERAH	161.233.956,00	1.589.458.541,00	360.665.000,00	2.111.357.497,00	159.083.950,72	1.483.015.414,06	315.550.659,00	1.957.650.023,78	(153.707.473,22)	92,72
04 05 04 05 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	26.633.956,00	743.321.044,00	295.665.000,00	1.065.620.000,00	26.633.950,72	721.873.050,90	264.299.659,00	1.012.806.660,62	(52.813.339,38)	95,04
04 05 04 05 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	368.182.000,00	-	368.182.000,00	-	367.087.038,00	-	367.087.038,00	(1.094.962,00)	99,70
04 05 04 05 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	26.633.956,00	375.139.044,00	295.665.000,00	697.438.000,00	26.633.950,72	354.786.012,90	264.299.659,00	645.719.622,62	(51.718.377,38)	92,58
04 05 04 05 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	178.054.000,00	65.000.000,00	243.054.000,00	-	163.978.088,00	51.251.000,00	215.229.088,00	(27.824.912,00)	88,55
04 05 04 05 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	68.000.000,00	65.000.000,00	133.000.000,00	-	64.203.000,00	51.251.000,00	115.454.000,00	(17.546.000,00)	86,81
04 05 04 05 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	110.054.000,00	-	110.054.000,00	-	99.775.088,00	-	99.775.088,00	(10.278.912,00)	90,66
04 05 04 05 01 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	121.220.000,00	-	121.220.000,00	-	119.887.000,00	-	119.887.000,00	(1.333.000,00)	98,90
04 05 04 05 01 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	-	121.220.000,00	-	121.220.000,00	-	119.887.000,00	-	119.887.000,00	(1.333.000,00)	98,90
04 05 04 05 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	7.624.000,00	-	7.624.000,00	-	7.570.240,00	-	7.570.240,00	(53.760,00)	99,29
04 05 04 05 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	-	7.624.000,00	-	7.624.000,00	-	7.570.240,00	-	7.570.240,00	(53.760,00)	99,29
04 05 04 05 01 115	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	127.000.000,00	322.770.000,00	-	449.770.000,00	124.850.000,00	258.401.066,00	-	383.251.066,00	(66.518.934,00)	85,21
04 05 04 05 01 115 001	Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	1.700.000,00	35.922.000,00	-	37.622.000,00	1.700.000,00	29.783.320,00	-	31.483.320,00	(6.138.680,00)	83,68
04 05 04 05 01 115 002	Pembinaan Kepatuhan Aparatur	125.300.000,00	286.848.000,00	-	412.148.000,00	123.150.000,00	228.617.746,00	-	351.767.746,00	(60.380.254,00)	85,35
04 05 04 05 01 116	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	-	50.788.000,00	-	50.788.000,00	-	49.955.648,00	-	49.955.648,00	(832.352,00)	98,36
04 05 04 05 01 116 001	Audit Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	-	31.100.000,00	-	31.100.000,00	-	30.494.848,00	-	30.494.848,00	(605.152,00)	98,05
04 05 04 05 01 116 002	Review Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Keuangan	-	19.688.000,00	-	19.688.000,00	-	19.460.800,00	-	19.460.800,00	(227.200,00)	98,85
04 05 04 05 01 117	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pembangunan Fisik	-	41.240.000,00	-	41.240.000,00	-	38.862.225,00	-	38.862.225,00	(2.377.775,00)	94,23
04 05 04 05 01 117 001	Audit Bidang Pembangunan Fisik	-	33.860.000,00	-	33.860.000,00	-	31.593.025,00	-	31.593.025,00	(2.266.975,00)	93,30
04 05 04 05 01 117 002	Review Pengadaan Barang dan Jasa	-	7.380.000,00	-	7.380.000,00	-	7.269.200,00	-	7.269.200,00	(110.800,00)	98,50

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN				REALISASI				BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
		JENIS BELANJA			JUMLAH ANGGARAN BELANJA	JENIS BELANJA			JUMLAH REALISASI BELANJA		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10-6	12
04 05 04 05 01 118	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Sosial Ekonomi Budaya	-	44.259.000,00	-	44.259.000,00	-	42.564.100,00	-	42.564.100,00	(1.694.900,00)	96,17
04 05 04 05 01 118 001	Audit Bidang Sosial Ekonomi Budaya	-	23.864.000,00	-	23.864.000,00	-	23.248.100,00	-	23.248.100,00	(615.900,00)	97,42
04 05 04 05 01 118 002	Review Dokumen Akuntabilitas Kinerja	-	20.395.000,00	-	20.395.000,00	-	19.316.000,00	-	19.316.000,00	(1.079.000,00)	94,71
04 05 04 05 01 128	Program Peningkatan dan Evaluasi Pengawasan	7.600.000,00	80.182.497,00	-	87.782.497,00	7.600.000,00	79.923.996,16	-	87.523.996,16	(258.500,84)	99,71
04 05 04 05 01 128 001	Penyusunan Kebijakan dan Evaluasi Hasil Pengawasan	7.600.000,00	80.182.497,00	-	87.782.497,00	7.600.000,00	79.923.996,16	-	87.523.996,16	(258.500,84)	99,71
04 06	URUSAN KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	754.670.564,00	10.052.536.834,00	447.314.602,00	11.254.522.000,00	582.165.223,04	8.530.515.149,00	440.651.750,00	9.553.332.122,04	(1.701.189.877,96)	84,88
04 06 01	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	754.670.564,00	10.052.536.834,00	447.314.602,00	11.254.522.000,00	582.165.223,04	8.530.515.149,00	440.651.750,00	9.553.332.122,04	(1.701.189.877,96)	84,88
04 06 04 06 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	150.215.564,00	710.460.134,00	248.682.602,00	1.109.358.300,00	143.515.223,04	667.507.187,00	244.340.750,00	1.055.363.160,04	(53.995.139,96)	95,13
04 06 04 06 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	278.655.000,00	-	278.655.000,00	-	273.677.585,00	-	273.677.585,00	(4.977.415,00)	98,21
04 06 04 06 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	150.215.564,00	431.805.134,00	248.682.602,00	830.703.300,00	143.515.223,04	393.829.602,00	244.340.750,00	781.685.575,04	(49.017.724,96)	94,10
04 06 04 06 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	120.379.500,00	198.632.000,00	319.011.500,00	-	103.585.246,00	196.311.000,00	299.896.246,00	(19.115.254,00)	94,01
04 06 04 06 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	-	198.632.000,00	198.632.000,00	-	-	196.311.000,00	196.311.000,00	(2.321.000,00)	98,83
04 06 04 06 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	120.379.500,00	-	120.379.500,00	-	103.585.246,00	-	103.585.246,00	(16.794.254,00)	86,05
04 06 04 06 01 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	27.933.000,00	-	27.933.000,00	-	27.098.000,00	-	27.098.000,00	(835.000,00)	97,01
04 06 04 06 01 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	-	27.933.000,00	-	27.933.000,00	-	27.098.000,00	-	27.098.000,00	(835.000,00)	97,01
04 06 04 06 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	5.036.000,00	-	5.036.000,00	-	5.031.000,00	-	5.031.000,00	(5.000,00)	99,90
04 06 04 06 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	-	5.036.000,00	-	5.036.000,00	-	5.031.000,00	-	5.031.000,00	(5.000,00)	99,90
04 06 04 06 01 119	Program Pengembangan Karier Aparatur Sipil Negara	386.255.000,00	1.685.447.000,00	-	1.939.302.000,00	223.450.000,00	611.783.099,00	-	702.921.099,00	(1.236.380.901,00)	36,25
04 06 04 06 01 119 001	Penataan dan Rekrutmen Aparatur Sipil Negara	117.955.000,00	1.128.357.000,00	-	1.246.312.000,00	20.150.000,00	112.797.119,00	-	132.947.119,00	(1.113.364.881,00)	10,67
04 06 04 06 01 119 002	Pengembangan Karir ASN	268.300.000,00	402.360.000,00	-	670.660.000,00	203.300.000,00	344.350.240,00	-	547.650.240,00	(123.009.760,00)	81,66
04 06 04 06 01 119 003	Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian	-	22.330.000,00	-	22.330.000,00	-	22.323.740,00	-	22.323.740,00	(6.260,00)	99,97
04 06 04 06 01 119 004	Operasional Assesment Centre	-	132.400.000,00	-	132.400.000,00	-	132.312.000,00	-	132.312.000,00	(88.000,00)	99,93
04 06 04 06 01 120	Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian	207.200.000,00	420.270.000,00	-	627.470.000,00	204.800.000,00	401.819.300,00	-	606.619.300,00	(20.850.700,00)	96,68
04 06 04 06 01 120 001	Mutasi Data Kepegawaian	54.375.000,00	43.696.000,00	-	98.071.000,00	51.975.000,00	42.838.300,00	-	94.813.300,00	(3.257.700,00)	96,68
04 06 04 06 01 120 002	Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai	54.375.000,00	219.724.000,00	-	274.099.000,00	54.375.000,00	204.000.500,00	-	258.375.500,00	(15.723.500,00)	94,26
04 06 04 06 01 120 003	Penatausahaan Kepegawaian	98.450.000,00	156.850.000,00	-	255.300.000,00	98.450.000,00	154.980.500,00	-	253.430.500,00	(1.869.500,00)	99,27

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN				REALISASI				BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
		JENIS BELANJA			JUMLAH ANGGARAN BELANJA	JENIS BELANJA			JUMLAH REALISASI BELANJA		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10-6	12
<b>04 06 04 06 01 121</b>	<b>Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>7.083.011.200,00</b>	-	<b>7.094.011.200,00</b>	<b>10.400.000,00</b>	<b>6.713.691.317,00</b>	-	<b>6.724.091.317,00</b>	<b>(369.919.883,00)</b>	<b>94,79</b>
04 06 04 06 01 121 001	Analisa Kebutuhan Diklat	-	138.997.200,00	-	138.997.200,00	-	120.769.900,00	-	120.769.900,00	(18.227.300,00)	86,89
04 06 04 06 01 121 002	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	11.000.000,00	6.552.850.000,00	-	6.563.850.000,00	10.400.000,00	6.245.031.117,00	-	6.255.431.117,00	(308.418.883,00)	95,30
04 06 04 06 01 121 003	Pengendalian dan Pengembangan Diklat	-	391.164.000,00	-	391.164.000,00	-	347.890.300,00	-	347.890.300,00	(43.273.700,00)	88,94
<b>04 07</b>	<b>URUSAN KEUANGAN</b>	<b>715.016.387,00</b>	<b>13.208.415.788,00</b>	<b>11.408.261.825,00</b>	<b>25.331.694.000,00</b>	<b>698.056.386,88</b>	<b>11.977.231.510,59</b>	<b>11.040.053.302,40</b>	<b>23.715.341.199,87</b>	<b>(1.616.352.800,13)</b>	<b>93,62</b>
<b>04 07 01</b>	<b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>	<b>715.016.387,00</b>	<b>13.208.415.788,00</b>	<b>11.408.261.825,00</b>	<b>25.331.694.000,00</b>	<b>698.056.386,88</b>	<b>11.977.231.510,59</b>	<b>11.040.053.302,40</b>	<b>23.715.341.199,87</b>	<b>(1.616.352.800,13)</b>	<b>93,62</b>
<b>04 07 04 07 01 001</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>136.539.387,00</b>	<b>6.720.629.719,00</b>	<b>413.161.825,00</b>	<b>7.270.330.931,00</b>	<b>136.539.386,88</b>	<b>6.219.196.889,64</b>	<b>396.385.000,00</b>	<b>6.752.121.276,52</b>	<b>(518.209.654,48)</b>	<b>92,87</b>
04 07 04 07 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	175.525.000,00	-	175.525.000,00	-	175.433.028,00	-	175.433.028,00	(91.972,00)	99,95
04 07 04 07 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	136.539.387,00	6.545.104.719,00	413.161.825,00	7.094.805.931,00	136.539.386,88	6.043.763.861,64	396.385.000,00	6.576.688.248,52	(518.117.682,48)	92,70
<b>04 07 04 07 01 002</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	-	<b>257.878.269,00</b>	<b>158.000.000,00</b>	<b>415.878.269,00</b>	-	<b>201.612.187,16</b>	<b>153.858.000,00</b>	<b>355.470.187,16</b>	<b>(60.408.081,84)</b>	<b>85,47</b>
04 07 04 07 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	1.000.000,00	158.000.000,00	159.000.000,00	-	1.000.000,00	153.858.000,00	154.858.000,00	(4.142.000,00)	97,39
04 07 04 07 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	256.878.269,00	-	256.878.269,00	-	200.612.187,16	-	200.612.187,16	(56.266.081,84)	78,10
<b>04 07 04 07 01 005</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	-	<b>69.000.000,00</b>	-	<b>69.000.000,00</b>	-	<b>60.000.000,00</b>	-	<b>60.000.000,00</b>	<b>(9.000.000,00)</b>	<b>86,96</b>
04 07 04 07 01 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	-	69.000.000,00	-	69.000.000,00	-	60.000.000,00	-	60.000.000,00	(9.000.000,00)	86,96
<b>04 07 04 07 01 006</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	-	<b>12.825.000,00</b>	-	<b>12.825.000,00</b>	-	<b>12.816.950,00</b>	-	<b>12.816.950,00</b>	<b>(8.050,00)</b>	<b>99,94</b>
04 07 04 07 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	-	12.825.000,00	-	12.825.000,00	-	12.816.950,00	-	12.816.950,00	(8.050,00)	99,94
<b>04 07 04 07 01 122</b>	<b>Program Perencanaan dan Pengendalian Anggaran</b>	<b>6.175.000,00</b>	<b>131.549.493,00</b>	-	<b>137.724.493,00</b>	<b>6.175.000,00</b>	<b>127.673.192,16</b>	-	<b>133.848.192,16</b>	<b>(3.876.300,84)</b>	<b>97,19</b>
04 07 04 07 01 122 001	Perencanaan Anggaran	6.175.000,00	103.099.493,00	-	109.274.493,00	6.175.000,00	100.535.992,16	-	106.710.992,16	(2.563.500,84)	97,65
04 07 04 07 01 122 002	Pengendalian Anggaran	-	28.450.000,00	-	28.450.000,00	-	27.137.200,00	-	27.137.200,00	(1.312.800,00)	95,39
<b>04 07 04 07 01 123</b>	<b>Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Transfer</b>	<b>15.675.000,00</b>	<b>41.041.000,00</b>	-	<b>56.716.000,00</b>	<b>14.525.000,00</b>	<b>39.232.400,00</b>	-	<b>53.757.400,00</b>	<b>(2.958.600,00)</b>	<b>94,78</b>
04 07 04 07 01 123 001	Pengendalian Anggaran Belanja Daerah	10.450.000,00	33.957.000,00	-	44.407.000,00	9.850.000,00	32.151.400,00	-	42.001.400,00	(2.405.600,00)	94,58
04 07 04 07 01 123 002	Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer	5.225.000,00	7.084.000,00	-	12.309.000,00	4.675.000,00	7.081.000,00	-	11.756.000,00	(553.000,00)	95,51
<b>04 07 04 07 01 124</b>	<b>Program Pengelolaan Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</b>	<b>70.350.000,00</b>	<b>387.646.000,00</b>	<b>400.000.000,00</b>	<b>857.996.000,00</b>	<b>70.350.000,00</b>	<b>336.970.516,00</b>	<b>371.261.000,00</b>	<b>778.581.516,00</b>	<b>(79.414.484,00)</b>	<b>90,74</b>
04 07 04 07 01 124 001	Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	35.700.000,00	286.624.000,00	-	322.324.000,00	35.700.000,00	262.550.516,00	-	298.250.516,00	(24.073.484,00)	92,53
04 07 04 07 01 124 002	Pengelolaan Pembiayaan dan Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD	34.650.000,00	101.022.000,00	400.000.000,00	535.672.000,00	34.650.000,00	74.420.000,00	371.261.000,00	480.331.000,00	(55.341.000,00)	89,67

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN				REALISASI				BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
		JENIS BELANJA			JUMLAH ANGGARAN BELANJA	JENIS BELANJA			JUMLAH REALISASI BELANJA		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10-6	12
<b>04 07 04 07 01 125</b>	<b>Program Pelayanan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah</b>	<b>257.997.000,00</b>	<b>449.735.489,00</b>	-	<b>707.732.489,00</b>	<b>256.247.000,00</b>	<b>449.320.918,16</b>	-	<b>705.567.918,16</b>	<b>(2.164.570,84)</b>	<b>99,69</b>
04 07 04 07 01 125 001	Pelayanan Pajak Daerah	12.825.000,00	275.044.796,00	-	287.869.796,00	12.825.000,00	275.040.295,00	-	287.865.295,00	(4.501,00)	100,00
04 07 04 07 01 125 002	Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah	56.500.000,00	80.845.000,00	-	137.345.000,00	54.750.000,00	80.437.931,00	-	135.187.931,00	(2.157.069,00)	98,43
04 07 04 07 01 125 003	Penetapan Pajak Daerah	188.672.000,00	93.845.693,00	-	282.517.693,00	188.672.000,00	93.842.692,16	-	282.514.692,16	(3.000,84)	100,00
<b>04 07 04 07 01 126</b>	<b>Program Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah</b>	<b>213.530.000,00</b>	<b>1.967.776.000,00</b>	-	<b>2.181.306.000,00</b>	<b>207.545.000,00</b>	<b>1.930.096.000,00</b>	-	<b>2.137.641.000,00</b>	<b>(43.665.000,00)</b>	<b>98,00</b>
04 07 04 07 01 126 001	Pengelolaan Penagihan, Keberatan dan Pembinaan Pajak Daerah	213.530.000,00	121.120.000,00	-	334.650.000,00	207.545.000,00	120.856.000,00	-	328.401.000,00	(6.249.000,00)	98,13
04 07 04 07 01 126 002	Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah	-	1.846.656.000,00	-	1.846.656.000,00	-	1.809.240.000,00	-	1.809.240.000,00	(37.416.000,00)	97,97
<b>04 07 04 07 01 127</b>	<b>Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Inventarisasi Aset</b>	<b>14.750.000,00</b>	<b>3.170.334.818,00</b>	<b>10.437.100.000,00</b>	<b>13.622.184.818,00</b>	<b>6.675.000,00</b>	<b>2.600.312.457,47</b>	<b>10.118.549.302,40</b>	<b>12.725.536.759,87</b>	<b>(896.648.058,13)</b>	<b>93,42</b>
04 07 04 07 01 127 001	Perencanaan, Pengadaan dan Distribusi Aset	-	320.711.500,00	10.394.200.000,00	10.714.911.500,00	-	299.305.360,00	10.076.886.802,40	10.376.192.162,40	(338.719.337,60)	96,84
04 07 04 07 01 127 002	Pemanfaatan dan Optimalisasi Aset	2.925.000,00	2.520.090.493,00	-	2.523.015.493,00	2.925.000,00	2.214.712.905,31	-	2.217.637.905,31	(305.377.587,69)	87,90
04 07 04 07 01 127 003	Inventarisasi Aset dan Pengelolaan Barang Persediaan	11.825.000,00	329.532.825,00	42.900.000,00	384.257.825,00	3.750.000,00	86.294.192,16	41.662.500,00	131.706.692,16	(252.551.132,84)	34,28
	<b>JUMLAH :</b>	<b>163.392.184.600,00</b>	<b>617.496.329.981,00</b>	<b>387.087.690.397,00</b>	<b>1.167.976.204.978,00</b>	<b>136.801.816.234,28</b>	<b>553.387.490.228,89</b>	<b>327.434.372.199,17</b>	<b>1.017.623.678.662,34</b>	<b>(150.352.526.315,66)</b>	<b>87,13</b>

**WALIKOTA YOGYAKARTA**

**ttd**

**HARYADI SUYUTI**

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN  
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA  
TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN					JUMLAH BELANJA	REALISASI					JUMLAH BELANJA	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	%
		BELANJA TIDAK LANGSUNG		BELANJA LANGSUNG				BELANJA TIDAK LANGSUNG		BELANJA LANGSUNG					
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA LAINNYA	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL		BELANJA PEGAWAI	BELANJA LAINNYA	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL			
3	4	5	6	7	8 = 3+4+5+6+7	9	10	11	12	13	14 = 9+10+11+12+13	15=14-8	16		
01	PELAYANAN UMUM	241.428.336.092,00	108.498.179.915,52	4.305.054.807,00	95.425.264.561,00	32.211.013.448,00	481.867.848.823,52	226.540.313.943,00	93.239.411.005,00	4.015.961.928,96	74.409.984.115,59	30.877.400.977,15	429.083.071.969,70	(52.784.776.853,82)	89,05
01 02 10	Komunikasi dan Informatika	3.191.150.581,00	-	164.499.440,00	11.737.919.328,00	8.481.099.000,00	23.574.668.349,00	2.969.096.503,00	-	146.470.052,00	11.133.310.696,00	8.026.052.216,00	22.274.929.467,00	(1.299.738.882,00)	94,49
01 02 14	Statistik	-	-	18.000.000,00	241.681.000,00	-	259.681.000,00	-	-	13.000.000,00	232.943.200,00	-	245.943.200,00	(13.737.800,00)	94,71
01 02 15	Persandian	-	-	12.375.000,00	653.484.000,00	975.270.000,00	1.641.129.000,00	-	-	10.725.000,00	638.187.733,00	946.312.242,00	1.595.224.975,00	(45.904.025,00)	97,20
01 02 18	Kearsipan	3.336.192.515,00	-	31.591.760,00	2.915.716.436,00	849.351.055,00	7.132.851.766,00	3.217.862.927,00	-	30.123.492,00	2.811.623.519,97	837.803.135,00	6.897.413.073,97	(235.438.692,03)	96,70
01 04 01	Perencanaan	3.023.686.101,00	-	130.295.840,00	3.188.850.540,00	1.179.192.620,00	7.522.025.101,00	2.921.511.525,00	-	128.495.840,00	3.037.146.453,00	1.144.555.400,00	7.231.709.218,00	(290.315.883,00)	96,14
01 04 02	Penelitian dan Pengembangan	-	-	520.350.000,00	725.078.000,00	615.000.000,00	1.860.428.000,00	-	-	519.275.000,00	638.951.475,00	615.000.000,00	1.773.226.475,00	(87.201.525,00)	95,31
01 04 03	Sekretariat Daerah	10.878.114.961,00	-	1.621.018.156,00	14.509.291.498,00	7.389.579.346,00	34.398.003.961,00	10.121.345.981,00	-	1.565.263.280,32	13.233.665.243,30	7.052.542.697,75	31.972.817.202,37	(2.425.186.758,63)	92,95
01 04 04	Sekretariat DPRD	22.745.882.926,00	-	176.003.704,00	36.602.832.596,00	505.280.000,00	60.029.999.226,00	22.013.597.359,00	-	163.303.704,00	20.693.393.721,67	458.879.575,00	43.329.174.359,67	(16.700.824.866,33)	72,18
01 04 05	Inspektorat	3.726.299.708,00	-	161.233.956,00	1.589.458.541,00	360.665.000,00	5.837.657.205,00	3.589.659.462,00	-	159.083.950,72	1.483.015.414,06	315.550.659,00	5.547.309.485,78	(290.347.719,22)	95,03
01 04 06	Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan	167.611.407.093,00	-	754.670.564,00	10.052.536.834,00	447.314.602,00	178.865.929.093,00	156.565.277.956,00	-	582.165.223,04	8.530.515.149,00	440.651.750,00	166.118.610.078,04	(12.747.319.014,96)	92,87
01 04 07	Keuangan	26.915.602.207,00	108.498.179.915,52	715.016.387,00	13.208.415.788,00	11.408.261.825,00	160.745.476.122,52	25.141.962.230,00	93.239.411.005,00	698.056.386,88	11.977.231.510,59	11.040.053.302,40	142.096.714.434,87	(18.648.761.687,65)	88,40
03	KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN	13.343.670.073,00	-	6.386.963.432,00	21.589.602.095,00	12.140.112.400,00	53.460.348.000,00	12.709.257.100,00	-	6.127.351.740,04	19.963.541.211,97	11.201.253.212,27	50.001.403.264,28	(3.458.944.735,72)	93,53
03 01 05	Ketertarikan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	12.605.501.895,00	-	5.510.879.476,00	19.618.897.551,00	12.060.134.900,00	49.795.413.822,00	12.033.857.974,00	-	5.288.767.784,04	18.122.686.054,97	11.124.001.052,27	46.569.312.865,28	(3.226.100.956,72)	93,52
03 02 19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	738.168.178,00	-	876.083.956,00	1.970.704.544,00	79.977.500,00	3.664.934.178,00	675.399.126,00	-	838.583.956,00	1.840.855.157,00	77.252.160,00	3.432.090.399,00	(232.843.779,00)	93,65
04	EKONOMI	52.682.622.281,00	-	10.419.507.109,00	118.269.021.620,00	17.543.253.676,00	198.914.404.686,00	50.288.041.560,00	-	9.823.552.932,36	110.864.376.366,21	16.319.321.984,52	187.295.292.843,09	(11.619.111.842,91)	94,16
04 02 01	Tenaga Kerja	-	-	229.575.000,00	5.005.278.000,00	-	5.234.853.000,00	-	-	229.575.000,00	4.890.867.249,00	-	5.120.442.249,00	(114.410.751,00)	97,81
04 02 03	Pangan	-	-	5.550.000,00	1.261.745.000,00	158.000.000,00	1.425.295.000,00	-	-	5.450.000,00	1.161.237.499,16	157.769.000,00	1.324.456.499,16	(100.838.500,84)	92,93
04 02 07	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	30.225.811.223,00	-	5.765.776.538,00	52.247.800.223,00	4.767.402.535,00	93.006.790.519,00	28.940.247.347,00	-	5.635.627.558,04	49.374.404.793,89	4.487.627.552,64	88.437.907.251,57	(4.568.883.267,43)	95,09
04 02 09	Perhubungan	4.064.623.631,00	-	518.551.729,00	12.335.648.849,00	4.526.939.331,00	21.445.763.540,00	4.039.506.024,00	-	502.367.690,32	11.445.812.502,64	3.851.829.124,93	19.839.515.341,89	(1.606.248.198,11)	92,51
04 02 11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.420.906.074,00	-	213.966.200,00	7.544.366.800,00	370.350.000,00	11.549.589.074,00	3.272.777.137,00	-	184.160.802,88	7.076.158.224,00	365.346.800,00	10.898.442.963,88	(651.146.110,12)	94,36
04 02 12	Penanaman Modal	3.209.740.940,00	-	450.411.532,00	3.194.275.668,00	477.392.800,00	7.331.820.940,00	3.053.773.661,00	-	398.419.117,44	2.922.145.605,68	470.380.000,00	6.844.718.384,12	(487.102.555,88)	93,36
04 03 01	Pertanian	4.061.367.754,00	-	284.039.560,00	3.155.935.808,00	2.600.902.632,00	10.102.245.754,00	3.645.775.624,00	-	283.964.546,60	2.996.849.913,72	2.515.760.568,00	9.442.350.652,32	(659.895.101,68)	93,47
04 03 03	Kelautan dan Perikanan	-	-	-	2.617.559.255,00	279.090.745,00	2.896.650.000,00	-	-	-	2.449.176.309,72	277.492.745,00	2.726.669.054,72	(169.980.945,28)	94,13
04 03 04	Perdagangan	-	-	1.061.516.230,00	21.554.321.337,00	3.802.140.633,00	26.417.978.200,00	-	-	711.443.779,00	20.107.991.488,00	3.641.318.255,95	24.460.753.522,95	(1.957.224.677,05)	92,59
04 03 05	Perindustrian	7.700.172.659,00	-	1.890.120.320,00	9.139.145.680,00	561.035.000,00	19.290.473.659,00	7.335.961.767,00	-	1.872.544.438,08	8.226.805.999,40	551.797.938,00	17.987.110.142,48	(1.303.363.516,52)	93,24
04 03 06	Transmigrasi	-	-	-	212.945.000,00	-	212.945.000,00	-	-	-	212.926.781,00	-	212.926.781,00	(18.219,00)	99,99

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN					JUMLAH BELANJA	REALISASI					JUMLAH BELANJA	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	%
		BELANJA TIDAK LANGSUNG		BELANJA LANGSUNG				BELANJA TIDAK LANGSUNG		BELANJA LANGSUNG					
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA LAINNYA	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL		BELANJA PEGAWAI	BELANJA LAINNYA	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL			
1	2	3	4	5	6	7	8 = 3+4+5+6+7	9	10	11	12	13	14 = 9+10+11+12+13	15=14-8	16
05	LINGKUNGAN HIDUP	15.800.812.428,00	-	2.099.078.372,00	29.779.582.330,00	62.246.317.543,00	109.925.790.673,00	15.538.441.890,00	-	1.967.247.429,60	28.408.247.276,62	35.089.697.126,77	81.003.633.722,99	(28.922.156.950,01)	73,69
05 02 04	Pertanahan	2.182.987.562,00	-	151.620.120,00	788.629.125,00	52.412.609.000,00	55.535.845.807,00	2.127.241.192,00	-	150.049.596,00	682.731.759,00	25.850.363.540,00	28.810.386.087,00	(26.725.459.720,00)	51,88
05 02 05	Lingkungan Hidup	13.617.824.866,00	-	1.947.458.252,00	28.990.953.205,00	9.833.708.543,00	54.389.944.866,00	13.411.200.698,00	-	1.817.197.833,60	27.725.515.517,62	9.239.333.586,77	52.193.247.635,99	(2.196.697.230,01)	95,96
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	7.340.157.733,00	-	695.072.432,00	34.533.224.507,00	182.858.140.133,00	225.426.594.805,00	7.190.184.372,00	-	612.204.047,88	31.897.194.725,53	161.102.254.588,30	200.801.837.733,71	(24.624.757.071,29)	89,08
06 01 03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.340.157.733,00	-	534.872.432,00	27.835.040.373,00	154.029.036.246,00	189.739.106.784,00	7.190.184.372,00	-	484.179.047,88	25.781.837.893,01	135.628.134.512,13	169.084.335.825,02	(20.654.770.958,98)	89,11
06 01 04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	160.200.000,00	6.698.184.134,00	28.829.103.887,00	35.687.488.021,00	-	-	128.025.000,00	6.115.356.832,52	25.474.120.076,17	31.717.501.908,69	(3.969.986.112,31)	88,88
07	KESEHATAN	69.904.326.015,00	-	84.203.996.098,00	171.784.451.292,00	47.429.145.775,00	373.321.919.180,00	67.252.256.380,00	-	64.583.337.553,48	155.774.636.311,56	44.267.019.059,25	331.877.249.304,29	(41.444.669.875,71)	88,90
07 01 02	Kesehatan	68.650.544.686,00	-	83.081.645.898,00	165.920.574.832,00	46.851.132.775,00	364.503.898.191,00	66.104.118.566,00	-	63.474.118.915,48	150.303.991.213,56	43.695.365.759,25	323.577.594.454,29	(40.926.303.736,71)	88,77
07 01 08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.253.781.329,00	-	1.122.350.200,00	5.863.876.460,00	578.013.000,00	8.818.020.989,00	1.148.137.814,00	-	1.109.218.638,00	5.470.645.098,00	571.653.300,00	8.299.654.850,00	(518.366.139,00)	94,12
08	PARIWISATA DAN BUDAYA	3.993.999.610,00	-	5.176.653.892,00	28.979.203.609,00	5.044.189.499,00	43.194.046.610,00	3.707.431.919,00	-	4.189.478.439,16	25.617.825.145,38	4.583.595.540,00	38.098.331.043,54	(5.095.715.566,46)	88,20
08 02 16	Kebudayaan	1.667.528.760,00	-	115.144.600,00	3.394.242.901,00	924.431.899,00	6.101.348.160,00	1.451.533.329,00	-	107.333.954,00	3.128.919.446,00	920.055.800,00	5.607.842.529,00	(493.505.631,00)	91,91
08 03 02	Pariwisata	2.326.470.850,00	-	5.061.509.292,00	25.584.960.708,00	4.119.757.600,00	37.092.698.450,00	2.255.898.590,00	-	4.082.144.485,16	22.488.905.699,38	3.663.539.740,00	32.490.488.514,54	(4.602.209.935,46)	87,59
10	PENDIDIKAN	255.432.614.623,00	-	46.974.120.333,00	100.410.938.478,00	24.503.796.343,00	427.321.469.777,00	233.255.040.710,00	-	42.672.551.566,00	90.861.688.462,28	21.022.553.279,91	387.811.834.018,19	(39.509.635.758,81)	90,75
10 01 01	Pendidikan	253.940.310.172,00	-	46.749.152.421,00	91.424.828.867,00	22.608.232.913,00	414.722.524.373,00	231.916.216.935,00	-	42.457.788.120,00	82.144.817.388,20	19.168.013.024,91	375.686.835.468,11	(39.035.688.904,89)	90,59
10 02 13	Kepemudaan dan Olah Raga	1.492.304.451,00	-	224.967.912,00	6.126.648.662,00	791.535.000,00	8.635.456.025,00	1.338.823.775,00	-	214.763.446,00	5.873.489.893,00	750.897.000,00	8.177.974.114,00	(457.481.911,00)	94,70
10 02 17	Perpustakaan	-	-	-	2.859.460.949,00	1.104.028.430,00	3.963.489.379,00	-	-	-	2.843.381.181,08	1.103.643.255,00	3.947.024.436,08	(16.464.942,92)	99,58
11	PERLINDUNGAN SOSIAL	7.539.233.398,00	-	3.131.738.125,00	16.725.041.489,00	3.111.721.580,00	30.507.734.592,00	7.249.278.320,00	-	2.810.130.596,80	15.589.996.613,75	2.971.276.431,00	28.620.681.961,55	(1.887.052.630,45)	93,81
11 01 06	Sosial	3.523.558.385,00	-	1.998.282.472,00	8.893.454.098,00	818.763.880,00	15.234.058.835,00	3.362.400.986,00	-	1.887.884.057,92	8.246.240.144,44	799.507.775,00	14.296.032.963,36	(938.025.871,64)	93,84
11 02 06	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	2.358.339.134,00	-	830.013.303,00	3.170.171.697,00	1.096.400.000,00	7.454.924.134,00	2.300.753.633,00	-	630.440.736,00	2.978.633.965,00	1.056.716.656,00	6.966.544.990,00	(488.379.144,00)	93,45
11 02 02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.657.335.879,00	-	303.442.350,00	4.661.415.694,00	1.196.557.700,00	7.818.751.623,00	1.586.123.701,00	-	291.805.802,88	4.365.122.504,31	1.115.052.000,00	7.358.104.008,19	(460.647.614,81)	94,11
	<b>JUMLAH :</b>	<b>667.465.772.253,00</b>	<b>108.498.179.915,52</b>	<b>163.392.184.600,00</b>	<b>617.496.329.981,00</b>	<b>387.087.690.397,00</b>	<b>1.943.940.157.146,52</b>	<b>623.730.246.194,00</b>	<b>93.239.411.005,00</b>	<b>136.801.816.234,28</b>	<b>553.387.490.228,89</b>	<b>327.434.372.199,17</b>	<b>1.734.593.335.861,34</b>	<b>(209.346.821.285,18)</b>	<b>89,23</b>

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

GOLONGAN/RUANG	PEJ. NEG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
		I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
Walikota	1								1
Wakil Walikota	1								1
<b>JUMLAH KEPDA</b>	<b>2</b>								<b>2</b>
Golongan IV/e	0						3		3
Golongan IV/d	0		0				6		6
Golongan IV/c	0		22				20		42
Golongan IV/b	0		6	51			107	1	165
Golongan IV/a	0			78	85		915	8	1086
<b>JUMLAH GOLONGAN IV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>129</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>1051</b>	<b>9</b>	<b>1302</b>
Golongan III/d	0			16	296		395	51	758
Golongan III/c	0				238		246	150	634
Golongan III/b	0				37		475	439	951
Golongan III/a	0				1		264	306	571
<b>JUMLAH GOLONGAN III</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>572</b>	<b>0</b>	<b>1380</b>	<b>946</b>	<b>2914</b>
Golongan II/d	0						38	202	240
Golongan II/c	0						21	362	383
Golongan II/b	0						6	180	186
Golongan II/a	0						2	78	80
<b>JUMLAH GOLONGAN II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>822</b>	<b>889</b>
Golongan I/d	0	0	0	0	0	0		83	83
Golongan I/c	0	0	0	0	0	0		25	25
Golongan I/b	0	0	0	0	0	0		2	2
Golongan I/a	0	0	0	0	0	0			0
<b>JUMLAH GOLONGAN I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>145</b>	<b>657</b>	<b>0</b>	<b>2498</b>	<b>1887</b>	<b>5217</b>

**WALIKOTA YOGYAKARTA**

ttd

**HARYADI SUYUTI**

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
 RINCIAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2019

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
1	2	3	4	5	6
4 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>653.011.939.630,00</b>	<b>689.049.725.509,27</b>	<b>36.037.785.879,27</b>	
4 1 1	<b>Hasil Pajak Daerah</b>	<b>425.381.500.000,00</b>	<b>451.265.948.031,00</b>	<b>25.884.448.031,00</b>	
4 1 1 01	Pajak Hotel	152.000.000.000,00	161.297.192.790,00	9.297.192.790,00	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011
4 1 1 0102	Hotel Bintang Lima	29.500.000.000,00	41.456.693.174,00	11.956.693.174,00	tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1)
4 1 1 0103	Hotel Bintang Empat	26.300.000.000,00	36.355.926.399,00	10.055.926.399,00	
4 1 1 0104	Hotel Bintang Tiga	42.300.000.000,00	43.044.652.512,00	744.652.512,00	
4 1 1 0105	Hotel Bintang Dua	29.000.000.000,00	16.438.946.977,00	(12.561.053.023,00)	
4 1 1 0106	Hotel Bintang Satu	13.500.000.000,00	8.530.782.478,00	(4.969.217.522,00)	
4 1 1 0107	Hotel Melati Tiga	2.300.000.000,00	2.917.661.459,00	617.661.459,00	
4 1 1 0108	Hotel Melati Dua	1.800.000.000,00	1.692.529.032,00	(107.470.968,00)	
4 1 1 0109	Hotel Melati Satu	6.600.000.000,00	9.646.655.426,00	3.046.655.426,00	
4 1 1 0112	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Rumah Kos	700.000.000,00	1.213.345.333,00	513.345.333,00	
4 1 1 02	Pajak Restoran	53.000.000.000,00	63.237.228.654,00	10.237.228.654,00	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011
4 1 1 0201	Restoran	52.950.000.000,00	63.164.465.780,00	10.214.465.780,00	tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1)
4 1 1 0203	Katering	50.000.000,00	72.762.874,00	22.762.874,00	
4 1 1 03	Pajak Hiburan.	12.500.000.000,00	12.702.230.080,00	202.230.080,00	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011
4 1 1 0301	Tontonan Film/Bioskop	4.300.000.000,00	4.934.475.169,00	634.475.169,00	tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1)
4 1 1 0302	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari dan/atau Busana	180.000.000,00	186.872.200,00	6.872.200,00	
4 1 1 0305	Pameran	4.066.000.000,00	3.096.930.200,00	(969.069.800,00)	
4 1 1 0307	Karaoke	450.000.000,00	381.933.891,00	(68.066.109,00)	
4 1 1 0310	Permainan Bilyar	50.000.000,00	55.287.496,00	5.287.496,00	
4 1 1 0314	Balap Kendaraan Bermotor	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	
4 1 1 0315	Permainan Ketangkasan	1.100.000.000,00	941.978.826,00	(158.021.174,00)	
4 1 1 0317	Mandi Uap/Spa	1.100.000.000,00	1.500.032.933,00	400.032.933,00	
4 1 1 0318	Pusat Kebugaran /FitnesCenter	50.000.000,00	334.008.073,00	284.008.073,00	
4 1 1 0319	Pertandingan Olah Raga	1.200.000.000,00	1.270.711.292,00	70.711.292,00	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
1	2	3	4	5	6
4 1 1 04	Pajak Reklame.	7.200.000.000,00	7.449.951.971,00	249.951.971,00	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011
4 1 1 0401	Reklame Papan/Bilboard/Videotron/Megatron	6.673.950.000,00	6.619.927.369,00	(54.022.631,00)	tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1)
4 1 1 0402	Reklame Kain	250.000.000,00	689.606.416,00	439.606.416,00	
4 1 1 0403	Reklame Melekat/Sticker	50.000,00	-	(50.000,00)	
4 1 1 0405	Reklame Berjalan	50.000.000,00	110.880.462,00	60.880.462,00	
4 1 1 0406	Reklame Udara	5.000.000,00	1.743.750,00	(3.256.250,00)	
4 1 1 0411	Reklame Baliho	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	
4 1 1 0412	Reklame Cahaya	220.000.000,00	27.793.974,00	(192.206.026,00)	
4 1 1 05	Pajak Penerangan Jalan.	51.000.000.000,00	52.374.696.494,00	1.374.696.494,00	
4 1 1 0501	Pajak Penerangan Jalan PLN	51.000.000.000,00	52.374.696.494,00	1.374.696.494,00	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1)
4 1 1 07	Pajak Parkir	3.675.000.000,00	3.050.479.181,00	(624.520.819,00)	
4 1 1 0701	Pajak Parkir	3.675.000.000,00	3.050.479.181,00	(624.520.819,00)	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1)
4 1 1 08	Pajak Air Tanah	2.500.000.000,00	2.546.299.969,00	46.299.969,00	
4 1 1 0801	Pajak Air Tanah	2.500.000.000,00	2.546.299.969,00	46.299.969,00	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1)
4 1 1 09	Pajak Sarang Burung Walet	6.500.000,00	6.650.000,00	150.000,00	
4 1 1 0901	Pajak Sarang Burung Walet	6.500.000,00	6.650.000,00	150.000,00	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1)
4 1 1 12	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	82.500.000.000,00	86.550.328.189,00	4.050.328.189,00	
4 1 1 1201	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	82.500.000.000,00	86.550.328.189,00	4.050.328.189,00	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesasaan dan Perkotaan, (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2)
4 1 1 13	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	61.000.000.000,00	62.050.890.703,00	1.050.890.703,00	
4 1 1 1301	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	61.000.000.000,00	62.050.890.703,00	1.050.890.703,00	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang BPHTB (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 8)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
1	2	3	4	5	6
4 1 2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	<b>33.451.735.712,00</b>	<b>32.428.343.731,00</b>	<b>(1.023.391.981,00)</b>	
4 1 2 01	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>26.329.081.859,00</b>	<b>27.208.565.231,00</b>	<b>879.483.372,00</b>	
4 1 2 01 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan.	259.981.000,00	292.521.700,00	32.540.700,00	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)
	a. Kesehatan Hewan	64.025.000,00	71.617.700,00	7.592.700,00	
	b. Laboratorium Pengawasan Kualitas Air	195.956.000,00	220.904.000,00	24.948.000,00	
4 1 2 01 02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	3.462.958.000,00	3.820.420.597,00	357.462.597,00	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)
4 1 2 01 04	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	109.000.000,00	123.580.000,00	14.580.000,00	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)
	a. TPU Utoroloyo	35.000.000,00	36.340.000,00	1.340.000,00	
	b. TPU Pracimoloyo	30.000.000,00	37.580.000,00	7.580.000,00	
	c. TPU Sasonoloyo	30.000.000,00	35.230.000,00	5.230.000,00	
	d. TPU Sariloyo	14.000.000,00	14.430.000,00	430.000,00	
4 1 2 01 05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	6.800.000.000,00	6.562.625.000,00	(237.375.000,00)	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)
4 1 2 01 06	Retribusi Pelayanan Pasar.	14.089.577.359,00	14.788.015.434,00	698.438.075,00	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)
4 1 2 01 07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	841.270.000,00	830.330.000,00	(10.940.000,00)	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)
4 1 2 01 12	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	766.295.500,00	791.072.500,00	24.777.000,00	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)
4 1 2 02	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>2.061.418.200,00</b>	<b>2.036.942.000,00</b>	<b>(24.476.200,00)</b>	
4 1 2 02 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	69.245.000,00	67.880.000,00	(1.365.000,00)	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
1	2	3	4	5	6
4 1 2 02 05	Retribusi Tempat Khusus Parkir.	1.628.347.200,00	1.581.164.000,00	(47.183.200,00)	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4)
4 1 2 02 08	Retribusi Rumah Potong Hewan.	99.960.000,00	89.685.000,00	(10.275.000,00)	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4)
4 1 2 02 13	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	263.866.000,00	298.213.000,00	34.347.000,00	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4 )
4 1 2 03	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>5.061.235.653,00</b>	<b>3.182.836.500,00</b>	<b>(1.878.399.153,00)</b>	
4 1 2 03 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	4.722.996.353,00	2.958.873.500,00	(1.764.122.853,00)	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3)
4 1 2 03 05	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan	2.239.300,00	2.239.300,00	-	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3)
4 1 2 03 06	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	336.000.000,00	221.723.700,00	(114.276.300,00)	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 5)
4 1 3	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	<b>28.935.929.644,00</b>	<b>28.975.003.950,01</b>	<b>39.074.306,01</b>	
4 1 3 01	<b>Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD</b>	<b>28.935.929.644,00</b>	<b>28.975.003.950,01</b>	<b>39.074.306,01</b>	
4 1 3 01 01	PD Air Minum Tirtamarta.	802.301.740,00	802.301.741,50	1,50	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 14)
4 1 3 01 02	PD BPR Bank Jogja	9.754.106.355,00	9.754.106.355,00	-	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 5)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
1	2	3	4	5	6
4 1 3 01 03	PT. Bank Pembangunan Daerah DIY	18.340.935.744,00	18.340.935.744,08	0,08	Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Perda DIY Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum BPD Provinsi DIY menjadi Perseroan Terbatas BPD DIY.
4 1 3 01 04	Penerimaan Bagi Hasil Laba BUKP	18.071.737,00	57.146.041,43	39.074.304,43	Keputusan Gubernur DIY Nomor 71/KEP/2017 tentang Pembagian Laba Bersih Badan Usaha Kredit Pedesaan Tahun Buku 2017
4 1 3 01 05	PD Jogjatama Visesha	20.514.068,00	20.514.068,00	-	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2012 tentang Penggunaan Laba Pada Perusahaan Daerah Jogjatama Visesha
4 1 4	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>	<b>165.242.774.274,00</b>	<b>176.380.429.797,26</b>	<b>11.137.655.523,26</b>	
4 1 4 01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	563.260.000,00	1.102.674.651,00	539.414.651,00	
4 1 4 01 02	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	22.000.000,00	6.524.600,00	(15.475.400,00)	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
4 1 4 01 05	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	65.500.000,00	149.429.114,00	83.929.114,00	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
4 1 4 01 06	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	109.250.000,00	378.794.887,00	269.544.887,00	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
4 1 4 01 10	Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan	366.510.000,00	567.926.050,00	201.416.050,00	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
4 1 4 02	Jasa Giro	2.070.000.000,00	3.044.745.330,00	974.745.330,00	Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83)
4 1 4 02 01	Jasa Giro Kas Daerah	2.000.000.000,00	2.841.386.980,00	841.386.980,00	Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83)
4 1 4 02 01	Jasa Giro Pemegang Kas	70.000.000,00	203.358.350,00	133.358.350,00	Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83)
4 1 4 03	Pendapatan Bunga Deposito	17.000.000.000,00	17.190.898.900,68	190.898.900,68	Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83)
4 1 4 04	Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah	400.000,00	1.070.000,00	670.000,00	
4 1 4 06	Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	444.576.214,65	444.576.214,65	
4 1 4 07	Pendapatan Denda Pajak	741.323.609,00	2.856.472.125,00	2.115.148.516,00	
4 1 4 08	Pendapatan Denda Retribusi	211.305.800,00	418.284.200,00	206.978.400,00	
4 1 4 10	Pendapatan dari Pengembalian	3.905.272.181,00	4.942.923.617,32	1.037.651.436,32	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
1	2	3	4	5	6
4 1 4 15	Pendapatan dari Barang Milik Daerah	1.236.056.222,00	1.903.049.400,00	666.993.178,00	
4 1 4 15 01	Sewa Lahan Terminal	-	-	-	
4 1 4 15 03	Sewa Penginapan Awak Bus Terminal	-	-	-	
4 1 4 15 04	Sewa Hotel Terminal	-	-	-	
4 1 4 15 05	Sewa Kantin pada Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor	6.000.000,00	6.000.000,00	-	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemda untuk Kegiatan Usaha
4 1 4 15 06	Sewa Gedung	982.056.222,00	1.653.159.400,00	671.103.178,00	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2006 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kota Yogyakarta Untuk Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal dan Sosial  Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemda untuk Kegiatan Usaha  Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2014 tentang Tarif Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Graha Bina Harapan  Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2014 tentang Tarif Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Cokrodirjan
4 1 4 15 07	Pengelolaan Wisma Ngestilaras	23.000.000,00	5.000.000,00	(18.000.000,00)	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemda untuk Kegiatan Usaha
4 1 4 15 08	Pengelolaan Reksa Arcade	225.000.000,00	238.890.000,00	13.890.000,00	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemda untuk Kegiatan Usaha
4 1 4 16	Pendapatan BLUD Taman Pintar	14.775.000.000,00	14.784.210.000,10	9.210.000,10	
4 1 4 16 01	Pendapatan BLUD Taman Pintar	14.775.000.000,00	14.784.210.000,10	9.210.000,10	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2011 tentang Sewa Sarana Prasarana di Taman Pintar  Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sewa Kios dan Branding di Taman Pintar Yogyakarta  Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2015 tentang Besaran Tarif Layanan Program di Taman Pintar Kota Yogyakarta  Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2017 tentang Tarif Tiket Per Zona di Taman Pintar Kota Yogyakarta

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
1	2	3	4	5	6
4 1 4 17	Pendapatan BLUD RSUD	81.500.000.000,00	78.121.244.026,00	(3.378.755.974,00)	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2009 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta
4 1 4 17 01	Pendapatan BLUD RSUD	81.500.000.000,00	78.121.244.026,00	(3.378.755.974,00)	
4 1 4 18	Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis	5.305.408.584,00	5.666.389.889,20	360.981.305,20	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Tarif Pemanfaatan Fasilitas di Pusat Perbelanjaan Beringharjo pada Dinas Pengelolaan Pasar
4 1 4 18 01	Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis	5.305.408.584,00	5.666.389.889,20	360.981.305,20	
4 1 4 19	Pendapatan BLUD Puskesmas	24.192.501.700,00	25.678.328.467,00	1.485.826.767,00	Peraturan Walikota Yogyakarta No 69 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
4 1 4 19 01	Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 1	858.000.000,00	917.445.181,00	59.445.181,00	
4 1 4 19 02	Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 2	590.850.000,00	666.722.318,00	75.872.318,00	
4 1 4 19 03	Pendapatan BLUD Puskesmas Gedongtengen	1.405.762.000,00	1.450.086.067,00	44.324.067,00	
4 1 4 19 04	Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 1	1.401.750.000,00	1.476.785.639,00	75.035.639,00	
4 1 4 19 05	Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 2	635.471.000,00	750.606.900,00	115.135.900,00	
4 1 4 19 06	Pendapatan BLUD Puskesmas Gondomanan	944.085.000,00	940.618.405,00	(3.466.595,00)	
4 1 4 19 07	Pendapatan BLUD Puskesmas Jetis	2.158.445.000,00	2.468.366.677,00	309.921.677,00	
4 1 4 19 08	Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 1	1.420.000.000,00	1.432.076.445,00	12.076.445,00	
4 1 4 19 09	Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 2	777.791.100,00	867.517.084,00	89.725.984,00	
4 1 4 19 10	Pendapatan BLUD Puskesmas Kraton	1.082.650.000,00	1.157.756.583,00	75.106.583,00	
4 1 4 19 11	Pendapatan BLUD Puskesmas Mantrijeron	2.132.660.000,00	2.187.601.068,00	54.941.068,00	
4 1 4 19 12	Pendapatan BLUD Puskesmas Mergangsan	1.678.891.000,00	1.759.944.631,00	81.053.631,00	
4 1 4 19 13	Pendapatan BLUD Puskesmas Ngampilan	791.870.600,00	906.812.748,00	114.942.148,00	
4 1 4 19 14	Pendapatan BLUD Puskesmas Pakualaman	618.696.000,00	694.222.526,00	75.526.526,00	
4 1 4 19 15	Pendapatan BLUD Puskesmas Tegalrejo	2.725.363.000,00	2.783.868.741,00	58.505.741,00	
4 1 4 19 16	Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 1	2.301.437.000,00	2.444.883.790,00	143.446.790,00	
4 1 4 19 17	Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 2	1.071.237.000,00	1.108.730.432,00	37.493.432,00	
4 1 4 19 18	Pendapatan BLUD Puskesmas Wirobrajan	1.597.543.000,00	1.664.283.232,00	66.740.232,00	
4 1 4 20	Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama	11.054.371.000,00	15.422.522.731,29	4.368.151.731,29	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tarip Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Pratama Yogyakarta
4 1 4 20 01	Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama	11.054.371.000,00	15.422.522.731,29	4.368.151.731,29	



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
1	2	3	4	5	6
4 1 4 21	Pendapatan BLUD UPT Logam	493.423.000,00	502.276.911,00	8.853.911,00	
4 1 4 21 01	Pendapatan BLUD UPT Logam	493.423.000,00	502.276.911,00	8.853.911,00	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Logam Kota Yogyakarta
4 1 4 23	Denda Hasil Operasi Yustisi	28.120.000,00	129.384.000,00	101.264.000,00	
4 1 4 24	Pendapatan BUKP	31.786.345,00	23.577.042,02	(8.209.302,98)	
4 1 4 24 01	Pendapatan BUKP - Dana Pembinaan BUKP - Jasa Produksi BUKP	31.786.345,00 18.163.626,00 13.622.719,00	23.577.042,02 13.472.595,43 10.104.446,59	(8.209.302,98) (4.691.030,57) (3.518.272,41)	Keputusan Gubernur DIY Nomor 71/KEP/2017 tentang Pembagian Laba Bersih Badan Usaha Koperasi Pedesaan BUKP Tahun Buku 2017
4 1 4 26	Penyelenggaraan Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS)	-	-	-	
4 1 4 26 01	Penyelenggaraan PMPS	-	-	-	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2017 tentang Tarif Sewa Lahan Pasar Malam Perayaan Sekaten Tahun Dal 1951 Tahun masehi 2017 di Kota Yogyakarta
4 1 4 27	Jaminan Bongkar	100.000.000,00	368.843.986,00	268.843.986,00	
4 1 4 27 01	Penerimaan Jaminan Biaya Bongkar Penyelenggaraan Reklame	100.000.000,00	368.843.986,00	268.843.986,00	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame  Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame
4 1 4 31	Pendapatan Bunga Pajak	545.995.880,00	2.126.474.511,00	1.580.478.631,00	
4 1 4 32	Pendapatan Bunga Retribusi	12.301.153,00	36.543.594,00	24.242.441,00	
4 1 4 33	Pendapatan Denda Administrasi	-	-	-	
4 1 4 33 01	Pendapatan Denda Administrasi (Dinduk Cakil)	-	-	-	
4 1 4 35	Pendapatan dari Pembayaran Listrik	1.476.248.800,00	1.615.940.201,00	139.691.401,00	
4 1 4 35 01	Pendapatan dari Pembayaran Listrik Pasar	1.476.248.800,00	1.615.940.201,00	139.691.401,00	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)  Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
4 1 4 26	Penerimaan Pendapatan Terminal	-	-	-	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang
4 1 4 26 01	Service Charge	-	-	-	Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemda Untuk Kegiatan Usaha

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
1	2	3	4	5	6
4 2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>916.460.511.482,00</b>	<b>875.308.177.702,00</b>	<b>(41.152.333.780,00)</b>	
4 2 1	<b>Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak</b>	<b>46.213.757.482,00</b>	<b>28.975.322.400,00</b>	<b>(17.238.435.082,00)</b>	
4 2 1 01	<b>Bagi Hasil Pajak.</b>	<b>43.688.080.000,00</b>	<b>27.070.845.600,00</b>	<b>(16.617.234.400,00)</b>	
4 2 1 01 03	Dana Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	38.857.895.000,00	23.314.737.000,00	(15.543.158.000,00)	Informasi resmi Kementerian Keuangan
4 2 1 01 05	Dana Bagi Hasil PBB Pemerintah Pusat	4.830.185.000,00	3.756.108.600,00	(1.074.076.400,00)	
4 2 1 02	<b>Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam</b>	<b>2.525.677.482,00</b>	<b>1.904.476.800,00</b>	<b>(621.200.682,00)</b>	
4 2 1 02 02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	2.970.000,00	1.782.000,00	(1.188.000,00)	Informasi resmi Kementerian Keuangan
4 2 1 02 07	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	983.593.000,00	590.155.800,00	(393.437.200,00)	
4 2 1 02 11	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	1.539.114.482,00	1.312.539.000,00	(226.575.482,00)	
4 2 2	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b>	<b>699.176.894.000,00</b>	<b>700.372.564.000,00</b>	<b>1.195.670.000,00</b>	
4 2 2 01	Dana Alokasi Umum (DAU)	699.176.894.000,00	700.372.564.000,00	1.195.670.000,00	Informasi resmi Kementerian Keuangan
4 2 3	<b>Dana Alokasi Khusus (DAK)</b>	<b>171.069.860.000,00</b>	<b>145.960.291.302,00</b>	<b>(25.109.568.698,00)</b>	
4 2 3 01	Dana Alokasi Khusus Fisik	59.145.559.000,00	49.435.128.281,00	(9.710.430.719,00)	Informasi resmi Kementerian Keuangan
4 2 3 01 02	Pelayanan Rujukan	19.722.999.000,00	17.192.622.745,00	(2.530.376.255,00)	
4 2 3 01 03	Pelayanan Kefarmasian	880.270.000,00	879.491.267,00	(778.733,00)	
4 2 3 01 04	Keluarga Berencana	460.000.000,00	407.900.000,00	(52.100.000,00)	
4 2 3 01 08	Lingkungan Hidup	753.310.000,00	279.390.000,00	(473.920.000,00)	
4 2 3 01 13	Pelayanan Kesehatan Dasar	4.265.880.000,00	4.011.013.033,00	(254.866.967,00)	
4 2 3 01 15	Perumahan dan Permukiman	3.262.144.000,00	3.211.800.000,00	(50.344.000,00)	
4 2 3 01 16	Infrastruktur Pemerintah Daerah (Jalan)	12.616.561.000,00	10.550.208.000,00	(2.066.353.000,00)	
4 2 3 01 17	Bidang Pendidikan	3.030.541.000,00	2.511.579.488,00	(518.961.512,00)	
4 2 3 01 18	Pengendalian Penyakit	523.650.000,00	482.054.000,00	(41.596.000,00)	
4 2 3 01 19	Sanitasi	3.014.116.000,00	2.477.808.148,00	(536.307.852,00)	
4 2 3 01 20	Jalan	10.616.088.000,00	7.431.261.600,00	(3.184.826.400,00)	
4 2 3 02	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	111.924.301.000,00	96.525.163.021,00	(15.399.137.979,00)	Informasi resmi Kementerian Keuangan
4 2 3 02 01	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	11.052.600.000,00	6.538.805.819,00	(4.513.794.181,00)	
4 2 3 02 02	Tunjangan Profesi Guru PNSD	81.395.549.000,00	72.251.345.280,00	(9.144.203.720,00)	
4 2 3 02 04	Bantuan Operasional Kesehatan	10.547.000.000,00	9.852.341.533,00	(694.658.467,00)	
4 2 3 02 05	Akreditasi Rumah Sakit	510.000.000,00	-	(510.000.000,00)	
4 2 3 02 06	Akreditasi Puskesmas	562.320.000,00	562.320.000,00	-	
4 2 3 02 07	Jaminan Persalinan	499.000.000,00	499.000.000,00	-	
4 2 3 02 08	Bantuan Operasional KB	1.718.240.000,00	1.213.769.008,00	(504.470.992,00)	
4 2 3 02 09	Pelayanan Adminduk	1.305.254.000,00	1.273.243.381,00	(32.010.619,00)	
4 2 3 02 10	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	3.041.300.000,00	3.041.300.000,00	-	
4 2 3 02 11	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	380.000.000,00	380.000.000,00	-	
4 2 3 02 12	Dana Pelayanan Kepariwisata	913.038.000,00	913.038.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
1	2	3	4	5	6
4 3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>185.296.038.275,00</b>	<b>201.402.515.281,00</b>	<b>16.106.477.006,00</b>	
4 3 1	<b>Pendapatan Hibah</b>	<b>30.078.600.000,00</b>	<b>31.011.780.000,00</b>	<b>933.180.000,00</b>	
4 3 2	<b>Dana Darurat</b>	-	-	-	
4 3 3	<b>Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya</b>	<b>118.220.579.275,00</b>	<b>133.393.876.281,00</b>	<b>15.173.297.006,00</b>	
4 3 3 01	<b>Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi</b>	<b>118.220.579.275,00</b>	<b>133.393.876.281,00</b>	<b>15.173.297.006,00</b>	
4 3 3 01 01	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	43.401.358.560,00	50.129.201.000,00	6.727.842.440,00	
4 3 3 01 03	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	24.047.766.000,00	29.834.114.000,00	5.786.348.000,00	
4 3 3 01 05	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	29.917.544.115,00	32.990.808.000,00	3.073.263.885,00	
4 3 3 01 07	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	10.620.000,00	35.818.000,00	25.198.000,00	
4 3 3 01 08	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	20.843.290.600,00	20.403.935.281,00	(439.355.319,00)	
4 3 4	<b>Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus</b>	<b>35.760.859.000,00</b>	<b>35.760.859.000,00</b>	-	
4 3 4 01	<b>Dana Penyesuaian</b>	<b>35.760.859.000,00</b>	<b>35.760.859.000,00</b>	-	
4 3 4 01 02	Dana Insentif Daerah	35.760.859.000,00	35.760.859.000,00	-	Informasi Resmi Kementerian Keuangan
4 3 5	<b>Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya</b>	<b>1.236.000.000,00</b>	<b>1.236.000.000,00</b>	-	
4 3 5 01	<b>Bantuan Keuangan dari Provinsi</b>	<b>1.236.000.000,00</b>	<b>1.236.000.000,00</b>	-	
4 3 5 01 01	Bantuan Keuangan dari Provinsi	1.236.000.000,00	1.236.000.000,00	-	
	<b>Jumlah :</b>	<b>1.754.768.489.387,00</b>	<b>1.765.760.418.492,27</b>	<b>10.991.929.105,27</b>	

**WALIKOTA YOGYAKARTA**

ttd

**HARYADI SUYUTI**

**LAMPIRAN II**  
**LAPORAN PERUBAHAN SAL**



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**  
**PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**  
**(AUDITED)**

NO	URAIAN	Reff	2019	2018
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1.	226.442.324.759,52	254.103.922.554,36
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2.	226.442.324.759,52	254.103.922.554,36
3	Sub Total (1-2)		-	-
4				
5	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	5.2.3.	220.340.133.122,45	226.442.324.759,52
6	Sub Total (3+5)		<b>220.340.133.122,45</b>	<b>226.442.324.759,52</b>
7				
8	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		-	-
9	Lain-lain		-	-
10	Saldo Anggaran Lebih Akhir (6+8+9)	5.2.4.	<b>220.340.133.122,45</b>	<b>226.442.324.759,52</b>

\*) Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian  
tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**WALIKOTA YOGYAKARTA**

ttd

**HARYADI SUYUTI**

**LAMPIRAN III**  
**LAPORAN OPERASIONAL**



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018  
(AUDITED)

Uraian	Reff	Realisasi 2019 Rp	Realisasi 2018 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp	%
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>					
<b>PENDAPATAN</b>	5.4.1				
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	5.4.1.1				
Pendapatan Pajak Daerah	5.4.1.1.a.	455.418.040.451,00	415.815.313.988,00	39.602.726.463,00	9,52
Pendapatan Retribusi Daerah	5.4.1.1.b.	32.721.998.352,00	34.358.737.796,00	(1.636.739.444,00)	(4,76)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	5.4.1.1.c.	28.975.003.950,01	28.032.365.012,83	942.638.937,18	3,36
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.4.1.1.d.	184.304.487.065,30	204.489.374.745,98	(20.184.887.680,68)	(9,87)
<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>		<b>701.419.529.818,31</b>	<b>682.695.791.542,81</b>	<b>18.723.738.275,50</b>	<b>2,74</b>
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	5.4.1.2				
<b>Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</b>	5.4.1.2.a.				
Dana Bagi Hasil Pajak	5.4.1.2.a.1	27.070.845.600,00	44.728.934.290,00	(17.658.088.690,00)	(39,48)
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.4.1.2.a.2	1.904.476.800,00	1.949.445.407,00	(44.968.607,00)	(2,31)
Dana Alokasi Umum	5.4.1.2.a.3	700.372.564.000,00	658.504.186.000,00	41.868.378.000,00	6,36
Dana Alokasi Khusus	5.4.1.2.a.4	145.960.291.302,00	162.523.890.048,00	(16.563.598.746,00)	(10,19)
<b>Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</b>		<b>875.308.177.702,00</b>	<b>867.706.455.745,00</b>	<b>7.601.721.957,00</b>	<b>0,88</b>
<b>Transfer Pemerintah Pusat Lainnya</b>	5.4.1.2.b				
Dana Otonomi Khusus	5.4.1.2.b.1	-	-	-	-
Dana Penyesuaian	5.4.1.2.b.2	65.318.639.000,00	42.500.000.000,00	22.818.639.000,00	53,69
Pendapatan Hibah	5.4.1.2.b.3	-	32.251.792.000,00	(32.251.792.000,00)	-
Dana Tunjangan Pendidikan	5.4.1.2.b.4	-	-	-	-
<b>Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Lainnya</b>		<b>65.318.639.000,00</b>	<b>74.751.792.000,00</b>	<b>(9.433.153.000,00)</b>	<b>(12,62)</b>
<b>Transfer Pemerintah Provinsi</b>	5.4.1.2.c				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.4.1.2.c.1	135.442.888.519,00	126.437.432.637,38	9.005.455.881,62	7,12
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	5.4.1.2.c.2	-	-	-	-
Pendapatan Lainnya	5.4.1.2.c.3	1.236.000.000,00	531.242.000,00	704.758.000,00	132,66
<b>Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi</b>		<b>136.678.888.519,00</b>	<b>126.968.674.637,38</b>	<b>9.710.213.881,62</b>	<b>7,65</b>
<b>Jumlah Pendapatan Transfer</b>		<b>1.077.305.705.221,00</b>	<b>1.069.426.922.382,38</b>	<b>7.878.782.838,62</b>	<b>0,74</b>
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	5.4.1.3				
Pendapatan Hibah	5.4.1.3.a	1.454.000.000,00	-	1.454.000.000,00	-
Pendapatan Hibah Aset	5.4.1.3.b	-	-	-	-
Pendapatan Dana Darurat	5.4.1.3.c	-	-	-	-
Pendapatan Lainnya	5.4.1.3.d	-	-	-	-
<b>Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>		<b>1.454.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.454.000.000,00</b>	<b>-</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>1.780.179.235.039,31</b>	<b>1.752.122.713.925,19</b>	<b>28.056.521.114,12</b>	<b>1,60</b>
<b>BEBAN</b>	5.4.2				
<b>BEBAN OPERASI</b>	5.4.2.1				
Beban Pegawai	5.4.2.1.1	758.691.887.722,78	767.270.949.068,35	(8.579.061.345,57)	(1,12)
Beban Barang	5.4.2.1.2	537.573.961.358,62	485.153.884.468,17	52.420.076.890,45	10,80
Beban Bunga	5.4.2.1.3	-	-	-	-
Beban Subsidi	5.4.2.1.4	-	-	-	-
Beban Hibah	5.4.2.1.5	79.389.047.945,00	53.665.425.050,00	25.723.622.895,00	47,93
Beban Bantuan Sosial	5.4.2.1.6	11.551.423.000,00	7.764.735.000,00	3.786.688.000,00	48,77
Beban Bantuan Keuangan	5.4.2.1.7	-	-	-	-
Beban Penyusutan	5.4.2.1.8	162.251.344.396,22	140.755.721.428,80	21.495.622.967,42	15,27
Beban penyisihan	5.4.2.1.9	3.306.466.252,30	5.528.301.939,98	(2.221.835.687,68)	(40,19)
Beban amortisasi	5.4.2.1.10	6.246.635.065,94	4.341.448.248,85	1.905.186.817,09	43,88
Beban Premi	5.4.2.1.11	-	-	-	-
<b>Jumlah Beban Operasi</b>		<b>1.559.010.765.740,86</b>	<b>1.464.480.465.204,14</b>	<b>94.530.300.536,72</b>	<b>6,45</b>
<b>BEBAN TRANSFER</b>	5.4.2.2				
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	5.4.2.2.a	-	-	-	-
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.4.2.2.b	-	-	-	-
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah daerah Lainnya	5.4.2.2.c	1.228.210.990,00	1.592.338.080,00	(364.127.090,00)	(22,87)
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	5.4.2.2.d	-	-	-	-
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	5.4.2.2.e	753.036.006,00	735.662.418,00	17.373.588,00	2,36
Beban transfer Dana Otonomi Khusus	5.4.2.2.f	-	-	-	-
Beban Tidak Terduga	5.4.2.2.g	317.693.064,00	293.241.254,00	24.451.810,00	8,34
<b>Jumlah Beban Transfer</b>		<b>2.298.940.060,00</b>	<b>2.621.241.752,00</b>	<b>(322.301.692,00)</b>	<b>(12,30)</b>
<b>Jumlah Beban Operasi dan Transfer</b>		<b>1.561.309.705.800,86</b>	<b>1.467.101.706.956,14</b>	<b>94.207.998.844,72</b>	<b>6,42</b>
<b>Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional</b>		<b>218.869.529.238,45</b>	<b>285.021.006.969,04</b>	<b>(66.151.477.730,59)</b>	<b>(23,21)</b>

Uraian	Reff	Realisasi 2019 Rp	Realisasi 2018 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp	%
<b>SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	5.4.3				
<b>SURPLUS NON OPERASIONAL</b>	5.4.3.1			-	
Surplus Penjualan Aset Non lancar		159.000.000,00	-	159.000.000,00	
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-	-	
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-	-	
<b>Jumlah Surplus Non Operasional</b>		<b>159.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>159.000.000,00</b>	<b>-</b>
<b>DEFISIT NON OPERASIONAL</b>	5.4.3.2				
Defisit Penjualan Aset Nonlancar		-	-	-	
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-	-	
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-	-	
<b>Jumlah Defisit Non Operasional</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>159.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>159.000.000,00</b>	<b>-</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>					
<b>POS LUAR BIASA</b>	5.4.4		-	<b>159.000.000,00</b>	<b>-</b>
<b>PENDAPATAN LUAR BIASA</b>	5.4.4.1				
Pendapatan Luar Biasa	5.4.4.1.a		-	-	-
<b>Jumlah Pendapatan Luar Biasa</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>BEBAN LUAR BIASA</b>	5.4.4.2				
Beban Luar Biasa	5.4.4.2.a		(17.999.000,00)	17.999.000,00	(100,00)
<b>Jumlah beban Luar Biasa</b>		<b>-</b>	<b>(17.999.000,00)</b>	<b>17.999.000,00</b>	<b>(100,00)</b>
<b>JUMLAH POS LUAR BIASA</b>		<b>-</b>	<b>17.999.000,00</b>	<b>(17.999.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>
<b>SURPLUS/ DEFISIT- LO</b>		<b>219.028.529.238,45</b>	<b>285.039.005.969,04</b>	<b>(66.010.476.730,59)</b>	<b>(23,16)</b>

\*) Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**WALIKOTA YOGYAKARTA**

ttd

**HARYADI SUYUTI**



**LAMPIRAN IV**  
**L P E**



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018**  
**(AUDITED)**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>Ref</b>	<b>TAHUN 2019</b> <b>Rp</b>	<b>TAHUN 2018</b> <b>Rp</b>
1	Ekuitas Awal	5.6.1	4.084.409.554.757,17	3.803.865.068.832,81
2	Surplus/defisit LO	5.6.2	219.028.529.238,45	285.039.005.969,04
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	5.6.3	-	-
4	Ekuitas Mutasi	5.6.4	(68.554.520.873,90)	(4.494.520.044,68)
5	Ekuitas Akhir	5.6.5	4.234.883.563.121,72	4.084.409.554.757,17

\*) Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**WALIKOTA YOGYAKARTA**

**ttd**

**HARYADI SUYUTI**

**LAMPIRAN V**  
**NERACA**

LAMPIRAN V  
 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
 NOMOR 5 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
**N E R A C A**  
 PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018  
 (AUDITED)

Uraian	Reff	31 Desember 2019 Rp	31 Desember 2018 Rp
<b>A S E T</b>	5.3.1		
<b>ASET LANCAR</b>	5.3.1.1		
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.a	176.886.586.123,00	188.225.493.976,14
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.b	34.639.092,00	324.379.804,00
Kas di Bendahara Dana BOS	5.3.1.1.c	8.176.660.137,16	6.785.532.068,16
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.d	-	-
Kas di BLUD	5.3.1.1.e	35.593.273.260,17	31.950.758.348,22
Kas Lainnya	5.3.1.1.g	-	87.774.031,00
Piutang Pajak	5.3.1.1.i	102.125.917.028,00	97.973.824.608,00
Penyisihan piutang pajak	5.3.1.1.i 1)	(46.638.938.595,95)	(44.976.323.154,60)
Piutang pajak netto	5.3.1.1.i 2)	55.486.978.432,05	52.997.501.453,40
Piutang Retribusi	5.3.1.1.j	3.156.534.910,00	3.580.800.580,00
Penyisihan piutang retribusi	5.3.1.1.j 1)	(1.599.833.267,80)	(2.177.524.833,70)
Piutang retribusi netto	5.3.1.1.j 2)	1.556.701.642,20	1.403.275.746,30
Bagian Lancar Tagihan Pemberian Pinjaman	5.3.1.1.k	169.124.999,00	174.967.999,00
Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pemberian Pinjaman	5.3.1.1.k 1)	(169.124.999,00)	(174.022.999,00)
Bagian Lancar Tagihan Pemberian Pinjaman Netto	5.3.1.1.k 2)	-	945.000,00
Bagian Lancar Tagihan Bagi Hasil Kemitraan	5.3.1.1.l	247.000.000,00	249.000.000,00
Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Bagi Hasil Kemitraan	5.3.1.1.l 1)	(1.235.000,00)	(1.245.000,00)
Bagian Lancar Tagihan Bagi Hasil Kemitraan Netto	5.3.1.1.l 2)	245.765.000,00	247.755.000,00
Piutang Denda Tagihan Bagi Hasil Kemitraan	5.3.1.1.m	2.000.000,00	-
Penyisihan Piutang Denda Tagihan Bagi Hasil Kemitraan	5.3.1.1.m 1)	(10.000,00)	-
Piutang Denda Tagihan Bagi Hasil Kemitraan Netto	5.3.1.1.m 2)	1.990.000,00	-
Bagian Lancar Tagihan Sewa	5.3.1.1.n	1.524.845.168,00	1.554.117.168,00
Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Sewa	5.3.1.1.n 1)	(1.323.897.188,00)	(570.384.253,34)
Bagian Lancar Tagihan Sewa Netto	5.3.1.1.n 2)	200.947.980,00	983.732.914,66
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	5.3.1.1.o	-	-
Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	5.3.1.1.o 1)	-	-
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto	5.3.1.1.o 2)	-	-
Piutang Transfer - Dana Bagi Hasil	5.3.1.1.p	2.049.012.238,00	-
Penyisihan Piutang Transfer - Dana Bagi Hasil	5.3.1.1.p 1)	(10.245.061,19)	-
Piutang Transfer - Dana Bagi Hasil Netto	5.3.1.1.p 2)	2.038.767.176,81	-
Piutang PAD Lainnya	5.3.1.1.q	32.276.757.330,00	30.097.695.132,00
Penyisihan Piutang PAD Lainnya	5.3.1.1.q 1)	(18.863.248.444,57)	(18.215.161.911,54)
Piutang PAD Lainnya Netto	5.3.1.1.q 2)	13.413.508.885,43	11.882.533.220,46
Piutang Lainnya	5.3.1.1.r	19.636.859.641,60	13.331.671.014,00
Penyisihan piutang lainnya	5.3.1.1.r 1)	(446.377.149,96)	(413.848.912,68)
Nilai bersih piutang lainnya	5.3.1.1.r 2)	19.190.482.491,64	12.917.822.101,32
Asuransi Dibayar Dimuka	5.3.1.1.s	1.603.287.437,68	1.108.969.387,26
Persediaan	5.3.1.1.s	36.723.783.804,99	40.720.493.927,26
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>351.153.371.463,13</b>	<b>349.636.966.978,19</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	5.3.1.2		
Investasi Non Permanen	5.3.1.2.a		
Investasi Non Permanen Lainnya	5.3.1.2.a 1)	710.489.692,00	719.202.724,00
Penyisihan investasi non permanen	5.3.1.2.a 2)	(710.489.692,00)	(719.202.724,00)
<b>Jumlah Investasi Non Permanen</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

Uraian	Reff	31 Desember 2019 Rp	31 Desember 2018 Rp
Investasi Permanen	5.3.1.2.b		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.1.2.b.1)	532.648.848.218,24	478.329.066.511,37
Investasi Permanen Lainnya	5.3.1.2.b.2)	-	-
<b>Jumlah Investasi Permanen</b>		<b>532.648.848.218,24</b>	<b>478.329.066.511,37</b>
<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>		<b>532.648.848.218,24</b>	<b>478.329.066.511,37</b>
<b>ASET TETAP</b>	5.3.1.3		
Tanah	5.3.1.3.a)	1.884.638.446.869,22	1.863.714.903.480,22
Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.b)	754.164.705.849,33	668.127.707.264,32
Bangunan dan Gedung	5.3.1.3.c)	1.076.780.987.891,51	1.033.542.511.761,76
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.3.1.3.d)	2.108.434.251.782,83	1.997.802.762.171,24
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.e)	41.148.254.654,97	37.345.880.968,58
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.f)	22.997.204.784,98	10.589.253.243,63
Akumulasi penyusutan	5.3.1.3.g)	(2.569.454.513.819,91)	(2.373.370.499.192,87)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>3.318.709.338.013,44</b>	<b>3.237.752.519.696,88</b>
<b>DANA CADANGAN</b>	5.3.1.4	-	11.818.230,00
<b>ASET LAINNYA</b>	5.3.1.5		
Kas yang dibatasi penggunaannya	5.3.1.5.a	2.798.981.468,00	2.837.062.270,00
Tagihan Bagi Hasil Kemitraan	5.3.1.5.b	1.375.000.000,00	1.603.000.000,00
Penyisihan Tagihan Bagi Hasil Kemitraan	5.3.1.5.b 1)	(6.875.000,00)	(8.015.000,00)
Tagihan Bagi Hasil Kemitraan Netto	5.3.1.5.b 2)	1.368.125.000,00	1.594.985.000,00
Tagihan Sewa	5.3.1.5.c	184.880.000,00	452.304.000,00
Penyisihan Tagihan Sewa	5.3.1.5.c 1)	(924.400,00)	(2.261.520,00)
Tagihan Sewa Netto	5.3.1.5.c 2)	183.955.600,00	450.042.480,00
Tuntutan Ganti Rugi	5.3.1.5.d	-	-
Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi	5.3.1.5.d 1)	-	-
Tuntutan Ganti Rugi Netto	5.3.1.5.d 2)	-	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.1.5.e	7.269.300.000,00	7.269.300.000,00
Aset Tak Berwujud	5.3.1.5.f	47.395.971.027,68	34.557.310.548,85
Akumulasi amortisasi	5.3.1.5.f 1)	(19.991.598.048,60)	(13.744.962.982,66)
Aset Tak Berwujud Netto	5.3.1.5.f 2)	27.404.372.979,08	20.812.347.566,19
Aset Lain -lain	5.3.1.5.g	5.357.144.501,83	3.297.075.891,84
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>44.381.879.548,91</b>	<b>36.260.813.208,03</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>4.246.893.437.243,72</b>	<b>4.101.991.184.624,48</b>
<b>K E W A J I B A N</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	5.3.1.6		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.1.6.a	3.054.754.868,00	3.396.586.401,00
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.1.6.b	2.439.982.267,00	1.811.562.647,76
Utang Belanja	5.3.1.6.c	6.515.136.987,00	12.373.480.818,55
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.1.6.d	-	-
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>12.009.874.122,00</b>	<b>17.581.629.867,31</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	5.3.1.7		
Utang Jangka Panjang Lainnya	5.3.1.7.a	-	-
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>12.009.874.122,00</b>	<b>17.581.629.867,31</b>
<b>EKUITAS</b>	5.3.1.8.	4.234.883.563.121,72	4.084.409.554.757,17
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>4.234.883.563.121,72</b>	<b>4.084.409.554.757,17</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>		<b>4.246.893.437.243,72</b>	<b>4.101.991.184.624,48</b>

\*) Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**WALIKOTA YOGYAKARTA**

ttt

**HARYADI SUYUTI**

**LAMPIRAN VI**  
**LAPORAN ARUS KAS**

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
 NOMOR 5 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**  
**Metode Langsung**  
**(AUDITED)**

Uraian	Reff	Tahun 2019	Tahun 2018 Rp
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	5.5.1		
<b>Arus Masuk Kas</b>	5.5.1.1		
Penerimaan Pajak Daerah	5.5.1.1.a	451.265.948.031,00	407.573.263.422,00
Penerimaan Retribusi Daerah	5.5.1.1.b	32.428.343.731,00	33.984.531.787,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.1.c	28.975.003.950,01	28.032.365.012,83
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.5.1.1.d	175.277.755.146,26	197.181.224.563,31
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	5.5.1.1.e	27.070.845.600,00	44.728.934.290,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.5.1.1.f	1.904.476.800,00	1.949.445.407,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.5.1.1.g	700.372.564.000,00	658.504.186.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	5.5.1.1.h	145.960.291.302,00	162.523.890.048,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus	5.5.1.1.i	-	-
Penerimaan Dana Penyesuaian	5.5.1.1.j	65.318.639.000,00	42.500.000.000,00
Penerimaan Hibah	5.5.1.1.k	-	32.251.792.000,00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak	5.5.1.1.l	133.393.876.281,00	126.437.432.637,38
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	5.5.1.1.m	1.236.000.000,00	-
Penerimaan Lainnya	5.5.1.1.n	-	531.242.000,00
Penerimaan Hibah	5.5.1.1.o	1.454.000.000,00	-
Penerimaan Dana Darurat	5.5.1.1.p	-	-
Penerimaan Lainnya	5.5.1.1.q	-	-
Penerimaan dari pendapatan Luar Biasa	5.5.1.1.r	-	-
<b>Total Arus Masuk Kas</b>		<b>1.764.657.743.841,27</b>	<b>1.736.198.307.167,52</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>	5.5.1.2		
<b>Belanja Operasi</b>	5.5.1.2.1		
Pembayaran Pegawai	5.5.1.2.1.a	760.532.062.428,28	767.231.708.627,85
Pembayaran Barang	5.5.1.2.1.b	553.387.490.228,89	496.351.994.037,57
Pembayaran Bunga	5.5.1.2.1.c	-	-
Pembayaran Subsidi	5.5.1.2.1.d	-	-
Pembayaran Hibah	5.5.1.2.1.e	79.389.047.945,00	53.665.425.050,00
Pembayaran Bantuan Sosial	5.5.1.2.1.f	11.551.423.000,00	7.764.735.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	5.5.1.2.1.g	1.981.246.996,00	2.328.000.498,00
Pembayaran Kejadian Luar Biasa	5.5.1.2.1.h	-	-
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>		<b>1.406.841.270.598,17</b>	<b>1.327.341.863.213,42</b>
<b>Belanja Tak Terduga</b>	5.5.1.2.2.	317.693.064,00	293.241.254,00
<b>Total Arus Keluar Kas</b>		<b>1.407.158.963.662,17</b>	<b>1.327.635.104.467,42</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>		<b>357.498.780.179,10</b>	<b>408.563.202.700,10</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>	5.5.2		
<b>Arus Masuk Kas</b>	5.5.2.1		
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	5.5.2.1.a	534.748.601,00	621.890.685,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	5.5.2.1.b	567.926.050,00	99.800.000,00
<b>Total Arus Masuk Kas</b>		<b>1.102.674.651,00</b>	<b>721.690.685,00</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>	5.5.2.2		
Perolehan Tanah	5.5.2.2.a	25.569.058.040,00	74.967.469.865,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	5.5.2.2.b	96.719.552.169,17	103.905.673.673,95
Perolehan Gedung dan Bangunan	5.5.2.2.c	54.312.514.794,87	22.131.236.620,86
Perolehan Jalan, Irigasi, dan jaringan	5.5.2.2.d	101.225.143.404,83	44.603.591.095,89
Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.5.2.2.e	828.300.673,00	4.208.575.933,00
Perolehan Aset Lainnya	5.5.2.2.f	48.779.803.117,30	75.276.191.867,79
Penyertaan Modal Pada BUMD	5.5.2.2.g	37.275.000.000,00	63.861.759.721,45
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	5.5.2.2.h	-	-
<b>Total Arus Keluar Kas</b>		<b>364.709.372.199,17</b>	<b>388.954.498.777,94</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>		<b>(363.606.697.548,17)</b>	<b>(388.232.808.092,94)</b>

Uraian	Reff	Tahun 2019	Tahun 2018 Rp
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>	5.5.3		
<b>Arus Masuk Kas</b>	5.5.3.1		
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	5.5.3.1.a	5.725.732,00	2.550.000,00
Penerimaan Piutang Daerah	5.5.3.1.b		
Pencairan Dana Cadangan	5.5.3.1.c	-	8.044.288.558,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.5.3.1.d		
Jumlah Arus Masuk Kas		<b>5.725.732,00</b>	<b>8.046.838.558,00</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>	5.5.3.2		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	5.5.3.2.a	-	56.038.830.960,00
Pembentukan Dana Cadangan	5.5.3.2.b		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.5.3.2.c	-	-
<b>Total Arus Keluar Kas</b>		<b>-</b>	<b>56.038.830.960,00</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>		<b>5.725.732,00</b>	<b>(47.991.992.402,00)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS</b>	5.5.4		
<b>Arus Masuk Kas</b>	5.5.4.1		
Penerimaan PFK	5.5.4.1.a	113.015.922.965,64	100.327.827.978,76
Penggunaan UP	5.5.4.1.b	13.577.131.452,76	11.358.582.864,64
Pengembalian UP	5.5.4.1.c	6.804.229.455,24	5.790.916.835,36
Sisa UP	5.5.4.1.d	34.639.092,00	300,00
Penggunaan TU	5.5.4.1.e	69.457.031.421,48	53.975.500.476,26
Pengembalian TU	5.5.4.1.f	1.166.455.511,48	2.687.843.528,29
Sisa TU	5.5.4.1.g	0,00	630.000,00
<b>Total Arus Masuk Kas</b>		<b>204.055.409.898,60</b>	<b>174.141.301.983,31</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>	5.5.4.2		
Penyetoran PFK	5.5.4.2.a	113.015.922.965,64	100.327.827.978,76
Pengeluaran SP2D UP	5.5.4.2.b	20.416.000.000,00	17.149.500.000,00
Pengeluaran SP2D TU	5.5.4.2.c	70.623.486.932,96	56.663.974.004,55
<b>Total Arus Keluar Kas</b>		<b>204.055.409.898,60</b>	<b>174.141.301.983,31</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>KENAIKAN ( PENURUNAN ) KAS</b>		<b>(6.102.191.637,07)</b>	<b>(27.661.597.794,84)</b>
<b>SALDO AWAL KAS</b>		<b>226.442.324.759,52</b>	<b>254.103.922.554,36</b>
<b>SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS</b>	5.5.5	<b>220.340.133.122,45</b>	<b>226.442.324.759,52</b>
Jumlah Kas dan Setara Kas	5.5.6.a		
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan (sisa kas BOSNAS dan BOS Propinsi dan BOSDA)	5.5.6.b	-	372.089.337,00
Saldo di Bendahara Penerimaan atas titipan pajak hiburan	5.5.6.c	-	-
Setoran Ke Kas Daerah melewati tahun anggaran	5.5.6.d	50.559.818,66	
Setoran ke Kas BLUD UPT Pusat Bisnis hasil pemeriksaan	5.5.6.e	44.692.271,22	
Saldo kas di Tim Dana Bergulir	5.5.6.f	-	87.774.031,00
Titipan Pihak Ketiga atas teater 4D dan Toilet Taman Pintar	5.5.6.g	255.773.400,00	471.750.100,00
<b>SALDO AKHIR KAS</b>	5.5.6	<b>220.691.158.612,33</b>	<b>227.373.938.227,52</b>

\*) Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**WALIKOTA YOGYAKARTA**

**ttd**

**HARYADI SUYUTI**



**LAMPIRAN VII**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**



---

---

## BAB I PENDAHULUAN

### **1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah**

#### **1.1.1. Maksud penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah adalah:**

- a. Menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta selaku entitas pelaporan selama periode pelaporan tahun 2019; dan
- b. Mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional Pemerintah Kota Yogyakarta, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi Pemerintahan Kota Yogyakarta dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

#### **1.1.2. Tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah adalah:**

- a. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan Tahun Anggaran 2019 cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Menyediakan informasi apakah cara memperoleh pendapatan dan alokasinya telah sesuai dengan target yang ditetapkan dan sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kota Yogyakarta serta hasil-hasil yang dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Kota Yogyakarta mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhannya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kota Yogyakarta berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya; dan
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama Tahun Anggaran 2019.

### **1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah :**

Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan



Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; dan
- h. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- j. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

### **1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah**

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

#### **BAB I           PENDAHULUAN**

Memuat maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah.

#### **BAB II          KEBIJAKAN UMUM DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD 2019**

Memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang dijadikan landasan penyusunan APBD dan perkembangannya dalam Perubahan APBD sampai dengan pelaksanaan APBD akhir tahun anggaran, kebijakan keuangan yang ditetapkan sampai dengan akhir tahun anggaran yang berimplikasi terhadap perubahan posisi Neraca dan Arus Kas, serta keberhasilan pencapaian target kinerja APBD yang dicerminkan melalui indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2019.

#### **BAB III        IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian kinerja APBD menurut bidang, berupa gambaran realisasi pencapaian efektivitas dan efisiensi serta kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.

#### **BAB IV        KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Memuat informasi tentang organisasi yang ditetapkan sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan, dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

#### **BAB V        PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN**

Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.



PEMERINTAH KOTAYOGYAKARTA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

---

**BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI - INFORMASI NON KEUANGAN**

Memuat informasi tentang hal-hal non keuangan yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, meliputi letak geografis, luas wilayah, penduduk dan informasi relevan lainnya.

**BAB VII PENJELASAN ATAS INFORMASI LAINNYA**

Memuat informasi tentang hal-hal lainnya yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, meliputi perkembangan penyerahan pengelolaan Terminal Tipe A Giwangan Yogyakarta kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia pasca penyelesaian sengketa hukum dengan PT. Perwita Karya dan perkembangan divestasi atas kepemilikan saham Pemerintah Kota Yogyakarta pada PT. Radio Swara Adhiloka..

**BAB VIII PENUTUP**

Memuat uraian penutup berupa kesimpulan - kesimpulan penting dari laporan keuangan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas.



---

---

**BAB II**  
**KEBIJAKAN UMUM**  
**DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD 2019**

**2.1. Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2019**

Dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2019. Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2019 tertuang dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor :

23/NKB.YK/VIII/2018

---

1/NKB/DPRD/VIII/2018

Tanggal 6 Agustus 2018 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Dalam Kebijakan Umum APBD TA 2019 dinyatakan bahwa penyusunan RAPBD Kota Yogyakarta Tahun 2019 disamping memperhatikan tema pembangunan nasional juga memperhatikan dan mempertimbangkan tema pembangunan Pemerintah DIY tahun 2019 yang tercantum pada RKPD Provinsi DIY Tahun 2019 yaitu "Pemerataan Pembangunan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan".

Tema pembangunan di atas dijabarkan ke dalam prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. ketimpangan wilayah;
2. kemiskinan dan Ketimpangan pendapatan;
3. tindak lanjut pembangunan New Yogyakarta International Airport;
4. pembiayaan pembangunan melalui peran swasta.

Sejalan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka tema pembangunan daerah untuk RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2019 adalah : "Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Mendorong Pemerataan Pembangunan"

Tematik pembangunan ini selanjutnya dijabarkan menjadi beberapa prioritas pembangunan sebagai berikut ini :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Sosial Budaya;
4. Pertumbuhan Ekonomi;



5. Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur;
6. Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang;
7. Kinerja Aparatur dan Birokrasi

#### 2.1.1. Rencana Target Ekonomi Makro Daerah Tahun 2019

##### 2.1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2019, diperkirakan akan tetap mengandalkan sektor-sektor ekonomi unggulan yaitu pada sektor-sektor perdagangan dan jasa serta sektor andalan lain, yaitu informasi dan komunikasi, industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum. Mendasarkan pada capaian pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012-2015 dan perkiraan pencapaian pada tahun 2016, serta arah kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah DIY, maka diharapkan sektor tersier tetap berkembang dan sejalan dengan image kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan tujuan pariwisata.

Dengan melihat kecenderungan pada tahun-tahun sebelumnya, maka tahun 2019 perekonomian Kota Yogyakarta diestimasikan tumbuh sebesar 5,19 persen.

##### 2.1.1.2. Inflasi

Inflasi pada tahun 2012 adalah sebesar 4,31 persen. Inflasi pada tahun 2013 sedikit lebih tinggi dari pada tahun 2012 yaitu 7,32 persen dan laju inflasi Tahun 2014 sedikit lebih tinggi yaitu sebesar 6,59 persen. Adapun pada tahun 2015 turun pada angka 3,09 persen dan turun kembali menjadi 2,29 persen di tahun 2016.

Dengan memperhatikan fluktuasi tingkat inflasi dari tahun 2012 hingga 2016 maka laju inflasi pada tahun 2019 diharapkan dapat ditekan pada level 3,62 persen.

##### 2.1.1.3. Pendapatan Per Kapita

Kesejahteraan penduduk Kota Yogyakarta yang dicerminkan dengan besaran PDRB per kapita, yang merupakan bagian pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk secara rata-rata. Berkembangnya perekonomian Kota Yogyakarta setiap tahunnya menyebabkan peningkatan pendapatan yang diterima oleh penduduknya. Pola pergerakan PDRB dan pola pergerakan jumlah penduduk Kota Yogyakarta tahun-tahun sebelumnya maka PDRB per kapita Kota Yogyakarta diperkirakan akan meningkat. Peningkatan PDRB per kapita ini akan mengikuti perkembangan ekonomi dan perkembangan penduduk Kota Yogyakarta.

Pada masa mendatang diperkirakan ekonomi akan bertumbuh lebih cepat daripada pertumbuhan penduduknya sehingga bagian pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk akan menjadi lebih besar.



#### 2.1.1.4. Angka Pengangguran Terbuka

Ketersediaan jumlah lapangan pekerjaan dengan jumlah pencari kerja yang tidak sebanding mengakibatkan timbulnya pengangguran. Oleh karena itu, keberadaan pengangguran mencerminkan terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia dibandingkan dengan potensi tenaga kerja yang tersedia. Pengangguran adalah orang yang termasuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) namun belum/tidak bekerja. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) dihitung berdasarkan jumlah orang yang tidak bekerja dibandingkan dengan angkatan kerja.

Selama tahun 2012-2016, tingkat pengangguran terbuka di Kota Yogyakarta menunjukkan perkembangan fluktuatif dengan tren menurun. Pertumbuhan rata-rata tingkat pengangguran terbuka di Kota Yogyakarta adalah sebesar -23,03%. Pada tahun 2012, TPT di Kota Yogyakarta adalah sebesar 10,34% dan turun menjadi 3,63% pada tahun 2016. Apabila dilihat dari jumlah pengangguran terbuka maupun jumlah angkatan kerja pada tahun 2014, besaran yang dimiliki memang relatif lebih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan tingkat pengangguran terbuka ini menunjukkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

#### 2.1.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD Kota Yogyakarta

##### 2.1.2.1. Target Kinerja Kota Yogyakarta Tahun 2019

Target kinerja Kota Yogyakarta berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 yang tertuang dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Target Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2019

No.	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Target
1.	Kemiskinan masyarakat menurun	Angka kemiskinan	7,35 %
2.	Keberdayaan masyarakat meningkat	Indeks keberdayaan masyarakat	56,53
3.	Ketahanan pangan masyarakat meningkat	pola pangan harapan	85,4
4.	Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun	Indeks Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,40
5.	Pertumbuhan ekonomi meningkat	Angka pertumbuhan ekonomi	5,19%
6.	Investasi di Kota Yogyakarta meningkat	Persentase peningkatan nilai investasi	1,50%



PEMERINTAH KOTAYOGYAKARTA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

7.	Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun	Angka kriminalitas menurut BPS	1,596
		Jumlah pelanggaran Perda yang dilaporkan dan/ atau dipantau	5.600
8.	Kualitas pendidikan meningkat	Angka rata-rata lama sekolah	11,43 th
		Angka harapan lama sekolah	17,01 th
9.	Harapan hidup masyarakat meningkat	Angka harapan hidup	74,34th
10.	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Indikator sasaran daerah	56%
11.	Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	73,40%
12.	kualitas lingkungan hidup meningkat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	51,04
13.	Infrastruktur wilayah meningkat	Indeks Infrastruktur Wilayah	41,29
14.	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	BB
		Opini pemeriksaan BPK WTP	WTP

#### 2.1.2.2. Laju inflasi

Harga barang dan jasa diharapkan pada tahun 2019 cukup stabil sehingga tidak akan cukup berpengaruh pada laju inflasi, dalam bab terdahulu terlihat bahwa inflasi pada tahun 2015 lebih tinggi dari tahun 2016. Laju inflasi pada tahun 2019 diharapkan dapat ditekan pada level 3,62 persen.

#### 2.1.2.3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran tingkat kemakmuran suatu wilayah. Sektor-sektor utama Kota Yogyakarta adalah sektor tersier, antara lain akomodasi, transportasi, informasi dan komunikasi serta jasa pendidikan.

Pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta pada tahun 2015 dapat mencapai 5,16 persen. Sektor industri pengolahan memiliki kontribusi terbesar sejak tahun 2012 hingga 2014, pertumbuhannya cenderung naik, tetapi pada tahun 2015 mengalami penurunan. Sedangkan sektor ekonomi dengan pertumbuhan terbesar





dalam perekonomian Kota Yogyakarta adalah sektor jasa keuangan dan asuransi yang rata-rata pertumbuhannya mencapai 7,75 persen setiap tahunnya.

Pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta tahun 2019 diperkirakan akan meningkat. Asumsi lain yang digunakan dalam perhitungan ini adalah bahwa pertumbuhan sektor pertanian serta sektor pertambangan dan penggalian diperkirakan akan melambat, sementara untuk pertumbuhan sektor-sektor lainnya diperkirakan akan meningkat. Agar pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan produksi dan produktivitas sektor-sektor utama serta peningkatan keterkaitan antar sektor. Sektor-sektor utama di Kota Yogyakarta adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor jasa, sektor keuangan, serta sektor pengangkutan.

Pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta tahun 2019 diperkirakan 5,19 persen dan akan meningkat dari tahun ke tahun.

#### 2.1.2.4. Pendapatan Per Kapita

Kesejahteraan penduduk Kota Yogyakarta yang dicerminkan dengan besaran PDRB per kapita. PDRB per kapita merupakan bagian pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk secara rata-rata. Berkembangnya perekonomian Kota Yogyakarta setiap tahunnya menyebabkan peningkatan pendapatan yang diterima oleh penduduknya. Pola pergerakan PDRB dan pola pergerakan jumlah penduduk Kota Yogyakarta tahun-tahun sebelumnya maka PDRB per kapita Kota Yogyakarta diperkirakan akan meningkat. Peningkatan PDRB per kapita ini akan mengikuti perkembangan ekonomi dan perkembangan penduduk Kota Yogyakarta.

Pada masa mendatang diperkirakan ekonomi akan bertumbuh lebih cepat daripada pertumbuhan penduduknya sehingga bagian pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk akan menjadi lebih besar dengan asumsi pertumbuhan ekonomi mencapai 5,19 persen dan laju inflasi 3,62 persen.

#### 2.1.3. Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

##### 2.1.3.1. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Penyusunan anggaran tahun 2019 ini secara umum disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan Daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah.

Prinsip dalam pengelolaan keuangan maka pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja adalah merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan.



Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

#### 2.1.3.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

##### 1. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:

- a. Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- b. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2019 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya. Untuk itu, pemerintah daerah harus melakukan upaya peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, mengingat tren peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah selama 5 tahun mulai dari Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 secara nasional meningkat rata-rata sebesar Rp12,38 triliun atau 7,67%, dengan uraian untuk pemerintah provinsi rata-rata meningkat sebesar Rp. 6,40 triliun atau 5,84% dan untuk pemerintah kabupaten/kota rata-rata meningkat sebesar Rp. 5,98 triliun atau 12,01%. Tren proporsi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total pendapatan asli daerah selama 5 tahun mulai dari Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 secara nasional rata-rata sebesar 76,37%, dengan uraian untuk pemerintah provinsi rata-rata sebesar 87,17% dan untuk pemerintah kabupaten/kota rata-rata sebesar 59,76%. Selanjutnya, tren proporsi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total pendapatan selama 5 tahun mulai dari Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 secara nasional rata-rata sebesar 17,87%, dengan uraian untuk pemerintah Provinsi rata-rata sebesar 41,78% dan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota rata-rata sebesar 7,76%.
- c. Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan



PEMERINTAH KOTAYOGYAKARTA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

---

- kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya.
- d. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
  - e. Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.
  - f. Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.
  - g. Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
  - h. Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang sebagaimana maksud Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  - i. Pemerintah daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, dan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor sebagaimana maksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.



PEMERINTAH KOTAYOGYAKARTA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

2. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan potensi penerimaan Tahun Anggaran 2019 dengan memperhitungkan rasionalitas nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah. Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:
  - a. Bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi pemupukan laba (profit oriented) adalah mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PAD; dan
  - b. Bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (public service oriented) adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah :

- a. Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Hasil Pengelolaan DanaBergulir, rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dariKelompok Masyarakat Penerima.
- b. Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenisLain-lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya.
- c. Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.
- d. Pendapatan dari pengembalian dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.

2.1.3.1.2. Dana Perimbangan

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) :



PEMERINTAH KOTAYOGYAKARTA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

---

- a. Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBHPajak Tahun Anggaran 2019. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2019 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBHPajak didasarkan pada tren realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2015.
- b. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2019 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.
- c. Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2019. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2019 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada tren realisasi pendapatan DBHCHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2015. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2019 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD



Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

- d. Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Pengusahaan Panas Bumi dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2019. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2019 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-SDA didasarkan pada tren realisasi pendapatan DBH-SDA 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2015, dengan mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga dan hasil produksi (lifting) minyak bumi dan gas bumi Tahun Anggaran 2019. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 mengenai Alokasi DBH-SDA diluar Dana Reboisasi yang merupakan bagian dari DBH Kehutanan atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA di luar Dana Reboisasi yang merupakan bagian dari DBH Kehutanan ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019. Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA diluar Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2019 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2018, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.
- e. Pendapatan DBh-Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran



2018. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

### 3. Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK dianggarkan sesuai Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2019 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau sebelum adanya informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2019 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, penganggaran DAK langsung ditampung dalam mekanisme pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2019 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2019.

#### 2.1.3.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal - hal sebagai berikut :

1. Dana Otonomi Khusus dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2019. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2019 belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Otonomi Khusus tersebut didasarkan pada alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2018 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2017. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri



Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2019 tersebut ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan Dana Otonomi Khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

2. Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2019. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2019 belum ditetapkan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2018 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2017. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBHMinyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2019 tersebut ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.
3. Pendapatan Hibah Dana BOS yang diterima langsung oleh Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2019, mekanisme pencatatan dan pengesahan dana BOS dimaksud dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Akun Pendapatan, Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Jenis Hibah, Obyek Hibah Dana BOS, Rincian Obyek Hibah Dana BOS masing-masing Satuan Pendidikan Negeri sesuai dengan kode rekening berkenaan. Selanjutnya, terhadap sisa dana BOS Tahun Anggaran 2018 termasuk sisa dana BOS pada satuan pendidikan negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota akibat lebih salur yang telah ditransfer oleh pemerintah provinsi, diperhitungkan pada APBD Provinsi Tahun Anggaran 2019. Terhadap sisa Dana BOS Tahun Anggaran 2018 termasuk sisa Dana BOS





PEMERINTAH KOTAYOGYAKARTA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

---

- pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi akibat belum disalurkan pada Tahun Anggaran 2018 ke rekening satuan Pendidikan Dasar Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota, agar diperhitungkan pada APBD provinsi Tahun Anggaran 2019.
4. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2019. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2019 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2019, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2017, sedangkan bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2018, ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.
  5. Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.
  6. Pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud. Untuk kepastian pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah daerah lainnya tersebut didasarkan pada



perjanjian hibah antara Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku pemberi dengan Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima, sedangkan untuk penerimaan hibah yang bersumber dari pihak ketiga juga didasarkan pada perjanjian hibah antara pihak ketiga selaku pemberi dengan Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima. Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan masing-masing nama pemberi hibah sesuai kode rekening berkenaan.

7. Pendapatan sumbangan yang bersumber dari pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud. Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan masing-masing nama pemberi sumbangan sesuai kode rekening berkenaan.
8. Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Dana Darurat. Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 296 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2019. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2019 ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan dana darurat dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

#### 2.1.3.1.4. Upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target

Kebijakan umum pendapatan daerah dalam APBD Tahun 2019 adalah sebagai berikut :



1. Menyempurnakan dan memberlakukan peraturan daerah yang mengatur tentang pendapatan disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang ada.
2. Kerjasama optimalisasi pendapatan daerah dengan pihak III.
3. Mengoptimalkan sumberdaya manusia dan prasarana dalam proses pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah agar sesuai dengan potensi yang dimiliki.
4. Pemberian penghargaan terhadap pengelola pajak daerah dan retribusi daerah yang berprestasi dalam mencapai target yang telah ditetapkan dan sanksi apabila terjadi pelanggaran.
5. Pemberian penghargaan terhadap wajib pajak daerah dan retribusi daerah yang patuh terhadap peraturan dan sanksi terhadap wajib pajak/wajib retribusi yang melanggar.
6. Peningkatan upaya-upaya untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dari Dana Perimbangan.
7. Pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi bekerjasama dengan masyarakat dan pelaku usaha.
8. Mengoptimalkan upaya-upaya untuk memperoleh bagian pendapatan yang lebih besar dari pemerintah pusat dengan memperkuat jaringan yang sudah ada dan memperluas jaringan serta peningkatan koordinasi dan informasi.
9. Mengupayakan sumber-sumber pendapatan lainnya dengan proses yang jelas
10. Menegakkan peraturan dengantegas dan adil berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
11. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi.

Selain kebijakan umum pendapatan seperti tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Yogyakarta juga mengupayakan sumber pendanaan lainnya untuk melakukan percepatan pencapaian tujuan pembangunan. Percepatan tersebut dengan melakukan upaya-upaya pemasaran program kepada pihak-pihak lain seperti Lembaga-lembaga donor/funding, BUMN lewat Corporate Social Responsibility (CSR), dan mengikuti program-program khusus yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah DIY.

#### 2.1.3.2. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2019 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energi dan sumber daya mineral, (f) perdagangan, (g) perindustrian, dan (h) transmigrasi.

#### 2.1.3.2.1. Belanja Tidak Langsung

Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

##### 1. Belanja Pegawai

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan



PEMERINTAH KOTAYOGYAKARTA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

- perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas.
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai Tahun 2019.
  - c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
  - d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2019 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD.
  - e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi
  - f. PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - g. Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.



- h. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- i. Tunjangan profesi guru PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2018 melalui DAK dianggarkan dalam APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota pada kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja pegawai, obyek belanja gaji dan tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.

## 2. Belanja Bunga

Bagi daerah yang belum memenuhi kewajiban pembayaran bunga pinjaman, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang supaya dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2019.

## 3. Belanja Subsidi

Pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (Public Service Obligation). Belanja Subsidi tersebut hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Perusahaan/lembaga tertentu yang diberi subsidi tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019, perusahaan/lembaga penerima subsidi harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Pemerintah daerah dapat memberikan belanja subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD Penyelenggara Penyediaan Air Minum. Dalam hal Kepala Daerah memutuskan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery) dan setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas, pemerintah daerah harus menyediakan



subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016.

#### 4. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan kepala daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

#### 5. Belanja Bagi Hasil Pajak

- a. Penganggaran dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Besaran alokasi dana bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi dianggarkan secara bruto, sebagaimana maksud Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Tata cara penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2019, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2018 yang belum direalisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.
- b. Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah provinsi dilarang untuk dianggarkan dalam APBD Tahun 2019 sebagaimana maksud Pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.
- c. Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014



tentang Desa, pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota. Tata cara penganggaran dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada Tahun Anggaran 2019, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2018 yang belum direalisasikan kepada pemerintah desa ditampung dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

- d. Dari aspek teknis penganggaran, Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dalam APBD harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan.

## 6. Belanja Bantuan Keuangan

- a. Belanja bantuan keuangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2019. Belanja bantuan keuangan tersebut, harus didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, serta dalam rangka kerjasama antar daerah sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah. Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan. Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberibantuan keuangan harus diuraikan daftar nama pemerintah daerah selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.





PEMERINTAH KOTAYOGYAKARTA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

- b. Bantuan keuangan kepada partai politik harus dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tatacara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- c. Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan alokasi dana untuk desa dan desa adat yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2018 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2017 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintah daerah/desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan. Dalam rangka optimalisasi dan efektifitas penyaluran dana dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa, pemerintah daerah selaku pemegang saham/modal pengendali dapat menyalurkan melalui BUMD Lembaga Keuangan Perbankan. Selanjutnya, dalam APBD pemerintah provinsi/kabupaten/kota pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama



pemerintah desaselaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekeningberkenaan.

- d. Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan peraturan perundangundangan lainnya.

## 7. Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2018 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2019, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

### 2.1.3.2.2. Belanja Langsung

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik serta mendorong inovasi daerah. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan SPM dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.
2. Belanja Pegawai
  - a. Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan,



PEMERINTAH KOTAYOGYAKARTA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

---

kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNSD sesuai ketentuan tersebut pada a.1).f) dan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan tersebut pada a.1).g).

- b. Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya kedalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium PNSD dan Non PNSD. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

### 3. Belanja Barang dan Jasa

- a. Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam kegiatan yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Kepala daerah.
- b. Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, yaitu pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain yang dibayarkan oleh APBD, dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016.
- c. Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.
- d. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2019.
- e. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah hanya berupa pelayanan medical check up sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dalam rangka pemeliharaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.



PEMERINTAH KOTAYOGYAKARTA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

- 
- f. Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage, pemerintah daerah melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional. Penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, terutama bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan yang bersumber dari APBN, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
- g. Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah dialokasikan pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan besarnya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah.
- h. Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
- i. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman



PEMERINTAH KOTAYOGYAKARTA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

---

Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- j. Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum;
- k. Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
- l. Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia bagi :
  - 1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
  - 2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
  - 3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;

Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

- 4) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
- m. Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur.
- n. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor



27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

#### 4. Belanja Modal

- a. Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2019 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar publik serta pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah harus melakukan upaya peningkatan alokasi belanja modal, mengingat alokasi belanja modal secara nasional pada Tahun Anggaran 2018 Rp. 217,48 triliun atau 19,26% dari total belanja daerah, dengan uraian untuk pemerintah provinsi Rp. 59,40 triliun atau 16,99% dari total belanja daerah dan untuk pemerintah kabupaten/kota Rp. 158,08 triliun atau 20,28% dari total belanja daerah.
- b. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKAPerangkat Daerah. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Gubernur/Bupati/Walikota berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.
- c. Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.Selanjutnya, untuk efisiensi penggunaan anggaran, pembangunan gedung kantor baru milik pemerintah daerah tidak diperkenankan sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 hal Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara/Lembaga, kecuali penggunaan anggaran tersebut terkait langsung dengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.
- d. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan



PEMERINTAH KOTAYOGYAKARTA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

---

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

- e. Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*). Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan, sesuai maksud Pasal 27 ayat (7) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akreal.
- f. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*), dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

#### 5. Surplus/Defisit APBD

Surplus atau defisit APBD adalah selisih antara anggaranpendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah.



- a. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal (investasi) daerah, pembentukan dana cadangan, dan/atau pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.
- b. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, pemerintah daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Dalam hal pemerintah daerah melakukan pinjaman daerah, maka Pemerintah Daerah wajib mempedomani penetapan batas maksimal jumlah kumulatif pinjaman daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

#### 2.1.3.3. Pembiayaan Daerah

##### 2.1.3.3.1. Penerimaan Pembiayaan

1. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2018 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2019 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan. Selanjutnya SILPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SILPA Tahun Anggaran 2018.
2. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.
3. Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima. Dalam kaitan itu, dana bergulir yang belum dapat diterima akibat tidak dapat tertagih atau yang diragukan tertagih, pemerintah daerah harus segera melakukan penagihan dana bergulir dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang pinjaman daerah.





5. Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dan persetujuan dari Menteri Keuangan sesuai maksud Pasal 300 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
6. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari Menteri Keuangan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara Menteri Keuangan dan Kepala Daerah sesuai maksud Pasal 301 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

#### 2.1.3.3.2. Pengeluaran Pembiayaan

1. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir sesuai Pasal 118 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima. Dalam penyaluran dana bergulir, pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.
2. Pemerintah Daerah harus menyusun analisis investasi pemerintah daerah sebelum melakukan investasi. Analisis investasi tersebut dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah. Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal. Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.
3. Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud



- guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR).
4. Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, dapat melakukan penyertaan modal kepada BUMD Perseroda guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% (lima puluh satu persen) atau lebih, sebagaimana dimaksud Pasal 339 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
  5. Dalam Rangka mendukung kebijakan pemerintah untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sesuai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR, pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal kepada BUMD Lembaga Keuangan Perbankan milik pemerintah daerah.
  6. Dalam rangka mendukung pencapaian target Sustainable Development Goal's (SDG's) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh per seratus) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh per seratus), pemerintah daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal pemerintah daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan bagian laba bersih PDAM. Penyertaan Modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna meningkatkan kualitas, kuantitas dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai SDG's dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Penyertaan modal pada PDAM berupa laba ditahan dapat langsung digunakan sebagai penambahan penyertaan modal pada PDAM dan besaran penyertaan modal tersebut agar disesuaikan dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM. Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud.
  7. Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Dana cadangan bersumber dari penyesuaian atas penerimaan Daerah kecuali dari DAK, pinjaman Daerah, dan penerimaan lain-lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu. Penggunaan dana cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam rekening kas umum Daerah.



Dalam hal dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah sebagaimana maksud Pasal 303 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

8. Pembayaran pokok utang hanya digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi beban pemerintah daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud.
9. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

#### 2.1.4. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

1. Pemerintah daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2019 bersaldo nihil.
2. Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan peraturan daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
3. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

#### 2.2. Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019

Dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperlukan Kebijakan Umum Perubahan APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019. Sehingga dibuatlah Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor :

16/NKB.YK/VII/2019

1/NKB/DPRD/VII/2019



---

Pada tanggal 5 Juli 2019 tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menyangkut 3 (tiga) kebijakan pokok yaitu kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan. Pada dasarnya kebijakan perubahan diambil berdasarkan perubahan perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, sedangkan alokasi anggaran pada belanja yang bersifat wajib, mengikat, prioritas dan strategis dapat dilakukan. Kemudian untuk pembiayaan diusahakan pada angka optimis yang dapat diraih untuk menutup defisit.

Asumsi dasar yang pada perkembangannya mengalami perubahan, meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA 2019

a. Asumsi Pendapatan Daerah

Perubahan asumsi pendapatan daerah yang mengalami kenaikan disebabkan adanya perubahan pendapatan pada Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada APBD TA 2019, Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar Rp. 1.725.609.408.040,- dan setelah perubahan menjadi Rp. 1.749.488.552.287,00.

b. Asumsi Belanja Daerah

Perubahan belanja daerah dilakukan untuk mendorong tercapainya standar pelayanan minimum sesuai target yang telah ditetapkan. Selain itu masih terdapat beberapa program dan kegiatan yang perlu dioptimalkan baik target maupun sasarannya di tahun 2019 dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan mengakomodasi kebutuhankebutuhan masyarakat yang perlu segera dipenuhi serta adanya kebijakankebijakan yang berdampak pada perubahan belanja daerah. Pada APBD 2019 Belanja Daerah ditetapkan sebesar Rp. 1.856.017.020.335,- dan setelah perubahan menjadi Rp. 1.938.660.877.046,52,-

2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja Mengakomodir hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah dan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



PEMERINTAH KOTAYOGYAKARTA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

maka perlu segera ditindaklanjuti dengan adanya pergeseran belanja antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antara jenis belanja.

- Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, terdapat sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) APBD TA 2019 sebelum perubahan sebesar Rp. 155.407.612.295,- kemudian setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 226.442.324.759,52,-. SiLPA tersebut akan digunakan untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta dan perangkat daerah, pemenuhan target kinerja program dan kegiatan serta untuk pemenuhan penyertaan modal pada Bank BPD.

Secara ringkas perbandingan APBD 2019, KUPA 2019 dan APBDP 2019 sebagaimana terlihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2.

Perubahan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2019

	APBD 2019	KUPA 2019	APBD-P 2019
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.725.609.408.040,00</b>	<b>1.749.488.552.287,00</b>	<b>1.744.227.169.387,00</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>636.084.388.145,00</b>	<b>658.273.322.530,00</b>	<b>653.011.939.630,00</b>
Pajak Daerah	420.731.500.000,00	425.381.500.000,00	425.381.500.000,00
Retribusi Daerah	33.621.960.412,00	33.548.235.712,00	33.451.735.712,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	28.588.899.994,00	28.935.929.644,00	28.935.929.644,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	153.142.027.739,00	170.407.657.174,00	165.242.774.274,00
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>907.202.077.000,00</b>	<b>908.741.191.482,00</b>	<b>908.741.191.482,00</b>
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	44.674.643.000,00	46.213.757.482,00	46.213.757.482,00
Dana Alokasi Umum	691.457.574.000,00	691.457.574.000,00	691.457.574.000,00
Dana Alokasi Khusus	171.069.860.000,00	171.069.860.000,00	171.069.860.000,00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>182.322.942.895,00</b>	<b>182.474.038.275,00</b>	<b>182.474.038.275,00</b>
Hibah	28.299.400.000,00	27.256.600.000,00	27.256.600.000,00
Dana Darurat			
Dana Bagi Hasil Pajak dari Prov. & Pemda Lainnya	117.026.683.895,00	118.220.579.275,00	118.220.579.275,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	35.760.859.000,00	35.760.859.000,00	35.760.859.000,00
Bantuan Keuangan dari Prov / Pemda Lainnya	1.236.000.000,00	1.236.000.000,00	1.236.000.000,00
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.856.017.020.335,00</b>	<b>1.938.660.877.046,52</b>	<b>1.933.398.837.146,52</b>
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>771.296.856.511,00</b>	<b>765.254.473.046,52</b>	<b>775.963.952.168,52</b>
Belanja Pegawai	661.041.083.965,00	661.568.989.353,00	667.465.772.253,00
Belanja Bunga			
Belanja Subsidi			



PEMERINTAH KOTAYOGYAKARTA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Belanja Hibah	89.293.099.138,00	85.740.983.138,00	85.740.983.138,00
Belanja Bantuan Sosial	15.498.800.000,00	12.526.580.000,00	12.526.580.000,00
Belanja Bagi Hasil kpd Prov/Kab/Kota & Pemdes			
Belanja Bantuan Keu kpd Prov/Kab/Kota & Pemdes, Parpol	1.963.873.408,00	1.963.873.408,00	2.002.804.587,00
Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000,00	3.454.047.147,52	8.227.812.190,52
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1.084.720.163.824,00</b>	<b>1.173.406.404.000,00</b>	<b>1.157.434.884.978,00</b>
Belanja Pegawai	151.997.577.805,00		163.392.184.600,00
Belanja Barang dan Jasa	624.674.618.029,00		609.777.009.981,00
Belanja Modal	308.047.967.990,00		384.265.690.397,00
<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>(130.407.612.295,00)</b>	<b>(189.172.324.759,52)</b>	<b>(189.171.667.759,52)</b>
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>			
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>155.407.612.295,00</b>	<b>226.442.324.759,52</b>	<b>226.446.667.759,52</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	155.407.612.295,00	226.442.324.759,52	226.442.324.759,52
Pencairan Dana Cadangan			
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan			
Penerimaan Pinjaman Daerah			
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			4.343.000,00
Penerimaan Piutang Daerah			
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>25.000.000.000,00</b>	<b>37.270.000.000,00</b>	<b>37.275.000.000,00</b>
Pembentukan Dana Cadangan			
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	25.000.000.000,00	37.270.000.000,00	37.275.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang			
Pemberian Pinjaman Daerah			
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>130.407.612.295,00</b>	<b>189.172.324.759,52</b>	<b>189.171.667.759,52</b>
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)</b>			

Terjadinya perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 baik anggaran yang tercantum dalam APBD murni, KUPA maupun APBD Perubahan sebagai akibat adanya dinamika pembahasan baik di Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) maupun akibat adanya evaluasi Gubernur DIY terhadap Raperda APBD.



PEMERINTAH KOTAYOGYAKARTA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

### 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Realisasi keuangan daerah sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Kota Yogyakarta secara ringkas sebagaimana tersaji dalam Laporan Realisasi Anggaran sebagai berikut :

**a. Format Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.**

**Tabel 2.3.**  
**Ringkasan APBD Kota Yogyakarta T.A 2019**

Rek.	Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>1.754.768.489.387,00</b>	<b>1.765.760.418.492,27</b>	<b>100,63</b>
<b>1.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>653.011.939.630,00</b>	<b>689.049.725.509,27</b>	<b>105,52</b>
1.1.1.	Hasil Pajak Daerah	425.381.500.000,00	451.265.948.031,00	106,08
1.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	33.451.735.712,00	32.428.343.731,00	96,94
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	28.935.929.644,00	28.975.003.950,01	100,14
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	165.242.774.274,00	176.380.429.797,26	106,74
<b>1.2.</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>916.460.511.482,00</b>	<b>875.308.177.702,00</b>	<b>95,51</b>
1.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	46.213.757.482,00	28.975.322.400,00	62,70
1.2.2.	Dana Alokasi Umum (DAU)	699.176.894.000,00	700.372.564.000,00	100,17
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	171.069.860.000,00	145.960.291.302,00	85,32
<b>1.3.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH</b>	<b>185.296.038.275,00</b>	<b>201.402.515.281,00</b>	<b>108,69</b>
1.3.1.	Pendapatan Hibah	30.078.600.000,00	31.011.780.000,00	103,10
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	118.220.579.275,00	133.393.876.281,00	112,83
1.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	35.760.859.000,00	35.760.859.000,00	100,00
1.3.5.	Bantuan keuangan dari Prov atau pemda lainnya	1.236.000.000,00	1.236.000.000,00	100,00
<b>2.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.943.940.157.146,52</b>	<b>1.734.593.335.861,34</b>	<b>89,23</b>
<b>2.1.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>775.963.952.168,52</b>	<b>717.969.657.199,00</b>	<b>92,40</b>
2.1.1.	Belanja Pegawai	667.465.772.253,00	623.730.246.194,00	93,45
2.1.4.	Belanja Hibah	85.740.983.138,00	79.389.047.945,00	92,59
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	12.526.580.000,00	11.551.423.000,00	92,22
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kpd Prov/Kab/Kota, Pemdes & Parpol	2.002.804.587,00	1.981.246.996,00	98,92
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	8.227.812.190,52	317.693.064,00	3,86



PEMERINTAH KOTAYOGYAKARTA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

<b>2.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1.167.976.204.978,00</b>	<b>1.017.623.678.662,34</b>	<b>87,13</b>
2.2.1.	Belanja Pegawai	163.392.184.600,00	136.801.816.234,28	83,73
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	617.496.329.981,00	553.360.933.346,89	89,61
2.2.3.	Belanja Modal	387.087.690.397,00	327.460.929.081,17	84,60
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(189.171.667.759,52)</b>	<b>31.167.082.630,93</b>	<b>(16,48)</b>
<b>3.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>			
<b>3.1.</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>226.446.667.759,52</b>	<b>226.448.050.491,52</b>	<b>100,00</b>
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	226.442.324.759,52	226.442.324.759,52	100,00
3.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
3.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	4.343.000,00	5.725.732,00	131,84
<b>3.2.</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>37.275.000.000,00</b>	<b>37.275.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
3.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	37.275.000.000,00	37.275.000.000,00	100,00
3.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>189.171.667.759,52</b>	<b>189.173.050.491,52</b>	<b>100,00</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>-</b>	<b>220.340.133.122,45</b>	<b>-</b>

**b. Format Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)**

**Tabel 2.4.**  
**Ringkasan APBD Kota Yogyakarta T.A 2019**

Uraian	Reff	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
<b>PENDAPATAN</b>	<b>5.1.1</b>	<b>1.754.768.489.387,00</b>	<b>1.765.760.418.492,27</b>	<b>100,63</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>5.1.1.1</b>	<b>653.011.939.630,00</b>	<b>689.049.725.509,27</b>	<b>105,52</b>
Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.a	425.381.500.000,00	451.265.948.031,00	106,08
Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.b	33.451.735.712,00	32.428.343.731,00	96,94
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.c	28.935.929.644,00	28.975.003.950,01	100,14
Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.d	165.242.774.274,00	176.380.429.797,26	106,74
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>5.1.1.2</b>	<b>1.101.556.549.757,00</b>	<b>1.075.256.692.983,00</b>	<b>97,61</b>
<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</b>	<b>5.1.1.2.a</b>	<b>916.460.511.482,00</b>	<b>875.308.177.702,00</b>	<b>95,51</b>
Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.a.1)	43.688.080.000,00	27.070.845.600,00	61,96
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	5.1.1.2.a.2)	2.525.677.482,00	1.904.476.800,00	75,40
Dana Alokasi Umum (DAU)	5.1.1.2.a.3)	699.176.894.000,00	700.372.564.000,00	100,17
Dana Alokasi Khusus (DAK)	5.1.1.2.a.4)	171.069.860.000,00	145.960.291.302,00	85,32





PEMERINTAH KOTAYOGYAKARTA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya</b>	<b>5.1.1.2.b</b>	<b>65.639.459.000,00</b>	<b>65.318.639.000,00</b>	<b>99,51</b>
Dana Penyesuaian	5.1.1.2.b.2)	65.639.459.000,00	65.318.639.000,00	99,51
Pendapatan Hibah	5.1.1.2.b.3)	-	-	
Pendapatan Transfer Pemda Lainnya	5.1.1.2.c	119.456.579.275,00	134.629.876.281,00	112,70
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.c.1)	118.220.579.275,00	133.393.876.281,00	112,83
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	5.1.1.2.c.2)	1.236.000.000,00	1.236.000.000,00	100,00
<b>LAIN-LAIN PAD YANG SAH</b>	<b>5.1.1.3</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>1.454.000.000,00</b>	<b>727,00</b>
Pendapatan Hibah	5.1.1.3.a	200.000.000,00	1.454.000.000,00	727,00
<b>BELANJA</b>	<b>5.1.2</b>	<b>1.941.937.352.559,52</b>	<b>1.734.593.335.861,34</b>	<b>89,23</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>5.1.2.1</b>	<b>1.546.621.849.972,00</b>	<b>1.404.860.023.602,17</b>	<b>90,83</b>
Belanja Pegawai	5.1.2.1.a	830.857.956.853,00	760.532.062.428,28	91,54
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.b	617.496.329.981,00	553.387.490.228,89	89,62
Belanja Hibah	5.1.2.1.e	85.740.983.138,00	79.389.047.945,00	92,59
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.f	12.526.580.000,00	11.551.423.000,00	92,22
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>5.1.2.2</b>	<b>387.087.690.397,00</b>	<b>327.434.372.199,17</b>	<b>84,59</b>
Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.a	52.092.672.025,00	25.569.058.040,00	49,08
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.b	102.840.905.712,00	96.719.552.169,17	94,05
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.c	61.732.855.774,00	54.312.514.794,87	87,98
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.1.2.2.d	115.413.512.507,00	101.225.143.404,83	87,71
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.e	848.419.134,00	828.300.673,00	97,63
Belanja Modal Lainnya	5.1.2.2.f	54.159.325.245,00	48.779.803.117,30	90,07
<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>5.1.2.3</b>	<b>8.227.812.190,52</b>	<b>317.693.064,00</b>	<b>3,86</b>
Belanja Tak Terduga		8.227.812.190,52	317.693.064,00	3,86
<b>TRANSFER</b>	<b>5.1.2.4</b>	<b>2.002.804.587,00</b>	<b>1.981.246.996,00</b>	<b>98,92</b>
<b>Transfer Bantuan Keuangan</b>	<b>5.1.2.4.2</b>	<b>2.002.804.587,00</b>	<b>1.981.246.996,00</b>	<b>98,92</b>
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	5.1.2.4.2.a	1.228.210.990,00	1.228.210.990,00	100,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	5.1.2.4.2.c	774.593.597,00	753.036.006,00	97,22
<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER</b>		<b>1.943.940.157.146,52</b>	<b>1.734.593.335.861,34</b>	<b>89,23</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>5.1.2.5</b>	<b>(189.171.667.759,52)</b>	<b>31.167.082.630,93</b>	<b>-16,48</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>5.1.3</b>			
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>5.1.3.1</b>	<b>226.446.667.759,52</b>	<b>226.448.050.491,52</b>	<b>100,00</b>
Penggunaan SiLPA	5.1.3.1.a	226.442.324.759,52	226.442.324.759,52	100,00
Pencairan Dana Cadangan	5.1.3.1.c	-	-	
Penerimaan Kembali Piutang		4.343.000,00	5.725.732,00	131,84



PEMERINTAH KOTAYOGYAKARTA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>5.1.3.2</b>	<b>37.275.000.000,00</b>	<b>37.275.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	5.1.3.2.b	37.275.000.000,00	37.275.000.000,00	100,00
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>		<b>189.171.667.759,52</b>	<b>189.173.050.491,52</b>	<b>100,00</b>
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>5.1.3.3</b>	-	<b>220.340.133.122,45</b>	

Pada TA 2019 setelah penetapan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang Perubahan APBD TA 2019, Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan 2 (dua) kali perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2019 sebagai berikut:

1. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2019, tanggal 28 Oktober 2019 dengan dasar:
  - a. adanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
  - b. SE Mendagri Nomor 895/9009/SJ tentang Penyelenggaraan Orientasi/Pembekalan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Anggaran Pendapatan Hibah BOS naik sebesar Rp2.822.000.000,00 dan Anggaran Belanja Modal yang bersumber dari Dana BOS juga bertambah sebesar Rp Rp2.822.000.000,00.

2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, tanggal 18 November 2019 dengan dasar Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 166/PMK.07/2019 tentang Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pembayaran Selisih Perubahan Iuran Jaminan Kesehatan Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah.  
Anggaran Pendapatan Dana Perimbangan-Dana Alokasi Umum naik sebesar Rp7.719.320.000,00 yang dianggarkan untuk Belanja Barang dan Jasa-Belanja Premi Asuransi.

Oleh karena itu, Target Anggaran yang kami cantumkan pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Yogyakarta berbeda dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### 2.3.1. Pendapatan

Pemerintah Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2019 memiliki beberapa Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Yogyakarta yang mengatur dan menjadi landasan hukum pemungutan Pendapatan Daerah, yaitu:



PEMERINTAH KOTAYOGYAKARTA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

1. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1992 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kotamadya Dati II Yogyakarta pada Pihak Ketiga;
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana diubah dengan Perda Kota Yogyakarta Nomor 06 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana diubah dengan Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan;
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
7. Peraturan Daerah kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal kepada PD. Jogjatama Vishesha;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Perda Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
10. Perda Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2017 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
11. Perda Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
12. Perda Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Pasar
13. Perda Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
14. Perda Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
15. Perda Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
16. Perda Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2018 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Yogyakarta;
18. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja;
20. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja;



PEMERINTAH KOTAYOGYAKARTA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

21. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 119 Tahun 2005 Penetapan Besaran Harga Sewa Pemakaian Lahan Bagi Pedagang Makanan / Minuman Didalam Kios Buku Lantai Ii Komplek Taman Pintar Kota Yogyakarta;
22. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Yogyakarta pada PT. Swara Adhiloka;
23. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2006 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kota Yogyakarta untuk Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal dan Sosial;
24. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2009 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta;
25. Perwal No 47 tahun 2010 ttg Penetapan Besaran Sewa Tanah dan atau Bangunan Gedung Milik Pemerintah daerah untuk kegiatan Usaha;
26. Perwal No 73 Tahun 2011 tentang Penetapan Besaran Tarif Sewa Sarana dan Prasarana di Taman Pintar Yogyakarta;
27. Perwal No 89 Tahun 2011 tentang Sewa Pemanfaatan Ruang Milik Jalan Untuk Kegiatan Pemasangan Jaringan Telekomunikasi;
28. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2013 tentang Besaran Tarif Layanan Program di Taman Pintar Kota Yogyakarta;
29. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2011 tentang Sewa Sarana Prasarana di Taman Pintar;
30. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sewa Kios dan Branding di Taman Pintar Yogyakarta;
31. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2012 tentang Besaran Tarif Masuk Zona Planetarium di Taman Pintar Kota Yogyakarta;
32. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2012 tentang Penggunaan Laba pada Perusahaan Daerah Jogjatama Vishesa;
33. Perwal No. 19 Tahun 2013 Mekanisme dan tarif Pemanfaatan Area Komersial di Taman Pintar Yogyakarta;
34. Perwal Nomor 27 Tahun 2013 ttg Besaran Tarif Sewa Pasar Ikan Higienis
35. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Tarif per Tiket Zona Astronomi dan Wahana Bahari di Taman Pintar Kota Yogyakarta;
36. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan BLUD Unit Pelaksana Teknis Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
37. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Tarif Pemanfaatan Fasilitas di Pusat Perbelanjaan Beringharjo pada Dinas Pengelolaan Pasar;
38. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2014 tentang Tarip Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Graha Bina Harapan;
39. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2014 tentang Tarip Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Cokrodirjan;
40. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2015 Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;



PEMERINTAH KOTAYOGYAKARTA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

41. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan pada BLUD Unit Pelaksana Teknis RS Pratama Yogyakarta;
42. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan pada BLUD Unit Pelaksana Teknis Logam Kota Yogyakarta;
43. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2017 tentang Besaran Sewa Pemanfaatan Aset Milik Pemerintah Daerah Untuk Menara Telekomunikasi;
44. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2017 tentang Tarif Tiket per Zona di Taman Pintar Yogyakarta;
45. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2017 Tarif Pemanfaatan Fasilitas Di Pusat Perbelanjaan Beringharjo;
46. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 Tarif Layanan Pada Unit Pelaksana Teknis Logam Kota Yogyakarta;
47. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Aset Pemerintah Daerah Untuk Pembangunan Menara Telekomunikasi dan Pergelaran Jaringan Fiber Optik;
48. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah;
49. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2018 tentang Sistem Monitoring, Pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah secara Online;
50. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Program di Taman Pintar Kota Yogyakarta;
51. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda Bagi Wajib Pajak Atas Tunggakan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Yogyakarta
52. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Deposito; dan
53. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 87 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah.

#### **2.3.1.1. Pendapatan Asli Daerah**

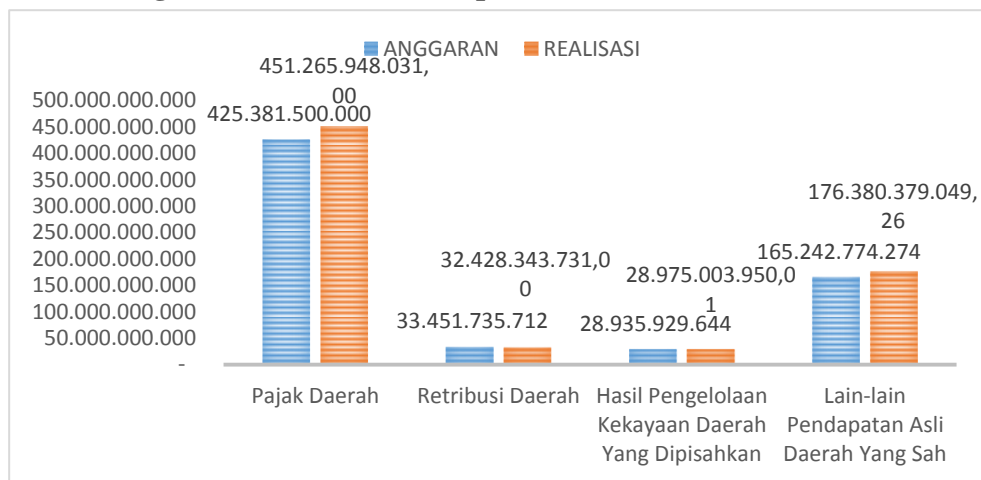
Target Pendapatan Asli Daerah tercapai pada realisasi Rp689.049.725.509,27 atau 105,52 %, meningkat 3,23 % atau Rp21.556.650.039,13 dibandingkan dengan realisasi PAD Tahun 2018 sebesar Rp.667.493.075.470,14. Dimana komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta dari Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah berhasil mencapai target di atas 100%.

Komponen PAD yang tidak mencapai 100% adalah Retribusi Daerah dengan realisasi Rp.32.428.343.731,00 atau 96,94 %.

Secara grafis target dan realisasi PAD Kota Yogyakarta Tahun 2019 sebagaimana tersaji pada gambar sebagai berikut :



**Gambar 2.1.**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019**



Pencapaian target komponen PAD Tahun 2019 yang melampaui 100 % adalah Pajak Daerah sebesar 106,08%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 100,14 % dan Lain-lain PAD yang Sah sebesar 106,74 %.

Dilihat dari komposisi PAD Kota Yogyakarta, maka kontribusi terbesar berasal dari Pajak Daerah dengan nominal Rp451.265.948.031,00 atau menyumbang PAD sebesar 65,49%. Secara lebih rinci kontribusi masing-masing komponen PAD Kota Yogyakarta Tahun 2019 sebagaimana tersaji pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.5.**  
**Komposisi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019**

No.	Jenis PAD	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pajak Daerah	451.265.948.031,00	65,49%
2	Retribusi Daerah	32.428.343.731,00	4,71%
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	28.975.003.950,01	4,21%
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	176.380.429.797,26	25,60%
	<b>Jumlah</b>	<b>689.049.725.509,27</b>	<b>100,00%</b>

Dilihat dari trend kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta, menunjukkan adanya kontribusi yang semakin meningkat, dimana pada tahun 2015 sebesar 35,60% maka 4 (empat) tahun berikutnya pada tahun 2019 sudah mencapai 39,02%.



PEMERINTAH KOTAYOGYAKARTA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Secara detail kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta selama 5 (lima) tahun tersaji pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.6.**  
**Trend Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015 s.d. 2019**

NO	TAHUN	PAD	PENDAPATAN DAERAH	KONTRIBUSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2015	510.548.822.809,51	1.434.009.588.218,85	35,60%
2	2016	540.504.305.181,63	1.577.679.933.045,20	34,26%
3	2017	657.049.376.703,22	1.659.277.141.816,66	39,60%
4	2018	667.493.075.470,14	1.736.919.997.852,52	38,43%
5	2019	689.049.725.509,27	1.765.760.418.492,27	39,02%

Sedangkan dilihat dari perkembangan PAD Kota Yogyakarta selama 5 (lima) tahun terakhir, terlihat bahwa PAD Kota Yogyakarta menunjukkan trend positif dengan rata-rata kenaikan setiap tahunnya sebesar 8,15%.

### 2.3.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer Kota Yogyakarta pada Tahun 2019 masih mendominasi pada Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta dengan kontribusi sebesar Rp.1.074.061.022.983,00 atau mencapai 60,87 %.

Secara lebih detail, komponen Pendapatan Transfer Kota Yogyakarta Tahun 2019 sebagaimana tersaji pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.7.**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2019**

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	916.460.511.482,00	875.308.177.702,00	95,51%
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	65.639.459.000,00	65.318.639.000,00	99,51%
3	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	119.456.579.275,00	134.629.876.281,00	112,70%
	JUMLAH	1.101.556.549.757,00	1.075.256.692.983,00	97,61%

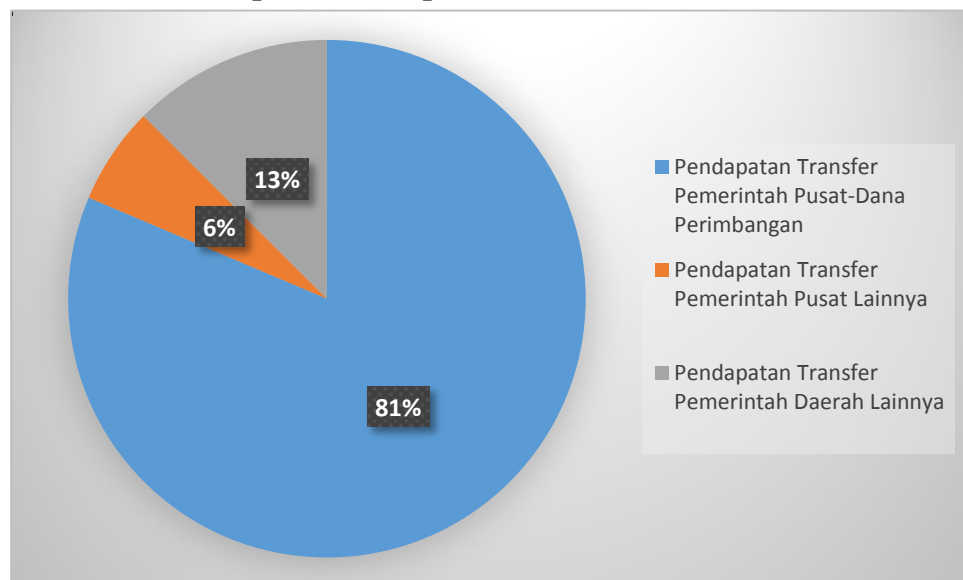
Dilihat dari realisasi pencapaian target, Pendapatan Transfer Kota Yogyakarta Tahun 2019 tercapai sebesar 97,61%, yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan tercapai sebesar 95,51%, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya tercapai sebesar 99,51% dan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya tercapai sebesar 112,70%.



Komposisi Pendapatan Transfer didominasi dari Dana Perimbangan dengan kontribusi sebesar 81%, sisanya diperoleh dari Transfer Pemerintah Daerah Lainnya sebesar 13% dan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya sebesar 6%. Secara grafis komposisi Pendapatan Transfer Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2019 sebagaimana tersaji pada gambar sebagai berikut :

**Gambar 2.2.**

**Komposisi Pendapatan Transfer Tahun 2019**



### 2.3.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Selain PAD dan Pendapatan Dana Transfer, Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 juga berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sebesar Rp.1.454.000.000,00 atau 727 % dari target yang ditetapkan.

Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tersebut hanya berasal dari Pendapatan Hibah. Secara lebih rinci komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Yogyakarta Tahun 2019 sebagaimana tersaji pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.8.**

**Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2019**

NO	URAIAN	Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pendapatan Hibah	200.000.000,00	1.454.000.000,00	727,00
2	Dana Darurat	-	-	
3	Pendapatan Lainnya	-	-	
	<b>JUMLAH</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>1.454.000.000,00</b>	<b>727,00</b>





PEMERINTAH KOTAYOGYAKARTA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

## 2.3.2. Belanja dan Transfer

### 2.3.2.1. Belanja

Realisasi penyerapan Belanja Daerah Tahun 2019 sebagaimana tersaji pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.9.**  
**Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2019**

Uraian	Reff	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
<b>BELANJA</b>	<b>5.1.2</b>	<b>1.943.940.157.146,52</b>	<b>1.734.593.335.861,34</b>	<b>89,23</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>5.1.2.1</b>	<b>1.546.621.849.972,00</b>	<b>1.404.860.023.602,17</b>	<b>90,83</b>
Belanja Pegawai	5.1.2.1.a	830.857.956.853,00	760.532.062.428,28	91,54
Belanja Barang	5.1.2.1.b	617.496.329.981,00	553.387.490.228,89	89,62
Belanja Hibah	5.1.2.1.e	85.740.983.138,00	79.389.047.945,00	92,59
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.f	12.526.580.000,00	11.551.423.000,00	92,22
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>5.1.2.2</b>	<b>387.087.690.397,00</b>	<b>327.434.372.199,17</b>	<b>84,59</b>
Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.a	52.092.672.025,00	25.569.058.040,00	49,08
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.b	102.840.905.712,00	96.719.552.169,17	94,05
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.c	61.732.855.774,00	54.312.514.794,87	87,98
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.1.2.2.d	115.413.512.507,00	101.225.143.404,83	87,71
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.e	848.419.134,00	828.300.673,00	97,63
Belanja Modal Lainnya	5.1.2.2.f	54.159.325.245,00	48.779.803.117,30	90,07
<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>5.1.2.3</b>	<b>8.227.812.190,52</b>	<b>317.693.064,00</b>	<b>3,86</b>
Belanja Tak Terduga		8.227.812.190,52	317.693.064,00	3,86



PEMERINTAH KOTAYOGYAKARTA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Anggaran Belanja Daerah tercapai pada realisasi 89,23%, yang terdiri dari komponen Belanja Operasi dengan realisasi 90,83%, Belanja Modal 84,59% dan Belanja Tak Terduga 3,86%.

Secara proporsi Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 sebagaimana tersaji pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.10.**  
**Komposisi Belanja Daerah Tahun 2019**

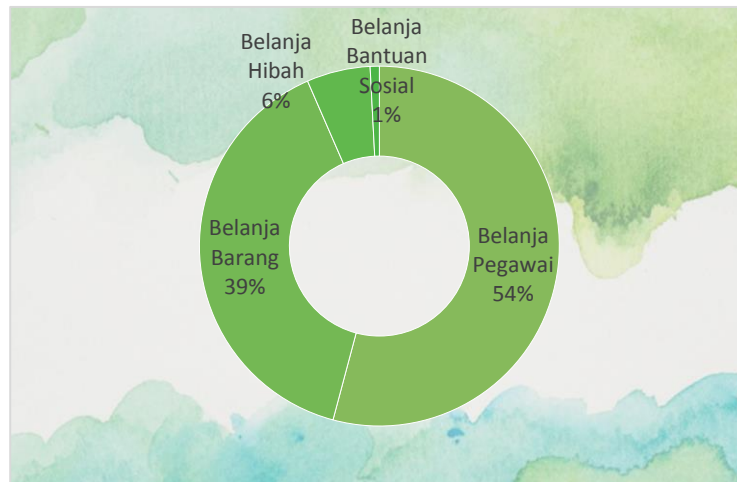
Uraian	Reff	Realisasi	Proporsi
1	2	3	4
<b>BELANJA</b>	<b>5.1.2</b>	<b>1.732.612.088.865,85</b>	
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>5.1.2.1</b>	<b>1.404.860.023.602,17</b>	<b>81,07%</b>
Belanja Pegawai	5.1.2.1.a	760.532.062.428,28	54,15%
Belanja Barang	5.1.2.1.b	553.387.490.228,89	39,31%
Belanja Hibah	5.1.2.1.e	79.389.047.945,00	5,71%
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.f	11.551.423.000,00	0,82%
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>5.1.2.2</b>	<b>327.434.372.199,17</b>	<b>18,91%</b>
Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.a	25.569.058.040,00	7,80%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.b	96.719.552.169,17	29,52%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.c	54.312.514.794,87	16,61%
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.1.2.2.d	101.225.143.404,83	30,92%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.e	828.300.673,00	0,25%
Belanja Modal Lainnya	5.1.2.2.f	48.779.803.117,30	14,89%
<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>5.1.2.3</b>	<b>317.693.064,00</b>	<b>0,02%</b>
Belanja Tak Terduga		317.693.064,00	100,00%



Proporsi terbesar Belanja Daerah berasal dari Belanja Operasi mencapai Rp1.404.860.023.602,17 atau 81,07 %, diikuti Belanja Modal dengan proporsi 18,91 %. Sedangkan proporsi terkecil berasal dari Belanja Tak Terduga yang hanya 0,02 % dari total Belanja Daerah.

Dilihat secara parsial, Belanja Operasi Tahun 2019 Kota Yogyakarta sebagaimana tersaji pada gambar sebagai berikut :

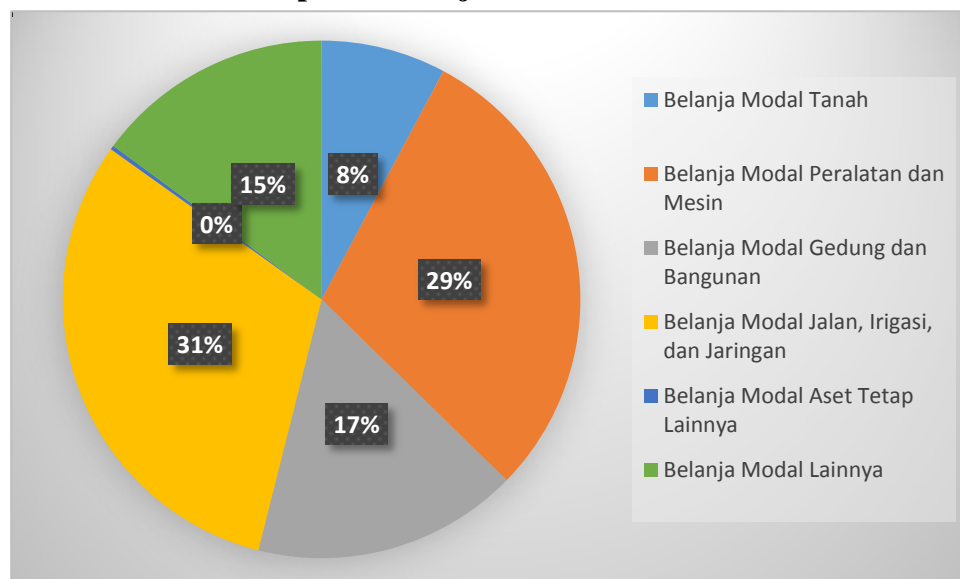
**Gambar 2.3.**  
**Komposisi Belanja Operasi Tahun 2019**



Belanja Operasi Tahun 2019 didominasi oleh Belanja Pegawai sebesar Rp760.532.062.428,28 dengan proporsi 54,15 %, berturut-turut diikuti Belanja Barang dengan proporsi 39,31%, Belanja Hibah dengan proporsi 5,71% dan Belanja Bantuan Sosial dengan proporsi 0,82%.

Sedangkan Belanja Modal Tahun 2019 Kota Yogyakarta, didominasi oleh Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan proporsi sebesar 30,92%. Secara lebih rinci, komposisi Belanja Modal dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

**Gambar 2.4.**  
**Komposisi Belanja Modal Tahun 2019**





Adapun proporsi Belanja Modal dengan ranking kedua adalah Belanja Peralatan dan Mesin sebesar 29,52%, berturut-turut diikuti Belanja Gedung dan Bangunan sebesar 16,61%, Belanja Modal Lainnya 14,89%, Belanja Modal Tanah 7,80%, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0,25%.

### 2.3.2.2. Transfer

Realisasi Transfer sebagai bagian dari Belanja Kota Yogyakarta Tahun 2019 mencapai Rp1.981.246.996,00 atau 98,92% dari target yang ditetapkan.

Secara lebih rinci, komponen Transfer Kota Yogyakarta Tahun 2019 sebagaimana tersaji pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.11.**  
**Target dan Realisasi Transfer Daerah Tahun 2019**

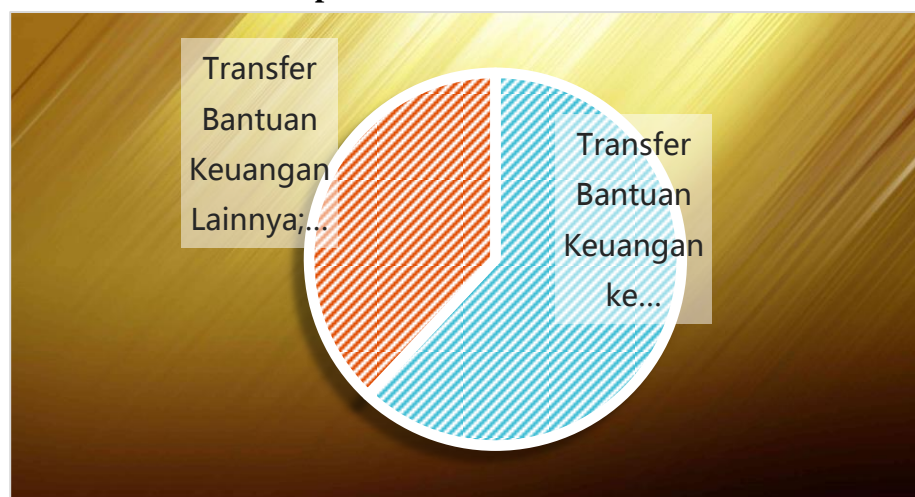
Uraian	Reff	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
<b>TRANSFER</b>	<b>5.1.2.4</b>	<b>2.002.804.587,00</b>	<b>1.981.246.996,00</b>	<b>98,92%</b>
Transfer Bantuan Keuangan	5.1.2.4.2	2.002.804.587,00	1.981.246.996,00	98,92%
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	5.1.2.4.2.a	1.228.210.990,00	1.228.210.990,00	100,00%
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	5.1.2.4.2.c	774.593.597,00	753.036.006,00	97,22%

Transfer Kota Yogyakarta Tahun 2019 hanya terdiri dari 2 (dua) komponen, yaitu Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp1.228.210.990 dan Transfer Bantuan Keuangan Lainnya sebesar Rp753.036.006,00.

Komposisi Transfer didominasi oleh Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya dengan proporsi 81,38%, yaitu bantuan kepada Pemerintah Provinsi DIY untuk IPAL, kepada Kabupaten Bulungan Provinsi Kaltara untuk transmigran dan kepada Partai Politik di Kota Yogyakarta.

Secara grafis komposisi Transfer Kota Yogyakarta Tahun 2019 sebagaimana terlihat pada gambar sebagai berikut :

**Gambar 2.5.**  
**Komposisi Transfer Tahun 2019**





### 2.3.3. Pembiayaan Daerah

#### 2.3.3.1. Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan Daerah sebagai seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Realisasi Penerimaan pada Pembiayaan Daerah Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.12.**

#### **Target dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2019**

No.	Penerimaan	Anggaran	Realisasi	%
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	226.442.324.759,52	226.442.324.759,52	100,00%
2	Pencairan Dana Cadangan			
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan			
4	Penerimaan Pinjaman Daerah			
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	4.343.000,00	5.725.732,00	131,84%
6	Penerimaan Piutang Daerah			
	Jumlah	226.446.667.759,52	226.448.050.491,52	100,00%

Target Penerimaan tercapai pada realisasi Rp226.448.050.491,52 atau 100%, dimana komponen Penerimaan Tahun 2019 hanya terdiri dari 2 (dua) komponen, yaitu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp226.442.324.759,52 dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sebesar Rp5.725.732,00.

#### 2.3.3.2. Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2019 secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.13.**

#### **Target dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2019**

No.	Pengeluaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pembentukan Dana Cadangan			
2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	37.275.000.000,00	37.275.000.000,00	100,00%
3	Pembayaran Pokok Utang			
4	Pemberian Pinjaman Daerah			
	Jumlah	37.275.000.000,00	37.275.000.000,00	100,00%

Target pengeluaran tercapai realisasi pada angka Rp37.275.000.000,00 atau 100 %, dimana pengeluaran pembiayaan tahun 2019 hanya satu komponen yaitu Penyertaan Modal (Investasi) Daerah pada PT. BPD DIY.



#### 2.3.4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Kota Yogyakarta sebesar Rp220.340.133.122,45. Perkembangan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) APBD Kota Yogyakarta cenderung mengalami penurunan, hal ini dapat dilihat pada tabel perkembangan SiLPA 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel 2.14.  
Perkembangan SiLPA APBD Kota Yogyakarta Tahun 2015 s.d. 2019

NO	TAHUN	SiLPA	PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	2015	205.342.170.311,46	
2	2016	117.651.486.141,87	-42,70%
3	2017	254.103.922.554,36	115,98%
4	2018	226.442.324.759,52	-10,89%
5	2019	220.340.133.122,45	-2,69%

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) APBD TA 2019 sebesar Rp220.340.133.122,45, turun Rp6.102.191.637,07 atau -2,69% dibandingkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) APBD TA 2018 . Hal ini mengindikasikan semakin baiknya kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyusun perencanaan maupun anggaran untuk tahun 2019.

#### 2.3.5. Target & Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019

Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, terdapat 267 (Dua ratus enam puluh tujuh) Program yang terdiri dari :

- a. 120 Program Eksternal; dan
- b. 147 Program Internal.

Jumlah kegiatan 671 kegiatan yang tersebar pada 51 OPD/Unit Kerja di Kota Yogyakarta.

Hasil kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta pada Tahun 2019 dalam melaksanakan program dan kegiatan di semua OPD/Unit Kerja Kota Yogyakarta dapat dilihat pada tabel Indikator Kerja Utama tahun 2019 sebagaimana tersaji pada tabel sebagai berikut :



PEMERINTAH KOTAYOGYAKARTA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Tabel 2.15.

Target dan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama Kota Yogyakarta Tahun 2019.

No	Indikator (dan satuannya)	Target	Realisasi	Realisasi dibanding Target (%)	Keterangan (Penjelasan atas capaian atau ketidaktercapaian)
1	Angka kemiskinan	6,24	6,84	90,38	Data Rilis BPS Desember 2019
2	Indeks keberdayaan masyarakat	56,53	63,86	112,97	Hasil Olahan DPMPPA 2019
3	Pola Pangan Harapan	85,4	87,5	102,46	Hasil Olahan Dinas Pertanian Pangan 2019
4	Indeks Ketimpangan Pendapatan	0,4	0,42	95	Buku Gini Rasio, BPS Kota Yogyakarta 2019
5	Angka pertumbuhan ekonomi	5,19%	5,49%	105,78	Buku Kota Yogyakarta Dalam Angka 2019
6	Angka Kriminalitas	1.596	1.037	135,03	Buku Kota Yogyakarta Dalam Angka 2019
7	Jumlah pelanggaran Perda	5.600	4.299	123,23	Hasil Olahan Satpol PP 2019
8	Angka Rata-rata lama sekolah	11,43 tahun	11,44 tahun	100,09	Buku Kota Yogyakarta Dalam Angka 2019
9	Angka harapan lama sekolah	17,01 tahun	17,05 tahun	100,24	Buku Kota Yogyakarta Dalam Angka 2019
10	Angka harapan hidup	74,34 tahun	74,45 tahun	100,15	Buku Kota Yogyakarta Dalam Angka 2019
11	Persentase rintisan kelurahan budaya yang aktif	56%	60%	107,14	Hasil Olahan Dinas Kebudayaan 2019
12	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	73,40%	78,45%	106,88	Hasil Olahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 2019
13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	51,04%	53,67	105,15	Hasil Olahan Dinas Lingkungan Hidup 2019
14	Indeks Infrastruktur Wilayah	41,29%	42,59	103,15	Hasil Olahan Bappeda 2019
15	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	BB	BB	100	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kemen PAN/RB Tahun 2019
16	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	100	Hasil Audit BPK Tahun 2019



### BAB III

#### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan perkembangannya dibanding Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.1 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2019**

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PENDAPATAN	1.754.768.489.387,00	1.765.760.418.492,27	100,63
BELANJA	1.943.940.157.146,52	1.734.593.335.861,34	89,23
Surplus (defisit)	(189.171.667.759,52)	31.167.082.630,93	(16,48)
PEMBIAYAAN			
1.Penerimaan Pembiayaan	226.446.667.759,52	226.448.050.491,52	100,00
2.Pengeluaran Pembiayaan	37.275.000.000,00	37.275.000.000,00	100,00
Pembiayaan Netto	189.171.667.759,52	189.173.050.491,52	100,00

**Tabel 3.2 Perkembangan Realisasi APBD  
Tahun Anggaran 2018 dan 2019**

Uraian	2018	2019	%
PENDAPATAN	1.736.919.997.852,52	1.765.760.418.492,27	1,66
BELANJA	1.652.727.843.523,91	1.734.593.335.861,34	4,95
Surplus (defisit)	84.192.154.328,61	31.167.082.630,93	(62,98)
PEMBIAYAAN			
1.Penerimaan Pembiayaan	262.150.761.112,36	226.448.050.491,52	(13,62)
2.Pengeluaran Pembiayaan	119.900.590.681,45	37.275.000.000,00	(68,91)
Pembiayaan Netto	142.250.170.430,91	189.173.050.491,52	32,99

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.765.760.418.492,27 atau 100,63% dari target sebesar Rp1.754.768.489.387,00 naik 1,66% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.736.919.997.852,52.

#### 3.1. Pendapatan

Pendapatan Daerah APBD Tahun Anggaran 2019 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Dana Perimbangan mempunyai kontribusi terbesar yaitu sebesar 49,57%, Pendapatan Asli Daerah sebesar 39,02% serta Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar 11,41%. Gambaran lebih lengkap realisasi APBD Tahun Anggaran 2019 berdasarkan sumber pendapatan daerah dapat dilihat pada tabel berikut.





**Tabel 3.3 Kontribusi Realisasi APBD Tahun Anggaran 2019  
Berdasarkan Sumber Pendapatan Daerah**

Uraian		Realisasi (Rp)	Kontribusi (% )
1	PAD	689.049.725.509,27	39,02
2	Dana Perimbangan	875.308.177.702,00	49,57
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	201.402.515.281,00	11,41
Pendapatan Daerah		1.765.760.418.492,27	100,00

**Tabel 3.4 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2019  
Berdasarkan Sumber Pendapatan Daerah**

Uraian		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	PAD	653.011.939.630,00	689.049.725.509,27	105,52
2	Dana Perimbangan	916.460.511.482,00	875.308.177.702,00	95,51
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	185.296.038.275,00	201.402.515.281,00	108,69
Pendapatan Daerah		1.754.768.489.387,00	1.765.760.418.492,27	100,63

**Tabel 3.5 Perkembangan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2018 dan 2019  
Berdasarkan Sumber Pendapatan Daerah**

Uraian		2018	2019	%
1	PAD	667.493.075.470,14	689.049.725.509,27	3,23
2	Pendapatan Transfer	867.706.455.745,00	875.308.177.702,00	0,88
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	201.720.466.637,38	201.402.515.281,00	(0,16)
Pendapatan Daerah		1.736.919.997.852,52	1.765.760.418.492,27	1,66

### 3.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah APBD Tahun Anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp689.049.725.509,27 atau 105,52% dari target sebesar Rp653.011.939.630,00 meningkat sebesar 3,23% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp667.493.075.470,14.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2019 berdasarkan sumbernya dapat dilihat pada tabel berikut.



**Tabel 3.6 Realisasi PAD Tahun Anggaran 2019**

Uraian	Target	Realisasi	%
1.Pajak Daerah	425.381.500.000,00	451.265.948.031,00	106,08
2.Retribusi Daerah	33.451.735.712,00	32.428.343.731,00	96,94
3.Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	28.935.929.644,00	28.975.003.950,01	100,14
4.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	165.242.774.274,00	176.380.429.797,26	106,74
Jumlah PAD	653.011.939.630,00	689.049.725.509,27	105,52

**Tabel 3.7 Perkembangan Realisasi PAD Tahun Anggaran 2018 dan 2019**

Uraian	2018	2019	%
1.Pajak Daerah	407.573.263.422,00	451.265.948.031,00	10,72
2.Retribusi Daerah	33.984.531.787,00	32.428.343.731,00	(4,58)
3.Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	28.032.365.012,83	28.975.003.950,01	3,36
4.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	197.902.915.248,31	176.380.429.797,26	(10,88)
Jumlah PAD	667.493.075.470,14	689.049.725.509,27	3,23

Dari tabel 3.6 terlihat bahwa untuk sumber PAD yang berasal dari pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah terealisasi melebihi target, retribusi daerah tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Secara lebih rinci berikut akan disampaikan target dan realisasi anggaran masing-masing sumber PAD.

**a. Pajak Daerah**

Pajak Daerah terdiri 10 jenis yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak BPHTB dan Pajak Bumi dan Bangunan. Realisasi pendapatan pajak daerah Tahun Anggaran 2019 melebihi target yaitu sebesar Rp451.265.948.031,00 atau sebesar 106,08% dari target Rp425.381.500.000,00 mengalami kenaikan 10,72% dibanding Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp407.573.263.422,00.

Target dan realisasi per jenis pajak Tahun Anggaran 2019 serta perkembangannya dibanding Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.



**Tabel 3.8 Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019**

Uraian	Target	Realisasi	%
1.Pajak Hotel	152.000.000.000,00	161.297.192.790,00	106,12
2.Pajak Restoran	53.000.000.000,00	63.237.228.654,00	119,32
3.Pajak Hiburan	12.500.000.000,00	12.702.230.080,00	101,62
4.Pajak Reklame	7.200.000.000,00	7.449.951.971,00	103,47
5.Pajak Penerangan Jalan	51.000.000.000,00	52.374.696.494,00	102,70
6.Pajak Parkir	3.675.000.000,00	3.050.479.181,00	83,01
7.Pajak Air Tanah	2.500.000.000,00	2.546.299.969,00	101,85
8. Pajak sarang burung walet	6.500.000,00	6.650.000,00	102,31
9. PBB	82.500.000.000,00	86.550.328.189,00	104,91
10. Pajak BPHTB	61.000.000.000,00	62.050.890.703,00	101,72
Jumlah	425.381.500.000,00	451.265.948.031,00	106,08

**Tabel 3.9 Perkembangan Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018 dan 2019**

Jenis Pajak	2018	2019	%
1.Pajak Hotel	149.075.654.791,00	161.297.192.790,00	8,20
2.Pajak Restoran	48.312.177.110,00	63.237.228.654,00	30,89
3.Pajak Hiburan	12.594.868.046,00	12.702.230.080,00	0,85
4.Pajak Reklame	7.435.901.805,00	7.449.951.971,00	0,19
5.Pajak Penerangan Jalan	49.514.221.949,00	52.374.696.494,00	5,78
6.Pajak Parkir	3.525.732.992,00	3.050.479.181,00	(13,48)
7. Pajak Air Tanah	2.277.618.512,00	2.546.299.969,00	11,80
8. Pajak Sarang Burung Walet	6.575.000,00	6.650.000,00	1,14
9. Pajak Bumi dan Bangunan	76.403.636.198,00	86.550.328.189,00	13,28
10. Pajak BPHTB	58.426.877.019,00	62.050.890.703,00	6,20
Jumlah	<b>407.573.263.422,00</b>	<b>451.265.948.031,00</b>	10,72

### 1) Pajak Hotel

Pada Tahun Anggaran 2019 pendapatan pajak hotel terealisasi sebesar Rp161.297.192.790,00 atau sebesar 106,12% dari target sebesar Rp152.000.000.000,00, atau naik sebesar 8,20% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp149.075.654.791,00

Tercapainya realisasi pajak hotel antara lain karena adanya peningkatan room rate hotel, kenaikan tingkat hunian pada jumlah kamar hotel dan juga adanya kenaikan Average Room Rate di tahun 2019. Selain itu juga dilakukan pemeriksaan secara rutin dan penagihan secara insentif terhadap obyek pajak, adanya pemasangan alat pantau transaksi dan adanya peningkatan kunjungan wisata di bulan November karena liburan juga mengakibatkan adanya peningkatan kunjungan Hotel.



## 2) Pajak Restoran

Pajak restoran terealisasi sebesar Rp63.237.228.654,00 atau sebesar 119,32% dari target sebesar Rp53.000.000.000,00 meningkat 30,89% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp48.312.177.110,00

Meningkatnya realisasi pajak restoran antara lain disebabkan karena bertambahnya jumlah obyek pajak gerai restoran di mall atau pusat perbelanjaan di tahun 201, selain itu jumlah WP untuk Catering juga bertambah sebanyak 2 WP.

## 3) Pajak Hiburan

Pajak Hiburan terealisasi sebesar Rp12.702.230.080,00 atau sebesar 101,62% dari target sebesar Rp12.500.000.000,00, meningkat 0,85% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp12.594.868.046,00.

Tercapainya realisasi pajak hiburan antara lain disebabkan karena meningkatnya jumlah penonton di bioskop karena tayangan film Box Office dan naiknya harga tiket pada saat week day's, adanya penambahan jadwal pertunjukan bioskop dan event-event kesenian insidental di Kota Yogyakarta antara lain musik show di Stadion Kridosono dan Lapangan Parkir Mandala Krida serta maraknya event pertandingan olahraga.

## 4) Pajak Reklame

Realisasi pajak reklame tahun 2019 sebesar Rp7.449.951.971,00 atau sebesar 103,47% dari target sebesar Rp7.200.000.000,00 meningkat 0,19% dibanding Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp7.435.901.805,00.

Meningkatnya realisasi pajak reklame antara lain disebabkan karena adanya realisasi pembayaran videotron untuk masa berlaku sampai tahun depan, banyaknya event yang menggunakan media reklame antara lain ketika event promosi produk, serta bertambahnya jumlah penyelenggaraan reklame berjalan berupa reklame yang terpasang di mobil box yang beroperasi di Wilayah Kota Yogyakarta.

## 5) Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan terealisasi sebesar Rp52.374.696.494,00 atau sebesar 102,70% dari target Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp51.000.000.000,00 mengalami kenaikan 5,78% dibanding Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp49.514.221.949,00.

Tercapainya Pajak Penerangan Jalan disebabkan karena adanya penambahan jumlah pemasang/pelanggan PLN dan adanya kenaikan Tarif Dasar Listrik di Tahun 2019.

## 6) Pajak Parkir

Pajak Parkir terealisasi sebesar Rp3.050.479.181,00 atau sebesar 83,01% dari target Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp3.675.000.000,00, menurun sebesar 13,48% dari realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp3.525.732.992,00.



Menurunnya pendapatan pajak parkir antara lain disebabkan karena berkurangnya jumlah obyek pajak parkir, hal itu disebabkan karena banyaknya angkutan berbasis online yang telah berkembang sehingga parkir kendaraan pribadi mengalami penurunan. Selain itu ada beberapa lokasi parkir yang tutup dan adanya piutang dari beberapa pengelola parkir skala besar, misalnya di RS. Bethesda, XXI, RS Panti Rapih, Jogjatronik, dan XT Square

**7) Pajak Air Tanah**

Pajak Air Tanah terealisasi sebesar Rp2.546.299.969,00 atau sebesar 101,85% dari target Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2.500.000.000,00, meningkat sebesar 11,80% dari realisasi tahun 2018 sebesar Rp2.277.618.512,00

Pajak Air Tanah mengalami peningkatan karena meningkatnya Nilai Perolehan Air Tanah berdasarkan data dari PU ESDM DIY dan meningkatnya jumlah wajib pajak air tanah di Kota Yogyakarta.

**8) Pajak Sarang Burung Walet**

Pajak Sarang Burung Walet terealisasi Rp6.650.000,00 atau sebesar 102,31% dari target Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp6.500.000,00 meningkat 1,14% dibanding realisasi tahun 2018 sebesar Rp6.575.000,00.

Tercapainya target antara lain karena dilakukannya himbuan kepada pengelola sarang burung walet untuk melakukan pembayaran pajak setelah transaksi jual beli.

**9) Pajak PBB**

Pajak PBB terealisasi sebesar Rp86.550.328.189,00 atau sebesar 104,91% dari target Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp82.500.000.000,00, meningkat 13,28% dibanding tahun 2018 sebesar Rp76.403.636.198,00.

Tercapainya target pendapatan tersebut antara lain karena terealisasinya tunggakan PBB-P2, bertambahnya objek baru PBB-P2 karena adanya mutasi pemecahan maupun pendaftaran objek pajak baru dan dihapusnya stimulus bangunan serta berkurangnya prosentase stimulus baru di tahun 2019. Selain itu juga dilakukan upaya jemput bola pelayanan PBB sampai ke tingkat kelurahan sehingga dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak PBB.

**10) Pajak BPHTB**

Pajak BPHTB terealisasi sebesar Rp62.050.890.703,00 atau sebesar 101,72% dari target Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp61.000.000.000,00 meningkat 6,20% dari tahun 2018 sebesar Rp58.426.877.019,00.

Tercapainya target Pajak BPHTB antara lain disebabkan karena meningkatnya jumlah transaksi pada tahun 2019, hal itu dikarenakan adanya pengembangan rumah hunian baru, adanya peralihan hak atas tanah dan bangunan di beberapa Hotel, Bank, dan penjualan kompleks perumahan cluster atau town house.



**b. Retribusi Daerah**

Retribusi Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 terdiri dari 15 jenis. Sebagian besar jenis retribusi terealisasi melebihi target, beberapa jenis retribusi lainnya tidak mencapai target. Tabel 3.10 berikut memperlihatkan target dan realisasi masing-masing jenis retribusi.

Tabel 3.10 Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019

	Jenis Retribusi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	259.981.000,00	292.521.700,00	112,52
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	3.462.958.000,00	3.820.420.597,00	110,32
3	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	109.000.000,00	123.580.000,00	113,38
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	6.800.000.000,00	6.562.625.000,00	96,51
5	Retribusi Pelayanan Pasar	14.089.577.359,00	14.788.015.434,00	104,96
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	841.270.000,00	830.330.000,00	98,70
7	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	766.295.500,00	791.072.500,00	103,23
8	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	69.245.000,00	67.880.000,00	98,03
9	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.628.347.200,00	1.581.164.000,00	97,10
10	Retribusi Rumah Potong Hewan	99.960.000,00	89.685.000,00	89,72
11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha daerah	263.866.000,00	298.213.000,00	113,02
12	Retribusi IMB	4.725.235.653,00	2.961.112.800,00	62,67
13	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing/IMTA	336.000.000,00	221.723.700,00	65,99
	<b>Jumlah</b>	<b>33.451.735.712,00</b>	<b>32.428.343.731,00</b>	96,94



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Tabel 3.11 Perkembangan Realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2018 dan 2019

	Jenis Retribusi	2018	2019	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	175.496.400,00	292.521.700,00	66,68
	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan			7,69
2		3.547.480.500,00	3.820.420.597,00	
	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan pengabuan mayat	116.535.000,00	123.580.000,00	6,05
3				
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	6.497.892.000,00	6.562.625.000,00	1,00
5	Retribusi Pelayanan Pasar	14.096.442.567,00	14.788.015.434,00	4,91
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	841.270.000,00	830.330.000,00	(1,30)
7	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	690.682.500,00	791.072.500,00	14,53
8	Retr. Pemakaian Kekayaan Daerah	89.485.000,00	67.880.000,00	(24,14)
9	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.479.926.640,00	1.581.164.000,00	6,84
10	Retribusi Rumah Potong Hewan	119.170.000,00	89.685.000,00	(24,74)
11	Retr. Penj. Produksi Usaha Daerah	247.779.000,00	298.213.000,00	20,35
12	Retribusi IMB	5.663.602.000,00	2.961.112.800,00	(47,72)
13	Retribusi Ijin Gangguan	0,00	0,00	-
14	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing/IMTA	418.770.180,00	221.723.700,00	(47,05)
	<b>Jumlah</b>	<b>33.984.531.787,00</b>	<b>32.428.343.731,00</b>	<b>(4,58)</b>

Secara keseluruhan pada Tahun Anggaran 2019 realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp32.428.343.731,00 atau 96,94% dari target sebesar Rp33.451.735.712,00, menurun 4,58% dibanding Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp33.984.531.787,00. Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019 terdiri dari 13 jenis. Optimalisasi retribusi daerah terus diupayakan melalui intensifikasi, ekstensifikasi. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 6 jenis Retribusi yang realisasinya mencapai target yaitu:

**1) Retribusi Pelayanan Kesehatan**

Retribusi Pelayanan Kesehatan terealisasi sebesar Rp292.521.700,00 atau sebesar 112,52% dari target sebesar Rp259.981.000,00 atau meningkat sebesar 66,68% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp175.496.400,00.

Tercapainya target pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dikarenakan meningkatnya kesadaran masyarakat sehingga banyak masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan kesehatan hewan, dan adanya peningkatan permintaan pengujian sampel untuk pengujian kualitas air karena sering dilakukan sosialisasi bagi pengusaha depo air minum akan pentingnya menjaga kualitas sesuai regulasi Usaha Laik Sehat.

**2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan**

Retribusi Pelayanan Persampahan terealisasi sebesar Rp3.820.420.597,00 atau sebesar 110,32% dari target sebesar Rp3.462.958.000,00 atau meningkat 7,69% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp3.547.480.500,00.

Tercapainya target pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dikarenakan meningkatnya koordinasi antara petugas retribusi UPT dengan pengelola pemungutan retribusi di wilayah sehingga



pendapatan semakin meningkat dan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi tepat waktu.

### **3) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat**

Retribusi Pemakaman Umum pada Tahun Anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp123.580.000,00 atau sebesar 113,38% dari target Rp109.000.000,00, meningkat 6,05% dari realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp116.535.000,00.

Tercapainya pendapatan retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat disebabkan karena meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi dan adanya kemudahan mekanisme pembayaran karena sudah tersistem melalui JSS sehingga memudahkan warga untuk mengakses. Adanya pembayaran tunggakan ditahun-tahun sebelumnya dan juga adanya peralihan izin makam dari pemesanan tempat pemakaman menjadi penggunaan tempat pemakaman juga meningkatkan realisasi pendapatan retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.

### **4) Retribusi Pelayanan Pasar**

Retribusi Pelayanan Pasar terealisasi sebesar Rp14.788.015.434,00 atau sebesar 104,96% dari target sebesar Rp14.089.577.359,00 atau meningkat 4,91% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp14.096.442.567,00.

Tercapainya pendapatan retribusi pelayanan pasar disebabkan karena adanya efektifitas pelaksanaan E-Retribusi pasar dan optimalisasi kegiatan penertiban administrasi pedagang. Selain itu, juga adanya penambahan Menara Telekomunikasi di Pasar Kotagede dan Pasar Gading.

### **5) Retribusi Pengolahan Air Limbah**

Retribusi Pengolahan Air Limbah terealisasi sebesar Rp791.072.500,00 atau sebesar 103,23% dari target sebesar Rp766.295.500,00 atau meningkat 14,53% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp690.682.500,00.

Tercapainya target pendapatan tersebut antara lain disebabkan karena dilakukannya updating data Wajib Retribusi yang menjadikan adanya peningkatan Wajib Retribusi.

### **6) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah**

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada Tahun Anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp298.213.000,00 atau sebesar 113,02% dari target sebesar Rp263.866.000,00, meningkat 20,35% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp247.779.000,00.

Tercapainya target tersebut antara lain disebabkan karena adanya peningkatan hasil penjualan pada semua jenis komoditas terutama dalam sektor Kehewan





Sebagian jenis retribusi tidak mencapai target yaitu:

**1) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Tahun Anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp6.562.625.000,00 atau sebesar 96,51% dari target sebesar Rp6.800.000.000,00, meningkat 1% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp6.497.892.000,00.

Hal ini antara lain disebabkan karena adanya pengurangan potensi-potensi yang hilang akibat diberlakukannya manajemen lalu lintas seperti Jalan Terban, Jalan Suryatmajan, dan Jalan Wakhid Hasyim. Selain itu juga berkurangnya potensi-potensi tempat yang digunakan untuk tempat parkir seperti SS di Jalan Kusumanegara berpindah ke Bantul dan Bank CIMB Niaga di Jalan Kusumanegara ditutup.

Diberlakukannya transaksi non tunai juga menyebabkan Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum mengalami penurunan karena masih ada Juru Parkir yang belum atau tidak mau membayar rekening BPD.

**2) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor terealisasi sebesar Rp830.330.000,00 atau sebesar 98,70% dari target Rp841.270.000,00, menurun 1,30% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp841.270.000,00.

Hal ini antara lain disebabkan karena berkurangnya jumlah Wajib Retribusi yang mengujikan kendaraan karena ada kendaraan yang mutasi keluar daerah karena pindah alamat, numpang uji keluar dan jumlah penguji yang berkurang sehingga penguji kendaraan harus antri dikarenakan hanya dapat mengoprasikan 1 line dari 2 line yang tersedia.

**3) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Tahun Anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp67.880.000,00 atau sebesar 98,03% dari target sebesar Rp69.245.000,00, menurun 24,14% dibanding tahun 2018 sebesar Rp89.485.000,00.

Tidak tercapainya target pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah disebabkan karena banyak konsumen yang beralih ke daging impor dan luar kota dibandingkan membeli daging di RPH sehingga pemakaian mobil angkut daging berkurang.

**4) Retribusi Tempat Khusus Parkir**

Retribusi Tempat Khusus Parkir pada Tahun Anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp1.581.164.000,00 atau sebesar 97,10% dari target sebesar Rp1.628.347.200,00, meningkat 6,84% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.479.926.640,00.

Hal ini antara lain karena berkurangnya lahan parkir di TKP 1 karena lahan parkirnya sering digunakan untuk kegiatan masyarakat, dan adanya



penambahan lahan parkir disekitar Malioboro sehingga parkir di TKP 2 menjadi berkurang.

**5) Retribusi Rumah Potong Hewan**

Retribusi Rumah Potong Hewan Tahun Anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp89.685.000,00 atau sebesar 89,72% dari target sebesar Rp99.960.000,00, menurun 24,74% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp119.170.000,00.

Tidak tercapainya target pendapatan retribusi rumah potong hewan antara lain disebabkan karena harga daging di rumah potong hewan lebih mahal dibandingkan daging yang berasal dari luar kota dan impor, sehingga banyak konsumen yang beralih ke daging yang berasal dari luar kota dan impor, dan ada yang beralih ke daging puyuh atau daging ayam.

**6) Retribusi Izin Membangun Bangunan (IMB)**

Retribusi Izin Membangun Bangunan (IMB) Tahun Anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp2.961.112.800,00 atau sebesar 62,67% dari target sebesar Rp4.725.235.653,00 menurun 47,72% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp5.663.602.000 00.

Tidak tercapainya target pendapatan Retribusi Izin Membangun Bangunan(IMB) antara lain karena jumlah pemohon IMB menurun tidak sesuai dengan target, dan banyak pemohon IMB yang tidak diterima karena tidak sesuai dengan tata ruang dan rekomendasi dari Dinas Kebudayaan DIY.

**7) Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing/IMTA**

Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing/IMTA Tahun Anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp221.723.700,00 atau sebesar 65,99% dari target sebesar Rp336.000.000,00 menurun 47,05% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp418.770.180,00.

Tidak tercapainya target pendapatan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing/IMTA disebabkan karena adanya kendala dalam penerapan sistem online dalam mengurus izin ini dan untuk tahun 2019 banyak tenaga asing yang habis masa kontraknya sehingga tidak diperpanjang karena alasan tertentu misalnya melahirkan.

**c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.**

Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan berasal dari PDAM Tirtamarta, PD BPR Bank Jogja, Bank Pembangunan Daerah, Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) dan PD Jogjatama Vishesha. Dasar pendapatan hasil Perusahaan Milik Daerah dan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah:

- 1) PDAM Tirtamarta, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Yogyakarta, yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Wali Kota



Yogyakarta No 76 Tahun 2019 sebesar 55% dari laba bersih setelah dikurangi dana cadangan.

- 2) PD BPR Bank Jogja, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja sebesar 55% dari laba bersih setelah dikurangi pajak.
- 3) PD Jogjatama Vishesha, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Jogjatama Vishesha Kota Yogyakarta sebesar 55% dari laba bersih setelah dikurangi pajak.

Adapun perkembangan Realisasi Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2018 dan 2019 PDAM Tirtamarta, PD. BPR Bank Jogja, BPD, Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) dan PD Jogjatama Vishesha dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12 Realisasi Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan APBD Tahun Anggaran 2018 – 2019

Uraian	2018	2019	%
1. PDAM Tirtamarta	1.407.116.860,00	802.301.741,50	(42,98)
2. BPR. Bank Jogja	8.126.342.383,00	9.754.106.355,00	20,03
3. BPD	18.169.713.459,02	18.340.935.744,08	0,94
4. BUKP	36.457.074,81	57.146.041,43	56,75
5. PD Jogjatama Vishesha	292.735.236,00	20.514.068,00	(92,99)
<b>Jumlah</b>	<b>28.032.365.012,83</b>	<b>28.975.003.950,01</b>	<b>3,36</b>

Realisasi Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp28.975.003.950,01 meningkat 3,36% dibanding Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp28.032.365.012,83 yang berasal dari PDAM Tirtamarta, PD BPR Bank Jogja, Bank Pembangunan Daerah, BUKP dan PD Jogjatama Vishesha. Realisasi dari PDAM Tirtamarta sebesar Rp802.301.741,50 menurun 42,98%, PD BPR Bank Jogja sebesar Rp9.754.106.355 meningkat 20,03%, Bank Pembangunan Daerah sebesar Rp18.340.935.744,08 meningkat 0,94%, laba BUKP sebesar Rp57.146.041,43 meningkat 56,75% dan laba PD Jogjatama Vishesha sebesar Rp20.514.068,00 menurun 92,99% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2018.

**d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp176.380.429.797,26 atau sebesar 106,74% dari target sebesar Rp165.242.774.274,00. Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dapat dilihat pada tabel berikut.



**Tabel 3.13 Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah  
APBD Tahun Anggaran 2019**

	Uraian	Target	Realisasi	%	Proporsi
1	Hasil Penjualan aset Daerah	563.260.000,00	1.102.674.651,00	195,77	0,63
2	Jasa Giro	2.070.000.000,00	3.044.745.330,00	147,09	1,73
3	Bunga Deposito	17.000.000.000,00	17.190.898.900,68	101,12	9,75
4	TPTGR	400.000,00	1.070.000,00	267,50	0,00
5	Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	444.576.214,65	0,00	0,25
6	Pendapatan denda pajak	741.323.609,00	2.856.472.125,00	385,32	1,62
7	Pendapatan denda retribusi	211.305.800,00	418.284.200,00	197,95	0,24
8	Pendapatan dari Pengembalian	3.905.272.181,00	4.942.923.617,32	126,57	2,80
9	Pendapatan dari barang milik daerah	1.236.056.222,00	1.903.049.400,00	153,96	1,08
10	Pendapatan BLUD Taman Pintar	14.775.000.000,00	14.784.210.000,10	100,06	8,38
11	Pendapatan BLUD RSUD	81.500.000.000,00	78.121.244.026,00	95,85	44,29
12	Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis	5.305.408.584,00	5.666.389.889,20	106,80	3,21
13	Pendapatan BLUD Puskesmas	24.192.501.700,00	25.678.328.467,00	106,14	14,56
14	Pendapatan Rumah Sakit Pratama	11.054.371.000,00	15.422.522.731,29	139,52	8,74
15	Pendapatan BLUD UPT Logam	493.423.000,00	502.276.911,00	101,79	0,28
16	Denda hasil operasi yustisi	28.120.000,00	129.384.000,00	460,11	0,07
17	Pendapatan BUKP	31.786.345,00	23.577.042,02	74,17	0,01
18	Penyelenggaraan PMPS	-	-	0,00	0,00
19	Jaminan Bongkar	100.000.000,00	368.843.986,00	368,84	0,21
20	Pendapatan bunga pajak	545.995.880,00	2.126.474.511,00	389,47	1,21
21	Pendapatan bunga retribusi	12.301.153,00	36.543.594,00	297,07	0,02
22	Pendapatan dari pembayaran Listrik	1.476.248.800,00	1.615.940.201,00	109,46	0,92
		165.242.774.274,00	176.380.429.797,26	106,74	100,00

Kontribusi terbesar dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah antara lain berasal dari Pendapatan BLUD RSUD sebesar Rp 78.121.244.026,00 (44,29%), Pendapatan BLUD Puskesmas Rp25.678.328.467,00 (14,56%), Bunga Deposito sebesar Rp17.190.898.900,68 (9,75%), Pendapatan RS Pratama Rp15.422.522.731,29 (8,74%), Pendapatan BLUD Taman Pintar Rp14.784.162.452,10 (8,38%), Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis sebesar Rp5.666.389.889,00 (3,21%), Pendapatan dari Pengembalian Rp4.942.923.617,32 (2,80%), Jasa Giro sebesar Rp 3.044.745.330,00 (1,73%), Pendapatan Denda Pajak sebesar Rp2.856.472.125,00 (1,62%), Pendapatan Bunga Pajak sebesar Rp2.126.474.511,00 (1,21%), Pendapatan dari barang milik daerah sebesar Rp1.903.049.400,00 (1,08%), Pendapatan dari Pembayaran Listrik sebesar Rp1.615.940.201,00 (0,92%), Hasil Penjualan Aset Daerah sebesar Rp1.102.674.651,00 (0,63%), Pendapatan BLUD UPT Logam sebesar Rp502.276.911,00 (0,28%), Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Rp444.576.214,65 (0,25%), Pendapatan Denda Retribusi sebesar Rp 418.284.200,00 (0,24%), Jaminan Bongkar sebesar Rp368.843.986,00 (0,21%), Denda hasil operasi yustisi sebesar Rp129.384.000,00 (0,07%), Pendapatan Bunga Retribusi sebesar Rp36.543.594,00 (0,02%), Pendapatan BUKP sebesar Rp23.577.042,02 (0,01%), TPTGR sebesar Rp1.070.000,00 (0,00%).



### Dana Perimbangan

Pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp875.308.177.702,00 atau sebesar 95,51% dari target sebesar Rp916.460.511.482,00, meningkat sebesar 0,88% dibanding Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp867.706.455.745,00. Target dan realisasi Dana Perimbangan berdasarkan sumbernya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.14 Target dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2019

No	Uraian	Target	Realisasi	%
1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	46.213.757.482,00	28.975.322.400,00	62,70
2	Dana Alokasi Umum	699.176.894.000,00	700.372.564.000,00	100,171
3	Dana Alokasi Khusus	171.069.860.000,00	145.960.291.302,00	85,32
	Jumlah	916.460.511.482,00	875.308.177.702,00	95,51

Tabel 3.15 Perkembangan Realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2018 dan 2019

No	Uraian	2018	2019	%
1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	46.678.379.697,00	28.975.322.400,00	(37,93)
2	Dana Alokasi Umum	658.504.186.000,00	700.372.564.000,00	6,36
3	Dana Alokasi Khusus	162.523.890.048,00	145.960.291.302,00	(10,19)
	Jumlah	867.706.455.745,00	875.308.177.702,00	0,88

#### a. Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

Pada Tahun Anggaran 2019 pendapatan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak terealisasi sebesar Rp28.975.322.400,00 atau 62,70% dari target sebesar Rp46.213.757.482,00. Apabila dibanding realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp46.678.379.697,00 pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak menurun sebesar 37,93%. Tabel berikut menunjukkan target dan realisasi sumber-sumber Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Tahun Anggaran 2019.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Tabel 3.16 Target dan Realisasi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Tahun Anggaran 2019

No	Uraian	Target	Realisasi	%
1	Bagi Hasil Pajak	43.688.080.000,00	27.070.845.600,00	61,96
	PPh 25,29 dan 21	38.857.895.000,00	23.314.737.000,00	60,00
	Bagi Hasil PBB:	4.830.185.000,00	3.756.108.600,00	77,76
	Bagi hasil PBB sektor pertambangan & Migas	0,00	0,00	0,00
	Bagi Hasil PBB Pemerintah Pusat	4.830.185.000,00	3.756.108.600,00	77,76
	Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas	0,00	0,00	0,00
2	Bagi Hasil Bukan Pajak	2.525.677.482,00	1.904.476.800,00	75,40
	Provisi SD Hutan	2.970.000,00	1.782.000,00	60,00
	SDA Perikanan	983.593.000,00	590.155.800,00	60,00
	Cukai Tembakau	1.539.114.482,00	1.312.539.000,00	85,28
	Jumlah	46.213.757.482,00	28.975.322.400,00	62,70

Perkembangan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.17 Perkembangan Realisasi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak  
APBD Tahun Anggaran 2018 dan 2019

No	Uraian	2018	2019	%
1	<b>Bagi Hasil Pajak</b>	<b>44.728.934.290,00</b>	<b>27.070.845.600,00</b>	(39,48)
	<b>PPh 25,29 dan 21</b>	<b>40.350.210.890,00</b>	<b>23.314.737.000,00</b>	(42,22)
	<b>Bagi hasil PBB:</b>	<b>4.378.723.400,00</b>	<b>3.756.108.600,00</b>	(14,22)
	Bagi hasil PBB sektor pertambangan & Migas	0,00	0,00	-
	Bagi Hasil PBB Pemerintah Pusat	4.378.723.400,00	3.756.108.600,00	(14,22)
	Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas	-	-	-
2	<b>Bagi Hasil Bukan Pajak</b>	<b>1.949.445.407,00</b>	<b>1.904.476.800,00</b>	(2,31)
	Provisi SD Hutan	10.887.816,00	1.782.000,00	(83,63)
	SDA Perikanan	701.234.591,00	590.155.800,00	(15,84)
	Cukai Tembakau	1.237.323.000,00	1.312.539.000,00	6,08
	<b>Jumlah</b>	<b>46.678.379.697,00</b>	<b>28.975.322.400,00</b>	(37,93)

Bagi Hasil Pajak pada tahun Anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp27.070.845.600,00 atau 61,96% dari target sebesar Rp43.688.080.000,00 menurun 39,48% dari tahun 2018 sebesar Rp44.728.934.290,00.

Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25, 29 dan 21 pada Tahun Anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp23.314.737.000,00 atau sebesar 60,00% dari target sebesar Rp38.857.895.000,00, menurun 42,22% dibanding Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp40.350.210.890,00.

Bagi Hasil Pajak yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Pemerintah Pusat pada Tahun Anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp3.756.108.600,00 atau sebesar 77,76% dari target Rp4.830.185.000,00 menurun sebesar 14,22% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp4.378.723.400,00.



Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp1.904.476.800,00 atau sebesar 75,40% dari target sebesar Rp2.525.677.482,00, menurun 2,31% dibanding Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.949.445.407,00.

Realisasi pendapatan Dana Perimbangan dari Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp1.904.476.800,00 terdiri dari Provisi sumber Daya Hutan sebesar Rp1.782.000,00, Pungutan Hasil Perikanan sebesar Rp590.155.800,00 dan dari Cukai Tembakau sebesar Rp1.312.539.000,00.

Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak kurang dari target yang dianggarkan dikarenakan penerimaan Pemerintah Pusat tidak mencapai target.

#### **b. Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus**

Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp700.372.564.000,00 atau 100,17% dari target, dan meningkat sebesar 6,36% dari realisasi tahun 2018 sebesar Rp658.504.186.000,00.

Realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp145.960.291.302,00 atau 85,32% dari target sebesar Rp171.069.860.000,00, menurun sebesar 10,19% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp162.523.890.048,00. Penetapan besarnya Dana Alokasi Khusus berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Dana Alokasi Khusus terdiri dari DAK Fisik sebesar Rp49.435.128.281,00 yang dipergunakan untuk bidang Pelayanan Rujukan sebesar Rp17.192.622.745,00, bidang Pelayanan Kefarmasian sebesar Rp879.491.267,00, bidang Keluarga Berencana sebesar Rp407.900.000,00, bidang Lingkungan Hidup sebesar Rp279.390.000,00, bidang Pelayanan Kesehatan Dasar sebesar Rp4.011.013.033,00, Bidang Perumahan dan Permukiman sebesar Rp3.211.800.000,00, bidang Infrastruktur Pemerintah Daerah (Jalan) sebesar Rp10.550.208.000,00, bidang pendidikan sebesar Rp2.511.579.488,00, bidang Pengendalian Penyakit sebesar Rp482.054.000,00, DAK Sanitasi sebesar Rp 2.477.808.148,00 dan bidang Jalan sebesar Rp7.431.261.600,00 dan DAK Non Fisik sebesar Rp96.525.163.021,00 yang dipergunakan untuk Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD sebesar Rp6.538.805.819,00, Tunjangan Profesi Guru PNSD sebesar Rp72.251.345.280,00, Bantuan Operasional Kesehatan sebesar Rp9.852.341.533,00, Akreditasi Puskesmas Rp 562.320.000,00, Jaminan Persalinan Rp499.000.000,00, Bantuan Operasional Keluarga Berencana Rp1.213.769.008,00, Pelayanan Adminduk Rp1.273.243.381,00, Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Rp 3.041.300.000,00, Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM Rp 380.000.000,00 dan Dana Pelayanan Kepariwisata Rp913.038.000,00.

Karena keputusan pemenang lelang pada DAK Bidang Jalan melebihi batas waktu input kontrak yang telah ditetapkan Kemenkeu dan Bidang Lingkungan Hidup mengalami gagal lelang menyebabkan realisasi penyaluran DAK Fisik kurang dari target yang dianggarkan karena sesuai dengan PMK Nomor 121/PMK.07/2018 bahwa penyaluran DAK Fisik sesuai dengan daftar kontrak yang diinput melalui OMSPAN. Dan pada BOP PAUD juga kurang dari target yang dianggarkan karena masih terdapat SILPA BOP PAUD TA 2018 sebesar Rp4.494.000.000,00 sehingga menjadi dasar perhitungan untuk penyaluran BOP PAUD tahun 2019.



### 3.1.2 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp201.402.515.281,00 atau 108,69% dari target sebesar Rp 185.296.038.275,00 yang terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana bagi hasil pajak dari propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Pendapatan Hibah terealisasi sebesar Rp31.011.780.000,00 atau 103,10%, yang terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah sebesar Rp1.254.000.000,00, Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri sebesar Rp200.000.000,00 dan Pendapatan Hibah Dana BOSNAS Rp29.557.780.000,00. Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Propinsi terealisasi sebesar Rp133.393.876.281,00 atau 112,83%, yang bersumber Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp50.129.201.000,00, Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp29.834.114.000,00, Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar kendaraan bermotor sebesar Rp32.990.808.000,00, Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebesar Rp35.818.000,00, dan Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp20.403.935.281,00.

Pendapatan dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus yang dianggarkan Rp35.760.859,00 terealisasi sebesar Rp35.760.859.000,00 atau 100% berupa Dana Insentif Daerah.

Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya dianggarkan sebesar Rp1.236.000.000,00 terealisasi Rp1.236.000.000,00 atau 100% yang terdiri dari Bantuan Keuangan Khusus Modal usaha untuk UEP PKH (150 penerima) sebesar Rp450.000.000,00, Bantuan Keuangan Khusus Padat Karya Infrastruktur (4 kelurahan) sebesar Rp516.000.000,00 dan Bantuan Keuangan Khusus Jambanisasi (30 penerima) sebesar Rp270.000.000,00.

### 3.2. Belanja

Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.734.593.335.861,34 atau sebesar 89,23% dari anggaran, meningkat sebesar 4,95% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.652.727.843.523,91. Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel 3.18.





Tabel 3.18 Anggaran dan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2019

Uraian	Target	Realisasi	%	Proporsi
Belanja Tidak Langsung	775.963.952.168,52	716.969.657.199,00	92,40	41,33
Belanja Pegawai	667.465.772.253,00	623.730.246.194,00	93,45	
Belanja Bunga	-	-		
Bunga Subsidi	-	-		
Belanja Hibah	85.740.983.138,00	79.389.047.945,00	92,59	
Belanja Bantuan Sosial	12.526.580.000,00	11.551.423.000,00	92,22	
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	-	-		
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	2.002.804.587,00	1.981.246.996,00	98,92	
Belanja Tidak Terduga	8.227.812.190,52	317.693.064,00	3,86	
Belanja Langsung	1.167.976.204.978,00	1.017.623.678.662,34	87,13	58,67
Belanja Pegawai	163.392.184.600,00	136.801.816.234,28	83,73	
Belanja Barang	617.496.329.981,00	553.360.933.346,89	89,61	
Belanja Modal	387.087.690.397,00	327.460.929.081,17	84,60	
Jumlah Belanja	1.943.940.157.146,52	1.734.593.335.861,34	89,23	

### 3.2.1. Realisasi Belanja Berdasarkan Kelompok Belanja

Belanja Tidak Langsung meliputi Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, Partai Politik dan Belanja Tidak Terduga. Proporsi Belanja Tidak Langsung terhadap Belanja APBD sebesar 41,33%. Realisasi Belanja Tidak Langsung pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp716.969.657.199,00.

Belanja Pegawai yang dianggarkan sebesar Rp667.465.772.253,00 terealisasi sebesar Rp623.730.246.194,00 atau 93,45% dari anggaran. Realisasi belanja pegawai tersebut termasuk belanja untuk tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru PNSD.

Belanja Hibah yang dianggarkan sebesar Rp85.740.983.138,00 terealisasi sebesar Rp79.389.047.945,00 atau 92,59% dari anggaran yang antara lain merupakan hibah kepada Pemerintah sebesar Rp1.259.645.450,00, hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi sebesar Rp47.342.470.016,00, BOS kepada SD Swasta sebesar Rp10.682.244.758,00, BOS kepada SMP Swasta sebesar Rp6.872.326.205,00, BOS kepada PAUD Swasta sebesar Rp11.297.923.516,00, dan Dana BOP Kesejahteraan Rp 1.934.438.000,00.

Belanja Bantuan Sosial yang dianggarkan sebesar Rp12.526.580.000,00 terealisasi sebesar Rp11.551.423,00 atau 92,22% dari anggaran yang antara lain digunakan untuk Bantuan Sosial Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat sebesar Rp9.695.180.000,00, Lembaga non Pemerintahan Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lain sebesar Rp724.393.000,00, Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat Yang Tidak Dapat Direncanakan sebesar Rp 1.131.850.000,00.



Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, Partai Politik dianggarkan sebesar Rp2.002.804.587,00 terealisasi sebesar Rp1.981.246.996,00 atau 98,92% dari anggaran yang antara lain digunakan untuk Bantuan Keuangan ke Pemerintah daerah Lainnya sebesar Rp1.228.210.990,00 dengan perincian kepada Provinsi DIY (IPAL) sebesar Rp528.210.990,00, dan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Bulungan Provinsi Kaltara bagi Transmigran sebesar Rp700.000.000,00 serta Bantuan kepada Partai Politik sebesar Rp753.036.006,00 dengan rincian untuk PDI-P sebesar Rp273.898.708,00, Demokrat sebesar Rp40.096.220,00, PAN sebesar Rp112.009.072,00, PKS sebesar Rp73.541.661,00, Golkar sebesar Rp60.230.624,00, PPP sebesar Rp53.767.651,00, Gerindra Rp99.013.056,00 dan Nasdem sebesar Rp40.479.014,00.

Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan sebesar Rp8.227.812.190,52 terealisasi sebesar Rp317.693.064,00 atau 3,86% dari anggaran, yang digunakan untuk mengembalikan kelebihan pendapatan sebesar Rp317.028.624,00 yang terdiri dari Pajak hotel sebesar Rp27.365.154,00, Pajak Restoran Rp6.956.530,00, PBB sebesar Rp486.895,00, Pajak BPHTB sebesar Rp281.378.050,00, Pajak Reklame Rp841.995,00 serta mengembalikan kelebihan setor belanja sebesar Rp664.440,00.

Belanja langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Proporsi belanja langsung terhadap Belanja APBD pada Tahun Anggaran 2019 sebesar 58,67%. Realisasi belanja langsung pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.017.623.678.662,34 atau 87,13% dari anggaran yang terdiri dari belanja pegawai Rp136.801.816.234,28, belanja barang jasa Rp553.360.933.346,89 dan belanja modal Rp327.460.929.081,17.

### **3.2.2. Realisasi Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi**

Realisasi Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi dan Proporsi Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi terhadap Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Tabel 3.19 Realisasi dan Proporsi Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi terhadap Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2019

No	Uraian	Realisasi	Proporsi
	Urusan Wajib:	1.249.203.475.939,60	72,02
I	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	960.931.613.484,75	55,40
	-Pendidikan	375.686.835.468,11	21,66
	-Kesehatan	323.577.594.454,29	18,65
	-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	169.084.335.825,02	9,75
	-Perumahan	31.717.501.908,69	1,83
	-Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	46.569.312.865,28	2,68
	-Sosial	14.296.032.963,36	0,82
II	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	288.271.862.454,85	16,62
	-Tenaga Kerja	5.120.442.249,00	0,30
	- Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.358.104.008,19	0,42
	- Pangan	1.324.456.499,16	0,08
	-Pertanahan	28.810.386.087,00	1,66
	- Lingkungan hidup	52.193.247.635,99	3,01
	- Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	6.966.544.990,00	0,40
	- Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	88.437.907.251,57	5,10
	-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.299.654.850,00	0,48
	- Perhubungan	19.839.515.341,89	1,14
	-Komunikasi dan Informatika	22.274.929.467,00	1,28
	-Koperasi/Usaha Kecil dan Menengah	10.898.442.963,88	0,63
	-Penanaman Modal	6.844.718.384,12	0,39
	-Kepemudaan dan Olah Raga	8.177.974.114,00	0,47
	- Statistik	245.943.200,00	0,01
	-Persandian	1.595.224.975,00	0,09
	-Kebudayaan	5.607.842.529,00	0,32
	-Perpustakaan	3.947.024.436,08	0,23
	-Kearsipan	6.897.413.073,97	0,40
	- Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	3.432.090.399,00	0,20
III	Urusan Pilihan	87.320.298.668,01	5,03
	-Pertanian	9.442.350.652,32	0,54
	-Pariwisata	32.490.488.514,54	1,87
	-Kelautan dan Perikanan	2.726.669.054,72	0,16
	-Perdagangan	24.460.753.522,95	1,41
	-Industri	17.987.110.142,48	1,04
	-Ketransmigrasian	212.926.781,00	0,01
IV	Urusan Administrasi Pemerintahan Dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	398.069.561.253,73	22,95
	-Perencanaan	7.231.709.218,00	0,42
	-Penelitian dan Pengembangan	1.773.226.475,00	0,10
	-Sekretariat Daerah	31.972.817.202,37	1,84
	-Sekretariat DPRD	43.329.174.359,67	2,50
	-Inspektorat	5.547.309.485,78	0,32
	-Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	166.118.610.078,04	9,58
	-Keuangan	142.096.714.434,87	8,19
	Jumlah	1.734.593.335.861,34	100,00



Tabel 3.20 Target dan Realisasi Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi APBD Tahun Anggaran 2019

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
I	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1.069.682.490.026,00	960.931.613.484,75	89,83
	-Pendidikan	414.722.524.373,00	375.686.835.468,11	90,59
	-Kesehatan	364.503.898.191,00	323.577.594.454,29	88,77
	-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	189.739.106.784,00	169.084.335.825,02	89,11
	-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	35.687.488.021,00	31.717.501.908,69	88,88
	-Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	49.795.413.822,00	46.569.312.865,28	93,52
	-Sosial	15.234.058.835,00	14.296.032.963,36	93,84
II	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	328.985.157.349,00	288.271.862.454,85	87,62
	- Tenaga Kerja	5.234.853.000,00	5.120.442.249,00	97,81
	- Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.818.751.623,00	7.358.104.008,19	94,11
	-Pangan	1.425.295.000,00	1.324.456.499,16	92,93
	-Pertanahan	55.535.845.807,00	28.810.386.087,00	51,88
	- Lingkungan hidup	54.389.944.866,00	52.193.247.635,99	95,96
	- Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	7.454.924.134,00	6.966.544.990,00	93,45
	- Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	93.006.790.519,00	88.437.907.251,57	95,09
	-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.818.020.989,00	8.299.654.850,00	94,12
	- Perhubungan	21.445.763.540,00	19.839.515.341,89	92,51
	-Komunikasi dan Informatika	23.574.668.349,00	22.274.929.467,00	94,49
	-Koperasi/Usaha Kecil dan Menengah	11.549.589.074,00	10.898.442.963,88	94,36
	-Penanaman Modal	7.331.820.940,00	6.844.718.384,12	93,36
	-Kepemudaan dan Olah Raga	8.635.456.025,00	8.177.974.114,00	94,70
	- Statistik	259.681.000,00	245.943.200,00	94,71
	-Persandian	1.641.129.000,00	1.595.224.975,00	97,20
	-Kebudayaan	6.101.348.160,00	5.607.842.529,00	91,91
	-Perpustakaan	3.963.489.379,00	3.947.024.436,08	99,58
	-Kearsipan	7.132.851.766,00	6.897.413.073,97	96,70
	- Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	3.664.934.178,00	3.432.090.399,00	93,65
III	Urusan Pilihan	96.012.991.063,00	87.320.298.668,01	90,95
	-Pertanian	10.102.245.754,00	9.442.350.652,32	93,47
	-Pariwisata	37.092.698.450,00	32.490.488.514,54	87,59
	-Kelautan dan Perikanan	2.896.650.000,00	2.726.669.054,72	94,13
	-Perdagangan	26.417.978.200,00	24.460.753.522,95	92,59
	-Perindustrian	19.290.473.659,00	17.987.110.142,48	93,24
	-Transmigrasi	212.945.000,00	212.926.781,00	99,99
IV	Urusan Administrasi Pemerintahan Dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	449.259.518.708,52	398.069.561.253,73	88,61
	-Perencanaan	7.522.025.101,00	7.231.709.218,00	96,14
	-Penelitian dan Pengembangan	1.860.428.000,00	1.773.226.475,00	95,31
	-Sekretariat Daerah	34.398.003.961,00	31.972.817.202,37	92,95
	-Sekretariat DPRD	60.029.999.226,00	43.329.174.359,67	72,18
	-Inspektorat	5.837.657.205,00	5.547.309.485,78	95,03
	-Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	178.865.929.093,00	166.118.610.078,04	92,87
	-Keuangan	160.745.476.122,52	142.096.714.434,87	88,40
	<b>Jumlah</b>	<b>1.943.940.157.146,52</b>	<b>1.734.593.335.861,34</b>	<b>89,23</b>

Belanja berdasar urusan wajib mempunyai proporsi sebesar 72,02% terhadap belanja daerah. Belanja menurut urusan wajib dibedakan menjadi 2 (dua) urusan yaitu Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar.

Porsi Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar sebesar 55,40% terhadap belanja daerah meliputi Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Sosial.

Belanja urusan Pendidikan digunakan untuk melaksanakan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar, Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Menengah Pertama, Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non formal dan PAUD dan Program Pengembangan Pendidikan. Realisasi belanja urusan pendidikan sebesar Rp375.686.835.468,11 atau 90,59% dari anggaran sebesar Rp414.722.524.373,00.



Belanja urusan kesehatan digunakan untuk melaksanakan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Pelayanan Kesehatan Dasar, Program Pelayanan Kesehatan Rujukan, Program Upaya Pelayanan Kesehatan, Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat, Program Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan, Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja. Realisasi Belanja urusan kesehatan sebesar Rp323.577.594.454,29 atau 88,77% dari anggaran sebesar Rp364.503.898.191,00.

Belanja urusan pekerjaan umum dan Penataan Ruang digunakan untuk melaksanakan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Pembangunan Gedung Pemerintah, Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase, Program Penataan Perumahan, Permukiman dan Tata Bangunan, Program Pengelolaan Pertanahan, Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang, Program Pengendalian Tata Ruang. Realisasi belanja urusan pekerjaan umum dan Penataan Ruang sebesar Rp169.084.335.825,02 atau 89,11% dari anggaran sebesar Rp189.739.106.784,00.

Belanja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman digunakan untuk melaksanakan Program Penataan Perumahan, Permukiman dan Tata Bangunan. Realisasi belanja urusan perumahan sebesar Rp31.717.501.908,69 atau 88,88% dari anggaran sebesar Rp35.687.488.021,00.

Belanja urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat digunakan untuk melaksanakan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan, Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Program Pengembangan Kapasitas dan Pengkajian Peraturan Perundangan, Program Perlindungan Masyarakat, Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur, Program Pencegahan Kebakaran, Program Penanggulangan Kebakaran, Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam. Realisasi belanja urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebesar Rp46.569.312.865,28 atau 93,52% dari anggaran sebesar Rp49.795.413.822,00.

Belanja urusan sosial digunakan untuk melaksanakan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Advokasi dan Rehabilitasi Sosial, dan Program Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial. Realisasi belanja urusan sosial sebesar Rp14.296.032.963,36 atau 93,84% dari anggaran sebesar Rp15.234.058.835,00.

Porsi Belanja Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar sebesar 16,62% terhadap belanja daerah yang meliputi Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,



Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olah Raga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

Belanja urusan Tenaga Kerja digunakan untuk melaksanakan Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja. Realisasi belanja urusan Tenaga Kerja sebesar Rp5.120.442.249,00 atau 97,81% dari anggaran sebesar Rp5.234.853.000,00.

Belanja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak digunakan untuk melaksanakan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Program Perlindungan Anak, Program Pemberdayaan Masyarakat. Realisasi belanja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebesar Rp7.358.104.008,19 atau 94,11% dari anggaran sebesar Rp7.818.751.623,00.

Belanja urusan Pangan digunakan untuk melaksanakan Program Pembinaan Ketahanan Pangan. Realisasi belanja urusan Pangan sebesar Rp1.324.456.499,16 atau 92,93% dari anggaran sebesar Rp1.425.295.000,00.

Belanja urusan Pertanahan digunakan untuk melaksanakan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Pengelolaan Pertanahan. Realisasi belanja urusan Pertanahan sebesar Rp28.810.386.087,00 atau 51,88% dari anggaran sebesar Rp55.535.845.807,00.

Belanja urusan lingkungan hidup digunakan untuk melaksanakan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Penataan dan Pengendalian Dampak Lingkungan, Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik, Program Pengelolaan Persampahan. Realisasi belanja urusan lingkungan hidup sebesar Rp52.193.247.635,99 atau 95,96% dari anggaran sebesar Rp54.389.944.866,00.

Belanja urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil digunakan untuk melaksanakan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Program Pelayanan pencatatan sipil, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data. Realisasi belanja urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil sebesar Rp6.966.544.990,00 atau 93,45% dari anggaran sebesar Rp7.454.924.134,00.



Belanja urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa digunakan untuk melaksanakan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dan Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat berbasis Kewilayahan. Realisasi belanja urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp88.437.907.251,57 atau 95,09% dari anggaran sebesar Rp93.006.790.519,00.

Belanja urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana digunakan untuk melaksanakan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dan Program Pengendalian Penduduk, Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Realisasi belanja urusan Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana sebesar Rp8.299.654.850,00 atau 94,12% dari anggaran sebesar Rp8.818.020.989,00.

Belanja urusan Perhubungan digunakan untuk melaksanakan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Pengelolaan Lalu Lintas, Program Angkutan Jalan, Pengendalian Operasional dan Keselamatan Lalu Lintas, Program Pengelolaan Perparkiran. Realisasi belanja urusan Perhubungan sebesar Rp19.839.515.341,89 atau 92,51% dari anggaran sebesar Rp 21.445.763.540,00.

Belanja urusan Komunikasi dan Informatika digunakan untuk melaksanakan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Telematika, Program Pengelolaan Informasi dan Statistik, Program Peningkatan Komunikasi Publik. Realisasi belanja urusan Komunikasi dan Informatika sebesar Rp22.274.929.467,00 atau 94,49% dari anggaran sebesar Rp23.574.668.349,00.

Belanja urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah digunakan untuk melaksanakan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Peningkatan Kualitas Koperasi, Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah. Realisasi belanja urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp10.898.442.963,88 atau 94,36% dari anggaran sebesar Rp11.549.589.074,00.

Belanja urusan Penanaman Modal digunakan untuk melaksanakan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan, Program Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan, Program Pengembangan Penanaman Modal, Program Penguatan Regulasi dan Pengembangan Kinerja Layanan Penanaman Modal dan Perizinan. Realisasi belanja urusan Penanaman Modal sebesar Rp6.844.718.384,12 atau 93,36% dari anggaran sebesar Rp7.331.820.940,00.



Belanja urusan Kepemudaan dan olah raga digunakan untuk melaksanakan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Pengembangan Kepemudaan, Program Pengembangan olah raga. Realisasi belanja urusan Kepemudaan dan Olah Raga sebesar Rp8.177.974.114,00 atau 94,70% dari anggaran sebesar Rp8.635.456.025,00.

Belanja urusan Statistik digunakan untuk melaksanakan Program Pengelolaan Informasi dan Statistik. Realisasi belanja urusan statistik sebesar Rp245.943.200,00 atau 94,71% dari anggaran sebesar Rp259.681.000,00.

Belanja urusan Persandian digunakan untuk melaksanakan Program Peningkatan Pelayanan Persandian. Realisasi belanja urusan Persandian sebesar Rp1.595.224.975,00 atau 97,20% dari anggaran sebesar Rp1.641.129.000,00.

Belanja urusan Kebudayaan digunakan untuk melaksanakan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya, Program Pelestarian Pengembangan Sejarah dan Bahasa, Program Pelestarian Pengembangan Seni dan Tradisi. Realisasi belanja urusan Kebudayaan sebesar Rp5.607.842.529,00 atau 91,91% dari anggaran sebesar Rp6.101.348.160,00.

Belanja urusan Perpustakaan digunakan untuk melaksanakan Program Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan, Program Pelestarian Koleksi Pustaka dan Data Informasi Perpustakaan. Realisasi belanja urusan Perpustakaan sebesar Rp3.947.024.436,08 atau 99,58% dari anggaran sebesar Rp3.963.489.379,00.

Belanja urusan Kearsipan digunakan untuk melaksanakan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Pengelolaan Pengembangan Kearsipan, Program Perlindungan, Penyelamatan, Data dan Informasi Arsip. Realisasi belanja urusan Kearsipan sebesar Rp6.897.413.073,97 atau 96,70% dari anggaran sebesar Rp7.132.851.766,00.

Belanja urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri digunakan untuk melaksanakan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan. Realisasi belanja urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri sebesar Rp3.432.090.399,00 atau 93,65% dari anggaran sebesar Rp3.664.934.178,00.

Porsi belanja Urusan Pilihan meliputi urusan Pertanian, Pariwisata, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi sebesar 5,03 % dari belanja daerah.

Belanja urusan Pertanian digunakan untuk melaksanakan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan





Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Pembinaan Pertanian. Realisasi belanja urusan Pertanian sebesar Rp9.442.350.652,32 atau 93,47% dari anggaran sebesar Rp10.102.245.754,00.

Belanja urusan Pariwisata digunakan untuk melaksanakan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Pengembangan dan Pemasaran Wisata, Program Peningkatan Kualitas Atraksi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Program Pengembangan Taman Pintar. Realisasi belanja urusan Pariwisata sebesar Rp32.490.488.514,54 atau 87,59% dari anggaran sebesar Rp37.092.698.450,00.

Belanja urusan Kelautan dan Perikanan digunakan untuk melaksanakan Program Pembinaan Kehewan dan Perikanan. Realisasi belanja urusan Kelautan dan Perikanan sebesar Rp2.726.669.054,72 atau 94,13% dari anggaran sebesar Rp2.896.650.000,00.

Belanja urusan Perdagangan digunakan untuk melaksanakan Program Pembinaan dan Pengendalian Perdagangan, Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban Pasar, Program Penataan, Pengembangan dan Pendapatan Pasar, Program Pengembangan Pusat Bisnis. Realisasi belanja urusan Perdagangan sebesar Rp24.460.753.522,95 atau 92,59% dari anggaran sebesar Rp26.417.978.200,00.

Belanja urusan Perindustrian digunakan untuk melaksanakan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Pembinaan Perindustrian, Program Pengembangan Industri Logam. Realisasi belanja urusan Perindustrian sebesar Rp17.987.110.142,48 atau 93,24% dari anggaran sebesar Rp19.290.473.659,00.

Belanja urusan Transmigrasi digunakan untuk melaksanakan Program Pengembangan dan Penempatan dan Transmigrasi. Realisasi belanja urusan Transmigrasi sebesar Rp212.926.781,00 atau 99,99% dari anggaran sebesar Rp212.945.000,00.

Porsi belanja Urusan Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan meliputi urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan, Keuangan sebesar 22,95% dari belanja daerah.

Belanja urusan Perencanaan digunakan untuk melaksanakan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Ekonomi, Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Fisik, Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Sosial . Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah. Realisasi belanja urusan perencanaan sebesar Rp7.231.709.218,00 atau 96,14% dari anggaran sebesar Rp7.522.025.101,00.



Belanja urusan Penelitian dan Pengembangan digunakan untuk melaksanakan Program penelitian dan Pengembangan. Realisasi belanja urusan Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp1.773.226.475,00 atau 95,31% dari anggaran sebesar Rp1.860.428.000,00.

Belanja urusan Sekretariat daerah digunakan untuk melaksanakan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan, Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum, Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Sekda, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah, Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat daerah dan Kerumahtanggaan, Program Peningkatan Perekonomian Pengembangan Pendapatan Daerah Asli Daerah dan Kerjasama, Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan, Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah, Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa. Realisasi belanja urusan Sekretariat Daerah sebesar Rp31.972.817.202,37 atau 92,95% dari anggaran sebesar Rp34.398.003.961,00.

Belanja urusan Sekretariat DPRD digunakan untuk melaksanakan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan, Program Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan. Realisasi belanja urusan Sekretariat DPRD sebesar Rp43.329.174.359,67 atau 72,18% dari anggaran sebesar Rp60.029.999.226,00.

Belanja urusan Inspektorat digunakan untuk melaksanakan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Aparatur, Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset, Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pembangunan Fisik, Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya, Program Peningkatan dan Evaluasi Pengawasan. Realisasi belanja urusan Inspektorat sebesar Rp5.547.309.485,78 atau 95,03% dari anggaran sebesar Rp5.837.657.205,00.

Belanja urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan digunakan untuk melaksanakan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Pengembangan Karier Aparatur Sipil Negara, Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian, Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara. Realisasi belanja urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp166.118.610.078,04 atau 92,87% dari anggaran sebesar Rp178.865.929.093,00.



Belanja urusan Keuangan digunakan untuk melaksanakan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Perencanaan dan Pengendalian Anggaran, Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Transfer, Program Pengelolaan Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Program Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah, Program Pembukuan dan penagihan Pajak Daerah, Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Inventarisasi Aset. Realisasi belanja urusan Keuangan sebesar Rp142.096.714.434,87 atau 88,40% dari anggaran sebesar Rp160.745.476.122,52.

### 3.3. Pembiayaan Daerah

#### 3.3.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp226.448.050.491,52 berasal dari :

- |  |                      |
|--|----------------------|
| - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2018 | Rp226.442.324.759,52 |
| - Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman      | Rp 5.725.732,00      |

#### 3.3.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp37.275.000.000,00 dipergunakan untuk:

- |                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| - penyertaan modal kepada PT BPD DIY | Rp37.275.000.000,00 |
|--------------------------------------|---------------------|

### 3.4. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2019

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp220.340.133.122,45 yang terdiri dari :

- |   |                      |
|---|----------------------|
| a. Sisa Kas di Kas Daerah Tahun Anggaran 2019   | Rp176.836.026.304,34 |
| b. Sisa UP/TU                                   | Rp 34.639.092,00     |
| c. Sisa Kas RSUD Tahun 2019                     | Rp 16.315.175.635,26 |
| d. Sisa Kas Taman Pintar Tahun 2019             | Rp 3.562.497.919,44  |
| e. Sisa Kas di BLUD Puskesmas Tahun 2019        | Rp 5.124.325.375,60  |
| f. Sisa Kas di BLUD UPT Pusat Bisnis Tahun 2019 | Rp 1.669.279.394,65  |
| g. Sisa Kas di BLUD UPT Pratama Tahun 2019      | Rp 8.539.523.751,80  |
| h. Sisa Kas di BLUD UPT Logam Tahun 2019        | Rp 82.005.512,20     |
| i. Sisa BOS Tahun 2019                          | Rp 8.176.660.137,16  |



## BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Sedangkan entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Pembuatan laporan keuangan dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku entitas akuntansi, sedangkan Laporan Keuangan tersebut akan dikonsolidasikan oleh entitas pelaporan dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta.

Adapun perangkat daerah Kota Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dan peraturan daerah lain terkait kelembagaan maupun penyertaan modal terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah (Tipe A), terdiri dari :
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Asisten Kesejahteraan Rakyat, membidangi Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat, dan Bagian Hukum;
  - c. Asisten Perekonomian, membidangi Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan, Bagian Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama, dan Bagian Layanan Pengadaan;
  - d. Asisten Umum, membidangi Bagian Umum, Bagian Protokol dan Bagian Organisasi;
2. Sekretariat DPRD (Tipe B);
3. Inspektorat Daerah (Tipe A);
4. Dinas Daerah, terdiri dari :
  - a. Dinas Pendidikan (Tipe A);
  - b. Dinas Pemuda dan Olahraga (Tipe B);
  - c. Dinas Kesehatan (Tipe A);
  - d. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (Tipe A);
  - e. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Tipe B);
  - f. Dinas Kebakaran (Tipe C);
  - g. Satuan Polisi Pamong Praja (Tipe A);
  - h. Dinas Sosial (Tipe A);
  - i. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak (Tipe A);
  - j. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Tipe B);
  - k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Tipe B);



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

---

- l. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Tipe A);
- m. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Tipe A);
- n. Dinas Pertanian dan Pangan (Tipe B);
- o. Dinas Lingkungan Hidup (Tipe A);
- p. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Tipe A);
- q. Dinas Perhubungan (Tipe B);
- r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Tipe A);
- s. Dinas Kebudayaan (Tipe A);
- t. Dinas Pariwisata (Tipe A);
- u. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (Tipe A);
5. Badan, terdiri dari :
  - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Tipe A);
  - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Tipe A);
  - c. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (Tipe B);
6. Kecamatan, terdiri dari 14 Kecamatan;
7. Kelurahan, terdiri dari 45 Kelurahan.
8. Kantor Kesatuan Bangsa;
9. Rumah Sakit Jogja;
10. Lembaga lain: Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. BUMD, terdiri dari :
  - a. PT. Bank BPD DIY;
  - b. Perumda PDAM Tirtamarta Yogyakarta;
  - c. Perumda BPR Bank Jogja;
  - d. PT. Radio Swara Adiloka;
  - e. PD. Jogjatama Vishesha.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2019 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Dengan demikian, dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintah daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian LKPD Kota Yogyakarta tahun 2019 adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO dan beban,



pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas, sedangkan basis kas diterapkan untuk pengakuan pendapatan-LRA, Belanja, Transfer dan Pembiayaan.

Kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Adapun kebijakan akuntansi tersebut di atas meliputi :

## 1) Pendapatan

### A. Definisi

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kota Yogyakarta yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kota Yogyakarta, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

### B. Pengakuan

Pendapatan LO diakui pada saat:

1. timbulnya hak atas pendapatan; atau
2. pendapatan direalisasi.

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat:

1. diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
2. diterima oleh SKPD; atau
3. diterima entitas lain diluar Pemerintah Kota Yogyakarta atas nama BUD.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan kedalam beberapa alternatif:

1. Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan. Sedangkan untuk pendapatan LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan.
2. Pengakuan pendapatan terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO dan Pendapatan LRA ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak. Apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan sudah sesuai



dengan nilai pajak yang dibayarkan maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPD Nihil).

3. Pendapatan terkait pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima.
4. Pengakuan pendapatan adalah pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Untuk pendapatan ini maka pengakuan pendapatan LO dan pengakuan pendapatan LRA pada saat pembayaran telah diterima oleh pemerintah Kota Yogyakarta.
5. Pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD diakui sebagai pendapatan LO, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
6. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas diakui sebagai pendapatan LO, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

### C. Pengukuran

1. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
3. Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

## 2) Beban dan Belanja

### A. Definisi

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

### B. Pengakuan

Beban diakui pada saat:

1. Timbulnya kewajiban  
Timbulnya kewajiban pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Kota Yogyakarta tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
2. Terjadinya konsumsi aset



Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah kota Yogyakarta.

3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

4. Adanya pengesahan dari BUD untuk pengeluaran yang dibiayai dari Pendapatan non-APBD.

Belanja diakui pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.

2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.

3. Dalam hal badan layanan umum daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Dalam rangka pencatatan atas pengakuan beban dapat menggunakan dua pendekatan yaitu:

1. Metode pendekatan Beban

Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksudkan untuk digunakan atau dikonsumsi segera mungkin.

2. Metode pendekatan Aset

Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau sifatnya untuk berjaga jaga.

### C. Pengukuran

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan. Belanja diukur jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

### D. Penilaian

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi anggaran berdasarkan belanja langsung dan tidak langsung.

## 3) Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.





Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta Bantuan Keuangan.

Transfer dikategorikan berdasarkan sumber kejadiannya dan diklasifikasikan antara lain :

1. transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan;
2. transfer Pemerintah Pusat-Lainnya;
3. Transfer Pemerintah Provinsi;
4. Transfer / Bantuan Keuangan.

Transfer masuk diakui pada saat diterimanya kas pada RKUD dan/atau diterimanya PMK/Peraturan Menteri Keuangan/Perpres terkait dengan kurang salur maka timbul hak daerah terhadap transfer masuk.

Transfer keluar diakui pada saat diterbitkannya surat keputusan Kepala Daerah/peraturan kepala daerah maka timbul kewajiban pemerintah daerah kepada pihak lain.

Transfer masuk dinilai sebagai berikut :

- a. berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- b. hibah mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah BI.

Transfer keluar dinilai sebesar akumulasi transfer keluar yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

#### 4) Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diklasifikasi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu :

##### 1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Umum Daerah, diukur menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima.



## 2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pengeluaran pembiayaan diakui saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah, yang diukur menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

## 5) Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Kota Yogyakarta yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas dan setara kas mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran.

Kas dan setara kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari :

- a. saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening – rekening pada bank yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran;
- b. setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

## 6) Piutang

### A. Definisi

Piutang adalah hak Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/wajib retribusi/wajib bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang, dibagi atas:

- a. Pungutan

Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas:



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

---

1. Piutang Pajak Daerah ;
  2. Piutang Retribusi Daerah;
  3. Piutang Lain-lain PAD Yang Sah.
- b. Perikatan
- Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas:
1. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran;
  2. Bagian Lancar Tagihan Pemberian Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya;
  3. Bagian Lancar TPTGR;
  4. Bagian Lancar Tagihan Bagi Hasil Kemitraan;
  5. Bagian Lancar Tagihan Sewa.
- c. Transfer antar Pemerintahan
- Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas:
1. Piutang Transfer Pemerintah Pusat;
  2. Piutang Transfer Pemerintah Lainnya;
  3. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya;
- d. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
- Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri atas:
1. Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
  2. Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara;
  3. Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap pihak ketiga.

## **B. Pengakuan**

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain.

Piutang berdasarkan pungutan dapat diakui ketika:

- a. diterbitkan surat ketetapan/dokumen lain yang sah; atau
- b. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- c. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang berdasarkan perikatan yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, kerjasama, sewa, penjualan, dan kemitraan diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- b. jumlah piutang dapat diukur;
- c. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
- d. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.



Piutang transfer antar pemerintahan dapat diakui sebagai piutang apabila memenuhi kriteria:

- a. Piutang Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam diakui apabila telah diterima alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.
- b. Piutang Dana Alokasi Umum diakui apabila telah diterima alokasi Dana Alokasi Umum yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden.
- c. Piutang Dana Alokasi Khusus diakui apabila telah diterima alokasi Dana Alokasi Khusus yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.
- d. Piutang Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari provinsi diakui apabila telah diterima alokasi Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

Pemerintah Pusat mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian ketetapan pemerintah belum dapat dijadikan dasar pengakuan piutang, mengingat kepastian penyalurannya tergantung pada persyaratan-persyaratan sesuai peraturan perundangan penyaluran alokasi tersebut. Untuk itu pengakuan piutang transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Walaupun demikian, piutang transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SK Pembebanan Sementara/SKTJM /Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan).

SK Pembebanan/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang/badan/lembaga dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

### **C. Pengukuran**

1. Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:
  - a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
  - b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

---

disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak Pemerintah Kota Yogyakarta sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

2. Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

a. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Piutang yang timbul dari penjualan yang pada umumnya berasal dari peristiwa pemindahtanganan barang milik daerah.

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang ( belum dibayar ) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

b. Bagian Lancar Tagihan Pemberian Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya;

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar

pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bagi hasil, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bagi hasil pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

c. Bagian Lancar TP/TGR

Pengukuran TP/TGR dinilai sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan kedepan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan.

d. Bagian Lancar Tagihan Bagi Hasil Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

e. Bagian Lancar Tagihan Sewa

Piutang sewa dinilai berdasarkan jumlah yang tercantum dalam Perjanjian Sewa yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

a. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku dengan terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur;

b. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota Yogyakarta dengan terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur;



- c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat, tetapi belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dengan terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.
3. Pengukuran piutang tuntutan ganti kerugian daerah berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
  - a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
  - b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.
4. Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.
5. Pemberhentian Pengakuan  
Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapusbukuan (*write down*) dan penghapustagihan (*write-off*).  
Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari *intrakomptabel* menjadi *ekstrakomptabel* agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya.  
Penghapustagihan piutang adalah penghapusan hak tagih atas piutang.  
Penghapustagihan piutang dilakukan setelah penetapan penghapusbukuan piutang.
6. Penerimaan Tunai atas Piutang yang Telah Dihapusbukukan  
Penerimaan piutang yang telah dihapusbukukan dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan.

#### **D. Penilaian**

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan sesuai dengan jenis piutang, yaitu:

1. Piutang dari pungutan



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

- a. Piutang Pajak (*self assessment dan official assessment*):
  - 1) Kualitas Lancar, dengan umur piutang kurang dari atau sama dengan 1 (satu) tahun;
  - 2) Kualitas Kurang Lancar, dengan umur piutang lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun;
  - 3) Kualitas Diragukan, dengan umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
  - 4) Kualitas Macet, dengan umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun.
- b. Piutang Retribusi:
  - 1) Kualitas Lancar, umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan;
  - 2) Kualitas Kurang Lancar, umur piutang lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan;
  - 3) Kualitas Diragukan, umur piutang lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
  - 4) Kualitas Macet, umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- c. Piutang selain piutang pajak dan retribusi:
  - 1) Kualitas Lancar, umur piutang sampai dengan akhir periode pelaporan belum jatuh tempo;
  - 2) Kualitas Kurang Lancar, umur piutang 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal surat tagihan pertama;
  - 3) Kualitas Diragukan, umur piutang 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal surat tagihan kedua;
  - 4) Kualitas Macet, umur piutang 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal surat tagihan ketiga;

Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

**Tabel 4.1. Penyisihan Piutang**

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	0,5 %
2.	Kurang Lancar	10 %
3.	Diragukan	50 %
4.	Macet	100 %

Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Pada tanggal pelaporan berikutnya Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan evaluasi terhadap perkembangan kualitas piutang. Apabila kualitas piutang masih sama, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK. Apabila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya



disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat, dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

## 7) Persediaan

### A. Definisi

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kota Yogyakarta, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Kota Yogyakarta, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas yang masih dapat dimanfaatkan.
- b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih.
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur.
- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Persediaan dalam kondisi rusak atau usang atau mati tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### B. Pengakuan

Persediaan diakui dengan pendekatan beban, yaitu setiap pembelian persediaan langsung dicatat sebagai beban persediaan.

### C. Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar:

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga perolehan, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar asset atau penyelesaian kewajiban antar





pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Persediaan hewan dan tanaman yang akan dikembangkan dinilai dengan menggunakan harga perolehan.

#### **D. Sistem Pencatatan Persediaan**

Sistem pencatatan yang digunakan Metode Perpetual. Dalam metode ini, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan pada akhir bulan untuk persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk semua jenis persediaan di SKPD.

Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode masuk pertama keluar pertama atau *First In First Out (FIFO)*.

Pada akhir periode pengurus barang melakukan Penghitungan fisik (*Stock Opname*) terhadap barang dan jasa yang dibeli dan belum digunakan.

### **8) Investasi**

#### **A. Definisi**

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Berdasarkan jangka waktunya, investasi dibagi menjadi:

##### **1. Investasi Jangka Pendek**

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Investasi jangka pendek digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana Pemerintah Kota Yogyakarta dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan kas.

##### **2. Investasi Jangka Panjang**

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

###### **a. Investasi Jangka Panjang Nonpermanen**

Investasi jangka panjang nonpermanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

###### **b. Investasi Jangka Panjang Permanen**

Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.



Tabel 4.2. Klasifikasi Investasi

Investasi Jangka Pendek	Investasi dalam Deposito
	Investasi Jangka Pendek Lainnya
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	Dana Bergulir
Investasi Jangka Panjang Permanen	Penyertaan Modal Kepada BUMD
	Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Swasta

### B. Pengakuan

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memungkinkan Pemerintah Kota Yogyakarta memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
- b. nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

### C. Pengukuran

1. Pengukuran investasi jangka pendek:
  - a. Investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominalnya:
  - b. Investasi dalam bentuk investasi jangka pendek lainnya:
    1. Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
    2. Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.
2. Pengukuran investasi jangka panjang:
  - a. Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*)
  - b. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, dinilai sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi.
3. Investasi non permanen dana bergulir  
Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.  
Penggolongan kualitas dana bergulir merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota



Yogyakarta. Kualitas dana bergulir didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan dana bergulir adalah kualitas dana bergulir, sebagai berikut :

- 1) Kualitas Lancar, umur piutang sampai dengan akhir periode pelaporan belum jatuh tempo;
- 2) Kualitas Kurang Lancar, umur piutang1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama;
- 3) Kualitas Diragukan, umur piutang1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua;
- 4) Kualitas Macet, umur piutang1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga.

Besarnya penyisihan dana bergulir tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

**Tabel 4.3. Penyisihan Dana Bergulir**

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	0,5 %
2.	Kurang Lancar	10 %
3.	Diragukan	50 %
4.	Macet	100 %

4. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi Pemerintah Kota Yogyakarta, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
5. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

#### **D. Metode Penilaian Investasi**

Penilaian investasi Pemerintah Kota Yogyakarta dilakukan dengan tiga metode yaitu:

##### **1. Metode biaya**

Investasi Pemerintah Kota Yogyakarta yang dinilai menggunakan metode biaya dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

##### **2. Metode ekuitas**

Investasi Pemerintah Kota Yogyakarta yang dinilai menggunakan metode ekuitas dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan Pemerintah Kota Yogyakarta setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima Pemerintah Kota Yogyakarta, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi Pemerintah Kota Yogyakarta



dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi Pemerintah Kota Yogyakarta, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Investasi Pemerintah Kota Yogyakarta yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. Kepemilikan sampai dengan 50% menggunakan metode biaya.
- b. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
- c. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

## 9) Aset Tetap

### A. Definisi

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kota Yogyakarta atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Kota Yogyakarta dan dalam kondisi siap pakai.

2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Kota Yogyakarta dan dalam kondisi siap pakai.

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah/Pemerintah Kota Yogyakarta serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dan dalam kondisi siap pakai.

5. Aset Tetap Lainnya



Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Kota Yogyakarta dan dalam kondisi siap pakai.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

## B. Pengakuan

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. berwujud;
- b. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- c. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
- f. merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;

Batasan nilai kapitalisasi untuk peralatan dan mesin sebesar Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan untuk gedung dan bangunan sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah)

Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap di atas akan diperlakukan sebagai persediaan atau aset lainnya.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Kota Yogyakarta tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

## C. Pengukuran

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

#### 1. Komponen Biaya

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Berikut adalah biaya-biaya yang dapat diatribusikan pada aset tetap:

**Tabel 4.4. Biaya-biaya yang dapat Distribusi**

No	Jenis Aset	Biaya yang Dikapitalisasikan
1	Tanah	<ul style="list-style-type: none"><li>- harga pembelian atau biaya pembebasan tanah</li><li>- biaya appraisal/penilai harga tanah</li><li>- biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak/ biaya pembuat sertifikat, (pengukuran, permohonan sk, pembelian tanda batas)</li><li>- biaya pelepasan (1% dari harga beli)</li><li>- biaya pematangan, (dalam rangka penyiapan lahan)</li><li>- Ijin Peruntukan Lahan (IPL)</li><li>- honor panitia pengadaan, panitia penerima ,tim musyawarah/negosiasi.</li><li>- Biaya Sosialisasi.</li></ul>
2	Peralatan dan mesin	<ul style="list-style-type: none"><li>- harga pembelian</li><li>- biaya pengangkutan/distribusi</li><li>- biaya instalasi/pemasangan</li><li>- biaya pengadaan/lelang (dokumen, pengumuman, perjalanan dinas,)</li></ul>



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Jenis Aset	Biaya yang Dikapitalisasikan
		<ul style="list-style-type: none"><li>- pajak</li><li>- honor panitia/pejabat pengadaan serta penerima.</li></ul>
3	Gedung dan bangunan	<ul style="list-style-type: none"><li>- biaya pematangan lahan dalam rangka pembangunan gedung</li><li>- biaya pengadaan/lelang (dokumen, pengumuman, perjalanan dinas,)</li><li>- harga pembelian atau biaya konstruksi,</li><li>- biaya perencanaan, pengawasan, konsultan (AMDAL, UKL/UPL)</li><li>- biaya pengurusan IMBB</li><li>- pajak,</li><li>- honor panitia/pejabat pengadaan serta penerima.</li><li>- Biaya Sosialisasi.</li></ul>
4	Jalan, Irigasi dan jaringan	<ul style="list-style-type: none"><li>- biaya pematangan lahan dalam rangka pembangunan Jalan, Irigasi dan jaringan</li><li>- biaya pengadaan/lelang (dokumen, pengumuman, perjalanan dinas,)</li><li>- biaya perolehan atau biaya konstruksi,</li><li>- biaya perencanaan, pengawasan, konsultan</li><li>- pajak</li><li>- honor panitia/pejabat pengadaan serta penerima.</li><li>- Biaya Sosialisasi.</li></ul>
5	Aset tetap lainnya	<ul style="list-style-type: none"><li>- harga pembelian,</li><li>- biaya pengangkutan/distribusi</li><li>- biaya pengadaan/lelang (dokumen, pengumuman, perjalanan dinas, dll)</li><li>- pajak,</li><li>- honor panitia/pejabat pengadaan serta penerima.</li></ul>
6	Konstruksi dalam pengerjaan	<ul style="list-style-type: none"><li>- biaya pematangan lahan dalam rangka pembangunan gedung</li><li>- biaya pengadaan/lelang (dokumen, pengumuman, perjalanan dinas, dll)</li><li>- harga pembelian atau biaya konstruksi,</li><li>- biaya perencanaan, pengawasan, konsultan (AMDAL, UKL/UPL)</li></ul>



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Jenis Aset	Biaya yang Dikapitalisasikan
		<ul style="list-style-type: none"><li>- biaya pengurusan IMBB</li><li>- pajak,</li><li>- honor panitia/pejabat pengadaan serta penerima.</li><li>- Biaya Sosialisasi.</li></ul>

Pembebanan atribusi dilakukan secara proposional berdasarkan harga pembelian per unit barang.

Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

## 2. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

## 3. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

## 4. Pertukaran Aset

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperolehnya itu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

## 5. Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

## 6. Pengeluaran Setelah Perolehan

Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

(1) Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara: (a) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau (b) bertambah umur ekonomis, dan/atau (c) bertambah volume, dan/atau (d) bertambah kapasitas produksi.

(2) Nilai pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut harus sama dengan atau melebihi nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap. Nilai satuan





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

---

minimum kapitalisasi adalah penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi.

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul*, renovasi dan restorasi disajikan pada tabel sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

7. Pengukuran berikutnya terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan berdasarkan ketentuan pemerintah pusat yang berlaku secara nasional untuk penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

8. Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Metode penyusutan yang digunakan adalah Metode Garis Lurus (*straight line method*) dan dihitung secara tahunan tanpa nilai residu.

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Aset Tetap Lainnya berupa buku perpustakaan, barang bersifat kebudayaan serta hewan, ternak dan tanaman tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut tidak dapat digunakan atau mati. Untuk penyusutan atas Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

9. Aset Bersejarah

Aset bersejarah disajikan dalam bentuk unit pada Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

10. Penghentian dan Pelepasan

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.



Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kota Yogyakarta tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

11. Penghapusbukuan Aset Tetap

Penghapusbukuan aset tetap dilakukan setelah diterbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kota Yogyakarta direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

**10) Konstruksi dalam Pengerjaan**

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset – aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.

Suatu aset berwujud diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- a. besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b. biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- c. aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
- b. dapat memberikan manfaat / jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi :

- a. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- b. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- c. biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya – biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi :

- a. biaya pekerjaan lapangan termasuk penyelia;
- b. biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
- c. biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan – bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
- d. biaya penyewaan sarana dan peralatan;



- e. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

Biaya - biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi :

- a. asuransi;
- b. biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
- c. biaya - biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Metode alokasi biaya yang digunakan adalah metode rata – rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- a. termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- b. kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
- c. pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Kontraktor meliputi kontraktor utama dan kontraktor lainnya. Pembayaran atas kontrak konstruksi yang dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi dicatat sebagai penambah nilai konstruksi dalam pengerjaan.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.

Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.

Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan.

## 11) Dana Cadangan

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya, yang didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya.

Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah. Pembentukan dana cadangan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah. Dana cadangan diakui saat terjadi perpindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke rekening Dana Cadangan. Proses pemindahan melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS, terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal. Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan –LRA dalam pos lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

## 12) Aset Lainnya

### A. Definisi

Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Kota Yogyakarta yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi Pemerintah Kota Yogyakarta karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan.

Aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 4.5. Klasifikasi Aset Lainnya

Tagihan Jangka Panjang	Tagihan Penjualan Angsuran
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Sewa
	Kerjasama Pemanfaatan
	Bangun Guna Serah
	Bangun Serah Guna
Aset Tidak Berwujud	Lisensi
	Hak Cipta
	Hak Paten
	Aset Tidak Berwujud Lainnya
Aset Lain-lain	Aset Lain-Lain

### B. Pengakuan

#### 1. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

##### a. Tagihan Penjualan Angsuran



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

---

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Kota Yogyakarta secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah Pemerintah Kota Yogyakarta.

b. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Ketetapan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM)/ Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan ini dapat berupa:

a. Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.

b. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).

c. Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*)

Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset Pemerintah Kota Yogyakarta oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada Pemerintah Kota Yogyakarta setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

d. Bangun Serah Guna– BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*)

Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset Pemerintah Kota Yogyakarta oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada Pemerintah Kota Yogyakarta untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/ investor



kepada Pemerintah Kota Yogyakarta disertai dengan kewajiban Pemerintah Kota Yogyakarta untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh Pemerintah Kota Yogyakarta ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

### 3. Aset Tidak Berwujud (ATB)

Aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

#### a. Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

#### b. Hak Cipta

Hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual berupa suatu karya seni yang dapat menghasilkan manfaat bagi Pemerintah Kota Yogyakarta.

Ciptaan tersebut dapat mencakup puisi, drama, serta karya tulis lainnya, film, karya-karya koreografis (tari, balet, dan sebagainya), komposisi musik, rekaman suara, lukisan, gambar, patung, foto, perangkat lunak komputer, siaran radio dan televisi, dan (dalam yurisdiksi tertentu) desain industri.

#### c. Hak Paten

Hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis yang dapat menghasilkan manfaat bagi Pemerintah Kota Yogyakarta. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

#### d. Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada, antara lain:

##### 1) Royalti

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

##### 2) Software

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. Software yang diakui sebagai ATB



memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas software berkenaan.

3) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

4) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan.

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika:

- a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas Pemerintah Kota Yogyakarta atau dinikmati oleh entitas; dan
- b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

4. Aset Lain-lain

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kota Yogyakarta direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kota Yogyakarta. Untuk penghentian penggunaan aset tetap berdasarkan SK Kepala Daerah tentang penghapusan aset tetap.

### C. Pengukuran

1. Tagihan Jangka Panjang

a. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

a. Sewa

Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak

b. Kerjasama Pemanfaatan (KSP)



Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

c. Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*)

BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.

d. Bangun Serah Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*)

BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan Pemerintah Kota Yogyakarta ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

3. Aset Tidak Berwujud

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas Pemerintah Kota Yogyakarta untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas Pemerintah Kota Yogyakarta.

Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:

- a. Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
- b. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
  - a. biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
  - b. biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
  - c. biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

- a. Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
- b. Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.
- c. Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

4. Aset Lain-lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kota Yogyakarta, direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

**AMORTISASI**

Terhadap aset tidak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tidak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dan dilakukan setiap akhir periode pelaporan serta dihitung secara tahunan tanpa nilai residu.

**Tabel 4.6. Amortisasi**

Kodifikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	ASET TIDAK BERWUJUD (ATB)	
1	Lisensi	Sesuai perjanjian
1	Hak Cipta	Tidak terbatas
1	Hak Paten	Tidak terbatas
1	Aset Tak Berwujud Lainnya:	
	1) Royalti	Tidak terbatas
	2) Software	Tidak terbatas selama masih dipakai
	3) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang	3
	4) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan	-
	5) Aset Lain-lain	-

**13) Kewajiban**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga



internasional. Kewajiban pemerintah daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pemerintah daerah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar untuk jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (accrued interest) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai akhir periode pelaporan.

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

**BAB V**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

**5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

**5.1.1. PENDAPATAN**

	Realisasi 2019 Rp	Realisasi 2018 Rp
Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2019 terdiri dari :	<b>1.765.760.418.492,27</b>	<b>1.736.919.997.852,52</b>
<b>5.1.1. 1. PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>689.049.725.509,27</b>	<b>667.493.075.470,14</b>
Jumlah tersebut adalah realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari :		
<b>5.1.1. 1. a. Pendapatan Pajak Daerah</b>	<b>451.265.948.031,00</b>	<b>407.573.263.422,00</b>
Pajak Daerah berasal dari 10 jenis pajak yaitu:		
1) Pajak Hotel	<b>161.297.192.790,00</b>	<b>149.075.654.791,00</b>
a) Berbintang:	<b>145.827.001.540,00</b>	<b>133.514.207.130,00</b>
Bintang Lima	41.456.693.174,00	32.937.667.439,00
Bintang Empat	36.355.926.399,00	30.106.979.005,00
Bintang Tiga	43.044.652.512,00	47.239.517.115,00
Bintang Dua	16.438.946.977,00	15.002.999.959,00
Bintang Satu	8.530.782.478,00	8.227.043.612,00
b) Melati:	<b>14.256.845.917,00</b>	<b>14.654.475.563,00</b>
Melati Tiga	2.917.661.459,00	3.205.409.935,00
Melati Dua	1.692.529.032,00	1.615.704.916,00
Melati Satu	9.646.655.426,00	9.833.360.712,00
c) Losmen/Rumah penginapan/pesangrahan/rumah kos	1.213.345.333,00	906.972.098,00
<i>Jumlah Pajak Hotel</i>	<b>161.297.192.790,00</b>	<b>149.075.654.791,00</b>
2) Pajak Restoran	<b>63.237.228.654,00</b>	<b>48.312.177.110,00</b>
a) Restoran	63.164.465.780,00	48.251.646.598,00
b) Rumah Makan		
c) Kantin		
d) Warung		
e) Katering	72.762.874,00	60.530.512,00
f) Sekaten		
<i>Jumlah Pajak Restoran</i>	<b>63.237.228.654,00</b>	<b>48.312.177.110,00</b>
3) Pajak Hiburan	<b>12.702.230.080,00</b>	<b>12.594.868.046,00</b>
a) Gedung Bioskop/Tontonan Film	4.934.475.169,00	4.817.504.621,00
b) Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	186.872.200,00	152.508.030,00
c) Pameran	3.096.930.200,00	3.428.103.117,00
f) Karaoke	381.933.891,00	323.525.250,00
d) Permainan bilyar	55.287.496,00	54.767.400,00
e) Balap Kendaraan Bermotor		6.115.000,00
f) Permainan Ketangkasan	941.978.826,00	1.133.282.279,00
g) Mandi Uap/Spa	1.500.032.933,00	1.294.575.824,00
h) Pertandingan Olah Raga	334.008.073,00	65.163.375,00
i) Pusat Kebugaran	1.270.711.292,00	1.319.323.150,00
j) Insidentil		-
k) Lain-lain Pertunjukan		-
<i>Jumlah Pajak Hiburan</i>	<b>12.702.230.080,00</b>	<b>12.594.868.046,00</b>



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

	Realisasi 2019 Rp	Realisasi 2018 Rp
4) Pajak Reklame	<b>7.449.951.971,00</b>	<b>7.435.901.805,00</b>
a) Reklame papan/billboard/vidiotron/megatron	6.619.927.369,00	6.818.905.073,00
b) Reklame kain	689.606.416,00	583.839.617,00
c) Reklame melekat/stiker	-	-
d) Reklame berjalan	110.880.462,00	17.620.764,00
e) Reklame udara	1.743.750,00	-
f) Reklame baliho	-	-
g) Reklame cahaya	27.793.974,00	15.536.351,00
5) Pajak Penerangan Jalan	52.374.696.494,00	49.514.221.949,00
6) Pajak Parkir	3.050.479.181,00	3.525.732.992,00
7) Pajak Air Tanah	2.546.299.969,00	2.277.618.512,00
8) Pajak sarang Burung Walet	6.650.000,00	6.575.000,00
9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	86.550.328.189,00	76.403.636.198,00
10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	62.050.890.703,00	58.426.877.019,00
<b>5.1.1. 1. b. Pendapatan Retribusi Daerah</b>	<b>32.428.343.731,00</b>	<b>33.984.531.787,00</b>
Retribusi Daerah terdiri dari 15 (lima belas) jenis retribusi yaitu :		
1) Retribusi Pelayanan Kesehatan, :		
a) Retribusi Kesehatan Hewan	71.617.700,00	70.482.800,00
b) Laboratorium Pemeriksaan Kualitas Air	220.904.000,00	105.013.600,00
<i>Jumlah Retribusi Pelayanan Kesehatan</i>	<b>292.521.700,00</b>	<b>175.496.400,00</b>
2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	3.820.420.597,00	3.547.480.500,00
3) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	<b>123.580.000,00</b>	<b>116.535.000,00</b>
a) TPU Utoroloyo Kec. Tegalrejo	36.340.000,00	40.380.000,00
b) TPU Pracimoloyo Kec. Wirobrajan	37.580.000,00	32.620.000,00
c) TPU Sariloyo Kec. Mantrijeron	35.230.000,00	14.340.000,00
d) TPU Sasonoloyo Kec. Mergangsan	14.430.000,00	29.195.000,00
4) Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum	<b>6.562.625.000,00</b>	<b>6.497.892.000,00</b>
a) TJU ( Dinas Perhubungan)	6.562.625.000,00	6.477.892.000,00
b) TJU ( UPT Malioboro)	-	-
c) Parkir PMPS (Kec. Gondomanan)	-	20.000.000,00
5) Retribusi Pasar, :	<b>14.788.015.434,00</b>	<b>14.096.442.567,00</b>
a) Kios	4.870.986.995,00	4.480.198.079,00
b) Los	3.122.546.567,00	3.093.845.200,00
c) Lapak	443.506.402,00	456.464.121,00
d) Gudang (tempat penyimpanan barang)	38.604.000,00	38.313.000,00
e) Siaran Radio	6.372.000,00	6.327.000,00
f) Bongkar Muat	321.556.000,00	318.913.400,00
g) Kamar Mandi	1.005.163.400,00	998.731.200,00
h) Parkir	3.200.427.500,00	2.984.150.400,00
-Tempat Khusus Parkir(TKP)	2.548.304.000,00	2.305.105.000,00
-Parkir Tepi Jalan Umum(TJU)	652.123.500,00	679.045.400,00
i) Sewa Lahan	1.077.777.467,00	1.178.111.289,00
j) Pemakaian Listrik		
k) Penerimaan piutang	701.075.103,00	541.388.878,00
l) Pendapatan lain-lain		
<i>Jumlah Retribusi Pasar</i>	<b>14.788.015.434,00</b>	<b>14.096.442.567,00</b>
6) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	830.330.000,00	841.270.000,00
7) Retribusi Pengolahan Limbah Cair	791.072.500,00	690.682.500,00
8) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	67.880.000,00	89.485.000,00



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

	Realisasi 2019 Rp	Realisasi 2018 Rp
9) Retribusi Terminal :		
a) Bus Cepat		-
b) Bus AKDP		-
c) Retribusi Bus Perkotaan		-
d) Parkir Bus		-
e) Jasa Ruang Tunggu		-
f) Parkir Pengunjung		-
g) Penitipan Barang		-
<i>Jumlah Retribusi Terminal</i>	-	-
10) Retribusi Tempat Khusus Parkir	<b>1.581.164.000,00</b>	<b>1.479.926.640,00</b>
a) - Dikelola Dinas Perhubungan	552.826.000,00	541.500.240,00
b) - Dikelola UPT Malioboro	1.028.338.000,00	938.426.400,00
11) Retribusi Rumah Potong Hewan, :		
a) Ongkos Periksa		
b) Sewa Kandang Peristirahatan		
c) Sewa Tempat Pemotongan		
d) Pemakaian Pelayuan Daging		
e) pemotongan	89.685.000,00	119.170.000,00
f) Periksa Hewan Betina		-
g) Pemeriksaan Hasil Monitoring Daging		-
<i>Jumlah Retribusi Rumah Potong Hewan</i>	<b>89.685.000,00</b>	<b>119.170.000,00</b>
12) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, terdiri dari :	<b>298.213.000,00</b>	<b>247.779.000,00</b>
a) Kebun Hortikultura	26.200.500,00	23.807.000,00
b) Kebun Bibit Tegalrejo	50.822.400,00	52.990.000,00
c) Kebun Bibit Giwangan	27.385.600,00	50.400.000,00
d) Kebun Plasma Nutfah Pisang	38.109.500,00	35.822.000,00
e) Balai Benih Ikan Mendungan	12.760.000,00	12.660.000,00
f) Balai Benih Ikan Nitikan	12.435.000,00	12.250.000,00
f) PASTY Sub Raiser	130.500.000,00	59.850.000,00
<i>Jumlah Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah</i>	<b>298.213.000,00</b>	<b>247.779.000,00</b>
13) Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	<b>2.961.112.800,00</b>	<b>5.663.602.000,00</b>
a) - IMB (Dinas Penanaman Modal dan Perizinan)	2.958.873.500,00	5.645.830.300,00
b) - IMB Kecamatan	2.239.300,00	17.771.700,00
14) Retribusi Ijin Gangguan		-
a) - HO (Dinas Penanaman Modal dan Perizinan)		-
b) - HO Kecamatan		-
15) Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing/IMTA	221.723.700,00	418.770.180,00
<b>5.1.1. 1. c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar</b>	<b>28.975.003.950,01</b>	<b>28.032.365.012,83</b>
Terdiri dari :		
1) PD Air Minum Tirtamarta	802.301.741,50	1.407.116.860,00
2) PD BPR Bank Jogja	9.754.106.355,00	8.126.342.383,00
3) Bank Pembangunan Daerah DIY sebesar Rp 18.340.935.744,08 berupa :		
a) Deviden	18.340.935.744,08	18.169.713.459,02
b) Dana Pembangunan		-
		18.169.713.459,02
4) Laba BUKP	57.146.041,43	36.457.074,81
5) PD Jogjatama vishesha	20.514.068,00	292.735.236,00
<i>Jumlah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</i>	<b>28.975.003.950,01</b>	<b>28.032.365.012,83</b>



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

	Realisasi 2019 Rp	Realisasi 2018 Rp
<b>51.1. 1. d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar</b>	<b>176.380.429.797,26</b>	<b>197.902.915.248,31</b>
Terdiri dari :		
1) Hasil Penjualan Barang Milik Daerah	<b>1.102.674.651,00</b>	<b>721.690.685,00</b>
a) Penjualan peralatan/perlengkapan kantor tak terpakai	6.524.600,00	5.257.700,00
b) Penjualan kendaraan dinas roda dua	149.429.114,00	82.223.211,00
c) Penjualan kendaraan dinas roda empat	378.794.887,00	534.409.774,00
d) Penjualan bahan-bahan bekas bangunan	567.926.050,00	99.800.000,00
2) <b>Jasa Giro sebesar Rp 3.044.745.330,00 berupa :</b>	<b>3.044.745.330,00</b>	<b>2.929.084.860,00</b>
a) Jasa giro Kasda	2.841.918.466,00	2.678.811.442,00
b) Jasa giro kantor/Dinas/Bagian	87.928.262,00	170.587.918,00
c) Jasa giro BOS	114.898.602,00	79.685.500,00
- Jasa giro BOS TK	11.445.215,00	541,00
- Jasa giro BOS SD	61.852.002,00	31.243.922,00
- Jasa giro BOS SMP	41.601.385,00	48.441.037,00
3) Pendapatan Bunga Deposito	<b>17.190.898.900,68</b>	<b>18.877.677.446,90</b>
a) Rekening Deposito pada PT. Bank BPD DIY	6.870.833.362,00	7.801.458.335,00
b) Rekening Deposito pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	2.972.732.876,68	3.156.910.958,90
c) Rekening Deposito pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	795.073.094,00	2.661.267.127,00
d) Rekening Deposito pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	2.699.622.628,00	1.887.119.052,00
e) Rekening Deposito pada PT. Bank Bukopin Tbk.	2.742.773.927,00	1.629.972.551,00
f) Rekening Deposito pada PT. Bank Mega Tbk.	1.045.102.739,00	669.803.015,00
g) Rekening Deposito pada PT. Bank OCBC NISP Tbk.		112.946.519,00
h) Rekening Deposito pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah		958.199.889,00
i) Rekening Deposito pada PT. Bank Sinarmas	64.760.274,00	
4) Penerimaan Ganti Rugi atas Kerugian Daerah (TP/TGR)	1.070.000,00	27.223.700,00
5) Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Daerah	444.576.214,65	73.795.789,83
6) Denda Pajak	<b>2.856.472.125,00</b>	<b>2.572.122.842,00</b>
a) Pendapatan denda pajak hotel	951.234.380,00	157.224.526,00
b) Pendapatan denda pajak Restoran	204.992.277,00	18.424.131,00
c) Pendapatan denda pajak Hiburan	12.594.604,00	1.618.916,00
d) Pendapatan denda pajak Reklame	27.678.106,00	43.573.216,00
e) Pendapatan denda pajak Parkir	3.251.045,00	1.026.919,00
f) Pendapatan denda pajak Air Tanah	48.026.286,00	14.027.052,00
g) Pendapatan denda pajak Bumi dan Bangunan	1.608.695.427,00	2.336.228.082,00
7) Denda retribusi Jasa Umum (Dinas Perhubungan)	<b>418.284.200,00</b>	<b>417.814.600,00</b>
8) Setoran pendapatan dari pengembalian berasal dari:	<b>4.942.923.617,32</b>	<b>1.812.720.991,49</b>
a) Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	73.502.093,00	170.832.129,00
b) Setoran Kelebihan Pembayaran Hasil Pemeriksaan	221.916.930,55	1.068.063.618,08
c) setoran kelebihan pembayaran kpd Pihak Ketiga		-
d) Penerimaan Sisa dari realisasi belanja		-
e) Pendapatan dari pengembalian hibah	788.434.661,00	133.306.478,00
f) Pendapatan dari pengembalian lainnya	3.859.069.932,77	440.518.766,41
- Pendapatan dari pengembalian Selain Hibah		228.499.787,41
- Pendapatan Lain- lain dari Dana BOS	181.882.863,00	212.018.979,00
Pendapatan Lain- lain dari Dana BOS SD	114.014.732,00	99.114.576,00
Pendapatan Lain- lain dari Dana BOS SMP	67.868.131,00	112.904.403,00
9) Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum		-



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

	Realisasi 2019 Rp	Realisasi 2018 Rp
10) Pendapatan dari Barang Milik Daerah	<b>1.903.049.400,00</b>	<b>930.758.600,00</b>
a) Sewa Lahan Terminal		-
b) Sewa penginapan awak bus		-
c) Sewa Hotel Terminal		-
d) Sewa Kantin Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor	6.000.000,00	6.000.000,00
e) Sewa Gedung sebesar Rp 1.653.159.400,00 berasal dari :	<b>1.653.159.400,00</b>	<b>661.868.600,00</b>
- Dinas Pendidikan / Edotel		
- Dinas Kimpraswil/ Rusunawa	360.797.600,00	322.425.600,00
- BPKAD	1.292.361.800,00	339.443.000,00
f) Penerimaan dari Fihak Ketiga yang Bukan Perusahaan Daerah sebesar Rp		
- Hotel Kayu Manis (Pesanggrahan Ngestilaras)	5.000.000,00	24.000.000,00
- PT Bumi Kusuma Santosa (Reksa Arcade)	238.890.000,00	238.890.000,00
<i>Jumlah Penerimaan dari Fihak Ketiga yang Bukan Perusahaan Daerah</i>	<b>243.890.000,00</b>	<b>262.890.000,00</b>
11) Pendapatan BLUD Taman Pintar	14.784.210.000,10	15.829.150.378,00
12) Pendapatan BLUD RSUD	78.121.244.026,00	109.123.120.406,00
13) Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis	5.666.389.889,20	5.406.580.780,00
14) Pendapatan BLUD Puskesmas	<b>25.678.328.467,00</b>	<b>24.676.926.660,00</b>
a) Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 1	917.445.181,00	912.674.219,00
b) Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 2	666.722.318,00	676.727.464,00
c) Pendapatan BLUD Puskesmas Gedongtengen	1.450.086.067,00	1.401.513.674,00
d) Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 1	1.476.785.639,00	1.369.693.169,00
e) Pendapatan BLUD Puskesmas Gonokusuman 2	750.606.900,00	690.073.197,00
f) Pendapatan BLUD Puskesmas Gondomanan	940.618.405,00	916.211.877,00
g) Pendapatan BLUD Puskesmas Jetis	2.468.366.677,00	2.300.832.838,00
h) Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 1	1.432.076.445,00	1.402.238.262,00
i) Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 2	867.517.084,00	833.020.356,00
j) Pendapatan BLUD Puskesmas Kraton	1.157.756.583,00	1.096.317.713,00
k) Pendapatan BLUD Puskesmas Manrijeron	2.187.601.068,00	2.129.650.821,00
l) Pendapatan BLUD Puskesmas Mergangsan	1.759.944.631,00	1.738.700.668,00
m) Pendapatan BLUD Puskesmas Ngampilan	906.812.748,00	801.256.929,00
n) Pendapatan BLUD Puskesmas Pakualaman	694.222.526,00	716.896.783,00
o) Pendapatan BLUD Puskesmas Tegalrejo	2.783.868.741,00	2.640.518.247,00
p) Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 1	2.444.883.790,00	2.346.641.014,00
q) Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 2	1.108.730.432,00	1.087.512.160,00
r) Pendapatan BLUD Puskesmas Wirobrajan	1.664.283.232,00	1.616.447.269,00
15) Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama	15.422.522.731,29	9.323.512.431,56
16) Pendapatan BLUD UPT Logam	502.276.911,00	360.451.566,00
17) Denda Hasil Operasi Yustisi	129.384.000,00	98.673.000,00
18) Pendapatan BUKP	<b>23.577.042,02</b>	<b>13.829.080,53</b>
a) Dana BUKP Pembinaan BUKP	13.472.595,43	7.766.288,87
b) Jasa Produksi BUKP	10.104.446,59	6.062.791,66
19) Penyelenggaraan Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS)	-	1.012.560.000,00
20) Jaminan Bongkar	368.843.986,00	511.483.818,00
21) Penerimaan Pendapatan Terminal	-	-
22) Sewa Media Reklame	-	-



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

	Realisasi 2019 Rp	Realisasi 2018 Rp
23) Pendapatan Bunga Pajak	<b>2.126.474.511,00</b>	<b>1.323.707.357,00</b>
a) Pendapatan Bunga Pajak Hotel	1.682.068.421,00	1.024.080.733,00
b) Pendapatan Bunga Pajak Restoran	369.379.390,00	205.136.508,00
c) Pendapatan Bunga Pajak Hiburan	42.979.615,00	56.298.974,00
d) Pendapatan Bunga Pajak Reklame	-	949.598,00
e) Pendapatan Bunga Pajak Parkir	30.994.467,00	37.042.044,00
f) Pendapatan Bunga Pajak Air Tanah	969.618,00	-
g) Pendapatan Bunga Pajak Sarang Burung Walet	83.000,00	199.500,00
24) Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum (Din. Perindag)	36.543.594,00	24.212.556,00
25) Pendapatan denda administrasi	-	<b>177.000.000,00</b>
a) Denda Retribusi Penggantian Biaya KTP	-	70.500.000,00
b) Denda Retribusi Penggantian Biaya Akte Catatan Sipil	-	106.500.000,00
26) Pendapatan dari Pembayaran Listrik	1.615.940.201,00	1.658.817.700,00
Pendapatan dari Pembayaran Listrik Pasar	1.593.771.300,00	
Denda Listrik Pasar	22.168.901,00	
27) Bagi Hasil Laba Koperasi Pola Syariah		-
<i>Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</i>	<b>176.380.429.797,26</b>	<b>197.902.915.248,31</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>689.049.725.509,27</b>	<b>667.493.075.470,14</b>
	Realisasi 2019 Rp	Realisasi 2018 Rp
<b>5.1.1. 2. PENDAPATAN TRANSFER SEBESAR</b>	<b>1.075.256.692.983,00</b>	<b>1.069.426.922.382,38</b>
Jumlah tersebut adalah realisasi penerimaan pendapatan Transfer yang terdiri dari :		
<b>5.1.1. 2. a. Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</b>	<b>875.308.177.702,00</b>	<b>867.706.455.745,00</b>
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan terdiri dari :		
<b>1) Dana Bagi Hasil Pajak, yaitu :</b>		
a) Pajak Bumi dan Bangunan, terdiri dari :	3.756.108.600,00	4.378.723.400,00
(1) PBB migas		
(2) Upah Pungut PBB		-
(3) Pengembalian PBB Bagian Pemerintah Pusat	3.756.108.600,00	4.378.723.400,00
(4) Pertambangan		-
b) Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	23.314.737.000,00	40.350.210.890,00
<i>Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak</i>	<b>27.070.845.600,00</b>	<b>44.728.934.290,00</b>
<b>2) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam</b>		
a) Provisi Sumber Daya Hutan	1.782.000,00	10.887.816,00
b) Sumberdaya Alam Perikanan	590.155.800,00	701.234.591,00
c) Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau	1.312.539.000,00	1.237.323.000,00
<i>Jumlah Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam</i>	<b>1.904.476.800,00</b>	<b>1.949.445.407,00</b>
<b>3) Dana Alokasi Umum</b>	<b>700.372.564.000,00</b>	<b>658.504.186.000,00</b>





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

	Realisasi 2019 Rp	Realisasi 2018 Rp
<b>4) Dana Alokasi Khusus</b>	<b>145.960.291.302,00</b>	<b>162.523.890.048,00</b>
<b>a) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik</b>	<b>49.435.128.281,00</b>	<b>59.044.361.492,00</b>
(1) DAK Fisik Bidang Pelayanan Dasar		-
(2) DAK Fisik Bidang Pelayanan Rujukan	17.192.622.745,00	35.057.518.412,00
(3) DAK Fisik Bidang Pelayanan Kefarmasian	879.491.267,00	366.642.600,00
(4) DAK Fisik Bidang Keluarga Berencana	407.900.000,00	454.982.000,00
(5) DAK Fisik Bidang Lingkungan Hidup	279.390.000,00	29.695.000,00
(6) DAK Pelayanan Kesehatan Dasar	4.011.013.033,00	5.922.168.480,00
(7) DAK Peralatan Pendukung Imunisasi		679.480.000,00
(8) DAK Perumahan dan Permukiman	3.211.800.000,00	3.107.599.000,00
(9) DAK Infrastruktur Pemerintah Daerah (Jalan)	8.831.592.700,00	13.426.276.000,00
(10) DAK Bidang Pendidikan	2.511.579.488,00	
(11) DAK Pengendalian Penyakit	482.054.000,00	
(12) DAK Sanitasi	2.477.808.148,00	
(13) DAK Jalan	9.149.876.900,00	
<b>b) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik</b>	<b>96.525.163.021,00</b>	<b>103.479.528.556,00</b>
(1) DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	6.538.805.819,00	11.345.237.915,00
(2) DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru PNSD	72.251.345.280,00	81.851.401.930,00
(3) DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan	9.852.341.533,00	7.629.437.786,00
(4) DAK Non Fisik Akreditasi Rumah Sakit		-
(5) DAK Non Fisik Akreditasi Puskesmas	562.320.000,00	-
(6) DAK Non Fisik Jaminan Persalinan	499.000.000,00	-
(7) DAK Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana	1.213.769.008,00	1.488.878.800,00
(8) DAK Non Fisik Pelayanan Admuduk	1.273.243.381,00	1.164.572.125,00
(9) DAK Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	3.041.300.000,00	-
(10) DAK Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	380.000.000,00	-
(12) DAK Dana Pelayanan Kepariwisata	913.038.000,00	-
<b>Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</b>	<b>875.308.177.702,00</b>	<b>867.706.455.745,00</b>
<b>5.1.1. 2. b. Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</b>	<b>65.318.639.000,00</b>	<b>74.751.792.000,00</b>
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya terdiri dari :		
<b>1) Dana Otonomi Khusus</b>		-
<b>2) Dana Keistimewaan</b>		-
<b>3) Dana Penyesuaian, yaitu :</b>	<b>65.318.639.000,00</b>	<b>42.500.000.000,00</b>
a) Tunjangan Profesi Guru PNSD		-
b) Dana Tambahan Penghasilan bagi PNSD		-
c) Dana Insentif Daerah	35.760.859.000,00	42.500.000.000,00
d) Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Provinsi		-
e) Bantuan Operasional Sekolah	29.557.780.000,00	-
<b>BOSN</b>	<b>29.557.780.000,00</b>	-
BOSN SD	17.546.580.000,00	-
BOSN SMP	12.011.200.000,00	-
<b>BOS Prov</b>	-	-
BOS Prov SD		-
BOS Prov SMP		-
<b>4) Pendapatan Hibah</b>	-	32.251.792.000,00
<b>Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</b>	<b>65.318.639.000,00</b>	<b>74.751.792.000,00</b>



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

	Realisasi 2019 Rp	Realisasi 2018 Rp
<b>5.1.1. 2. c. Transfer Pemerintah Provinsi</b>	<b>134.629.876.281,00</b>	<b>126.968.674.637,38</b>
<b>1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak</b>		
Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi yang dianggarkan dalam Lain-Lain Pendapatan yang Sah, yang terdiri dari :		
a) Pajak Kendaraan Bermotor	50.129.201.000,00	45.178.005.768,33
b) Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	29.834.114.000,00	29.367.356.094,00
c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	32.990.808.000,00	32.080.286.732,56
d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah		-
e) Penyisihan Pajak Bumi dan Bangunan		-
f) Bagi hasil Pajak air permukaan	35.818.000,00	13.915.136,64
g) Bagi hasil Pajak Rokok Kota Yogyakarta	20.403.935.281,00	19.797.868.905,85
<b>Jumlah Pendapatan Bagi Hasil Pajak</b>	<b>133.393.876.281,00</b>	<b>126.437.432.637,38</b>
<b>2) Pendapatan Bagi Hasil Lainnya</b>		-
<b>3) Pendapatan Lainnya</b>		
Pendapatan Lainnya sebesar Rp 1.236.000.000,00 berupa Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya yang terdiri dari :		
Bantuan Keuangan kepada Kota Yogyakarta	1.236.000.000,00	531.242.000,00
- Bantuan Keuangan UEP PKH	450.000.000,00	138.000.000,00
- Bantuan Keuangan Pembangunan Jamban	270.000.000,00	200.000.000,00
- Bantuan Keuangan Padat Karya Infrastruktur	516.000.000,00	193.242.000,00
Bantuan untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa		-
<b>Jumlah Pendapatan Lainnya</b>	<b>1.236.000.000,00</b>	<b>531.242.000,00</b>
<b>Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi</b>	<b>134.629.876.281,00</b>	<b>126.968.674.637,38</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.075.256.692.983,00</b>	<b>1.069.426.922.382,38</b>
<b>5.1.1. 3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>		-
Jumlah tersebut adalah realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri dari :		
<b>5.1.1. 3. a. Pendapatan Hibah</b>	1.454.000.000,00	-
<b>5.1.1. 3. b. Pendapatan Dana Darurat</b>		-
<b>5.1.1. 3. c. Pendapatan Lainnya</b>		-
<b>JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>1.454.000.000,00</b>	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.765.760.418.492,27</b>	<b>1.736.919.997.852,52</b>



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

5.1.2. BELANJA

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2019 berdasarkan kelompok Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer adalah sebagai berikut :

	Realisasi 2019 Rp	Realisasi 2018 Rp
<b>5.1.2. 1. BELANJA OPERASI</b>	<b>1.404.860.023.602,17</b>	<b>1.325.013.862.715,42</b>
Realisasi Belanja Operasi terdiri dari :		
a. Belanja Pegawai	<b>760.532.062.428,28</b>	<b>767.231.708.627,85</b>
1) Belanja gaji dan Tunjangan	436.621.717.756,00	432.983.322.309,00
2) Tambahan Penghasilan PNS	159.916.722.770,00	176.225.862.950,00
3) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	8.034.863.866,00	7.960.792.132,00
4) Insentif Pemungutan Pajak	17.955.781.100,00	16.443.174.813,00
5) Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.201.160.702,00	1.511.168.715,00
6) Belanja Pegawai BLUD		-
7) Uang Lembur	488.610.000,00	19.580.000,00
8) Belanja Pegawai Dana BOS	14.384.532.150,00	10.421.507.318,00
9) Uang Piket	3.926.830.000,00	3.528.499.876,00
10) Uang Kelayan Panti	194.313.000,00	179.286.000,00
11) Honorarium Pelaksana Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)		1.663.798.450,00
12) Honorarium PNS	47.374.814.794,00	52.858.420.788,00
13) Honorarium Non PNS	70.432.716.290,28	63.436.295.276,85
b. Belanja Barang dan Jasa	<b>553.387.490.228,89</b>	<b>496.351.994.037,57</b>
1) Belanja Barang dan jasa BLUD		
2) Belanja Bahan Pakai Habis	11.604.198.793,09	14.769.311.954,89
3) Belanja Bahan/Material	74.534.130.906,60	70.491.038.819,61
4) Belanja Jasa Kantor	126.676.178.553,21	133.189.740.987,65
5) Belanja Premi Asuransi	33.676.690.310,15	11.613.776.772,64
6) Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.632.609.387,90	9.626.609.230,23
7) Belanja Cetak dan Penggandaan	12.936.477.782,00	14.912.294.850,00
8) Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.155.517.000,00	4.942.011.230,00
9) Belanja Sewa Sarana Mobilitas	443.110.000,00	865.644.462,00
10) Belanja Sewa Alat Berat	26.500.000,00	10.200.000,00
11) Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.154.363.805,00	8.747.557.969,00
12) Belanja Makanan dan Minuman	47.059.512.084,25	46.311.308.389,00
13) Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1.745.343.524,00	1.622.925.950,00
14) Belanja Pakaian Kerja	1.776.853.795,00	1.483.880.866,00
15) Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	332.222.500,00	310.760.000,00
16) Belanja Perjalanan Dinas	26.579.151.409,81	38.685.449.974,06
17) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	368.576.000,00	500.412.000,00
18) Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	8.624.612.350,00	4.304.927.200,00
19) Belanja Pemeliharaan	68.299.218.664,88	45.596.384.225,49
20) Belanja Jasa Konsultansi	5.315.525.660,00	3.831.566.623,00
21) Belanja Barang Dana BOSDA	49.210.542.284,00	22.179.693.050,00
22) Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	21.950.000,00	
23) Belanja Hibah Barang atau Jasa	179.280.000,00	451.917.000,00
24) Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	3.086.627.000,00	2.982.830.698,00
25) Belanja Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar(KBM)	17.111.665.000,00	31.717.425.990,00
26) Belanja Bea Siswa Pendidikan Non PNS		-
27) Belanja Pemberian Kompensasi kepada Perorangan/ Masyarakat/ Lembaga	90.000.000,00	90.000.000,00
28) Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	21.978.151.600,00	23.234.819.596,00
29) Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat	5.567.919.600,00	3.762.409.000,00
30) Belanja Barang Kelayan Panti dan Akomodasi	112.976.400,00	117.097.200,00
31) Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	10.087.585.819,00	
c. Belanja Bunga		-
d. Belanja Subsidi		-



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

	Realisasi 2019 Rp	Realisasi 2018 Rp
e. Belanja Hibah	<b>79.389.047.945,00</b>	<b>53.665.425.050,00</b>
1) Belanja Hibah Kepada Pemerintah	1.259.645.450,00	-
2) Belanja Hibah Kepada Masyarakat		27.245.791.600,00
3) Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan	47.342.470.016,00	-
4) Belanja Hibah Dana BOS	30.786.932.479,00	26.419.633.450,00
5) Belanja Uang Untuk diberikan kepada Masyarakat		-
Merupakan konversi Belanja Langsung Uang Untuk diberikan kepada Masyarakat menjadi Belanja Hibah		
f. Belanja Bantuan Sosial	<b>11.551.423.000,00</b>	<b>7.764.735.000,00</b>
1) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu, Keluarga, dan/atau Masyarakat	9.695.180.000,00	5.892.300.000,00
1) Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lain	724.393.000,00	633.610.000,00
2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu, Keluarga, dan/atau Masyarakat yang Tidak Dapat Direncanakan	1.131.850.000,00	1.238.825.000,00
<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>1.404.860.023.602,17</b>	<b>1.325.013.862.715,42</b>
<b>5.1.2. 2. BELANJA MODAL</b>	<b>327.434.372.199,17</b>	<b>325.092.739.056,49</b>
Realisasi Belanja Modal terdiri dari :		
a. Belanja Modal Tanah	<b>25.569.058.040,00</b>	<b>74.967.469.865,00</b>
1) Tanah untuk Bangunan Gedung	17.982.757.800,00	64.659.853.220,00
2) Tanah untuk Bangunan Bukan Gedung	7.378.227.240,00	10.307.616.645,00
3) Pematangan Tanah	208.073.000,00	
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	<b>96.719.552.169,17</b>	<b>103.905.673.673,95</b>
1) Alat-alat Berat/Besar	2.171.319.500,00	3.028.001.820,00
2) Alat-alat Angkutan	19.076.406.400,40	14.503.932.950,00
3) Alat Bengkel/Alat Bantu	2.651.641.483,00	424.503.900,00
4) Alat Pertanian dan Peternakan (Alat Pengolah Sampah)	692.196.212,64	338.343.500,00
5) Alat Kantor Dan Rumah Tangga	36.440.007.765,95	35.107.147.581,98
6) Alat Studio Dan Alat Komunikasi	4.381.991.185,00	5.280.193.654,00
7) Alat Ukur/Alat Uji/Alat Peraga	1.396.311.240,00	765.571.207,00
8) Alat Kedokteran/Kesehatan	27.194.260.252,25	40.474.740.956,12
9) Alat Laboratorium	1.173.537.300,00	2.255.920.830,00
10) Alat Keamanan (Penyelamatan)	1.541.880.829,93	1.727.317.274,85
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	<b>54.312.514.794,87</b>	<b>22.131.236.620,86</b>
1) Pengadaan Bangunan Gedung tempat kerja	40.903.251.382,29	21.674.173.820,86
2) Pengadaan Konstruksi/Pembelian Tempat Pembuangan Sampah Sementara	1.146.603.833,79	365.174.800,00
3) Pengadaan Monumen/Bangunan Bersejarah	200.680.000,00	91.888.000,00
4) Pengadaan Bangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	6.465.466.310,08	
5) Pengadaan Bangunan Lainnya	5.596.513.268,71	
d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	<b>101.225.143.404,83</b>	<b>44.603.591.095,89</b>
1) Pengadaan Jalan	24.818.351.391,23	21.021.470.803,70
2) Pengadaan Jembatan	9.758.765.000,00	-
3) Pengadaan Bangunan Air Irigasi	17.387.670.856,89	603.466.000,00
4) Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku		150.500.000,00
5) Pengadaan Bangunan Air Kotor	34.865.709.981,71	13.091.288.170,75
6) Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik		200.352.200,00
7) Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	1.135.331.500,00	3.099.489.065,00
8) Pengadaan Jaringan Listrik	13.223.022.265,00	6.437.024.856,44
9) Pengadaan Jaringan	36.292.410,00	-
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	828.300.673,00	4.208.575.933,00
f. Belanja Modal Lainnya	48.779.803.117,30	75.276.191.867,79
<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>327.434.372.199,17</b>	<b>325.092.739.056,49</b>



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

	Realisasi 2019 Rp	Realisasi 2018 Rp
<b>5.1.2. 3. BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>317.693.064,00</b>	<b>293.241.254,00</b>
Realisasi Belanja Tak Terduga digunakan untuk :		
- pengembalian kelebihan setor belanja tahun 2018	664.440,00	
- pengembalian kelebihan pendapatan pajak	317.028.624,00	293.241.254,00
- Tanggap darurat bencana tanah longsor		
- Pemindahbukuan ke rekening Kasda DIY		
<b>JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>317.693.064,00</b>	<b>293.241.254,00</b>
<b>5.1.2. 4. TRANSFER</b>	<b>1.981.246.996,00</b>	<b>2.328.000.498,00</b>
<b>1. Transfer Bagi Hasil Pendapatan</b>	-	-
a. Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		
b. Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		
c. Transfer Bagi Hasil Lainnya		
<b>2. Transfer Bantuan Keuangan</b>	<b>1.981.246.996,00</b>	<b>2.328.000.498,00</b>
a. Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah daerah Lainnya	1.228.210.990,00	1.592.338.080,00
- Provinsi DIY (IPAL)	528.210.990,00	492.338.080,00
- Provinsi Nusa Tenggara Barat (Bencana Gempa Bumi)		250.000.000,00
- Provinsi Sulawesi Tenggara (Tsunami)		500.000.000,00
- Kabupaten Bulungan Provinsi Kaltara bagi Transmigran	700.000.000,00	350.000.000,00
b. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		
c. Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	753.036.006,00	735.662.418,00
- PDI-P	273.898.708,00	266.155.256,00
- Demokrat	40.096.220,00	44.904.826,00
- PAN	112.009.072,00	106.660.592,00
- PKS	73.541.661,00	64.050.802,00
- Golkar	60.230.624,00	61.211.298,00
- PPP	53.767.651,00	72.641.680,00
- Gerindra	99.013.056,00	92.900.714,00
- Nasdem	40.479.014,00	27.137.250,00
<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER</b>	<b>1.734.593.335.861,34</b>	<b>1.652.727.843.523,91</b>



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

	Realisasi 2019 Rp	Realisasi 2018 Rp
<b>5.1.2. 5. SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>31.167.082.630,93</b>	<b>84.192.154.328,61</b>
<b>5.1.3. PEMBIAYAAN</b>		
<b>5.1.3. 1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>226.448.050.491,52</b>	<b>262.150.761.112,36</b>
Realisasi Penerimaan Pembiayaan berasal dari :		
<b>a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya dari :</b>	<b>226.442.324.759,52</b>	<b>254.103.922.554,36</b>
- Pajak Daerah	9.416.763.422,00	79.133.434.525,05
- Retribusi Daerah	596.538.491,00	1.157.611.901,05
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	18.385.338,83	-
- Lain-lain PAD Yang Sah	43.571.415.267,31	6.448.108.049,05
- Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung	25.681.568.793,00	70.898.658.500,00
- Belanja Pegawai dari Belanja Langsung	363.668.294,63	2.973.862.545,00
- Belanja Barang Dan Jasa	10.279.079.490,14	33.780.407.310,00
- Belanja Modal	10.948.838.770,68	11.643.183.316,00
- Belanja Hibah	15.354.933.450,00	5.917.689.902,00
- Belanja Bantuan Sosial	1.036.565.000,00	505.550.000,00
- Belanja Bantuan Keuangan		3.309.000,00
- Belanja Tak Terduga	5.833.628.968,00	4.076.529.560,00
- DAK Bidang Infrastruktur	2.599.000,00	
- DAK Fisik Lingkungan Hidup	4.728.000,00	
- DAK Fisik Infrastruktur Pemerintah Daerah	25.625.428,00	
- DAK Non Fisik BOP PAUD	4.494.000.000,00	1.756.200.000,00
- DAK Non Fisik TPG PNSG	8.444.614.920,00	5.752.673.090,00
- DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan	694.658.467,00	1.182.528.719,00
- DAK Non Fisik Akreditasi Rumah Sakit		-
- DAK Non Fisik Akreditasi Puskesmas		108.207.495,00
- DAK Non Fisik Jaminan Persalinan		320.850.000,00
- DAK Non Fisik Bantuan Operasional KB	624.030.992,00	322.862.650,00
- DAK Non Fisik Adminduk	32.010.619,00	22.021.875,00
- Dana Penyesuaian BOS	6.346.193.738,16	5.309.183.777,91
- Dana Penyesuaian Tamsil Guru PNSD	5.807.897.500,00	6.013.897.500,00
- Silpa BLUD Taman Pintar	4.400.934.134,34	5.200.092.517,34
- Silpa BLUD RSUD	15.455.907.772,26	1.956.848.835,26
- Silpa BLUD UPT Pusat Bisnis	1.551.719.416,40	2.621.870.210,40
- Silpa BLUD UPT Logam	34.197.879,60	14.585.663,30
- Silpa BLUD UPT 18 Puskesmas	4.368.821.546,06	4.613.388.189,00
- Silpa BLUD RS Pratama	5.667.427.499,56	2.370.367.424,00
- Penerimaan kembali pemberian pinjaman	600.000,00	-
- Pencairan Dana Cadangan	179.508.045,00	-
- Penerimaan Piutang Daerah		-
- Sisa Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	45.205.464.516,55	
<b>b. Pencairan Dana Cadangan</b>		<b>8.044.288.558,00</b>
<b>c. Penerimaan kembali pemberian pinjaman</b>	<b>5.725.732,00</b>	<b>2.550.000,00</b>
<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>226.448.050.491,52</b>	<b>262.150.761.112,36</b>
<b>5.1.3. 2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>37.275.000.000,00</b>	<b>119.900.590.681,45</b>
Realisasi Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari :		
<b>a. Pembentukan Dana Cadangan</b>		<b>-</b>
<b>b. Penyertaan Modal :</b>	<b>37.275.000.000,00</b>	<b>63.861.759.721,45</b>
- Penyertaan modal kepada PD BPR Bank Jogja		1.092.993.721,45
- Penyertaan modal kepada PDAM Tirtamarta		27.898.766.000,00
- Penyertaan modal kepada PT BPD DIY	37.275.000.000,00	34.870.000.000,00
<b>c. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat</b>		<b>56.038.830.960,00</b>
- Merupakan pembayaran nilai penggantian kepada PT Perwita Karya sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 416 Pk/Pdt/2015 jo. Nomor 1/Pdt.Eks/2015/PN.Yk tanggal 25 November 2015		
<b>d. Pemberian Pinjaman Daerah</b>		<b>-</b>
<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>37.275.000.000,00</b>	<b>119.900.590.681,45</b>
<b>JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>189.173.050.491,52</b>	<b>142.250.170.430,91</b>



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

	<b>Realisasi 2019</b>	<b>Realisasi 2018</b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
<b>5.1.3. 3 SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SiLPA) TA 2019</b>	<b>220.340.133.122,45</b>	<b>226.442.324.759,52</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kas Umum Daerah yang terdiri dari :	176.870.665.396,34	188.549.873.780,14
- Kas di Kas Daerah	176.836.026.304,34	68.225.493.976,14
- Deposito		120.000.000.000,00
- Sisa U P/ T U	34.639.092,00	324.379.804,00
- Titipan di Kas Bendahara		
Sisa BOS	8.176.660.137,16	6.413.442.731,16
Sisa kas di bendahara penerimaan		-
Sisa Kas BLUD RSUD	16.315.175.635,26	15.455.907.772,26
Sisa Kas BLUD Taman Pintar	3.562.497.919,44	4.400.934.134,34
Sisa Kas BLUD UPT Pusat Bisnis	1.669.279.394,65	1.551.719.416,40
Sisa Kas BLUD UPT Puskesmas	5.124.325.375,60	4.368.821.546,06
Sisa Kas BLUD UPT Pratama	8.539.523.751,80	5.667.427.499,56
Sisa Kas BLUD UPT Logam	82.005.512,20	34.197.879,60
<b>JUMLAH SiLPA TA 2019</b>	<b>220.340.133.122,45</b>	<b>226.442.324.759,52</b>



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

**5.2. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**

	<b>31 Desember 2019</b>	<b>31 Desember 2018</b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
<b>5.2.1. SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL</b>	<b>226.442.324.759,52</b>	<b>254.103.922.554,36</b>

Jumlah tersebut berasal dari Saldo Anggaran Lebih tahun 2019 dan 2018 yang terdiri dari :

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kas Umum	188.549.873.780,14	232.017.585.937,15
- Kas di Kas Daerah	68.225.493.976,14	51.983.873.700,83
- Deposito	120.000.000.000,00	180.000.000.000,00
- Sisa U P/ T U	324.379.804,00	33.712.236,32
Sisa Kas BOS	6.413.442.731,16	5.309.183.777,91
Sisa kas di bendahara penerimaan	-	-
Sisa Kas BLUD RSUD	15.455.907.772,26	1.956.848.835,26
Sisa Kas BLUD Taman Pintar	4.400.934.134,34	5.200.092.517,34
Sisa Kas BLUD UPT Pusat Bisnis	1.551.719.416,40	2.621.870.210,40
Sisa Kas BLUD UPT Puskesmas	4.368.821.546,06	4.613.388.189,00
Sisa Kas BLUD RS Pratama	5.667.427.499,56	2.370.367.424,00
Sisa Kas BLUD UPT Logam	34.197.879,60	14.585.663,30
	<b>226.442.324.759,52</b>	<b>254.103.922.554,36</b>

	<b>31 Desember 2019</b>	<b>31 Desember 2018</b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
<b>5.2.2. PENGGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN</b>	<b>226.442.324.759,52</b>	<b>254.103.922.554,36</b>

Jumlah tersebut merupakan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan yang dipergunakan untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019.

	<b>31 Desember 2019</b>	<b>31 Desember 2018</b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
<b>5.2.3. SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN ((SiLPA/SiKPA)</b>	<b>220.340.133.122,45</b>	<b>226.442.324.759,52</b>

Jumlah tersebut merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2019 yang terdiri dari :

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kas Umum	176.870.665.396,34	188.549.873.780,14
- Kas di Kas Daerah	176.836.026.304,34	68.225.493.976,14
- Deposito	-	120.000.000.000,00
- Sisa U P/ T U	34.639.092,00	324.379.804,00
Sisa BOS	8.176.660.137,16	6.413.442.731,16
Sisa kas di bendahara penerimaan	-	-
Sisa Kas BLUD RSUD	16.315.175.635,26	15.455.907.772,26
Sisa Kas BLUD Taman Pintar	3.562.497.919,44	4.400.934.134,34
Sisa Kas BLUD UPT Pusat Bisnis	1.669.279.394,65	1.551.719.416,40
Sisa Kas BLUD UPT Puskesmas	5.124.325.375,60	4.368.821.546,06
Sisa Kas BLUD RS Pratama	8.539.523.751,80	5.667.427.499,56
Sisa Kas BLUD UPT Logam	82.005.512,20	34.197.879,60
	<b>220.340.133.122,45</b>	<b>226.442.324.759,52</b>

	<b>31 Desember 2019</b>	<b>31 Desember 2018</b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
<b>5.2.4. SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR</b>	<b>220.340.133.122,45</b>	<b>226.442.324.759,52</b>

Jumlah tersebut merupakan Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2019 dan 2018





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

**BAB V**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

**5.3. PENJELASAN POS-POS NERACA**

**5.3.1. A S E T**

**5.3.1.1. ASET LANCAR**

	<b>31 Desember 2019</b>	<b>31 Desember 2018</b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
<b>a. Kas di Kas Daerah</b>	176.886.586.123,00	188.225.493.976,14

Kas di Kas Daerah sebesar Rp176.886.586.123,00 merupakan saldo kas Pemerintah Kota Yogyakarta yang seluruhnya berada di Rekening Kas Umum Daerah di Bank BPD DIY. Terdiri dari Rp175.737.679.393,83 merupakan Saldo Kas di Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2019 dan Rp1.148.906.729,17 merupakan setoran yang dilakukan pada tahun 2020.

<b>b. Kas di Bendahara Pengeluaran</b>		
1) Sisa Uang Persediaan/ Tambah Uang	34.639.092,00	324.379.804,00
2) Pajak Belum Disetor		
3) Titipan di Bendahara Pengeluaran		
Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran	34.639.092,00	324.379.804,00

Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp34.639.092,00 merupakan sisa uang persediaan (UP) yang belum disetorkan sebesar Rp34.639.092,00 yang harus dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran pada Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Pendidikan. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran terdapat di **Lampiran 1B**.

<b>c. Kas di Bendahara Dana BOS</b>		
(a) Sisa Kas BOSNAS dan BOS provinsi pada SDN Se-Kota Yogyakarta	3.698.087.250,16	3.745.889.477,16
(b) Sisa Kas BOSNAS dan BOS provinsi pada SMPN Se-Kota Yogyakarta	4.478.572.887,00	2.969.578.998,00
(c) Sisa Kas BOSDA	-	70.063.593,00
Jumlah Kas di Bendahara Dana BOS	8.176.660.137,16	6.785.532.068,16

Jumlah Kas dan Setara Kas tersebut tidak termasuk sisa kas Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) di Bendahara sekolah dan di Rekening siswa yang belum dibelanjakan sampai dengan akhir tahun 2019. Saldo akhir JPD untuk sekolah dalam kota Tahun 2019 yang belum dibelanjakan sebesar Rp1.967.439.705,00 dan untuk Saldo akhir JPD untuk sekolah luar kota tahun 2019 sebesar Rp62.759.800,00. Jumlah Kas dan Setara Kas tersebut juga tidak termasuk kas di Bendahara Kelurahan Karangwaru Kec. Tegalrejo sebesar Rp100.000,00 yang merupakan honorarium panitia pelatihan kapasitas kader yang baru dibayarkan pada tanggal 8 Januari 2020 namun belanja sudah diakui tahun 2019, kas di Bendahara Kelurahan Ngampilan Kec. Ngampilan sebesar Rp1.080.000,00 yang merupakan honorarium instruktur pelatihan membuat kue yang baru dibayarkan pada tanggal 7 Januari 2020 namun belanja sudah diakui tahun 2019, kas di Bendahara Kel. Kotabaru Kec. Gondokusuman yang merupakan honor piket PAM Kewilayahan dan Pengamanan Deklarasi Panca Tertib di SMP N 5 YK yang dibayarkan tanggal 3 Januari 2020 namun belanja sudah diakui tahun 2019, dan kas di Bendaharan Kel. Kota Baru Kec Gondokusuman yang merupakan honor piket PAM dan Pengamanan Hari Raya Natal dan Tahun Baru yang baru dibayarkan tanggal 3 Januari 2010 namun belanja sudah diakui tahun 2019. Rincian sisa kas BOS di sekolah-sekolah dan JPD terdapat pada Lampiran 1C

**d. Kas di Bendahara Penerimaan** -

<b>e. Kas di BLUD</b>		
1) Kas di BLUD RSUD	16.315.175.635,26	15.455.907.772,26
2) Kas di BLUD Taman Pintar	3.818.271.319,44	4.872.684.234,34
3) Kas di BLUD Unit Kerja Pusk. Danurejan I	229.822.314,20	244.850.277,20
4) Kas di BLUD Unit Kerja Pusk. Danurejan II	132.755.292,14	133.202.872,22
5) Kas di BLUD Unit Kerja Pusk. Gedongtengen	218.538.683,00	130.558.697,00
6) Kas di BLUD Unit Kerja Pusk. Gondokusuman I	354.533.368,64	133.386.489,64
7) Kas di BLUD Unit Kerja Pusk. Gondokusuman II	194.223.955,00	103.055.593,00
8) Kas di BLUD Unit Kerja Pusk. Gondomanan	135.460.575,00	144.377.221,00
9) Kas di BLUD Unit Kerja Pusk. Jetis	438.609.408,00	421.037.582,00
10) Kas di BLUD Unit Kerja Pusk. Kotagede I	100.267.951,00	16.908.814,00
11) Kas di BLUD Unit Kerja Pusk. Kotagede II	119.297.146,00	127.199.147,00
12) Kas di BLUD Unit Kerja Pusk. Kraton	261.308.481,00	133.826.426,00
13) Kas di BLUD Unit Kerja Pusk. Mantrijeron	477.872.287,00	198.835.640,00
14) Kas di BLUD Unit Kerja Pusk. Mergangsan	1.060.595.546,00	1.180.669.720,00
15) Kas di BLUD Unit Kerja Pusk. Ngampilan	304.003.649,62	224.215.733,00
16) Kas di BLUD Unit Kerja Pusk. Pakualaman	348.343.231,00	288.669.147,00



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

17) Kas di BLUD Unit Kerja Pusk. Tegalrejo	127.865.034,00	119.881.468,00
18) Kas di BLUD Unit Kerja Pusk. Umbulharjo I	313.553.238,00	405.176.627,00
19) Kas di BLUD Unit Kerja Pusk. Umbulharjo II	84.881.489,00	36.320.975,00
20) Kas di BLUD Unit Kerja Pusk. Wirobrajan	222.393.727,00	326.649.117,00
21) Kas di BLUD RS Pratama	8.539.523.751,80	5.667.427.499,56
22) Kas di BLUD UPT Pusat Bisnis	1.713.971.665,87	1.551.719.416,40
23) Kas di BLUD UPT Logam	82.005.512,20	34.197.879,60
Jumlah Kas di BLUD	<b>35.593.273.260,17</b>	<b>31.950.758.348,22</b>

Kas di BLUD RSUD sebesar Rp16.315.175.635,26 terdiri dari saldo rekening giro pada Bank BPD DIY No. 006.111.001162 sebesar Rp5.804.451.538,26 dan rekening giro Bank BPD DIY No. 006.111.000132 sebesar Rp0,00, saldo rekening giro pada Bank BNI No. 371.195.0001 sebesar Rp286.503.175,00, saldo rekening giro pada Bank Mandiri No. 137-00-1396574-0 sebesar Rp191.933.066,00, Kas di Bendahara Penerimaan Sebesar Rp32.287.856,00 dan deposito sebesar Rp10.000.000.000,00 pada Bank BPD DIY. Rincian deposito terdapat pada **Lampiran 1D**.

Kas di BLUD Taman Pintar sebesar Rp3.818.271.319,44 merupakan saldo rekening giro pada Bank BPD DIY No. 006.111.000341 sebesar Rp2.212.294.271,44, sisa kas di Bendahara Penerimaan Rp85.977.048,00, kas kecil sebesar Rp20.000.000,00 dan deposito sebesar Rp1.500.000.000,00 yang ditempatkan pada Bank BPD DIY sebesar Rp500.000.000, Bank BNI Rp1.000.000.000,00. Rincian deposito terdapat pada **Lampiran 1D**.

Kas di BLUD Unit Kerja Puskesmas Danurejan I sebesar Rp229.822.314,20 merupakan saldo rekening giro pada Bank BPD DIY No. 006.111.001326 .

Kas di BLUD Unit Kerja Puskesmas Danurejan II sebesar Rp132.755.292,14 merupakan saldo rekening giro pada Bank BPD DIY No. 006.111.001333 .

Kas di BLUD Unit Kerja Puskesmas Gedongtengen sebesar Rp218.538.683,00 merupakan saldo rekening giro pada Bank BPD DIY No. 006.111.001330 .

Kas di BLUD Unit Kerja Puskesmas Gondokusuman I sebesar Rp 354.533.368,64 merupakan saldo rekening giro pada Bank BPD DIY No. 006.111.001293 .

Kas di BLUD Unit Kerja Puskesmas Gondokusuman II sebesar Rp194.223.955,00 merupakan saldo rekening giro pada Bank BPD DIY No. 006.111.001327.

Kas di BLUD Unit Kerja Puskesmas Gondomanan sebesar Rp135.460.575,00 merupakan saldo rekening giro pada Bank BPD DIY No. 006.111.001296.

Kas di BLUD Unit Kerja Puskesmas Jetis sebesar Rp438.609.408,00 merupakan saldo rekening giro pada Bank BPD DIY No. 006.111.001268.

Kas di BLUD Unit Kerja Puskesmas Kotagede I sebesar Rp100.267.951,00 merupakan saldo rekening giro pada Bank BPD DIY No. 006.111.001295.

Kas di BLUD Unit Kerja Puskesmas Kotagede II sebesar Rp119.297.146,00 merupakan saldo rekening giro pada Bank BPD DIY No. 006.111.001325.

Kas di BLUD Unit Kerja Puskesmas Kraton sebesar Rp261.308.481,00 merupakan saldo rekening giro pada Bank BPD DIY No. 006.111.001328.

Kas di BLUD Unit Kerja Puskesmas Mantrijeron sebesar Rp477.872.287,00 merupakan saldo rekening giro pada Bank BPD DIY No. 006.111.001294.

Kas di BLUD Unit Kerja Puskesmas Mergangsan sebesar Rp1.060.595.546,00 merupakan saldo rekening giro pada Bank BPD DIY No. 006.111.001271.

Kas di BLUD Unit Kerja Puskesmas Ngampilan sebesar Rp304.003.649,62 merupakan saldo rekening giro pada Bank BPD DIY No. 006.111.001331

Kas di BLUD Unit Kerja Puskesmas Pakualaman sebesar Rp 348.343.231 merupakan saldo rekening giro pada Bank BPD DIY No. 006.111.001332.

Kas di BLUD Unit Kerja Puskesmas Tegalrejo sebesar Rp127.865.034,00 merupakan saldo rekening giro pada Bank BPD DIY No. 006.111.001270.

Kas di BLUD Unit Kerja Puskesmas Umbulharjo I sebesar Rp313.553.238,00 merupakan saldo rekening giro pada Bank BPD DIY No. 006.111.001269.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Kas di BLUD Unit Kerja Puskesmas Umbulharjo II sebesar Rp84.881.489,00 merupakan saldo rekening giro pada Bank BPD DIY No. 006.111.001329.

Kas di BLUD Unit Kerja Puskesmas Wirobrajan sebesar Rp222.393.727,00 merupakan saldo rekening giro pada Bank BPD DIY No. 006.111.001324.

Kas di BLUD RS Pratama sebesar Rp8.539.523.751,80 terdiri dari saldo rekening giro pada Bank BPD DIY No. 006.111.001469 sebesar Rp8.443.882.893,95, saldo rekening giro Bank Mandiri Nomor rekening No. 137-00-1600008-1 sebesar Rp95.640.857,85.

Kas di BLUD UPT Pusat Bisnis Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp1.713.971.665,87 merupakan saldo rekening giro pada Bank BPD DIY No. 006.111.001290 sebesar Rp669.279.394,65, deposito sebesar Rp1.000.000.000,00 yang ditempatkan pada Bank BRI Sebesar Rp500.000.000,00 dan Bank Mandiri sebesar Rp500.000.000,00 dan setoran temuan hasil pemeriksaan BPK yang dilakukan pada tahun 2020 sebesar Rp44.692.271,22, Rincian deposito terdapat pada **Lampiran 1D**.

Kas di BLUD UPT Logam Dinas Pengelolaan Pasar sebesar Rp82.005.512,20 merupakan saldo rekening giro pada Bank BPD DIY No. 006.111.001515 sebesar Rp82.005.512,20.

	31 Desember 2019 Rp	31 Desember 2018 Rp
<b>f. Kas Lainnya</b>	-	<b>87.774.031,00</b>

Jumlah kas lainnya merupakan sisa kas dana bergulir pada Dinas Koperasi, UMK, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Perindagkoptan

Kas di Tim Dana Bergulir adalah Kas atas penerimaan Dana Bergulir yang ada pada rekening:

Nama & No. Rekening	31 Desember 2019 Rp	31 Desember 2018 Rp
PT. BPD DIY No.006.211.011841 a.n Disperindagkop untuk angsuran pokok PEW Th.2006	-	5.205.422,00
PT BPD DIY No.006.221.014560 a.n Disperindagkop untuk Angsuran bunga PEW Th.2006	-	-
PT. BPD DIY No.006.221.008966 a.n Disperindagkop untuk Angsuran pokok LKM	-	10.601.636,00
PT. BPD DIY No.006.221.008483 a.n Disperindagkop untuk Cad likuiditas Pokja	-	20.425.259,00
PT BPD DIY 'No.006.221.008484 Pokja dan Fasilitas	-	2.850.122,00
PT BPD DIY No.006.221.011047 Cadangan Resiko Pokja	-	42.192.744,00
PD BPR Bank JogJa No.32/22.7985 a.n Dinas Perekonomian untuk Angsuran pokok dan bunga Tenda PKL	-	6.498.848,00
<b>Jumlah</b>	-	<b>87.774.031,00</b>

Rincian sisa kas dana bergulir terdapat pada **Lampiran 1E**.

<b>JUMLAH KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>220.691.158.612,33</b>	<b>227.373.938.227,52</b>
----------------------------------	---------------------------	---------------------------



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

	31 Desember 2019 Rp	31 Desember 2018 Rp
<b>g. PIUTANG PAJAK</b>	<b>102.125.917.028,00</b>	<b>97.973.824.608,00</b>
<p>Piutang pajak disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (<i>net realizable value</i>). Jumlah tersebut di atas merupakan saldo Piutang Pajak yang sudah ada ketetapannya, namun belum dibayar oleh Wajib Pajak per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp102.125.917.028,00 dan Rp97.973.824.608,00 dengan rincian sebagai berikut :</p>		
1) Pajak Hotel	6.009.137.605,00	7.928.535.737,00
2) Pajak Restoran	4.397.149.006,00	5.729.344.123,00
3) Pajak Hiburan	1.833.748.516,00	1.639.666.423,00
4) Pajak Reklame	6.020.168.151,00	5.748.702.794,00
5) Pajak Parkir	1.003.546.605,00	1.059.022.714,00
6) Pajak Air Bawah Tanah	493.881.530,00	559.692.864,00
7) PBB	82.368.285.615,00	75.308.859.953,00
	<b>102.125.917.028,00</b>	<b>97.973.824.608,00</b>

Piutang Pajak yang disajikan merupakan piutang pokok pajak. Piutang PBB sebesar Rp82.368.285.615,00 sudah termasuk pelimpahan piutang dari KPP Pratama yang dilimpahkan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta pada tanggal 27 Januari 2012 sebesar Rp48.641.639.274,00.

Piutang Pajak dan penyisihan piutang pajak per 31 Desember 2019 tersebut berdasarkan umurnya dikelompokkan sebagai berikut :

<u>Umur Piutang</u>	<u>Nilai Piutang</u>	<u>Penyisihan</u>	<u>Nilai Bersih</u>
1) < 1 tahun	20.985.888.510,00	104.929.442,55	20.880.959.067,45
2) 1 - 2 tahun	28.394.724.764,00	2.839.472.476,40	25.555.252.287,60
3) 2 - 5 tahun	18.101.534.154,00	9.050.767.077,00	9.050.767.077,00
4) > 5 tahun	34.643.769.600,00	34.643.769.600,00	0,00
	<b>102.125.917.028,00</b>	<b>46.638.938.595,95</b>	<b>55.486.978.432,05</b>

Daftar Piutang Pajak dan Rincian saldo Piutang Pajak berdasarkan umur dapat dilihat pada **Lampiran 2A dan Lampiran 2B**

Persentase penyisihan piutang daerah mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah yang sudah ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 102 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Penyelesaian piutang pajak sampai saat ini masih dilakukan dengan berbagai upaya penagihan terhadap piutang yang masih ada kemungkinan tertagih.

	31 Desember 2019 Rp	31 Desember 2018 Rp
<b>h. PIUTANG RETRIBUSI</b>	<b>3.156.534.910,00</b>	<b>3.580.800.580,00</b>
<p>Piutang retribusi disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (<i>net realizable value</i>). Jumlah tersebut di atas merupakan saldo Piutang Retribusi yang sudah ada ketetapannya, namun belum dibayar oleh Wajib Bayar per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp3.156.535.310,00 dan Rp3.580.800.580,00 dengan rincian sebagai berikut :</p>		
1) Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD	111.005.034,00	112.040.059,00
2) Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas	980.500,00	980.500,00
3) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	643.708.551,00	792.363.345,00
4) Retribusi Pasar (Kios, Los, Lapak)	1.868.189.698,00	2.063.486.688,00
5) Retribusi Parkir	291.061.027,00	370.339.888,00
6) Retribusi IMBB	241.590.100,00	241.590.100,00
<b>JUMLAH PIUTANG RETRIBUSI</b>	<b>3.156.534.910,00</b>	<b>3.580.800.580,00</b>

Rincian saldo Piutang Retribusi berdasarkan umur dapat dilihat pada **Lampiran 3B**.

Piutang Retribusi dan Penyisihan piutang retribusi per 31 Desember 2019 sebesar **Rp3.156.534.910,00** tersebut berdasarkan umurnya dikelompokkan sebagai berikut :

<u>Umur Piutang</u>	<u>Nilai Piutang</u>	<u>Penyisihan</u>	<u>Nilai Bersih</u>
1) < 1 bulan	715.578.319,00	3.577.891,60	712.000.427,40
2) > 1 - 3 bulan	512.641.647,00	51.264.164,70	461.377.482,30
3) > 3 - 12 bulan	766.647.465,00	383.323.732,50	383.323.732,50
4) > 12 bulan	1.161.667.479,00	1.161.667.479,00	0,00
	<b>3.156.534.910,00</b>	<b>1.599.833.267,80</b>	<b>1.556.701.642,20</b>



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Persentase penyisihan piutang daerah mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah yang sudah ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 102 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Penyelesaian piutang retribusi sampai saat ini masih dilakukan dengan berbagai upaya penagihan terhadap piutang yang masih ada kemungkinan tertagih.

	<b>31 Desember 2019</b>	<b>31 Desember 2018</b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
<b>i. BAGIAN LANCAR TAGIHAN PEMBERIAN PINJAMAN</b>	<b>169.124.999,00</b>	<b>174.967.999,00</b>

Jumlah tersebut merupakan piutang yang sudah jatuh tempo terakhir pada tahun 2015 namun masih ada realisasi pembayaran atas dana yang dipinjamkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta kepada 18 BMT di Kota Yogyakarta sebesar Rp169.124.999,00. Penyajian saldo akun Bagian Lancar Tagihan Pemberian Pinjaman per 31 Desember 2019 dilakukan untuk kepentingan penyisihan piutang dan penghitungan beban penyisihan piutang sehingga dimungkinkan dalam bagian lancar piutang ada piutang dalam kategori diragukan atau macet. Penyajian tersebut berdasarkan penerapan Akuntansi Piutang sesuai Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Nomor 16. Bagian Lancar Pemberian Pinjaman dikelompokkan sebagai berikut:

<u>Kualitas Piutang</u>	<u>Nilai Piutang</u>	<u>Penyisihan</u>	<u>Nilai Bersih</u>
1) Lancar	0,00	0,00	0,00
2) Kurang Lancar	0,00	0,00	0,00
3) Diragukan	0,00	0,00	0,00
4) Macet	169.124.999,00	169.124.999,00	0,00
	<b>169.124.999,00</b>	<b>169.124.999,00</b>	<b>0,00</b>

Penyelesaian piutang bagian lancar tagihan pemberian pinjaman sampai saat ini masih dilakukan dengan berbagai upaya penagihan terhadap piutang yang masih ada kemungkinan tertagih.

Rincian Tagihan Pemberian Pinjaman dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

	<b>31 Desember 2019</b>	<b>31 Desember 2018</b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
<b>j. BAGIAN LANCAR TAGIHAN BAGI HASIL KEMITRAAN</b>	<b>247.000.000,00</b>	<b>249.000.000,00</b>

Jumlah tersebut merupakan bagian lancar piutang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas Tagihan Bagi Hasil Kemitraan per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 yang disajikan kembali berdasarkan penerapan Akuntansi Piutang sesuai Buletin Teknis Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Nomor 16 dengan rincian sebagai berikut :

1) Pengelolaan Penginapan Ngestilaras oleh Hotel Kayu Manis (BOT)	22.000.000	24.000.000,00
2) Pengelolaan Reksa Arcade oleh PT Bumi Kusuma Santosa (BOT)	225.000.000	225.000.000,00
<b>JUMLAH BAG. LANCAR TAGIHAN BAGI HASIL KEMITRAAN</b>	<b>247.000.000,00</b>	<b>249.000.000,00</b>

Bagian Lancar Tagihan Bagi Hasil Kemitraan dikelompokkan sebagai berikut:

<u>Kualitas Piutang</u>	<u>Nilai Piutang</u>	<u>Penyisihan</u>	<u>Nilai Bersih</u>
1) Lancar	247.000.000,00	1.235.000,00	245.765.000,00
2) Kurang Lancar	0,00	0,00	0,00
3) Diragukan	0,00	0,00	0,00
4) Macet	0,00	0,00	0,00
	<b>247.000.000,00</b>	<b>1.235.000,00</b>	<b>245.765.000,00</b>



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Pemerintah Kota Yogyakarta menjalin kerjasama kemitraan dengan pihak ketiga dalam bentuk *Build, Operate and Transferred* (BOT). Kemitraan ini dimaksudkan untuk membangun dan mengelola aset Pemerintah Kota Yogyakarta dan di akhir masa perjanjian, aset yang dibangun dan dikelola oleh pihak ketiga tersebut diserahkan kembali kepada Pemerintah Kota Yogyakarta. Selama masa pengelolaan, Pemerintah Kota Yogyakarta berhak mendapatkan kontribusi pendapatan sesuai perjanjian. Rincian kemitraan BOT adalah sebagai berikut :

1) *Pengelolaan Pesanggrahan Ngestilaras oleh Hotel Kayu Manis.*

Kerjasama pemanfaatan dan pengelolaan Pesanggrahan Ngestilaras dimulai pada tanggal 16 Agustus 2004, berlaku selama jangka waktu 15 tahun dan berakhir pada tahun 2020. Pemerintah Kota Yogyakarta menyertakan investasi dalam bentuk aset tanah dan bangunan sebesar Rp861.000.000,00 dan investasi pihak ketiga sebesar Rp200.000.000,00.

2) *Pengelolaan Reksa Arcade oleh PT Bumi Kusuma Santosa.*

Kerjasama pembangunan dan pengelolaan aset eks Pasar Reksonegaran (Reksa Arcade) dimulai pada tanggal 30 Agustus 2004 untuk jangka waktu 20 tahun yang akan berakhir pada Tahun 2025. Investasi yang disertakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta seluruh nilai tanah dan bangunan dengan nilai Rp6.408.300.000,00, sedangkan investasi pihak ketiga sebesar Rp6.895.566.560,00.

Penyelesaian piutang bagian lancar tagihan bagi hasil kemitraan sampai saat ini masih dilakukan dengan berbagai upaya penagihan terhadap piutang yang masih ada kemungkinan tertagih.

Rincian Bagian Lancar Tagihan Bagi Hasil Kemitraan dapat dilihat pada **Lampiran 5A**.

	31 Desember 2019 Rp	31 Desember 2018 Rp
<b>k. PIUTANG DENDA TAGIHAN BAGI HASIL KEMITRAAN</b>	<b>2.000.000,00</b>	-
Piutang denda timbul karena Hotel Kayu Manis tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban pembayaran Kontribusi Tetap Bagi Hasil Kemitraan tahun 2019		
1) Pengelolaan Penginapan Ngestilaras oleh Hotel Kayu Manis (BOT)	2.000.000,00	-
<b>JUMLAH PIUTANG DENDA TAGIHAN BAGI HASIL KEMITRAAN</b>	<b>2.000.000,00</b>	-

Piutang Denda Tagihan Bagi Hasil Kemitraan dikelompokkan sebagai berikut:

<u>Kualitas Piutang</u>	<u>Nilai Piutang</u>	<u>Penyisihan</u>	<u>Nilai Bersih</u>
1) Lancar	2.000.000,00	10.000,00	1.990.000,00
2) Kurang Lancar	-	-	-
3) Diragukan	-	-	-
4) Macet	-	-	-
	<b>2.000.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.990.000,00</b>

Rincian Piutang Denda Tagihan Bagi Hasil Kemitraan dapat dilihat pada **Lampiran 5C**.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
	<u>Rp</u>	<u>Rp</u>
<b>k. BAGIAN LANCAR TAGIHAN SEWA</b>	<b>1.524.845.168,00</b>	<b>1.554.117.168,00</b>
Jumlah tersebut merupakan bagian lancar piutang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas Tagihan Sewa kerjasama penyewaan aset oleh Pemerintah Kota Yogyakarta kepada pihak ketiga per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 yang disajikan kembali berdasarkan penerapan Akuntansi Piutang sesuai Buletin Teknis Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal Nomor 16 dengan rincian sebagai berikut:		
1) Pengelolaan Pasar Ikan Higienis Terpadu oleh PT Bummy Harapan Umat	60.000.000,00	60.000.000,00
2) Tagihan sewa kantin Dinas Pendidikan oleh Dharma Wanita Dinas Pendidikan	12.693.000,00	12.693.000,00
3) Tagihan atas hak pengelolaan titik reklame	1.149.239.168,00	1.189.239.168,00
4) Tagihan sewa ruang oleh PD Bank Jogja pada Dinas Perijinan, Kec. GK, Kec. MJ dan Kec. DN	-	50.000.000,00
5) Tagihan sewa sebagian ruang Dinas Perijinan oleh PT. BPD DIY	61.000.000,00	61.000.000,00
6) Tagihan sewa gedung Kantin Dharma Wanita	-	-
7) Tagihan sewa Rusunawa Grha Bina Harapan dan Cokrodirjan	140.622.000,00	79.894.000,00
8) Tagihan sewa fotocopy Dinas Pendidikan oleh Dharma Wanita	8.851.000,00	8.851.000,00
9) Tagihan sewa ruang oleh PD. BPR. Bank Jogja (Eks Kecamatan Jetis)	92.440.000,00	92.440.000,00
<b>JUMLAH BAGIAN LANCAR TAGIHAN SEWA</b>	<b>1.524.845.168,00</b>	<b>1.554.117.168,00</b>

Bagian Lancar Tagihan Sewa dikelompokkan sebagai berikut:

<u>Kualitas Piutang</u>	<u>Nilai Piutang</u>	<u>Penyisihan</u>	<u>Nilai Bersih</u>
1) Lancar	186.484.000,00	932.420,00	185.551.580,00
2) Kurang Lancar	11.061.000,00	1.106.100,00	9.954.900,00
3) Diragukan	10.883.000,00	5.441.500,00	5.441.500,00
4) Macet	1.316.417.168,00	1.316.417.168,00	0,00
	<b>1.524.845.168,00</b>	<b>1.323.897.188,00</b>	<b>200.947.980,00</b>

Penyajian saldo akun Bagian Lancar Tagihan Sewa per 31 Desember 2019 dilakukan untuk kepentingan penyisihan piutang dan penghitungan beban penyisihan piutang sehingga dimungkinkan dalam bagian lancar piutang ada piutang dalam kategori diragukan atau macet.

Penyelesaian piutang bagian lancar tagihan pemberian pinjaman sampai saat ini masih dilakukan dengan berbagai upaya penagihan terhadap piutang yang masih ada kemungkinan tertagih.

Rincian Bagian Lancar Tagihan Sewa dapat dilihat pada **Lampiran 6**.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

	31 Desember 2019 Rp	31 Desember 2018 Rp
<b>I. BAGIAN LANCAR TUNTUTAN GANTI RUGI</b>	-	-

Jumlah tersebut merupakan saldo tagihan Pemerintah Kota Yogyakarta per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 atas Tuntutan Ganti Rugi kepada pegawai yang jatuh tempo dalam satu tahun. Tuntutan Ganti Rugi berasal dari ganti rugi atas tindakan indisipliner.

Penyelesaian piutang bagian lancar tuntutan ganti rugi sampai saat ini masih dilakukan dengan berbagai upaya penagihan terhadap piutang yang masih ada kemungkinan tertagih

Mutasi Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dapat dilihat pada **Lampiran 7A**.

	31 Desember 2019 Rp	31 Desember 2018 Rp
<b>m. PIUTANG TRANSFER-DANA BAGI HASIL</b>	<b>2.049.012.238,00</b>	-

Jumlah piutang transfer 2019 merupakan piutang bagi hasil pajak daerah provinsi sesuai dengan Keputusan Gubernur DIY No. 05/KEP/2020 tentang Bagi Hasil Kurang Bayar Penerimaan Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2020. Jumlah tersebut merupakan jumlah piutang transfer yang akan diterima pada tahun 2020.

<u>Kualitas Piutang</u>	<u>Nilai Piutang</u>	<u>Penyisihan</u>	<u>Nilai Bersih</u>
1) Lancar	2.049.012.238,00	10.245.061,19	2.038.767.176,81
2) Kurang Lancar	0,00	0,00	0,00
3) Diragukan	0,00	0,00	0,00
4) Macet	0,00	0,00	0,00
	<b>2.049.012.238,00</b>	<b>10.245.061,19</b>	<b>2.038.767.176,81</b>

	31 Desember 2019 Rp	31 Desember 2018 Rp
<b>n. PIUTANG PAD LAINNYA</b>	<b>32.276.757.330,00</b>	<b>30.097.695.132,00</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo piutang PAD lainnya per 31 Desember 2019 yang terdiri dari:

1) Piutang denda Pasar Ikan Higienis PT. Bummy Harapan Umat	6.760.000,00	6.760.000,00
2) Piutang denda sewa hunian Rusunawa Cokrodirjan	15.251.500,00	7.724.500,00
3) Piutang denda keterlambatan pengadaan barang (CV. Restu Biyung)	36.874.656,00	36.874.656,00
4) Piutang denda PBB	29.949.432.704,00	27.818.915.556,00
5) Piutang denda pajak hotel	733.019.805,00	779.634.993,00
6) Piutang denda pajak restoran	16.767.111,00	5.785.500,00
7) Piutang denda pajak Hiburan	15.458.455,00	15.458.455,00
8) Piutang denda pajak parkir	806.600,00	
9) Piutang bunga pajak hotel	1.165.846.544,00	1.048.268.316,00
10) Piutang bunga pajak restoran	232.090.308,00	259.344.081,00
11) Piutang bunga pajak hiburan	-	10.652.514,00
12) Piutang bunga pajak reklame	-	-
13) Piutang bunga pajak parkir	55.205.607,00	59.032.521,00
14) Piutang bunga pajak air bawah tanah	-	-
15) Piutang denda titik reklame (PT Oscar Sembilan Pariwisata)	49.244.040,00	49.244.040,00
<b>JUMLAH PIUTANG PAD LAINNYA</b>	<b>32.276.757.330,00</b>	<b>30.097.695.132,00</b>

Piutang denda keterlambatan pengadaan barang dari CV. Restu Biyung merupakan reklas dari piutang Tuntutan Ganti Rugi pada Tahun 2016

<u>Kualitas Piutang</u>	<u>Nilai Piutang</u>	<u>Penyisihan</u>	<u>Nilai Bersih</u>
1) Lancar	1.761.787.434,00	8.808.937,17	1.752.978.496,83
2) Kurang Lancar	9.363.871.834,00	936.387.183,40	8.427.484.650,60
3) Diragukan	6.466.091.476,00	3.233.045.738,00	3.233.045.738,00
4) Macet	14.685.006.586,00	14.685.006.586,00	0,00
	<b>32.276.757.330,00</b>	<b>18.863.248.444,57</b>	<b>13.413.508.885,43</b>

Penyelesaian Piutang PAD Lainnya sampai saat ini masih dilakukan dengan berbagai upaya penagihan terhadap piutang yang masih ada kemungkinan tertagih

Rincian Piutang PAD Lainnya ada pada **Lampiran 8A**.





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

	31 Desember 2019 Rp	31 Desember 2018 Rp
<b>o. PIUTANG LAINNYA</b>	<b>19.636.859.641,60</b>	<b>13.331.671.014,00</b>
Piutang lainnya disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan ( <i>net realizable value</i> ). Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 yang terdiri dari:		
1) Piutang sewa kios makanan minuman dan pengelolaan kamar mandi/WC kios buku di kompleks Taman Pintar	232.780.200,00	130.481.800,00
2) Piutang RSUD	12.969.674.620,00	8.863.567.963,00
3) Piutang Listrik Kios Buku di Kompleks Taman Pintar	4.321.190,00	4.321.190,00
4) Piutang tagihan air Rusunawa Grha Bina Harapan dan Cokrodirjan	23.649.550,00	13.483.350,00
5) Piutang Puskesmas	6.406.434.081,60	4.319.816.711,00
<b>JUMLAH PIUTANG LAINNYA</b>	<b>19.636.859.641,60</b>	<b>13.331.671.014,00</b>

Piutang lainnya dan penyisihan piutang per 31 Desember 2019 sebesar Rp13.331.671.014,00 dikelompokkan berdasarkan umur sebagai berikut :

<u>Kualitas Piutang</u>	<u>Nilai Piutang</u>	<u>Penyisihan</u>	<u>Nilai Bersih</u>
1) Lancar	18.833.344.111,60	94.166.720,56	18.739.177.391,04
2) Kurang Lancar	216.377.909,00	21.637.790,90	194.740.118,10
3) Diragukan	513.129.965,00	256.564.982,50	256.564.982,50
4) Macet	74.007.656,00	74.007.656,00	0,00
	<b>19.636.859.641,60</b>	<b>446.377.149,96</b>	<b>19.190.482.491,64</b>

Penyelesaian piutang lainnya sampai saat ini masih dilakukan dengan berbagai upaya penagihan terhadap piutang yang masih ada kemungkinan tertagih.

Rincian piutang Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 8B**.

	31 Desember 2019 Rp	31 Desember 2018 Rp
<b>p. ASURANSI DIBAYAR DIMUKA</b>	<b>1.603.287.437,68</b>	<b>1.108.969.387,26</b>

Jumlah tersebut merupakan beban asuransi dibayar dimuka untuk premi asuransi Barang Milik Daerah (bangunan pemerintah) dan bangunan perekonomian di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sebesar Rp1.242.721.911,03 serta asuransi kendaraan yang dibayar pada tahun 2019 sebesar Rp334.806.241,14 pada BPKAD dan asuransi dibayar dimuka bangunan gedung sebesar Rp19.042.978,08 dan asuransi kendaraan sebesar Rp6.716.307,43 pada Dinas Pariwisata yang dibayar tahun 2019. Rincian asuransi dibayar di muka dapat dilihat pada **Lampiran 9**.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	Rp	Rp
<b>q. PERSEDIAAN</b>	<b>36.723.783.804,99</b>	<b>40.720.493.927,26</b>
<p>Persediaan dinilai berdasar metode perpetual FIFO bulanan. Jumlah tersebut di atas merupakan sisa persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai, diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kota Yogyakarta dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di unit kerja Pemerintah Kota Yogyakarta per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 dengan rincian sebagai berikut:</p>		
1) ATK	3.951.882.155,47	3.372.971.920,20
2) Pakaian Dinas	284.165.131,71	174.420.614,00
3) Pakaian Olah Raga	4.450.000,00	
4) Suku Cadang Sarana Mobilitas	2.044.750,00	1.483.050,00
5) Bahan Kebersihan dan alat Pembersih	1.011.545.271,16	902.737.004,50
6) Barang Cetak	3.425.410.162,82	1.884.650.689,50
7) Karcis	366.975.645,00	321.260.645,00
8) Alat Listrik/elektronik	1.917.467.123,50	6.023.408.188,50
9) Obat-obatan	14.324.574.427,46	17.298.646.332,74
10) Bahan Material	2.086.958.406,10	4.438.397.117,27
11) Bahan Makanan	2.009.595,00	2.226.850,00
12) Tanaman	202.132.500,00	50.258.900,00
13) Peralatan Kerja dan Bahan Percontohan	556.429.237,74	292.554.707,10
14) Reagen dan Alat Laboratorium	2.010.109.444,75	822.617.466,00
15) Rambu dan APILL	-	3.848.000,00
16) Bahan Komputer	754.413.667,50	530.210.306,00
17) BBM dan Pelumas	175.459.090,00	69.318.800,00
18) Alat Kesehatan/Bahan Kimia/Medis	1.937.519.384,81	582.743.044,00
19) Vaksin	638.096.354,75	305.347.000,00
20) Perlengkapan Rumah Tangga	2.193.222.075,36	331.025.202,25
21) Barang Hibah	73.714.721,00	2.399.726.500,00
22) Bibit Ikan	12.627.010,00	62.451.010,00
23) Alat Kontrasepsi	80.313.395,00	23.170.197,00
24) Bendera	-	-
25) Peralatan Uji	371.550.297,00	583.268.632,00
26) Linen	150.274.352,20	112.443.428,20
27) Lain-lain	190.439.606,66	131.308.323,00
<b>JUMLAH PERSEDIAAN</b>	<b>36.723.783.804,99</b>	<b>40.720.493.927,26</b>

Jumlah persediaan di atas termasuk obat yang kadaluwarsa pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp116.793.355, pada UPT Farmasi sebesar Rp277.405.703,40, pada RS Pratama pada Dinas Kesehatan sebesar Rp20.494.436,95 dan pada RSUD sebesar Rp141.869.740,12. Rincian persediaan pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 10**.

<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>351.153.371.463,13</b>	<b>349.636.966.978,19</b>
---------------------------	---------------------------	---------------------------



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

	31 Desember 2019 Rp	31 Desember 2018 Rp
<b>5.3.1.2. INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>532.648.848.218,24</b>	<b>478.329.066.511,37</b>

**a. INVESTASI NON PERMANEN**

**INVESTASI NON PERMANEN LAINNYA** **710.489.692,00** **719.202.724,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo dana bergulir yang disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan atau *Net Realizable Value* (NRV) yaitu sebesar jumlah penyaluran dana bergulir kepada masyarakat dikurangi angsuran pokok dan ditambah dengan saldo rekening tabungan Dana Bergulir pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Perindagkop) per 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut :

	31 Desember 2019 Rp	31 Desember 2018 Rp
1) Program Bantuan Modal Pinjaman Lunak kepada Koperasi dan	48.632.554,00	49.165.286,00
2) Program Dana Bergulir kepada Kelompok UMK dalam rangka Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan (PEW)	507.109.188,00	515.289.488,00
3) Program Pinjaman Pengadaan Tenda bagi Pedagang Kaki Lima Kota Yogyakarta	154.747.950,00	154.747.950,00
<b>JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN LAINNYA</b>	<b>710.489.692,00</b>	<b>719.202.724,00</b>

Investasi non permanen dan penyisihan investasi non permanen per 31 Desember 2019 sebesar Rp719.202.724,00 tersebut berdasarkan umurnya dikelompokkan sebagai berikut :

<u>Umur Piutang</u>	<u>Nilai Piutang</u>	<u>Penyisihan</u>	<u>Nilai Bersih</u>
1) Lancar	0,00	0,00	0,00
2) Kurang Lancar	0,00	0,00	0,00
3) Diragukan	0,00	0,00	0,00
4) Macet	710.489.692,00	710.489.692,00	0,00
	<b>710.489.692,00</b>	<b>710.489.692,00</b>	<b>0,00</b>

Penyajian dana bergulir sesuai NRV-nya sejalan dengan Akuntansi Dana Bergulir sesuai Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 yang diterbitkan pada Agustus 2008. Perhitungan NRV dan rincian rekening Dana Bergulir pada **Lampiran 11**.

Program Bantuan Modal Pinjaman Lunak kepada Koperasi dan Kelompok/Lembaga Keuangan Mikro disalurkan kepada Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro dengan tujuan untuk memperkuat struktur keuangan/permodalan dalam bentuk dana bergulir. Program ini telah disalurkan melalui Kelompok Kerja (Pokja) Tahun 2003 sebesar Rp973.000.000,00 (53 KSP/LKM), Pokja Tahun 2006 sebesar Rp910.000.000,00 (50 KSP/LKM), Pokja Tahun 2007 Rp299.000.000,00, dan Pokja Tahun 2008 sebesar Rp500.000.000,00 (38 KSP/LKM). Bank pelaksana yang ditunjuk adalah BPD DIY Cabang Senopati Yogyakarta.

Program Bantuan Modal Pinjaman Lunak kepada Kelompok Usaha Mikro dan Kecil (UMK) disalurkan kepada pengusaha/kelompok usaha mikro dan kecil non pedagang kaki lima dalam rangka Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan (PEW) dalam bentuk dana bergulir. Program ini telah disalurkan melalui Pokja Tahun 2006 sebesar Rp1.048.000.000,00 (28 kelompok) dan Pokja Tahun 2007 sebesar Rp912.000.000,00 (23 kelompok). Bank pelaksana yang ditunjuk adalah BPD DIY Cabang Senopati Yogyakarta.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

	31 Desember 2019 Rp	31 Desember 2018 Rp
<b>b. INVESTASI PERMANEN</b>	<b>532.648.848.218,24</b>	<b>478.329.066.511,37</b>
<b>1) PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>532.648.848.218,24</b>	<b>478.329.066.511,37</b>

Jumlah tersebut merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Yogyakarta kepada Badan Usaha Milik Daerah per 31 Desember 2019 dan 2018 dengan rincian sebagai berikut :

1) PT. Bank BPD DIY	189.145.000.000,00	151.870.000.000,00
2) PD. BPR Bank Jogja	175.269.284.949,09	158.156.966.905,09
3) PDAM Tirtamarta	57.598.423.658,80	56.414.676.260,68
4) BUKP se-Kota Yogyakarta	411.000.000,00	411.000.000,00
5) PT. Radio Swara Adhiloka	270.481.312,48	297.006.667,76
6) PD. Jogjatama Vishesha	109.954.658.297,87	111.179.416.677,84
<b>JUMLAH PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>532.648.848.218,24</b>	<b>478.329.066.511,37</b>

Penilaian atas Penyertaan Modal Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap perusahaan daerah/BUMD sebagaimana tersebut di atas menggunakan Metode Ekuitas. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 12**.

	31 Desember 2019 Rp	31 Desember 2018 Rp
<b>2) INVESTASI PERMANEN LAINNYA</b>	-	-
<b>JUMLAH INVESTASI PERMANEN</b>	<b>532.648.848.218,24</b>	<b>478.329.066.511,37</b>
<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>532.648.848.218,24</b>	<b>478.329.066.511,37</b>

	31 Desember 2019 Rp	31 Desember 2018 Rp
<b>5.3.1.3. ASET TETAP</b>	<b>3.318.709.338.013,44</b>	<b>3.237.752.519.696,88</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo aset berwujud yang mempunyai manfaat lebih dari satu tahun dan digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018. Pemerintah Kota Yogyakarta sejak Tahun 2015 telah menerapkan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua. Oleh sebab itu, maka Aset Tetap Tahun 2015 telah dilakukan penyusutan. Penyajian aset tetap mempedomani Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Waliota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

	31 Desember 2019 Rp	31 Desember 2018 Rp
a) Tanah	1.884.638.446.869,22	1.863.714.903.480,22
b) Peralatan dan Mesin	754.164.705.849,33	668.127.707.264,32
c) Bangunan Gedung	1.076.780.987.891,51	1.033.542.511.761,76
d) Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.108.434.251.782,83	1.997.802.762.171,24
e) Aset Tetap Lainnya	41.148.254.654,97	37.345.880.968,57
f) Konstruksi Dalam Pengerjaan	22.997.204.784,98	10.589.253.243,63
g) Akumulasi Penyusutan	(2.569.454.513.819,91)	(2.373.370.499.192,87)
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>3.318.709.338.013,44</b>	<b>3.237.752.519.696,88</b>

**a) Tanah**

Pada Tahun 2019 terdapat penambahan aset tetap tanah sebesar Rp. 25.304.543.389,00 merupakan penambahan dari realisasi belanja modal untuk pembelian 6 bidang tanah yang terdiri dari Tanah untuk bidang Perkantoran Umum 1 bidang senilai Rp.3.916.609.517,00, Tanah untuk bidang Kesehatan 1 bidang senilai Rp. 14.045.378.632,00 dan Tanah untuk Ruang Terbuka Hijau Publik 4 bidang senilai Rp.7.342.555.240,00.

Terdapat pelepasan aset tetap tanah senilai Rp.4.381.000.000,00 untuk penyertaan modal ke BUMD Bank Jogja.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

**b) Peralatan dan Mesin**

Pada Tahun 2019 terdapat penambahan aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp. 92.639.742.354,62 yang berasal dari Belanja Modal sebesar Rp. 92.618.112.354,66 yang terdiri dari penambahan barang baru sebesar Rp. 92.145.615.454,66 dan penambahan nilai aset sebesar Rp. 472.496.900,00, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.10.835.000,00 dan koreksi pencatatan sebesar Rp.10.795.000,00 dan reklasifikasi dari aset gedung dan bangunan sebesar Rp.3.862.939.288,38

Pada Tahun 2019 terdapat pengurangan aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp.10.186.515.593,05 yang terdiri dari penghapusan kendaraan bermotor dan peralatan kantor sebesar Rp. 2.246.307.672,06 dan reklasifikasi ke aset gedung dan bangunan dan aset lain-lain atas hasil sensus sebesar Rp.7.940.207.920,99

Nilai penambahan dan pengurangan tersebut termasuk peralatan dan mesin yang nilainya dibawah Rp300.000,00. Namun demikian saldo peralatan mesin per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 754.164.705.849,33 sudah tidak termasuk peralatan dan mesin yang nilainya dibawah Rp300.000,00 dengan nilai sebesar Rp. 16.324.857.773,25

**c) Bangunan gedung**

Penambahan aset tetap bangunan gedung Tahun 2019 sebesar Rp.64.710.628.640,48 dari Belanja Modal senilai Rp. 61.570.390.614,26 , yang terdiri dari Penambahan bangunan baru sebesar Rp.53.464.118.556,94 dan kapitalisasi penambahan nilai rehabilitasi dan renovasi gedung dari Belanja Modal senilai Rp. 8.041.818.648,64 dan koreksi pencatatan aset sebesar Rp. 516.000.000,00 dan reklas dari KDP Rp.132.286.000,00 dan reklas dari aset jalan jaringan dan jembatan dan KDP sebesar Rp.2.491.952.026,22

Pengurangan aset tetap bangunan gedung Tahun 2019 sebesar Rp. 15.292.784.114,48 yang terdiri dari penghapusan sebesar Rp.5.564.191.608,97, dan pengurangan nilai karena penghapusan sebagian bangunan gedung sebesar Rp.1.050.856.981,35 dan reklasifikasi ke bangunan gedung dan aset lain-lain hasil sensus sebesar Rp.8.677.735.524,16

Nilai penambahan dan pengurangan tersebut termasuk Bangunan dan Gedung yang nilainya dibawah Rp10.000.000,00. Namun demikian saldo peralatan mesin per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 1.076.780.987.891,51 sudah tidak termasuk Bangunan dan Gedung yang nilainya dibawah Rp10.000.000,00 dengan nilai sebesar Rp.75.019.928.362,68

**d) Jalan Irigasi dan Jaringan**

Penambahan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan tahun 2019 sebesar Rp.112.858.659.224,16 dari Belanja Modal senilai Rp. 100.757.949.169,73 , yang terdiri dari penambahan fisik baru sebesar Rp. 60.740.268.957,83 dan kapitalisasi penambahan nilai kegiatan peningkatan senilai Rp.40.017.680.211,90 dan reklas dari KDP senilai Rp.49.433.000,00 dan reklasifikasi ke aset gedung bangunan Rp.12.051.277.054,43

Pengurangan Aset Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2019 sebesar Rp.2.227.169.612,57 terdiri dari penghapusan sebesar Rp. 1.964.140.037,87 dan reklasifikasi ke aset gedung bangunan dan aset lain-lain hasil sensus barang daerah Rp.263.029.574,7

**e) Aset tetap lainnya**

Penambahan Aset tetap lainnya tahun 2019 sebesar Rp. 4.355.726.668,46 yang terdiri penambahan baru dari Belanja Modal senilai Rp. 4.178.235.818,51, Hibah sebesar Rp. 128.236.600,00 dan koreksi pencatatan Rp.48.500.000,00 dan reklasifikasi dari aset peralatan dan mesin sebesar Rp.754.250,00

Pengurangan Aset Tetap Lainnya Tahun 2019 sebesar Rp.553.352.982,00 terdiri dari Penghapusan sebesar Rp.445.589.000,00 pengurangan koreksi nilai Rp.560.000,00 dan koreksi pencatatan Rp.48.500.000,00 dan reklasifikasi ke aset lain-lain sebesar Rp.58.703.982,00

**f) Konstruksi dalam pengerjaan**

Penambahan Konstruksi Dalam Pekerjaan tahun 2019 dari Penambahan Baru Belanja Modal sebesar Rp.13.512.593.962,12 yang terdiri dari pembangunan gedung Dinas Lingkungan Hidup Tahap I sebesar Rp.7.431.555.764,87 dan perencanaan/DED Rp.5.948.538.197,25

Pengurangan Konstruksi Dalam Pekerjaan Tahun 2019 terjadi karena penggabungan ke aset induk/reklas senilai Rp.1.104.642.420,77



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

**g) Akumulasi Penyusutan**

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Pemerintah Kota Yogyakarta menyajikan akumulasi penyusutan pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp.2.569.454.513.819,91 yang terdiri dari:

	<u>31 Desember 2019</u> Rp	<u>31 Desember 2018</u> Rp
1) Akumulasi Penyusutan s.d. Tahun 2018	2.373.370.499.192,87	2.203.512.276.355,10
2) Penyesuaian penyusutan	38.111.543.820,33	29.102.501.408,98
3) Penyusutan Tahun 2019	157.972.470.806,71	140.755.721.428,79
	<b>2.569.454.513.819,91</b>	<b>2.373.370.499.192,87</b>

Akumulasi Penyusutan tersebut tidak termasuk penyusutan Aset Tetap Lainnya yang belum disusutkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta karena dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Yogyakarta belum mengatur umur ekonomis dari Aset Tetap Lainnya.

Dengan adanya kebijakan Penyusutan Aset Tetap tersebut, maka nilai buku aset tetap Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2019 seluruhnya sebesar Rp.3.318.709.338.013,44

Rekap Aset Tetap dapat dilihat pada **Lampiran 13A**

	<u>31 Desember 2019</u> Rp	<u>31 Desember 2018</u> Rp
<b>5.3.1.4. DANA CADANGAN</b>	-	<b>11.818.230,00</b>

Dana Cadangan dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk pembayaran sebagian Kewajiban Pemerintah Kota Yogyakarta kepada PT. Perwita Karya sebagai Tindak Lanjut Pengambilalihan Terminal Penumpang Tipe A Giwangan Yogyakarta.

Rekening Dana Cadangan ditutup pada tahun 2019.

	<u>31 Desember 2019</u> Rp	<u>31 Desember 2018</u> Rp
<b>5.3.1.5. ASET LAINNYA</b>	<b>44.381.879.548,91</b>	<b>36.260.813.208,03</b>

	<u>31 Desember 2019</u> Rp	<u>31 Desember 2018</u> Rp
<b>a. Kas yang Dibatasi Penggunaannya</b>	<b>2.798.981.468,00</b>	<b>2.837.062.270,00</b>

Jumlah kas yang dibatasi penggunaannya merupakan jaminan bongkar reklame pada BPKAD Kota Yogyakarta.

1) Kas Jaminan Bongkar adalah Kas titipan Jaminan Bongkar, yang ada pada rekening:

<u>Nama &amp; No. Rekening</u>	<u>31 Desember 2019</u> Rp	<u>31 Desember 2018</u> Rp
(a) Giro BPD DIY No. 006.111.001060 a.n. DPDPK-Jabong Reklame Permanen untuk Menampung uang jabong reklame permanen	1.835.475.991,00	1.879.316.920,00
(b) Tabungan BPD DIY No. 006.221.016.390 a.n. DPDPK-Jabong Reklame Insidentil untuk Menampung uang jabong reklame insidentil	163.505.477,00	157.745.350,00
(c) Deposito BPD DIY No a.n. DPDPK-Jabong Permanen untuk Menampung deposito jabong reklame permanen	800.000.000,00	800.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.798.981.468,00</b>	<b>2.837.062.270,00</b>



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

	<u>31 Desember 2019</u> Rp	<u>31 Desember 2018</u> Rp
<b>b. TAGIHAN BAGI HASIL KEMITRAAN</b>	<b>1.375.000.000,00</b>	<b>1.603.000.000,00</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo piutang jangka panjang atas Tagihan Bagi Hasil Kemitraan per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 yang disajikan kembali berdasarkan penerapan Akuntansi Piutang sesuai Buletin Teknis Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 16 dengan rincian sebagai berikut :

	<u>31 Desember 2019</u> Rp	<u>31 Desember 2018</u> Rp
1) Pengelolaan Penginapan Ngestilaras oleh Hotel Kayu Manis (BOT)	-	3.000.000,00
2) Pengelolaan Reksa Arcade oleh PT Bumi Kusuma Santosa (BOT)	1.375.000.000,00	1.600.000.000,00
<b>JUMLAH TAGIHAN BAGI HASIL KEMITRAAN</b>	<b>1.375.000.000,00</b>	<b>1.603.000.000,00</b>

<u>Umur Piutang</u>	<u>Nilai Piutang</u>	<u>Penyisihan</u>	<u>Nilai Bersih</u>
1) Lancar	1.375.000.000,00	6.875.000,00	1.368.125.000,00
2) Kurang Lancar	-	-	0,00
3) Diragukan	-	-	0,00
4) Macet	-	-	0,00
	<b>1.375.000.000,00</b>	<b>6.875.000,00</b>	<b>1.368.125.000,00</b>

Pemerintah Kota Yogyakarta menjalin kerjasama kemitraan dengan pihak ketiga dalam bentuk *Build, Operate and Transferred* (BOT). Kemitraan ini dimaksudkan untuk membangun dan mengelola aset Pemerintah Kota Yogyakarta dan diakhir masa perjanjian, aset yang dibangun dan dikelola oleh pihak ketiga tersebut diserahkan kembali kepada Pemerintah Kota Yogyakarta. Selama masa pengelolaan, Pemerintah Kota Yogyakarta berhak mendapatkan kontribusi pendapatan sesuai perjanjian. Rincian kemitraan BOT adalah sebagai berikut :

- 1) Pengelolaan Pesanggrahan Ngestilaras oleh Hotel Kayu Manis.  
Kerjasama pemanfaatan dan pengelolaan Pesanggrahan Ngestilaras dimulai pada tanggal 16 Agustus 2004, berlaku selama jangka waktu 15 tahun dan berakhir pada Tahun 2020. Pemerintah Kota Yogyakarta menyertakan investasi dalam bentuk aset tanah dan bangunan sebesar Rp861.000.000,00 dan investasi pihak ketiga sebesar Rp200.000.000,00.
- 2) Pengelolaan Reksa Arcade oleh PT Bumi Kusuma Santosa.  
Kerjasama pembangunan dan pengelolaan aset eks Pasar Reksonegaran (Reksa Arcade) dimulai pada tanggal 30 Agustus 2004 untuk jangka waktu 20 tahun yang akan berakhir pada Tahun 2025. Investasi yang disertakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta seluruh nilai tanah dan bangunan dengan nilai Rp6.408.300.000,00, sedangkan investasi pihak ketiga sebesar Rp6.895.566.560,00.

Rincian Tagihan Bagi Hasil Kemitraan dapat dilihat pada **Lampiran 5B**.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

	31 Desember 2019 Rp	31 Desember 2018 Rp
<b>c. TAGIHAN SEWA</b>	<b>184.880.000,00</b>	<b>452.304.000,00</b>

Jumlah tersebut merupakan piutang atas Tagihan Sewa kerjasama penyewaan aset oleh Pemerintah Kota Yogyakarta kepada pihak ketiga per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 yang disajikan kembali berdasarkan penerapan Akuntansi Piutang sesuai Buletin Teknis Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Nomor 16 dengan rincian sebagai berikut :

	31 Desember 2019 Rp	31 Desember 2018 Rp
1) Tagihan sewa ruang oleh PD Bank Jogja pada Dinas Perijinan, Kec. GK, Kec. MJ dan Kec. DN	-	-
2) Tagihan sewa kantin Dinas Pendidikan oleh Dharma Wanita Dinas Pendidikan Kota YK	-	12.693.000,00
3) Tagihan sewa fotocopy Dinas Pendidikan oleh Dharma Wanita Dinas Pendidikan Kota YK	-	8.851.000,00
4) Tagihan sewa sebagian ruang Dinas Perijinan oleh PT. BPD DIY	-	61.000.000,00
5) Tagihan sewa ruang oleh PD. BPR. Bank Jogja (Eks Kecamatan Jetis)	184.880.000,00	369.760.000,00
<b>JUMLAH TAGIHAN SEWA</b>	<b>184.880.000,00</b>	<b>452.304.000,00</b>

Tagihan sewa dikelompokkan sebagai berikut:

<u>Umur Piutang</u>	<u>Nilai Piutang</u>	<u>Penvisihan</u>	<u>Nilai Bersih</u>
1) Lancar	184.880.000,00	924.400,00	183.955.600,00
2) Kurang Lancar	-	-	0,00
3) Diragukan	-	-	0,00
4) Macet	-	-	0,00
	<b>184.880.000,00</b>	<b>924.400,00</b>	<b>183.955.600,00</b>

	31 Desember 2019 Rp	31 Desember 2018 Rp
<b>d. TUNTUTAN GANTI RUGI</b>	-	-

Jumlah tersebut merupakan saldo tagihan Pemerintah Kota Yogyakarta per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 atas Piutang TPTGR yang jatuh tempo Tahun 2018 dan seterusnya.

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 14**.

	31 Desember 2019 Rp	31 Desember 2018 Rp
<b>e. KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA</b>	<b>7.269.300.000,00</b>	<b>7.269.300.000,00</b>

Kemitraan dengan Pihak Ketiga dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka pengelolaan aset daerah, dalam bentuk kerjasama Built, Operate, and Transferred (BOT) serta kerjasama pengelolaan aset. Jumlah tersebut merupakan saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 jumlah tersebut merupakan nilai aset Pemerintah Kota Yogyakarta yang dikerjasamakan, yang terdiri dari :

1) Kerjasama dengan PT. Perwita Karya atas Pembangunan dan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A Giwangan (BOT hingga Tahun 2032)	-	-
2) Kerjasama dengan Hotel Kayumanis atas Pemanfaatan Pesanggrahan Ngestilaras (BOT hingga Tahun 2020)	861.000.000,00	861.000.000,00
3) Kerjasama dengan PT. Bumi Kusuma Santosa atas Pemanfaatan Reksa Arcade (BOT hingga Tahun 2025)	6.408.300.000,00	6.408.300.000,00
<b>JUMLAH KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA</b>	<b>7.269.300.000,00</b>	<b>7.269.300.000,00</b>





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	Rp	Rp
<b>f. ASET TAK BERWUJUD</b>	<b>27.404.372.979,08</b>	<b>20.812.347.566,19</b>
<p>Jumlah tersebut merupakan nilai aset tak berwujud berupa Sistem Informasi Manajemen (SIM) sebanyak 158 buah dan Kajian/Penelitian sebanyak 256 buah per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 dengan rincian sebagai berikut:</p>		
1) Sistem Informasi Manajemen (158 buah)	12.218.054.271,13	7.667.244.642,31
2) Kajian/penelitian (256 buah)	35.177.916.756,55	26.890.065.906,54
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(19.991.598.048,60)	(13.744.962.982,66)
<b>JUMLAH ASET TAK BERWUJUD</b>	<b>27.404.372.979,08</b>	<b>20.812.347.566,19</b>

Jumlah tersebut termasuk SISMIO, POS PBB dan SIM Perencanaan yang belum diketahui nilainya karena dokumen pendukung yang belum ditemukan. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 15A dan Lampiran 15B**.

Penilaian beban amortisasi berpedoman pada Peraturan Walikota Nomor 102 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Walikota tersebut terdapat perubahan kebijakan umur ekonomis amortisasi aset tak berwujud berupa software yang semula 5 tahun menjadi tidak terbatas dan aset tak berwujud berupa kajian umur ekonomis semula 5 tahun menjadi 3 tahun. Amortisasi aset tak berwujud dihitung secara bulanan. Selisih perhitungan amortisasi aset tak berwujud disajikan dalam dampak kumulatif perubahan kebijakan amortisasi aset tak berwujud.

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud disajikan sebesar Rp20.056.967.762,49, yang merupakan penjumlahan dari Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Tahun 2018 sebesar Rp13.744.962.982,66 ditambah dengan Beban Amortisasi Tahun 2019 sebesar Rp6.312.004.779,83. Perhitungan akumulasi amortisasi sudah mengacu pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	Rp	Rp
<b>g. ASET LAIN-LAIN</b>	<b>5.357.144.501,83</b>	<b>3.297.075.891,84</b>
<p>Jumlah tersebut merupakan Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 yaitu berupa Penyertaan pada Yayasan Purna Bhakti (YARNATI), aset tetap hasil sensus barang daerah tahun 2013 yang tidak ditemukan fisiknya dan belum diproses lebih lanjut, Aset yang masih dalam proses penghapusan, aset yang tidak laku dilelang dan Kerjasama dengan PT. Perwita Karya atas pembangunan dan pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A Giwangan yang telah putus kontrak. Jumlah penyertaan pada Yarnati semula adalah sebesar Rp495.000.000,00 dan sudah ada realisasi pembayaran kepada anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 1992-2004 sebesar Rp411.680.000,00 sehingga saldo yang masih ada di Yarnati adalah sebesar Rp83.320.000,00.</p>		
<p>Aset lain-lain per 31 Desember 2019 berupa aset tetap hasil sensus barang daerah tahun 2013 yang tidak diketemukan fisiknya sebesar Rp2.664.269.115,62 dibanding aset lain-lain per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.664.269.115,62. Aset tetap hasil sensus barang daerah tahun 2013 yang tidak diketemukan fisiknya ini semula berjumlah Rp7.435.364.020,19 dan terjadi pengurangan sebesar Rp4.771.094.904,57 karena aset tersebut sudah ditemukan dan direklasifikasi ke aset tetap.</p>		
<p>Rincian aset lain-lain adalah sebagai berikut:</p>		
1) Penyertaan Kepada Yarnati	83.320.000,00	83.320.000,00
2) Aset tetap hasil sensus 2013 yang belum diketemukan	3.046.131.957,63	2.664.269.115,62
3) Aset yang masih dalam proses penghapusan	549.486.776,22	549.486.776,22
4) Aset barang rusak	1.678.205.767,98	-
5) Aset yang tidak laku dilelang	-	-
<b>JUMLAH ASET LAIN-LAIN</b>	<b>5.357.144.501,83</b>	<b>3.297.075.891,84</b>

Aset bersejarah (*heritage asset*) yang dikuasai dan dimiliki oleh Pemerintah Kota Yogyakarta adalah sebanyak 450 unit bangunan yang dikelola oleh Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Dari aset bersejarah sebanyak 450 buah gedung tersebut, terdiri dari 13 gedung milik Pemerintah Kota Yogyakarta dan 437 buah gedung milik perseorangan/swasta/lembaga lainnya. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 16**.

YARNATI didirikan berdasarkan Akta Pendirian Notaris M.M.I. Wiardi, SH No. 7 tanggal 4 Desember 1990 dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota DPRD yang telah pensiun dengan memberikan Tunjangan Purna Bhakti (TPB). Penyertaan modal Pemerintah Kota Yogyakarta kepada YARNATI sebesar Rp495.000.000,00 dilakukan berdasarkan Instruksi Menteri dalam Negeri No. 12 Tahun 1992. Anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 2004 - 2009 sudah tidak lagi mengikuti program TPB dari YARNATI.

Aset Kerjasama dengan PT. Perwita Karya atas Pembangunan dan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A Giwangan (BOT hingga Tahun 2032) di reklasifikasi ke Aset Tetap sebagai tindak lanjut penyelesaian permasalahan Terminal Penumpang Tipe A Giwangan dengan PT. Perwita Karya pada tahun 2018.

<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>44.381.879.548,91</b>	<b>36.260.813.208,03</b>
----------------------------	--------------------------	--------------------------



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

5.3.1.6. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

	31 Desember 2019 Rp	31 Desember 2018 Rp
<b>a. UTANG PERHITUNGAN PIHAK KETIGA (PFK)</b>	<b>3.054.754.868,00</b>	<b>3.396.586.401,00</b>
Jumlah tersebut merupakan Utang Perhitungan Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 dengan rincian sebagai berikut :		
1) Potongan Askes, Taspen, IHT, Taperum dan pajak yang belum disetor (rincian pada <b>Lampiran 17</b> )	-	-
2) Saldo rekening jaminan bongkar reklame	2.798.981.468,00	2.837.062.270,00
3) Kas di BLU Taman Pintar berupa titipan pihak ketiga atas Theater 4D (Mahaka), toilet, hutang pajak layanan, dan utang jangka pendek lainnya bulan Desember 2019 yang belum diberikan	255.773.400,00	471.750.100,00
4) Kas di Pengelola Dana bergulir	-	87.774.031,00
5) Titipan Bendahara RS Pratama	-	-
6) Titipan Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja	-	-
	<b>3.054.754.868,00</b>	<b>3.396.586.401,00</b>

	31 Desember 2019 Rp	31 Desember 2018 Rp
<b>b. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA</b>	<b>2.439.982.267,00</b>	<b>1.811.562.647,76</b>

Jumlah tersebut merupakan pendapatan diterima dimuka untuk sewa gedung, sewa foodcourt Taman Pintar dan pemakaman di 4 (empat) kecamatan per 31 Desember 2019 yang jasanya akan diberikan dalam tahun 2019 dan seterusnya. Rincian lebih lanjut tentang Pendapatan Diterima Dimuka dapat dilihat pada **Lampiran 18**.

	31 Desember 2019 Rp	31 Desember 2018 Rp
<b>c. UTANG BELANJA</b>	<b>6.515.136.987,00</b>	<b>12.373.480.818,55</b>
Rincian utang belanja per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 terdiri dari:		
1) Utang Listrik	682.121.953,00	906.339.012,00
2) Utang Telepon	8.179.736,00	18.984.494,00
3) Utang Air (PDAM)	3.879.992,00	7.397.948,00
4) Utang Belanja Barang	1.930.320.847,00	5.470.551.829,87
5) Utang Belanja Modal	48.162.000,00	484.475.299,18
6) Utang Belanja Pegawai	3.624.591.532,00	5.464.766.237,50
7) Utang Belanja lainnya	217.880.927,00	20.965.998,00
<b>Jumlah utang belanja</b>	<b>6.515.136.987,00</b>	<b>12.373.480.818,55</b>

Jumlah tersebut merupakan utang belanja listrik, telepon, air, utang belanja barang, utang belanja modal, utang belanja pegawai dan utang belanja lainnya per 31 Desember 2019 yang dibayar pada tahun 2020. Rincian lebih lanjut tentang utang belanja dapat dilihat pada **Lampiran 19**.

	31 Desember 2019 Rp	31 Desember 2018 Rp
<b>d. UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA</b>	-	-
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>12.009.874.122,00</b>	<b>17.581.629.867,31</b>

5.3.1.7. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

	31 Desember 2019 Rp	31 Desember 2018 Rp
<b>a. UTANG JANGKA PANJANG LAINNYA</b>	-	-

5.3.1.8. EKUITAS

	31 Desember 2019 Rp	31 Desember 2018 Rp
	<b>4.234.883.563.121,72</b>	<b>4.084.409.554.757,17</b>

Ekuitas merupakan selisih antara Aset dengan Kewajiban. Pada LKPD Berbasis Akruar, Neraca tidak menyajikan Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, Ekuitas Dana Cadangan secara terpisah, namun menyajikan Ekuitas secara keseluruhan



5.4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

5.4.1. PENDAPATAN-LO

	Realisasi Penerimaan 2019 (Rp)	Penambahan 2019 (Rp)	Pengurangan 2019 (Rp)	Jumlah Pendapatan-LO Per 31 Desember 2019 (Rp)	Realisasi Penerimaan 2018 (Rp)
Realisasi Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2019 terdiri dari :	<b>1.765.760.418.492,27</b>	<b>207.821.813.530,36</b>	<b>193.402.996.983,32</b>	<b>1.780.179.235.039,31</b>	<b>1.752.122.713.925,19</b>
<b>5.4.1. 1. PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>689.049.725.509,27</b>	<b>205.772.801.292,36</b>	<b>193.402.996.983,32</b>	<b>701.419.529.818,31</b>	<b>682.695.791.542,81</b>
Jumlah tersebut adalah realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari :			4.152.092.420,00		
<b>5.4.1. 1. a. Pendapatan Pajak Daerah</b>	<b>451.265.948.031,00</b>	<b>107.745.693.672,00</b>	<b>103.593.601.252,00</b>	<b>455.418.040.451,00</b>	<b>415.815.313.988,00</b>
Pajak Daerah berasal dari 10 jenis pajak yaitu:					
1) Pajak Hotel	161.297.192.790,00	7.525.378.374,00	9.444.776.506,00	159.377.794.658,00	148.380.360.392,00
2) Pajak Restoran	63.237.228.654,00	1.511.084.911,00	2.843.280.028,00	61.905.033.537,00	49.278.720.010,00
3) Pajak Hiburan	12.702.230.080,00	228.325.111,00	34.243.018,00	12.896.312.173,00	13.049.250.288,00
4) Pajak Reklame	7.449.951.971,00	875.033.958,00	603.568.601,00	7.721.417.328,00	7.117.730.685,00
5) Pajak Penerangan Jalan	52.374.696.494,00	-	-	52.374.696.494,00	49.514.221.949,00
6) Pajak Parkir	3.050.479.181,00	14.019.437,00	69.495.546,00	2.995.003.072,00	3.482.582.083,00
7) Pajak Air Tanah	2.546.299.969,00	2.480.402.976,00	2.546.214.310,00	2.480.488.635,00	2.392.628.781,00
8) Pajak sarang Burung Walet	6.650.000,00	-	-	6.650.000,00	6.575.000,00
9) PBB	86.550.328.189,00	95.111.448.905,00	88.052.023.243,00	93.609.753.851,00	84.166.367.781,00
10) BPHTB	62.050.890.703,00	-	-	62.050.890.703,00	58.426.877.019,00
Piutang Pendapatan pajak Daerah 2019 sebesar Rp107.745.693.672,00 yang merupakan mutasi tambah piutang pada tahun 2019, dan sebesar Rp103.593.601.252 yang merupakan mutasi kurang piutang Rincian mutasi piutang pajak ada pada <b>Lampiran 2C</b> .					
<b>5.4.1. 1. b. Pendapatan Retribusi Daerah</b>	<b>32.428.343.731,00</b>	<b>1.115.362.419,00</b>	<b>821.707.798,00</b>	<b>32.721.998.352,00</b>	<b>34.358.737.796,00</b>
Retribusi Daerah terdiri dari 16 (enam belas) jenis retribusi yaitu :					
1) Retribusi Pelayanan Kesehatan, :					
a) Pemeriksaan Kualitas Air	220.904.000,00	-	-	220.904.000,00	105.013.600,00
b) Pos Kesehatan Hewan	71.617.700,00	-	-	71.617.700,00	70.482.800,00
<i>Jumlah Retribusi Pelayanan Kesehatan</i>	<i>292.521.700,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>292.521.700,00</i>	<i>175.496.400,00</i>
2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	3.820.420.597,00	571.279.306,00	709.718.200,00	3.681.981.703,00	3.638.882.700,00
3) Retribusi Pelayanan Pemakaman umum	123.580.000,00	38.305.000,00	73.203.333,00	88.681.667,00	124.915.000,00
a) Kec. Tegalarjo	36.340.000,00	7.780.000,00	17.321.250,00	26.798.750,00	43.160.000,00
b) Kec. Wirobrajan	37.580.000,00	19.575.000,00	28.247.083,33	28.907.916,67	35.805.000,00
c) Kec. Mergangsan	35.230.000,00	8.010.000,00	16.739.999,67	26.500.000,33	26.940.000,00
d) Kec. Mantrijeron	14.430.000,00	2.940.000,00	10.895.000,00	6.475.000,00	19.010.000,00
4) Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum	6.562.625.000,00	-	-	6.562.625.000,00	6.497.892.000,00
a) Din. Pariwisata (UPT Malioboro)	-	-	-	-	-
b) Dinas Perhubungan	6.562.625.000,00	-	-	6.562.625.000,00	6.477.892.000,00
c) Kec. Gondomanan (PMPS)	-	-	-	-	20.000.000,00
5) Retribusi Pasar, :					
a) Kios	4.870.986.995,00	357.954.816,00	243.675.479,00	4.985.266.332,00	4.766.700.883,00
b) Los	3.122.546.567,00	137.617.722,00	(211.081.414,00)	3.471.245.703,00	3.081.866.155,00
c) Lapak	443.506.402,00	10.205.575,00	6.192.200,00	447.519.777,00	457.024.171,00
d) Gudang (tempat penyimpanan barang)	38.604.000,00	-	-	38.604.000,00	38.313.000,00
e) Siaran Radio	6.372.000,00	-	-	6.372.000,00	6.327.000,00
f) Bongkar Muat	321.556.000,00	-	-	321.556.000,00	318.913.400,00
g) Kamar Mandi	1.005.163.400,00	-	-	1.005.163.400,00	998.731.200,00
h) Parkir:					
TKP	2.548.304.000,00	-	-	2.548.304.000,00	2.305.105.000,00
TJU	652.123.500,00	-	-	652.123.500,00	679.045.400,00
i) Sewa Lahan	1.077.777.467,00	-	-	1.077.777.467,00	1.178.111.289,00
j) Pemakaian Listrik	-	-	-	-	-
k) Penerimaan piutang	701.075.103,00	-	-	701.075.103,00	541.388.878,00
l) Pendapatan lain-lain (denda listrik)	-	-	-	-	-
- kas di bendahara penerimaan	-	-	-	-	(660.000,00)
<i>Jumlah Retribusi Pasar</i>	<i>14.788.015.434,00</i>	<i>505.778.113,00</i>	<i>38.786.265,00</i>	<i>15.255.007.282,00</i>	<i>14.370.866.376,00</i>
6) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	830.330.000,00	-	-	830.330.000,00	841.270.000,00
7) Retribusi Pengolahan Limbah Cair	791.072.500,00	-	-	791.072.500,00	690.682.500,00
8) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	67.880.000,00	-	-	67.880.000,00	89.485.000,00
a) DPUPKP	13.020.000,00	-	-	13.020.000,00	14.310.000,00
b) Dinas Pertanian & Pangan	16.560.000,00	-	-	16.560.000,00	31.425.000,00
c) Dinas Kebakaran	38.300.000,00	-	-	38.300.000,00	43.750.000,00
9) Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.581.164.000,00	-	-	1.581.164.000,00	1.479.926.640,00
a) Dinas Perhubungan	552.826.000,00	-	-	552.826.000,00	541.500.240,00
b) Dinas Pariwisata	1.028.338.000,00	-	-	1.028.338.000,00	938.426.400,00
10) Retribusi Rumah Potong Hewan	89.685.000,00	-	-	89.685.000,00	119.170.000,00
11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	298.213.000,00	-	-	298.213.000,00	247.779.000,00
12) Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	2.958.873.500,00	-	-	2.958.873.500,00	5.645.830.300,00
13) Retribusi Ijin Gangguan (HO)	-	-	-	-	-
14) Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Kecamatan:	2.239.300,00	-	-	2.239.300,00	17.771.700,00
a) Kecamatan Tegalarjo	-	-	-	-	-
b) Kecamatan Jetis	-	-	-	-	-
c) Kecamatan Gondokusuman	325.000,00	-	-	325.000,00	1.461.400,00
d) Kecamatan Danurejan	-	-	-	-	178.000,00
e) Kecamatan Gedongtengen	-	-	-	-	-
f) Kecamatan Pakualaman	-	-	-	-	385.500,00
g) Kecamatan Ngampilan	555.200,00	-	-	555.200,00	897.500,00
h) Kecamatan Wirobrajan	-	-	-	-	3.212.900,00
i) Kecamatan Mantrijeron	-	-	-	-	3.361.800,00
j) Kecamatan Kraton	-	-	-	-	-
k) Kecamatan Gondomanan	-	-	-	-	-
l) Kecamatan Mergangsan	-	-	-	-	2.958.200,00
m) Kecamatan Umbulharjo	992.100,00	-	-	992.100,00	4.309.400,00
n) Kecamatan Kotagede	367.000,00	-	-	367.000,00	1.007.000,00
16) Ret. Perpanjangan Izin Mempekerjaan Tenaga Asing / IMTA (Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenagakerja)	221.723.700	-	-	221.723.700,00	418.770.180

Penambahan pendapatan retribusi daerah 2019 sebesar Rp1.115.362.419,00 merupakan mutasi tambah piutang dan pendapatan diterima dimuka pada tahun 2019. Sedangkan pengurangan pendapatan retribusi daerah 2019 sebesar Rp821.707.798,00 merupakan mutasi kurang piutang tahun 2019 dan pendapatan diterima dimuka tahun 2020, 2021, dst.

Rincian mutasi tambah piutang retribusi ada pada **Lampiran 3B**.

Penerimaan retribusi termasuk penerimaan retribusi pasar di akhir tahun yang masih ada di pemungut dan belum disetor ke kas daerah pada tanggal 31 Desember 2019



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

	Realisasi Penerimaan 2019 (Rp)	Penambahan 2019 (Rp)	Pengurangan 2019 (Rp)	Jumlah Pendapatan-LO Per 31 Desember 2019 (Rp)	Realisasi Penerimaan 2018 (Rp)
<b>5.4.1. 1. c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar :</b>	<b>28.975.003.950,01</b>	-	-	<b>28.975.003.950,01</b>	<b>28.032.365.012,83</b>
Terdiri dari :					
1) PD Air Minum Tirtamarta	802.301.741,50	-	-	802.301.741,50	1.407.116.860,00
2) PD BPR Bank Jogja	9.754.106.355,00	-	-	9.754.106.355,00	8.126.342.383,00
3) Bank Pembangunan Daerah DIY terdiri dari :					
a) Deviden	18.340.935.744,08	-	-	18.340.935.744,08	18.169.713.459,02
b) Dana Pembangunan		-	-		-
	18.340.935.744,08	-	-	18.340.935.744,08	18.169.713.459,02
4) Laba BUKP	57.146.041,43	-	-	57.146.041,43	36.457.074,81
5) PD Jogjatama Visesha	20.514.068,00	-	-	20.514.068,00	292.735.236,00
<b>Jumlah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan</b>	<b>28.975.003.950,01</b>	-	-	<b>28.975.003.950,01</b>	<b>28.032.365.012,83</b>
<b>5.4.1. 1. d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar:</b>	<b>176.380.429.797,26</b>	<b>96.911.745.201,36</b>	<b>88.987.687.933,32</b>	<b>184.304.487.065,30</b>	<b>204.489.374.745,98</b>
Terdiri dari :					
1) Hasil Penjualan Barang Milik Daerah	1.102.674.651,00	-	-	1.102.674.651,00	721.690.685,00
a) Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor	6.524.600,00	-	-	6.524.600,00	5.257.700,00
b) Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	149.429.114,00	-	-	149.429.114,00	82.223.211,00
c) Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	378.794.887,00	-	-	378.794.887,00	534.409.774,00
d) Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan	567.926.050,00	-	-	567.926.050,00	99.800.000,00
2) Jasa Giro	3.044.745.330,00	-	-	3.044.745.330,00	2.929.084.860,00
3) Pendapatan Bunga Deposito	17.190.898.900,68	-	-	17.190.898.900,68	18.877.677.446,90
a) Rekening Deposito Pada PT. BPD DIY	6.870.833.362,00	-	-	6.870.833.362,00	7.801.458.335,00
b) Rekening Deposito Pada PT. BTN	2.972.732.876,68	-	-	2.972.732.876,68	3.156.910.958,90
c) Rekening Deposito Pada PT. BNI	795.073.094,00	-	-	795.073.094,00	2.661.267.127,00
d) Rekening Deposito Pada PT. BRI	2.699.622.628,00	-	-	2.699.622.628,00	1.887.119.052,00
e) Rekening Deposito Pada PT. Bank Bukopin	2.742.773.927,00	-	-	2.742.773.927,00	1.629.972.551,00
f) Rekening Deposito Pada PT. Bank Mega	1.045.102.739,00	-	-	1.045.102.739,00	669.803.015,00
g) Rekening Deposito Pada PT. Bank OCB NISP	-	-	-	-	112.946.519,00
h) Rekening Deposito Pada PT. Bank Jateng	-	-	-	-	958.199.889,00
i) Rekening Deposito pada PT. Bank Sinarmas	64.760.274,00	-	-	64.760.274,00	-
4) Penerimaan Ganti Rugi atas Kerugian Daerah	1.070.000,00	-	-	1.070.000,00	27.223.700,00
5) Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Daerah	444.576.214,65	-	-	444.576.214,65	73.795.789,83
6) Denda Pajak	2.856.472.125,00	6.755.757.699,82	4.660.067.532,14	4.952.162.292,68	5.363.408.861,00
a) Denda Pajak Hotel	951.234.380,00	6.842.572,00	53.457.760,00	904.619.192,00	708.218.403,00
b) Denda Pajak Restoran	204.992.277,00	10.981.611,00	-	215.973.888,00	14.412.085,00
c) Denda Pajak Hiburan	12.594.604,00	-	-	12.594.604,00	17.077.371,00
d) Denda Pajak Reklame	27.678.106,00	-	-	27.678.106,00	43.573.216,00
e) Denda Pajak Parkir	3.251.045,00	806.600,00	-	4.057.645,00	1.026.919,00
f) Denda Pajak Air Tanah	48.026.286,00	-	-	48.026.286,00	14.027.052,00
g) Denda Pajak PBB	1.608.695.427,00	6.737.126.916,82	4.606.609.772,14	3.739.212.571,68	4.565.073.815,00
7) Denda retribusi	418.284.200,00	-	-	418.284.200,00	417.814.600,00
8) Setoran pendapatan dari pengembalian berasal dari:	4.942.923.617,32	-	-	4.942.923.617,32	1.812.720.991,49
a) Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	73.502.093,00	-	-	73.502.093,00	170.832.129,00
b) Pengembalian Hasil Pemeriksaan	221.916.930,55	-	-	221.916.930,55	1.068.063.618,08
c) Pendapatan dari pengembalian Hibah	788.434.661,00	-	-	788.434.661,00	133.306.478,00
d) Pendapatan dari pengembalian Lainnya	3.677.187.069,77	-	-	3.677.187.069,77	228.499.787,41
e) Pendapatan lain-Lain dari Dana BOS	181.882.863,00	-	-	181.882.863,00	212.018.979,00
9) Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	-	-	-	-	-
10) Pendapatan dari Barang Milik Daerah	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00	6.000.000,00
a) Sewa Kantin Pada Gd. Pengujian Kendaraan	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00	6.000.000,00
11) Sewa Gedung	1.653.159.400,00	442.086.409,67	1.105.432.662,91	989.813.146,76	633.009.851,83
a) Dinas Pendidikan/Edotel	-	-	-	-	-
b) DPUPKP (Rusunawa)	360.797.600,00	156.862.000,00	78.440.800,00	439.218.800,00	368.895.800,00
c) BPKAD	1.292.361.800,00	285.224.409,67	1.026.991.862,91	550.594.346,76	264.114.051,83
12) Penerimaan dari Pihak Ketiga yang Bukan Perusahaan Daerah berasal dari :	243.890.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	243.890.000,00	262.890.000,00
a) Hotel Kayu Manis (Pesanggrahan Ngestilaras)	5.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00	24.000.000,00
b) PT Bumi Kusuma Santosa (Reksa Arcade)	238.890.000,00	-	-	238.890.000,00	238.890.000,00
13) Denda Hasil Operasi Yustisi	129.384.000,00	-	-	129.384.000,00	98.673.000,00
14) Penyelenggaraan PMPS	-	-	-	-	1.012.560.000,00
15) Pendapatan BLUD Taman Pintar	14.784.210.000,10	890.318.566,67	637.340.166,67	15.037.188.400,10	16.077.198.878,00
16) Pendapatan BLUD RSUD	78.121.244.026,00	68.917.064.968,00	64.787.413.579,00	82.250.895.415,00	109.450.130.555,00
17) Jasa Bongkar Reklame	368.843.986,00	-	-	368.843.986,00	511.483.818,00
18) Pendapatan bunga Pajak	2.126.474.511,00	1.996.291.124,00	1.920.446.097,00	2.202.319.538,00	1.760.041.927,84
a) Pendapatan Bunga Pajak Hotel	1.682.068.421,00	1.682.805.878,00	1.565.227.650,00	1.799.646.649,00	1.674.614.958,00
b) Pendapatan Bunga Pajak Restoran	369.379.390,00	305.042.043,00	332.295.816,00	342.125.617,00	266.904.952,00
c) Pendapatan Bunga Pajak Hiburan	42.979.615,00	2.200.416,00	12.852.930,00	32.327.101,00	62.386.208,00
d) Pendapatan Bunga Pajak Reklame	-	-	-	-	(252.312.145,66)
e) Pendapatan Bunga Pajak Parkir	30.994.467,00	6.242.787,00	10.069.701,00	27.167.553,00	23.467.817,00
f) Pendapatan Bunga Pajak Air Tanah	969.618,00	-	-	969.618,00	(15.019.861,50)
g) Pendapatan Bunga Pajak Sarang Burung Walet	83.000,00	-	-	83.000,00	-
19) Pendapatan dari pengelolaan BUKP	23.577.042,02	-	-	23.577.042,02	13.829.080,53
20) Pendapatan BLUD Puskesmas	25.678.328.467,00	734.589.962,00	777.601.462,00	25.635.316.967,00	24.676.926.660,00
a) Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan I	917.445.181,00	-	-	917.445.181,00	912.674.219,00
b) Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan II	666.722.318,00	16.265.000,00	14.693.000,00	668.294.318,00	676.727.464,00
c) Pendapatan BLUD Puskesmas Gedongtengen	1.450.086.067,00	18.715.000,00	23.272.000,00	1.445.529.067,00	1.401.513.674,00
d) Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman I	1.476.785.639,00	-	-	1.476.785.639,00	1.369.693.169,00
e) Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman II	750.606.900,00	10.751.000,00	12.598.000,00	748.759.900,00	690.073.197,00
f) Pendapatan BLUD Puskesmas Gondomanan	940.618.405,00	11.570.000,00	19.130.000,00	933.058.405,00	916.211.877,00
g) Pendapatan BLUD Puskesmas Jetis	2.468.366.677,00	261.247.500,00	301.172.500,00	2.428.441.677,00	2.300.832.838,00
h) Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede I	1.432.076.445,00	1.595.000,00	2.313.500,00	1.431.357.945,00	1.402.238.262,00
i) Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede II	867.517.084,00	26.665.000,00	29.330.000,00	864.852.084,00	833.020.356,00
j) Pendapatan BLUD Puskesmas Kraton	1.157.756.583,00	15.790.000,00	13.480.000,00	1.160.066.583,00	1.096.317.713,00
k) Pendapatan BLUD Puskesmas Mantri Jeron	2.187.601.068,00	5.890.000,00	3.700.000,00	2.189.791.068,00	2.129.650.821,00
l) Pendapatan BLUD Puskesmas Mergangsan	1.759.944.631,00	39.719.500,00	46.162.000,00	1.753.502.131,00	1.738.700.668,00
m) Pendapatan BLUD Puskesmas Ngampilan	906.812.748,00	3.365.000,00	3.905.000,00	906.272.748,00	801.256.929,00
n) Pendapatan BLUD Puskesmas Pakualaman	694.222.526,00	23.303.000,00	24.456.500,00	693.069.026,00	716.896.783,00
o) Pendapatan BLUD Puskesmas Tegalrejo	2.783.868.741,00	217.705.000,00	191.270.000,00	2.810.303.741,00	2.640.518.247,00
p) Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo I	2.444.883.790,00	40.301.962,00	49.126.962,00	2.436.058.790,00	2.346.641.014,00
q) Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo II	1.108.730.432,00	12.037.000,00	16.192.000,00	1.104.575.432,00	1.087.512.160,00
r) Pendapatan BLUD Puskesmas Wirobrajan	1.664.283.232,00	29.670.000,00	26.800.000,00	1.667.153.232,00	1.616.447.269,00



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

	Realisasi Penerimaan 2019 (Rp)	Penambahan 2019 (Rp)	Pengurangan 2019 (Rp)	Jumlah Pendapatan-LO Per 31 Desember 2019 (Rp)	Realisasi Penerimaan 2018 (Rp)
21) Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis	5.666.389.889,20	57.277.500,00	141.056.333,00	5.582.611.056,20	5.349.303.280,00
22) Pendapatan BLUD RS Pratama	15.422.522.731,29	17.116.358.971,20	14.956.330.100,60	17.582.551.601,89	12.193.428.938,56
23) Pendapatan bunga Retribusi	36.543.594,00	-	-	36.543.594,00	24.212.556,00
24) Pendapatan denda administrasi	-	-	-	-	177.000.000,00
25) Pendapatan BLUD UPT Logam	502.276.911,00	-	-	502.276.911,00	360.451.566,00
26) Pendapatan dari pembayaran listrik pasar	1.593.771.300,00	-	-	1.593.771.300,00	1.636.607.700,00
27) Pendapatan denda listrik pasar	22.168.901,00	-	-	22.168.901,00	22.210.000,00
<b>Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>	<b>176.380.429.797,26</b>	<b>96.911.745.201,36</b>	<b>88.987.687.933,32</b>	<b>184.304.487.065,30</b>	<b>204.489.374.745,98</b>
Penambahan lain-lain PAD yang sah 2019 sebesar Rp96.911.745.201,36 merupakan mutasi tambah piutang dan pendapatan diterima dimuka pada tahun 2019. Sedangkan pengurangan lain-lain PAD yang sah 2019 sebesar Rp88.987.687.933,32 merupakan mutasi kurang piutang tahun 2019 dan pendapatan diterima dimuka tahun 2020, 2021, dst.					
<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>689.049.725.509,27</b>	<b>205.772.801.292,36</b>	<b>193.402.996.983,32</b>	<b>701.419.529.818,31</b>	<b>682.695.791.542,81</b>
<b>5.4.1. 2. PENDAPATAN TRANSFER SEBESAR</b>	<b>1.075.256.692.983,00</b>	<b>2.049.012.238,00</b>	<b>-</b>	<b>1.077.305.705.221,00</b>	<b>1.069.426.922.382,38</b>
Jumlah tersebut adalah realisasi penerimaan pendapatan Transfer yang terdiri dari :					
<b>5.4.1. 2. a. Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</b>	<b>875.308.177.702,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>875.308.177.702,00</b>	<b>867.706.455.745,00</b>
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan terdiri dari :					
<b>1) Dana Bagi Hasil Pajak, yaitu :</b>					
a) Pajak Bumi dan Bangunan, terdiri dari :					
(1) PBB migas					
(2) Biaya Pemungutan PBB Pertambangan Migas					
(3) Dana Bagi Hasil PBB Pemerintah Pusat	3.756.108.600,00	-	-	3.756.108.600,00	4.378.723.400,00
(4) Dana Bagi Hasil PBB Sektor Pertambangan	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Pajak Bumi dan Bangunan</b>	<b>3.756.108.600,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.756.108.600,00</b>	<b>4.378.723.400,00</b>
b) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan					
c) Pajak Penghasilan Pasal 21, 25, dan 29	23.314.737.000,00	-	-	23.314.737.000,00	40.350.210.890,00
<b>Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak</b>	<b>27.070.845.600,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27.070.845.600,00</b>	<b>44.728.934.290,00</b>
<b>2) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam</b>					
a) Provisi Sumber Daya Hutan	1.782.000,00	-	-	1.782.000,00	10.887.816,00
b) Sumberdaya Alam Perikanan	590.155.800,00	-	-	590.155.800,00	701.234.591,00
c) Cukai Tembakau	1.312.539.000,00	-	-	1.312.539.000,00	1.237.323.000,00
<b>Jumlah Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam</b>	<b>1.904.476.800,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.904.476.800,00</b>	<b>1.949.445.407,00</b>
<b>3) Dana Alokasi Umum</b>					
<b>4) Dana Alokasi Khusus</b>	<b>700.372.564.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>700.372.564.000,00</b>	<b>658.504.186.000,00</b>
<b>Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</b>	<b>875.308.177.702,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>875.308.177.702,00</b>	<b>867.706.455.745,00</b>
<b>5.4.1. 2. b. Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</b>	<b>65.318.639.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>65.318.639.000,00</b>	<b>74.751.792.000,00</b>
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya terdiri dari :					
<b>1) Dana Otonomi Khusus</b>					
<b>2) Dana Penyesuaian, yaitu :</b>					
a) Dana Penyesuaian Cukai Tembakau					
b) Dana Tambahan Penghasilan bagi PNSD					
c) Dana Penyesuaian Insentif Daerah	35.760.859.000,00	-	-	35.760.859.000,00	42.500.000.000,00
d) Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Provinsi					
e) Bantuan Operasional Sekolah					
BOSN SD					
BOSN SMP					
f) Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana	12.011.200.000,00	-	-	12.011.200.000,00	-
<b>Jumlah Dana Penyesuaian</b>	<b>65.318.639.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>65.318.639.000,00</b>	<b>42.500.000.000,00</b>
<b>3) Pendapatan Hibah</b>					
1) Hibah Pemerintah Pusat					
2) Hibah yang diterima SD Negeri					
3) Hibah yang diterima SMP Negeri					
4) Hibah Pasar Pingit					
<b>4) Dana Tunjangan Pendidikan</b>					
<b>Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</b>	<b>65.318.639.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>65.318.639.000,00</b>	<b>74.751.792.000,00</b>
<b>5.4.1. 2. c. Transfer Pemerintah Provinsi</b>	<b>134.629.876.281,00</b>	<b>2.049.012.238,00</b>	<b>-</b>	<b>136.678.888.519,00</b>	<b>126.968.674.637,38</b>
<b>1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak</b>					
Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi yang dianggarkan dalam Lain-Lain Pendapatan yang Sah, yang terdiri dari :					
a) Pajak Kendaraan Bermotor					
b) Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor					
c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor					
d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah					
e) Penyisihan Pajak Bumi dan Bangunan					
f) Bagi hasil Pajak air permukaan					
g) Bagi hasil Pajak Rokok Kota Yogyakarta					
g) Bagi Hasil Retribusi					
<b>Jumlah Pendapatan Bagi Hasil Pajak</b>	<b>133.393.876.281,00</b>	<b>2.049.012.238,00</b>	<b>-</b>	<b>135.442.888.519,00</b>	<b>126.437.432.637,38</b>
<b>2) Pendapatan Bagi Hasil Lainnya</b>					
<b>3) Pendapatan Lainnya</b>					
Pendapatan Lainnya sebesar Rp1.236.000,00 berupa Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya yang terdiri dari :					
a) Bantuan Keuangan kepada Kota Yogyakarta					
b) Bantuan untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa					
<b>Jumlah Pendapatan Lainnya</b>	<b>1.236.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.236.000,00</b>	<b>531.242.000,00</b>
<b>Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi</b>	<b>134.629.876.281,00</b>	<b>2.049.012.238,00</b>	<b>-</b>	<b>136.678.888.519,00</b>	<b>126.968.674.637,38</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.075.256.692.983,00</b>	<b>2.049.012.238,00</b>	<b>-</b>	<b>1.077.305.705.221,00</b>	<b>1.069.426.922.382,38</b>



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

5.4.1. 3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH -

	Realisasi Penerimaan 2019 (Rp)	Penambahan 2019 (Rp)	Pengurangan 2019 (Rp)	Jumlah Pendapatan-LO Per 31 Desember 2019 (Rp)	Realisasi Penerimaan 2018 (Rp)
<b>Realisasi Pendapatan Hibah</b>					
5.4.1. 3. a. Pendapatan Hibah	1.454.000.000,00	-	-	1.454.000.000,00	-
1) Hibah Pemerintah Pusat	1.454.000.000,00	-	-	1.454.000.000,00	-
2) Hibah yang diterima SD Negeri	-	-	-	-	-
3) Hibah yang diterima SMP Negeri	-	-	-	-	-
4) Hibah Pasar Pingit	-	-	-	-	-
b. Pendapatan Hibah Aset	-	-	-	-	-
c. Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-
d. Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>1.454.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.454.000.000,00</b>	<b>-</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.765.760.418.492,27</b>	<b>207.821.813.530,36</b>	<b>193.038.246.983,32</b>	<b>1.780.179.235.039,31</b>	<b>1.752.122.713.925,19</b>

5.4.2. BEBAN

Realisasi Beban Operasi tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

	Realisasi Belanja LRA 2019 (Rp)	Penambahan 2019 (Rp)	Pengurangan 2019 (Rp)	Jumlah Beban-LO Per 31 Desember 2019 (Rp)	Realisasi Beban 2018 (Rp)
<b>5.4.2. 1. BEBAN OPERASI</b>	<b>1.404.860.023.602,17</b>	<b>232.188.989.082,98</b>	<b>78.038.246.944,29</b>	<b>1.559.010.765.740,86</b>	<b>1.464.480.465.204,14</b>
Realisasi Beban Operasi terdiri dari :					
1. Beban Pegawai	760.532.062.428,28	4.113.201.532,00	5.953.376.237,50	758.691.887.722,78	767.270.949.068,35 (180.000.000,00)
a. Beban Pegawai (BLUD/BOSNAS/BOSPROV) - LO	-	-	-	-	-
b. Beban Gaji dan Tunjangan - LO	436.621.717.756,00	808.352,00	3.721.461,00	436.618.804.647,00	432.987.043.770,00
c. Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	159.916.722.770,00	-	-	159.916.722.770,00	176.225.862.950,00
d. Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO	8.034.863.866,00	-	-	8.034.863.866,00	7.960.792.132,00
e. Insentif Pemungutan Pajak Daerah	17.955.781.100,00	-	-	17.955.781.100,00	16.443.174.813,00
f. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.201.160.702,00	-	-	1.201.160.702,00	1.511.168.715,00
g. Uang Lembur - LO	488.610.000,00	488.610.000,00	488.610.000,00	488.610.000,00	16.214.000,00
h. Beban Honorarium Pengelolaan Dana BOS - LO	14.384.532.150,00	-	-	14.384.532.150,00	10.421.507.318,00
i. Beban Uang Piket - LO	3.926.830.000,00	-	-	3.926.830.000,00	3.512.624.876,00
j. Beban Uang Kelayan Panti - LO	194.313.000,00	-	-	194.313.000,00	179.286.000,00
k. Beban Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Belajar	-	-	-	-	1.663.798.450,00
l. Honorarium PNS	47.374.814.794,00	3.623.783.180,00	5.461.044.776,50	45.537.553.197,50	58.499.465.564,50
m. Honorarium Non PNS	70.432.716.290,28	-	-	70.432.716.290,28	58.030.010.479,85
2. Beban Barang	553.387.490.228,89	55.011.696.386,52	70.825.225.256,79	537.573.961.358,62	485.153.884.468,17
a. Beban Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
b. Beban Bahan Pakai Habis	11.604.198.793,09	10.635.942.974,40	7.535.512.598,99	14.704.629.168,50	10.170.807.773,97
- Beban Persediaan Barang Pakai habis	-	-	-	-	-
c. Beban Persediaan Bahan/ Material	74.534.130.906,60	26.554.761.394,36	35.676.276.412,64	65.412.615.888,32	67.232.171.114,56
- Beban Persediaan Bahan/Material	-	-	-	-	-
d. Beban Jasa Kantor	126.676.178.553,21	928.405.938,00	1.492.731.500,00	126.111.852.991,21	132.754.287.808,65
e. Beban Premi Asuransi	33.676.690.310,15	1.108.969.387,26	1.603.287.437,68	33.182.372.259,73	11.437.607.506,17
f. Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	10.632.609.387,90	-	2.684.557,00	10.629.924.830,90	9.582.230.051,23
g. Beban Cetak dan Penggandaan	12.936.477.782,00	2.229.972.734,50	3.807.158.947,82	11.359.291.568,68	14.923.470.885,38
- Beban Persediaan Barang Cetak	-	-	-	-	-
h. Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.155.517.000,00	-	-	6.155.517.000,00	4.942.011.230,00
i. Beban Sewa Sarana Mobilitas	443.110.000,00	-	-	443.110.000,00	865.644.462,00
j. Beban Sewa Alat Berat	26.500.000,00	-	-	26.500.000,00	10.200.000,00
k. Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.154.363.805,00	-	-	9.154.363.805,00	8.746.057.969,00
l. Beban Makanan dan Minuman	47.059.512.084,25	17.367.670,00	56.471.828,00	47.020.407.926,25	46.173.106.218,00
m. Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	1.745.343.524,00	174.420.614,00	284.165.131,71	1.635.599.006,29	(821.126.487,34)
- Beban Persediaan Pakaian Dinas	-	-	-	-	-
n. Beban Pakaian Kerja	1.776.853.795,00	-	9.890.000,00	1.766.963.795,00	1.493.770.866,00
o. Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	332.222.500,00	-	4.450.000,00	327.772.500,00	310.760.000,00
p. Beban Perjalanan Dinas	26.579.151.409,81	-	-	26.579.151.409,81	38.668.008.475,06
q. Beban Pemeliharaan	68.299.218.664,88	25.040.000,00	10.049.969.902,95	58.274.288.761,93	45.649.782.575,49
r. Beban Jasa Konsultasi	5.315.525.660,00	-	-	5.315.525.660,00	3.831.566.623,00
s. Beban Beasiswa Pendidikan PNS	368.576.000,00	-	-	368.576.000,00	500.412.000,00
t. Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	8.624.612.350,00	-	-	8.624.612.350,00	4.272.647.100,00
u. Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5.567.919.600,00	-	-	5.567.919.600,00	3.762.409.000,00
v. Beban Barang Dana BOS	49.210.542.284,00	-	-	49.210.542.284,00	22.179.693.050,00
w. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	3.086.627.000,00	-	6.400.000,00	3.080.227.000,00	2.982.830.698,00
x. Beban hibah barang atau jasa	179.280.000,00	3.114.303.455,00	73.714.721,00	3.219.868.734,00	374.017.513,00
y. Beban Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)	17.111.665.000,00	-	-	17.111.665.000,00	31.717.425.990,00
z. Beban Barang Lainnya	21.950.000,00	21.950.000,00	21.950.000,00	21.950.000,00	-
aa. Beban Pemberian Kompensasi kepada Perorangan/Mas	90.000.000,00	-	-	90.000.000,00	90.000.000,00
ab. Beban Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/	21.978.151.600,00	-	-	21.978.151.600,00	23.186.994.846,00
ac. Beban Barang Kelayan Panti	112.976.400,00	112.976.400,00	112.976.400,00	112.976.400,00	117.097.200,00
ad. Beban Bantuan Transport dan Akomodasi	10.087.585.819,00	10.087.585.819,00	10.087.585.819,00	10.087.585.819,00	-
3. Beban Bunga	-	-	-	-	-
4. Beban Subsidi	-	-	-	-	-
5. Beban Hibah	79.389.047.945,00	1.259.645.450,00	1.259.645.450,00	79.389.047.945,00	53.665.425.050,00
a. Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.259.645.450,00	1.259.645.450,00	1.259.645.450,00	1.259.645.450,00	-
b. Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat	47.342.470.016,00	-	-	47.342.470.016,00	27.245.791.600,00
c. Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	-	-	-	-	-
d. Beban Hibah Dana BOS	30.786.932.479,00	-	-	30.786.932.479,00	26.419.633.450,00
d. Beban Uang Untuk diberikan kepada Masyarakat	-	-	-	-	-
Beban Uang Untuk diberikan kepada Masyarakat merupakan konversi beban hibah dari beban barang jasa	-	-	-	-	-
6. Beban Bantuan Sosial	11.551.423.000,00	-	-	11.551.423.000,00	7.764.735.000,00
a. Beban Bantuan Sosial kepada Individu, Keluarga	9.695.180.000,00	-	-	9.695.180.000,00	5.892.300.000,00
b. Beban Bantuan Sosial kepada Lembaga Non	724.393.000,00	-	-	724.393.000,00	633.610.000,00
c. Beban Bantuan Sosial Tidak Dapat Direncanakan	1.131.850.000,00	-	-	1.131.850.000,00	1.238.825.000,00
7. Beban Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-
a. Beban Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-
b. Beban Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	-	-	-	-	-



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

	Realisasi Belanja LRA 2019 (Rp)	Penambahan 2019 (Rp)	Pengurangan 2019 (Rp)	Jumlah Beban-LO Per 31 Desember 2019 (Rp)	Realisasi Beban 2018 (Rp)
8. Beban Penyusutan	-	162.251.344.396,22	-	162.251.344.396,22	140.755.721.428,80
9. Beban penyesihan piutang	-	3.306.466.252,30	-	3.306.466.252,30	5.528.301.939,98
10. Beban amortisasi	-	6.246.635.065,94	-	6.246.635.065,94	4.341.448.248,85
11. Beban Premi JKK dan JKN	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH BEBAN OPERASI</b>	<b>1.404.860.023.602,17</b>	<b>232.188.989.082,98</b>	<b>78.038.246.944,29</b>	<b>1.559.010.765.740,860</b>	<b>1.464.480.465.204,14</b>
Rincian belanja dibayar dimuka dan pembayaran utang serta rincian utang belanja terdapat pada lampiran 19A					
Beban penyusutan terdiri dari:	-	162.251.344.396,22	-	162.251.344.396,222	140.755.721.428,80
- penyusutan Peralatan dan Mesin	-	100.548.312.847,78	-	100.548.312.847,78	88.071.231.145,84
- penyusutan Gedung dan Bangunan	-	24.365.034.207,29	-	24.365.034.207,29	20.327.217.580,94
- penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	37.337.997.341,15	-	37.337.997.341,15	32.357.272.702,02
Beban penyesihan terdiri dari :	-	-	-	-	-
- penyesihan piutang pendapatan pajak sebesar	-	1.662.615.441,36	-	1.662.615.441,36	4.252.004.622,79
- penyesihan piutang pendapatan retribusi sebesar	-	175.127.058,10	-	175.127.058,10	138.184.800,83
- penyesihan piutang Lainnya	-	56.072.969,28	-	56.072.969,28	15.239.568,65
- penyesihan piutang transfer	-	10.245.061,19	-	10.245.061,19	-
- penyesihan piutang PAD lainnya sebesar	-	648.632.787,71	-	648.632.787,71	1.122.622.947,72
- penyesihan dana bergulir	-	-	-	-	-
- penyesihan bagian lancar TGR	-	-	-	-	-
- penyesihan bagian lancar tagihan Bagi Hasil Kemitraan	-	-	-	-	-
- Penyesihan Piutang Denda Tagihan Bagi Hasil Kemitraan	-	10.000,00	-	10.000,00	-
- penyesihan bagian lancar tagihan sewa	-	753.762.934,66	-	753.762.934,66	250.000,00
- penyesihan bagian lancar pemberian pinjaman	-	-	-	-	-
- penyesihan tagihan bagi hasil kemitraan	-	-	-	-	-
- penyesihan tagihan sewa	-	-	-	-	-
- penyesihan TGR	-	-	-	-	-
Jumlah Penyesihan	-	3.306.466.252,30	-	3.306.466.252,30	5.528.301.939,98
Beban amortisasi sebesar	-	6.246.635.065,94	-	6.246.635.065,94	4.341.448.248,85
- amortisasi aset tidak berwujud berupa software	-	-	-	-	-
- amortisasi aset tidak berwujud berupa hasil kajian	-	6.246.635.065,94	-	6.246.635.065,94	4.341.448.248,85
Beban Lain-lain adalah beban Pemerintah Daerah dalam rangka melakukan kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang.					
<b>5.4.2. 2. BEBAN TRANSFER</b>					
Realisasi Beban Transfer tahun 2019 terdiri dari:					
a. Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	-	-	-	-	-
b. Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-
c. Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah daerah Lainnya	1.228.210.990,00	-	-	1.228.210.990,00	1.592.338.080,00
d. Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	-	-	-	-	-
e. Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	753.036.006,00	-	-	753.036.006,00	735.662.418,00
f. Beban transfer Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-
g. Beban Tidak Terduga	317.693.064,00	-	-	317.693.064,00	293.241.254,00
<b>JUMLAH BEBAN TRANSFER</b>	<b>2.298.940.060,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.298.940.060,00</b>	<b>2.621.241.752,00</b>
<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>1.407.158.963.662,17</b>	<b>232.188.989.082,98</b>	<b>78.038.246.944,29</b>	<b>1.561.309.705.800,86</b>	<b>1.467.101.706.956,14</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>				<b>218.869.529.238,45</b>	<b>285.021.006.969,04</b>
	<b>Realisasi Belanja LRA 2019 (Rp)</b>	<b>Penambahan 2019 (Rp)</b>	<b>Pengurangan 2019 (Rp)</b>	<b>Jumlah Beban-LO Per 31 Desember 2019 (Rp)</b>	<b>Realisasi Beban 2018 (Rp)</b>
<b>5.4.3. SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>				<b>159.000.000,00</b>	<b>-</b>
<b>5.4.3. 1. SURPLUS NON OPERASIONAL</b>					
Surplus Penjualan Aset Non lancar	-	159.000.000,00	-	159.000.000,00	-
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Surplus Non Operasional</b>				<b>159.000.000,00</b>	<b>-</b>
<b>5.4.3. 2. DEFISIT NON OPERASIONAL</b>					
Defisit Penjualan Aset Nonlancar/penghapusan aset tetap	-	-	-	-	-
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Defisit Non Operasional</b>					<b>-</b>
<b>5.4.4. POS LUAR BIASA</b>					
<b>5.4.4. 1. PENDAPATAN LUAR BIASA</b>					
a. Pendapatan Luar Biasa	-	-	-	-	-
1) Penerimaan Aset Metrologi	-	-	-	-	-
<b>5.4.4. 2. BEBAN LUAR BIASA</b>					
a. Beban Luar Biasa	-	-	-	-	(17.999.000,00)
1) Penyerahan Aset SMA/SMK ke Provinsi DIY:	-	-	-	-	(17.999.000,00)
2) Hutang kepada Pihak Ketiga - Bank BNI	-	-	-	-	-
3) Hutang kepada Pihak Ketiga - PT. Perwita Karya	-	-	-	-	(17.999.000,00)
Surplus/Defisit Pos Luar Biasa					17.999.000,00
<b>TOTAL BEBAN</b>	<b>1.407.158.963.662,17</b>	<b>232.188.989.082,98</b>	<b>78.038.246.944,29</b>	<b>1.561.309.705.800,86</b>	<b>1.467.083.707.956,14</b>
<b>Surplus/defisit LO</b>				<b>219.028.529.238,45</b>	



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

5.5. PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	Rp	Rp
<b>5.5.1. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	<b>357.498.780.179,10</b>	<b>408.563.202.700,10</b>

Arus Kas dari Aktivitas Operasi adalah arus masuk dan arus keluar kas pada Bendahara Umum Daerah yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2019 dan 2018 yang terdiri dari :

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	Rp	Rp
1. Arus Masuk Kas yang diperoleh dari:	<b>1.764.657.743.841,27</b>	<b>1.736.198.307.167,52</b>
a. Penerimaan Pajak Daerah	451.265.948.031,00	407.573.263.422,00
b. Penerimaan Retribusi Daerah	32.428.343.731,00	33.984.531.787,00
c. Penerimaan Hasil Pengelolaan Keayaan Daerah Yang Dipisahkan	28.975.003.950,01	28.032.365.012,83
d. Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	175.277.755.146,26	197.181.224.563,31
e. Penerimaan Dana Bagi hasil Pajak	27.070.845.600,00	44.728.934.290,00
f. Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.904.476.800,00	1.949.445.407,00
g. Penerimaan Dana Alokasi Umum	700.372.564.000,00	658.504.186.000,00
h. Penerimaan Dana Alokasi Khusus	145.960.291.302,00	162.523.890.048,00
i. Penerimaan Otonomi Khusus	0,00	0,00
j. Penerimaan Dana Penyesuaian	65.318.639.000,00	42.500.000.000,00
k. Penerimaan Hibah	0,00	32.251.792.000,00
l. Penerimaan Bagi Hasil Pajak	133.393.876.281,00	126.437.432.637,38
m. Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	1.236.000.000,00	0,00
n. Penerimaan Lainnya	0,00	531.242.000,00
o. Penerimaan Hibah	1.454.000.000,00	0,00
p. Penerimaan Dana Darurat	0,00	0,00
q. Penerimaan Lainnya	0,00	0,00
r. Penerimaan dari pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
2. Arus Keluar Kas digunakan untuk:	<b>1.407.158.963.662,17</b>	<b>1.327.635.104.467,42</b>
1). Belanja Operasi	<b>1.406.841.270.598,17</b>	<b>1.327.341.863.213,42</b>
a. Pembayaran Pegawai	760.532.062.428,28	767.231.708.627,85
b. Pembayaran Barang	553.387.490.228,89	496.351.994.037,57
c. Pembayaran Bunga	0,00	0,00
d. Pembayaran Subsidi	0,00	0,00
e. Pembayaran Hibah	79.389.047.945,00	53.665.425.050,00
f. Pembayaran Bantuan Sosial	11.551.423.000,00	7.764.735.000,00
g. Pembayaran Bantuan Keuangan	1.981.246.996,00	2.328.000.498,00
h. Pembayaran Kejadian Luar Biasa	0,00	0,00
2). Belanja Tak Terduga	<b>317.693.064,00</b>	<b>293.241.254,00</b>
<i>Arus Kas Bersih</i>	<b>357.498.780.179,10</b>	<b>408.563.202.700,10</b>

Jumlah arus kas bersih Tahun 2018 sebesar Rp 357.498.780.179,10 menunjukkan bahwa selama tahun 2019 dari aktivitas operasi menambah saldo Kas sebesar Rp 357.498.780.179,10





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

	31 Desember 2019 Rp	31 Desember 2018 Rp
<b>5.5.2. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>	<b>(363.606.697.548,17)</b>	<b>(388.232.808.092,94)</b>

Arus Kas dari Aktivitas Investasi adalah arus masuk dan arus keluar kas pada Bendahara Umum Daerah yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas dari investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat dimasa yang akan datang.

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Tahun 2019 dan 2018 yang terdiri dari :

	31 Desember 2019 Rp	31 Desember 2018 Rp
1. Arus Masuk Kas yang diperoleh dari:	<b>1.102.674.651,00</b>	<b>721.690.685,00</b>
a. Penjualan atas peralatan dan mesin	534.748.601,00	621.890.685,00
b. Penjualan atas gedung dan bangunan	567.926.050,00	99.800.000,00
2. Arus Keluar Kas digunakan untuk:	<b>364.709.372.199,17</b>	<b>388.954.498.777,94</b>
a. Perolehan Tanah	25.569.058.040,00	74.967.469.865,00
b. Perolehan Peralatan dan Mesin	96.719.552.169,17	103.905.673.673,95
c. Perolehan Gedung dan Bangunan	54.312.514.794,87	22.131.236.620,86
d. Perolehan Jalan, Irigasi, dan jaringan	101.225.143.404,83	44.603.591.095,89
e. Perolehan Aset Tetap Lainnya	828.300.673,00	4.208.575.933,00
f. Perolehan Aset Lainnya	48.779.803.117,30	75.276.191.867,79
g. Penyertaan Modal Pada BUMD	37.275.000.000,00	63.861.759.721,45
h. Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		
<b>Arus Kas Bersih</b>	<b>(363.606.697.548,17)</b>	<b>(388.232.808.092,94)</b>

Jumlah arus kas bersih Tahun 2019 sebesar -Rp 363.606.697.548,17 menunjukkan bahwa selama tahun 2019 dari aktivitas investasi mengurangi saldo Kas sebesar Rp 363.864.626.393,31

	31 Desember 2019 Rp	31 Desember 2018 Rp
<b>5.5.3. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>	<b>5.725.732,00</b>	<b>(47.991.992.402,00)</b>

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan adalah arus masuk dan arus keluar kas pada Bendahara Umum Daerah yang ditujukan untuk penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang dan penyertaan modal.

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2019 dan 2018 yang terdiri dari :

	31 Desember 2019 Rp	31 Desember 2018 Rp
1. Arus Masuk Kas yang diperoleh dari:	5.725.732,00	8.046.838.558,00
a. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	5.725.732,00	2.550.000,00
b. Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
c. Pencairan Dana Cadangan	0,00	8.044.288.558,00
d. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00
2. Arus Keluar Kas digunakan untuk:	0,00	56.038.830.960,00
a. Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	56.038.830.960,00
b. Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
c. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
<b>Arus Kas Bersih</b>	<b>5.725.732,00</b>	<b>(47.991.992.402,00)</b>

Jumlah arus kas bersih Tahun 2019 sebesar Rp 5.725.732,00 menunjukkan bahwa selama Tahun 2019 dari aktivitas pendanaan menambah saldo Kas sebesar Rp 5.725.732,00



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

	31 Desember 2019 Rp	31 Desember 2018 Rp
<b>5.5.4. ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<p>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris adalah arus masuk dan arus keluar kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan pemerintah. Arus masuk Kas dari Aktivitas Transitoris meliputi penerimaan PFK dan Penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan kembali uang persediaan bendahara pengeluaran. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran transitoris seperti kiriman uang keluar dan pemberian uang persediaan kepada bendahara pengeluaran.</p> <p>Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun 2019 dan 2018. Aktivitas Transitoris Tahun 2019 terdiri dari penerimaan dan penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga dari BUD, Penggunaan dan pengembalian Uang Persediaan, Penerimaan sisa uang persediaan dan Pemberian uang persediaan kepada bendahara pengeluaran serta Penggunaan dan pengembalian Tambah Uang Persediaan, Penerimaan sisa tambah uang persediaan dan Pemberian tambah uang persediaan kepada bendahara pengeluaran..</p>		
	<b>31 Desember 2019 Rp</b>	<b>31 Desember 2018 Rp</b>
1. Arus Masuk Kas yang diperoleh dari:	204.055.409.898,60	174.141.301.983,31
a. Penerimaan PFK	113.015.922.965,64	100.327.827.978,76
b. Penggunaan UP	13.577.131.452,76	11.358.582.864,64
c. Pengembalian UP	6.804.229.455,24	5.790.916.835,36
d. Sisa UP 2018	34.639.092,00	300,00
e. Penggunaan TU	69.457.031.421,48	53.975.500.476,26
f. Pengembalian TU	1.166.455.511,48	2.687.843.528,29
g. Sisa TU 2018	0,00	630.000,00
2. Arus Keluar Kas digunakan untuk:	204.055.409.898,60	174.141.301.983,31
a. Penyetoran PFK	113.015.922.965,64	100.327.827.978,76
b. Pengeluaran SP2D UP	20.416.000.000,00	17.149.500.000,00
c. Pengeluaran SP2D TU	70.623.486.932,96	56.663.974.004,55
<b>Arus Kas Bersih</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Jumlah arus kas masuk Tahun 2019 sebesar Rp 204.055.409.898,60 terdiri dari pemungutan PFK Tahun 2019 sebesar Rp 113.015.922.965,64, penggunaan uang persediaan sebesar Rp 13.577.131.452,76, pengembalian uang persediaan sebesar Rp 6.804.229.455,24 dan Sisa uang persediaan 2019 sebesar Rp 34.639.092,00, penggunaan TU sebesar Rp 69.457.031.421,48, pengembalian TU sebesar Rp 1.166.455.511,48 dan Sisa TU 2019 sebesar Rp 0,00.

Jumlah arus kas keluar Tahun 2019 sebesar Rp 204.055.409.898,60 terdiri dari penyetoran kewajiban kepada pihak ketiga sebesar Rp 113.015.922.965,64, pemberian uang persediaan sebesar Rp 20.416.000.000,00 dan pemberian TU sebesar Rp 70.623.486.932,96.

Jumlah arus kas bersih Tahun 2019 dari aktivitas transitoris nol.

	31 Desember 2019 Rp	31 Desember 2018 Rp
<b>5.5.5. SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>220.340.133.122,45</b>	<b>226.442.324.759,52</b>
<p>Dari keempat arus kas bersih tersebut di atas didapat saldo Kas dan Setara Kas tahun 2019 sebesar Rp 220.340.133.122,45</p> <p>Hal ini berarti saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2019 sebesar Rp 220.340.133.122,45 mengalami penurunan sebesar Rp 6.102.191.637,07 jika dibandingkan saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2018 sebesar Rp 226.442.324.759,52</p> <p>Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2019 sebesar Rp 220.340.133.122,45 dan per 31 Desember 2018 sebesar Rp 226.442.324.759,52 terdiri atas :</p>		



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	Rp	Rp
1. Kas di Kas Daerah	176.836.026.304,34	188.225.493.976,14
2. Deposito	-	-
3. Kas di Bendahara Pengeluaran :		
a. Sisa Uang Persediaan	34.639.092,00	323.749.804,00
b. Pajak Belum Disetor	-	-
c. Pendapatan Belum Disetor	-	-
d. Kewajiban kpd Pihak Ketiga	-	-
e. Sisa TU Bendahara	-	630.000,00
4. Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
5. Kas di Tim Dana Bergulir	-	-
6. Kas di BLUD RSUD	16.315.175.635,26	15.455.907.772,26
7. Kas di BLUD Taman Pintar	3.562.497.919,44	4.400.934.134,34
8. KAS BLUD PUSKESMAS DANUREJAN I	229.822.314,20	244.850.277,20
9. KAS BLUD PUSKESMAS DANUREJAN II	132.755.292,14	133.202.872,22
10. KAS BLUD PUSKESMAS GEDONGTENGAN	218.538.683,00	130.558.697,00
11. KAS BLUD PUSKESMAS GONDOKUSUMAN I	354.533.368,64	133.386.489,64
12. KAS BLUD PUSKESMAS GONDOKUSUMAN II	194.223.955,00	103.055.593,00
13. KAS BLUD PUSKESMAS GONDOMANAN	135.460.575,00	144.377.221,00
14. KAS BLUD PUSKESMAS JETIS	438.609.408,00	421.037.582,00
15. KAS BLUD PUSKESMAS KOTEGEDE I	100.267.951,00	16.908.814,00
16. KAS BLUD PUSKESMAS KOTAGEDE II	119.297.146,00	127.199.147,00
17. KAS BLUD PUSKESMAS KRATON	261.308.481,00	133.826.426,00
18. KAS BLUD PUSKESMAS MANTRIJERON	477.872.287,00	198.835.640,00
19. KAS BLUD PUSKESMAS MERGANGSAN	1.060.595.546,00	1.180.669.720,00
20. KAS BLUD PUSKESMAS NGAMPILAN	304.003.649,62	224.215.733,00
21. KAS BLUD PUSKESMAS PAKUALAMAN	348.343.231,00	288.669.147,00
22. KAS BLUD PUSKESMAS TEGALREJO	127.865.034,00	119.881.468,00
23. KAS BLUD PUSKESMAS UMBULHARJO I	313.553.238,00	405.176.627,00
24. KAS BLUD PUSKESMAS UMBULHARJO II	84.881.489,00	36.320.975,00
25. KAS BLUD PUSKESMAS WIROBRAJAN	222.393.727,00	326.649.117,00
26. Kas di BLUD RS Pratama	8.539.523.751,80	5.667.427.499,56
27. Kas di BLUD UPT Pusat Bisnis	1.669.279.394,65	1.551.719.416,40
28. Kas Jaminan Bongkar	-	-
29. Sisa Kas BOSNAS dan BOS Provinsi	8.176.660.137,16	6.413.442.731,16
30. Kas di BLUD UPT Logam	82.005.512,20	34.197.879,60
<i>Jumlah Kas dan Setara Kas</i>	<b>220.340.133.122,45</b>	<b>226.442.324.759,52</b>
	<b>31 Desember 2019</b>	<b>31 Desember 2018</b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
<b>5.5.6. SALDO AKHIR KAS</b>	<b>220.741.718.430,99</b>	<b>227.461.712.258,52</b>
a. Jumlah Kas dan Setara Kas	220.340.133.122,45	226.442.324.759,52
b. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan (sisa kas BOSNAS dan BOS Propinsi)	-	372.089.337,00
c. Saldo di Bendahara Penerimaan atas titipan pajak hiburan	50.559.818,66	-
d. Setoran Ke Kas Daerah melewati tahun anggaran	50.559.818,66	-
e. Setoran ke Kas BLUD UPT Pusat Bisnis hasil pemeriksaan	44.692.271,22	87.774.031,00
f. Saldo kas di Tim Dana Bergulir	0,00	87.774.031,00
g. Titipan Pihak Ketiga atas teater 4D dan Toilet Taman Pintar	255.773.400,00	471.750.100,00
Jumlah Saldo Akhir Kas	<b>220.741.718.430,99</b>	<b>227.461.712.258,52</b>



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

**5.6. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Komponen Laporan Perubahan Ekuitas terdiri dari Ekuitas awal, Surplus/defisit LO, Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar dan Ekuitas akhir.

	<b>31 Desember 2019</b>	<b>31 Desember 2018</b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
<b>5.6.1. EKUITAS AWAL</b>	<b>4.084.409.554.757,17</b>	<b>3.803.865.068.832,81</b>

Ekuitas awal 2018 sebesar Rp 3.803.865.068.832,81. Ekuitas ini merupakan ekuitas akhir tahun 2017.

Ekuitas awal tahun 2019 sebesar RpRp4.084.409.554.757,17 merupakan selisih dari total aset akhir tahun 2018 sebesar Rp4.101.991.184.624,48 dan kewajiban akhir tahun 2018 sebesar Rp17.581.629.867,31

	<b>31 Desember 2019</b>	<b>31 Desember 2018</b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
<b>5.6.2. SURPLUS/DEFISIT LO</b>	<b>219.028.529.238,45</b>	<b>285.039.005.969,04</b>

Surplus/Defisit LO tahun 2018 sebesar Rp285.039.005.969,04 dan surplus/defisit LO tahun 2019 sebesar Rp219.028.529.238,45 yang merupakan selisih antara pendapatan LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

	<b>31 Desember 2019</b>	<b>31 Desember 2018</b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
<b>5.6.3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR</b>		

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp0,-

**JUMLAH**

	<b>31 Desember 2019</b>	<b>31 Desember 2018</b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
<b>5.6.4. EKUITAS MUTASI</b>		

Ekuitas mutasi terdiri dari:

- Pengurangan penyisihan piutang	776.613.356,01	(56.376.465,50)
- Penerimaan Tagihan Pemberian Pinjaman - MKPL BMT	(5.725.732,00)	(2.550.000,00)
- Penerimaan Tagihan Dana Bergulir - PEW	-	-
- Pengurangan akumulasi penyusutan dari penghapusan aset	5.319.394.560,21	
- Pengurangan nilai aset tetap	(1.705.451.420,09)	(240.000.000,00)
- Koreksi Aset	703.531.600,00	363.081.728,09
- Penambahan aset terminal		45.714.674.000,00
- Hibah aset	-	6.429.235.059,01
- Hibah persediaan	6.106.423.463,30	2.068.000.000,00
- BM yang tidak menjadi aset	(56.441.651,00)	(947.318.326,32)
- Ekstrakomp	(91.539.332.261,63)	(84.886.250.274,75)
- Penyesuaian penyusutan aset	(38.743.158.368,70)	27.117.031.311,06
- Penyesuaian Investasi Permanen	54.319.781.706,87	
- Pelepasan Aset Tanah Investasi Bank Jogja	(4.540.000.000,00)	
- Koreksi atas aset barang rusak	15.398.139,13	
- Koreksi atas aset barang tidak ketemu	6.406.000,00	
- Penyesuaian Piutang Pendapatan Retribusi	752.818.624,00	
- Penyesuaian Piutang Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah	33.327.732,00	
- Penyesuaian Penyisihan Piut Bag Hasil Kemitraan	10.000,00	
- Penyesuaian Penyisihan Tagihan Bagi Hasil Kemitraan	1.337.120,00	
- Koreksi Beban Penyisihan	546.258,00	
- Koreksi Kas Bendahara BOS	-	351.123.339,00
- Koreksi kurang catat atas Aset Tetap		55.355.500,00
- Koreksi atas Investasi Permanen		(404.630.928,27)
- Koreksi Bagian Lancar Tagihan Sewa		50.000.000,00
- Koreksi Persediaan yang diakui Aset Tetap di SKPD baru		(105.894.987,00)
<b>JUMLAH</b>	<b>(68.554.520.873,90)</b>	<b>(4.494.520.044,68)</b>

	<b>31 Desember 2019</b>	<b>31 Desember 2018</b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
<b>5.6.5. EKUITAS AKHIR</b>	<b>4.234.883.563.121,72</b>	<b>4.084.409.554.757,17</b>

Ekuitas akhir Tahun 2018 adalah sebesar Rp 4.084.409.554.757,17. dan ekuitas akhir tahun 2019 sebesar Rp 4.234.883.563.121,72.

Ekuitas ini merupakan hasil dari penjumlahan ekuitas awal tahun ditambah surplus/defisit-LO dan ekuitas mutasi.



## BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

### a. Letak Geografis dan Luas Wilayah

Secara geografis Kota Yogyakarta terbentang antara  $110^{\circ}24'19''$  sampai  $110^{\circ}28'53''$  Bujur Timur dan  $07^{\circ}15'24''$  sampai  $07^{\circ}24'26''$  Lintang Selatan. Jarak terjauh dari utara ke selatan kurang lebih 7,5 km dan dari barat ke timur kurang lebih 5,6 km. Secara administratif Kota Yogyakarta berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kabupaten Sleman (Kecamatan Depok dan Kecamatan Mlati);
- Sebelah Timur : Kabupaten Sleman (Kecamatan Depok dan Kecamatan Berbah) dan Kabupaten Bantul (Kecamatan Banguntapan);
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bantul (Kecamatan Banguntapan dan Kecamatan Sewon);
- Sebelah Barat : Kabupaten Sleman (Kecamatan Gamping) dan Kabupaten Bantul (Kecamatan Kasihan);

Kota Yogyakarta terletak di daerah dataran lereng aliran Gunung Merapi, memiliki kemiringan lahan yang relatif datar (antara 0-2 %) dan berada pada ketinggian rata-rata 114 meter dari permukaan air laut (dpa). Sebagian wilayah dengan luas 1.657 ha terletak pada ketinggian kurang dari 100 meter dan sisanya (1.593 ha) berada pada ketinggian antara 100-199 meter dpa. Sebagian besar jenis tanahnya adalah regosol. Terdapat 3 (tiga) sungai yang mengalir dari arah utara ke selatan, yaitu : Sungai Gajahwong yang mengalir di bagian timur kota, Sungai Code di bagian tengah dan Sungai Winongo di bagian barat kota.

Luas Kota Yogyakarta sekitar 32,5 km<sup>2</sup> atau 1,02 % dari luas wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan terdiri dari 14 Kecamatan, 45 Kelurahan, 250 kampung, 616 RW dan 2534 RT. Luas masing-masing Kecamatan sebagai berikut :

**Tabel 6.1**  
**Pembagian Wilayah Kota Yogyakarta Menurut Kecamatan,**  
**Kelurahan dan Luas**

No.	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah			Luas
			Kampung	RW	RT	Km <sup>2</sup>
1.	Tegalrejo	Kricak	3	13	61	0,82
		Karangwaru	5	14	56	0,70
		Bener	2	7	26	0,57
		Tegalrejo	4	12	47	0,85
2.	Jetis	Bumijo	3	13	57	0,58
		Cokrodiningratan	3	11	57	0,66
		Gowongan	3	13	52	0,46



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No.	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah			Luas
			Kampung	RW	RT	Km <sup>2</sup>
3.	Gondokusuman	Demangan	3	12	44	0,47
		Kotabaru	1	4	20	0,71
		Klitren	4	16	63	0,68
		Baciro	6	21	87	1,06
		Terban	4	12	58	0,80
4.	Danurejan	Suryatmajan	6	14	43	0,28
		Tegalpanggung	5	16	66	0,35
		Bausasran	5	12	49	0,47
5.	Gedongtengen	Sosromenduran	7	14	54	0,50
		Pringgokusuman	7	22	84	0,46
6.	Ngampilan	Ngampilan	9	13	70	0,45
		Notoprajan	5	8	50	0,37
7.	Wirobrajan	Pakuncen	7	12	56	0,65
		Wirobrajan	3	12	58	0,67
		Patangpuluhan	3	10	51	0,44
8.	Mantrijeron	Gedongkiwo	3	18	86	0,86
		Suryodiningratan	4	17	70	0,90
		Mantrijeron	5	20	75	0,85
9.	Kraton	Patehan	4	10	44	0,40
		Panembahan	5	18	78	0,66
		Kadipaten	4	15	53	0,34
10.	Gondomanan	Ngupasan	4	13	49	0,67
		Prawirodirjan	4	18	61	0,45
11.	Pakualaman	Purwokinanti	4	10	47	0,33
		Gunungketur	3	9	36	0,30
12.	Mergangsan	Keparakan	4	13	58	0,53



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No.	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah			Luas
			Kampung	RW	RT	Km <sup>2</sup>
		Wirogunan	7	24	76	0,85
		Brontokusuman	6	23	84	0,93
13.	Umbulharjo	Semaki	3	10	34	0,66
		Muja-muju	4	12	55	1,53
		Tahunan	8	12	50	0,78
		Warungboto	5	9	38	0,83
		Pandeyan	7	13	52	1,38
		Sorosutan	17	18	70	1,68
		Giwangan	7	13	44	1,26
14.	Kotagede	Rejowinangun	9	13	50	1,25
		Prenggan	17	13	57	0,99
		Purbayan	18	14	58	0,83
	Jumlah	45	250	616	2.534	32,50

Sumber : Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 335 Tahun 2018 tentang Jumlah RT dan RW se-Kota Yogyakarta Periode 2018 – 2021.

#### b. Penduduk

Berdasarkan hasil registrasi penduduk diketahui bahwa jumlah penduduk Kota Yogyakarta pada akhir tahun 2019 sebanyak 415.599 orang dengan perincian sebagai berikut:

- Laki-laki : 202.780 orang
- Perempuan : 212.819 orang.

Secara terperinci distribusi penduduk Kota Yogyakarta berdasarkan Kecamatan, seperti tertera pada tabel di bawah ini :



**Tabel 6.2**  
**Distribusi Frekuensi Penduduk Kota Yogyakarta**  
**Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2019**

No	Kecamatan	Jumlah (Jiwa)			%
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Tegalrejo	18.240	19.019	37.259	8,97
2	Jetis	13.228	14.017	27.245	6,56
3	Gondokusuman	20.813	22.188	43.001	10,35
4	Danurejan	10.519	10.945	21.464	5,16
5	Gedongtengen	9.752	10.176	19.928	4,80
6	Ngampilan	9.114	9.480	18.594	4,47
7	Wirobrajan	13.654	14.380	28.034	6,75
8	Mantrijeron	17.317	18.239	35.556	8,56
9	Kraton	10.667	11.243	21.910	5,27
10	Gondomanan	7.319	7.704	15.023	3,61
11	Pakulaman	5.201	5.643	10.844	2,61
12	Mergangsan	15.555	16.586	32.141	7,73
13	Umbulharjo	34.426	35.786	70.212	16,89
14	Kotagede	16.975	17.413	34.388	8,27
Jumlah		202.780	212.819	415.599	100

Sumber: aplikasi Open Data Jogja Smart Service.

Kepadatan penduduk Kota Yogyakarta tahun 2019 mencapai 12.788 orang per kilometer persegi.

**c. Organisasi Pemerintahan Daerah**

Perangkat daerah Kota Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dan peraturan daerah lain terkait kelembagaan maupun penyertaan modal terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah, meliputi :
  - a. Sekretaris Daerah;





- b. Asisten Kesejahteraan Rakyat, membidangi Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat, dan Bagian Hukum;
  - c. Asisten Perekonomian, membidangi Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan, Bagian Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama, dan Bagian Layanan Pengadaan;
  - d. Asisten Umum, membidangi Bagian Umum, Bagian Protokol dan Bagian Organisasi;
2. Sekretariat DPRD;
  3. Inspektorat Daerah;
  4. Dinas Daerah, terdiri dari :
    - a. Dinas Pendidikan;
    - b. Dinas Pemuda dan Olahraga;
    - c. Dinas Kesehatan;
    - d. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    - e. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang;
    - f. Dinas Kebakaran;
    - g. Satuan Polisi Pamong Praja;
    - h. Dinas Sosial;
    - i. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak;
    - j. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
    - k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
    - l. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
    - m. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
    - n. Dinas Pertanian dan Pangan;
    - o. Dinas Lingkungan Hidup;
    - p. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian;
    - q. Dinas Perhubungan;
    - r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
    - s. Dinas Kebudayaan;
    - t. Dinas Pariwisata;
    - u. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan;
  5. Badan, terdiri dari :
    - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
    - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
    - c. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
  6. Kecamatan, terdiri dari 14 Kecamatan;
  7. Kelurahan, terdiri dari 45 Kelurahan.
  8. Kantor Kesatuan Bangsa;
  9. Rumah Sakit Jogja;
  10. Lembaga lain : Badan Penanggulangan Bencana Daerah;



11. Penyertaan modal (investasi) Daerah, terdiri dari :
- a. PT Bank BPD DIY
  - b. Perumda PDAM Tirtamarta Yogyakarta;
  - c. Perumda BPR Bank Jogja;
  - d. PT Radio Swara Adiloka;
  - e. PD. Jogjatama Vishesha;
  - f. BUKP se-Kota Yogyakarta.



## **BAB VII**

### **INFORMASI LAINNYA**

#### **1. PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE A GIWANGAN YOGYAKARTA**

##### **A. Penyelesaian Perkara Terminal Giwangan**

Kerjasama pembangunan dan pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A Yogyakarta antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan PT Perwita Karya dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan PT Perwita Karya dengan Akta Notaris Nomor 2 Tahun 2002 tanggal 9 September 2002 yang diadakan perubahan dengan Akta Nomor 37 Tahun 2004 tanggal 26 Juni 2004 tentang Pembangunan dan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A Yogyakarta.

Dalam pelaksanaan perjanjian, PT Perwita Karya tidak dapat melaksanakan pembangunan sarana penunjang lainnya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian, Oleh karena itu pada tanggal 10 Maret 2009 Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan pengambilalihan pengelolaan terhadap Terminal Tipe A Yogyakarta sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 4 tertanggal 10 Maret 2009 tentang Pembatalan.

Untuk menentukan besaran investasi PT Perwita Karya dalam pembangunan Terminal Tipe A Yogyakarta, telah disepakati menunjuk Tim Appraisal Independen untuk melakukan penilaian terhadap bangunan yang telah dikerjakan oleh PT Perwita Karya.

Dari hasil penilaian akhir Tim Appraisal Independen, bangunan yang telah dikerjakan ditetapkan sebesar Rp41.537.174.000,- (Empat puluh satu milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah). Terhadap hasil akhir penilaian Tim Appraisal tersebut, PT. Perwita Karya belum dapat menerima dengan alasan laporan appraisal belum sempurna karena adanya 3 (tiga) aset yang belum dimasukkan dalam penilaian yaitu pematangan tanah, satuan sambungan telephon, dan piutang.

Karena tidak ada titik temu atas persoalan tersebut, PT Perwita Karya menggugat Pemerintah Kota Yogyakarta ke Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan pokok gugatan meminta agar 3 (tiga) aset berupa pematangan tanah,



satuan sambungan telepon dan piutang dimasukkan dalam hasil akhir penilaian Tim Appraisal.

Dalam perkara perdata tersebut, pihak PT Bank BNI melakukan intervensi dengan mengajukan gugatan intervensi karena dalam pembiayaan pembangunan Terminal Giwangan, PT Perwita Karya memperoleh kredit pembiayaan dengan jaminan Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 00188/Giwangan tanggal 24 September 2002 di atas Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 1/Giwangan, dimana pokok gugatan intervensi yang diajukan oleh Bank BNI adalah meminta Hakim untuk memerintahkan agar pembayaran oleh Pemerintah Kota Yogyakarta langsung dibayarkan kepada Bank BNI.

Dalam proses Tingkat Pertama telah ada putusan, dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta telah mengabulkan gugatan PT Perwita Karya sesuai putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 29/Pdt.G/2010/PN.YK tanggal 8 Nopember 2010. Namun atas putusan tersebut Pemerintah Kota Yogyakarta keberatan dan mengajukan upaya hukum banding. Dimana dalam putusannya Pengadilan Tinggi Yogyakarta mengabulkan permohonan banding dari Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 52/PDT/2011/PT/Y tanggal 23 Desember 2011 dengan amar putusan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 29/Pdt.G/2010/PN.YK tanggal 8 Nopember 2010.

Atas putusan Pengadilan Tinggi tersebut, PT Perwita Karya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 10 Pebruari 2012. Dimana Mahkamah Agung mengabulkan kasasi yang diajukan oleh PT Perwita Karya pada bulan Nopember 2014 dan atas putusan tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 416 PK/Pdt/2015 tanggal 25 Nopember 2015, Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dinyatakan ditolak, dan oleh karena itu perkara mengenai Terminal Penumpang Tipe A Yogyakarta ini dinyatakan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap *inkracht van gewijsde*.



Dalam perkara ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta dihukum untuk membayar nilai penggantian investasi beserta bunga senilai total Rp56.056.829.960,- (lima puluh enam milyar lima puluh enam juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) yang harus dibayarkan kepada PT Bank Negara Indonesia sejumlah Rp41.537.174.000,- (empat puluh satu milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah), dan sisanya sejumlah Rp14.519.655.960,- (empat belas milyar lima ratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) dibayarkan ke PT Perwita Karya.

Dalam rangka melaksanakan putusan Mahkamah Agung Nomor 416 PK/Pdt/2015 tanggal 25 Nopember 2015, Pemerintah Kota Yogyakarta harus membayar nilai penggantian investasi beserta bunga senilai total Rp56.056.829.960,- (lima puluh enam milyar lima puluh enam juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), telah dianggarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dalam kode rekening 3.2.3. Pembayaran Pokok Utang sebesar Rp56.038.830.960,- (Lima puluh enam milyar tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah). Adanya selisih nominal Rp17.999.000,- (Tujuh belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) disebabkan ada kesalahan penjumlahan nilai penggantian diluar bunga dalam putusan MA yang tertulis Rp50.731.873.176,- (Lima puluh milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tiga seratus tujuh puluh enam rupiah), seharusnya Rp50.713.874.176,- (Lima puluh milyar tujuh ratus tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh empat seratus tujuh puluh enam rupiah). Sehingga apabila ditambahkan dengan bunga sebesar Rp5.324.956.784,- (Lima milyar tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) menjadi sebesar Rp56.038.830.960,- (Lima puluh enam milyar tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

Dalam rangka menyelesaikan pelaksanaan eksekusi pembayaran nilai penggantian, dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta di Kantor



Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan saksi dari pihak-pihak terkait dilakukan kesepakatan Para Pihak meliputi Pemerintah Kota Yogyakarta, PT. Perwita Karya dan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang tertuang dalam Berita Acara Kesepahaman Pelaksanaan Putusan Perkara Nomor 29/Pdt.G/2010/PN.Yk juncto Nomor 52/PDT/2011/PT.Y juncto Nomor 2512 K/Pdt/2012 juncto Nomor 416 PK/Pdt/2015 juncto Nomor 1/Pdt.Eks/2015/PN.Yyk juncto Nomor 22/Pdt.Eks/2018/PN.Yyk

NOMOR : 180/309

NOMOR : PK.003/SK.UM/I-2019 tanggal 28-01-2019

NOMOR : RRC/3/0050/R tanggal 28-01-2019

Adapun isi kesepakatan tersebut diantaranya adalah :

1. Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan pembayaran kepada PT. Perwita Karya sebesar Rp56.038.830.960,- (Lima puluh enam milyar tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) sesuai Amar putusan *in casu* dengan teknis pembayaran :
  - a. Rp41.537.174.000,- (empat puluh satu milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dibayarkan kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.;
  - b. Rp14.501.656.960,- (empat belas milyar lima ratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) dibayarkan kepada PT. Perwita Karya.
2. Pemerintah Kota Yogyakarta menerima :
  - a. Terminal Giwanagan berupa tanah dan seluruh bangunan di atasnya, yang bebas dari segala ikatan hukum dari pihak manapun;
  - b. Daftar nama pedagang yang masih mempunyai tunggakan hutang atas sewa kios beserta bukti yang cukup;
  - c. Sertifikat asli SHGB Nomor 00188/Giwangan atas nama Prananto Hidayat beserta tanda bukti Roya (Pelepasan Pembebanan Hak) terhadap SHGB Nomor 00188/Giwangan dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.;



- d. Bukti pemutusan/pembatalan/penghentian Perjanjian Kerjasama antara PT. Perwita Karya dengan pengelola SPBU yang berada di lahan terminal.

Selanjutnya bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Yogyakarta, Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta melaksanakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 31 Januari 2019 mengenai Pelaksanaan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 22/Pdt.Eks/2018/PN.Yyk tanggal 31 Januari 2019. Dalam pelaksanaan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 31 Januari 2019 tersebut, Panitera memanggil dan datang menghadap para pihak meliputi Pemerintah Kota Yogyakarta, PT. Perwita Karya dan PT. BNI (Persero). Atas penjelasan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam pertemuan tersebut, para pihak menyatakan telah mengerti dan siap untuk pelaksanaan eksekusi.

Untuk pelaksanaan yang pertama, Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta menyerahkan dokumen kepada Pemerintah Kota Yogyakarta berupa :

- a. 1 (satu) set asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00188 tanggal 24 September 2002;
- b. 1 (satu) set asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00882/2002 tanggal 4 Nopember 2002;
- c. 1 (satu) set asli bermaterai dan 1 (satu) set asli tembusan (tanpa materai) Surat Roya Hak Tanggungan Nomor : ADK/4.2/1052/R tanggal 26 Nopember 2018 yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta;
- d. Asli Surat Keterangan Perubahan Rekening Penerima Pembayaran Kompensasi Nomor : RRC/1/0212/R tanggal 26 Nopember 2018.

Untuk pelaksanaan yang kedua, Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta memerintahkan pemindahbukuan dari rekening penitipan milik Pengadilan Negeri Yogyakarta di Bank Tabungan Negara nomor rekening 0049701-30-000012-7 kepada rekening penerima sebagai berikut :



- a. Rp41.537.174.000,- (empat puluh satu milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dibayarkan kepada PT. Perwita Karya melalui rekening PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk nomor 268144607 atas nama Simsem Divisi RRC di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Jakarta Pusat;
- b. Rp14.501.656.960,- (empat belas milyar lima ratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) dibayarkan kepada PT. Perwita Karya melalui rekening Bank BPD DIY Nomor 001.111.000.428 atas nama PT. Perwita Karya.

Dengan demikian seluruh putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta nomor 29/Pdt.G/2010/PN.Yk jo Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta nomor 52/PDT/2011/PTY jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung nomor 2512 K/Pdt/2012 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung nomor 416 PK/PDT/2015 telah dilaksanakan dengan sempurna.

Dalam rangka mengembalikan hak atas tanah Terminal Penumpang Tipe A Yogyakarta kepada Pemerintah Kota Yogyakarta sekaligus persiapan penyerahan pengelolaan terminal tipe A kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia sebagai tindaklanjut amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, telah dilakukan beberapa langkah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta mengajukan Revisi Hak Pengelolaan (HPL) atas nama PT. Perwita Karya menjadi sepenuhnya atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta kepada Kepala Kantor Pertanahan/ATR BPN Kota Yogyakarta melalui surat Nomor : 590/2205 tanggal 17 Juni 2019 perihal Permohonan Penghapusan Hak Pengelolaan a.n. PT. Perwita Karya;
2. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta mengajukan permohonan pelepasan HGB sertifikat Nomor : 00188 atas nama PT. Perwita karya dan menghapus catatan HPL sertifikat Nomor : 1/Giwangan atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta melalui surat Nomor : 590/2340 tanggal 27 Juni 2019





perihal Permohonan Percepatan Pelepasan HGB dan Penghapusan Catatan HPL Terminal Giwangan Kota Yogyakarta;

3. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta mengajukan permohonan informasi terkait perkembangan proses pelepasan HGB dan Penghapusan Catatan HPL Terminal Giwangan Kota Yogyakarta kepada Kepala Kantor Pertanahan/ATR BPN Kota Yogyakarta melalui surat Nomor : 640/3120 tanggal 19 Agustus 2019 perihal Permohonan Percepatan Penghapusan Hak Pengelolaan a.n. PT. Perwita Karya.

#### **B. Penyerahan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A Giwangan kepada Pemerintah Pusat**

Penyerahan pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A Giwangan Yogyakarta kepada Pemerintah Pusat sebagai tindaklanjut amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sampai saat ini belum dapat dilaksanakan. Adapun kronologis proses penyerahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 21 Maret 2016 dilakukan Inventarisasi dan Verifikasi P3D terminal penumpang Yogyakarta oleh Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Kota Yogyakarta yang hasilnya dituangkan dalam bentuk Berita Acara.
2. Pada tanggal 31 Mei 2016 disampaikan surat Walikota Yogyakarta Nomor 800/2010 perihal pemenuhan kelengkapan data pengalihan P3D Terminal tipe A kepada Kementerian Perhubungan (Sekretaris Dirjen Perhubungan Darat).
3. Penyelesaian perkara Terminal Giwangan antara Pemkot Yogyakarta dengan PT. Perwita Karya sampai dengan terbitnya sertifikat pengembalian hak pengelolaan Terminal Giwangan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta, sebagaimana telah diuraikan pada poin (A).
4. Pada tanggal 13 Februari 2017 Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan melalui surat Nomor 801/216/DJPD/2017 telah menyampaikan surat keputusan pengalihan PNS Daerah ke Kementerian Perhubungan sebanyak 20 orang.



5. Pada tanggal 20-21 Juni 2019 menghadiri undangan rapat koordinasi Percepatan Penyelesaian Pengalihan Aset Terminal Tipe A di Dirjend Perhubungan Darat beserta jajaran Kementerian Perhubungan terkait dengan potensi pembagian tapak Terminal tipe A Giwangan untuk kepentingan Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Kota Yogyakarta.
6. Pada tanggal 20 Agustus 2019 menghadiri undangan rapat di Biro Tata Pemerintahan Setda DIY acara Percepatan Penyelesaian Permasalahan Pengalihan Aset Terminal A Giwangan koordinasi tahapan Penyelesaian Pengalihan Aset pada Terminal Giwangan.
7. Pemerintah Kota Yogyakarta sedang menunggu surat resmi dari Kementerian Perhubungan berkaitan dengan hasil jawaban koordinasi pembagian tapak Terminal tipe A Giwangan (sesuai dengan uraian kegiatan angka 5).

Dengan demikian proses penyerahan pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A Giwangan Yogyakarta kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia belum dapat dilaksanakan karena menunggu proses pelepasan HGB sertifikat Nomor : 00188 atas nama PT. Perwita Karya dan menghapus catatan HPL sertifikat Nomor : 1/Giwangan atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta.

## **2. Divestasi PT. Radio Swara Adhiloka**

PT. Radio Swara Adhiloka adalah salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang merupakan penyertaan modal dari pengambilalihan saham oleh Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2006.

PT. Radio Swara Adhiloka berkedudukan di Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta didirikan berdasarkan akta Notaris nomor 17 tanggal 25 Agustus 1990 dibuat dihadapan Notaris Koeshariati Tito, SH., yang telah berubah beberapa kali Anggaran Dasar melalui rapat umum pemegang saham, terakhir dengan Akta Notaris nomor 10 oleh Hj. Pandam Nurwulan, SH., M.Hum., dikeluarkan di Yogyakarta tanggal 12 Agustus 2008.

Dasar hukum penyertaan modal Pemerintah Kota Yogyakarta pada PT. Radio Swara Adhiloka adalah :



1. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1992 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kotamadya Dati II Yogyakarta;
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006; dan
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Yogyakarta pada PT. Radio Swara Adhiloka Dalam Bentuk Pengambilalihan Saham.

Adapun susunan pemegang saham PT. Radio Swara Adhiloka sebagaimana tertuang dalam tabel sebagai berikut :

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp.)	% Kepemilikan Saham
1.	Pemerintah Kota Yogyakarta	690	690.000.000,-	99,28 %
2.	Ny. Hj. Badi'ah	5	5.000.000,-	0,72 %
	Total	695	695.000.000,-	100,00 %

Pertimbangan penyertaan modal pada PT. Radio Swara Adhiloka adalah untuk peningkatan pelayanan keprograman radio dalam rangka mendukung Taman Pintar Yogyakarta, menjadi radio edukasi anak di wilayah Kota Yogyakarta. PT. Radio Swara Adhiloka pada awalnya memiliki kantor dan ruang siaran di kawasan Taman Pintar Yogyakarta dengan nama udara sebagai Radio Anak Jogja pada frekuensi FM 99,9 Mhz.

Seiring pemberlakuan penuh UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan PP Nomor 50 Tahun 2005, maka sesuai dengan Izin Siaran Radio (ISR) FM PT. Radio Swara Adhiloka yang diterbitkan Kementerian Kominfo RI, maka PT. Radio Swara Adhiloka harus melakukan siaran dan berpindah operasi di Wonosari Gunung Kidul pada tahun 2013.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja BPK RI Nomor : 37/LHP/XVIII.YOG/11/2016 atas Efektifitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan BUMD Tahun Anggaran 2011 - 2016 pada Pemerintah Kota Yogyakarta,



maka BPK RI merekomendasikan untuk segera menyusun kajian atas keberadaan dan kelangsungan operasional PT. Radio Swara Adhiloika.

Sebagai tindaklanjut atas rekomendasi tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan kerjasama dengan P2EB FEB UGM untuk melakukan analisis atas kelayakan divestasi penyertaan modal pada PT. Radio Swara Adhiloika. Dari hasil analisis tersebut P2EB FEB UGM merekomendasikan Pemerintah Kota Yogyakarta mendivestasi kepemilikan Radio Swara Adhiloika, dengan pertimbangan :

1. Secara historis analisis keuangan menunjukkan tren kerugian dan prediksi juga menunjukkan hal yang sama, hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 52 Tahun 2012 Pasal 24 ayat (1) :”Dalam hal investasi pemerintah daerah diperkirakan rugi, pemerintah daerah melakukan divestasi”;
2. Keberadaan PT. Radio Swara Adhiloika sudah tidak sesuai dengan tujuan penyertaan modal semula; dan
3. Peluang untuk merealisasikan pendapatan dan keuntungan hanya bisa jika perusahaan dan/atau pemegang saham melakukan investasi tambahan.

Tahapan divestasi PT. Radio Swara Adhiloika yang sudah dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Yogyakarta melayangkan surat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta melalui surat Walikota Yogyakarta kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 570/1231 tanggal 2 April 2019 perihal Permohonan Persetujuan Divestasi PT. Radio Swara Adhiloika;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta memberikan persetujuan atas rencana divestasi PT. Radio Swara Adhiloika melalui Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14/KEP/DPRD/VII/2019 tanggal 7 Agustus 2019 tentang Persetujuan Divestasi atas Kepemilikan Saham pada PT. Radio Swara Adhiloika;
3. Audit Keuangan Due Dilligence atas Laporan Keuangan PT. Radio Swara Adhiloika untuk Tahun Buku yang Berakhir Tanggal 30 September 2019 melalui jasa Kantor Akuntan Publik Drs. Soeroso Donosapetro;



4. Analisis penilaian bisnis untuk mengetahui nilai pasar saham PT. Radio Swara Adhiloka melalui Kantor Jasa Penilai Publik Amin Nirman Alfiantori & Rekan yang memberikan kesimpulan nilai pasar 100% saham pada tanggal 30 September 2019 sebesar Rp.404.000.000,00 (Empat ratus empat juta rupiah);
5. Persetujuan penjualan saham dan penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) melalui surat Walikota Yogyakarta Nomor 032/4913 tanggal 19 Desember 2019 tentang Persetujuan Penjualan dan Harga Limit dengan besaran HPS Rp.690.000.000,00 (Enam ratus sembilan puluh juta rupiah);
6. Menyerahkan penjualan secara lelang atas kepemilikan saham PT. Radio Swara Adhiloka milik Pemerintah Kota Yogyakarta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta melalui surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Nomor 028/6090 tanggal 27 Desember 2019 tentang Permohonan Lelang Barang Bergerak Tidak Berwujud (Kepemilikan Saham).

Pelaksanaan lelang atas pemilikan saham Pemerintah Kota Yogyakarta pada PT. Radio Swara Adhiloka selanjutnya akan dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai ketentuan berlaku.



## BAB VIII PENUTUP

Dari uraian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 pada bab terdahulu dapat disimpulkan sebagai berikut:

### A. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

#### 1. Pendapatan

Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Secara keseluruhan realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp1.765.760.418.492,27 atau 100,63% dari target sebesar Rp1.754.768.489.387,00 meningkat 1,66% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.736.919.997.852,52.

Pendapatan Asli Daerah APBD Tahun Anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp689.049.725.509,27 atau 105,52% dari target Rp653.011.939.630,00 yang terdiri dari :

- Pajak Daerah sebesar Rp451.265.948.031,00 atau 106,08% dari target;
- Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp32.428.343.731,00 atau 96,94% dari target;
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp28.975.003.950,01 atau 100,14% dari target;
- Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp176.380.429.797,26 atau 106,74% dari target.

Pendapatan Transfer tahun 2019 terealisasi sebesar Rp1.075.256.692.983,00 atau 97,61% dari target, yang terdiri dari :

- Bagi Hasil Pajak sebesar Rp27.070.845.600,00 atau 61,96% dari target;
- Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar Rp1.904.476.800,00 atau 75,40% dari target;
- Dana Alokasi Umum sebesar Rp700.372.564.000,00 atau 100,17% dari target;
- Dana Alokasi Khusus sebesar Rp145.960.291.302,00 atau 85,32% dari target.
- Dana Penyesuaian sebesar Rp65.318.639.000,00 atau 99,51% dari target;
- Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sebesar Rp133.393.876.281,00 atau 112,83% dari target;
- Bantuan Keuangan dari Provinsi sebesar Rp1.236.000.000,00 atau 100% dari target.

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah tahun 2019 terealisasi sebesar Rp1.454.000.000,00 yang merupakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat atau 727% dari target.



## 2. Belanja

Realisasi belanja APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.734.593.335.861,34 atau 89,23% dari anggaran yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Transfer.

### a. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasional sebesar Rp1.404.860.023.602,17 atau sebesar 90,83% dari anggaran. Proporsi Belanja Operasi terhadap Belanja APBD sebesar 80,99%. Belanja operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial.

Belanja Pegawai yang dianggarkan sebesar Rp830.857.956.853,00 terealisasi sebesar Rp760.532.062.428,28 atau 91,54% dari anggaran. Belanja Barang dianggarkan sebesar Rp617.496.329.981,00 terealisasi sebesar Rp553.387.490.228,89 atau sebesar 89,62% dari anggaran.

Belanja hibah dianggarkan sebesar Rp85.740.983.138,00 terealisasi Rp79.389.047.945,00 atau 92,59% dari anggaran.

Belanja Bantuan Sosial yang dianggarkan sebesar Rp12.526.580.000,00 terealisasi sebesar Rp11.551.423.000,00 atau 92,22% dari anggaran.

### b. Belanja Modal

Belanja Modal sebesar Rp327.434.372.199,17 atau 84,59% dari anggaran. Belanja Modal meliputi Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Modal Lainnya. Proporsi Belanja Modal terhadap belanja APBD pada tahun anggaran 2019 sebesar 18,88%.

### c. Belanja Tak Terduga.

Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan sebesar Rp8.227.812.190,52 terealisasi sebesar Rp317.693.064,00 atau 3,86% dari anggaran.

### d. Transfer

Belanja Transfer merupakan Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Partai Politik yang dianggarkan sebesar Rp2.002.804.587,00 terealisasi sebesar Rp1.981.246.996,00 atau 98,92% dari anggaran.

## 3. Pembiayaan

### a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp226.448.050.491,52 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2018 sebesar Rp226.442.324.759,52, dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Rp5.725.732,00.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

---

- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah  
Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp37.275.000.000,00 untuk Penyertaan Modal (Investasi) daerah pada PT. Bank BPD DIY.
- c. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2019  
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp220.340.133.122,45.

**B. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih**

1. Saldo Anggaran Lebih Awal berasal dari Saldo Anggaran Lebih Tahun 2018 sebesar Rp226.442.324.759,52;
2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan yang digunakan untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2019, sebesar Rp226.442.324.759,52;
3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2019 sebesar Rp220.340.133.122,45.

**C. Neraca**

**1. Aset**

Neraca per 31 Desember 2019 menunjukkan nilai Aset sebesar Rp4.246.893.437.243,72 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp351.153.371.463,13 Investasi Jangka Panjang sebesar Rp532.648.848.218,24 Aset Tetap sebesar Rp3.318.709.338.013,44, Dana Cadangan sebesar Rp0,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp44.381.879.548,91.

**2. Kewajiban**

Neraca per 31 Desember 2019 menunjukkan Kewajiban sebesar Rp12.009.874.122,00, yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

**3. Ekuitas Dana**

Neraca per 31 Desember 2019 menunjukkan Ekuitas sebesar Rp4.234.883.563.121,72.

**D. Laporan Operasional**

**1. Pendapatan-LO**

Jumlah Pendapatan-LO tahun 2019 sebesar Rp1.780.179.235.039,31 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LO sebesar Rp701.419.529.818,31, Pendapatan Transfer-LO sebesar Rp1.077.305.705.221,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO sebesar Rp1.454.000.000,00.





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

---

**2. Beban-LO**

Jumlah Beban-LO tahun 2019 sebesar Rp1.561.309.705.800,86 yang terdiri dari Beban Operasi-LO sebesar Rp1.559.010.765.740,86 dan beban Transfer-LO sebesar Rp2.298.940.060,00.

**3. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional**

Surplus dari Kegiatan Operasional tahun 2019 sebesar Rp218.869.529.238,45.

**4. Surplus Non Operasional**

Surplus Non Operasional tahun 2019 sebesar Rp159.000.000,00.

**5. Pendapatan Luar Biasa**

Pada tahun 2019 tidak terdapat Pendapatan Luar Biasa.

**6. Beban Luar Biasa**

Pada tahun 2019 tidak terdapat Beban Luar Biasa.

**7. Surplus/Defisit-LO**

Surplus-LO tahun 2019 sebesar Rp219.028.529.238,45.

**E. Laporan Arus Kas**

Saldo kas BUD dan BLUD per 31 Desember 2019 sebesar Rp220.340.133.122,45 berkurang sebesar Rp6.102.191.637,07 dibanding saldo kas pada tanggal 1 Januari 2019 sebesar Rp226.442.324.759,52. Berkurangnya kas sebesar Rp6.102.191.637,07 disebabkan oleh arus kas bersih dari aktivitas operasi surplus sebesar Rp357.498.780.179,10, arus kas bersih dari aktifitas investasi defisit sebesar Rp363.606.697.548,17, arus kas bersih aktivitas pendanaan surplus sebesar Rp5.725.732,00 dan tidak ada selisih pada arus kas bersih dari aktivitas transitoris.

Saldo akhir kas per 31 Desember 2019 sebesar Rp220.691.158.612,33 terdiri dari:

1. Saldo kas BUD dan BLUD sebesar Rp220.340.133.122,45;
2. Setoran ke Kas Daerah hasil pemeriksaan sebesar Rp50.559.818,66;
3. Setoran ke Kas BLUD UPT Pusat Bisnis hasil pemeriksaan sebesar Rp44.692.271,22; dan
4. Titipan Pihak Ketiga atas Teater 4D dan Toilet Taman Pintar sebesar Rp255.773.400,00.

**F. Laporan Perubahan Ekuitas**

**1. Ekuitas Awal**

Ekuitas awal sebesar Rp4.084.409.554.757,17 merupakan ekuitas akhir tahun 2018.

**2. Surplus/Defisit LO**

Surplus/Defisit LO tahun 2019 sebesar Rp219.028.529.238,45 merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban-LO selama periode pelaporan tahun 2019, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

---

**3. Ekuitas Mutasi**

Ekuitas Mutasi sebesar (Rp68.554.520.873,90) terdiri dari pengurangan penyisihan piutang Rp776.613.356,01, penerimaan tagihan pemberian pinjaman-MKPL BMT (Rp5.725.732,00), Pengurangan akumulasi penyusutan dari penghapusan Rp5.319.394.560,21, Pengurangan nilai aset tetap (Rp1.705.451.420,09), koreksi aset Rp703.531.600,00, Hibah Persediaan Rp6.106.423.463,30, Belanja Modal yang tidak menjadi aset (Rp56.441.651,00), ekstrakomp (Rp91.539.332.261,63), penyesuaian penyusutan aset (Rp38.743.158.368,70), Penyesuaian investasi permanen Rp54.319.781.706,87, Pelepasan Aset Tanah Investasi Bank Jogja (Rp4.540.000.000,00), Koreksi atas aset barang rusak Rp15.398.139,13, Koreksi atas aset barang tidak ketemu Rp6.406.000,00, Penyesuaian piutang pendapatan retribusi Rp752.818.624,00, Penyesuaian piutang pendapatan Lain-lain PAD yang sah Rp33.327.732,00, Penyesuaian penyisihan piutang bagi hasil kemitraan Rp10.000,00, Penyesuaian penyisihan tagihan bagi hasil kemitraan Rp1.337.120,00, dan Koreksi Beban Penyisihan Rp546.258.

**4. Ekuitas Akhir**

Ekuitas Akhir Tahun 2018 sebesar Rp4.084.409.554.757,17 dan Ekuitas Akhir Tahun 2019 sebesar Rp4.234.883.563.121,72.

**WALIKOTA YOGYAKARTA**

ttd

**H. HARYADI SUYUTI**

**LAMPIRAN VIII**  
**DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG**  
**DAERAH**

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2019**

<b>NO</b>	<b>Uraian Rincian Piutang</b>	<b>Tahun Pengakuan Piutang</b>	<b>Saldo Awal Piutang</b>	<b>Penambahan Piutang</b>	<b>Pengurangan Piutang</b>	<b>Saldo Akhir Piutang</b>
1	2	3	4	5	6	7
1	Piutang Pajak	1994 - 2019	52.997.501.453,40	107.710.147.557,00	105.220.670.578,35	55.486.978.432,05
2	Piutang Retribusi	1994 - 2019	1.403.275.746,30	1.654.976.987,90	1.501.551.089,00	1.556.701.642,20

**WALIKOTA YOGYAKARTA**

**ttd**

**HARYADI SUYUTI**

**LAMPIRAN IX**  
**DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN**  
**PIUTANG TAK TERTAGIH**

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

<b>No.</b>	<b>Jenis Piutang</b>	<b>Jumlah Piutang</b>	<b>Jumlah Penyisihan</b>	<b>NRV</b>
1	2	3	4	5
1	Piutang Pajak	102.125.917.028,00	46.638.938.595,95	55.486.978.432,05
2	Piutang Retribusi	3.156.534.910,00	1.599.833.267,80	1.556.701.642,20

**WALIKOTA YOGYAKARTA**

**ttd**

**HARYADI SUYUTI**

**LAMPIRAN X**  
**DAFTAR REKAPITULASI DANA**  
**BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA**  
**BERGULIR**

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
 DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR  
 TAHUN ANGGARAN 2019**

No.	SKPD	Uraian	Plafond Kredit	Jumlah	Jumlah Penyisihan	NRV
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Bantuan Modal Pinjaman Lunak kepada Koperasi dan LKM				
		Pokja 2003-Tahap I	190.000.000,00	-		
		Pokja 2003-Tahap II	413.000.000,00	16.023.817,00		
		Pokja 2003-Tahap III	370.000.000,00	10.687.614,00		
		Jumlah Pokja 2003	<b>973.000.000,00</b>	<b>26.711.431,00</b>		
		Pokja 2006-Kelompok I	385.000.000,00	7.000.000,00		
		Pokja 2006-Kelompok II	525.000.000,00	-		
		Jumlah Pokja 2006	<b>910.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>		
		Pokja 2007	299.000.000,00	5.785.315,00		
		Pokja 2008	500.000.000,00	196.403.967,00		
		Pengurangan Tahun 2010		(170.686.133,00)		
		Pengurangan Tahun 2011		(13.086.132,00)		
		Pengurangan Tahun 2013		(265.000,00)		
		Pengurangan Tahun 2016		(3.230.894,00)		
	<b>Jumlah</b>	<b>2.682.000.000,00</b>	<b>48.632.554,00</b>	<b>48.632.554,00</b>	-	
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Bergulir kepada Kelompok UMK dalam rangka Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan (PEW)				
		Tahun 2006	1.048.000.000,00	321.945.400,00		
		Tahun 2007	912.000.000,00	185.163.788,00		
		<b>Jumlah</b>	<b>1.960.000.000,00</b>	<b>507.109.188,00</b>	<b>507.109.188,00</b>	-
3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pinjaman Pengadaan Tenda bagi Pedagang Kaki Lima Kota Yogyakarta Tahun 2006	<b>1.250.000.000,00</b>	<b>154.747.950,00</b>		
		<b>TOTAL</b>	<b>5.892.000.000,00</b>	<b>710.489.692,00</b>	<b>710.489.692,00</b>	-

**WALIKOTA YOGYAKARTA**

ttd

**HARYADI SUYUTI**



**LAMPIRAN XI**  
**DAFTAR PENYERTAAN MODAL**  
**(INVESTASI) DAERAH**

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
 DAFTAR PENYERTAAN MODAL ( INVESTASI ) DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2019

No	Tahun Penyer-taan Modal	Nama Badan/Lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyer-taan Modal (Investasi) Daerah	Bentuk Penyer-taan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Penyer-taan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Tahun Anggaran Lalu	Penyer-taan Modal Tahun Ini	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini	Sisa Modal Yang Belum Disertakan	Hasil Penyer-taan Modal (Investasi) Daerah Tahun Ini	Jumlah Modal (Investasi ) Yang Akan Diterima Kembali Tahun Ini	Jumlah Modal (Investasi) Yang Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=6-9	11	12	13=9-12
1	2003	PDAM Tirtamarta	Perda No 17/2018	Uang	26.038.546.346,08	56.414.676.260,68	1.183.747.398,12	57.598.423.658,80	(31.559.877.312,72)	802.301.741,50	-	57.598.423.658,80
2	2003	PD BPR Bank Jogja	Perda No 4/2008	Uang	100.000.000.000,00	158.156.966.905,09	17.112.318.044,00	175.269.284.949,09	(75.269.284.949,09)	9.754.106.355,00	-	175.269.284.949,09
3	2018	PT. BPD DIY	Perda No 17/2018	Uang	117.000.000.000,00	151.870.000.000,00	37.275.000.000,00	189.145.000.000,00	(72.145.000.000,00)	18.340.935.744,08	-	189.145.000.000,00
4	2003	BUKP se Kota Yk	Perda Prov. DIY No. 1/ 1989	Uang	411.000.000,00	411.000.000,00	-	411.000.000,00	-	57.146.041,43	-	411.000.000,00
5	2006	PT Radio Swara Adhiloka	AKTA Notaris Hj. Pandam Nurwulan, S.MH. No. 5 Tgl. 7 Agustus 2006	Uang	376.333.444,43	297.006.667,76	(26.525.355,28)	270.481.312,48	105.852.131,95	-	-	270.481.312,48
6	2012	PD Jogjatama Vishesa	Perda No 12/2012	Uang	110.692.058.661,28	111.179.416.677,84	(1.224.758.379,97)	109.954.658.297,87	737.400.363,41	20.514.068,00	-	109.954.658.297,87
			<b>Jumlah :</b>		<b>354.517.938.451,79</b>	<b>478.329.066.511,37</b>	<b>54.319.781.706,87</b>	<b>532.648.848.218,24</b>	<b>(178.130.909.766,45)</b>	<b>28.975.003.950,01</b>	<b>-</b>	<b>532.648.848.218,24</b>

Keterangan :

- 1) Perda Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyer-taan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah
- 2) Perda Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perda Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja
- 3) Perda Provinsi DIY Nomor 1 Tahun 1989 tentang Badan Usaha Kredit Pedesaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- 4) Perda Kota Yogyakarta No. 12 Tahun 2012 tentang Penyer-taan Modal Kepada Perusahaan Daerah Jogjatama Vishesa

**WALIKOTA YOGYAKARTA**

**ttd**

**HARYADI SUYUTI**

**LAMPIRAN XII**  
**DAFTAR REKAPITULASI REALISASI**  
**PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN**  
**ASET TETAP DAERAH**

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

No	URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1	Tanah	1.863.714.903.480,22	69.191.438.582,29	48.267.895.193,29	1.884.638.446.869,22
2	Peralatan dan Mesin	684.173.397.572,63	99.237.643.275,22	12.921.477.225,26	770.489.563.622,59
3	Gedung dan Bangunan	1.102.383.071.728,21	73.165.766.105,86	23.747.921.579,88	1.151.800.916.254,19
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.997.802.762.171,24	113.003.135.126,09	2.371.645.514,50	2.108.434.251.782,83
5	Aset Tetap Lainnya	37.345.880.968,58	4.444.756.086,49	642.382.400,10	41.148.254.654,97
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	10.589.253.243,63	13.512.593.962,12	1.104.642.420,77	22.997.204.784,98
	<b>Jumlah</b>	<b>5.696.009.269.164,51</b>	<b>372.555.333.138,07</b>	<b>89.055.964.333,80</b>	<b>5.979.508.637.968,77</b>

**WALIKOTA YOGYAKARTA**

ttd

**HARYADI SUYUTI**

**LAMPIRAN XIII**  
**DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP**

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP  
TAHUN 2019

NO	NAMA SKPD	TANAH	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN JARINGAN DAN JEMBATAN	ASET TETAP LAINNYA	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	SALDO AKHIR	EKSTRAKOMP	ASET TETAP AUDITED
1	DINAS PENDIDIKAN	-	116.244.556.375,49	275.400.988.745,53	47.810.500,00	30.576.286.968,82	38.942.847,28	422.308.585.437,11	11.554.923.604,22	410.753.661.832,89
2	DINAS KESEHATAN	-	99.134.864.103,50	107.650.412.806,08	144.475.901,93	250.904.366,50	-	207.180.657.178,01	1.261.665.578,52	205.918.991.599,49
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	-	195.524.454.781,42	24.074.415.529,37	531.825.230,00	250.000,00	-	220.130.945.540,79	344.397.340,24	219.786.548.200,55
4	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	18.878.633.645,91	271.515.666.892,58	2.078.723.186.025,26	1.480.708.956,20	19.079.554.237,70	2.389.677.749.757,65	57.734.887.475,16	2.331.942.862.282,49
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	7.597.348.426,41	2.271.538.353,04	-	3.604.200,00	-	9.872.490.979,45	59.578.133,71	9.812.912.845,74
6	DINAS KEBAKARAN	-	19.391.777.412,91	2.938.156.452,94	4.854.405.206,85	903.625,00	938.992.500,00	28.124.235.197,70	27.923.879,09	28.096.311.318,61
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	8.601.897.424,71	873.231.451,00	3.614.421.469,62	2.137.290,00	94.400.000,00	13.186.087.635,33	46.979.052,79	13.139.108.582,54
8	DINAS SOSIAL	-	5.500.738.824,04	4.786.600.979,89	-	22.805.340,00	-	10.310.145.143,93	135.469.752,03	10.174.675.391,90
9	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	2.935.878.778,63	548.612.615,02	-	26.638.950,00	-	3.511.130.343,64	68.663.103,70	3.442.467.239,94
10	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	1.306.127.354.254,00	2.599.641.281,86	2.718.351.365,64	-	96.267.651,00	-	1.311.541.614.552,50	43.793.481,93	1.311.497.821.070,57
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	43.578.717.976,48	29.957.571.236,31	3.630.456.775,47	2.245.224.357,79	532.675.550,00	79.944.645.896,05	5.071.579.640,26	74.873.066.255,79
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	9.204.270.785,48	1.832.536.706,50	-	5.554.500,00	-	11.042.361.991,98	54.088.331,56	10.988.273.660,42
13	KECAMATAN TEGALREJO	-	2.431.706.754,07	4.872.613.304,50	561.602.338,50	231.453.335,32	-	8.097.375.732,39	132.869.457,66	7.964.506.274,73
14	KECAMATAN JETIS	-	1.811.810.142,35	3.427.871.689,04	584.676.618,13	42.429.004,54	-	5.866.787.454,07	72.545.514,47	5.794.241.939,60
15	KECAMATAN GONDOKUSUMAN	-	2.068.802.779,12	8.106.853.619,06	1.010.726.126,79	147.082.872,72	-	11.333.465.397,69	189.695.812,87	11.143.769.584,82
16	KECAMATAN DANUREJAN	-	1.785.870.329,54	5.097.774.751,98	13.595.000,00	40.422.704,54	-	6.937.662.786,06	126.592.061,17	6.811.070.724,89
17	KECAMATAN GEDONGTENGEN	-	1.536.508.215,69	2.589.186.544,59	598.598.569,24	185.123.636,36	-	4.909.416.965,88	94.149.226,47	4.815.267.739,41
18	KECAMATAN PAKUALAMAN	-	1.817.415.674,64	1.720.673.972,33	284.454.000,00	26.713.636,36	-	3.849.257.283,32	70.035.760,40	3.779.221.522,92
19	KECAMATAN NGAMPILAN	-	1.229.345.580,32	3.718.613.549,17	440.805.834,30	196.029.451,36	-	5.584.794.415,15	77.497.706,49	5.507.296.708,66
20	KECAMATAN WIROBRAJAN	-	1.501.439.397,84	3.575.245.294,74	487.176.201,84	195.945.141,49	-	5.759.806.035,91	108.455.456,27	5.651.350.579,64
21	KECAMATAN MANTRIJERON	-	1.566.002.710,82	3.031.139.335,42	963.799.527,73	214.848.041,49	-	5.775.789.615,46	108.864.934,74	5.666.924.680,71
22	KECAMATAN KRATON	-	1.459.066.181,19	3.943.330.776,36	756.795.844,64	41.825.754,54	-	6.201.018.556,73	98.776.710,52	6.102.241.846,21
23	KECAMATAN GONDOMANAN	-	1.446.887.009,73	3.300.964.073,76	271.772.200,00	188.968.686,36	-	5.208.591.969,85	91.267.567,71	5.117.324.402,14
24	KECAMATAN MERGANGSAN	-	1.717.738.624,56	4.745.582.066,43	1.268.664.549,32	209.921.536,49	-	7.941.906.776,80	153.475.774,59	7.788.431.002,21
25	KECAMATAN UMBULHARJO	-	3.394.003.317,46	17.095.536.319,33	1.395.105.316,25	149.597.696,80	-	22.034.242.649,84	240.544.516,73	21.793.698.133,11
26	KECAMATAN KOTAGEDE	-	1.741.989.043,74	7.692.073.434,94	-	73.783.691,48	-	9.507.846.170,16	91.333.780,91	9.416.512.389,25
27	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	3.880.088.962,89	1.194.196.999,96	-	1.245.825,00	-	5.075.531.787,85	104.486.300,39	4.971.045.487,46
28	DINAS PERHUBUNGAN	-	16.767.956.564,53	44.353.752.979,32	487.843.525,01	54.621.196,46	-	61.664.174.265,32	11.143.527.541,04	50.520.646.724,28
29	DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN PERSANDIAN	-	43.358.432.661,09	7.864.185.644,43	447.203.194,11	15.209.632,00	-	51.685.031.131,63	138.374.277,59	51.546.656.854,04
30	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	2.691.507.998,51	-	-	152.233.100,00	-	2.843.741.098,51	58.993.556,42	2.784.747.542,09
31	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN	-	4.990.696.792,34	15.312.268.280,49	-	2.102.700,00	-	20.305.067.772,83	24.777.116,34	20.280.290.656,49
32	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	1.682.910.167,16	313.413.000,00	-	8.975.000,00	-	2.005.298.167,16	20.977.888,23	1.984.320.278,93

NO	NAMA SKPD	TANAH	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN JARINGAN DAN JEMBATAN	ASET TETAP LAINNYA	KONSTRUKSI DALAM PENERJAAN	SALDO AKHIR	EKSTRAKOMP	ASET TETAP AUDITED
33	DINAS KEBUDAYAAN	-	1.705.098.129,22	954.100.705,50	-	77.150.000,00	298.689.800,00	3.035.038.634,72	26.330.805,89	3.008.707.828,83
34	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	-	7.606.889.839,54	4.171.681.480,56	-	2.054.732.925,08	-	13.833.304.245,18	98.034.355,36	13.735.269.889,82
35	KANTOR KESATUAN BANGSA	-	690.879.576,75	-	-	1.046.800,00	-	691.926.376,75	18.391.653,15	673.534.723,60
36	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	-	7.631.721.566,98	8.504.365.656,78	570.920.376,71	33.900.500,00	142.007.500,00	16.882.915.600,47	227.593.398,21	16.655.322.202,26
37	DINAS PARIWISATA	-	29.741.004.681,59	51.152.026.891,63	566.443.000,00	1.077.862.766,46	1.629.500.350,00	84.166.837.689,68	83.395.650,02	84.083.442.039,66
38	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	31.730.426.391,78	129.751.169.056,82	342.088.451,13	92.638.900,00	163.352.000,00	162.079.674.799,73	202.277.183,26	161.877.397.616,47
39	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	3.011.580.460,41	444.964.000,00	-	8.981.423,00	-	3.465.525.883,41	36.039.751,65	3.429.486.131,76
40	SEKRETARIAT DAERAH	-	25.263.465.674,56	30.112.161.570,98	-	298.390.281,80	79.090.000,00	55.753.107.527,34	626.113.101,45	55.126.994.425,89
41	SEKRETARIAT DPRD	-	12.022.560.770,47	8.996.784.097,96	-	243.020.820,01	-	21.262.365.688,44	82.675.065,92	21.179.690.622,52
42	INSPEKTORAT	-	2.686.547.619,54	7.041.057.050,48	-	18.901.140,00	-	9.746.505.810,02	38.699.430,44	9.707.806.379,58
43	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	-	2.694.105.779,67	1.131.855.805,79	-	17.586.750,00	-	3.843.548.335,46	36.719.317,20	3.806.829.018,26
44	PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG	578.511.092.615,22	9.175.352.567,81	40.080.139.907,55	5.835.400.000,00	330.965.000,00	-	633.932.950.090,58	130.471.998,98	633.802.478.091,60
45	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	8.456.971.839,81	2.937.251.260,43	-	3.258.500,00	-	11.397.481.600,24	186.854.090,19	11.210.627.510,05
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>1.884.638.446.869,22</b>	<b>770.489.563.622,59</b>	<b>1.151.800.916.254,19</b>	<b>2.108.434.251.782,83</b>	<b>41.148.254.654,97</b>	<b>22.997.204.784,98</b>	<b>5.979.508.637.968,78</b>	<b>91.344.786.135,93</b>	<b>5.888.163.851.832,84</b>

**WALIKOTA YOGYAKARTA**

ttd

**HARYADI SUYUTI**

**LAMPIRAN XIV**  
**DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI**  
**DALAM Pengerjaan**



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

<b>No</b>	<b>URAIAN/JENIS</b>	<b>SALDO AWAL</b>	<b>PENAMBAHAN</b>	<b>PENGURANGAN</b>	<b>SALDO AKHIR</b>
1	Konstruksi Dalam Pekerjaan pada Dinas Pendidikan	38.942.847,28	-	-	38.942.847,28
2	Konstruksi Dalam Pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum, Permukiman dan Prasarana Wilayah	8.391.486.546,35	11.550.188.112,12	862.120.420,77	19.079.554.237,70
3	Konstruksi Dalam Pekerjaan pada Dinas Kebakaran	543.030.000,00	395.962.500,00		938.992.500,00
4	Konstruksi Dalam Pekerjaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	143.833.000,00		49.433.000,00	94.400.000,00
5	Konstruksi Dalam Pekerjaan pada Dinas Lingkungan Hidup	253.871.000,00	339.607.550,00	60.803.000,00	532.675.550,00
6	Konstruksi Dalam Pekerjaan pada Dinas Kebudayaan	219.112.500,00	79.577.300,00		298.689.800,00
7	Konstruksi Dalam Pekerjaan pada Dinas Pertanian dan Pangan		142.007.500,00		142.007.500,00
8	Konstruksi Dalam Pekerjaan pada Dinas Pariwisata	835.625.350,00	926.161.000,00	132.286.000,00	1.629.500.350,00
9	Konstruksi Dalam Pekerjaan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	163.352.000,00	-	-	163.352.000,00
10	Konstruksi Dalam Pekerjaan pada Sekretariat Daerah		79.090.000,00		79.090.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>10.589.253.243,63</b>	<b>13.512.593.962,12</b>	<b>1.104.642.420,77</b>	<b>22.997.204.784,98</b>

**WALIKOTA YOGYAKARTA**

**ttd**

**HARYADI SUYUTI**

**LAMPIRAN XV  
DAFTAR REKAPITULASI  
ASET LAINNYA**

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA  
TAHUN ANGGARAN 2019**

<b>No</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SALDO AWAL</b>	<b>PENAMBAHAN</b>	<b>PENGURANGAN</b>	<b>SALDO AKHIR</b>
1	Kas yang dibatasi penggunaannya	2.837.062.270,00	-	38.080.802,00	2.798.981.468,00
2	Tagihan Bagi Hasil Kemitraan	1.594.985.000,00	1.140.000,00	228.000.000,00	1.368.125.000,00
3	Tagihan Sewa	450.042.480,00	1.337.120,00	267.424.000,00	183.955.600,00
4	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	7.269.300.000,00	0,00	0,00	7.269.300.000,00
6	Aset Tak Berwujud	20.812.347.566,19	12.838.660.478,83	6.246.635.065,94	27.404.372.979,08
7	Aset Lain-lain	3.297.075.891,84	2.060.068.609,99	0,00	5.357.144.501,83
	<b>Jumlah</b>	<b>36.260.813.208,03</b>	<b>14.901.206.208,82</b>	<b>6.780.139.867,94</b>	<b>44.381.879.548,91</b>

**WALIKOTA YOGYAKARTA**

**ttd**

**HARYADI SUYUTI**

**LAMPIRAN XVI**  
**DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH**

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**DAFTAR DANA CADANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

No	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan yang Direncanakan	Saldo Awal	Transfer dari Kas Daerah	Transfer ke Kas Daerah	Saldo Akhir	Sisa dana yang belum dicadangkan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Untuk Pembayaran sebagian kewajiban Pemerintah Kota Yogyakarta kepada PT. Perwita Karya sebagai tindak lanjut pengambilalihan terminal Penumpang Tipe A Giwangan Yogyakarta	Perda Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2009		11.818.230,00	-	11.818.230,00	-	-
<b>JUMLAH</b>				<b>11.818.230,00</b>	<b>-</b>	<b>11.818.230,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**WALIKOTA YOGYAKARTA**

ttd

**HARYADI SUYUTI**

**LAMPIRAN XVII**  
**DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK  
TAHUN ANGGARAN 2019**

No	Uraian Kewajiban Jangka Pendek	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2				3
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	3.396.586.401,00	255.773.400,00	597.604.933,00	3.054.754.868,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	1.811.562.647,76	2.114.778.992,99	1.486.359.373,75	2.439.982.267,00
3	Utang Belanja	12.373.480.818,55	6.515.136.987,00	12.373.480.818,55	6.515.136.987,00
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>17.581.629.867,31</b>	<b>8.885.689.379,99</b>	<b>14.457.445.125,30</b>	<b>12.009.874.122,00</b>

**WALIKOTA YOGYAKARTA**

**ttd**

**HARYADI SUYUTI**

**LAMPIRAN XVII**  
**DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA**  
**PANJANG**





**LAMPIRAN XIX**  
**DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN YANG**  
**BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR**  
**TAHUN DAN DIANGGARKAN KEMBALI**  
**DALAM TAHUN ANGGARAN**  
**BERIKUTNYA**



**LAMPIRAN XX**  
**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN**  
**BADAN USAHA MILIK DAERAH/  
PERUSAHAAN DAERAH**

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH**  
**AKTIVA, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS DANA**  
**TAHUN 2019**

No	Perusahaan Daerah	Sumber a)	Status b)	Aktiva lancar	Aktiva Tidak lancar	Aktiva Lainnya	Total Aktiva	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang/Lainnya	Total Kewajiban	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	BPYDS c)	Ekuitas Lainnya	Laba ditahan	Total Ekuitas	% Saham Daerah	Kepemilikan Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9	10	11=9+10	12	13	14	15	16	17	18	19=17 x 8	
1	Bidang Perbankan																		
	- PD BPR Bank Jogja	1	S	887.598.204.768,00	14.411.349.475,00	1.587.759.216,00	903.597.313.459,00	747.822.185.627,00	-	747.822.185.627,00	-	100.000.000.000,00		33.474.129.793,00	22.300.998.039,00	155.775.127.832,00			
	<b>Sub Total (1)</b>			887.598.204.768,00	14.411.349.475,00	1.587.759.216,00	903.597.313.459,00	747.822.185.627,00	-	747.822.185.627,00	-	100.000.000.000,00	-	33.474.129.793,00	22.300.998.039,00	155.775.127.832,00	-		
2	Bidang Jasa Lainnya																		
	- PDAM Tirta Marta	1	S	43.281.383.860,97	23.205.354.731,97	26.324.140,00	66.513.062.732,94	11.255.551.379,02	18.048.809.951,00	29.304.361.330,02	-	46.859.766.642,20	-	(9.651.065.239,28)	-	37.208.701.402,92			
	<b>Sub Total (2)</b>			43.281.383.860,97	23.205.354.731,97	26.324.140,00	66.513.062.732,94	11.255.551.379,02	18.048.809.951,00	29.304.361.330,02	-	46.859.766.642,20	-	(9.651.065.239,28)	-	37.208.701.402,92	-		
3	Bidang Jasa Lainnya																		
	- PD Jogjatama Vishesha	1	S	5.138.540.032,50	104.194.977.986,30	-	109.333.518.018,80	575.770.696,81	107.472.929,00	683.243.625,81	-	117.667.020.000,00		189.174.728,00	(9.205.920.335,02)	108.650.274.392,98			
	<b>Sub Total (3)</b>			5.138.540.032,50	104.194.977.986,30	-	109.333.518.018,80	575.770.696,81	107.472.929,00	683.243.625,81	-	117.667.020.000,00	-	189.174.728,00	(9.205.920.335,02)	108.650.274.392,98	-		
	<b>Total Seluruh Bidang</b>			936.018.128.661,47	141.811.682.193,27	1.614.083.356,00	1.079.443.894.210,74	759.653.507.702,83	18.156.282.880,00	777.809.790.582,83	-	264.526.786.642,20	-	24.012.239.281,72	13.095.077.703,98	301.634.103.627,90	-		

**WALIKOTA YOGYAKARTA**

ttd

**HARYADI SUYUTI**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**DAFTAR DEPOSITO**  
**Per 31 Desember 2019**

No.	Bank	No. Rekening	Nilai Nominal (Rp)
1	Bank Pembangunan Daerah DIY	-	-
2	Bank Tabungan negara	-	-
3	Bank Nasional Indonesia	-	-
4	Bank Rakyat Indonesia	-	-
5	Bank Bukopin	-	-
6	Bank Mega	-	-
7	Bank Jateng	-	-
8	Bank Sinarmas	-	-
9			-
10			-
	<b>JUMLAH</b>		-

## LAMPIRAN 1D

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**DAFTAR DEPOSITO BLUD TAMAN PINTAR**  
**Per 31 Desember 2019**

1	Bank BNI	0800 371 000	1.000.000.000
2	Bank BPD DIY	006 311 008870	500.000.000
	<b>Jumlah</b>		<b>1.500.000.000</b>

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**DAFTAR DEPOSITO BLUD RS JOGJA**  
**Per 31 Desember 2019**

No.	Bank	No. Rekening	Nilai Nominal (Rp)
1	Bank BPD DIY	006 311 009363	2.000.000.000
2	Bank BPD DIY	006 311 009364	2.000.000.000
3	Bank BPD DIY	006 311 009314	2.000.000.000
4	Bank BPD DIY	006 311 009315	2.000.000.000
5	Bank BPD DIY	006 311 009316	2.000.000.000
	<b>Jumlah</b>		<b>10.000.000.000</b>

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**DAFTAR DEPOSITO BLUD UPT PUSAT BISNIS**  
**Per 31 Desember 2019**

1	Bank Mandiri	137 02 0506254-6	500.000.000
2	Bank BRI	780 901 000354404	500.000.000
	<b>Jumlah</b>		<b>1.000.000.000</b>



Lampiran 1B

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**RINCIAN KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN (SISA UP/TU)**  
**Per 31 Desember 2019**

No.	SKPD	Sisa UP/TU/LS (Rp)	TGL PENYETORAN
1	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	34.639.092,00	Pengembalian Belanja Pegawai disetor dengan STS No 74 tanggal 06/01/2020 Rp 24.681.819,- dan STS No 75 tanggal 06/01/2020 Rp 9.957.273,-
	<b>JUMLAH</b>	<b>34.639.092,00</b>	

## RINCIAN DANA BOS SEKOLAH SD NEGERI KOTA YOGYAKARTA

NO	NAMA SEKOLAH	SISA BOS 2018 AUDITED			PENDAPATAN				JUMLAH TOTAL PENDAPATAN BOS 2019	REALISASI BOS 2019			JUMLAH REALISASI BOS 2019	SALDO AKHIR BOS 2019	
		SISA BOSN	SISA BOSPROP	JUMLAH SISA BOS 2018 AUDITED	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER BOSKINERJA	JUMLAH PENERIMAAN BUNGA	LAIN-LAIN PENDAPATAN		JUMLAH BELANJA PEGAWAI	JUMLAH BELANJA BARANG DAN JASA	JUMLAH BELANJA MODAL			JUMLAH BELANJA MODAL BOS KINERJA
1	SD Negeri Baciro	52.348.392,00	-	52.348.392,00	125.600.000,00	79.000.000,00	-	2.475.000,00	207.075.000,00	4.500.000,00	120.042.865,00	16.715.500,00	78.925.000,00	220.183.365,00	39.240.027,00
2	SD Negeri Badran	25.885.598,00	-	25.885.598,00	119.040.000,00	-	-	385.800,00	119.425.800,00	3.000.000,00	119.447.754,00	13.516.050,00	-	135.963.804,00	9.347.594,00
3	SD Negeri	8.283.432,00	-	8.283.432,00	104.000.000,00	-	-	-	104.000.000,00	4.200.000,00	83.037.132,00	12.712.209,00	-	99.949.341,00	12.334.091,00
4	SD Negeri	27.095.249,00	-	27.095.249,00	131.840.000,00	79.000.000,00	-	-	210.840.000,00	19.800.000,00	111.371.842,00	25.284.650,00	79.000.000,00	235.456.492,00	2.478.757,00
5	SD Negeri	23.293.486,00	-	23.293.486,00	227.200.000,00	-	-	-	227.200.000,00	9.150.000,00	167.473.544,00	49.380.950,00	-	226.004.494,00	24.488.992,00
6	SD Negeri	47.428.430,00	-	47.428.430,00	111.520.000,00	-	-	-	111.520.000,00	8.000.000,00	89.801.912,00	11.995.255,00	-	109.797.167,00	49.151.263,00
7	SD Negeri	12.991.681,00	-	12.991.681,00	63.360.000,00	57.000.000,00	-	-	120.360.000,00	-	44.084.368,00	14.398.400,00	56.004.762,00	114.487.530,00	18.864.151,00
8	SD Negeri Bener	30.449.836,00	-	30.449.836,00	142.880.000,00	-	-	72.274,00	142.952.274,00	12.850.000,00	101.941.036,00	43.807.045,00	-	158.598.081,00	14.804.029,00
9	SD Negeri	17.432.967,00	-	17.432.967,00	374.880.000,00	-	-	-	374.880.000,00	25.200.000,00	235.837.630,00	56.265.000,00	-	317.302.630,00	75.010.337,00
10	SD Negeri	68.549.732,00	-	68.549.732,00	115.840.000,00	-	-	-	115.840.000,00	3.519.000,00	86.333.080,00	31.483.800,00	-	121.335.880,00	63.053.852,00
11	SD Negeri Bumijo	56.378.675,00	-	56.378.675,00	127.680.000,00	-	-	-	127.680.000,00	4.200.000,00	141.890.767,00	19.290.425,00	-	165.381.192,00	18.677.483,00
12	SD Negeri	52.135.794,00	-	52.135.794,00	44.960.000,00	-	-	-	44.960.000,00	5.100.000,00	51.266.643,00	4.688.100,00	-	61.054.743,00	36.041.051,00
13	SD Negeri Dalem	8.678.545,00	-	8.678.545,00	123.360.000,00	-	-	1.032.078,00	124.392.078,00	4.000.000,00	89.867.805,00	20.953.800,00	-	114.821.605,00	18.249.018,00
14	SD Negeri	80.883.182,00	-	80.883.182,00	259.360.000,00	-	-	-	259.360.000,00	34.100.000,00	210.983.367,00	16.719.500,00	-	261.802.867,00	78.440.315,00
15	SD Negeri	10.137.910,00	-	10.137.910,00	38.880.000,00	-	-	-	38.880.000,00	2.400.000,00	31.911.284,00	8.191.800,00	-	42.503.084,00	6.514.826,00
16	SD Negeri	70.320.539,00	-	70.320.539,00	280.640.000,00	-	-	-	280.640.000,00	13.400.000,00	278.716.691,00	28.056.670,00	-	320.173.361,00	30.787.178,00
17	SD Negeri	25.401.026,00	-	25.401.026,00	272.960.000,00	-	-	31.749.101,00	304.709.101,00	22.500.000,00	125.131.698,00	55.451.700,00	-	203.083.398,00	127.026.729,00
18	SD Negeri	36.539.065,00	-	36.539.065,00	240.480.000,00	-	-	-	240.480.000,00	24.200.000,00	178.132.174,00	57.084.780,00	-	259.416.954,00	17.602.111,00
19	SD Negeri	23.774.263,00	-	23.774.263,00	281.280.000,00	-	-	258.600,00	281.538.600,00	23.700.000,00	234.707.319,00	29.059.900,00	-	287.467.219,00	17.845.644,00
20	SD Negeri Glagah	121.371.663,00	-	121.371.663,00	389.600.000,00	-	-	504.500,00	390.104.500,00	18.300.000,00	212.292.807,00	62.062.155,00	-	292.654.962,00	218.821.201,00
21	SD Negeri Golo	8.092.360,00	-	8.092.360,00	234.880.000,00	-	-	-	234.880.000,00	8.400.000,00	188.813.747,00	30.110.800,00	-	227.323.747,00	15.648.613,00
22	SD Negeri	19.871.649,00	-	19.871.649,00	123.520.000,00	-	-	-	123.520.000,00	4.800.000,00	107.327.840,00	18.393.600,00	-	130.521.440,00	12.870.209,00
23	SD Negeri Jetis 1	38.707.930,00	-	38.707.930,00	255.360.000,00	-	-	-	255.360.000,00	10.100.000,00	215.076.859,00	39.449.200,00	-	264.626.059,00	29.441.871,00
24	SD Negeri Jetis 2	162.070,00	-	162.070,00	38.080.000,00	-	-	-	38.080.000,00	5.880.000,00	24.494.630,00	7.828.300,00	-	38.202.930,00	39.140,00
25	SD Negeri	198.250.369,25	-	198.250.369,25	270.400.000,00	-	-	-	270.400.000,00	41.800.000,00	157.614.468,00	25.242.000,00	-	224.656.468,00	243.993.901,25
26	SD Negeri	13.066.984,00	-	13.066.984,00	74.400.000,00	-	-	-	74.400.000,00	3.000.000,00	58.167.918,00	16.927.500,00	-	78.095.418,00	9.371.566,00
27	SD Negeri	1.047.810,00	-	1.047.810,00	96.160.000,00	-	-	-	96.160.000,00	5.600.000,00	56.925.208,00	24.840.000,00	-	87.365.208,00	9.842.602,00
28	SD Negeri	13.678.502,00	470.000,00	14.148.502,00	97.600.000,00	-	-	-	97.600.000,00	3.500.000,00	78.720.229,00	22.971.200,00	-	105.191.429,00	6.557.073,00
29	SD Negeri	20.731.272,00	-	20.731.272,00	57.280.000,00	-	-	-	57.280.000,00	7.335.000,00	51.322.600,00	12.299.700,00	-	70.957.300,00	7.053.972,00
30	SD Negeri	136.718.413,00	-	136.718.413,00	320.160.000,00	-	-	-	320.160.000,00	12.000.000,00	311.704.958,00	73.549.500,00	-	397.254.458,00	59.623.955,00
31	SD Negeri	49.161.893,00	-	49.161.893,00	398.240.000,00	-	-	113.707,00	398.353.707,00	39.000.000,00	246.504.254,00	39.222.300,00	-	324.726.554,00	122.789.046,00
32	SD Negeri	17.883.073,00	-	17.883.073,00	392.800.000,00	-	-	2.842.732,00	395.642.732,00	26.850.000,00	216.094.650,00	42.446.200,00	-	285.390.850,00	128.134.955,00
33	SD Negeri	22.749.235,00	-	22.749.235,00	128.000.000,00	-	-	2.503,00	128.002.503,00	4.800.000,00	103.166.603,00	25.282.800,00	-	133.249.403,00	17.502.335,00
34	SD Negeri	7.072.733,00	-	7.072.733,00	89.760.000,00	65.000.000,00	-	-	154.760.000,00	14.300.000,00	66.616.681,00	10.871.500,00	64.004.754,00	155.792.935,00	6.039.798,00
35	SD Negeri Klitren	80.051.898,00	-	80.051.898,00	115.840.000,00	-	-	243.541,00	116.083.541,00	-	29.781.858,00	4.062.900,00	-	33.844.758,00	162.290.681,00
36	SD Negeri	34.533.840,00	-	34.533.840,00	413.600.000,00	-	-	-	413.600.000,00	25.200.000,00	284.008.069,00	102.011.300,00	-	411.219.369,00	36.914.471,00
37	SD Negeri	36.782.114,00	-	36.782.114,00	280.800.000,00	-	-	-	280.800.000,00	11.370.000,00	216.348.390,00	49.995.701,00	-	277.714.091,00	39.868.023,00
38	SD Negeri	30.446.779,00	-	30.446.779,00	131.520.000,00	-	-	-	131.520.000,00	3.400.000,00	78.723.714,00	18.035.400,00	-	100.159.114,00	61.807.665,00
39	SD Negeri	2.895.679,00	-	2.895.679,00	136.000.000,00	-	-	-	136.000.000,00	11.900.000,00	104.067.477,00	15.552.200,00	-	131.519.677,00	7.376.002,00
40	SD Negeri Kraton	14.778.217,00	-	14.778.217,00	78.080.000,00	-	-	-	78.080.000,00	3.300.000,00	76.658.240,00	4.795.000,00	-	84.753.240,00	8.104.977,00
41	SD Negeri Kyai	42.077.444,00	-	42.077.444,00	134.400.000,00	-	-	-	134.400.000,00	3.000.000,00	114.130.990,00	14.620.500,00	-	131.751.490,00	44.725.954,00

NO	NAMA SEKOLAH	SISA BOS 2018 AUDITED			PENDAPATAN				JUMLAH TOTAL PENDAPATAN BOS 2019	REALISASI BOS 2019			JUMLAH BELANJA MODAL BOS KINERJA	JUMLAH REALISASI BOS 2019	SALDO AKHIR BOS 2019
		SISA BOSN	SISA BOSPROP	JUMLAH SISA BOS 2018 AUDITED	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER BOSKINERJA	JUMLAH PENERIMAAN BUNGA	LAIN-LAIN PENDAPATAN		JUMLAH BELANJA PEGAWAI	JUMLAH BELANJA BARANG DAN JASA	JUMLAH BELANJA MODAL			
42	SD Negeri	36.908.730,00	-	36.908.730,00	388.320.000,00	-	-	-	388.320.000,00	34.934.000,00	324.638.643,00	51.262.600,00	-	410.835.243,00	14.393.487,00
43	SD Negeri	73.577.327,00	-	73.577.327,00	403.200.000,00	-	-	-	403.200.000,00	16.500.000,00	376.490.110,00	34.586.000,00	-	427.576.110,00	49.201.217,00
44	SD Negeri	4.971.129,00	-	4.971.129,00	166.720.000,00	-	-	-	166.720.000,00	7.050.000,00	131.942.848,00	20.267.100,00	-	159.259.948,00	12.431.181,00
45	SD Negeri	17.343.775,00	-	17.343.775,00	91.520.000,00	-	-	-	91.520.000,00	4.300.000,00	70.593.768,00	23.606.920,00	-	98.500.688,00	10.363.087,00
46	SD Negeri	4.902.042,00	-	4.902.042,00	152.160.000,00	-	-	1.033.897,00	153.193.897,00	6.270.000,00	120.864.448,00	10.578.500,00	-	137.712.948,00	20.382.991,00
47	SD Negeri	16.078.064,00	-	16.078.064,00	149.920.000,00	-	-	-	149.920.000,00	7.800.000,00	122.912.532,00	17.409.500,00	-	148.122.032,00	17.876.032,00
48	SD Negeri	9.123.906,00	-	9.123.906,00	117.600.000,00	-	-	-	117.600.000,00	5.100.000,00	86.263.906,00	24.945.400,00	-	116.309.306,00	10.414.600,00
49	SD Negeri	192.133.888,00	-	192.133.888,00	266.080.000,00	-	-	52.378.132,00	318.458.132,00	19.600.000,00	258.185.259,00	53.869.924,00	-	331.655.183,00	178.936.837,00
50	SD Negeri Pakel	31.335.830,00	-	31.335.830,00	275.840.000,00	143.000.000,00	-	-	418.840.000,00	10.500.000,00	231.466.935,00	43.139.700,00	142.004.676,00	427.111.311,00	23.064.519,00
51	SD Negeri	1.530.388,00	-	1.530.388,00	105.920.000,00	-	-	-	105.920.000,00	3.300.000,00	72.013.314,00	16.440.100,00	-	91.753.414,00	15.696.974,00
52	SD Negeri	43.156.502,00	-	43.156.502,00	217.700.000,00	-	-	-	217.700.000,00	19.100.000,00	165.998.621,00	23.825.100,00	-	208.923.721,00	51.932.781,00
53	SD Negeri	2.488.437,00	-	2.488.437,00	-	-	-	2.488.437,00	2.488.437,00	-	-	-	-	-	-
54	SD Negeri	118.110.323,00	-	118.110.323,00	255.840.000,00	-	-	300.000,00	256.140.000,00	10.200.000,00	262.129.282,00	42.924.502,00	-	315.253.784,00	58.996.539,00
55	SD Negeri	6.616.890,00	-	6.616.890,00	97.600.000,00	-	-	-	97.600.000,00	3.300.000,00	65.582.950,00	13.954.100,00	-	82.837.050,00	21.379.840,00
56	SD Negeri Pingit	28.472.986,00	-	28.472.986,00	93.440.000,00	69.000.000,00	-	-	162.440.000,00	3.900.000,00	89.045.308,00	9.948.000,00	68.004.750,00	170.898.058,00	20.014.928,00
57	SD Negeri	13.426,00	-	13.426,00	67.520.000,00	-	-	-	67.520.000,00	9.600.000,00	42.939.271,00	12.034.230,00	-	64.573.501,00	2.959.925,00
58	SD Negeri	277.011.069,00	67.578.900,00	344.589.969,00	578.240.000,00	-	-	5.400.000,00	583.640.000,00	23.505.000,00	681.275.334,00	38.179.600,00	-	742.950.934,00	185.279.035,00
59	SD Negeri Puro	37.206.220,00	-	37.206.220,00	54.240.000,00	-	-	-	54.240.000,00	675.000,00	45.672.360,00	6.844.800,00	-	53.192.160,00	38.254.060,00
60	SD Negeri	21.363.300,00	-	21.363.300,00	89.920.000,00	-	-	-	89.920.000,00	3.810.000,00	77.653.147,00	22.676.000,00	-	104.139.147,00	7.144.153,00
61	SD Negeri	96.258.768,00	-	96.258.768,00	375.840.000,00	-	-	381.364,00	376.221.364,00	41.400.000,00	246.360.120,00	51.952.600,00	-	339.712.720,00	132.767.412,00
62	SD Negeri	11.674.282,00	-	11.674.282,00	141.920.000,00	-	-	44.343,00	141.964.343,00	5.100.000,00	116.611.986,00	15.057.850,00	-	136.769.836,00	16.868.789,00
63	SD Negeri Sagan	32.760.482,00	-	32.760.482,00	55.200.000,00	-	-	-	55.200.000,00	8.000.000,00	42.152.108,00	4.170.500,00	-	54.322.608,00	33.637.874,00
64	SD Negeri	4.808.998,00	-	4.808.998,00	47.520.000,00	-	-	-	47.520.000,00	3.000.000,00	31.446.959,00	9.256.700,00	-	43.703.659,00	8.625.339,00
65	SD Negeri	23.552.288,00	-	23.552.288,00	64.640.000,00	59.000.000,00	-	-	124.622.669,00	-	44.038.230,00	15.994.500,00	58.004.760,00	118.037.490,00	30.137.467,00
66	SD Negeri Serayu	51.149.368,00	-	51.149.368,00	296.000.000,00	-	-	-	296.000.000,00	21.700.000,00	279.084.214,00	16.070.800,00	-	316.855.014,00	30.294.354,00
67	SD Negeri	99.088.206,00	-	99.088.206,00	271.680.000,00	-	-	2.488.437,00	274.168.437,00	9.240.000,00	225.928.813,00	44.875.100,00	-	280.043.913,00	93.212.730,00
68	SD Negeri	44.159.608,00	-	44.159.608,00	57.280.000,00	-	-	-	57.280.000,00	7.700.000,00	46.824.930,00	14.814.050,00	-	69.338.980,00	32.100.628,00
69	SD Negeri	25.897.340,00	-	25.897.340,00	118.880.000,00	-	-	-	118.880.000,00	13.200.000,00	105.497.578,00	20.146.125,00	-	138.843.703,00	5.933.637,00
70	SD Negeri	23.485.328,00	-	23.485.328,00	128.480.000,00	-	-	-	128.480.000,00	18.800.650,00	114.772.073,00	17.259.000,00	-	150.831.723,00	1.133.605,00
71	SD Negeri	6.341.848,00	-	6.341.848,00	102.240.000,00	69.000.000,00	-	-	171.240.000,00	6.017.000,00	84.561.416,00	7.601.700,00	68.937.500,00	167.117.616,00	10.464.232,00
72	SD Negeri	38.105.665,00	-	38.105.665,00	236.160.000,00	-	-	5.240.000,00	241.400.000,00	10.500.000,00	170.897.751,00	20.543.500,00	-	201.941.251,00	77.564.414,00
73	SD Negeri	12.533.166,00	-	12.533.166,00	89.280.000,00	-	-	-	89.280.000,00	4.430.000,00	28.240.444,00	14.317.300,00	-	46.987.744,00	54.825.422,00
74	SD Negeri	26.279.219,00	-	26.279.219,00	253.440.000,00	135.000.000,00	-	1.656.200,00	390.096.200,00	10.500.000,00	194.978.166,00	47.597.250,00	134.855.000,00	387.930.416,00	28.445.003,00
75	SD Negeri	28.481.863,00	24.220.900,00	52.702.763,00	260.960.000,00	137.000.000,00	-	10.000,00	397.970.000,00	11.100.000,00	184.853.301,00	84.847.500,00	136.941.000,00	417.741.801,00	32.930.962,00
76	SD Negeri	19.057.179,00	-	19.057.179,00	135.200.000,00	-	-	605.521,00	135.805.521,00	10.305.000,00	81.325.638,00	38.263.840,00	-	129.894.478,00	24.968.222,00
77	SD Negeri	31.367.466,00	-	31.367.466,00	122.240.000,00	-	-	-	122.240.000,00	4.800.000,00	122.150.785,00	3.186.700,00	-	130.137.485,00	23.469.981,00
78	SD Negeri Tegal	74.261.371,00	-	74.261.371,00	137.440.000,00	-	-	-	137.440.000,00	12.900.000,00	134.069.574,00	22.268.418,00	-	169.237.992,00	42.463.379,00
79	SD Negeri Tegal	26.734.550,00	-	26.734.550,00	195.680.000,00	-	-	-	195.680.000,00	6.600.000,00	150.523.722,00	35.506.040,00	-	192.629.762,00	29.784.788,00
80	SD Negeri	58.762.649,91	-	58.762.649,91	269.760.000,00	-	-	2.861.000,00	272.621.000,00	22.425.000,00	217.773.666,00	55.445.000,00	-	295.643.666,00	35.739.983,91
81	SD Negeri	39.568.827,00	-	39.568.827,00	272.640.000,00	-	-	1.700.000,00	274.340.000,00	11.100.000,00	258.773.402,00	12.633.900,00	-	282.507.302,00	31.401.525,00
82	SD Negeri	41.334.765,00	-	41.334.765,00	270.880.000,00	-	-	-	270.880.000,00	-	194.688.359,00	59.615.040,00	-	254.303.399,00	57.911.366,00
83	SD Negeri	26.154.256,00	-	26.154.256,00	165.280.000,00	-	-	-	165.280.000,00	5.904.000,00	129.031.994,00	24.744.600,00	-	159.680.594,00	31.753.662,00
84	SD Negeri	39.892.414,00	-	39.892.414,00	260.480.000,00	135.000.000,00	-	-	395.480.000,00	7.000.000,00	220.505.470,00	37.151.900,00	134.855.000,00	399.512.370,00	35.860.044,00
85	SD Negeri	30.072.588,00	-	30.072.588,00	164.640.000,00	-	-	-	164.640.000,00	9.900.000,00	140.944.693,00	26.691.500,00	-	177.536.193,00	17.176.395,00
86	SD Negeri	72.548.087,00	-	72.548.087,00	559.200.000,00	-	-	-	559.200.000,00	22.650.000,00	476.429.101,00	72.670.755,00	-	571.749.856,00	59.998.231,00
87	SD Negeri Vidya	29.833.512,00	-	29.833.512,00	130.400.000,00	-	-	-	130.400.000,00	5.127.450,00	92.178.454,00	26.478.100,00	-	123.784.004,00	36.449.508,00
88	SD Negeri	8.555.895,00	-	8.555.895,00	80.320.000,00	-	-	-	80.320.000,00	8.000.000,00	66.366.968,00	11.374.900,00	-	85.741.868,00	3.134.027,00
89	SD Negeri	4.365.831,00	-	4.365.831,00	83.040.000,00	-	-	1.400.000,00	84.440.000,00	5.600.000,00	49.775.291,00	19.520.000,00	-	74.895.291,00	13.910.540,00
90	SD Negeri	6.630.475,00	-	6.630.475,00	87.840.000,00	71.000.000,00	-	341.770,00	159.181.770,00	2.200.000,00	64.234.059,00	10.817.100,00	70.935.000,00	148.186.159,00	17.626.086,00
	JUMLAH	3.544.200.256,16	92.269.800,00	3.636.470.056,16	16.448.580.000,00	1.098.000.000,00	-	114.014.732,00	17.660.594.732,00	982.297.100,00	13.041.228.402,00	2.482.979.834,00	1.092.472.202,00	17.598.977.538,00	3.698.087.250,16

## RINCIAN SISA DANA BOS SEKOLAH SMP NEGERI KOTA YOGYAKARTA

NO	NAMA SEKOLAH	SISA BOS 2018 AUDITED		JUMLAH SISA BOS 2018 AUDITED	PENDAPATAN					JUMLAH TOTAL PENDAPATAN BOS 2019	REALISASI BOS 2019			JUMLAH REALISASI BOS 2019	SALDO AKHIR BOS 2019
		SISA BOSN	SISA BOS PROV		TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	BOS KINERJA	LAIN-LAIN PENDAPATAN		JUMLAH PENERIMAAN BUNGA		JUMLAH BELANJA PEGAWAI	JUMLAH BELANJA BARANG JASA	JUMLAH BELANJA MODAL		
							LAIN-LAIN PENDAPATAN	BUNGA DES 2018							
1	SMP N 1	278.651.532		278.651.532	800.600.000		-	370.148	-	800.229.852	65.477.600	722.635.823	56.110.800	844.224.223	234.657.161
2	SMP N 2	135.723.320		135.723.320	709.200.000		-	168.458	-	709.031.542	56.150.000	542.260.805	67.874.600	666.285.405	178.469.457
3	SMP N 3	166.666.637		166.666.637	597.200.000		700.000	166.526	-	597.733.474	61.640.000	515.001.085	94.089.700	670.730.785	93.669.326
4	SMP N 4	71.875.570		71.875.570	504.000.000	355.000.000	-	95.324	-	858.904.676	45.300.000	420.453.235	7.094.000	472.847.235	457.933.011
5	SMP N 5	150.648.669		150.648.669	943.600.000		-	178.562	-	943.421.438	52.300.000	910.969.877	77.044.300	1.040.314.177	53.755.930
6	SMP N 6	290.984.231		290.984.231	701.800.000		-	387.384	-	701.412.616	20.522.400	592.125.943	40.807.000	653.455.343	338.941.504
7	SMP N 7	67.193.920		67.193.920	607.800.000		1.836.194	76.330	-	609.559.864	29.299.000	514.771.029	51.072.000	595.142.029	81.611.755
8	SMP N 8	141.726.326		141.726.326	941.000.000	715.000.000	-	188.717	-	1.655.811.283	76.985.200	805.419.709	-	882.404.909	915.132.700
9	SMP N 9	221.349.520	39.254.604	260.604.124	609.000.000		66.559.156	434.600	-	675.124.556	23.100.000	635.833.244	41.339.000	700.272.244	235.456.436
10	SMP N 10	133.777.514		133.777.514	508.000.000	361.000.000	-	178.132	-	868.821.868	38.490.000	497.603.615	14.901.200	550.994.815	451.604.567
11	SMP N 11	102.646.982	52.308.197	154.955.179	395.400.000		584.000	203.324	-	395.780.676	36.864.000	278.232.532	32.462.700	347.559.232	203.176.623
12	SMP N 12	247.848.034		247.848.034	495.200.000		1.700.000	324.699	-	496.575.301	26.745.000	554.735.943	10.279.870	591.760.813	152.662.522
13	SMP N 13	106.107.580		106.107.580	388.000.000		-	92.150	-	387.907.850	57.135.000	275.660.911	35.066.400	367.862.311	126.153.119
14	SMP N 14	34.606.138		34.606.138	398.200.000	293.000.000	-	46.080	-	691.153.920	41.400.000	318.176.439	20.894.200	380.470.639	345.289.419
15	SMP N 15	198.141.513		198.141.513	990.800.000		-	244.895	-	990.555.105	23.550.000	704.759.152	96.155.143	824.464.295	364.232.323
16	SMP N 16	234.492.925	35.720.470	270.213.395	697.400.000		-	355.890	-	697.044.110	47.880.000	673.550.471	-	721.430.471	245.827.034
<b>JUMLAH</b>		<b>2.582.440.411</b>	<b>127.283.271</b>	<b>2.709.723.682</b>	<b>10.287.200.000</b>	<b>1.724.000.000</b>	<b>71.379.350</b>	<b>3.511.219</b>	<b>-</b>	<b>12.079.068.131</b>	<b>702.838.200</b>	<b>8.962.189.813</b>	<b>645.190.913</b>	<b>10.310.218.926</b>	<b>4.478.572.887</b>

## LAMPIRAN 1C-3

## LAPORAN SISA DANA JPD TAHUN 2019 YANG BELUM DI BELANJAKAN

NO	SEKOLAH DALAM KOTA	Saldo Akhir JPD	
		Uang Yang Dikelola Bendahara	
		Tunai	Kas di Bank
1	TK NEGERI	501.475	3.840.000
2	TK SWASTA	3.843.550	9.507.600
3	SD NEGERI	285.021.061	268.464.618
4	SD SWASTA	132.594.530	218.213.622
5	SMP NEGERI	15.960.465	150.061.451
6	SMP SWASTA	55.332.620	155.754.500
7	SMA NEGERI	68.120.355	78.480.750
8	SMA SWASTA	12.415.300	28.870.000
9	SMK NEGERI	56.156.775	240.407.300
10	SMK SWASTA	17.513.500	53.921.233
11	PKBM	1.500.000	18.800.000
12	PANTI ASUHAN	10.859.000	81.300.000
<b>TOTAL</b>		<b>659.818.631</b>	<b>1.307.621.074</b>
<b>SISA DANA</b>		<b>1.967.439.705</b>	

NO	SEKOLAH LUAR KOTA	Saldo Akhir JPD	
		Uang Yang Dikelola Bendahara	
		Tunai	Kas di Bank
1	TK NEGERI	-	-
2	TK SWASTA	-	-
3	SD NEGERI	800.000	-
4	SD SWASTA	-	-
5	SMP NEGERI	500.000	-
6	SMP SWASTA	44.148.100	-
7	SMA NEGERI	-	-
8	SMA SWASTA	1.904.500	-
9	SMK NEGERI	9.750.000	-
10	SMK SWASTA	400.000	-
11	SLB	5.257.200	-
<b>TOTAL</b>		<b>62.759.800</b>	<b>-</b>
<b>SISA DANA</b>		<b>62.759.800</b>	

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**RINCIAN REKENING DANA BERGULIR**  
**Per 31 Desember 2019**

No.	Uraian	No. Rekening Tabungan	Atas Nama	Peruntukan	Bank	Saldo Per 31 Desember 2019 Rp	Keterangan
1	Bantuan Modal Pinjaman Lunak kepada Koperasi dan LKM	006.221.008483	Disperindagkop Kota Yk	Penampung pokok dana bergulir	BPD DIY	-	
		006.221.008484	Cad. Likuiditas Pokja/Sarjono	Bunga untuk cadangan likuiditas	BPD DIY	-	
		006.221.008966	Op. Pokja & Fas/Sri Harnanik Ir	Bunga untuk ops Pokja & Fas	BPD DIY	-	
		006.221.011047	Cad. Resiko Pokja Cnl/Sarjono	Bunga untuk cadangan resiko	BPD DIY	-	
					Jumlah		
2	Dana Bergulir kepada Kelompok UMK dalam rangka Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan (PEW)	006.211.011841	Disperindagkop	Penampung pokok dana bergulir	BPD DIY	-	
		006.221.014560	Disperindagkop Yk/Bambang S	Bunga tahun 2006	BPD DIY	-	
					Jumlah		
3	Pinjaman Pengadaan Tenda bagi Pedagang Kaki Lima Kota Yogyakarta	32/22.7985	Dinas Perekonomian Kota	Penampung pokok dan bunga dana bergulir	Bank Jogja	-	
<b>TOTAL</b>						-	

## Lampiran 2A

**DAFTAR PIUTANG PAJAK**  
Per 31 Desember 2019

No	Tahun	Pajak Hotel	Pajak Restoran	Pajak Hiburan	Pajak Reklame	Pajak Parkir	Pajak ABT	PBB	JUMLAH
1	1994	-	-	-	-	-	-	442.856.418,00	442.856.418,00
2	1995	-	-	-	-	-	-	742.727.841,00	742.727.841,00
3	1996	-	-	-	-	-	-	550.215.358,00	550.215.358,00
4	1997	-	-	-	-	-	-	524.741.566,00	524.741.566,00
5	1998	-	-	-	-	-	-	664.344.649,00	664.344.649,00
6	1999	-	-	-	-	-	-	667.820.961,00	667.820.961,00
7	2000	-	-	-	-	-	-	344.765.735,00	344.765.735,00
8	2001	-	-	-	-	-	-	389.213.562,00	389.213.562,00
9	2002	4.754.000,00	20.192.700,00	19.183.241,00	0,00	0,00	0,00	411.134.243,00	455.264.184,00
10	2003	3.580.000,00	25.681.250,00	13.705.201,00	0,00	3.566.160,00	0,00	632.555.425,00	679.088.036,00
11	2004	4.046.000,00	48.586.640,00	23.008.455,00	0,00	9.536.120,00	0,00	727.044.368,00	812.221.583,00
12	2005	5.385.500,00	52.433.184,00	71.936.153,00	14.506.867,00	6.071.640,00	0,00	938.519.333,00	1.088.852.677,00
13	2006	7.127.500,00	124.066.712,00	4.733.500,00	12.399.342,00	13.973.640,00	0,00	1.384.121.669,00	1.546.422.363,00
14	2007	6.608.500,00	113.350.750,00	7.104.049,00	118.281.262,00	13.254.640,00	0,00	1.731.464.340,00	1.990.063.541,00
15	2008	9.354.500,00	112.490.000,00	6.270.244,00	163.014.342,00	6.828.640,00	0,00	2.479.090.778,00	2.777.048.504,00
16	2009	13.336.000,00	113.361.545,00	26.701.934,00	127.846.823,00	12.923.640,00	0,00	3.679.901.743,00	3.974.071.685,00
17	2010	21.374.102,00	173.142.695,00	43.113.000,00	298.365.532,00	22.029.880,00	0,00	3.546.929.365,00	4.104.954.574,00
18	2011	13.277.400,00	88.757.000,00	10.578.689,00	211.336.787,00	12.791.500,00	302.176,00	3.535.085.982,00	3.872.129.534,00
19	2012	21.709.736,00	112.292.877,00	9.954.065,00	223.321.148,00	51.793.900,00	4.592.864,00	3.588.243.218,00	4.011.907.808,00
20	2013	652.778.041,00	194.278.917,00	64.853.922,00	471.281.315,00	29.297.136,00	20.351.280,00	3.572.218.410,00	5.005.059.021,00
		<b>763.331.279,00</b>	<b>1.178.634.270,00</b>	<b>301.142.453,00</b>	<b>1.640.353.418,00</b>	<b>182.066.896,00</b>	<b>25.246.320,00</b>	<b>30.552.994.964,00</b>	<b>34.643.769.600,00</b>
21	2014	147.249.120,00	498.468.932,00	295.803.397,00	479.396.235,00	337.267.583,00	21.031.768,00	3.793.212.392,00	5.572.429.427,00
22	2015	157.460.963,00	345.109.639,00	438.456.999,00	848.295.754,00	1.774.013,00	15.471.512,00	4.653.679.485,00	6.460.248.365,00
23	2016	247.345.818,00	623.803.133,00	74.291.499,00	63.938.561,00	3.073.680,00	34.391.432,00	5.022.012.239,00	6.068.856.362,00
		<b>552.055.901,00</b>	<b>1.467.381.704,00</b>	<b>808.551.895,00</b>	<b>1.391.630.550,00</b>	<b>342.115.276,00</b>	<b>70.894.712,00</b>	<b>13.468.904.116,00</b>	<b>18.101.534.154,00</b>
24	2017	723.183.695,00	434.884.493,00	9.477.410,00	2.166.273.665,00	269.767.842,00	91.911.917,00	8.794.304.961,00	12.489.803.983,00
25	2018	2.461.447.776,00	804.420.052,00	486.251.647,00	142.631.285,00	195.577.154,00	45.718.423,00	11.768.874.444,00	15.904.920.781,00
		<b>3.184.631.471,00</b>	<b>1.239.304.545,00</b>	<b>495.729.057,00</b>	<b>2.308.904.950,00</b>	<b>465.344.996,00</b>	<b>137.630.340,00</b>	<b>20.563.179.405,00</b>	<b>28.394.724.764,00</b>
25	2019	1.509.118.954,00	511.828.487,00	228.325.111,00	679.279.233,00	14.019.437,00	260.110.158,00	17.783.207.130,00	20.985.888.510,00
		<b>1.509.118.954,00</b>	<b>511.828.487,00</b>	<b>228.325.111,00</b>	<b>679.279.233,00</b>	<b>14.019.437,00</b>	<b>260.110.158,00</b>	<b>17.783.207.130,00</b>	<b>20.985.888.510,00</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>6.009.137.605,00</b>	<b>4.397.149.006,00</b>	<b>1.833.748.516,00</b>	<b>6.020.168.151,00</b>	<b>1.003.546.605,00</b>	<b>493.881.530,00</b>	<b>82.368.285.615,00</b>	<b>102.125.917.028,00</b>

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**RINCIAN PIUTANG PAJAK BERDASARKAN UMUR**  
**Per 31 Desember 2019**

(dalam Rp)

No.	Jenis Piutang	Umur				Jumlah
		< 1 tahun	1 - 2 tahun	2 - 5 tahun	> 5 tahun	
1	Pajak Hotel	1.509.118.954,00	3.184.631.471,00	552.055.901,00	763.331.279,00	6.009.137.605,00
2	Pajak Restoran	511.828.487,00	1.239.304.545,00	1.467.381.704,00	1.178.634.270,00	4.397.149.006,00
3	Pajak Hiburan	228.325.111,00	495.729.057,00	808.551.895,00	301.142.453,00	1.833.748.516,00
4	Pajak Reklame	679.279.233,00	2.308.904.950,00	1.391.630.550,00	1.640.353.418,00	6.020.168.151,00
5	Pajak Parkir	14.019.437,00	465.344.996,00	342.115.276,00	182.066.896,00	1.003.546.605,00
6	Pajak Air Bawah Tanah	260.110.158,00	137.630.340,00	70.894.712,00	25.246.320,00	493.881.530,00
7	PBB	17.783.207.130,00	20.563.179.405,00	13.468.904.116,00	30.552.994.964,00	82.368.285.615,00
	<b>Jumlah sebelum penyisihan</b>	<b>20.985.888.510,00</b>	<b>28.394.724.764,00</b>	<b>18.101.534.154,00</b>	<b>34.643.769.600,00</b>	<b>102.125.917.028,00</b>
	Persentase penyisihan	0,50%	10%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Pajak	104.929.442,55	2.839.472.476,40	9.050.767.077,00	34.643.769.600,00	46.638.938.595,95
	<b>Jumlah Piutang pajak setelah penyisihan</b>	<b>20.880.959.067,45</b>	<b>25.555.252.287,60</b>	<b>9.050.767.077,00</b>	<b>-</b>	<b>55.486.978.432,05</b>



## LAMPIRAN 3A

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**MUTASI RETRIBUSI KEBERSIHAN**  
**Per 31 Desember 2019**

(dalam Rp)

No.	Jenis Piutang	Saldo Per 31 Desember 2018	Mutasi				Saldo Per 31 Desember 2019
			Penambahan		Pengurangan		
			Mutasi	Koreksi	Mutasi	Koreksi	
	<b>PIUTANG RETRIBUSI:</b>	<b>792.363.345,00</b>	<b>571.279.306,00</b>	<b>-</b>	<b>719.933.700,00</b>	<b>400,00</b>	<b>643.708.551,00</b>
1	Retribusi Kebersihan tahun 1996	11.495.245,00	-				11.495.245,00
2	Retribusi Kebersihan tahun 2015	71.149.900,00			10.215.500,00	400,00	60.934.000,00
4	Retribusi Kebersihan tahun 2018	709.718.200,00			709.718.200,00		-
5	Retribusi Kebersihan tahun 2019	-	571.279.306,00				571.279.306,00
	<b>Jumlah</b>	<b>792.363.345,00</b>	<b>571.279.306,00</b>	<b>-</b>	<b>719.933.700,00</b>	<b>400,00</b>	<b>643.708.551,00</b>

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**RINCIAN PIUTANG RETRIBUSI BERDASARKAN UMUR**  
**Per 31 Desember 2019**

(dalam Rp)

No	Jenis Piutang	Umur				Jumlah
		< 1 bulan	> 1 - 3 bulan	> 3 -12 bulan	> 12 bulan	
1	Piutang Pelayanan Kesehatan RSUD	-	-	-	111.005.034,00	111.005.034,00
2	Piutang Pelayanan Kesehatan Puskesmas	-	-	-	980.500,00	980.500,00
3	Piutang Retribusi Sampah/Kebersihan (Dinas Lingkungan Hidup)	209.800.206,00	222.598.100,00	138.881.000,00	72.429.245,00	643.708.551,00
4	Piutang Retribusi Pasar (Dinas Pengelolaan Pasar )					
	- Kios	357.954.816,00	190.365.457,00	219.384.321,00	334.965.785,00	1.102.670.379,00
	- Los	137.617.722,00	98.249.690,00	406.529.244,00	99.030.113,00	741.426.769,00
	- Lapak	10.205.575,00	1.428.400,00	1.852.900,00	10.605.675,00	24.092.550,00
		505.778.113,00	290.043.547,00	627.766.465,00	444.601.573,00	1.868.189.698,00
5	Piutang Retribusi Parkir (Dinas Perhubungan )	-	-	-	291.061.027,00	291.061.027,00
6	Piutang Retribusi IMBB Dinas Perizinan	-	-	-	241.590.100,00	241.590.100,00
	<b>Jumlah sebelum penyisihan</b>	<b>715.578.319,00</b>	<b>512.641.647,00</b>	<b>766.647.465,00</b>	<b>1.161.667.479,00</b>	<b>3.156.534.910,00</b>
	Persentase penyisihan	0,50%	10%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Retribusi	3.577.891,60	51.264.164,70	383.323.732,50	1.161.667.479,00	1.599.833.267,80
	<b>Jumlah Piutang Retribusi setelah penyisihan</b>	<b>712.000.427,40</b>	<b>461.377.482,30</b>	<b>383.323.732,50</b>	<b>-</b>	<b>1.556.701.642,20</b>

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**RINCIAN TAGIHAN PEMBERIAN PINJAMAN**  
**PER 31 Desember 2019**

No.	Pihak Ketiga	No & tgl. Perjanjian	Lingkup perjanjian	Jangka waktu (th)	Nilai Pinjaman (Rp)	Realisasi Pembayaran s.d 31 Desember 2019 (Rp)	Bag.Lancar Tag.Pemberian Pinjaman per 31/12/2019 (Rp)	Tagihan Pemberian Pinjaman per 31/12/2019 (Rp)	Kualitas Piutang				Jumlah	
									Lancar	Kurang lancar	Diragukan	Macet		
1	Pedagang Kios Buku komplek Taman Pintar (lantai I)	Peraturan Walikota No. 19 Tahun 2006 tanggal 16 Maret 2006 (s.d. 2008)	Pemberian pinjaman tanpa bunga untuk angsuran ke-1 sampai ke-6 sewa kios buku di komplek taman Pintar.	5	530.000.000	530.000.000	-	-	-	-	-	-	-	
2	Pedagang Kios Buku komplek Taman Pintar (lantai II)	Peraturan Walikota No. 63 Tahun 2006 tanggal 13 September 2006 (s.d. 2010)	Pemberian pinjaman tanpa bunga untuk angsuran ke-1 sampai ke-6 sewa kios buku di komplek taman Pintar.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Koperasi Pola Syariah	Perjanjian No.27/Perj.Yk/2012 tanggal 3 Desember 2012 tentang Pelaksanaan Program Pembiayaan Modal Kerja Pinjaman Lunak (MKPL) kepada Koperasi Pola Syariah Kota Yogyakarta	Pemberian pinjaman kepada Koperasi Jasa keuangan Syariah dg jangka waktu 3 tahun sejak tanggal perjanjian (3-12-2012).	3	1.000.000.000	830.875.001	169.124.999,00	-	-	-	169.124.999,00	169.124.999,00		
<b>JUMLAH</b>						<b>1.530.000.000</b>	<b>1.360.875.001</b>	<b>169.124.999,00</b>	-	-	-	<b>169.124.999,00</b>	<b>169.124.999,00</b>	
									Persentase penyisihan	0,50%	10%	50%	100%	
									Penyisihan Tagihan Pemberian Pinjaman	-	-	-	169.124.999,00	169.124.999,00
									Tagihan Pemberian Pinjaman Netto	-	-	-	-	-

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**RINCIAN BAGIAN LANCAR TAGIHAN BAGI HASIL KEMITRAAN**  
**Per 31 Desember 2019**

No.	Pihak Ketiga	No & tgl. Perjanjian	Lingkup perjanjian	Jangka waktu (th)	Total Nilai Kontribusi (Rp)	Pembebasan pembayaran kontribusi	Realisasi Pembayaran s.d. 31/12/2019 (Rp)	Bag.Lancar Tag.Bagi Hasil Kemitraan per 31/12/2019 (Rp)	Tagihan Bagi Hasil Kemitraan per 31/12/2019 (Rp)	Kualitas Piutang				Jumlah
										Lancar	Kurang lancar	Diragukan	Macet	
1	Hotel Kayu Manis	Akta Notaris Tri Agus Heryono, SH No. 30 tgl. 16 Agustus 2004 (s.d. 2020)	Rehabilitasi & penambahan bangunan serta pengelolaan aset pesanggrahan Ngestilaras Kaliurang	15	345.000.000	21.000.000	302.000.000	22.000.000	-	22.000.000				22.000.000,00
2	PT Bumi Kusuma Santosa	Akta Notaris Tri Agus Heryono, SH No. 34 tgl. 30 Agustus 2004 (s.d. 2025)	Pembangunan & pengelolaan aset eks Pasar Reksonegaran (Reksa Arcade)	20	4.000.000.000	-	2.400.000.000	225.000.000	1.375.000.000	225.000.000				225.000.000,00
<b>JUMLAH</b>										<b>247.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>247.000.000</b>
Persentase penyisihan										0,50%	10%	50%	100%	
Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Bagi Hasil Kemitraan										1.235.000,00	-	-	-	1.235.000,00
Bagian Lancar Tagihan Bagi Hasil Kemitraan Netto										<b>245.765.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>245.765.000,00</b>

## Keterangan :

Th 2006 Hotel Kayu Manis mendapatkan pembebasan pembayaran kontribusi sebesar Rp10.000.000,00 (April-Agustus 2006) karena adanya penutupan kawasan Kaliurang akibat siaga Merapi.

Th 2010 ada pembebasan sebesar Rp 3.000.000,00 (Nopember - Desember 2010 ) karena terjadinya erupsi merapi.

Th 2011 ada pembebasan sebesar Rp 8.000.000,00 (Januari - April 2011 ) akibat erupsi merapi

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**RINCIAN TAGIHAN BAGI HASIL KEMITRAAN**  
**Per 31 Desember 2019**

No.	Pihak Ketiga	No & tgl. Perjanjian	Lingkup perjanjian	Jangka waktu (th)	Total Nilai Kontribusi (Rp)	Pembebasan pembayaran kontribusi	Realisasi Pembayaran s.d. 31/12/2019 (Rp)	Bag.Lancar Tag.Bagi Hasil Kemitraan per 31/12/2019 (Rp)	Tagihan Bagi Hasil Kemitraan per 31/12/2019 (Rp)	Kualitas Piutang				Jumlah	
										Lancar	Kurang lancar	Diragukan	Macet		
1	Hotel Kayu Manis	Akta Notaris Tri Agus Heryono, SH No. 30 tgl. 16 Agustus 2004 (s.d. 2020)	Rehabilitasi & penambahan bangunan serta pengelolaan aset pesanggrahan Ngestilaras Kaliurang	15	345.000.000	21.000.000	302.000.000	22.000.000	-	-	-	-	-		
2	PT Bumi Kusuma Santosa	Akta Notaris Tri Agus Heryono, SH No. 34 tgl. 30 Agustus 2004 (s.d. 2025)	Pembangunan & pengelolaan aset eks Pasar Reksonegaran (Reksa Arcade)	20	4.000.000.000	-	2.400.000.000	225.000.000	1.375.000.000	1.375.000.000	-	-	-	1.375.000.000,00	
														-	
	<b>JUMLAH</b>				<b>4.345.000.000</b>	<b>21.000.000</b>	<b>2.702.000.000</b>	<b>247.000.000</b>	<b>1.375.000.000</b>	<b>1.375.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.375.000.000</b>	
										Persentase penyisihan	0,50%	10%	50%	100%	
										Penyisihan Tagihan Bagi Hasil Kemitraan	6.875.000,00	-	-	-	6.875.000,00
										Tagihan Bagi Hasil Kemitraan Netto	<b>1.368.125.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.368.125.000,00</b>

## Keterangan :

Th 2006 Hotel Kayu Manis mendapatkan pembebasan pembayaran kontribusi sebesar Rp10.000.000,00 (April-Agustus 2006) karena adanya penutupan kawasan Kaliurang akibat siaga Merapi.

Th 2010 ada pembebasan sebesar Rp 3.000.000,00 (Nopember - Desember 2010 ) karena terjadinya erupsi merapi.

Th 2011 ada pembebasan sebesar Rp 8.000.000,00 (Januari - April 2011 ) akibat erupsi merapi

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**PIUTANG DENDA TAGIHAN BAGI HASIL KEMITRAAN**  
**Per 31 Desember 2019**

No.	Pihak Ketiga	No & tgl. Perjanjian	Lingkup perjanjian	Jangka waktu (th)	Kontribusi Tetap Tag. Bagi Hasil Kemitraan Tahun 2019 (Rp)	Realisasi Pembayaran s.d. 31/12/2019 (Rp)	Kekurangan Pembayaran s.d. 31/12/2019 (Rp)	Piutang Denda Keterlambatan Pembayaran per 31/12/2019 (Rp)	Kualitas Piutang				Jumlah	
									Lancar	Kurang lancar	Diragukan	Macet		
1	Hotel Kayu Manis	Akta Notaris Tri Agus Heryono, SH No. 30 tgl. 16 Agustus 2004 (s.d. 2020)	Rehabilitasi & penambahan bangunan serta pengelolaan aset pesanggrahan Ngestilaras Kaliurang	15	23.000.000,00	5.000.000,00	18.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00				2.000.000,00	
<b>JUMLAH</b>					<b>23.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	-	-	-	<b>2.000.000,00</b>	
									Persentase penyisihan	0,50%	10%	50%	100%	
									Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Bagi Hasil Kemitraan	10.000,00	-	-	-	10.000,00
									Bagian Lancar Tagihan Bagi Hasil Kemitraan Netto	<b>1.990.000,00</b>	-	-	-	<b>1.990.000,00</b>

## Keterangan :

Piutang denda timbul karena Hotel Kayu Manis tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban pembayaran Kontribusi Tetap Bagi Hasil Kemitraan tahun 2019

## LAMPIRAN 5D

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**RINCIAN PIUTANG DENDA TAGIHAN BAGI HASIL KEMITRAAN HOTEL KAYU MANIS**  
**Per 31 Desember 2019**

No.	Periode	Kontribusi Tetap	Jatuh Tempo	Realisasi Pembayaran (Rp)	Denda	
					%	Jumlah
1	Januari	2.000.000	31 Januari 2019	2.000.000,00	-	
2	Februari	1.000.000	28 Februari 2019	-	20%	200.000,00
3	Maret	2.000.000	31 Maret 2019	-	18%	360.000,00
4	April	2.000.000	30 April 2019	-	16%	320.000,00
5	Mei	2.000.000	31 Mei 2019	-	14%	280.000,00
6	Juni	2.000.000	30 Juni 2019	-	12%	240.000,00
7	Juli	2.000.000	31 Juli 2019	-	10%	200.000,00
8	Agustus	2.000.000	31 Agustus 2019	-	8%	160.000,00
9	September	2.000.000	30 September 2019	-	6%	120.000,00
10	Oktober	2.000.000	31 Oktober 2019	-	4%	80.000,00
11	November	2.000.000	30 November 2019	2.000.000,00	2%	40.000,00
12	Desember	2.000.000	31 Desember 2019	1.000.000,00	-	-
			<b>JUMLAH</b>	<b>5.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>

**MUTASI BAGIAN LANCAR TAGIHAN SEWA**  
Per 31 Desember 2019

No.	Keterangan	Saldo per 31 Desember 2018	Penambahan	Pengurangan	Saldo per 31 Desember 2019	Kualitas Piutang				Jumlah
						Lancar	Kurang lancar	Diragukan	Macet	
1	Pengelolaan Pasar Ikan Higienis Terpadu oleh PT Bummy Harapan Umat	60.000.000,00	-	-	60.000.000,00	0	0	0	60.000.000,00	60.000.000,00
2	Tagihan atas hak pengelolaan titik reklame	1.189.239.168,00	-	40.000.000,00	1.149.239.168,00	0,00	0,00	0,00	1.149.239.168,00	1.149.239.168,00
3	Tagihan sewa ruang oleh PD. BPR. Bank Jogja pada Dinas Perijinan, Kec. GK, Kec. MJ dan Kec. DN	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-	-	0	0	0	-
4	Sewa sebagian Gedung Perijinan oleh BPD DIY Cabang Senopati	61.000.000,00	61.000.000,00	61.000.000,00	61.000.000,00	61.000.000,00	0	0	0	61.000.000,00
5	Tagihan sewa gedung Kantin Dharma Wanita (Balaikota)	-	-	-	-	-	0	0	0	-
6	Tagihan sewa Rusunawa Grha Bina Harapan dan Cokrodirjan	79.894.000,00	129.591.300,00	68.863.300,00	140.622.000,00	11.500.000,00	11.061.000,00	10.883.000,00	107.178.000,00	140.622.000,00
7	Tagihan sewa kantin Dinas Pendidikan	12.693.000,00	12.693.000,00	12.693.000,00	12.693.000,00	12.693.000,00	0	0	0	12.693.000,00
8	Tagihan sewa tempat fotocopy Dinas Pendidikan	8.851.000,00	8.851.000,00	8.851.000,00	8.851.000,00	8.851.000,00	0	0	0	8.851.000,00
9	Tagihan sewa ruang oleh PD. BPR. Bank Jogja (Eks Kecamatan Jetis)	92.440.000,00	92.440.000,00	92.440.000,00	92.440.000,00	92.440.000,00	0	0	0	92.440.000,00
	<b>JUMLAH BAGIAN LANCAR TAGIHAN SEWA</b>	<b>1.554.117.168,00</b>	<b>304.575.300,00</b>	<b>333.847.300,00</b>	<b>1.524.845.168,00</b>	<b>186.484.000,00</b>	<b>11.061.000,00</b>	<b>10.883.000,00</b>	<b>1.316.417.168,00</b>	<b>1.524.845.168,00</b>
	Persentase penyisihan					0,50%	10%	50%	100%	
	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Sewa					932.420,00	1.106.100,00	5.441.500,00	1.316.417.168,00	1.323.897.188,00
	Bagian Lancar Tagihan Sewa Netto					<b>185.551.580,00</b>	<b>9.954.900,00</b>	<b>5.441.500,00</b>	-	<b>200.947.980,00</b>



**MUTASI TAGIHAN SEWA**  
Per 31 Desember 2019

No.	Keterangan	Saldo per 31 Desember 2018	Penambahan	Pengurangan	Saldo per 31 Desember 2019	Kualitas Piutang				Jumlah
						Lancar	Kurang lancar	Diragukan	Macet	
1	Tagihan sewa ruang oleh PD. BPR. Bank Jogja pada Dinas Perijinan, Kec. GK, Kec. MJ dan Kec. DN	-	-	-	-	-				-
2	Sewa sebagian Gedung Perijinan oleh BPD DIY Cabang Senopati	61.000.000,00	-	61.000.000,00	-	-				-
3	Tagihan sewa gedung Kantin Dharma Wanita (Balaikota)	-	-	-	-	-				-
4	Tagihan sewa kantin Dinas Pendidikan	12.693.000,00	-	12.693.000,00	-	-				-
5	Tagihan sewa tempat fotocopy Dinas Pendidikan	8.851.000,00	-	8.851.000,00	-	-				-
6	Tagihan sewa ruang oleh PD. BPR. Bank Jogja (Eks Kecamatan Jetis)	369.760.000,00	-	184.880.000,00	184.880.000,00	184.880.000,00				184.880.000,00
	<b>JUMLAH BAGIAN LANCAR TAGIHAN SEWA</b>	<b>452.304.000,00</b>	<b>-</b>	<b>267.424.000,00</b>	<b>184.880.000,00</b>	<b>184.880.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>184.880.000,00</b>
	Persentase penyisihan					0,50%	10%	50%	100%	
	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Sewa					924.400,00	-	-	-	924.400,00
	Bagian Lancar Tagihan Sewa Netto					<b>183.955.600,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>183.955.600,00</b>

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**MUTASI BAGIAN LANCAR TUNTUTAN GANTI RUGI**  
**Per 31 Desember 2019**

(dalam Rp)

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2018	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2019	Kualitas Piutang				Jumlah
						Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
1	Saldo	0,00								
2	Reklasifikasi		0,00							
3	Tahun 2018			0,00	0,00	0,00				0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Persentase penyisihan					0,50%	10%	50%	100%	
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi					-	-	-	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto					-	-	-	-	-

**MUTASI PIUTANG PAD LAINNYA**  
Per 31 Desember 2019

No	Keterangan	Saldo per 31 Desember 2018	Penambahan		Pengurangan		Saldo per 31 Desember 2019	Kualitas Piutang				Jumlah
			Mutasi	Koreksi	Mutasi	Koreksi		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
1	Piutang denda Pasar Ikan Higienis PT. Bummy Harapan Umat	6.760.000,00	-	-	-	-	6.760.000,00				6.760.000,00	6.760.000,00
2	Piutang denda sewa hunian Rusunawa Cokrodirjan	7.724.500,00	10.641.500,00		3.114.500,00		15.251.500,00	1.001.500,00	937.500,00	1.017.500,00	12.295.000,00	15.251.500,00
3	Piutang denda keterlambatan pengadaan barang (CV. Restu Biyung) (Reklas dari Piutang TP/TGR)	36.874.656,00					36.874.656,00	36.874.656,00				36.874.656,00
4	Piutang denda PBB	27.818.915.556,00	6.737.126.917,00		4.606.609.769,00		29.949.432.704,00	1.066.992.428,00	7.751.928.714,00	6.465.073.976,00	14.665.437.586,00	29.949.432.704,00
5	Piutang denda pajak hotel	779.634.993,00	6.842.572,00		53.457.760,00		733.019.805,00	-	733.019.805,00	-	-	733.019.805,00
6	Piutang denda pajak restoran	5.785.500,00	10.981.611,00		16.767.111,00		10.981.611,00	10.981.611,00	5.785.500,00	-	-	16.767.111,00
7	Piutang denda pajak hiburan	15.458.455,00					15.458.455,00		15.458.455,00	-	-	15.458.455,00
8	Piutang denda pajak parkir	0,00	806.600,00				806.600,00	806.600,00				806.600,00
9	Piutang bunga pajak hotel	1.048.268.316,00	1.682.805.878,00		1.565.227.650,00		1.165.846.544,00	500.059.800,00	665.786.744,00	-	-	1.165.846.544,00
10	Piutang bunga pajak restoran	259.344.081,00	305.042.043,00		332.295.816,00		232.090.308,00	90.098.012,00	141.992.296,00	-	-	232.090.308,00
11	Piutang bunga pajak hiburan	10.652.514,00			10.652.514,00		-	-	-	-	-	-
12	Piutang bunga pajak reklame	0,00					-	-	-	-	-	-
13	Piutang bunga pajak parkir	59.032.521,00	5.728.787,00	514.000,00	10.069.701,00		55.205.607,00	5.728.787,00	48.962.820,00	-	514.000,00	55.205.607,00
14	Piutang bunga pajak air bawah tanah	0,00					-	-	-	-	-	-
15	Piutang denda titik reklame (PT. Oscar Sembilan Pariwara)	49.244.040,00					49.244.040,00	49.244.040,00				49.244.040,00
	<b>JUMLAH PIUTANG LAINNYA</b>	<b>30.097.695.132,00</b>	<b>8.759.975.908,00</b>	<b>514.000,00</b>	<b>6.581.427.710,00</b>	<b>-</b>	<b>32.276.757.330,00</b>	<b>1.761.787.434,00</b>	<b>9.363.871.834,00</b>	<b>6.466.091.476,00</b>	<b>14.685.006.586,00</b>	<b>32.276.757.330,00</b>
	Persentase penyisihan							0,5%	10%	50%	100%	
	Penyisihan piutang PAD lainnya							8.808.937,17	936.387.183,40	3.233.045.738,00	14.685.006.586,00	18.863.248.444,57
	Piutang PAD Lainnya Netto							<b>1.752.978.496,83</b>	<b>8.427.484.650,60</b>	<b>3.233.045.738,00</b>	<b>-</b>	<b>13.413.508.885,43</b>

**MUTASI PIUTANG LAINNYA**  
Per 31 Desember 2019

No	Keterangan	Saldo per 31 Desember 2018	Penambahan		Pengurangan		Saldo per 31 Desember 2019	Kualitas Piutang				Jumlah
			Mutasi	Koreksi	Mutasi	Koreksi		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
1	Piutang sewa kios makanan minuman dan pengelolaan kamar mandi/WC kios buku di komplek Taman Pintar	130.481.800,00	555.776.900,00	101.500.000,00	554.978.500,00		232.780.200,00	190.244.600,00	22.800.000,00	19.735.600,00		232.780.200,00
2	Piutang RSUD	8.863.567.963,00	68.915.641.968,00		64.809.535.311,00		12.969.674.620,00	12.236.556.430,00	191.759.909,00	491.594.365,00	49.763.916,00	12.969.674.620,00
3	Piutang Listrik Kios Buku di Kompleks Taman Pintar	4.321.190,00					4.321.190,00				4.321.190,00	4.321.190,00
4	Piutang air Rusunawa Grha Bina Harapan dan Cokrodirjan	13.483.350,00	14.362.000,00	2.267.200,00	6.463.000,00	-	23.649.550,00	1.726.000,00	1.818.000,00	1.800.000,00	18.305.550,00	23.649.550,00
5	Piutang Puskesmas	4.319.816.711,00	17.820.548.933,20		15.733.931.562,60		6.406.434.081,60	6.404.817.081,60			1.617.000,00	6.406.434.081,60
	<b>JUMLAH PIUTANG LAINNYA</b>	<b>13.331.671.014,00</b>	<b>87.306.329.801,20</b>	<b>103.767.200,00</b>	<b>81.104.908.373,60</b>	<b>-</b>	<b>19.636.859.641,60</b>	<b>18.833.344.111,60</b>	<b>216.377.909,00</b>	<b>513.129.965,00</b>	<b>74.007.656,00</b>	<b>19.636.859.641,60</b>
	Persentase penyisihan							0,5%	10%	50%	100%	
	Penyisihan piutang lainnya							94.166.720,56	21.637.790,90	256.564.982,50	74.007.656,00	446.377.149,96
	Piutang Lainnya Netto							<b>18.739.177.391,04</b>	<b>194.740.118,10</b>	<b>256.564.982,50</b>	<b>-</b>	<b>19.190.482.491,64</b>

**ASURANSI DIBAYAR DI MUKA  
PER 31 DESEMBER 2019**

NO	SKPD	Jenis Asuransi	Periode	Jumlah Premi (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2018	Penambahan 2019	Beban 2019	Asuransi dibayar di muka Kendaraan 2019	Asuransi dibayar di muka Bangunan 2019	Asuransi dibayar di muka 2019	
1	Taman Pintar	Asuransi Bangunan ASKRIDA No. 0219-2323-0319-0001-00	13/03/2019 - 10/03/2020	30.932.500,00	-	30.932.500,00	24.915.493,15		6.017.006,85	6.017.006,85	
2	Taman Pintar	Asuransi Bangunan ASKRIDA No. 0281-2323-0319-0002-00	13/03/2019 - 13/03/2020	66.964.500,00	-	66.964.500,00	53.938.528,77		13.025.971,23	13.025.971,23	
3	Taman Pintar	Asuransi Kendaraan ASKRIDA No. 0203-2323-0519-0005-00	01/04/2019 - 01/04/2020	5.091.500,00	-	5.091.500,00	3.836.061,64	1.255.438,36		1.255.438,36	
4	Taman Pintar	Asuransi Kendaraan ASKRIDA No. 0203-2323-0419-0002-00	01/04/2019- 01/04/2020	4.683.625,00	-	4.683.625,00	3.528.758,56	1.154.866,44		1.154.866,44	
5	Taman Pintar	Asuransi Kendaraan EKA LLOYD JAYA No. 06022119000002	25/9/2019 - 25/9/2020	1.301.458,00	-	1.301.458,00	349.432,56	952.025,44		952.025,44	
6	Taman Pintar	Asuransi Kendaraan EKA LLOYD JAYA No. 06022119000003	25/9/2019 - 25/9/2020	4.585.025,00	-	4.585.025,00	1.231.047,81	3.353.977,19		3.353.977,19	
7	Taman Pintar	Asuransi Bangunan ASKRIDA No. 0281-2323-0318-0001-00	13/3/2018 - 10/03/2019	74.362.000,00	14.464.936,99	-	14.464.936,99		-	-	
8	Taman Pintar	Asuransi Bangunan ASKRIDA No. 0219-2323-0318-0001-00	13/3/2018 - 13/3/2019	34.330.000,00	6.677.890,41	-	6.677.890,41		-	-	
9	Taman Pintar	Asuransi Kendaraan ASKRIDA No. 0203-2323-0418-0001-00	1/4/2018 - 1/4/2019	4.822.000,00	1.188.986,30	-	1.188.986,30	-		-	
10	Taman Pintar	Asuransi Kendaraan ASKRIDA No. 0203-2323-0418-0002-00	1/4/2018 - 1/4/2019	4.626.015,00	1.140.661,23	-	1.140.661,23	-		-	
		<b>Total Asuransi Dibayar Di Muka Dinas Pariwisata</b>				<b>23.472.474,93</b>	<b>113.558.608,00</b>	<b>111.271.797,42</b>	<b>6.716.307,43</b>	<b>19.042.978,08</b>	<b>25.759.285,51</b>
11	BPKAD	Asuransi kendaraan, PT Asuransi Sinar Mas, Sleman No. 02/Kontrak/Asuransi-Kendaraan/VII/2018	13/7/2018 - 13/7/2019	399.586.972,50	199.793.486,25	-	199.793.486,25	-		-	
12	BPKAD	Asuransi bangunan gedung bangunan perekonomian, PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Yk, No. 05/Kontrak-Asuransi Bangunan Perekonomian/VIII/2018	01/8/2018 - 01/8/2019	747.528.748,12	436.058.436,40	-	436.058.436,40	-		-	
13	BPKAD	Asuransi bangunan gedung bangunan kesehatan, PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Yogyakarta, No: 08/Kontrak/Asuransi-Bangunan Kesehatan/X/2018	01/10/2018 - 01/10/2019	282.112.174,05	211.584.130,54	-	211.584.130,54	-		-	
14	BPKAD	Asuransi Bangunan Gedung Bangunan Pemerintahan, PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Yogyakarta, No: 11/Kontrak-asuransi Bangunan Pemerintahan/XI/2018	02/11/2018 - 02/11/2019	285.673.030,97	238.060.859,14	-	238.060.859,14	-		-	
15	BPKAD	Asuransi Kendaraan, PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 YK No 02/Kontrak/Asuransi-Kendaraan/VIII/2019	28/8/2019 - 28/8/2020	502.209.361,71	-	502.209.361,71	167.403.120,57	334.806.241,14		334.806.241,14	
16	BPKAD	Asuransi Bangunan Gedung Bangunan Perekonomian, PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Yk, No. 05/Kontrak-Asuransi Bangunan Perekonomian/IX/2019	20/9/2019 - 20/9/2020	856.960.014,20	-	856.960.014,20	214.240.003,55		642.720.010,65	642.720.010,65	
17	BPKAD	Asuransi Bangunan Gedung Bangunan Perekonomian, PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Yk, No. 11/Kontrak-Asuransi Bangunan Kesehatan/XI/2019	22/11/2019 - 22/11/2020	366.265.932,21	-	366.265.932,21	30.522.161,02		335.743.771,19	335.743.771,19	
18	BPKAD	Asuransi Bangunan Gedung Bangunan Pemerintahan, PT Asuransi Sinar Mas, Sleman No;08/Kontrak -Asuransi Bangunan Pemerintahan/XI/2019	14/11/2019 - 14/11/2020	317.109.755,03	-	317.109.755,03	52.851.625,84		264.258.129,19	264.258.129,19	
		<b>BPKAD</b>				<b>###</b>	<b>2.042.545.063,15</b>	<b>1.550.513.823,31</b>	<b>334.806.241,14</b>	<b>1.242.721.911,03</b>	<b>1.577.528.152,17</b>
						<b>Total Asuransi Dibayar Di Muka</b>		<b>341.522.548,57</b>	<b>1.261.764.889,11</b>	<b>1.603.287.437,68</b>	

## LAMPIRAN 10

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
PERSEDIAAN PER 31 DESEMBER 2019**

<b>NO</b>	<b>JENIS PERSEDIAAN</b>	<b>JUMLAH ( Rp )</b>
1	ATK	3.951.882.155,47
2	Pakaian Dinas	284.165.131,71
3	Pakaian Olah Raga	4.450.000,00
4	Suku Cadang Sarana Mobilitas	2.044.750,00
5	Bahan Kebersihan dan alat Pembersih	1.011.545.271,16
6	Barang Cetakan	3.425.410.162,82
7	Karcis	366.975.645,00
8	Alat Listrik/elektronik	1.917.467.123,50
9	Obat-obatan	14.324.574.427,46
10	Bahan Material	2.086.958.406,10
11	Bahan Makanan	2.009.595,00
12	Tanaman	202.132.500,00
13	Peralatan Kerja dan Bahan Percontohan	556.429.237,74
14	Reagen dan Alat Laboratorium	2.010.109.444,75
15	Rambu dan APILL	-
16	Bahan Komputer	754.413.667,50
17	BBM dan Pelumas	175.459.090,00
18	Alat Kesehatan/Bahan Kimia/Medis	1.937.519.384,81
19	Vaksin	638.096.354,75
20	Perlengkapan Rumah Tangga	2.193.222.075,36
21	Barang Hibah	73.714.721,00
22	Bibit Ikan	12.627.010,00
23	Alat Kontrasepsi	80.313.395,00
24	Bendera	
25	Peralatan Uji	371.550.297,00
26	Linen	150.274.352,20
27	Lain-lain	190.439.606,66
	<b>Jumlah</b>	<b>36.723.783.804,99</b>

## REKAPITULASI LAPORAN SALDO BARANG PERSEDIAAN PER KODE REKENING AKHIR TAHUN 2019

NO.	SKPD	ATK	Pakaian Dinas	Suku Cadang Sarana Mobilitas	Bahan Kebersihan dan Alat Pembersih	Barang Cetak	Karcis	Alat Listrik/ Elektronik	Obat-obatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Dinas Pendidikan	2.266.153.236	8.343.200	2.044.750	449.130.104	168.082.321		160.247.821	73.421.119
2	Dinas Pariwisata	93.480.728				35.024.580	28.280.960	259.337.248	
3	Dinas Kesehatan	683.180.208	124.347.037		416.732.410	1.146.213.268	2.470.000	132.498.083	6.698.961.337
4	Rumah Sakit Umum Daerah	68.027.222	28.040.230		49.943.015	339.222.192			7.443.300.490
5	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawawan Permukiman Kota	39.331.750	12.251.550			4.000.000		1.208.861.463	
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.944.250							
7	Dinas Kebakaran	24.435.925			22.980.990	8.847.000		5.201.500	
8	Dinas Perhubungan	88.752.115	15.120.000		2.962.770	239.337.450	210.038.950	9.755.284	
9	Bappeda	20.663.815			3.722.255	7.391.575		654.000	
10	Dinas Lingkungan Hidup	5.242.680			709.260	149.393.300		1.224.500	154.650
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.837.500				632.019.587			
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	6.733.200			598.000				
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.786.510			1.130.870	51.999.000			95.578.161
14	Dinas Sosial	2.021.137						329.500	
15	Dinas Pertanian dan Pangan	6.753.450			6.106.080	5.670.000	4.287.500	7.669.625	11.404.480
16	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	74.879.995			15.780.900	19.852.800	121.898.235	14.623.950	985.390
17	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	94.000							
18	Dinas Pemuda dan Olah Raga	3.736.849			100.000	157.500		1.320.000	
19	Kantor Kesatuan Bangsa	12.018.000			3.093.100	10.118.100		1.685.000	
20	Sekretariat DPRD	81.433.822			6.399.600	52.586.850		55.452.050	
21	Sekretariat Daerah	35.715.934			8.708.105	5.509.500		5.780.100	
	a. Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	2.653.500			305.000	1.373.000		470.000	
	b. Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan	11.286.200			2.908.100	490.000			
	c. Bagian Layanan Pengadaan	16.078.156			1.346.550	3.473.500		1.141.500	
	d. Bagian Hukum	76.300							
	e. Bagian Protokol	3.271.999			1.562.500	62.500		2.135.000	
	f. Bagian Umum	292.979			2.135.000			1.419.100	
	g. Bagian P3ADK	1.351.050			375.955			220.000	
	h. Bagian Organisasi	705.750			75.000	110.500		394.500	
22	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	6.378.800							
	Jumlah Dipindahkan	3.524.601.126	188.102.017	2.044.750	988.097.458	2.875.425.023	366.975.645	1.864.640.124	14.323.805.627

NO.	SKPD	ATK	Pakaian Dinas	Suku Cadang Sarana Mobilitas	Bahan Kebersihan dan Alat Pembersih	Barang Cetak	Karcis	Alat Listrik/ Elektronik	Obat-obatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	Inspektorat	19.242.325			2.029.542	17.825.950		2.881.850	
24	Badan Kepegawaian Pendididkan dan Pelatihan	9.681.650	66.600.000		232.000	7.202.240		1.495.000	768.800
25	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	96.751.246			708.560	23.611.750		13.713.950	
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	106.217.850	11.890.215			329.707.450			
27	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	49.494.700				125.753.000		6.375.000	
28	Satuan Polisi Pamong Praja	19.609.700	22.022.900		3.674.000			7.375.000	
29	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	590.100				12.083.500			
30	Dinas Kebudayaan	21.640.124			1.218.650			145.900	
31	Kecamatan Tegalarjo	3.822.500			619.295	2.288.000		246.200	
32	Kecamatan Jetis	21.636.675			3.219.765			5.166.100	
33	Kecamatan Gondokusuman	6.745.716			8.430.586	410.000		5.442.000	
34	Kecamatan Danurejan	11.436.950			219.000			3.532.500	
35	Kecamatan Gedongtengen	6.022.817			1.041.121	3.055.000		1.525.000	
36	Kecamatan Pakualaman	2.173.600			126.525				
37	Kecamatan Ngampilan	10.430.110				8.132.500		1.343.500	
38	Kecamatan Wirobrajan	3.449.850			670.600			162.000	
39	Kecamatan Mantriweron	4.112.250							
40	Kecamatan Kraton	5.858.800			528.000	2.418.000			
41	Kecamatan Gondomanan	8.479.785				2.083.000		276.000	
42	Kecamatan Mergangsan	3.537.200				172.500		1.224.500	
43	Kecamatan Umbulharjo	9.955.682			605.169	6.375.000		944.200	
44	Kecamatan Kotagede	6.391.400			125.000	8.867.250		978.300	
	<b>Jumlah jalan</b>	<b>427.281.030</b>	<b>100.513.115</b>		<b>23.447.813</b>	<b>549.985.140</b>		<b>52.827.000</b>	<b>768.800</b>
	<b>JUMLAH (A)</b>	<b>3.951.882.155</b>	<b>288.615.132</b>	<b>2.044.750</b>	<b>1.011.545.271</b>	<b>3.425.410.163</b>	<b>366.975.645</b>	<b>1.917.467.124</b>	<b>14.324.574.427</b>



REKAPITULASI LAPORAN SALDO BARANG

NO.	SKPD	Bahan Material	Bahan Makanan	Tanaman Hias dan buah	Peralatan Kerja dan Bahan Percontohan	Reagen dan Alat Laboratorium	Rambu dan APPL	Bahan Komputer	BBM dan Pelumas	Alat Kesehatan dan /Bahan Kimia/Medis
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Dinas Pendidikan	125.120.176	2.009.595	25.553.000	146.402.137	58.344		245.249.068	805.000	4.030.068
2	Dinas Pariwisata				111.174.970			48.809.000		4.321.000
3	Dinas Kesehatan	2.967.760		88.000	56.791.520	1.980.787.251		163.329.427	83.663.840	1.776.507.036
4	Rumah Sakit Umum Daerah				605.000					
5	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawawan Permukiman Kota	1.917.268.945				6.320.000		18.945.500	60.182.550	
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				15.267.500					
7	Dinas Kebakaran							9.827.500	16.160.000	
8	Dinas Perhubungan	6.690.350			1.601.066			35.746.821	3.119.000	
9	Bappeda							23.125.500		
10	Dinas Lingkungan Hidup	5.898.750		146.222.100	2.087.500	22.943.850		10.964.500		
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil							25.580.000		
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak									
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							1.595.000	120.000	149.454.846
14	Dinas Sosial							7.567.000		
15	Dinas Pertanian dan Pangan			30.219.400	123.459.500			2.095.000	408.000	3.206.435
16	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	27.375.425			98.820.045			25.194.000	10.532.700	
17	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi									
18	Dinas Pemuda dan Olah Raga									
19	Kantor Kesatuan Bangsa							16.178.400		
20	Sekretariat DPRD	909.500						2.664.000		
21	Sekretariat Daerah							45.860.946	234.000	
	a. Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat							2.310.000		
	b. Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan							3.723.800		
	c. Bagian Layanan Pengadaan							38.272.546	234.000	
	d. Bagian Hukum									
	e. Bagian Protokol							840.000		
	f. Bagian Umum							214.600		
	g. Bagian P3ADK							75.000		
	h. Bagian Organisasi							425.000		
22	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian							3.706.500		
	Jumlah Dipindahkan	2.086.230.906	2.009.595	202.082.500	556.209.238	2.010.109.445	-	686.438.162	175.225.090	1.937.519.385

NO.	SKPD	Bahan Material	Bahan Makanan	Tanaman Hias dan buah	Peralatan Kerja dan Bahan Percontohan	Reagen dan Alat Laboratorium	Rambu dan APIL	Bahan Komputer	BBM dan Pelumas	Alat Kesehatan dan /Bahan Kimia/Medis
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19
23	Inspektorat							1.260.000		
24	Badan Kepegawaian Pendididkan dan Pelatihan							12.237.000		
25	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang							22.733.156		
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah							772.200		
27	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan				190.000				234.000	
28	Satuan Polisi Pamong Praja							1.900.000		
29	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	500.000						101.250		
30	Dinas Kebudayaan							1.390.000		
31	Kecamatan Tegalarjo							1.425.000		
32	Kecamatan Jetis				30.000			4.439.000		
33	Kecamatan Gondokusuman							8.970.000		
34	Kecamatan Danurejan							2.220.000		
35	Kecamatan Gedongtengen	227.500						3.020.000		
36	Kecamatan Pakualaman							215.000		
37	Kecamatan Ngampilan			50.000				2.625.000		
38	Kecamatan Wirobrajan							210.000		
39	Kecamatan Mantriweron									
40	Kecamatan Kraton							80.000		
41	Kecamatan Gondomanan							932.500		
42	Kecamatan Mergangsan							983.800		
43	Kecamatan Umbulharjo							1.361.600		
44	Kecamatan Kotagede							1.100.000		
	<b>Jumlah jalan</b>	<b>727.500</b>		<b>50.000</b>	<b>220.000</b>			<b>67.975.506</b>	<b>234.000</b>	
	<b>JUMLAH (A)</b>	<b>2.086.958.406</b>	<b>2.009.595</b>	<b>202.132.500</b>	<b>556.429.238</b>	<b>2.010.109.445</b>	<b>-</b>	<b>754.413.668</b>	<b>175.459.090</b>	<b>1.937.519.385</b>

REKAPITULASI LAPORAN SALDO BARANG

NO.	SKPD	Vaksin	Perlengkapan Rumah Tangga	Barang Hibah	Bibit Ikan	Alat Kontrasepsi	Bendera	Peralatan Uji	Linen	Lain-lain	JUMLAH
1	2	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	Dinas Pendidikan		141.230.790	11.398.000	1.495.000				615.000	123.042.361	3.954.431.089
2	Dinas Pariwisata		2.631.250							30.551.746	613.611.482
3	Dinas Kesehatan	638.096.355	1.417.610.923	58.541.721		40.651.890			84.682.880	3.579.500	15.511.700.444
4	Rumah Sakit Umum Daerah		677.383						64.968.172		7.994.656.555
5	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawawan Permukiman Kota		20.460.000							642.000	3.288.263.758
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah										17.211.750
7	Dinas Kebakaran		4.564.000							2.715.000	94.731.915
8	Dinas Perhubungan		1.730.000					371.550.297		2.973.000	989.377.103
9	Bappeda									1.644.000	57.201.145
10	Dinas Lingkungan Hidup		1.084.000							150.000	346.075.090
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		760.000							1.725.000	661.922.087
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak										7.331.200
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		5.148.800			39.661.505				2.190.000	348.664.692
14	Dinas Sosial										9.917.637
15	Dinas Pertanian dan Pangan		500.000		11.132.010				8.300	30.000	212.949.780
16	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		573.095.080							2.013.000	985.051.520
17	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi									159.000	253.000
18	Dinas Pemuda dan Olah Raga		587.000								5.901.349
19	Kantor Kesatuan Bangsa									30.000	43.122.600
20	Sekretariat DPRD		3.903.750							1.350.000	204.699.572
21	Sekretariat Daerah		4.844.300							2.043.000	108.695.885
	a. Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat									1.383.000	8.494.500
	b. Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan		2.759.000							375.000	21.542.100
	c. Bagian Layanan Pengadaan		221.800								60.768.052
	d. Bagian Hukum										76.300
	e. Bagian Protokol		1.571.000								9.442.999
	f. Bagian Umum		292.500								4.354.179
	g. Bagian P3ADK									231.000	2.253.005
	h. Bagian Organisasi									54.000	1.764.750
22	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian										10.085.300
	Jumlah Dipindahkan	638.096.355	2.178.827.276	69.939.721	12.627.010	80.313.395	-	371.550.297	150.274.352	174.837.607	35.465.854.953

NO.	SKPD	Vaksin	Perlengkapan Rumah Tangga	Barang Hibah	Bibit Ikan	Alat Kontrasepsi	Bendera	Peralatan Uji	Linen	Lain-lain	JUMLAH
1	2	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
23	Inspektorat		1.169.061							228.000	44.636.728
24	Badan Kepegawaian Pendididkan dan Pelatihan		784.000	3.775.000						780.000	103.555.690
25	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang									1.785.000	159.303.662
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		3.379.900							5.322.500	457.290.115
27	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan										182.046.700
28	Satuan Polisi Pamong Praja		1.500.000								56.081.600
29	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan									210.000	13.484.850
30	Dinas Kebudayaan									262.500	24.657.174
31	Kecamatan Tegalrejo		519.180							396.000	9.316.175
32	Kecamatan Jetis		1.404.000							3.258.000	39.153.540
33	Kecamatan Gondokusuman										29.998.302
34	Kecamatan Danurejan		460.900							219.000	18.088.350
35	Kecamatan Gedongtengen		591.500							675.000	16.157.938
36	Kecamatan Pakualaman		101.000								2.616.125
37	Kecamatan Ngampilan		1.644.759							615.000	24.840.869
38	Kecamatan Wirobrajan									615.000	5.107.450
39	Kecamatan Mantriweron									30.000	4.142.250
40	Kecamatan Kraton									228.000	9.112.800
41	Kecamatan Gondomanan										11.771.285
42	Kecamatan Mergangsan		162.500								6.080.500
43	Kecamatan Umbulharjo									255.000	19.496.651
44	Kecamatan Kotagede		2.678.000							723.000	20.862.950
	<b>Jumlah jalan</b>		<b>14.394.800</b>	<b>3.775.000</b>						<b>15.602.000</b>	<b>1.257.801.704</b>
	<b>JUMLAH (A)</b>	<b>638.096.355</b>	<b>2.193.222.075</b>	<b>73.714.721</b>	<b>12.627.010</b>	<b>80.313.395</b>	<b>-</b>	<b>371.550.297</b>	<b>150.274.352</b>	<b>190.439.607</b>	<b>36.723.656.656</b>

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**PERHITUNGAN NET REALIZABLE VALUE (NRV) DANA BERGULIR**  
**Per 31 Desember 2019**

No.	Uraian	Plafond Kredit	Saldo Awal 2018	Pengurangan dr Plafon Kredit (Pokok)	Saldo Akhir (Pokok)	Kualitas Piutang			
						Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
1	Bantuan Modal Pinjaman Lunak kepada								
	Pokja 2003-Tahap I	190.000.000,00	-	190.000.000,00	-				
	Pokja 2003-Tahap II	413.000.000,00	16.023.817,00	396.976.183,00	16.023.817,00				
	Pokja 2003-Tahap III	370.000.000,00	10.687.614,00	359.312.386,00	10.687.614,00				
	Jumlah Pokja 2003	<b>973.000.000,00</b>	<b>26.711.431,00</b>	<b>946.288.569,00</b>	<b>26.711.431,00</b>				26.711.431,00
	Pokja 2006-Kelompok I	385.000.000,00	7.000.000,00	378.000.000,00	7.000.000,00				
	Pokja 2006-Kelompok II	525.000.000,00	-	525.000.000,00	-				
	Jumlah Pokja 2006	<b>910.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>903.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>				7.000.000,00
	Pokja 2007	299.000.000,00	6.318.047,00	293.214.685,00	5.785.315,00				
	Pokja 2008	500.000.000,00	196.403.967,00	303.596.033,00	196.403.967,00				
	Pengurangan Tahun 2010		(170.686.133,00)	170.686.133,00	(170.686.133,00)				
	Pengurangan Tahun 2011		(13.086.132,00)	13.086.132,00	(13.086.132,00)				
	Pengurangan Tahun 2013		(265.000,00)	265.000,00	(265.000,00)				
	Pengurangan Tahun 2016		(3.230.894,00)	3.230.894,00	(3.230.894,00)				
	<b>Jumlah</b>	<b>2.682.000.000,00</b>	<b>48.632.554,00</b>	<b>2.633.367.446,00</b>	<b>48.632.554,00</b>				14.921.123,00
2	Dana Bergulir kepada Kelompok UMK								
	Tahun 2006	1.048.000.000,00	330.125.700,00	726.054.600,00	321.945.400,00				
	Tahun 2007	912.000.000,00	185.163.788,00	726.836.212,00	185.163.788,00				
	<b>Jumlah</b>	<b>1.960.000.000,00</b>	<b>515.289.488,00</b>	<b>1.452.890.812,00</b>	<b>507.109.188,00</b>				507.109.188,00
3	Pinjaman Pengadaan Tenda bagi Pedagang Kaki Lima Kota Yogyakarta Tahun 2006	<b>1.250.000.000,00</b>	<b>166.225.882,00</b>	<b>1.095.252.050,00</b>	<b>154.747.950,00</b>				154.747.950,00
	<b>TOTAL</b>	<b>5.892.000.000,00</b>	<b>730.147.924,00</b>	<b>5.181.510.308,00</b>	<b>710.489.692,00</b>	-	-	-	710.489.692,00
	Persentase penyisihan					0,50%	10%	50%	100%
	Penyisihan investasi non permanen					-	-	-	710.489.692,00
	<b>Jumlah investasi non permanen</b>					-	-	-	-

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**MUTASI PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH**  
**Per 31 Desember 2019**

No.	Uraian	Saldo 31 Des 2018		Penambahan Investasi Permanen Tahun 2019	Pengurangan Investasi Permanen Tahun 2019 (Rp)	Saldo 31 Des 2019		Keterangan
		Nilai (Rp)	% Kepemilikan			Nilai (Rp)	% Kepemilikan	
1	Bank BPD DIY	151.870.000.000,00	11,70%	37.275.000.000,00	-	189.145.000.000,00	11,70%	Metode Biaya
2	PD BPR Bank Jogja	158.156.966.905,09	100,00%	26.866.424.399,00	9.754.106.355,00	175.269.284.949,09	100%	Penambahan Investasi merupakan realisasi penyertaan modal + laba tahun berjalan. Pengurangan merupakan bagian laba tahun 2018 yang disetor tahun 2019.
3	PDAM Tirtamarta	56.414.676.260,68	100,00%	1.986.049.139,62	802.301.741,50	57.598.423.658,80	100%	Penambahan Investasi merupakan realisasi penyertaan modal + laba tahun berjalan. Pengurangan merupakan bagian laba tahun 2018 yang disetor tahun 2019.
4	BUKP se Kota Yogyakarta	411.000.000,00	0,00%	-	-	411.000.000,00		Metode Biaya
5	PT. Radio Swara Adhiloka	297.006.667,76	99,28%	-	26.525.355,28	270.481.312,48	99,28%	Pengurangan merupakan kerugian tahun berjalan yang menjadi bagian Pemkot Yk
6	PD. Jogjatama Vishesha	111.179.416.677,84	100,00%	-	1.224.758.379,97	109.954.658.297,87	100%	Pengurangan merupakan bagian laba tahun 2018 yang disetor tahun 2019 + rugi tahun berjalan.
	<b>Jumlah</b>	<b>478.329.066.511,37</b>		<b>66.127.473.538,62</b>	<b>11.807.691.831,75</b>	<b>532.648.848.218,24</b>		

**PERHITUNGAN PENYERTAAN MODAL  
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
Per 31 Desember 2019**

1	BPR Bank Jogja (Unaudited)	Modal Disetor				104.540.000.000,00	100%	104.540.000.000,00
		Cadangan Umum				17.180.844.345,00	100%	17.180.844.345,00
		Cadangan Tujuan				16.293.285.448,00	100%	16.293.285.448,00
		Penyertaan Modal Pemkot 2019			4.540.000.000,00			
		Laba Tahun Berjalan			22.326.424.399,00			
		Pembagian laba tahun berjalan:						
		- Bagian laba untuk Pemkot	55,0%	12.279.533.419,45				
		- Cadangan Umum	10,0%	2.232.642.439,90				
		- Cadangan Tujuan	10,0%	2.232.642.439,90				
		- Dana Kesejahteraan	10,0%	2.232.642.439,90				
		- Jasa Produksi	8,0%	1.786.113.951,92				
		- Tantiem	4,0%	893.056.975,96				
		- CSR	3,0%	669.792.731,97				
		Perhitungan ekuitas Pemkot atas Laba Tahun Berjalan						
		- Bagian laba untuk Pemkot				12.279.533.419,45		
		- Cadangan Umum				2.232.642.439,90		
		- Cadangan Tujuan				2.232.642.439,90		16.744.818.299,25
<b>JUMLAH PD. BPR BANK JOGJA</b>						<b>154.758.948.092,25</b>		
2	PDAM (Unaudited)	Kekayaan Pemda yg dipisahkan				43.397.922.980,18	100%	43.397.922.980,18
		Penyertaan Pemerintah Pusat				2.239.205.369,10	100%	
		Selisih penilaian kembali aset tetap				(1.222.638.292,92)	100%	(1.222.638.292,92)
		Cadangan Umum				7.535.212.438,40	100%	7.535.212.438,40
		Penyertaan Modal Pemkot 2019				-		
		Laba Tahun Berjalan			1.986.049.139,62			
		Pembagian Laba						
		- Bagian Laba untuk Pemkot	50%	993.024.569,81				
		- Cadangan Umum	10%	198.604.913,96				
		- Sosial dan Pendidikan	5%	99.302.456,98				
		- Tantiem	5%	99.302.456,98				
		- Jasa Produksi	10%	198.604.913,96				
		- Dana Kesejahteraan	10%	198.604.913,96				
		- Dana pensiun dan sokongan	10%	198.604.913,96				
		Perhitungan ekuitas Pemkot atas Laba Tahun Berjalan						
		- Bagian Laba untuk Pemkot				993.024.569,81		
		- Cadangan Umum				198.604.913,96		1.191.629.483,77

		<b>JUMLAH PDAM</b>					<b>50.902.126.609,43</b>
3	PT. Radio Swara Adhiloka				695.000.000,00	99,28%	690.000.000,00
	(Unaudited)	Rugi			(432.599.594,00)	99,28%	(429.487.366,71)
		<b>JUMLAH PT RADIO SWARA ADHILOKA</b>					<b>260.512.633,29</b>
4	PD. Jogjatama Vishe	Modal Disetor			117.667.020.000,00	100%	117.667.020.000,00
	(Unaudited)	Cadangan Umum			-	100%	-
		Rugi Tahun berjalan			(1.204.244.311,97)	100%	(1.204.244.311,97)
		Laba Tahun Berjalan			-		
		Pembagian laba tahun berjalan:					
		- Bagian laba untuk Pemkot	55%	-			
		- Cadangan Umum	10%	-			
		- Cadangan Tujuan	15%	-			
		- Dana Kesejahteraan	10%	-			
		- Jasa Produksi	10%	-			
		Perhitungan ekuitas Pemkot atas Laba Tahun Berjalan					
		- Bagian laba untuk Pemkot			-		
		- Cadangan Umum			-		
		- Cadangan Tujuan			-		-
		<b>JUMLAH PD JOGJATAMA VISHESHA</b>					<b>116.462.775.688,03</b>
5	Bank BPD DIY				189.145.000.000,00		<b>189.145.000.000,00</b>
6	BUKP				411.000.000,00		<b>411.000.000,00</b>
		<b>TOTAL</b>					<b>511.940.363.023,01</b>



## MUTASI ASET TETAP TAHUN 2019

Halaman 1

NAMA SKPD	SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH		
		PENAMBAHAN	KOREKSI/REKLASIFIKASI/ MUTASI	TOTAL PENAMBAHAN
1	2	3	4	5=3+4
TANAH	1.863.714.903.480,22	25.304.543.389,00	43.886.895.193,29	69.191.438.582,29
PERALATAN DAN MESIN	684.173.397.572,63	92.639.742.354,63	6.597.900.920,59	99.237.643.275,22
BANGUNAN DAN GEDUNG	1.102.383.071.728,20	62.218.676.614,26	10.947.089.491,62	73.165.766.105,88
JALAN JEMBATAN DAN JARINGAN	1.997.802.762.171,24	100.807.382.169,73	12.195.752.956,36	113.003.135.126,09
ASET TETAP LAINNYA	37.345.880.968,52	4.354.972.418,47	89.783.668,08	4.444.756.086,55
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	10.589.253.243,63	13.512.593.962,12	-	13.512.593.962,12
<b>JUMLAH</b>	<b>5.696.009.269.164,43</b>	<b>298.837.910.908,21</b>	<b>73.717.422.229,94</b>	<b>372.555.333.138,15</b>

## MUTASI ASET TETAP TAHUN 2019

NAMA SKPD	MUTASI KURANG			SALDO AKHIR AUDITED	EKSTRAKOMP	ASET TETAP AUDITED	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
	PENGURANGAN	KOREKSI/ REKLASIFIKASI/ MUTASI	TOTAL PENGURANGAN					
1	6	7	8=6+7	9=2+5-8	10	11=9-10		
TANAH	5.244.013.386,00	43.023.881.807,29	48.267.895.193,29	1.884.638.446.869,22	-	1.884.638.446.869,22		1.884.638.446.869,22
PERALATAN DAN MESIN	2.246.307.672,06	10.675.169.553,20	12.921.477.225,26	770.489.563.622,59	16.324.857.773,25	754.164.705.849,33	(527.878.866.976,26)	226.285.838.873,07
BANGUNAN DAN GEDUNG	6.615.048.590,32	17.132.872.989,56	23.747.921.579,88	1.151.800.916.254,19	75.019.928.362,68	1.076.780.987.891,51	(305.023.786.791,44)	771.757.201.100,07
JALAN JEMBATAN DAN JARINGAN	1.964.140.037,87	407.505.476,63	2.371.645.514,50	2.108.434.251.782,83	-	2.108.434.251.782,83	(1.736.551.860.052,20)	371.882.391.730,63
ASET TETAP LAINNYA	494.649.000,00	147.733.400,10	642.382.400,10	41.148.254.654,97	-	41.148.254.654,97		41.148.254.654,97
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	1.104.642.420,77	1.104.642.420,77	22.997.204.784,98	-	22.997.204.784,98		22.997.204.784,98
<b>JUMLAH</b>	<b>16.564.158.686,25</b>	<b>72.491.805.647,55</b>	<b>89.055.964.333,80</b>	<b>5.979.508.637.968,78</b>	<b>91.344.786.135,93</b>	<b>5.888.163.851.832,84</b>	<b>(2.569.454.513.819,91)</b>	<b>3.318.709.338.013,44</b>

## MUTASI ASET TANAH PER SKPD TAHUN 2019

NO	NAMA SKPD	SALDO AWAL	PENAMBAHAN				PENGURANGAN			
			PENAMBAHAN BARU	PENAMBAHAN NILAI	MUTASI MASUK	REKLASIFIKASI	PENGHAPUSAN	PENGURANGAN NILAI	MUTASI KELUAR	REKLASIFIKASI
1	DINAS PENDIDIKAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	DINAS KESEHATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	DINAS KEBAKARAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	DINAS SOSIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	1.319.465.692.672,29	25.304.543.389,00	5.244.013.386,00	-	-	5.244.013.386,00	-	38.642.881.807,29	-
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	KECAMATAN TEGALREJO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	KECAMATAN JETIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	KECAMATAN GONDOKUSUMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	KECAMATAN DANUREJAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	KECAMATAN GEDONGTENGEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	KECAMATAN PAKUALAMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	KECAMATAN NGAMPILAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	KECAMATAN WIROBRAJAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	KECAMATAN MANTRIJERON	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	KECAMATAN KRATON	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	KECAMATAN GONDOMANAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	KECAMATAN MERGANGSAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	KECAMATAN UMBULHARJO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	KECAMATAN KOTAGEDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN PERSANDIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	DINAS KEBUDAYAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	KANTOR KESATUAN BANGSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	DINAS PARIWISATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	INSPEKTORAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG	544.249.210.807,93	-	-	38.642.881.807,29	-	-	-	-	-
45	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.863.714.903.480,22</b>	<b>25.304.543.389,00</b>	<b>5.244.013.386,00</b>	<b>38.642.881.807,29</b>	<b>-</b>	<b>5.244.013.386,00</b>	<b>-</b>	<b>38.642.881.807,29</b>	<b>-</b>

106.843.925.782,21

## MUTASI ASET TANAH PER SKPD TAHUN 2019

NO	NAMA SKPD	KOREKSI			SALDO AKHIR AUDITED	EKSTRAKOMP	ASET TETAP AUDITED
		SALDO AKHIR	KURANG CATAT	LEBIH CATAT			
1	DINAS PENDIDIKAN	-	-	-	-	-	-
2	DINAS KESEHATAN	-	-	-	-	-	-
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	-	-	-	-	-	-
4	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMU	-	-	-	-	-	-
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-	-	-	-	-
6	DINAS KEBAKARAN	-	-	-	-	-	-
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	-	-	-	-
8	DINAS SOSIAL	-	-	-	-	-	-
9	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLIN	-	-	-	-	-	-
10	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	1.306.127.354.254,00	-	-	1.306.127.354.254,00	-	1.306.127.354.254,00
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	-	-	-
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	-	-	-	-
13	KECAMATAN TEGALREJO	-	-	-	-	-	-
14	KECAMATAN JETIS	-	-	-	-	-	-
15	KECAMATAN GONDOKUSUMAN	-	-	-	-	-	-
16	KECAMATAN DANUREJAN	-	-	-	-	-	-
17	KECAMATAN GEDONGTENGEN	-	-	-	-	-	-
18	KECAMATAN PAKUALAMAN	-	-	-	-	-	-
19	KECAMATAN NGAMPILAN	-	-	-	-	-	-
20	KECAMATAN WIROBRAJAN	-	-	-	-	-	-
21	KECAMATAN MANTRIJERON	-	-	-	-	-	-
22	KECAMATAN KRATON	-	-	-	-	-	-
23	KECAMATAN GONDOMANAN	-	-	-	-	-	-
24	KECAMATAN MERGANGSAN	-	-	-	-	-	-
25	KECAMATAN UMBULHARJO	-	-	-	-	-	-
26	KECAMATAN KOTAGEDE	-	-	-	-	-	-
27	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	-	-	-	-	-
28	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-	-	-	-
29	DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN PERSANDIAN	-	-	-	-	-	-
30	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA	-	-	-	-	-	-
31	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN	-	-	-	-	-	-
32	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	-	-	-	-	-
33	DINAS KEBUDAYAAN	-	-	-	-	-	-
34	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	-	-	-	-	-	-
35	KANTOR KESATUAN BANGSA	-	-	-	-	-	-
36	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	-	-	-	-	-	-
37	DINAS PARIWISATA	-	-	-	-	-	-
38	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	-	-	-	-	-
39	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	-	-	-	-
40	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	-	-	-	-
41	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-	-	-	-
42	INSPEKTORAT	-	-	-	-	-	-
43	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	-	-	-	-	-	-
44	PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG	582.892.092.615,22	-	4.381.000.000,00	578.511.092.615,22	-	578.511.092.615,22
45	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.889.019.446.869,22</b>	<b>-</b>	<b>4.381.000.000,00</b>	<b>1.884.638.446.869,22</b>	<b>-</b>	<b>1.884.638.446.869,22</b>

## MUTASI ASET PERALATAN DAN MESIN PER SKPD TAHUN 2019

NO	NAMA SKPD	SALDO AWAL	PENAMBAHAN				PENGURANGAN			
			PENAMBAHAN BARU	PENAMBAHAN NILAI	MUTASI MASUK	REKLASIFIKASI	PENGHAPUSAN	PENGURANGAN NILAI	MUTASI KELUAR	REKLASIFIKASI
1	DINAS PENDIDIKAN	106.158.602.762,66	10.177.052.590,20	-	-	-	-	-	13.810.369,21	-
2	DINAS KESEHATAN	89.545.915.309,38	9.797.543.171,02	-	-	-	-	-	-	-
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	174.927.805.949,85	20.727.516.441,00	-	10.322.203,67	-	-	-	-	-
4	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKAAN	15.879.170.951,21	3.507.693.351,05	-	-	-	-	-	83.167.156,40	-
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	6.970.390.953,72	686.765.000,00	28.850.000,00	-	-	-	-	-	-
6	DINAS KEBAKARAN	17.844.589.231,84	2.396.803.410,14	-	-	-	-	-	-	-
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	6.448.391.729,19	2.198.780.425,14	-	-	-	-	-	-	-
8	DINAS SOSIAL	5.152.899.389,02	417.117.240,05	-	8.483.322,19	-	-	-	-	-
9	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLIN	1.754.085.998,26	1.111.680.223,34	-	104.711.104,30	-	-	-	-	-
10	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	2.508.497.675,76	372.001.675,14	-	-	-	-	-	85.000.000,00	-
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	38.653.048.418,73	5.052.033.384,73	-	14.952.214,58	-	-	-	-	-
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7.964.044.269,48	1.384.726.516,00	-	-	-	-	-	144.500.000,00	-
13	KECAMATAN TEGALREJO	1.863.905.202,16	615.227.929,00	-	-	-	-	-	11.420.692,63	-
14	KECAMATAN JETIS	1.513.836.674,38	338.510.609,00	-	-	-	-	-	9.710.000,00	-
15	KECAMATAN GONDOKUSUMAN	1.719.072.178,98	332.120.629,00	-	-	-	-	-	-	-
16	KECAMATAN DANUREJAN	1.528.292.354,15	267.446.384,00	-	-	-	-	-	-	-
17	KECAMATAN GEDONGTENGEN	2.092.795.083,76	227.524.920,00	-	-	-	-	-	11.460.000,00	-
18	KECAMATAN PAKUALAMAN	1.260.578.486,21	615.383.800,00	-	-	-	-	-	-	-
19	KECAMATAN NGAMPILAN	1.078.963.036,22	165.541.362,00	-	-	-	-	-	-	-
20	KECAMATAN WIROBRAJAN	1.215.974.142,43	313.864.925,00	-	-	-	-	-	-	-
21	KECAMATAN MANTRIJERON	1.275.751.317,47	293.736.779,00	-	-	-	-	-	-	-
22	KECAMATAN KRATON	1.366.105.160,78	118.878.000,00	-	-	-	-	-	-	-
23	KECAMATAN GONDOMANAN	1.252.395.350,51	169.876.849,00	-	-	-	-	-	11.420.692,63	-
24	KECAMATAN MERGANGSAN	1.508.326.116,87	262.487.054,00	-	-	-	-	-	-	-
25	KECAMATAN UMBULHARJO	2.955.313.246,65	418.642.846,30	-	-	-	-	-	9.700.000,00	-
26	KECAMATAN KOTAGEDE	1.443.445.508,14	314.744.279,00	-	-	-	-	-	-	-
27	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3.217.435.297,55	766.233.350,00	-	-	-	-	-	-	-
28	DINAS PERHUBUNGAN	11.335.312.000,95	2.096.636.172,00	-	-	-	60.250.000,00	-	-	-
29	DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN PERSANDIAN	36.956.115.790,00	6.988.982.993,94	-	37.946.727,28	-	-	-	-	-
30	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA	2.194.051.501,11	754.950.000,00	-	-	-	-	-	244.769.371,16	-
31	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN	4.873.404.330,15	294.279.680,00	-	-	-	9.700.000,00	-	-	-
32	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.512.806.709,16	138.366.700,56	-	31.736.757,44	-	-	-	-	-
33	DINAS KEBUDAYAAN	1.643.682.176,79	338.335.378,15	-	-	-	17.750.000,00	-	-	-
34	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	6.315.344.898,83	1.461.179.511,30	-	-	-	38.168.419,51	-	5.226.000,00	-
35	KANTOR KESATUAN BANGSA	699.737.843,22	-	-	-	-	-	-	-	-
36	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	6.928.045.824,84	992.243.813,05	215.660.000,00	-	-	-	-	-	-
37	DINAS PARIWISATA	27.611.783.671,50	2.117.464.196,30	222.671.900,00	-	-	-	-	-	-
38	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	28.529.411.668,20	3.701.880.919,25	5.315.000,00	127.300.000,00	-	-	-	54.000.000,00	-
39	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.278.629.377,61	858.808.400,00	-	-	-	-	-	95.814.378,12	-
40	SEKRETARIAT DAERAH	19.957.025.150,34	6.150.194.113,97	-	534.929.226,56	-	554.968.852,55	-	231.161.152,00	-
41	SEKRETARIAT DPRD	13.384.589.058,38	451.764.200,00	-	-	-	-	-	1.093.715.226,56	-
42	INSPEKTORAT	2.360.627.090,26	324.870.795,30	-	83.167.156,40	-	-	-	-	-
43	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	2.035.422.491,81	672.249.562,00	-	-	-	-	-	-	-
44	PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG	8.237.812.612,29	963.662.500,00	-	1.777.883.765,28	-	1.553.478.400,00	-	165.246.727,28	-
45	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	8.219.963.581,80	811.443.375,70	-	3.529.154,51	-	11.992.000,00	-	464.839.866,22	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>684.173.397.572,63</b>	<b>92.167.245.454,63</b>	<b>472.496.900,00</b>	<b>2.734.961.632,21</b>	<b>-</b>	<b>2.246.307.672,06</b>	<b>-</b>	<b>2.734.961.632,21</b>	<b>-</b>

## MUTASI ASET PERALATAN DAN MESIN PER SKPD TAHUN 2019

NO	NAMA SKPD	KOREKSI			SALDO AKHIR AUDITED	EKSTRAKOMP	ASET TETAP AUDITED
		SALDO AKHIR	KURANG CATAT	LEBIH CATAT			
1	DINAS PENDIDIKAN	116.321.844.983,65	400.000,00	77.688.608,16	116.244.556.375,49	11.204.145.476,22	105.040.410.899,27
2	DINAS KESEHATAN	99.343.458.480,40	-	208.594.376,90	99.134.864.103,50	1.226.406.799,20	97.908.457.304,30
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	195.665.644.594,52	-	141.189.813,10	195.524.454.781,42	327.374.289,41	195.197.080.492,01
4	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKAAN	19.303.697.145,86	-	425.063.499,95	18.878.633.645,91	79.719.825,04	18.798.913.820,87
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	7.686.005.953,72	-	88.657.527,31	7.597.348.426,41	59.578.133,71	7.537.770.292,70
6	DINAS KEBAKARAN	20.241.392.641,98	-	849.615.229,07	19.391.777.412,91	27.923.879,09	19.363.853.533,82
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	8.647.172.154,33	-	45.274.729,62	8.601.897.424,71	38.229.052,79	8.563.668.371,92
8	DINAS SOSIAL	5.578.499.951,26	-	77.761.127,22	5.500.738.824,04	109.529.615,05	5.391.209.208,99
9	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLIN	2.970.477.325,90	-	34.598.547,27	2.935.878.778,63	68.663.103,70	2.867.215.674,93
10	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	2.795.499.350,90	-	195.858.069,04	2.599.641.281,86	43.793.481,93	2.555.847.799,93
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	43.720.034.018,04	-	141.316.041,56	43.578.717.976,48	231.448.763,96	43.347.269.212,53
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9.204.270.785,48	-	-	9.204.270.785,48	51.542.911,48	9.152.727.874,00
13	KECAMATAN TEGALREJO	2.467.712.438,53	25.709.012,60	61.714.697,06	2.431.706.754,07	98.376.015,06	2.333.330.739,01
14	KECAMATAN JETIS	1.842.637.283,38	7.307.548,50	38.134.689,53	1.811.810.142,35	65.237.965,97	1.746.572.176,38
15	KECAMATAN GONDOKUSUMAN	2.051.192.807,98	54.164.971,14	36.555.000,00	2.068.802.779,12	118.678.656,74	1.950.124.122,38
16	KECAMATAN DANUREJAN	1.795.738.738,15	25.013.614,20	34.882.022,81	1.785.870.329,54	101.578.446,97	1.684.291.882,57
17	KECAMATAN GEDONGTENGEN	2.308.860.003,76	20.555.167,86	792.906.955,93	1.536.508.215,69	73.594.058,61	1.462.914.157,08
18	KECAMATAN PAKUALAMAN	1.875.962.286,21	8.674.726,40	67.221.337,97	1.817.415.674,64	61.361.034,00	1.756.054.640,64
19	KECAMATAN NGAMPILAN	1.244.504.398,22	13.886.744,10	29.045.562,00	1.229.345.580,32	63.610.962,39	1.165.734.617,93
20	KECAMATAN WIROBRAJAN	1.529.839.067,43	21.363.352,50	49.763.022,09	1.501.439.397,84	70.392.103,77	1.431.047.294,07
21	KECAMATAN MANTRIJEON	1.569.488.096,47	27.610.376,50	31.095.762,15	1.566.002.710,82	72.692.622,61	1.493.310.088,21
22	KECAMATAN KRATON	1.484.983.160,78	24.486.864,50	50.403.844,09	1.459.066.181,19	74.289.846,02	1.384.776.335,17
23	KECAMATAN GANDOMANAN	1.410.851.506,88	65.152.061,92	29.116.559,07	1.446.887.009,73	65.264.505,79	1.381.622.503,94
24	KECAMATAN MERGANGSAN	1.770.813.170,87	26.048.620,50	79.123.166,81	1.717.738.624,56	127.427.154,09	1.590.311.470,47
25	KECAMATAN UMBULHARJO	3.364.256.092,95	51.009.215,58	21.261.991,07	3.394.003.317,46	183.181.042,31	3.210.822.275,15
26	KECAMATAN KOTAGEDE	1.758.189.787,14	26.048.620,50	42.249.363,90	1.741.989.043,74	65.285.160,41	1.676.703.883,33
27	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3.983.668.647,55	-	103.579.684,66	3.880.088.962,89	13.873.300,43	3.866.215.662,46
28	DINAS PERHUBUNGAN	13.371.698.172,95	3.396.258.391,58	-	16.767.956.564,53	117.354.090,27	16.650.602.474,26
29	DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN PERSANDIAN	43.983.045.511,22	-	624.612.850,13	43.358.432.661,09	134.774.277,59	43.223.658.383,50
30	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA	2.704.232.129,95	-	12.724.131,44	2.691.507.998,51	58.993.556,42	2.632.514.442,09
31	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN	5.157.984.010,15	-	167.287.217,81	4.990.696.792,34	24.777.116,34	4.965.919.676,00
32	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.682.910.167,16	-	-	1.682.910.167,16	20.977.888,23	1.661.932.278,93
33	DINAS KEBUDAYAAN	1.964.267.554,94	-	259.169.425,72	1.705.098.129,22	26.330.805,89	1.678.767.323,33
34	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	7.733.129.990,62	-	126.240.151,08	7.606.889.839,54	81.205.355,36	7.525.684.484,18
35	KANTOR KESATUAN BANGSA	699.737.843,22	-	8.858.266,47	690.879.576,75	18.391.653,15	672.487.923,60
36	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	8.135.949.637,89	-	504.228.070,91	7.631.721.566,98	189.148.055,81	7.442.573.511,17
37	DINAS PARIWISATA	29.951.919.767,80	-	210.915.086,21	29.741.004.681,59	73.697.994,27	29.667.306.687,32
38	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	32.309.907.587,45	6.250.000,00	585.731.195,67	31.730.426.391,78	183.627.183,26	31.546.799.208,52
39	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3.041.623.399,49	-	30.042.939,08	3.011.580.460,41	36.039.751,65	2.975.540.708,76
40	SEKRETARIAT DAERAH	25.856.018.486,32	-	592.552.811,76	25.263.465.674,56	313.523.433,59	24.949.942.240,97
41	SEKRETARIAT DPRD	12.742.638.031,82	-	720.077.261,35	12.022.560.770,47	82.675.065,92	11.939.885.704,55
42	INSPEKTORAT	2.768.665.041,96	-	82.117.422,42	2.686.547.619,54	33.708.430,44	2.652.839.189,10
43	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	2.707.672.053,81	-	13.566.274,14	2.694.105.779,67	26.219.317,20	2.667.886.462,47
44	PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG	9.260.633.750,29	63.000.000,00	148.281.182,48	9.175.352.567,81	97.471.998,98	9.077.880.568,83
45	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	8.558.104.245,79	-	101.132.405,98	8.456.971.839,81	82.743.592,14	8.374.228.247,67
	<b>JUMLAH</b>	<b>774.566.832.255,20</b>	<b>3.862.939.288,38</b>	<b>7.940.207.920,99</b>	<b>770.489.563.622,59</b>	<b>16.324.857.773,25</b>	<b>754.164.705.849,33</b>

## MUTASI ASET BANGUNAN DAN GEDUNG PER SKPD TAHUN 2019

NO	NAMA SKPD	SALDO AWAL	PENAMBAHAN				PENGURANGAN			
			PENAMBAHAN BARU	PENAMBAHAN NILAI	MUTASI MASUK	REKLASIFIKASI	PENGHAPUSAN	PENGURANGAN NILAI	MUTASI KELUAR	REKLASIFIKASI
1	DINAS PENDIDIKAN	277.557.173.078,93	343.385.280,94	507.743.555,00	-	-	1.638.623.346,60	986.403.572,66	448.951.000,00	-
2	DINAS KESEHATAN	107.623.413.306,08		-	-	-	-	-	-	-
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	24.074.415.529,37		-	-	-	-	-	-	-
4	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKAAN	235.552.878.220,77	43.566.556.836,51	730.193.777,75	-	-	661.498.974,38	-	7.025.066.050,48	-
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.838.928.353,04	177.650.000,00	254.960.000,00	-	-	-	-	-	-
6	DINAS KEBAKARAN	2.938.156.452,94		-	-	-	-	-	-	-
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	358.940.000,00		88.331.596,00	448.951.000,00	-	-	-	-	-
8	DINAS SOSIAL	4.697.998.804,89	460.533.175,00	-	-	-	371.931.000,00	-	-	-
9	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLIN	842.870.488,52		217.041.000,00	211.720.414,92	-	-	723.019.288,42	-	-
10	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	2.285.814.365,64		432.537.000,00	-	-	-	-	-	-
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	28.097.567.416,29	2.810.489.220,49	738.359.091,28	-	-	793.446.071,66	-	-	-
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.768.627.206,50		63.909.500,00	-	-	-	-	-	-
13	KECAMATAN TEGALREJO	4.775.927.795,60		83.782.000,00	-	-	-	-	-	-
14	KECAMATAN JETIS	3.102.767.503,28	24.567.000,00	69.815.154,00	-	-	-	-	-	-
15	KECAMATAN GONDOKUSUMAN	8.274.127.843,74		-	-	-	260.000.000,00	-	-	-
16	KECAMATAN DANUREJAN	5.195.882.294,09		34.252.000,00	-	-	107.345.927,91	-	-	-
17	KECAMATAN GEDONGTENGEN	2.609.741.712,45		-	-	-	-	-	-	-
18	KECAMATAN PAKUALAMAN	1.606.584.102,71		99.303.000,00	-	-	-	-	-	-
19	KECAMATAN NGAMPILAN	3.357.973.096,89	78.380.000,00	207.370.000,00	-	-	-	-	-	-
20	KECAMATAN WIROBRAJAN	3.336.593.879,31	128.082.000,00	-	-	-	-	-	-	-
21	KECAMATAN MANTRIJERON	2.977.161.841,40		-	-	-	-	-	-	-
22	KECAMATAN KRATON	3.868.967.162,84	15.492.000,00	-	-	-	-	-	-	-
23	KECAMATAN GONDOMANAN	3.085.494.335,68	-	108.982.000,00	-	-	-	-	-	-
24	KECAMATAN MERGANGSAN	4.762.200.156,93		83.830.530,00	-	-	74.400.000,00	-	-	-
25	KECAMATAN UMBULHARJO	17.414.002.292,16	39.706.000,00	-	-	-	91.150.000,00	-	769.400.000,00	-
26	KECAMATAN KOTAGEDE	7.508.864.420,44	92.002.518,00	117.255.117,00	-	-	-	-	-	-
27	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.194.196.999,96		-	-	-	-	-	-	-
28	DINAS PERHUBUNGAN	46.981.479.461,24	1.407.990.909,66	-	-	-	-	-	-	-
29	DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN PERSANDIAN	7.591.478.644,43	166.107.000,00	106.600.000,00	-	-	-	-	-	-
30	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN	15.312.268.280,49		-	-	-	-	-	-	-
32	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	313.413.000,00	-	-	-	-	-	-	-
33	DINAS KEBUDAYAAN	755.400.705,50	198.700.000,00	-	-	-	-	-	-	-
34	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4.077.688.138,16	17.625.421,57	140.821.329,52	-	-	-	64.453.408,69	-	-
35	KANTOR KESATUAN BANGSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	7.165.639.433,42	777.720.000,00	638.576.000,00	-	-	42.777.000,00	-	-	-
37	DINAS PARIWISATA	48.581.433.364,63	2.134.297.527,00	426.796.000,00	-	-	-	-	-	-
38	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	130.158.378.389,05	383.288.667,77	-	-	-	800.000.000,00	-	-	-
39	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	189.217.000,00	255.747.000,00	-	-	-	-	-	-	-
40	SEKRETARIAT DAERAH	27.155.400.408,69	199.680.000,00	2.784.494.406,78	-	-	-	-	27.413.244,49	-
41	SEKRETARIAT DPRD	8.996.784.097,96		-	-	-	-	-	-	-
42	INSPEKTORAT	11.000.000,00	4.991.000,00	-	7.025.066.050,48	-	-	-	-	-
43	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	191.136.805,79		171.319.000,00	769.400.000,00	-	-	-	-	-
44	PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG	42.087.247.077,98		-	-	-	-	-	184.307.170,43	-
45	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2.421.251.260,43	516.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.102.383.071.728,20</b>	<b>54.112.404.556,94</b>	<b>8.106.272.057,32</b>	<b>8.455.137.465,40</b>	-	<b>5.564.191.608,97</b>	<b>1.050.856.981,35</b>	<b>8.455.137.465,40</b>	-

## MUTASI ASET BANGUNAN DAN GEDUNG PER SKPD TAHUN 2019

NO	NAMA SKPD	KOREKSI			SALDO AKHIR AUDITED	EKSTRAKOMP	ASET TETAP AUDITED
		SALDO AKHIR	KURANG CATAT	LEBIH CATAT			
1	DINAS PENDIDIKAN	275.334.323.995,61	67.064.749,92	400.000,00	275.400.988.745,53	350.778.128,00	275.050.210.617,53
2	DINAS KESEHATAN	107.623.413.306,08	26.999.500,00	-	107.650.412.806,08	35.258.779,32	107.615.154.026,76
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	24.074.415.529,37	-	-	24.074.415.529,37	17.023.050,83	24.057.392.478,54
4	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMU	272.163.063.810,17	622.893.420,77	1.270.290.338,36	271.515.666.892,58	57.655.167.650,12	213.860.499.242,46
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2.271.538.353,04	-	-	2.271.538.353,04	-	2.271.538.353,04
6	DINAS KEBAKARAN	2.938.156.452,94	-	-	2.938.156.452,94	-	2.938.156.452,94
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	896.222.596,00	-	22.991.145,00	873.231.451,00	8.750.000,00	864.481.451,00
8	DINAS SOSIAL	4.786.600.979,89	-	-	4.786.600.979,89	25.940.136,98	4.760.660.842,91
9	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLIN	548.612.615,02	-	-	548.612.615,02	-	548.612.615,02
10	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	2.718.351.365,64	-	-	2.718.351.365,64	-	2.718.351.365,64
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	30.852.969.656,40	60.803.000,00	956.201.420,09	29.957.571.236,31	4.840.130.876,30	25.117.440.360,01
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.832.536.706,50	-	-	1.832.536.706,50	2.545.420,08	1.829.991.286,42
13	KECAMATAN TEGALREJO	4.859.709.795,60	85.467.091,50	72.563.582,60	4.872.613.304,50	34.493.442,60	4.838.119.861,90
14	KECAMATAN JETIS	3.197.149.657,28	255.964.072,26	25.242.040,50	3.427.871.689,04	7.307.548,50	3.420.564.140,54
15	KECAMATAN GONDOKUSUMAN	8.014.127.843,74	146.890.746,46	54.164.971,14	8.106.853.619,06	71.017.156,13	8.035.836.462,93
16	KECAMATAN DANUREJAN	5.122.788.366,18	-	25.013.614,20	5.097.774.751,98	25.013.614,20	5.072.761.137,78
17	KECAMATAN GEDONGTENGEN	2.609.741.712,45	-	20.555.167,86	2.589.186.544,59	20.555.167,86	2.568.631.376,73
18	KECAMATAN PAKUALAMAN	1.705.887.102,71	28.749.348,03	13.962.478,42	1.720.673.972,33	8.674.726,40	1.711.999.245,93
19	KECAMATAN NGAMPILAN	3.643.723.096,89	94.924.165,70	20.033.713,42	3.718.613.549,17	13.886.744,10	3.704.726.805,07
20	KECAMATAN WIROBRAJAN	3.464.675.879,31	178.351.731,01	67.782.315,58	3.575.245.294,74	38.063.352,50	3.537.181.942,24
21	KECAMATAN MANTRIHERON	2.977.161.841,40	85.959.338,80	31.981.844,78	3.031.139.335,42	36.172.312,13	2.994.967.023,28
22	KECAMATAN KRATON	3.884.459.162,84	83.358.478,02	24.486.864,50	3.943.330.776,36	24.486.864,50	3.918.843.911,86
23	KECAMATAN GANDOMANAN	3.194.476.335,68	167.242.800,00	60.755.061,92	3.300.964.073,76	26.003.061,92	3.274.961.011,84
24	KECAMATAN MERGANGSAN	4.771.630.686,93	-	26.048.620,50	4.745.582.066,43	26.048.620,50	4.719.533.445,93
25	KECAMATAN UMBULHARJO	16.593.158.292,16	562.031.583,75	59.653.556,58	17.095.536.319,33	57.363.474,42	17.038.172.844,91
26	KECAMATAN KOTAGEDE	7.718.122.055,44	-	26.048.620,50	7.692.073.434,94	26.048.620,50	7.666.024.814,44
27	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.194.196.999,96	-	-	1.194.196.999,96	90.612.999,96	1.103.584.000,00
28	DINAS PERHUBUNGAN	48.389.470.370,90	-	4.035.717.391,58	44.353.752.979,32	11.026.173.450,77	33.327.579.528,55
29	DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN PERSANDIAN	7.864.185.644,43	-	-	7.864.185.644,43	3.600.000,00	7.860.585.644,43
30	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA	-	-	-	-	-	-
31	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN	15.312.268.280,49	-	-	15.312.268.280,49	-	15.312.268.280,49
32	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	313.413.000,00	-	-	313.413.000,00	-	313.413.000,00
33	DINAS KEBUDAYAAN	954.100.705,50	-	-	954.100.705,50	-	954.100.705,50
34	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4.171.681.480,56	-	-	4.171.681.480,56	16.829.000,00	4.154.852.480,56
35	KANTOR KESATUAN BANGSA	-	-	-	-	-	-
36	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	8.539.158.433,42	-	34.792.776,64	8.504.365.656,78	38.445.342,40	8.465.920.314,38
37	DINAS PARIWISATA	51.142.526.891,63	9.500.000,00	-	51.152.026.891,63	9.697.655,75	51.142.329.235,88
38	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	129.741.667.056,82	15.752.000,00	6.250.000,00	129.751.169.056,82	18.650.000,00	129.732.519.056,82
39	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	444.964.000,00	-	-	444.964.000,00	-	444.964.000,00
40	SEKRETARIAT DAERAH	30.112.161.570,98	-	-	30.112.161.570,98	312.589.667,86	29.799.571.903,12
41	SEKRETARIAT DPRD	8.996.784.097,96	-	-	8.996.784.097,96	-	8.996.784.097,96
42	INSPEKTORAT	7.041.057.050,48	-	-	7.041.057.050,48	4.991.000,00	7.036.066.050,48
43	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.131.855.805,79	-	-	1.131.855.805,79	10.500.000,00	1.121.355.805,79
44	PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG	41.902.939.907,55	-	1.822.800.000,00	40.080.139.907,55	33.000.000,00	40.047.139.907,55
45	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2.937.251.260,43	-	-	2.937.251.260,43	104.110.498,05	2.833.140.762,38
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.157.986.699.752,14</b>	<b>2.491.952.026,22</b>	<b>8.677.735.524,16</b>	<b>1.151.800.916.254,19</b>	<b>75.019.928.362,68</b>	<b>1.076.780.987.891,51</b>



## MUTASI ASET JALAN JARINGAN DAN JEMBATAN PER SKPD TAHUN 2019

NO	NAMA SKPD	SALDO AWAL	PENAMBAHAN				PENGURANGAN			
			PENAMBAHAN BARU	PENAMBAHAN NILAI	MUTASI MASUK	REKLASIFIKASI	PENGHAPUSAN	PENGURANGAN NILAI	MUTASI KELUAR	REKLASIFIKASI
1	DINAS PENDIDIKAN	47.810.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2	DINAS KESEHATAN	-	-	-	144.475.901,93	-	-	-	-	-
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	531.825.230,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKAAN	1.984.825.848.931,76	54.481.903.092,24	40.017.680.211,90	-	-	1.895.600.000,00	-	-	-
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	DINAS KEBAKARAN	3.050.352.003,00	1.804.053.203,85	-	-	-	-	-	-	-
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	3.654.448.557,42	-	-	-	-	-	-	-
8	DINAS SOSIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	3.670.293.160,27	173.179.555,00	-	-	-	68.540.037,87	-	144.475.901,93	-
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	KECAMATAN TEGALREJO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	KECAMATAN JETIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	KECAMATAN GONDOKUSUMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	KECAMATAN DANUREJAN	3.740.000,00	9.855.000,00	-	-	-	-	-	-	-
17	KECAMATAN GEDONGTENGEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	KECAMATAN PAKUALAMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	KECAMATAN NGAMPILAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	KECAMATAN WIROBRAJAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	KECAMATAN MANTRIJIJERON	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	KECAMATAN KRATON	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	KECAMATAN GONDOMANAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	KECAMATAN MERGANGSAN	-	509.022.549,32	-	-	-	-	-	-	-
25	KECAMATAN UMBULHARJO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	KECAMATAN KOTAGEDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	DINAS PERHUBUNGAN	309.873.295,01	-	-	-	-	-	-	-	-
29	DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN PERSANDIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	DINAS KEBUDAYAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	KANTOR KESATUAN BANGSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	401.537.600,07	134.590.000,00	-	-	-	-	-	-	-
37	DINAS PARIWISATA	566.443.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
38	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	319.438.451,13	22.650.000,00	-	-	-	-	-	-	-
39	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	INSPEKTORAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG	4.075.600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
45	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.997.802.762.171,24</b>	<b>60.789.701.957,83</b>	<b>40.017.680.211,90</b>	<b>144.475.901,93</b>	-	<b>1.964.140.037,87</b>	-	<b>144.475.901,93</b>	-

## MUTASI ASET JALAN JARINGAN DAN JEMBATAN PER SKPD TAHUN 2019

NO	NAMA SKPD	KOREKSI		SALDO AKHIR AUDITED	EKSTRAKOMP	ASET TETAP AUDITED	
		SALDO AKHIR	KURANG CATAT				LEBIH CATAT
1	DINAS PENDIDIKAN	47.810.500,00	-	-	47.810.500,00	-	47.810.500,00
2	DINAS KESEHATAN	144.475.901,93	-	-	144.475.901,93	-	144.475.901,93
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	531.825.230,00	-	-	531.825.230,00	-	531.825.230,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMU	2.077.429.832.235,90	1.396.117.506,26	102.763.716,90	2.078.723.186.025,26	-	2.078.723.186.025,26
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-	-	-	-	-
6	DINAS KEBAKARAN	4.854.405.206,85	-	-	4.854.405.206,85	-	4.854.405.206,85
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.654.448.557,42	-	40.027.087,80	3.614.421.469,62	-	3.614.421.469,62
8	DINAS SOSIAL	-	-	-	-	-	-
9	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLIN	-	-	-	-	-	-
10	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	-	-	-	-	-	-
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	3.630.456.775,47	-	-	3.630.456.775,47	-	3.630.456.775,47
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	-	-	-	-
13	KECAMATAN TEGALREJO	-	561.602.338,50	-	561.602.338,50	-	561.602.338,50
14	KECAMATAN JETIS	-	584.676.618,13	-	584.676.618,13	-	584.676.618,13
15	KECAMATAN GONDOKUSUMAN	-	1.010.726.126,79	-	1.010.726.126,79	-	1.010.726.126,79
16	KECAMATAN DANUREJAN	13.595.000,00	-	-	13.595.000,00	-	13.595.000,00
17	KECAMATAN GEDONGTENGEN	-	598.598.569,24	-	598.598.569,24	-	598.598.569,24
18	KECAMATAN PAKUALAMAN	-	284.454.000,00	-	284.454.000,00	-	284.454.000,00
19	KECAMATAN NGAMPILAN	-	440.805.834,30	-	440.805.834,30	-	440.805.834,30
20	KECAMATAN WIROBRAJAN	-	487.176.201,84	-	487.176.201,84	-	487.176.201,84
21	KECAMATAN MANTRIJERON	-	963.799.527,73	-	963.799.527,73	-	963.799.527,73
22	KECAMATAN KRATON	-	756.795.844,64	-	756.795.844,64	-	756.795.844,64
23	KECAMATAN GONDOMANAN	-	271.772.200,00	-	271.772.200,00	-	271.772.200,00
24	KECAMATAN MERGANGSAN	509.022.549,32	759.642.000,00	-	1.268.664.549,32	-	1.268.664.549,32
25	KECAMATAN UMBULHARJO	-	1.395.105.316,25	-	1.395.105.316,25	-	1.395.105.316,25
26	KECAMATAN KOTAGEDE	-	-	-	-	-	-
27	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	-	-	-	-	-
28	DINAS PERHUBUNGAN	309.873.295,01	298.209.000,00	120.238.770,00	487.843.525,01	-	487.843.525,01
29	DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN PERSANDIAN	-	447.203.194,11	-	447.203.194,11	-	447.203.194,11
30	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA	-	-	-	-	-	-
31	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN	-	-	-	-	-	-
32	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	-	-	-	-	-
33	DINAS KEBUDAYAAN	-	-	-	-	-	-
34	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	-	-	-	-	-	-
35	KANTOR KESATUAN BANGSA	-	-	-	-	-	-
36	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	536.127.600,07	34.792.776,64	-	570.920.376,71	-	570.920.376,71
37	DINAS PARIWISATA	566.443.000,00	-	-	566.443.000,00	-	566.443.000,00
38	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	342.088.451,13	-	-	342.088.451,13	-	342.088.451,13
39	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	-	-	-	-
40	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	-	-	-	-
41	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-	-	-	-
42	INSPEKTORAT	-	-	-	-	-	-
43	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	-	-	-	-	-	-
44	PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG	4.075.600.000,00	1.759.800.000,00	-	5.835.400.000,00	-	5.835.400.000,00
45	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.096.646.004.303,10</b>	<b>12.051.277.054,43</b>	<b>263.029.574,70</b>	<b>2.108.434.251.782,83</b>	<b>-</b>	<b>2.108.434.251.782,83</b>

## MUTASI ASET TETAP LAINNYA PER SKPD TAHUN 2019

NO	NAMA SKPD	SALDO AWAL	PENAMBAHAN				PENGURANGAN			
			PENAMBAHAN BARU	PENAMBAHAN NILAI	MUTASI MASUK	REKLASIFIKASI	PENGHAPUSAN	PENGURANGAN NILAI	MUTASI KELUAR	REKLASIFIKASI
1	DINAS PENDIDIKAN	27.311.422.767,30	3.290.966.833,52	-	-	-	-	-	-	-
2	DINAS KESEHATAN	248.487.866,50	2.116.500,00	-	-	-	-	-	-	-
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	24.487.900,00	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-
4	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKAAN	1.478.208.956,20	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2.963.700,00	640.500,00	-	-	-	-	-	-	-
6	DINAS KEBAKARAN	565.400,00	338.225,00	-	-	-	-	-	-	-
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.223.560,00	913.730,00	-	-	-	-	-	-	-
8	DINAS SOSIAL	20.722.740,00	2.082.600,00	-	-	-	-	-	-	-
9	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN	26.588.950,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-
10	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	14.374.151,00	81.893.500,00	-	-	-	-	-	-	-
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.245.224.357,79	-	-	-	-	-	-	-	-
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.074.500,00	480.000,00	-	-	-	-	-	-	-
13	KECAMATAN TEGALREJO	171.290.480,00	56.611.582,60	-	3.551.272,72	-	-	-	-	-
14	KECAMATAN JETIS	10.849.900,00	22.223.250,00	-	9.355.854,54	-	-	-	-	-
15	KECAMATAN GONDOKUSUMAN	96.118.781,82	35.371.000,00	-	15.593.090,90	-	-	-	-	-
16	KECAMATAN DANUREJAN	9.509.250,00	21.557.600,00	-	9.355.854,54	-	-	-	-	-
17	KECAMATAN GEDONGTENGEN	164.723.000,00	14.163.400,00	-	6.237.236,36	-	-	-	-	-
18	KECAMATAN PAKUALAMAN	11.388.000,00	14.088.400,00	-	6.237.236,36	-	-	-	-	-
19	KECAMATAN NGAMPILAN	175.453.815,00	14.338.400,00	-	6.237.236,36	-	-	-	-	-
20	KECAMATAN WIROBRAJAN	165.823.000,00	27.458.686,95	-	2.663.454,54	-	-	-	-	-
21	KECAMATAN MANTRIJERON	182.325.900,00	29.858.686,95	-	2.663.454,54	-	-	-	-	-
22	KECAMATAN KRATON	9.878.000,00	22.591.900,00	-	9.355.854,54	-	-	-	-	-
23	KECAMATAN GONDONANAN	168.543.050,00	14.188.400,00	-	6.237.236,36	-	-	-	-	-
24	KECAMATAN MERGANGSAN	179.799.395,00	27.458.686,95	-	2.663.454,54	-	-	-	-	-
25	KECAMATAN UMBULHARJO	79.112.700,00	64.270.269,55	-	6.214.727,25	-	-	-	-	-
26	KECAMATAN KOTAGEDE	43.511.550,00	27.608.686,95	-	2.663.454,53	-	-	-	-	-
27	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	985.075,00	419.950,00	-	-	-	-	-	-	-
28	DINAS PERHUBUNGAN	53.142.396,46	1.478.800,00	-	-	-	-	-	-	-
29	DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN PERSANDIAN	15.209.632,00	-	-	-	-	-	-	-	-
30	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA	151.836.300,00	396.800,00	-	-	-	-	-	-	-
31	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN	2.102.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-
32	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	8.975.000,00	-	-	-	-	-	-	-
33	DINAS KEBUDAYAAN	77.150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
34	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1.513.545.770,08	541.187.155,00	-	-	-	-	-	-	-
35	KANTOR KESATUAN BANGSA	1.046.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
36	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	36.400.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
37	DINAS PARIWISATA	1.513.771.766,46	9.680.000,00	-	-	-	445.589.000,00	-	-	-
38	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	92.638.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-
39	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	8.981.423,00	-	-	-	-	-	-	-	-
40	SEKRETARIAT DAERAH	427.977.449,90	8.502.250,00	-	-	-	48.500.000,00	560.000,00	89.029.418,10	-
41	SEKRETARIAT DPRD	235.905.445,01	7.115.375,00	-	-	-	-	-	-	-
42	INSPEKTORAT	18.278.840,00	622.300,00	-	-	-	-	-	-	-
43	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	15.012.800,00	2.573.950,00	-	-	-	-	-	-	-
44	PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG	330.965.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
45	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	3.258.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>37.345.880.968,52</b>	<b>4.354.972.418,47</b>	<b>-</b>	<b>89.029.418,08</b>	<b>-</b>	<b>494.089.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>89.029.418,10</b>	<b>-</b>

## MUTASI ASET TETAP LAINNYA PER SKPD TAHUN 2019

NO	NAMA SKPD	KOREKSI		SALDO AKHIR AUDITED	EKSTRAKOMP	ASET TETAP AUDITED	
		SALDO AKHIR	KURANG CATAT				LEBIH CATAT
1	DINAS PENDIDIKAN	30.602.389.600,82	454.250,00	26.556.882,00	30.576.286.968,82	-	30.576.286.968,82
2	DINAS KESEHATAN	250.604.366,50	300.000,00	-	250.904.366,50	-	250.904.366,50
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	24.737.900,00	-	24.487.900,00	250.000,00	-	250.000,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKAAN	1.480.708.956,20	-	-	1.480.708.956,20	-	1.480.708.956,20
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	3.604.200,00	-	-	3.604.200,00	-	3.604.200,00
6	DINAS KEBAKARAN	903.625,00	-	-	903.625,00	-	903.625,00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.137.290,00	-	-	2.137.290,00	-	2.137.290,00
8	DINAS SOSIAL	22.805.340,00	-	-	22.805.340,00	-	22.805.340,00
9	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN	26.638.950,00	-	-	26.638.950,00	-	26.638.950,00
10	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	96.267.651,00	-	-	96.267.651,00	-	96.267.651,00
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.245.224.357,79	-	-	2.245.224.357,79	-	2.245.224.357,79
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.554.500,00	-	-	5.554.500,00	-	5.554.500,00
13	KECAMATAN TEGALREJO	231.453.335,32	-	-	231.453.335,32	-	231.453.335,32
14	KECAMATAN JETIS	42.429.004,54	-	-	42.429.004,54	-	42.429.004,54
15	KECAMATAN GONDOKUSUMAN	147.082.872,72	-	-	147.082.872,72	-	147.082.872,72
16	KECAMATAN DANUREJAN	40.422.704,54	-	-	40.422.704,54	-	40.422.704,54
17	KECAMATAN GEDONGTENGEN	185.123.636,36	-	-	185.123.636,36	-	185.123.636,36
18	KECAMATAN PAKUALAMAN	31.713.636,36	-	5.000.000,00	26.713.636,36	-	26.713.636,36
19	KECAMATAN NGAMPILAN	196.029.451,36	-	-	196.029.451,36	-	196.029.451,36
20	KECAMATAN WIROBRAJAN	195.945.141,49	-	-	195.945.141,49	-	195.945.141,49
21	KECAMATAN MANTRIJERON	214.848.041,49	-	-	214.848.041,49	-	214.848.041,49
22	KECAMATAN KRATON	41.825.754,54	-	-	41.825.754,54	-	41.825.754,54
23	KECAMATAN GONDOMANAN	188.968.686,36	-	-	188.968.686,36	-	188.968.686,36
24	KECAMATAN MERGANGSAN	209.921.536,49	-	-	209.921.536,49	-	209.921.536,49
25	KECAMATAN KOMBULHARJO	149.597.696,80	-	-	149.597.696,80	-	149.597.696,80
26	KECAMATAN KOTAGEDE	73.783.691,48	-	-	73.783.691,48	-	73.783.691,48
27	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.405.025,00	-	159.200,00	1.245.825,00	-	1.245.825,00
28	DINAS PERHUBUNGAN	54.621.196,46	-	-	54.621.196,46	-	54.621.196,46
29	DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN PERSANDIAN	15.209.632,00	-	-	15.209.632,00	-	15.209.632,00
30	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA	152.233.100,00	-	-	152.233.100,00	-	152.233.100,00
31	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN	2.102.700,00	-	-	2.102.700,00	-	2.102.700,00
32	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	8.975.000,00	-	-	8.975.000,00	-	8.975.000,00
33	DINAS KEBUDAYAAN	77.150.000,00	-	-	77.150.000,00	-	77.150.000,00
34	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2.054.732.925,08	-	-	2.054.732.925,08	-	2.054.732.925,08
35	KANTOR KESATUAN BANGSA	1.046.800,00	-	-	1.046.800,00	-	1.046.800,00
36	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	36.400.500,00	-	2.500.000,00	33.900.500,00	-	33.900.500,00
37	DINAS PARIWISATA	1.077.862.766,46	-	-	1.077.862.766,46	-	1.077.862.766,46
38	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	92.638.900,00	-	-	92.638.900,00	-	92.638.900,00
39	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	8.981.423,00	-	-	8.981.423,00	-	8.981.423,00
40	SEKRETARIAT DAERAH	298.390.281,80	-	-	298.390.281,80	-	298.390.281,80
41	SEKRETARIAT DPRD	243.020.820,01	-	-	243.020.820,01	-	243.020.820,01
42	INSPEKTORAT	18.901.140,00	-	-	18.901.140,00	-	18.901.140,00
43	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	17.586.750,00	-	-	17.586.750,00	-	17.586.750,00
44	PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG	330.965.000,00	-	-	330.965.000,00	-	330.965.000,00
45	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	3.258.500,00	-	-	3.258.500,00	-	3.258.500,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>41.206.204.386,97</b>	<b>754.250,00</b>	<b>58.703.982,00</b>	<b>41.148.254.654,97</b>	<b>-</b>	<b>41.148.254.654,97</b>

## MUTASI ASET KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan per SKPD Tahun 2019

NO	NAMA SKPD	SALDO AWAL	PENAMBAHAN				PENGURANGAN			
			PENAMBAHAN BARU	PENAMBAHAN NILAI	MUTASI MASUK	REKLASIFIKASI	PENGHAPUSAN	PENGURANGAN NILAI	MUTASI KELUAR	REKLASIFIKASI
1	DINAS PENDIDIKAN	38.942.847,28	-	-	-	-	-	-	-	-
2	DINAS KESEHATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKAAN	8.391.486.546,35	11.550.188.112,12	-	-	-	-	-	-	-
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	DINAS KEBAKARAN	543.030.000,00	395.962.500,00	-	-	-	-	-	-	-
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	143.833.000,00	-	-	-	-	-	-	-	49.433.000,00
8	DINAS SOSIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	253.871.000,00	339.607.550,00	-	-	-	-	-	-	-
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	KECAMATAN TEGALREJO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	KECAMATAN JETIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	KECAMATAN GONDOKUSUMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	KECAMATAN DANUREJAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	KECAMATAN GEDONGTENGEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	KECAMATAN PAKUALAMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	KECAMATAN NGAMPILAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	KECAMATAN WIROBRAJAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	KECAMATAN MANTRIJERON	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	KECAMATAN KRATON	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	KECAMATAN GONDOMANAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	KECAMATAN MERGANGSAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	KECAMATAN UMBULHARJO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	KECAMATAN KOTAGEDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN PERSANDIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	DINAS KEBUDAYAAN	219.112.500,00	79.577.300,00	-	-	-	-	-	-	-
34	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	KANTOR KESATUAN BANGSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	-	142.007.500,00	-	-	-	-	-	-	-
37	DINAS PARIWISATA	835.625.350,00	793.661.000,00	132.500.000,00	-	-	-	-	-	132.286.000,00
38	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	163.352.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
39	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	SEKRETARIAT DAERAH	-	79.090.000,00	-	-	-	-	-	-	-
41	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	INSPEKTORAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>10.589.253.243,63</b>	<b>13.380.093.962,12</b>	<b>132.500.000,00</b>	-	-	-	-	-	<b>181.719.000,00</b>

## MUTASI ASET KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan per SKPD Tahun 2019

NO	NAMA SKPD	KOREKSI		SALDO AKHIR AUDITED	EKSTRAKOMP	ASET TETAP AUDITED	
		SALDO AKHIR	KURANG CATAT				LEBIH CATAT
1	DINAS PENDIDIKAN	38.942.847,28	-	-	38.942.847,28	-	38.942.847,28
2	DINAS KESEHATAN	-	-	-	-	-	-
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	-	-	-	-	-	-
4	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKAAN	19.941.674.658,47	-	862.120.420,77	19.079.554.237,70	-	19.079.554.237,70
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-	-	-	-	-
6	DINAS KEBAKARAN	938.992.500,00	-	-	938.992.500,00	-	938.992.500,00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	94.400.000,00	-	-	94.400.000,00	-	94.400.000,00
8	DINAS SOSIAL	-	-	-	-	-	-
9	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN	-	-	-	-	-	-
10	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	-	-	-	-	-	-
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	593.478.550,00	-	60.803.000,00	532.675.550,00	-	532.675.550,00
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	-	-	-	-
13	KECAMATAN TEGALREJO	-	-	-	-	-	-
14	KECAMATAN JETIS	-	-	-	-	-	-
15	KECAMATAN GONDOKUSUMAN	-	-	-	-	-	-
16	KECAMATAN DANUREJAN	-	-	-	-	-	-
17	KECAMATAN GEDONGTENGEN	-	-	-	-	-	-
18	KECAMATAN PAKUALAMAN	-	-	-	-	-	-
19	KECAMATAN NGAMPILAN	-	-	-	-	-	-
20	KECAMATAN WIROBRAJAN	-	-	-	-	-	-
21	KECAMATAN MANTRIJEON	-	-	-	-	-	-
22	KECAMATAN KRATON	-	-	-	-	-	-
23	KECAMATAN GONDONANAN	-	-	-	-	-	-
24	KECAMATAN MERGANGSAN	-	-	-	-	-	-
25	KECAMATAN UMBULHARJO	-	-	-	-	-	-
26	KECAMATAN KOTAGEDE	-	-	-	-	-	-
27	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	-	-	-	-	-
28	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-	-	-	-
29	DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN PERSANDIAN	-	-	-	-	-	-
30	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA	-	-	-	-	-	-
31	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN	-	-	-	-	-	-
32	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	-	-	-	-	-
33	DINAS KEBUDAYAAN	298.689.800,00	-	-	298.689.800,00	-	298.689.800,00
34	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	-	-	-	-	-	-
35	KANTOR KESATUAN BANGSA	-	-	-	-	-	-
36	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	142.007.500,00	-	-	142.007.500,00	-	142.007.500,00
37	DINAS PARIWISATA	1.629.500.350,00	-	-	1.629.500.350,00	-	1.629.500.350,00
38	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	163.352.000,00	-	-	163.352.000,00	-	163.352.000,00
39	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	-	-	-	-
40	SEKRETARIAT DAERAH	79.090.000,00	-	-	79.090.000,00	-	79.090.000,00
41	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-	-	-	-
42	INSPEKTORAT	-	-	-	-	-	-
43	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	-	-	-	-	-	-
44	PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG	-	-	-	-	-	-
45	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>23.920.128.205,75</b>	<b>-</b>	<b>922.923.420,77</b>	<b>22.997.204.784,98</b>	<b>-</b>	<b>22.997.204.784,98</b>

## MUTASI TOTAL ASET PER SKPD TAHUN 2019

NO	NAMA SKPD	SALDO AWAL	PENAMBAHAN				PENGURANGAN			
			PENAMBAHAN BARU	PENAMBAHAN NILAI	MUTASI MASUK	REKLASIFIKASI	PENGHAPUSAN	PENGURANGAN NILAI	MUTASI KELUAR	REKLASIFIKASI
1	DINAS PENDIDIKAN	411.113.951.956,17	13.811.404.704,66	507.743.555,00	-	-	1.638.623.346,60	986.403.572,66	462.761.369,21	-
2	DINAS KESEHATAN	197.417.816.481,96	9.799.659.671,02	-	144.475.901,93	-	-	-	-	-
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	199.558.534.609,22	20.727.766.441,00	-	10.322.203,67	-	-	-	-	-
4	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKAAN	2.246.127.593.606,29	113.108.841.391,92	40.747.873.989,65	-	-	2.557.098.974,38	-	7.108.233.206,88	-
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	8.812.283.006,76	865.055.500,00	283.810.000,00	-	-	-	-	-	-
6	DINAS KEBAKARAN	24.376.693.087,78	4.597.157.338,99	-	-	-	-	-	-	-
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	6.952.388.289,19	5.854.142.712,56	88.331.596,00	448.951.000,00	-	-	-	-	49.433.000,00
8	DINAS SOSIAL	9.871.620.933,91	879.733.015,05	-	8.483.322,19	-	371.931.000,00	-	-	-
9	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN	2.623.545.436,78	1.111.730.223,34	217.041.000,00	316.431.519,22	-	723.019.288,42	-	-	-
10	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	1.324.274.378.864,69	25.758.438.564,14	5.676.550.386,00	-	-	5.244.013.386,00	-	38.727.881.807,29	-
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	72.920.004.353,08	8.375.309.710,22	738.359.091,28	14.952.214,58	-	861.986.109,53	-	144.475.901,93	-
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9.737.745.975,98	1.385.206.516,00	63.909.500,00	-	-	-	-	144.500.000,00	-
13	KECAMATAN TEGALREJO	6.811.123.477,76	671.839.511,60	83.782.000,00	3.551.272,72	-	-	-	11.420.692,63	-
14	KECAMATAN JETIS	4.627.454.077,66	385.300.859,00	69.815.154,00	9.355.854,54	-	-	-	9.710.000,00	-
15	KECAMATAN GONDOKUSUMAN	10.089.318.804,54	367.491.629,00	-	15.593.090,90	-	260.000.000,00	-	-	-
16	KECAMATAN DANUREJAN	6.737.423.898,24	298.858.984,00	34.252.000,00	9.355.854,54	-	107.345.927,91	-	-	-
17	KECAMATAN GEDONGTENGEN	4.867.259.796,21	241.688.320,00	-	6.237.236,36	-	-	-	11.460.000,00	-
18	KECAMATAN PAKUALAMAN	2.878.550.588,92	629.472.200,00	99.303.000,00	6.237.236,36	-	-	-	-	-
19	KECAMATAN NGAMPILAN	4.612.389.948,11	258.259.762,00	207.370.000,00	6.237.236,36	-	-	-	-	-
20	KECAMATAN WIROBRAJAN	4.718.391.021,74	469.405.611,95	-	2.663.454,54	-	-	-	-	-
21	KECAMATAN MANTRIJERON	4.435.239.058,87	323.595.465,95	-	2.663.454,54	-	-	-	-	-
22	KECAMATAN KRATON	5.244.950.323,62	156.961.900,00	-	9.355.854,54	-	-	-	-	-
23	KECAMATAN GANDOMANAN	4.506.432.736,19	184.065.249,00	108.982.000,00	6.237.236,36	-	-	-	11.420.692,63	-
24	KECAMATAN MERGANGSAN	6.450.325.668,80	798.968.290,27	83.830.530,00	2.663.454,54	-	74.400.000,00	-	-	-
25	KECAMATAN UMBULHARJO	20.448.428.238,81	522.619.115,85	-	6.214.727,25	-	91.150.000,00	-	779.100.000,00	-
26	KECAMATAN KOTAGEDE	8.995.821.478,58	434.355.483,95	117.255.117,00	2.663.454,53	-	-	-	-	-
27	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4.412.617.372,51	766.653.300,00	-	-	-	-	-	-	-
28	DINAS PERHUBUNGAN	58.679.807.153,66	3.506.105.881,66	-	-	-	60.250.000,00	-	-	-
29	DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN PERSANDIAN	44.562.804.066,43	7.155.089.993,94	106.600.000,00	37.946.727,28	-	-	-	-	-
30	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA DAN USAHA RUMAH TANGGA	2.345.887.801,11	755.346.800,00	-	-	-	-	-	244.769.371,16	-
31	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN	20.187.775.310,64	294.279.680,00	-	-	-	9.700.000,00	-	-	-
32	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.512.806.709,16	460.754.700,56	-	31.736.757,44	-	-	-	-	-
33	DINAS KEBUDAYAAN	2.695.345.382,29	616.612.678,15	-	-	-	17.750.000,00	-	-	-
34	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	11.906.578.807,07	2.019.992.087,87	140.821.329,52	-	-	38.168.419,51	64.453.408,69	5.226.000,00	-
35	KANTOR KESATUAN BANGSA	700.784.643,22	-	-	-	-	-	-	-	-
36	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	14.531.623.358,33	2.046.561.313,05	854.236.000,00	-	-	42.777.000,00	-	-	-
37	DINAS PARIWISATA	79.109.057.152,59	5.055.102.723,30	781.967.900,00	-	-	445.589.000,00	-	-	132.286.000,00
38	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	159.263.219.408,38	4.107.819.587,02	5.315.000,00	127.300.000,00	-	800.000.000,00	-	54.000.000,00	-
39	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.476.827.800,61	1.114.555.400,00	-	-	-	-	-	95.814.378,12	-
40	SEKRETARIAT DAERAH	47.540.403.008,93	6.437.466.363,97	2.784.494.406,78	534.929.226,56	-	603.468.852,55	560.000,00	347.603.814,59	-
41	SEKRETARIAT DPRD	22.617.278.601,35	458.879.575,00	-	-	-	-	-	1.093.715.226,56	-
42	INSPEKTORAT	2.389.905.930,26	330.484.095,30	-	7.108.233.206,88	-	-	-	-	-
43	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	2.241.572.097,60	674.823.512,00	171.319.000,00	-	-	769.400.000,00	-	-	-
44	PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG	598.980.835.498,20	963.662.500,00	-	40.420.765.572,57	-	1.553.478.400,00	-	349.553.897,71	-
45	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	10.644.473.342,23	1.327.443.375,70	-	3.529.154,51	-	11.992.000,00	-	464.839.866,22	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>5.696.009.269.164,43</b>	<b>250.108.961.738,99</b>	<b>53.972.962.555,22</b>	<b>50.066.486.224,91</b>	<b>-</b>	<b>15.512.741.704,90</b>	<b>1.051.416.981,35</b>	<b>50.066.486.224,93</b>	<b>181.719.000,00</b>

## MUTASI TOTAL ASET PER SKPD TAHUN 2019

NO	NAMA SKPD	KOREKSI		SALDO AKHIR AUDITED	EKSTRAKOMP	ASET TETAP AUDITED	
		SALDO AKHIR	KURANG CATAT				LEBIH CATAT
1	DINAS PENDIDIKAN	422.345.311.927,35	67.918.999,92	104.645.490,16	422.308.585.437,11	11.554.923.604,22	410.753.661.832,89
2	DINAS KESEHATAN	207.361.952.054,91	27.299.500,00	208.594.376,90	207.180.657.178,01	1.261.665.578,52	205.918.991.599,49
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	220.296.623.253,89	-	165.677.713,10	220.130.945.540,79	344.397.340,24	219.786.548.200,55
4	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKAAN	2.390.318.976.806,60	2.019.010.927,03	2.660.237.975,98	2.389.677.749.757,65	57.734.887.475,16	2.331.942.862.282,49
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	9.961.148.506,76	-	88.657.527,31	9.872.490.979,45	59.578.133,71	9.812.912.845,74
6	DINAS KEBAKARAN	28.973.850.426,77	-	849.615.229,07	28.124.235.197,70	27.923.879,09	28.096.311.318,61
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	13.294.380.597,75	-	108.292.962,42	13.186.087.635,33	46.979.052,79	13.139.108.582,54
8	DINAS SOSIAL	10.387.906.271,15	-	77.761.127,22	10.310.145.143,93	135.469.752,03	10.174.675.391,90
9	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN	3.545.728.890,91	-	34.598.547,27	3.511.130.343,64	68.663.103,70	3.442.467.239,94
10	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	1.311.737.472.621,54	-	195.858.069,04	1.311.541.614.552,50	43.793.481,93	1.311.497.821.070,57
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	81.042.163.357,70	60.803.000,00	1.158.320.461,65	79.944.645.896,05	5.071.579.640,26	74.873.066.255,79
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	11.042.361.991,98	-	-	11.042.361.991,98	54.088.331,56	10.988.273.660,42
13	KECAMATAN TEGALREJO	7.558.875.569,45	672.778.442,60	134.278.279,66	8.097.375.732,39	132.869.457,66	7.964.506.274,73
14	KECAMATAN JETIS	5.082.215.945,20	847.948.238,89	63.376.730,03	5.866.787.454,07	72.545.514,47	5.794.241.939,60
15	KECAMATAN GONDOKUSUMAN	10.212.403.524,44	1.211.781.844,39	90.719.971,14	11.333.465.397,69	189.695.812,87	11.143.769.584,82
16	KECAMATAN NGAMPILAN	6.972.544.808,87	25.013.614,20	59.895.637,01	6.937.662.786,06	126.592.061,17	6.811.070.724,89
17	KECAMATAN GEDONGTENGEN	5.103.725.352,57	619.153.737,10	813.462.123,79	4.909.416.965,88	94.149.226,47	4.815.267.739,41
18	KECAMATAN PAKUALAMAN	3.613.563.025,28	321.878.074,43	86.183.816,39	3.849.257.283,32	70.035.760,40	3.779.221.522,92
19	KECAMATAN NGAMPILAN	5.084.256.946,47	549.616.744,10	49.079.275,42	5.584.794.415,15	77.497.706,49	5.507.296.708,66
20	KECAMATAN WIROBRAJAN	5.190.460.088,23	686.891.285,35	117.545.337,67	5.759.806.035,91	108.455.456,27	5.651.350.579,64
21	KECAMATAN MANTRIHERON	4.761.497.979,36	1.077.369.243,03	63.077.606,93	5.775.789.615,46	108.864.934,74	5.666.924.680,71
22	KECAMATAN KRATON	5.411.268.078,16	864.641.187,16	74.890.708,59	6.201.018.556,73	98.776.710,52	6.102.241.846,21
23	KECAMATAN GONDOMANAN	4.794.296.528,92	504.167.061,92	89.871.620,99	5.208.591.969,85	91.267.567,71	5.117.324.402,14
24	KECAMATAN MERGANGSAN	7.261.387.943,61	785.690.620,50	105.171.787,31	7.941.906.776,80	153.475.774,59	7.788.431.002,21
25	KECAMATAN UMBULHARJO	20.107.012.081,91	2.008.146.115,58	80.915.547,65	22.034.242.649,84	240.544.516,73	21.793.698.133,11
26	KECAMATAN KOTAGEDE	9.550.095.534,06	26.048.620,50	68.297.984,40	9.507.846.170,16	91.333.780,91	9.416.512.389,25
27	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	5.179.270.672,51	-	103.738.884,66	5.075.531.787,85	104.486.300,39	4.971.045.487,46
28	DINAS PERHUBUNGAN	62.125.663.035,32	3.694.467.391,58	4.155.956.161,58	61.664.174.265,32	11.143.527.541,04	50.520.646.724,28
29	DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN PERSANDIAN	51.862.440.787,65	447.203.194,11	624.612.850,13	51.685.031.131,63	138.374.277,59	51.546.656.854,04
30	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA	2.856.465.229,95	-	12.724.131,44	2.843.741.098,51	58.993.556,42	2.784.747.542,09
31	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN	20.472.354.990,64	-	167.287.217,81	20.305.067.772,83	24.777.116,34	20.280.290.656,49
32	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	2.005.298.167,16	-	-	2.005.298.167,16	20.977.888,23	1.984.320.278,93
33	DINAS KEBUDAYAAN	3.294.208.060,44	-	259.169.425,72	3.035.038.634,72	26.330.805,89	3.008.707.828,83
34	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	13.959.544.396,26	-	126.240.151,08	13.833.304.245,18	98.034.355,36	13.735.269.889,82
35	KANTOR KESATUAN BANGSA	700.784.643,22	-	8.858.266,47	691.926.376,75	18.391.653,15	673.534.723,60
36	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	17.389.643.671,38	34.792.776,64	541.520.847,55	16.882.915.600,47	227.593.398,21	16.655.322.202,26
37	DINAS PARIWISATA	84.368.252.775,89	9.500.000,00	210.915.086,21	84.166.837.689,68	83.395.650,02	84.083.442.039,66
38	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	162.649.653.995,40	22.002.000,00	591.981.195,67	162.079.674.799,73	202.277.183,26	161.877.397.616,47
39	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3.495.568.822,49	-	30.042.939,08	3.465.525.883,41	36.039.751,65	3.429.486.131,76
40	SEKRETARIAT DAERAH	56.345.660.339,10	-	592.552.811,76	55.753.107.527,34	626.113.101,45	55.126.994.425,89
41	SEKRETARIAT DPRD	21.982.442.949,79	-	720.077.261,35	21.262.365.688,44	82.675.065,92	21.179.690.622,52
42	INSPEKTORAT	9.828.623.232,44	-	82.117.422,42	9.746.505.810,02	38.699.430,44	9.707.806.379,58
43	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	3.857.114.609,60	-	13.566.274,14	3.843.548.335,46	36.719.317,20	3.806.829.018,26
44	PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG	638.462.231.273,06	1.822.800.000,00	6.352.081.182,48	633.932.950.090,58	130.471.998,98	633.802.478.091,60
45	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	11.498.614.006,22	-	101.132.405,98	11.397.481.600,24	186.854.090,19	11.210.627.510,05
	<b>JUMLAH</b>	<b>5.983.345.315.772,37</b>	<b>18.406.922.619,03</b>	<b>22.243.600.422,62</b>	<b>5.979.508.637.968,78</b>	<b>91.344.786.135,93</b>	<b>5.888.163.851.832,84</b>



**REKAPITULASI ASET TETAP PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
TAHUN 2019**

NO	NAMA SKPD	TANAH	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN JARINGAN DAN JEMBATAN	ASET TETAP LAINNYA	KONSTRUKSI DALAM PENERJAAN	SALDO AKHIR	EKSTRAKOMP	ASET TETAP AUDITED
1	DINAS PENDIDIKAN	-	116.244.556.375,49	275.400.988.745,53	47.810.500,00	30.576.286.968,82	38.942.847,28	422.308.585.437,11	11.554.923.604,22	410.753.661.832,89
2	DINAS KESEHATAN	-	99.134.864.103,50	107.650.412.806,08	144.475.901,93	250.904.366,50	-	207.180.657.178,01	1.261.665.578,52	205.918.991.599,49
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	-	195.524.454.781,42	24.074.415.529,37	531.825.230,00	250.000,00	-	220.130.945.540,79	344.397.340,24	219.786.548.200,55
4	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKAAN	-	18.878.633.645,91	271.515.666.892,58	2.078.723.186.025,26	1.480.708.956,20	19.079.554.237,70	2.389.677.749.757,65	57.734.887.475,16	2.331.942.862.282,49
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	2.271.538.353,04	2.271.538.353,04	-	3.604.200,00	-	9.872.490.979,45	59.578.133,71	9.812.912.845,74
6	DINAS KEBAKARAN	-	19.391.777.412,91	2.938.156.452,94	4.854.405.206,85	903.625,00	938.992.500,00	28.124.235.197,70	27.923.879,09	28.096.311.318,61
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	8.601.897.424,71	873.231.451,00	3.614.421.469,62	2.137.290,00	94.400.000,00	13.186.087.635,33	46.979.052,79	13.139.108.582,54
8	DINAS SOSIAL	-	5.500.738.824,04	4.786.600.979,89	-	22.805.340,00	-	10.310.145.143,93	135.469.752,03	10.174.675.391,90
9	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLIN	-	2.935.878.778,63	548.612.615,02	-	26.638.950,00	-	3.511.130.343,64	68.663.103,70	3.442.467.239,94
10	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	1.306.127.354.254,00	2.599.641.281,86	2.718.351.365,64	-	96.267.651,00	-	1.311.541.614.552,50	43.793.481,93	1.311.497.821.070,57
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	43.578.717.976,48	29.957.571.236,31	3.630.456.775,47	2.245.224.357,79	532.675.550,00	79.944.645.896,05	5.071.579.640,26	74.873.066.255,79
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	9.204.270.785,48	1.832.536.706,50	-	5.554.500,00	-	11.042.361.991,98	54.088.331,56	10.988.273.660,42
13	KECAMATAN TEGALREJO	-	2.431.706.754,07	4.872.613.304,50	561.602.338,50	231.453.335,32	-	8.097.375.732,39	132.869.457,66	7.964.506.274,73
14	KECAMATAN JETIS	-	1.811.810.142,35	3.427.871.689,04	584.676.618,13	42.429.004,54	-	5.866.787.454,07	72.545.514,47	5.794.241.939,60
15	KECAMATAN GONDOKUSUMAN	-	2.068.802.779,12	8.106.853.619,06	1.010.726.126,79	147.082.872,72	-	11.333.465.397,69	189.695.812,87	11.143.769.584,82
16	KECAMATAN DANUREJAN	-	1.785.870.329,54	5.097.774.751,98	13.595.000,00	40.422.704,54	-	6.937.662.786,06	126.592.061,17	6.811.070.724,89
17	KECAMATAN GEDONGTENGEN	-	1.536.508.215,69	2.589.186.544,59	598.598.569,24	185.123.636,36	-	4.909.416.965,88	94.149.226,47	4.815.267.739,41
18	KECAMATAN PAKUALAMAN	-	1.817.415.674,64	1.720.673.972,33	284.454.000,00	26.713.636,36	-	3.849.257.283,32	70.035.760,40	3.779.221.522,92
19	KECAMATAN NGAMPILAN	-	3.129.345.580,32	3.718.613.549,17	440.805.834,30	196.029.451,36	-	5.584.794.415,15	77.497.706,49	5.507.296.708,66
20	KECAMATAN WIROBRAJAN	-	1.501.439.397,84	3.575.245.294,74	487.176.201,84	195.945.141,49	-	5.759.806.035,91	108.455.456,27	5.651.350.579,64
21	KECAMATAN MANTRIJERON	-	1.566.002.710,82	3.031.139.335,42	963.799.527,73	214.848.041,49	-	5.775.789.615,46	108.864.934,74	5.666.924.680,71
22	KECAMATAN KRATON	-	1.459.066.181,19	3.943.330.776,36	756.795.844,64	41.825.754,54	-	6.201.018.556,73	98.776.710,52	6.102.241.846,21
23	KECAMATAN GONDOMANAN	-	1.446.887.009,73	3.300.964.073,76	271.772.200,00	188.968.686,36	-	5.208.591.969,85	91.267.467,71	5.117.324.402,14
24	KECAMATAN MERGANGSAN	-	1.717.738.624,56	4.745.582.066,43	1.268.664.549,32	209.921.536,49	-	7.941.906.776,80	153.475.774,59	7.788.431.002,21
25	KECAMATAN UMBULHARJO	-	3.394.003.317,46	17.095.536.319,33	1.395.105.316,25	149.597.696,80	-	22.034.242.649,84	240.544.516,73	21.793.698.133,11
26	KECAMATAN KOTAGEDE	-	1.741.989.043,74	7.692.073.434,94	-	73.783.691,48	-	9.507.846.170,16	91.333.780,91	9.416.512.389,25
27	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	3.880.088.962,89	1.194.196.999,96	-	1.245.825,00	-	5.075.531.787,85	104.486.300,39	4.971.045.487,46
28	DINAS PERHUBUNGAN	-	16.767.956.564,53	44.353.752.979,32	487.843.525,01	54.621.196,46	-	61.664.174.265,32	11.143.527.541,04	50.520.646.724,28
29	DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN PERSANDIAN	-	43.358.432.661,09	7.864.185.644,43	447.203.194,11	15.209.632,00	-	51.685.031.131,63	138.374.277,59	51.546.656.854,04
30	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA	-	2.691.507.998,51	-	-	152.233.100,00	-	2.843.741.098,51	58.993.556,42	2.784.747.542,09
31	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN	-	4.990.696.792,34	15.312.268.280,49	-	2.102.700,00	-	20.305.067.772,83	24.777.116,34	20.280.290.656,49
32	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	1.682.910.167,16	313.413.000,00	-	8.975.000,00	-	2.005.298.167,16	20.977.888,23	1.984.320.278,93
33	DINAS KEBUDAYAAN	-	1.705.098.129,22	954.100.705,50	-	77.150.000,00	298.689.800,00	3.035.038.634,72	26.330.805,89	3.008.707.828,83
34	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	-	7.606.889.839,54	4.171.681.480,56	-	2.054.732.925,08	-	13.833.304.245,18	98.034.355,36	13.735.269.889,82
35	KANTOR KESATUAN BANGSA	-	690.879.576,75	-	-	1.046.800,00	-	691.926.376,75	18.391.653,15	673.534.723,60
36	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	-	7.631.721.566,98	8.504.365.656,78	570.920.376,71	33.900.500,00	142.007.500,00	16.882.915.600,47	227.593.398,21	16.655.322.202,26
37	DINAS PARIWISATA	-	29.741.004.681,59	51.152.026.891,63	566.443.000,00	1.077.862.766,46	1.629.500.350,00	84.166.837.689,68	83.395.650,02	84.083.442.039,66
38	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	31.730.426.391,78	129.751.169.056,82	342.088.451,13	92.638.900,00	163.352.000,00	162.079.674.799,73	202.277.183,26	161.877.397.616,47
39	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	3.011.580.460,41	444.964.000,00	-	8.981.423,00	-	3.465.525.883,41	36.039.751,65	3.429.486.131,76
40	SEKRETARIAT DAERAH	-	25.263.465.674,56	30.112.161.570,98	-	298.390.281,80	79.090.000,00	55.753.107.527,34	626.113.101,45	55.126.994.425,89
41	SEKRETARIAT DPRD	-	12.022.560.770,47	8.996.784.097,96	-	243.020.820,01	-	21.262.365.688,44	82.675.065,92	21.179.690.622,52
42	INSPEKTORAT	-	2.686.547.619,54	7.041.057.050,48	-	18.901.140,00	-	9.746.505.810,02	38.699.430,44	9.707.806.379,58
43	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	-	2.694.105.779,67	1.131.855.805,79	-	17.586.750,00	-	3.843.548.335,46	36.719.317,20	3.806.829.018,26
44	PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG	578.511.092.615,22	9.175.352.567,81	40.080.139.907,55	5.835.400.000,00	330.965.000,00	-	633.932.950.090,58	130.471.998,98	633.802.478.091,60
45	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	8.456.971.839,81	2.937.251.260,43	-	3.258.500,00	-	11.397.481.600,24	186.854.090,19	11.210.627.510,05
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>1.884.638.446.869,22</b>	<b>770.489.563.622,59</b>	<b>1.151.800.916.254,19</b>	<b>2.108.434.251.782,83</b>	<b>41.148.254.654,97</b>	<b>22.997.204.784,98</b>	<b>5.979.508.637.968,78</b>	<b>91.344.786.135,93</b>	<b>5.888.163.851.832,84</b>

NO	NAMA SKPD
1	DINAS PENDIDIKAN
2	DINAS KESEHATAN
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
4	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMU
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
6	DINAS KEBAKARAN
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
8	DINAS SOSIAL
9	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLIN
10	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
13	KECAMATAN TEGALREJO
14	KECAMATAN JETIS
15	KECAMATAN GONDOKUSUMAN
16	KECAMATAN DANUREJAN
17	KECAMATAN GEDONGTENGEN
18	KECAMATAN PAKUALAMAN
19	KECAMATAN NGAMPILAN
20	KECAMATAN WIROBRAJAN
21	KECAMATAN MANTRIJERON
22	KECAMATAN KRATON
23	KECAMATAN GANDOMANAN
24	KECAMATAN MERGANGSAN
25	KECAMATAN UMBULHARJO
26	KECAMATAN KOTAGEDE
27	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
28	DINAS PERHUBUNGAN
29	DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN PERSANDIAN
30	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA
31	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
32	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
33	DINAS KEBUDAYAAN
34	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
35	KANTOR KESATUAN BANGSA
36	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
37	DINAS PARIWISATA
38	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
39	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
40	SEKRETARIAT DAERAH
41	SEKRETARIAT DPRD
42	INSPEKTORAT
43	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
44	PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG
45	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	<b>JUMLAH TOTAL</b>

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**DAFTAR PIUTANG TPTGR PER 31 Desember 2019**

No	Nama	Jumlah Piutang	Jumlah	Penambahan	Pelunasan/	Saldo	Beban	Beban	Kualitas Piutang				Jumlah	
			Per 31 Desember 2018	2019	Angsuran 2019	Per 31 Desember 2019	Tahun 2019	Tahun 2020 dst	Lancar	Kurang lancar	Diragukan	Macet		
<b>I TUNTUTAN PERBENDAHARAAN (TP):</b>														
1	Ety Sugiyarti	Kehilangan kas Rp 94.000.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00				-	
	Bendahara BLH	diangsur 179 bln @ Rp 525.150,00 mulai bln September '07											-	
													-	
													-	
<b>II TUNTUTAN GANTI RUGI (TGR):</b>														
													-	
													-	
		<b>Jumlah</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									Persentase penyisihan	0,50%	10%	50%	100%	0%
									Penyisihan Tagihan Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-
									Tagihan Pemberian Pinjaman Netto	-	-	-	-	-

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**ASET TAK BERWUJUD - SOFTWARE**  
**Per 31 Desember 2019**

No	SKPD	Uraian	Perolehan		lasifikasi Ass	Nilai
			Bulan	Tahun		
1	Bidang Pengelolaan Taman Pintar	SIM Pembelajaran Interaktif	Desember	2009	Software	44.005.000,00
2	Bidang Pengelolaan Taman Pintar	Software Website Perpustakaan	Desember	2011	Software	12.815.000,00
3	Bidang Pengelolaan Taman Pintar	Software Sirkulasi Perpustakaan	Desember	2011	Software	25.015.100,00
4	Bidang Pengelolaan Taman Pintar	Sim Tiket Elektrik	Desember	2012	Software	50.000.000,00
5	Bidang Pengelolaan Taman Pintar	Software Dubbing Film Planetarium	Juni	2012	Software	8.000.000,00
6	Bidang Pengelolaan Taman Pintar	Software website Taman Pintar	Desember	2013	Software	51.950.000,00
7	Bidang Pengelolaan Taman Pintar	SIM Pemasaran	Desember	2013	Software	43.400.000,00
8	Bidang Pengelolaan Taman Pintar	Software Ticketing	Oktober	2016	Software	112.925.938,00
9	Bidang Pengelolaan Taman Pintar	Software Sistem Automatisasi Video 4D	Desember	2016	Software	37.073.810,00
10	Bidang Pengelolaan Taman Pintar	Software Redesign Website Taman Pintar	Desember	2017	Software	15.400.000,00
11	Bidang Pengelolaan Taman Pintar	Aplikasi Interaktif berbasis flash informasi tentang	Desember	2017	Software	52.665.800,00
12	Bidang Pengelolaan Taman Pintar	Software Komputer Animasi Mekanika Fluida	Mei	2019	Software	49.450.000,00
13	Bidang Pengelolaan Taman Pintar	Software Pengembangan Sistem E-Ticketing	September	2019	Software	24.200.000,00
14	Bidang Pengelolaan Taman Pintar	Software Coreldraw Graphics Suite 2019	Oktober	2019	Software	24.000.000,00
15	Dinas Pariwisata	Server + Software Akuntansi	Desember	2009	Software	23.712.000,00
	<b>Jumlah Dinas Pariwisata</b>					<b>574.612.648,00</b>
16	RSUD	Software Aplikasi Program SIM RS	September	2010	Software	158.400.000,00
17	RSUD	Software Windows 8	Juli	2013	Software	33.535.600,00
18	RSUD	Website RSUD	November	2013	Software	5.300.000,00
19	RSUD	SIM Inventory Farmasi	Oktober	2013	Software	49.600.000,00
20	RSUD	Modul Aplikasi Touchsreen	November	2015	Software	15.007.631,00
21	RSUD	Modul Integrasi SIM RS BPJS	November	2015	Software	38.519.587,00
22	RSUD	Modul Jasa Medik	November	2015	Software	50.025.437,00
23	RSUD	Modul SMS Gateway	November	2015	Software	25.012.719,00
24	RSUD	Replikasi	November	2015	Software	7.503.816,00
25	RSUD	Modul SIM RS (SKM/BRM)	Oktober	2015	Software	25.012.719,00
26	RSUD	Modul Antrian	November	2015	Software	25.012.719,00
27	RSUD	Software modul pendaftaran dan laporan	Desember	2019	Software	16.500.000,00
28	RSUD	Software PACS	Desember	2019	Software	2.635.000.000,00
	<b>Jumlah RSUD</b>					<b>3.084.430.228,00</b>

No	SKPD	Uraian	Perolehan		lasifikasi Ass	Nilai
			Bulan	Tahun		
29	BAPPEDA	Aplikasi Software SIM Musrenbang	Desember	2011	Software	50.000.000,00
30	BAPPEDA	Penyempurnaan SIM Perencanaan Pembangunan	Desember	2012	Software	44.000.000,00
31	BAPPEDA	SIM RAPAT	Desember	2017	Software	17.210.500,00
32	BAPPEDA	SOFWARE LEMHANAS	Desember	2019	Software	36.296.126,82
	<b>Jumlah Bappeda</b>					<b>147.506.626,82</b>
33	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	SIM Arsip	-	2002	Software	9.080.000,00
34	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	SIM Capil	-	2002	Software	11.540.000,00
35	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	SIM Kepegawaian	-	2002	Software	13.380.000,00
36	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	SIM Monografi Kecamatan/Kelurahan	-	2004	Software	9.340.000,00
37	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	SIM Retribusi Kebersihan	-	2003	Software	23.975.000,00
38	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	SIM pelayanan Perijinan	-	2003	Software	11.519.000,00
39	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	SIM IMBB	-	2003	Software	36.261.000,00
40	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	SIM Retribusi Assainering dan Pemakaman	-	2004	Software	47.767.500,00
41	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	SIM Aplikasi Pelayanan Perijinan	-	2005	Software	57.997.000,00
42	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	SIM Aplikasi Web Pelayanan Puskesmas	-	2005	Software	127.265.600,00
43	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	SIM Pasar	-	2006	Software	237.072.000,00
44	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	SIM Perlengkapan (SIMKAP)	-	2007	Software	59.026.000,00
45	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	SIM Aplikasi Penggajian Berbasis Web	-	2008	Software	82.808.000,00
46	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	SIM Presensi Sidik Jari	-	2008	Software	46.090.000,00
47	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	SIM Kecamatan Berbasis Web	-	2008	Software	62.707.700,00
48	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	SIM barang Daerah	-	2008	Software	38.401.000,00
49	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	SIM Database Pemerintahan Terpadu	-	2009	Software	72.853.000,00
50	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	SIM Web Service PBB	-	2009	Software	97.702.000,00
51	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	SIM Agenda Dewan	November	2012	Software	25.560.000,00
52	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	SIM Mapatda	Desember	2012	Software	94.500.000,00
53		SIM Mapatda	Oktober	2014	Software	48.559.500,00
54		Pengembangan SIM Mapatda	Desember	2015	Software	44.211.590,00
55		Pengembangan SIM Mapatda		2016	Software	47.498.000,00
56	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	SIM Perencanaan	-	0	Software	-
57	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	Software SIPKD	-	2008	Software	145.839.000,00
58	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	SIM Pelaporan	Desember	2012	Software	6.200.000,00
59		Pengembangan SIM Pelaporan	Desember	2013	Software	19.387.000,00
60		Pengembangan SIM Pelaporan	November	2015	Software	9.900.000,00
61	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	Software Mastercame	November	2013	Software	148.000.000,00
62	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	Aplikasi Layanan Uji Kendaraan	November	2013	Software	23.520.000,00
63	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	Aplikasi Eksekutif	Desember	2013	Software	22.248.000,00
64	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	SIM Pengukuran Kinerja	November	2014	Software	49.747.500,00
65	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	SIM Anggaran	Desember	2014	Software	49.489.000,00
66	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	SIM Digilib	Desember	2014	Software	49.610.000,00
67	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	Pengembangan SISMIOP	Juni	2014	Software	9.900.000,00

No	SKPD	Uraian	Perolehan		lasifikasi Ass	Nilai
			Bulan	Tahun		
68		Pengembangan SISMIOP Modul Penetapan	Desember	2015	Software	9.900.000,00
69	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	SIM Monografi Kelurahan	Juli	2014	Software	9.900.000,00
70	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	SIM Samsucakep	Oktober	2014	Software	9.900.000,00
71		Pengembangan Samsucakep	April	2015	Software	9.900.000,00
72	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	SIM Assaenering	September	2014	Software	9.900.000,00
73	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	SIM Anjab	Desember	2014	Software	15.810.000,00
74	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	SIM Persediaan	Desember	2014	Software	18.480.000,00
75	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	Wistle Blower Sistem Inspektorat	Desember	2014	Software	18.480.000,00
76	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	SIM Organisasi	Desember	2014	Software	18.480.000,00
77	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	Software Freezy	Agustus	2014	Software	3.000.000,00
78	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	Software Solidworks	November	2014	Software	140.000.000,00
79	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	Pengembangan SIM Posyandu	April	2015	Software	9.900.000,00
80	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	Pengembangan/redesign KBS Online	April	2015	Software	9.900.000,00
81	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	Pengembangan SIM dan Web Bag. Organisasi	September	2015	Software	9.900.000,00
82	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	Pengadaan Aplikasi Video Streaming CCTV	Juli	2015	Software	46.035.000,00
83	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	Redesign Web Dinas Pendidikan	Juli	2015	Software	49.775.000,00
84	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	SIM Pemberdayaan Masyarakat	Oktober	2015	Software	31.625.000,00
85	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	Pengembangan Website Bag Hukum	November	2015	Software	9.900.000,00
86	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	Pengembangan Web Perhubungan	Oktober	2015	Software	38.802.500,00
87	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	SIM UPT Logam	November	2015	Software	47.410.000,00
88	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	SIM Peserta KB	Desember	2015	Software	47.300.000,00
89	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	Pengembangan SIM Pembangunan Sektoral	Desember	2015	Software	9.900.000,00
90	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	SIM Pemberdayaan Masyarakat Tahap II	Desember	2015	Software	50.862.600,00
91	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	SIPKD Modul Aset	Desember	2015	Software	53.380.700,00
92	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	Pembangunan SIM/Web BKD	Desember	2016	Software	49.258.000,00
93	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	Pembangunan Web BPBD	Desember	2016	Software	46.024.000,00
94	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	Pembangunan aplikasi SIKS dan integrasi databa	Desember	2016	Software	48.680.500,00
95	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	Pembangunan SIM Kelaikan Fungsi bangunan	Desember	2016	Software	39.550.500,00
96	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	Pengembangan SISMIOP PBB dan SIM Pos PBB	Desember	2016	Software	49.230.500,00
97	Diskominfo dan Persandian	Pengembangan SIM MAPATDA	Desember	2017	Software	53.203.450,00
98	Diskominfo dan Persandian	Pembangunan Data Warehouse	Desember	2017	Software	52.658.500,00
99	Diskominfo dan Persandian	Pembangunan Aplikasi e-SPTPD Hotel dan Resto	Desember	2017	Software	52.391.000,00
100	Diskominfo dan Persandian	Pembangunan Aplikasi Pemungutan Retribusi Pa	Desember	2017	Software	50.883.500,00
101	Diskominfo dan Persandian	Pembangunan UPIK Versi Mobile	Desember	2017	Software	52.055.500,00
102	Diskominfo dan Persandian	Pembangunan SIM Peserta KB	Desember	2017	Software	50.851.900,00
103	Diskominfo dan Persandian	Pemeliharaan SIM Perencanaan	Desember	2017	Software	9.900.000,00
104	Diskominfo dan Persandian	Pemeliharaan SIM Samsucakep	Desember	2017	Software	9.900.000,00
105	Diskominfo dan Persandian	Pemeliharaan SIM Pemberdayaan Masyarakat	Desember	2017	Software	9.900.000,00

No	SKPD	Uraian	Perolehan		lasifikasi Ass	Nilai
			Bulan	Tahun		
106	Diskominfo dan Persandian	Pemeliharaan SIMPEG	Desember	2017	Software	9.900.000,00
107	Diskominfo dan Persandian	Pemeliharaan SIM Uji Kendaraan	Desember	2017	Software	9.900.000,00
108	Diskominfo dan Persandian	Pemeliharaan SIM E-Office	Desember	2017	Software	9.900.000,00
109	Diskominfo dan Persandian	Pemeliharaan SIM Pelaporan	Desember	2017	Software	9.900.000,00
110	Diskominfo dan Persandian	Pemeliharaan SIM Pasar	Desember	2017	Software	9.900.000,00
111	Diskominfo dan Persandian	Licency Vivotek	Agustus	2018	Software	48.000.000,00
112	Diskominfo dan Persandian	Pengembangan Aplikasi Smart City	September	2018	Software	49.890.500,00
113	Diskominfo dan Persandian	Perangkat Lunak Pengujian Keamanan Aplikasi S	September	2018	Software	143.697.973,63
114	Diskominfo dan Persandian	Perangkat Lunak Pengujian Keamanan Aplikasi S	September	2018	Software	23.146.063,04
115	Diskominfo dan Persandian	Perangkat Lunak Pengujian Keamanan Aplikasi S	September	2018	Software	71.256.184,64
116	Diskominfo dan Persandian	Pengembangan Datawarehouse	Oktober	2018	Software	50.910.000,00
117	Diskominfo dan Persandian	Licency Virtualisasi	Oktober	2018	Software	220.200.000,00
118	Diskominfo dan Persandian	Licency Virtualisasi	Oktober	2018	Software	51.480.000,00
119	Diskominfo dan Persandian	Licency Streaming	Nopember	2018	Software	38.000.000,00
120	Diskominfo dan Persandian	Licency XiBo For Android	Nopember	2018	Software	25.800.000,00
121	Diskominfo dan Persandian	Licency Visio Profesional	Nopember	2018	Software	16.900.000,00
122	Diskominfo dan Persandian	Licency Xen Server	Desember	2018	Software	45.280.000,00
123	Diskominfo dan Persandian	Pembangunan Aplikasi SIG	Desember	2018	Software	49.993.000,00
124	Diskominfo dan Persandian	Software Aplikasi e-Tax	Desember	2018	Software	140.879.500,00
125	Diskominfo dan Persandian	Pembangunan Aplikasi SIM e-Kinerja	Desember	2018	Software	49.148.000,00
126	Diskominfo dan Persandian	Pengembangan Aplikasi ASET	Desember	2018	Software	68.893.000,00
127	Diskominfo dan Persandian	Integrasi OSS dan Customisasi Aplikasi	Desember	2018	Software	98.839.000,00
128	Diskominfo dan Persandian	Pengembangan Aplikasi SIM Monev	Juli	2018	Software	9.900.000,00
129	Diskominfo dan Persandian	Pemeliharaan Database Pemerintahan Terpadu	Agustus	2018	Software	9.900.000,00
130	Diskominfo dan Persandian	Pengembangan Aplikasi Pajak Bumi dan Banguna	Oktober	2018	Software	9.900.000,00
131	Diskominfo dan Persandian	Pemeliharaan SIMAPATDA	Desember	2018	Software	9.900.000,00
132	Diskominfo dan Persandian	Pemeliharaan SIM Presensi	Mei	2018	Software	9.900.000,00
133	Diskominfo dan Persandian	Pemeliharaan SIM Presensi	Maret	2018	Software	9.900.000,00
134	Diskominfo dan Persandian	Pembangunan Aplikasi e-Gov	Mei	2018	Software	50.589.450,00
135	Diskominfo dan Persandian	Pembangunan Portal Website	Juni	2018	Software	50.121.000,00
136	Diskominfo dan Persandian	Pembangunan Aplikasi e-Gov II	September	2019	Software	49.867.500,00
137	Diskominfo dan Persandian	Pembangunan Aplikasi e-Gov I	Oktober	2019	Software	99.384.000,00
138	Diskominfo dan Persandian	Pembangunan Aplikasi e-Gov III	November	2019	Software	48.330.000,00
139	Diskominfo dan Persandian	Pembangunan Aplikasi e-Gov IV	Desember	2019	Software	50.064.000,00
140	Diskominfo dan Persandian	Pemeliharaan Aplikasi Pendaftaran PKB Online	September	2019	Software	9.900.000,00

No	SKPD	Uraian	Perolehan		lasifikasi Ass	Nilai
			Bulan	Tahun		
141	Diskominfo dan Persandian	Pemeliharaan SIM Pemberdayaan (Penambahan Modul Intervensi Pelatihan)	Maret	2019	Software	9.900.000,00
142	Diskominfo dan Persandian	Perbaikan SIM Presensi	Mei	2019	Software	9.900.000,00
143	Diskominfo dan Persandian	Perbaikan SIM Pemberdayaan Masyarakat	Agustus	2019	Software	9.900.000,00
144	Diskominfo dan Persandian	Perbaikan SIM PKB	Maret	2019	Software	9.900.000,00
145	Diskominfo dan Persandian	Lisensi Xibo For Android	Maret	2019	Software	11.600.000,00
146	Diskominfo dan Persandian	Lisensi Vast Vivotek	Maret	2019	Software	24.625.000,00
147	Diskominfo dan Persandian	Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Jogja Smart City (JSS)	Maret	2019	Software	720.000,00
148	Diskominfo dan Persandian	Pengembangan Aplikasi Layanan Pajak	Desember	2019	Software	49.659.500,00
149	Diskominfo dan Persandian	Implementasi Aplikasi Sistem Manajemen Alat Transportasi	Desember	2019	Software	49.742.000,00
150	Diskominfo dan Persandian	Pembangunan Aplikasi Kanal Tunggal Layanan Pembayaran Pajak Non PBB dan Retribusi	September	2019	Software	49.544.500,00
151	Diskominfo dan Persandian	Pembangunan SIM Aplikasi Smart Data Tahun 2019	Oktober	2019	Software	49.247.000,00
152	Diskominfo dan Persandian	Pemeliharaan Webservice PBB dan Retribusi Pasar	Oktober	2019	Software	9.900.000,00
153	Diskominfo dan Persandian	Pengembangan dan Optimalisasi Service Data Kependudukan (Web Service NIK)	Oktober	2019	Software	9.900.000,00
154	Diskominfo dan Persandian	Perbaikan Aplikasi Web Bappeda (Aplikasi Jurnal Pemeliharaan dan Pengembangan Kota Yk.	Mei	2019	Software	9.900.000,00
155	Diskominfo dan Persandian	Integrasi pelayanan aduan kedaruratan, kebakaran dan layanan mobil jenazah dengan aplikasi Tracking Kendaraan	Desember	2019	Software	9.900.000,00
156	Diskominfo dan Persandian	Pengembangan SISMIOP	Desember	2019	Software	9.900.000,00
157	Diskominfo dan Persandian	Lisensi SIP Phone	Agustus	2019	Software	75.675.000,00
158	Diskominfo dan Persandian	Billing System	Agustus	2019	Software	25.000.000,00
159	Diskominfo dan Persandian	Lisensi SIP Phone	November	2019	Software	75.675.000,00
160	Diskominfo dan Persandian	Perpanjangan Licency Alat pemindai	November	2019	Software	200.379.242,00
161	<b>Jumlah Diskominfo</b>					<b>5.452.318.953,31</b>
162	DPDPK (Pemberian dari KPP Pratama)	SISMIOP	-	2012	Software	-
163	DPDPK (Pemberian dari KPP Pratama)	SIM Pos PBB	-	2009	Software	-
164	DPDPK	SIPKD	-	2008	Software	-
165		Pengembangan Aplikasi SIPKD	Desember	2013	Software	14.190.000,00
166		Pengembangan Aplikasi SIPKD	Desember	2014	Software	49.775.000,00
167	DPDPK	Aplikasi Lampiran Perda APBD	Desember	2016	Software	15.000.000,00
	<b>Jumlah BPKAD</b>					<b>78.965.000,00</b>



No	SKPD	Uraian	Perolehan		lasifikasi Ass	Nilai
			Bulan	Tahun		
168	Dinas Perijinan	Aplikasi Advice Planning dan SMS Gateway'	Oktober	2010	Software	93.785.000,00
169	Dinas Perijinan	SIM Dokumen IMBB	Nopember	2007	Software	48.136.000,00
170		Software Penyempurnaan IMBB	Oktober	2011	Software	44.770.000,00
171	Dinas Perijinan	SIM Domain perijinan	Desember	2008	Software	48.144.000,00
172		Redesign Sub Domain perijinan	April	2012	Software	25.475.000,00
173	Dinas Perijinan	Penyempurnaan SIM Perijinan	Nopember	2009	Software	43.500.000,00
174		Penyempurnaan SIM Perijinan	Juni	2012	Software	82.308.000,00
175		Pengembangan SIM Perijinan	Juli	2013	Software	70.665.000,00
176		Pengembangan SIM Perijinan	Juni	2015	Software	48.015.000,00
177		Pengembangan SIM Perijinan (Pembangunan Ap	Desember	2016	Software	46.282.500,00
178	Dinas Perijinan	Software Perijinan Online	Juli	2011	Software	43.140.000,00
179	Dinas Perijinan	Pembangunan Aplikasi Pengawasan dan Pengad	Agustus	2014	Software	45.292.500,00
180	Dinas Perijinan	Pembangunan Aplikasi IKM dengan touchpad	September	2014	Software	19.442.500,00
181	Dinas Perijinan	Pembangunan Aplikasi Data Induk	Oktober	2014	Software	46.255.000,00
182	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	IKM dengan Touchpad	Desember	2017	Software	19.442.500,00
183	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	SIM Aplikasi Perizinan	Desember	2017	Software	44.534.000,00
184	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	SIM Aplikasi Informasi Digital	Desember	2017	Software	40.114.200,00
185	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Aplikasi Android	April	2018	Software	36.759.800,00
186	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Pengembangan Subdomain	Maret	2018	Software	43.945.000,00
187	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Pengembangan SIM Perizinan (Online)	Agustus	2018	Software	48.730.000,00
188	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Aplikasi Potensi Investasi	Agustus	2019	Software	58.520.000,00
189	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Pengembangan SIM Perizinan	Nopember	2019	Software	75.735.000,00
	<b>Jumlah Dinas Perijinan dan Penanaman Modal</b>					<b>1.072.991.000,00</b>
172	Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah	Software Perpustakaan (SIPRUS)	-	2009	Software	6.500.000,00
173	Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah	Software Perpustakaan Digital	-	2009	Software	4.000.000,00
174	Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah	Pemeliharaan Website Perpustakaan	November	2012	Software	8.000.000,00
175	DPK	Pengembangan Aplikasi INLISLite	Oktober	2019	Software	99.748.000,00
	<b>Jumlah Dinas Perpustakaan dan Kearsian</b>					<b>118.248.000,00</b>
176	UPT Pusat Bisnis Dinas Pengelolaan Pas	Software Keuangan	September	2015	Software	29.584.500,00
	<b>Jumlah UPT Pusat Bisnis</b>					<b>29.584.500,00</b>
177	Bagian Organisasi	Sistem Manajemen Mutu Kantor Arpusda	Desember	2016	Software	38.999.950,00
178	Bagian Organisasi	Sistem Manajemen Mutu RSUD	Desember	2016	Software	68.000.000,00
179	Bagian Organisasi	Sertifikasi ISO	Desember	2016	Software	30.000.000,00
	<b>Jumlah Bagian Organisasi</b>					<b>136.999.950,00</b>
180	DINHUB	Software VISSIM	November	2017	Software	126.500.000,00
	<b>Jumlah Dinas Perhubungan</b>					<b>126.500.000,00</b>

No	SKPD	Uraian	Perolehan		lasifikasi Ass	Nilai
			Bulan	Tahun		
181	Dinas Pendidikan	Pembangunan SIM Aplikasi LI		2017	Software	56.257.000,00
182	Dinas Pendidikan	Pembangunan SIM Aplikasi Pengelolaan Keuangan Sekolah		2017	Software	56.889.500,00
183	Dinas Pendidikan	SIM Aplikasi TPMBK	Maret	2018	Software	49.426.465,00
184	Dinas Pendidikan	Pembangunan SIM Aplikasi JPD	Mei	2018	Software	45.968.065,00
185	Dinas Pendidikan	Pengembangan SIM LI	Desember	2018	Software	48.954.565,00
186	Dinas Pendidikan	Pembangunan SIM e-learning	Desember	2018	Software	48.828.065,00
187	Dinas Pendidikan	Pembangunan SIM Aplikasi Teleconference	Desember	2018	Software	44.802.065,00
188	Dinas Pendidikan	Pengembangan SIM Apli e PPKS	Desember	2018	Software	35.948.000,00
189	Dinas Pendidikan	Pengembangan SIM JPD	Desember	2019	Software	48.646.400,00
190	Dinas Pendidikan	Pengembangan Sistem Pendidikan	Desember	2019	Software	49.139.860,00
191	Dinas Pendidikan	Pengembangan SIM Aplikasi E-Learning	Desember	2019	Software	49.153.060,00
192	Dinas Pendidikan	Pembangunan SIM Aplikasi PAK	Desember	2019	Software	49.223.900,00
193	Dinas Pendidikan	Pembangunan Aplikasi Server Backbone	Desember	2019	Software	28.319.000,00
194	Dinas Pendidikan	Pengembangan SIM Aplikasi KBS	Desember	2019	Software	49.153.060,00
195	Dinas Pendidikan	Pengembangan SIM Pengelolaan Keuangan	Desember	2019	Software	49.287.700,00
196	Dinas Pendidikan	OFICCICE HOME&STUDENT 2016 1 PC + PPN	Desember	2016	Software	1.424.500,00
197	Dinas Pendidikan	OFICCICE HOME&STUDENT 2016 1 PC + PPN	Desember	2016	Software	1.424.500,00
198	Dinas Pendidikan	OFICCICE HOME&STUDENT 2016 1 PC + PPN	Desember	2016	Software	1.424.500,00
199	Dinas Pendidikan	Pengadaan Software Animasi PAI SD	Desember	2013	Software	880.000,00
	<b>Jumlah Dinas pendidikan</b>					<b>715.150.205,00</b>
200	Bag. Layanan Pengadaan	Pendampingan ISO 9001:2015	Desember	2017	Software	30.000.000,00
201	Bag. Layanan Pengadaan	Aplikasi Monitoring Layanan Pengadaan	Desember	2017	Software	49.500.000,00
202	Bag. Layanan Pengadaan	Sub Domain Bagian Layanan Pengadaan	Desember	2017	Software	33.962.500,00
	<b>Jumlah Bagian Layanan Pengadaan</b>					<b>113.462.500,00</b>
203	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Aplikasi Management LED & Antrian	November	2017	Software	207.720.800,00
204	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Software Alat Baca Sidik Jari	November	2018	Software	40.000.000,00
205	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Software Aplikasi Lisensi	November	2019	Software	7.000.000,00
	<b>Jumlah Dindukcapil</b>					<b>254.720.800,00</b>
206	Dinas Kesehatan	Software dan mastering database barcode barang	Desember	2017	Software	24.073.580,00
207	Dinas Kesehatan	Software Aplikasi E-Regulasi Perizinan dan Sertifikasi	Desember	2017	Software	26.590.000,00
208	Dinas Kesehatan	software	Desember	2018	Software	778.950,00
209	Dinas Kesehatan	software	Desember	2018	Software	778.950,00
210	Dinas Kesehatan	Software mastering database	Desember	2017	Software	24.073.580,00
211	Dinas Kesehatan	Software Sismadak	Desember	2018	Software	16.029.800,00
	<b>Jumlah Dinas Kesehatan</b>					<b>92.324.860,00</b>
212	Dinas DaldukKB	SIM KB	Desember	2018	Software	47.841.000,00
	<b>Jumlah Dinas DaldukKB</b>					<b>47.841.000,00</b>
213	Disperindag	Software IKM	Desember	2019	Software	89.859.000,00
	<b>Jumlah Disperindag</b>					<b>89.859.000,00</b>

No	SKPD	Uraian	Perolehan		lasifikasi Ass	Nilai
			Bulan	Tahun		
214	DPUPKP	Pendataan Penghuni Tahap II	Desember	2019	Software	37.745.000,00
215	DPUPKP	Updating SIM Pendataan Penanganan Permukiman Kumuh	November	2019	Software	44.794.000,00
	<b>Jumlah DPUPKP</b>					<b>82.539.000,00</b>
	<b>JUMLAH</b>					<b>12.218.054.271,13</b>

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**ASET TAK BERWUJUD-KAJIAN**  
**Per 31 Desember 2019**

No	SKPD	Uraian	Perolehan		Klasifikasi Asset	Nilai Kajian	Perhitungan Dengan Kebijakan Baru						Nilai Bersih ATB Dengan Kebijakan Baru	
			Bulan	Tahun			Masa Manfaat (bulan)	Amortisasi per Bulan	Masa Pemakaian	Amortisasi 2018	Akumulasi Amortisasi s.d 2018	Amortisasi 2019		Akumulasi Amortisasi s.d 2019
1	DISHUB	Survei Tarikan dan Bangkitan Pekerjaan serta kebutuhan Ruang Parkir Pusat Perbelanjaan	Desember	2014	Kajian	123.365.000,00	36	3.426.805,56	36	-	123.365.000,00	-	123.365.000,00	-
2	DISHUB	Survey dan Updating kinerja lalu lintas (Volume dan Kecepatan)	Desember	2014	Kajian	142.000.000,00	36	3.944.444,44	36	-	142.000.000,00	-	142.000.000,00	-
3	DISHUB	Grand Design Intelligent Transport System Yogyakarta	Desember	2014	Kajian	108.585.000,00	36	3.016.250,00	36	-	108.585.000,00	-	108.585.000,00	-
4	DISHUB	Audit Keselamatan Jalan Kota Yogyakarta	Desember	2014	Kajian	49.527.500,00	36	1.375.763,89	36	-	49.527.500,00	-	49.527.500,00	-
5	DISHUB	Kajian Simpang Kota Yogyakarta	Desember	2014	Kajian	48.372.500,00	36	1.343.680,56	36	-	48.372.500,00	-	48.372.500,00	-
6	DISHUB	Studi Pembukaan Akses Jalan Baru	Desember	2013	Kajian	49.256.000,00	36	1.368.222,22	36	-	49.256.000,00	-	49.256.000,00	-
7	DISHUB	Penyusunan Data Base Kinerja Lalu Lintas	Desember	2013	Kajian	49.505.000,00	36	1.375.138,89	36	-	49.505.000,00	-	49.505.000,00	-
8	DISHUB	Studi Formulasi Kebijakan Transportasi Kota Yogyakarta	Desember	2012	Kajian	113.355.000,00	36	3.148.750,00	36	-	113.355.000,00	-	113.355.000,00	-
9	DISHUB	Survei strategis Pengelolaan Perlintasan Kereta Api di Kota Yogyakarta	Desember	2012	Kajian	109.450.000,00	36	3.040.277,78	36	-	109.450.000,00	-	109.450.000,00	-
10	DISHUB	SIM KTB	Desember	2010	Kajian	19.700.000,00	36	547.222,22	36	-	19.700.000,00	-	19.700.000,00	-
11	DISHUB	Survei Tarikan dan Bangkitan Pekerjaan Serta Kebutuhan Ruang Parkir Kegiatan Pendidikan	Desember	2015	Kajian	100.000.000,00	36	2.777.777,78	36	33.333.333,33	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-
12	DISHUB	Kajian Manajemen Lalu Lintas Kawasan	Desember	2015	Kajian	139.535.000,00	36	3.875.972,22	36	46.511.666,67	139.535.000,00	-	139.535.000,00	-
13	DISHUB	Survei Grand Design Sistem Satu Arah di Kota Yogyakarta	Desember	2015	Kajian	49.852.000,00	36	1.384.777,78	36	16.617.333,33	49.852.000,00	-	49.852.000,00	-
14	DISHUB	Kajian Alternatif Pool Bus Wisata	Desember	2015	Kajian	49.500.000,00	36	1.375.000,00	36	16.500.000,00	49.500.000,00	-	49.500.000,00	-
15	DISHUB	Pengadaan Pekerjaan Jasa Konsultasi DED Pengembangan Taman Keselamatan Lalu Lintas	Desember	2015	Kajian	24.750.000,00	36	687.500,00	36	8.250.000,00	24.750.000,00	-	24.750.000,00	-
16	DISHUB	Kajian Pengembangan Microcell Telekomunikasi	Oktober	2015	Kajian	44.960.000,00	36	1.248.888,89	36	12.488.888,89	44.960.000,00	-	44.960.000,00	-
17	DISHUB	Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Dishub Kota Tahun 2015	Juli	2015	Kajian	44.950.000,00	36	1.248.611,11	36	8.740.277,78	44.950.000,00	-	44.950.000,00	-
18	DISHUB	Survey Penyusunan Data Angkutan KTB (Andong dan Becak)	Oktober	2016	Kajian	49.857.500,00	36	1.384.930,56	36	16.619.166,67	36.008.194,44	13.849.305,56	49.857.500,00	-
19	DISHUB	Survey Penyusunan Jaringan Lintas di Kota Yogyakarta	November	2016	Kajian	49.830.000,00	36	1.384.166,67	36	16.610.000,00	34.604.166,67	15.225.833,33	49.830.000,00	-
20	DISHUB	Survey Bangkitan dan Tarikan Perjalanan serta kebutuhan parkir kegiatan hotel/penginapan	Desember	2016	Kajian	145.835.000,00	36	4.050.972,22	36	48.611.666,67	97.223.333,33	48.611.666,67	145.835.000,00	-
21	DISHUB	Kajian Manajemen Lalu Lintas Kawasan	Desember	2016	Kajian	141.835.000,00	36	3.939.861,11	36	47.278.333,33	94.556.666,67	47.278.333,33	141.835.000,00	-
22	DISHUB	Survey updating kinerja lalu lintas jalan (volume per kapasitas dan kecepatan)	Desember	2016	Kajian	49.362.500,00	36	1.371.180,56	36	16.454.166,67	32.908.333,33	16.454.166,67	49.362.500,00	-
23	DISHUB	Survey penyusunan trayek angkutan umum perkotaan berbasis wisata di Kota Yogyakarta	Desember	2016	Kajian	49.800.000,00	36	1.383.333,33	36	16.600.000,00	33.200.000,00	16.600.000,00	49.800.000,00	-
24	DISHUB	Survey Bangkitan dan Tarikan Perjalanan dan Kebutuhan Parkir Pusat Layanan Kesehatan	Oktober	2017	Kajian	127.975.000,00	36	3.554.861,11	26	42.658.333,33	49.768.055,56	42.658.333,33	92.426.388,89	35.548.611,11
25	DISHUB	Survey Tarikan dan Bangkitan Perjalanan dan Kebutuhan Parkir Pasar Tradisional	Oktober	2017	Kajian	102.360.000,00	36	2.843.333,33	26	34.120.000,00	39.806.666,67	34.120.000,00	73.926.666,67	28.433.333,33
26	DISHUB	Survey Updating Kinerja Lalu Lintas Jalan	Oktober	2017	Kajian	136.020.000,00	36	3.778.333,33	26	45.340.000,00	52.896.666,67	45.340.000,00	98.236.666,67	37.783.333,33
27	DISHUB	Survey Manajemen Rekrayasa Lalu Lintas Kawasan	Oktober	2017	Kajian	189.417.200,00	36	5.261.588,89	26	63.139.066,67	73.662.244,44	63.139.066,67	136.801.311,11	52.615.888,89
28	DISHUB	Survey Penyusunan Jaringan Trayek Bus Sekolah di Kota Yogyakarta	Oktober	2017	Kajian	45.178.000,00	36	1.254.944,44	26	15.059.333,33	17.569.222,22	15.059.333,33	32.628.555,56	12.549.444,44
29	DISHUB	Penyusunan Desain dan Rencana Penempatan Sarana dan Prasarana KTB	Oktober	2017	Kajian	45.308.000,00	36	1.258.555,56	26	15.102.666,67	17.619.777,78	15.102.666,67	32.722.444,44	12.585.555,56
30	DISHUB	Survey Normalisasi Simpang	Agustus	2018	Kajian	213.488.400,00	36	5.930.233,33	16	23.720.933,33	23.720.933,33	71.162.800,00	94.883.733,33	118.604.666,67

No	SKPD	Uraian	Bulan	Tahun	Klasifikasi Asset	Nilai Kajian	Masa Manfaat (bulan)	Amortisasi per Bulan	Masa Pemakaian	Amortisasi 2018	Akumulasi Amortisasi s.d 2018	Amortisasi 2019	Akumulasi Amortisasi s.d 2019	Nilai Bersih ATB Dengan Kebijakan Baru
												-		
31	DISHUB	Survey Bangkitan dan Tarikan Perjalanan dan Kebutuhan Parkir Gedung Pertemuan dan Restoran	Oktober	2018	Kajian	103.895.000,00	36	2.885.972,22	14	5.771.944,44	5.771.944,44	34.631.666,67	40.403.611,11	63.491.388,89
32	DISHUB	Penyusunan Database Angkutan Umum, Agen Angkutan Umum dan Pool Angkutan Umum di Kota Yogyakarta Tahun 2018	Oktober	2018	Kajian	49.773.000,00	36	1.382.583,33	14	2.765.166,67	2.765.166,67	16.591.000,00	19.356.166,67	30.416.833,33
33	DISHUB	Survey Bangkitan dan Tarikan Perjalanan dan Kebutuhan Parkir Bangunan Perkantoran dan Jasa Keuangan	November	2018	Kajian	100.100.000,00	36	2.780.555,56	13	2.780.555,56	2.780.555,56	33.366.666,67	36.147.222,22	63.952.777,78
34	DISHUB	Updating Kinerja Lalu Lintas	Desember	2018	Kajian	103.015.000,00	36	2.861.527,78	12	-	-	34.338.333,33	34.338.333,33	68.676.666,67
35	DISHUB	Konsultasi Penelitian Naskah Akademik Perda	Oktober	2019	Kajian	74.910.000,00	36	2.080.833,33	2	-	-	4.161.666,67	4.161.666,67	70.748.333,33
36	DISHUB	Survey Normalisasi Simpang	November	2019	Kajian	217.234.000,00	36	6.034.277,78	1	-	-	6.034.277,78	6.034.277,78	211.199.722,22
37	DISHUB	Survey Bangkitan dan Tarikan Perjalanan dan Kebutuhan Parkir Bangunan Perkantoran dan Jasa Keuangan	November	2019	Kajian	114.000.000,00	36	3.166.666,67	1	-	-	3.166.666,67	3.166.666,67	110.833.333,33
38	DISHUB	Dokumen Kajian Rute Aman Selamat Sekolah Tahun 2019	Desember	2019	Kajian	49.947.000,00	36	1.387.416,67	0	-	-	-	-	49.947.000,00
39	DISHUB	Survey Inventarisasi dan Kebutuhan Sarpras Lalu Lintas	Desember	2019	Kajian	191.180.000,00	36	5.310.555,56	0	-	-	-	-	191.180.000,00
40	DISHUB	Survey Penyusunan Database Angkutan Barang, Jasa Titipan, Ekspedisi dan Paket di Kota Yogyakarta Tahun 2019	Desember	2019	Kajian	49.775.000,00	36	1.382.638,89	0	-	-	-	-	49.775.000,00
		<b>SUB TOTAL DINAS PERHUBUNGAN</b>				<b>3.666.758.600,00</b>		<b>101.854.405,56</b>		<b>555.072.833,33</b>	<b>1.881.524.927,78</b>	<b>576.891.783,33</b>	<b>2.458.416.711,11</b>	<b>1.208.341.888,89</b>
41	P3ADK	Pengadaan Rencana Aksi Pengembangan Investasi di Lokasi Strategis Berkembang di Kota Yogyakarta	Juni	2010	Kajian	96.580.000,00	36	2.682.777,78	36	-	96.580.000,00	-	96.580.000,00	-
42	P3ADK	Penyusunan Dokumen Izin Prinsip Pendirian PT. BPRS Jogja Bidang Hukum	Nopember	2010	Kajian	9.000.000,00	36	250.000,00	36	-	9.000.000,00	-	9.000.000,00	-
43	P3ADK	Penyusunan Dokumen Izin Prinsip Pendirian PT. BPRS Jogja Bidang Ekonomi Syariah	Nopember	2010	Kajian	9.000.000,00	36	250.000,00	36	-	9.000.000,00	-	9.000.000,00	-
44	P3ADK	Studi Potensi (sensus) Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum (TJU) di Kota Yogyakarta tahun 2010	Nopember	2010	Kajian	220.955.000,00	36	6.137.638,89	36	-	220.955.000,00	-	220.955.000,00	-
45	P3ADK	Perencanaan Potensi Izin Gangguan (HO) di Kota Yogyakarta	Nopember	2010	Kajian	30.630.000,00	36	850.833,33	36	-	30.630.000,00	-	30.630.000,00	-
46	P3ADK	Pekerjaan Jasa Konsultansi Studi Rencana Aksi Pengembangan Investasi (RAPI) di Lokasi Strategis Berkembang di Kota Yogyakarta (wilayah Kecamatan Keraton, Ngampilan, Wirobrajan, Tegalrejo, dan Danurejan)	Juli	2011	Kajian	82.093.000,00	36	2.280.361,11	36	-	82.093.000,00	-	82.093.000,00	-
47	P3ADK	Analisa/perhitungan nilai optimalisasi pemanfaatan barang/aset daerah (Kajian Finansial Penyediaan Jaringan Intranet di Wilayah Kota Yogyakarta)	Nopember	2011	Kajian	39.754.000,00	36	1.104.277,78	36	-	39.754.000,00	-	39.754.000,00	-
48	P3ADK	Pekerjaan jasa konsultansi analisa/perhitungan nilai optimalisasi pemanfaatan barang/aset daerah (Kajian Pengembangan Pasar Ikan Higienis di Kota Yogyakarta)	Nopember	2011	Kajian	38.937.800,00	36	1.081.605,56	36	-	38.937.800,00	-	38.937.800,00	-
49	P3ADK	Studi Potensi Izin Gangguan (HO) di Kota Yogyakarta (Kecamatan Umbulharjo dan Kecamatan Kotagede)	Oktober	2011	Kajian	167.622.000,00	36	4.656.166,67	36	-	167.622.000,00	-	167.622.000,00	-
50	P3ADK	Studi Rencana Aksi Pengembangan Investasi (RAPI) di Lokasi Strategis Berkembang di Kota Yogyakarta (Wilayah Kec. Jetis, Gedongtengen, Gondokusuman, Pakualaman dan Gondomanan)	Agustus	2012	Kajian	119.250.000,00	36	3.312.500,00	36	-	119.250.000,00	-	119.250.000,00	-
51	P3ADK	Studi Potensi Parkir di TKP di Kota Yogyakarta	September	2012	Kajian	169.140.000,00	36	4.698.333,33	36	-	169.140.000,00	-	169.140.000,00	-
52	P3ADK	Studi Potensi Pajak Hotel di Kota Yogyakarta	September	2012	Kajian	201.098.000,00	36	5.586.055,56	36	-	201.098.000,00	-	201.098.000,00	-
53	P3ADK	Studi Potensi Pajak Restoran di Kota Yogyakarta	September	2012	Kajian	267.433.000,00	36	7.428.694,44	36	-	267.433.000,00	-	267.433.000,00	-
54	P3ADK	Studi Potensi Retribusi Izin Gangguan di Kota Yogyakarta (Kec. Mergangsan, Kec. Kraton, Kec. Pakualaman, Kec. Gondomanan dan Kec. Mantrijeron)	Nopember	2013	Kajian	222.637.500,00	36	6.184.375,00	36	-	222.637.500,00	-	222.637.500,00	-
55	P3ADK	Studi Potensi Retribusi Izin Gangguan di Kota Yogyakarta (Kec. Jetis, Kec. Tegalrejo, Kec. Gedongtengen, Kec. Wirobrajan dan Kec. Ngampilan)	Desember	2013	Kajian	239.352.000,00	36	6.648.666,67	36	-	239.352.000,00	-	239.352.000,00	-
56	P3ADK	Penyusunan Informasi Peluang Usaha Sektor Prioritas I (Pariwisata) di Kota Yogyakarta	September	2014	Kajian	149.940.000,00	36	4.165.000,00	36	-	149.940.000,00	-	149.940.000,00	-

No	SKPD	Uraian	Bulan	Tahun	Klasifikasi Asset	Nilai Kajian	Masa Manfaat (bulan)	Amortisasi per Bulan	Masa Pemakaian	Amortisasi 2018	Akumulasi Amortisasi s.d 2018	Amortisasi 2019	Akumulasi Amortisasi s.d 2019	Nilai Bersih ATB Dengan Kebijakan Baru
												-		
57	P3ADK	Kajian Daya Tampung dan Sirkulasi Pengunjung Taman Pintar Kota Yogyakarta	Oktober	2014	Kajian	49.604.500,00	36	1.377.902,78	36	-	49.604.500,00	-	49.604.500,00	-
58	P3ADK	Studi Potensi Pajak Hiburan di Kota Yogyakarta	September	2014	Kajian	133.150.000,00	36	3.698.611,11	36	-	133.150.000,00	-	133.150.000,00	-
59	P3ADK	Studi Potensi Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum di jalan Malioboro dan Jalan A Yani di Kota Yogyakarta	Nopember	2014	Kajian	135.150.000,00	36	3.754.166,67	36	-	135.150.000,00	-	135.150.000,00	-
60	P3ADK	Studi Potensi Retribusi Pelayanan Pasar di Kota Yogyakarta	Nopember	2014	Kajian	208.450.000,00	36	5.790.277,78	36	-	208.450.000,00	-	208.450.000,00	-
61	P3ADK	Penyusunan Informasi Peluang Usaha Sektor Prioritas I di Kota Yogyakarta (swakelola)	September	2015	Kajian	154.787.600,00	36	4.299.655,56	36	38.696.900,00	154.787.600,00	-	154.787.600,00	-
62	P3ADK	Penyusunan Naskah Akademik Pemberian Insentif dan pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kota	Oktober	2015	Kajian	79.950.000,00	36	2.220.833,33	36	17.766.666,67	75.508.333,33	4.441.666,67	79.950.000,00	-
63	P3ADK	Study Review Potensi Pajak Hotel di Kota Yogyakarta Tahun 2015	September	2015	Kajian	148.305.000,00	36	4.119.583,33	36	37.076.250,00	148.305.000,00	-	148.305.000,00	-
64	P3ADK	Kajian Optimalisasi Pemungutan Pajak Restoran pada Pedagang Kaki Lima (PKL)	September	2015	Kajian	49.990.000,00	36	1.388.611,11	36	12.497.500,00	49.990.000,00	-	49.990.000,00	-
65	P3ADK	Kajian Review Tarif Retribusi Jasa Umum Tahun 2015	September	2015	Kajian	49.661.500,00	36	1.379.486,11	36	12.415.375,00	49.661.500,00	-	49.661.500,00	-
66	P3ADK	Kajian Review Tarif Retribusi Jasa Usaha Tahun 2015	September	2015	Kajian	48.689.000,00	36	1.352.472,22	36	12.172.250,00	48.689.000,00	-	48.689.000,00	-
67	P3ADK	Study Review Potensi Pajak Restoran di Kota Yogyakarta Tahun 2016	Oktober	2016	Kajian	148.785.000,00	36	4.132.916,67	36	49.595.000,00	107.455.833,33	41.329.166,67	148.785.000,00	-
68	P3ADK	Kajian Optimalisasi Pemungutan Retribusi Rumah	Juni	2016	Kajian	50.908.000,00	36	1.414.111,11	36	16.969.333,33	42.423.333,33	8.484.666,67	50.908.000,00	-
69	P3ADK	Penyusunan Tarif Layanan BLUD Puskesmas di Kota Yogyakarta	September	2016	Kajian	84.950.000,00	36	2.359.722,22	36	28.316.666,67	63.712.500,00	21.237.500,00	84.950.000,00	-
70	P3ADK	Penyusunan Informasi Peluang Usaha Sektor/Bidang Jasa Kota Yogyakarta	Oktober	2016	Kajian	204.950.000,00	36	5.693.055,56	36	68.316.666,67	148.019.444,44	56.930.555,56	204.950.000,00	-
71	P3ADK	Belanja Pekerjaan Kajian Optimalisasi Pemungutan	Maret	2017	Kajian	49.976.000,00	36	1.388.222,22	33	16.658.666,67	29.152.666,67	16.658.666,67	45.811.333,33	4.164.666,67
72	P3ADK	Belanja Pekerjaan Kajian optimalisasi pemungutan	Juni	2017	Kajian	49.751.000,00	36	1.381.972,22	30	16.583.666,67	24.875.500,00	16.583.666,67	41.459.166,67	8.291.833,33
73	P3ADK	belanja modal dan konsultasi	September	2017	Kajian	11.604.000,00	36	322.333,33	27	3.868.000,00	4.835.000,00	3.868.000,00	8.703.000,00	2.901.000,00
74	P3ADK	Kajian Pengaruh Variabel Makro terhadap Kinerja Keuangan Daerah	Juni	2018	Kajian	49.874.000,00	36	1.385.388,89	18	8.312.333,33	8.312.333,33	16.624.666,67	24.937.000,00	24.937.000,00
75	P3ADK	Penelitian Penyusunan Kajian Kebutuhan Pendirian BPR Syariah di Kota Yogyakarta	Oktober	2018	Kajian	144.450.000,00	36	4.012.500,00	14	8.025.000,00	8.025.000,00	48.150.000,00	56.175.000,00	88.275.000,00
76	P3ADK	BPR Syariah	Januari	2019	Kajian	285.000.000,00	36	7.916.666,67	11	-	-	87.083.333,33	87.083.333,33	197.916.666,67
77	P3ADK	BPR Syariah	Oktober	2019	Kajian	57.215.812,50	36	1.589.328,13	2	-	-	3.178.656,25	3.178.656,25	54.037.156,25
78	P3ADK	Review Potensi Pajak Hotel	November	2019	Kajian	106.257.937,50	36	2.951.609,38	1	-	-	2.951.609,38	2.951.609,38	103.306.328,13
79	P3ADK	Audit Pengawasan Aset Eks Ps. Rekonegaran	November	2019	Kajian	11.627.000,00	36	322.972,22	1	-	-	322.972,22	322.972,22	11.304.027,78
		<b>SUB TOTAL P3ADK</b>				<b>4.376.508.650,00</b>		<b>121.569.684,72</b>		<b>347.270.275,00</b>	<b>3.553.529.844,44</b>	<b>327.845.126,74</b>	<b>3.881.374.971,18</b>	<b>495.133.678,82</b>
80	BAPPEDA	Kajian Rencana Pengembangan Jalur Transportasi Non Motoris dan Pedestrian (dengan Perguruan Tinggi)	November	2014	Kajian	108.000.000,00	36	3.000.000,00	36	-	108.000.000,00	-	108.000.000,00	-
81	BAPPEDA	Kajian Pengembangan TOD Stasiun Lempuyangan (dengan Perguruan Tinggi)	Oktober	2014	Kajian	108.400.000,00	36	3.011.111,11	36	-	108.400.000,00	-	108.400.000,00	-
82	BAPPEDA	Kajian Penataan Pasar Terban (dengan Perguruan Tinggi)	Agustus	2014	Kajian	109.238.000,00	36	3.034.388,89	36	-	109.238.000,00	-	109.238.000,00	-
83	BAPPEDA	Penyusunan Kajian Kawasan Cagar Budaya Tuk	Agustus	2014	Kajian	51.290.800,00	36	1.424.744,44	36	-	51.290.800,00	-	51.290.800,00	-
84	BAPPEDA	Kajian Efisiensi dan Efektifitas Kendaraan Dinas	November	2014	Kajian	96.343.150,00	36	2.676.198,61	36	-	96.343.150,00	-	96.343.150,00	-
85	BAPPEDA	FS Bahasa Jawa sebagai Pengantar Pendidikan	November	2014	Kajian	98.586.000,00	36	2.738.500,00	36	-	98.586.000,00	-	98.586.000,00	-
86	BAPPEDA	FS Manajemen Pengembangan Kemandirian Perajin	November	2014	Kajian	96.491.850,00	36	2.680.329,17	36	-	96.491.850,00	-	96.491.850,00	-
87	BAPPEDA	Penyusunan Kajian Kawasan Baciro	Agustus	2014	Kajian	51.241.840,00	36	1.423.384,44	36	-	51.241.840,00	-	51.241.840,00	-
88	BAPPEDA	Penyusunan RP4D (dengan Perguruan Tinggi Negeri)	November	2014	Kajian	109.746.750,00	36	3.048.520,83	36	-	109.746.750,00	-	109.746.750,00	-
89	BAPPEDA	Penyusunan RIPJM (dengan Perguruan Tinggi Negeri)	September	2014	Kajian	109.592.750,00	36	3.044.243,06	36	-	109.592.750,00	-	109.592.750,00	-

No	SKPD	Uraian	Bulan	Tahun	Klasifikasi Asset	Nilai Kajian	Masa Manfaat (bulan)	Amortisasi per Bulan	Masa Pemakaian	Amortisasi 2018	Akumulasi Amortisasi s.d 2018	Amortisasi 2019	Akumulasi Amortisasi s.d 2019	Nilai Bersih ATB Dengan Kebijakan Baru
90	BAPPEDA	Penyusunan Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Kualitas Lingkungan Kota Yogyakarta( dengan Perguruan Tinggi Negeri)	November	2014	Kajian	108.899.300,00	36	3.024.980,56	36	-	108.899.300,00	-	108.899.300,00	-
91	BAPPEDA	Pekerjaan Pendataan Rumah Tidak Layak Huni	Agustus	2014	Kajian	202.413.350,00	36	5.622.593,06	36	-	202.413.350,00	-	202.413.350,00	-
92	BAPPEDA	Penyusunan Grand Disain Sungai Gajah Wong	September	2014	Kajian	52.657.000,00	36	1.462.694,44	36	-	52.657.000,00	-	52.657.000,00	-
93	BAPPEDA	Jurnal Penelitian	Desember	2014	Penelitian	26.748.250,00	36	743.006,94	36	-	26.748.250,00	-	26.748.250,00	-
94	BAPPEDA	Dokumen Penelitian	Desember	2014	Penelitian	56.918.390,00	36	1.581.066,39	36	-	56.918.390,00	-	56.918.390,00	-
95	BAPPEDA	Rencana Aksi RTH Tahap II	Agustus	2010	Kajian	288.292.125,00	36	8.008.114,58	36	-	288.292.125,00	-	288.292.125,00	-
96	BAPPEDA	Rencana Aksi Pengembangan Pariwisata Kota Yogyakarta Tahap II	Oktober	2010	Kajian	103.153.700,00	36	2.865.380,56	36	-	103.153.700,00	-	103.153.700,00	-
97	BAPPEDA	Pengembangan Kota Layak Anak (KLA)	Oktober	2011	Kajian	82.000.000,00	36	2.277.777,78	36	-	82.000.000,00	-	82.000.000,00	-
98	BAPPEDA	Penyusunan Kajian Akademis Penyusunan Draft Perda RIPP Kota Yogyakarta	Oktober	2011	Kajian	75.000.000,00	36	2.083.333,33	36	-	75.000.000,00	-	75.000.000,00	-
99	BAPPEDA	Studi Model Layanan Rumah Sakit	September	2012	Kajian	45.000.000,00	36	1.250.000,00	36	-	45.000.000,00	-	45.000.000,00	-
100	BAPPEDA	Kajian Tata Kelola Pemukiman Kota Yogyakarta	Juni	2013	Kajian	48.500.000,00	36	1.347.222,22	36	-	48.500.000,00	-	48.500.000,00	-
101	BAPPEDA	Kajian dan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat	November	2013	Kajian	48.500.000,00	36	1.347.222,22	36	-	48.500.000,00	-	48.500.000,00	-
102	BAPPEDA	Pekerjaan Penyusunan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Ungkitan	Juni	2011	Kajian	45.000.000,00	36	1.250.000,00	36	-	45.000.000,00	-	45.000.000,00	-
103	BAPPEDA	Pekerjaan Penyusunan Evaluasi Pelaksanaan Program Jaring Pengaman Sosial	Juni	2011	Kajian	45.000.000,00	36	1.250.000,00	36	-	45.000.000,00	-	45.000.000,00	-
104	BAPPEDA	Dokumen Revitalisasi Penataan Kawasan Sungai Gajah Wong	September	2013	Kajian	51.614.750,00	36	1.433.743,06	36	-	51.614.750,00	-	51.614.750,00	-
105	BAPPEDA	Dokumen Grand Design Penataan Kawasan Sungai Winongo Kota Yk	September	2013	Kajian	52.065.750,00	36	1.446.270,83	36	-	52.065.750,00	-	52.065.750,00	-
106	BAPPEDA	Dokumen Grand Design Penataan Kawasan Sungai Code Kota Yk	September	2013	Kajian	51.451.000,00	36	1.429.194,44	36	-	51.451.000,00	-	51.451.000,00	-
107	BAPPEDA	Naskah Akademik RPJM 2017-2021	Oktober	2015	Kajian	282.787.100,00	36	7.855.197,22	36	78.551.972,22	282.787.100,00	-	282.787.100,00	-
108	BAPPEDA	Kajian Perencanaan Pembangunan Kota Inklusif	Desember	2015	Kajian	52.598.000,00	36	1.461.055,56	36	17.532.666,67	52.598.000,00	-	52.598.000,00	-
109	BAPPEDA	Kajian Taman Kanak-Kanak Negeri Kota Yk	September	2015	Kajian	118.820.000,00	36	3.300.555,56	36	29.705.000,00	118.820.000,00	-	118.820.000,00	-
110	BAPPEDA	Review Dokumen Strategi Sanitasi Kota Yk dan	September	2015	Kajian	155.771.000,00	36	4.326.972,22	36	38.942.750,00	155.771.000,00	-	155.771.000,00	-
111	BAPPEDA	Penyusunan Kajian Filosofi Tata Ruang Kraton	September	2015	Kajian	51.688.000,00	36	1.435.777,78	36	12.922.000,00	51.688.000,00	-	51.688.000,00	-
112	BAPPEDA	Pekerjaan Penjaringan Aspirasi Masyarakat	Desember	2015	Kajian	124.024.300,00	36	3.445.119,44	36	41.341.433,33	124.024.300,00	-	124.024.300,00	-
113	BAPPEDA	Kajian Pengembangan Bahasa Jawa Sebagai Pengantar	Desember	2015	Kajian	94.034.600,00	36	2.612.072,22	36	31.344.866,67	94.034.600,00	-	94.034.600,00	-
114	BAPPEDA	Kajian Pengembangan Fisik Bangunan Etnis Eropa di	September	2015	Kajian	52.963.300,00	36	1.471.202,78	36	13.240.825,00	52.963.300,00	-	52.963.300,00	-
115	BAPPEDA	Kajian Kawasan Strategis	November	2015	Kajian	110.035.000,00	36	3.056.527,78	36	33.621.805,56	110.035.000,00	-	110.035.000,00	-
116	BAPPEDA	Penyusunan Evaluasi RPJPD	Oktober	2015	Kajian	179.720.000,00	36	4.992.222,22	36	49.922.222,22	179.720.000,00	-	179.720.000,00	-
117	BAPPEDA	Kajian Hunian Berimbang	November	2015	Kajian	195.875.000,00	36	5.440.972,22	36	59.850.694,44	195.875.000,00	-	195.875.000,00	-
118	BAPPEDA	Kajian Perencanaan Transportasi Perkotaan	Oktober	2016	Kajian	118.488.900,00	36	3.291.358,33	36	39.496.300,00	85.575.316,67	32.913.583,33	118.488.900,00	-
119	BAPPEDA	Kajian Smart City	Juli	2016	Kajian	167.862.000,00	36	4.662.833,33	36	55.954.000,00	135.222.166,67	32.639.833,33	167.862.000,00	-
120	BAPPEDA	Kajian Ruang Terbuka Air	Juli	2016	Kajian	117.850.000,00	36	3.273.611,11	36	39.283.333,33	94.934.722,22	22.915.277,78	117.850.000,00	-
121	BAPPEDA	Kajian Lingkungan Hidup Strategis	November	2016	Kajian	111.355.200,00	36	3.093.200,00	36	37.118.400,00	77.330.000,00	34.025.200,00	111.355.200,00	-
122	BAPPEDA	Kajian Pengembangan Kampung Wisata	Desember	2016	Kajian	49.640.000,00	36	1.378.888,89	36	16.546.666,67	33.093.333,33	16.546.666,67	49.640.000,00	-
123	BAPPEDA	Penyusunan Peta Geospasial Bangunan Cagar Budaya	November	2016	Kajian	57.209.200,00	36	1.589.144,44	36	19.069.733,33	39.728.611,11	17.480.588,89	57.209.200,00	-
124	BAPPEDA	Penyusunan Data/Peta Wilayah Berbasis Rukun Warga	Juni	2016	Kajian	246.662.100,00	36	6.851.725,00	36	82.220.700,00	205.551.750,00	41.110.350,00	246.662.100,00	-
125	BAPPEDA	Peninjauan Kembali Perda No. 2 Th 2010 tentang	Desember	2016	Kajian	150.000.000,00	36	4.166.666,67	36	50.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	150.000.000,00	-
126	BAPPEDA	Kajian Kawasan Pinggir Sungai Gajah Wong	November	2016	Kajian	48.889.000,00	36	1.358.027,78	36	16.296.694,44	33.950.694,44	14.938.305,56	48.889.000,00	-
127	BAPPEDA	Review Dokumen Grand Design Sungai Code	Desember	2016	Kajian	49.137.000,00	36	1.364.916,67	36	16.379.000,00	32.758.000,00	16.379.000,00	49.137.000,00	-
128	BAPPEDA	Kajian Hunian Perkotaan	November	2016	Kajian	167.726.250,00	36	4.659.062,50	36	55.908.750,00	116.476.562,50	51.249.687,50	167.726.250,00	-
129	BAPPEDA	Kajian Kawasan Tumbuh Cepat Yogya Selatan	November	2016	Kajian	237.375.000,00	36	6.593.750,00	36	79.125.000,00	164.843.750,00	72.531.250,00	237.375.000,00	-
130	BAPPEDA	Dokumen Kajian Ekososbud Kawasan Permukiman Kumuh	Desember	2016	Kajian	138.100.000,00	36	3.836.111,11	36	46.033.333,33	92.066.666,67	46.033.333,33	138.100.000,00	-
131	BAPPEDA	Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Kota Inklusif	November	2016	Kajian	99.075.000,00	36	2.752.083,33	36	33.025.000,00	68.802.083,33	30.272.916,67	99.075.000,00	-

No	SKPD	Uraian	Bulan	Tahun	Klasifikasi Asset	Nilai Kajian	Masa Manfaat (bulan)	Amortisasi per Bulan	Masa Pemakaian	Amortisasi 2018	Akumulasi Amortisasi s.d 2018	Amortisasi 2019	Akumulasi Amortisasi s.d 2019	Nilai Bersih ATB Dengan Kebijakan Baru
132	BAPPEDA	Masterplan Transportasi Perkotaan	November	2017	Kajian	266.299.375,00	36	7.397.204,86	25	88.766.458,33	96.163.663,19	88.766.458,33	184.930.121,53	81.369.253,47
133	BAPPEDA	Kajian Smart City Tahap II	Oktober	2017	Kajian	177.707.000,00	36	4.936.305,56	26	59.235.666,67	69.108.277,78	59.235.666,67	128.343.944,44	49.363.055,56
134	BAPPEDA	Penyusunan Ropmap Sistem Inovasi daerah	Agustus	2017	Kajian	34.878.750,00	36	968.854,17	28	11.626.250,00	15.501.666,67	11.626.250,00	27.127.916,67	7.750.833,33
135	BAPPEDA	Kegiatan Penyusunan Investasiasi Buku Hasil	November	2017	Kajian	53.566.450,00	36	1.487.956,94	25	17.855.483,33	19.343.440,28	17.855.483,33	37.198.923,61	16.367.526,39
136	BAPPEDA	Penyusunan Data Jalan Beruas Kota Yogyakarta	Agustus	2017	Kajian	264.025.000,00	36	7.334.027,78	28	88.008.333,33	117.344.444,44	88.008.333,33	205.352.777,78	58.672.222,22
137	BAPPEDA	Analisa Data Statistik	April	2017	Kajian	109.730.200,00	36	3.048.061,11	32	36.576.733,33	60.961.222,22	36.576.733,33	97.537.955,56	12.192.244,44
138	BAPPEDA	Penyusunan Modal Data (Instrumen) Profil RW Kota	Oktober	2017	Kajian	65.000.000,00	36	1.805.555,56	26	21.666.666,67	25.277.777,78	21.666.666,67	46.944.444,44	18.055.555,56
139	BAPPEDA	Kajian Kelayakan Rumah Susun Kota Yogyakarta	November	2017	Kajian	159.993.700,00	36	4.444.269,44	25	53.331.233,33	57.775.502,78	53.331.233,33	111.106.736,11	48.886.963,89
140	BAPPEDA	Analisa Fiskal Daeah	Oktober	2017	Kajian	90.000.000,00	36	2.500.000,00	26	30.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	65.000.000,00	25.000.000,00
141	BAPPEDA	Pengembangan Potensi Pasar Tradisional	Oktober	2018	Kajian	252.314.000,00	36	7.008.722,22	14	14.017.444,44	14.017.444,44	84.104.666,67	98.122.111,11	154.191.888,89
142	BAPPEDA	Penguatan Rencana Kerja Sistem Inovasi Daerah	Desember	2018	Kajian	91.462.000,00	36	2.540.611,11	12	-	-	30.487.333,33	30.487.333,33	60.974.666,67
143	BAPPEDA	Rancangan Sistem Informasi Warga Kelurahan	Desember	2018	Kajian	80.000.000,00	36	2.222.222,22	12	-	-	26.666.666,67	26.666.666,67	53.333.333,33
144	BAPPEDA	Desain Becak Njogiani	Desember	2018	Kajian	50.000.000,00	36	1.388.888,89	12	-	-	16.666.666,67	16.666.666,67	33.333.333,33
145	BAPPEDA	Kajian Optimalisasi Aset Daerah	Desember	2018	Kajian	201.782.000,00	36	5.605.055,56	12	-	-	67.260.666,67	67.260.666,67	134.521.333,33
146	BAPPEDA	Kajian Review Pemanfaatan Aset Daerah	Desember	2018	Kajian	111.390.700,00	36	3.094.186,11	12	-	-	37.130.233,33	37.130.233,33	74.260.466,67
147	BAPPEDA	Dokumen Penelitian	Desember	2018	Kajian	217.986.281,87	36	6.055.174,50	12	-	-	72.662.093,96	72.662.093,96	145.324.187,91
148	BAPPEDA	Dokumen Penelitian Strategi Tematik	Desember	2018	Kajian	152.032.400,00	36	4.223.122,22	12	-	-	50.677.466,67	50.677.466,67	101.354.933,33
149	BAPPEDA	Pendataan Jamban Tidak Aman Kota Yogyakarta	Juli	2018	Kajian	101.662.000,00	36	2.823.944,44	17	14.119.722,22	14.119.722,22	33.887.333,33	48.007.055,56	53.654.944,44
150	BAPPEDA	Kajian Evaluasi Hasil Musrenbang	Desember	2018	Kajian	130.185.000,00	36	3.616.250,00	12	-	-	43.395.000,00	43.395.000,00	86.790.000,00
151	BAPPEDA	SDGS Kota Yogyakarta	November	2018	Kajian	170.000.000,00	36	4.722.222,22	13	4.722.222,22	4.722.222,22	56.666.666,67	61.388.888,89	108.611.111,11
152	BAPPEDA	Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan	September	2018	Kajian	168.335.700,00	36	4.675.991,67	15	14.027.975,00	14.027.975,00	56.111.900,00	70.139.875,00	98.195.825,00
153	BAPPEDA	Analisis money follow program dalam rpjmd 2017-	Desember	2018	Kajian	149.400.000,00	36	4.150.000,00	12	-	-	49.800.000,00	49.800.000,00	99.600.000,00
154	BAPPEDA	Analisis Data Statistik	November	2018	Kajian	152.951.500,00	36	4.248.652,78	13	4.248.652,78	4.248.652,78	50.983.833,33	55.232.486,11	97.719.013,89
155	BAPPEDA	Kajian Perhitungan Karbon Footprint Kota	November	2018	Kajian	200.345.000,00	36	5.565.138,89	13	5.565.138,89	5.565.138,89	66.781.666,67	72.346.805,56	127.998.194,44
156	BAPPEDA	Kajian Pengembangan Ruang Kreativitas Anak Muda	Desember	2018	Kajian	75.680.000,00	36	2.102.222,22	12	-	-	25.226.666,67	25.226.666,67	50.453.333,33
157	BAPPEDA	Evaluasi Cooperate Social Responsibilite (CSR) terhadap pembentukan karakter berbasis sociopreneur.	November	2019	Kajian	25.000.000,00	36	694.444,44	1	-	-	694.444,44	694.444,44	24.305.555,56
158	BAPPEDA	Program healing per group sebagai pencegahan dan	Oktober	2019	Kajian	25.000.000,00	36	694.444,44	2	-	-	1.388.888,89	1.388.888,89	23.611.111,11
159	BAPPEDA	Kajian Industri Kreatif Fasion terhadap perkembangan	Oktober	2019	Kajian	25.000.000,00	36	694.444,44	2	-	-	1.388.888,89	1.388.888,89	23.611.111,11
160	BAPPEDA	Penerapan internet of thing ( iot) pada aplikasi sistem	November	2019	Kajian	30.000.000,00	36	833.333,33	1	-	-	833.333,33	833.333,33	29.166.666,67
161	BAPPEDA	Pemetaan aset komunitas terkait layanan kesehatan dan	Desember	2019	Kajian	25.000.000,00	36	694.444,44	0	-	-	-	-	25.000.000,00
162	BAPPEDA	Upaya pengembangan taman pintar Jogjakarta menjadi	Oktober	2019	Kajian	25.000.000,00	36	694.444,44	2	-	-	1.388.888,89	1.388.888,89	23.611.111,11
163	BAPPEDA	Study Pendahuluan Penyediaan Ducting	September	2019	Kajian	100.000.000,00	36	2.777.777,78	3	-	-	8.333.333,33	8.333.333,33	91.666.666,67
164	BAPPEDA	Kajian Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Siswa	Juli	2019	Kajian	200.000.000,00	36	5.555.555,56	5	-	-	27.777.777,78	27.777.777,78	172.222.222,22
165	BAPPEDA	Perancangan Inovasi Daerah Kota Yogyakarta	Desember	2019	Kajian	100.000.000,00	36	2.777.777,78	0	-	-	-	-	100.000.000,00
166	BAPPEDA	Kajian Pengembangan Potensi Wilayah di Kampung Dukuh.	Oktober	2019	Kajian	50.000.000,00	36	1.388.888,89	2	-	-	2.777.777,78	2.777.777,78	47.222.222,22
167	BAPPEDA	Kajian Kota Seni dan Budaya	Desember	2019	Kajian	125.000.000,00	36	3.472.222,22	0	-	-	-	-	125.000.000,00
168	BAPPEDA	Kajian Pengembangan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Kec. Tegalrejo dan Wirobrajan	November	2019	Kajian	100.000.000,00	36	2.777.777,78	1	-	-	2.777.777,78	2.777.777,78	97.222.222,22
169	BAPPEDA	Kajian Potensi Zakat Infaq Sodaqoh Berbasis Teknologi Informasi di Kota Yogyakarta	November	2019	Kajian	10.000.000,00	36	277.777,78	1	-	-	277.777,78	277.777,78	9.722.222,22
		<b>SUB TOTAL BAPPEDA</b>				<b>9.866.557.761,87</b>		<b>274.071.048,94</b>		<b>1.457.200.766,67</b>	<b>5.573.971.862,64</b>	<b>1.702.250.567,57</b>	<b>7.276.222.430,21</b>	<b>2.590.335.331,66</b>
170	DISPETARU	Dok. Kajian Ev RT/RW	Agustus	2017	Kajian	267.165.600,00	36	7.421.266,67	28	89.055.200,00	118.740.266,67	89.055.200,00	207.795.466,67	59.370.133,33
171	DISPETARU	Dok. Kajian Blok Kawasan Strategis	September	2017	Kajian	215.682.200,00	36	5.991.172,22	27	71.894.066,67	89.867.583,33	71.894.066,67	161.761.650,00	53.920.550,00
172	DISPETARU	Dok. RTBL Kawasan Jl. Solo	Oktober	2017	Kajian	272.618.878,00	36	7.572.746,61	26	90.872.959,33	106.018.452,56	90.872.959,33	196.891.411,89	75.727.466,11
173	DISPETARU	Dok. Review RTBL Kawasan Kotabaru	Desember	2017	Kajian	57.807.850,00	36	1.605.773,61	24	19.269.283,33	19.269.283,33	19.269.283,33	38.538.566,67	19.269.283,33



No	SKPD	Uraian	Bulan	Tahun	Klasifikasi Asset	Nilai Kajian	Masa Manfaat (bulan)	Amortisasi per Bulan	Masa Pemakaian	Amortisasi 2018	Akumulasi Amortisasi s.d 2018	Amortisasi 2019	Akumulasi Amortisasi s.d 2019	Nilai Bersih ATB Dengan Kebijakan Baru
174	DISPETARU	Kajian Ev. Pemanfaatan Ruang	Desember	2017	Kajian	138.985.950,00	36	3.860.720,83	24	46.328.650,00	46.328.650,00	46.328.650,00	92.657.300,00	46.328.650,00
175	DISPETARU	Neraca Penatagunaan tanah, Sumber daya air, udara dan Sumber daya lainnya	Desember	2017	Kajian	228.463.000,00	36	6.346.194,44	24	76.154.333,33	76.154.333,33	76.154.333,33	152.308.666,67	76.154.333,33
176	DISPETARU	Dok. Updating Peta RT/RW	Desember	2017	Kajian	111.356.225,00	36	3.093.228,47	24	37.118.741,67	37.118.741,67	37.118.741,67	74.237.483,33	37.118.741,67
177	DISPETARU	Dokumen Revisi RTRW	Agustus	2018	Kajian	191.728.799,73	36	5.325.799,99	16	21.303.199,97	21.303.199,97	63.909.599,91	85.212.799,88	106.515.999,85
178	DISPETARU	Dokumen Penyempurnaan Peta RTRW	September	2018	Kajian	100.524.000,00	36	2.792.333,33	15	8.377.000,00	8.377.000,00	33.508.000,00	41.885.000,00	58.639.000,00
179	DISPETARU	Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis	November	2018	Kajian	250.966.175,00	36	6.971.282,64	13	6.971.282,64	6.971.282,64	83.655.391,67	90.626.674,31	160.339.500,69
180	DISPETARU	Dokumen Persandingan RTRW	Desember	2018	Kajian	65.912.000,00	36	1.830.888,89	12	-	-	21.970.666,67	21.970.666,67	43.941.333,33
181	DISPETARU	Dokumen RTBL Kawasan Mangkubumi	Desember	2018	Kajian	343.080.000,00	36	9.530.000,00	12	-	-	114.360.000,00	114.360.000,00	228.720.000,00
182	DISPETARU	Dokumen RTBL Kawasan Jetis	Agustus	2018	Kajian	220.085.615,00	36	6.113.489,31	16	24.453.957,22	24.453.957,22	73.361.871,67	97.815.828,89	122.269.786,11
183	DISPETARU	Dokumen Rancangan 3 Dimensi (Skyline) Pengaturan	Desember	2018	Kajian	98.376.000,00	36	2.732.666,67	12	-	-	32.792.000,00	32.792.000,00	65.584.000,00
184	DISPETARU	Kajian Studi Model dan Bentuk Kompensasi terhadap	November	2018	Kajian	51.733.000,00	36	1.437.027,78	13	1.437.027,78	1.437.027,78	17.244.333,33	18.681.361,11	33.051.638,89
185	DISPETARU	Kajian Evaluasi dan Potensi Rumah Susun di Kota Yk.	November	2018	Kajian	50.978.300,00	36	1.416.063,89	13	1.416.063,89	1.416.063,89	16.992.766,67	18.408.830,56	32.569.469,44
186	DISPETARU	Kajian Pengembangan Kawasan Tumbuh Cepat	Agustus	2018	Kajian	178.278.927,27	36	4.952.192,42	16	19.808.769,70	19.808.769,70	59.426.309,09	79.235.078,79	99.043.848,48
187	DISPETARU	Kajian Pengembangan Kawasan Koridor Ipda Tut	Desember	2018	Kajian	65.254.600,00	36	1.812.627,78	12	-	-	21.751.533,33	21.751.533,33	43.503.066,67
188	DISPETARU	Kajian Evaluasi Pemanfaatan Ruang dan Pertanian	Desember	2018	Kajian	155.957.200,00	36	4.332.144,44	12	-	-	51.985.733,33	51.985.733,33	103.971.466,67
189	DISPETARU	Neraca Penatagunaan Tanah.	Desember	2018	Kajian	385.954.000,00	36	10.720.944,44	12	-	-	128.651.333,33	128.651.333,33	257.302.666,67
190	DISPETARU	Kajian Peringkat Pengendalian Penataan Ruang	Desember	2018	Kajian	50.425.417,45	36	1.400.706,04	12	-	-	16.808.472,48	16.808.472,48	33.616.944,97
191	DISPETARU	Kajian Database Spasial Penataan Ruang	September	2018	Kajian	197.036.300,00	36	5.473.230,56	15	16.419.691,67	16.419.691,67	65.678.766,67	82.098.458,33	114.937.841,67
192	DISPETARU	Peta RTHP Berbasis GIS	November	2018	Kajian	111.925.200,00	36	3.109.033,33	13	3.109.033,33	3.109.033,33	37.308.400,00	40.417.433,33	71.507.766,67
193	DISPETARU	Digitalisasi Dokumen Vital Pertanian	Mei	2018	Kajian	34.226.150,00	36	950.726,39	19	6.655.084,72	6.655.084,72	11.408.716,67	18.063.801,39	16.162.348,61
194	DISPETARU	Kajian Database Sistem Informasi Pertanian	Agustus	2018	Kajian	201.528.000,00	36	5.598.000,00	16	22.392.000,00	22.392.000,00	67.176.000,00	89.568.000,00	111.960.000,00
195	DISPETARU	Amdal kawasan kota baru	Desember	2019	Kajian	580.950.000,00	36	16.137.500,00	0	-	-	-	-	580.950.000,00
196	DISPETARU	RTBL kawasan Taman Siswa	November	2019	Kajian	287.123.800,00	36	7.975.661,11	1	-	-	7.975.661,11	7.975.661,11	279.148.138,89
197	DISPETARU	RTBL Kawasan Gondomanan	Oktober	2019	Kajian	303.075.400,00	36	8.418.761,11	2	-	-	16.837.522,22	16.837.522,22	286.237.877,78
198	DISPETARU	Kajian Pengembangan Kawasan Simpul Irigasi	November	2019	Kajian	102.833.200,00	36	2.856.477,78	1	-	-	2.856.477,78	2.856.477,78	99.976.722,22
199	DISPETARU	Kajian Potensi Pengembangan Kawasan Pendestrian Kawasan Kota Yk	November	2019	Kajian	51.044.400,00	36	1.417.900,00	1	-	-	1.417.900,00	1.417.900,00	49.626.500,00
200	DISPETARU	Kajian Etnografi zona perbatasan dan jasa di kota	November	2019	Kajian	51.690.300,00	36	1.435.841,67	1	-	-	1.435.841,67	1.435.841,67	50.254.458,33
201	DISPETARU	Kajian Evaluasi Pemanfaatan Ruang dan Pertanian	Desember	2019	Kajian	186.095.400,00	36	5.169.316,67	0	-	-	-	-	186.095.400,00
202	DISPETARU	Penyusunan Neraca Penatagunaan Air	November	2019	Kajian	205.128.200,00	36	5.698.005,56	1	-	-	5.698.005,56	5.698.005,56	199.430.194,44
203	DISPETARU	Penyusunan Kajian Pengendalian Penataan Ruang	Oktober	2019	Kajian	102.883.000,00	36	2.857.861,11	2	-	-	5.715.722,22	5.715.722,22	97.167.277,78
204	DISPETARU	Pengembangan dan Updating Sistem Informasi Pertanian	November	2019	Kajian	62.164.300,00	36	1.726.786,11	1	-	-	1.726.786,11	1.726.786,11	60.437.513,89
205	DISPETARU	Pengembangan dan Updating Sistem Informasi Tata Ruang	November	2019	Kajian	201.978.600,00	36	5.610.516,67	1	-	-	5.610.516,67	5.610.516,67	196.368.083,33
206	DISPETARU	Pembuatan Peta Sebaran Bangunan ber IMKB Berbasis GIS	November	2019	Kajian	121.542.800,00	36	3.376.188,89	1	-	-	3.376.188,89	3.376.188,89	118.166.611,11
207	DISPETARU	Pembuatan Video Profil Tata Ruang	November	2019	Kajian	81.074.000,00	36	2.252.055,56	1	-	-	2.252.055,56	2.252.055,56	78.821.944,44
208	DISPETARU	Jasa Konsultasi Potensi konflik Pertanian	Desember	2019	Kajian	47.440.000,00	36	1.317.777,78	0	-	-	-	-	47.440.000,00
209	DISPETARU	Kajian Evaluasi Pemanfaatan Ruang dan Pertanian	Desember	2019	Kajian	186.095.400,00	36	5.169.316,67	0	-	-	-	-	186.095.400,00
		<b>SUB TOTAL DISPETARU</b>				<b>6.617.168.187,45</b>		<b>183.810.227,43</b>		<b>563.036.345,25</b>	<b>625.840.421,81</b>	<b>1.403.585.806,93</b>	<b>2.029.426.228,73</b>	<b>4.587.741.958,72</b>
210	DBGAD	Laporan DED/ Perencanaan	Desember	2012	Kajian	23.034.490,68	36	639.846,96	36	-	23.034.490,68	-	23.034.490,68	-
211	DBGAD	DED Pra Rancang Pendidikan Inklusi	Desember	2013	Kajian	24.183.226,29	36	671.756,29	36	-	24.183.226,29	-	24.183.226,29	-
212	DBGAD	Perencanaan Kecamatan		2009	Kajian	29.667.012,33	36	824.083,68	36	-	29.667.012,33	-	29.667.012,33	-

No	SKPD	Uraian	Bulan	Tahun	Klasifikasi Asset	Nilai Kajian	Masa Manfaat (bulan)	Amortisasi per Bulan	Masa Pemakaian	Amortisasi 2018	Akumulasi Amortisasi s.d 2018	Amortisasi 2019	Akumulasi Amortisasi s.d 2019	Nilai Bersih ATB Dengan Kebijakan Baru
213	DBGAD	Prarancangan Kelurahan		2009	Kajian	48.562.617,12	36	1.348.961,59	36	-	48.562.617,12	-	48.562.617,12	-
214	KIMPRASWIL	Buku Laporan		2008	Kajian	34.450.000,00	36	956.944,44	36	-	34.450.000,00	-	34.450.000,00	-
215	KIMPRASWIL	Buku Laporan		2008	Kajian	43.820.000,00	36	1.217.222,22	36	-	43.820.000,00	-	43.820.000,00	-
216	KIMPRASWIL	Buku Laporan		2008	Kajian	41.750.000,00	36	1.159.722,22	36	-	41.750.000,00	-	41.750.000,00	-
217	KIMPRASWIL	Buku Laporan	Desember	2010	Kajian	44.451.000,00	36	1.234.750,00	36	-	44.451.000,00	-	44.451.000,00	-
218	KIMPRASWIL	Buku Laporan	Desember	2010	Kajian	44.451.000,00	36	1.234.750,00	36	-	44.451.000,00	-	44.451.000,00	-
219	DPUPKP	Review Masterplan Kompleks Balai Kota	Desember	2017	Kajian	50.558.511,80	36	1.404.403,11	24	16.852.837,27	16.852.837,27	16.852.837,27	33.705.674,53	16.852.837,27
220	DPUPKP	Pemeriksaan Keandalan bangunan Kesehatan	Desember	2017	Kajian	51.930.000,00	36	1.442.500,00	24	17.310.000,00	17.310.000,00	17.310.000,00	34.620.000,00	17.310.000,00
221	DPUPKP	Pemeriksaan Keandalan bangunan Pendidikan	Desember	2017	Kajian	51.985.000,00	36	1.444.027,78	24	17.328.333,33	17.328.333,33	17.328.333,33	34.656.666,67	17.328.333,33
222	DPUPKP	Updating Data Ledger	Desember	2017	Kajian	52.105.000,00	36	1.447.361,11	24	17.368.333,33	17.368.333,33	17.368.333,33	34.736.666,67	17.368.333,33
223	DPUPKP	Dok. Blok Kajian Kawasan Strategis	Desember	2017	Kajian	215.682.200,00	36	5.991.172,22	24	71.894.066,67	71.894.066,67	71.894.066,67	143.788.133,33	71.894.066,67
224	DPUPKP	Dok. RTBL Kawasan Jl. Solo	Desember	2017	Kajian	290.525.294,00	36	8.070.147,06	24	96.841.764,67	96.841.764,67	96.841.764,67	193.683.529,33	96.841.764,67
225	DPUPKP	Dok. RTBL Kawasan Jl. Kotabaru	Desember	2017	Kajian	57.807.850,00	36	1.605.773,61	24	19.269.283,33	19.269.283,33	19.269.283,33	38.538.566,67	19.269.283,33
226	DPUPKP	Pendataan penghuni Rusunawa September 2018	September	2018	Kajian	39.000.000,00	36	1.083.333,33	15	3.250.000,00	3.250.000,00	13.000.000,00	16.250.000,00	22.750.000,00
227	DPUPKP	Pemeriksaan keandalan bangunan bidang Kesehatan	April	2018	Kajian	49.070.000,00	36	1.363.055,56	20	10.904.444,44	10.904.444,44	16.356.666,67	27.261.111,11	21.808.888,89
228	DPUPKP	Pemeriksaan keandalan bangunan bidang pemerintahan	Agustus	2018	Kajian	48.520.000,00	36	1.347.777,78	16	5.391.111,11	5.391.111,11	16.173.333,33	21.564.444,44	26.955.555,56
229	DPUPKP	pemeriksaan keandalan bangunan bidang pendidikan	Mei	2018	Kajian	49.126.000,00	36	1.364.611,11	19	9.552.277,78	9.552.277,78	16.375.333,33	25.927.611,11	23.198.388,89
230	DPUPKP	Pendataan Septic tank MBR	Desember	2018	Kajian	49.604.000,00	36	1.377.888,89	12	-	-	16.534.666,67	16.534.666,67	33.069.333,33
231	DPUPKP	Survey kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan layanan Infrastruktur Kota di wilayah	September	2018	Kajian	69.505.000,00	36	1.930.694,44	15	5.792.083,33	5.792.083,33	23.168.333,33	28.960.416,67	40.544.583,33
232	DPUPKP	Pemeriksaan keandalan bangunan Bidang Kesehatan	Juli	2019		51.332.866,67	36	1.425.912,96	5	-	-	7.129.564,82	7.129.564,82	44.203.301,85
233	DPUPKP	Pemeriksaan keandalan bangunan bidang	Desember	2019		51.062.866,67	36	1.418.412,96	0	-	-	-	-	51.062.866,67
234	DPUPKP	Pemeriksaan keandalan Bangunan Bidang	November	2019		51.192.866,67	36	1.422.024,07	1	-	-	1.422.024,07	1.422.024,07	49.770.842,60
235	DPUPKP	Pendataan Septic Tank Tahap I	Desember	2019		97.628.000,00	36	2.711.888,89	0	-	-	-	-	97.628.000,00
236	DPUPKP	Updsting Data Ledger	Desember	2019		50.852.200,00	36	1.412.561,11	0	-	-	-	-	50.852.200,00
237	DPUPKP	Studi Pemenuhan Kewajiban Penyediaan 20% Rusun MBR	Desember	2019		49.808.000,00	36	1.383.555,56	0	-	-	-	-	49.808.000,00
238	DPUPKP	Pendataan kondisi Jalan	Desember	2019		72.842.000,00	36	2.023.388,89	0	-	-	-	-	72.842.000,00
239	DPUPKP	Pendataan Rumah	November	2019		406.711.000,00	36	11.297.527,78	1	-	-	11.297.527,78	11.297.527,78	395.413.472,22
240	DPUPKP	Pendataan Rumah Tahap II	Desember	2019		274.670.000,00	36	7.629.722,22	0	-	-	-	-	274.670.000,00
241	DPUPKP	Pengkajian Konsolidasi Lahap Kel. Pringgokusuman	Desember	2019		48.117.000,00	36	1.336.583,33	0	-	-	-	-	48.117.000,00
242	DPUPKP	Updating Rumah Tidak Layak Huni	Desember	2019		49.193.000,00	36	1.366.472,22	0	-	-	-	-	49.193.000,00
243	DPUPKP	survei Kenuasan Masyarakat bidang Parkim Bina	Oktober	2019		74.442.000,00	36	2.067.833,33	2	-	-	4.135.666,67	4.135.666,67	70.306.333,33
244	DPUPKP	Updating Wajib Retribusi	Oktober	2019		99.825.000,00	36	2.772.916,67	2	-	-	5.545.833,33	5.545.833,33	94.279.166,67
245	DPUPKP	Pendataan PJU Tahap II	Desember	2019		249.562.500,00	36	6.932.291,67	0	-	-	-	-	249.562.500,00
		<b>SUB TOTAL DPUPKP</b>				<b>3.037.027.502,23</b>		<b>84.361.875,06</b>		<b>291.754.535,27</b>	<b>626.123.881,69</b>	<b>388.003.568,60</b>	<b>1.014.127.450,29</b>	<b>2.022.900.051,94</b>
246	Taman Pintar	Kajian kekuatan struktur bangunan gedung kotak Taman Pintar	April	2015	Kajian	24.805.000,00	36	689.027,78	36	2.756.111,11	24.805.000,00	-	24.805.000,00	-
		<b>SUB TOTAL DINAS PARIWISATA</b>				<b>24.805.000,00</b>		<b>689.027,78</b>		<b>2.756.111,11</b>	<b>24.805.000,00</b>	<b>-</b>	<b>24.805.000,00</b>	<b>-</b>
247	Bag. Organisasi	Kajian Kelembagaan Penguatan Organisasi	Desember	2016	Kajian	249.999.750,00	36	6.944.437,50	36	83.333.250,00	166.666.500,00	83.333.250,00	249.999.750,00	-
248	Bag. Organisasi	Konsultasi Perencanaan Penyusunan Standarisasi Kesel	Juli	2017	Kajian	299.816.000,00	36	8.328.222,22	29	99.938.666,67	141.579.777,78	99.938.666,67	241.518.444,44	58.297.555,56
249	Bag. Organisasi	Kajian Kelembagaan Pengelolaan Taman Pintar	Juli	2017	Kajian	99.999.845,00	36	2.777.773,47	29	33.333.281,67	47.222.149,03	33.333.281,67	80.555.430,69	19.444.414,31
250	Bag. Organisasi	Kajian Kelembagaan Pengelolaan Pasar di Lingkungan	Juli	2017	Kajian	99.999.900,00	36	2.777.775,00	29	33.333.300,00	47.222.175,00	33.333.300,00	80.555.475,00	19.444.425,00
251	Bag. Organisasi	Evaluasi Jabatan	Oktober	2018	Kajian	276.000.000,00	36	7.666.666,67	14	15.333.333,33	15.333.333,33	92.000.000,00	107.333.333,33	168.666.666,67
252	Bag. Organisasi	Kajian Kelembagaan Pengelolaan RSUD Kota	Agustus	2018	Kajian	99.996.050,00	36	2.777.668,06	16	11.110.672,22	11.110.672,22	33.332.016,67	44.442.688,89	55.553.361,11
253	Bag. Organisasi	Kajian Pengembangan Aparatur	Desember	2019	Kajian	201.170.000,00	36	5.588.055,56	0	-	-	-	-	201.170.000,00
		<b>SUB TOTAL BAGIAN ORGANISASI</b>				<b>1.326.981.545,00</b>		<b>36.860.598,47</b>		<b>276.382.503,89</b>	<b>429.134.607,36</b>	<b>375.270.515,00</b>	<b>804.405.122,36</b>	<b>522.576.422,64</b>
254	Bag. Administrasi dan Pengendalian Pembangunan	Kajian Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi	Juli	2017	Kajian	54.299.250,00	36	1.508.312,50	29	18.099.750,00	25.641.312,50	18.099.750,00	43.741.062,50	10.558.187,50
		<b>SUB TOTAL BAGIAN ADMINISTRASI dan</b>				<b>54.299.250,00</b>	<b>36</b>	<b>1.508.312,50</b>		<b>18.099.750,00</b>	<b>25.641.312,50</b>	<b>18.099.750,00</b>	<b>43.741.062,50</b>	<b>10.558.187,50</b>

No	SKPD	Uraian	Bulan	Tahun	Klasifikasi Asset	Nilai Kajian	Masa Manfaat (bulan)	Amortisasi per Bulan	Masa Pemakaian	Amortisasi 2018	Akumulasi Amortisasi s.d 2018	Amortisasi 2019	Akumulasi Amortisasi s.d 2019	Nilai Bersih ATB Dengan Kebijakan Baru
255	Dinas kebudayaan	Kajian Budaya Kalana	Mei	2017	Kajian	38.910.000,00	36	1.080.833,33	31	12.970.000,00	20.535.833,33	12.970.000,00	33.505.833,33	5.404.166,67
256	Dinas kebudayaan	Kajian Filosofi dan Makna Keris dalam Budaya Jawa	September	2018	Kajian	44.214.500,00	36	1.228.180,56	15	3.684.541,67	3.684.541,67	14.738.166,67	18.422.708,33	25.791.791,67
257	Dinas kebudayaan	Kajian Sejarah pada Kegiatan Pelestarian dan	Oktober	2018	Kajian	46.685.000,00	36	1.296.805,56	14	2.593.611,11	2.593.611,11	15.561.666,67	18.155.277,78	28.529.722,22
258	Dinas kebudayaan	Penelitian Pendataan Tata Nilai Budaya nDalem-nDalem Kepangeranan 2018	Desember	2018	Kajian	59.500.000,00	36	1.652.777,78	12	-	-	19.833.333,33	19.833.333,33	39.666.666,67
259	Dinas kebudayaan	Kajian/ Penyusunan Data Bangunan Warisan Budaya 2018	Desember	2018	Kajian	91.014.000,00	36	2.528.166,67	12		-	30.338.000,00	30.338.000,00	60.676.000,00
260	Dinas kebudayaan	Kajian Penyusunan Bangunan Cagar Budaya	April	2019	Kajian	45.000.000,00	36	1.250.000,00	8			10.000.000,00	10.000.000,00	35.000.000,00
261	Dinas kebudayaan	Kajian Pengembangan Teknologi Arsitektur Bangunan Tradisional Jawa	September	2019	Kajian	69.960.000,00	36	1.943.333,33	3			5.830.000,00	5.830.000,00	64.130.000,00
262	Dinas kebudayaan	Kajian Filosofi dan Makna Batik Yogyakarta	September	2019	Kajian	60.000.000,00	36	1.666.666,67	3			5.000.000,00	5.000.000,00	55.000.000,00
263	Dinas kebudayaan	Kajian Penataan Fisik Lingkungan Budaya Bintaran	Agustus	2019	Kajian	79.450.000,00	36	2.206.944,44	4			8.827.777,78	8.827.777,78	70.622.222,22
264	Dinas kebudayaan	Kajian Pelestarian dan Pengembangan Museum Kalang Kotagede dan Living Museum Bintaran	Agustus	2019	Kajian	79.500.000,00	36	2.208.333,33	4			8.833.333,33	8.833.333,33	70.666.666,67
265	Dinas kebudayaan	Kajian Pemuktahiran Data Bangunan Cagar Budaya Kota Yogyakarta	Oktober	2019	Kajian	79.525.000,00	36	2.209.027,78	2			4.418.055,56	4.418.055,56	75.106.944,44
266	Dinas kebudayaan	Kajian Sejarah Lokal Toponim Kota Yogyakarta	November	2019	Kajian	45.000.000,00	36	1.250.000,00	1			1.250.000,00	1.250.000,00	43.750.000,00
267	Dinas kebudayaan	Kajian Sejarah Lokal Kelurahan Budaya di Kota Yogyakarta	November	2019	Kajian	45.000.000,00	36	1.250.000,00	1			1.250.000,00	1.250.000,00	43.750.000,00
		<b>SUB TOTAL DINAS KEBUDAYAAN</b>				<b>783.758.500,00</b>	<b>36</b>	<b>21.771.069,44</b>		<b>19.248.152,78</b>	<b>26.813.986,11</b>	<b>138.850.333,33</b>	<b>165.664.319,44</b>	<b>618.094.180,56</b>
268	Dinas Pertanian dan	Jasa Konsultasi Penelitian/Pembuatan Data Base Bid	November	2017	Kajian	49.582.500,00	36	1.377.291,67	25	16.527.500,00	17.904.791,67	16.527.500,00	34.432.291,67	15.150.208,33
269	Dinas Pertanian dan Pangan	Jasa Konsultasi Grand Desain Kampung Agro Rejowinangun	November	2017	Kajian	48.915.680,00	36	1.358.768,89	25	16.305.226,67	17.663.995,56	16.305.226,67	33.969.222,22	14.946.457,78
270	Dinas Pertanian dan	Jasa Konsultasi Grand Desain Plasma Nuffah Pisang	November	2017	Kajian	49.190.680,00	36	1.366.407,78	25	16.396.893,33	17.763.301,11	16.396.893,33	34.160.194,44	15.030.485,56
271	Dinas Pertanian dan	Pembuatan Database Ketahanan Pangan (Kajian	September	2018	Kajian	49.757.000,00	36	1.382.138,89	15	4.146.416,67	4.146.416,67	16.585.666,67	20.732.083,33	29.024.916,67
272	Dinas Pertanian dan Pangan	Database ketahanan pangan dpp	November	2019	Kajian	49.775.000,00	36	1.382.638,89	1	-	-	1.382.638,89	1.382.638,89	48.392.361,11
		<b>SUB TOTAL DINAS PERTANIAN DAN PANGAN</b>				<b>247.220.860,00</b>		<b>6.867.246,11</b>		<b>53.376.036,67</b>	<b>57.478.505,00</b>	<b>67.197.925,56</b>	<b>124.676.430,56</b>	<b>122.544.429,44</b>

No	SKPD	Uraian	Bulan	Tahun	Klasifikasi Asset	Nilai Kajian	Masa Manfaat (bulan)	Amortisasi per Bulan	Masa Pemakaian	Amortisasi 2018	Akumulasi Amortisasi s.d 2018	Amortisasi 2019	Akumulasi Amortisasi s.d 2019	Nilai Bersih ATB Dengan Kebijakan Baru
273	DINKES	Pelayanan kesehatan primer dan rujukan kajian	Sep	2017	Kajian	39.347.000,00	36	1.092.972,22	27	13.115.666,67	16.394.583,33	13.115.666,67	29.510.250,00	9.836.750,00
274	DINKES	Review buku panduan Penobatan Puskesmas	Sen	2017	Kajian	39.897.000,00	36	1.108.250,00	27	13.299.000,00	16.623.750,00	13.299.000,00	29.922.750,00	9.974.250,00
275	DINKES	Jasa penilaian manfaat sertifikat produk pangan industri rumah tangga terhadap industri rumah tangga pangan	Okt	2017	Kajian	44.500.000,00	36	1.236.111,11	26	14.833.333,33	17.305.555,56	14.833.333,33	32.138.888,89	12.361.111,11
276	DINKES	Review buku pedoman Penanganan bencana bidang	Okt	2017	Kajian	39.913.500,00	36	1.108.708,33	26	13.304.500,00	15.521.916,67	13.304.500,00	28.826.416,67	11.087.083,33
277	DINKES	Jasa penilaian aplikasi perizinan dan sertifikasi bidang Kesehatan	Nov	2017	Kajian	44.900.000,00	36	1.247.222,22	25	14.966.666,67	16.213.888,89	14.966.666,67	31.180.555,56	13.719.444,44
278	DINKES	Jasa Pemutakhiran data Unit Layanan Kefarmasian	Des	2017	Kajian	44.660.000,00	36	1.240.555,56	24	14.886.666,67	14.886.666,67	14.886.666,67	29.773.333,33	14.886.666,67
279	DINKES	Jasa Pemutakhiran data PKRT	Des	2017	Kajian	39.875.000,00	36	1.107.638,89	24	13.291.666,67	13.291.666,67	13.291.666,67	26.583.333,33	13.291.666,67
280	DINKES	Jasa Review Fomas Tingkat Kota	Des	2017	Kajian	44.500.000,00	36	1.236.111,11	24	14.833.333,33	14.833.333,33	14.833.333,33	29.666.666,67	14.833.333,33
281	DINKES	Jasa Penyusunan Comendium Alkes tingkat	Des	2017	Kajian	44.715.000,00	36	1.242.083,33	24	14.905.000,00	14.905.000,00	14.905.000,00	29.810.000,00	14.905.000,00
282	DINKES	Penyusunan review Formularium revisi Kota Yogyakarta	Des	2017	Kajian	44.500.000,00	36	1.236.111,11	24	14.833.333,33	14.833.333,33	14.833.333,33	29.666.666,67	14.833.333,33
283	DINKES	Penyusunan Kajian review EHRA 2018	Juni	2018	Kajian	149.988.300,00	36	4.166.341,67	18	24.998.050,00	24.998.050,00	49.996.100,00	74.994.150,00	74.994.150,00
284	DINKES	Penyusunan DPLH (Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup) di Puskesmas Danurejan 2	Juni	2018	Kajian	48.785.000,00	36	1.355.138,89	18	8.130.833,33	8.130.833,33	16.261.666,67	24.392.500,00	24.392.500,00
285	DINKES	Penilaian kepatuhan rumah sakit dalam menentukan standar evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku	Juli	2018	Kajian	46.640.000,00	36	1.295.555,56	17	6.477.777,78	6.477.777,78	15.546.666,67	22.024.444,44	24.615.555,56
		<b>SUB TOTAL DINAS KESEHATAN</b>				<b>672.220.800,00</b>		<b>18.672.800,00</b>		<b>181.875.827,78</b>	<b>194.416.355,56</b>	<b>224.073.600,00</b>	<b>418.489.955,56</b>	<b>253.730.844,44</b>
286	DISKOMINFO	Dok. Kajian Penyusunan Site Audit Menara	Okt	2017	Kajian	49.070.000,00	36	1.361.666,67	26	16.340.000,00	19.063.333,33	16.340.000,00	35.403.333,33	13.616.666,67
287	DISKOMINFO	Dok. Sistem Monitoring & Ev. Pengendalian Menara	Okt	2017	Kajian	49.080.000,00	36	1.363.333,33	26	16.360.000,00	19.086.666,67	16.360.000,00	35.446.666,67	13.633.333,33
288	DISKOMINFO	Dok. Kajian Pengembangan Microcell Telekomunikasi	Okt	2017	Kajian	44.960.000,00	36	1.248.888,89	26	14.986.666,67	17.484.444,44	14.986.666,67	32.471.111,11	12.488.888,89
289	DISKOMINFO	Kajian Titik Lokasi Menara Telekomunikasi	Okt	2017	Kajian	21.177.000,00	36	588.250,00	26	7.059.000,00	8.235.500,00	7.059.000,00	15.294.500,00	5.882.500,00
290	DISKOMINFO	Kajian Pengembangan Microcell Telekomunikasi	Oktober	2015	Kajian	44.960.000,00	36	1.248.888,89	36	12.488.888,89	44.960.000,00	-	44.960.000,00	-
291	DISKOMINFO	Dokumen Kajian Penyusunan Site Audit Menara telekomunikasi	Des	2013	Kajian	49.020.000,00	36	1.361.666,67	36	-	49.020.000,00	-	49.020.000,00	-
292	DISKOMINFO	Dokumen Sistem Monitoring & Evaluasi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Des	2014	Kajian	49.080.000,00	36	1.363.333,33	36	-	49.080.000,00	-	49.080.000,00	-
293	DISKOMINFO	Perencanaan Infrastruktur Smart City	Desember	2018	Kajian	99.155.000,00	36	2.754.305,56	12	-	-	33.051.666,67	33.051.666,67	66.103.333,33
294	DISKOMINFO	Kajian Standar Manajemen Keamanan Informasi	Desember	2018	Kajian	74.982.100,00	36	2.082.836,11	12	-	-	24.994.033,33	24.994.033,33	49.988.066,67
295	DISKOMINFO	Kajian Manajemen Resiko	November	2019	Kajian	75.427.000,00	36	2.095.194,44	1	-	-	2.095.194,44	2.095.194,44	73.331.805,56
296	DISKOMINFO	Kajian Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Infrastruktur Telekomunikasi	Desember	2019	Kajian	100.719.000,00	36	2.797.750,00	0	-	-	-	-	100.719.000,00
		<b>SUB TOTAL DISKOMINFO</b>				<b>657.580.100,00</b>		<b>18.266.113,89</b>		<b>67.234.555,56</b>	<b>206.929.944,44</b>	<b>114.886.561,11</b>	<b>321.816.505,56</b>	<b>335.763.594,44</b>
297	DINDUKCAPIL	Buku Kajian Kependudukan	Nov	2017	Kajian	45.524.000,00	36	1.264.555,56	25	15.174.666,67	16.439.222,22	15.174.666,67	31.613.888,89	13.910.111,11
		<b>SUB TOTAL DINDUKCAPIL</b>				<b>45.524.000,00</b>		<b>1.264.555,56</b>		<b>15.174.666,67</b>	<b>16.439.222,22</b>	<b>15.174.666,67</b>	<b>31.613.888,89</b>	<b>13.910.111,11</b>
298	DINDALDUKKB	Modul Edukasi Pengendalian Penduduk	September	2018	Kajian	44.650.000,00	36	1.240.277,78	15	3.720.833,33	3.720.833,33	14.883.333,33	18.604.166,67	26.045.833,33
299	DINDALDUKKB	Penyusunan Parameter Pengendalian Kuantitas Penduduk	Desember	2018	Kajian	44.950.000,00	36	1.248.611,11	12	-	-	14.983.333,33	14.983.333,33	29.966.666,67
300	DINDALDUKKB	Penyusunan Naskah Akademik Pengendalian Penduduk	Desember	2018	Kajian	57.250.000,00	36	1.590.277,78	12	-	-	19.083.333,33	19.083.333,33	38.166.666,67
		<b>SUB TOTAL DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK dan KELUARGA BERENCANA</b>				<b>146.850.000,00</b>		<b>4.079.166,67</b>		<b>3.720.833,33</b>	<b>3.720.833,33</b>	<b>48.950.000,00</b>	<b>52.670.833,33</b>	<b>94.179.166,67</b>
301	RSUD	Kajian Jasa Konsultasi Pengawasan ISO 9001:2008	Okt	2017	Kajian	45.000.000,00	36	1.250.000,00	26	15.000.000,00	17.500.000,00	15.000.000,00	32.500.000,00	12.500.000,00
		<b>SUB TOTAL RSUD</b>				<b>45.000.000,00</b>		<b>1.250.000,00</b>		<b>15.000.000,00</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>32.500.000,00</b>	<b>12.500.000,00</b>

No	SKPD	Uraian	Bulan	Tahun	Klasifikasi Asset	Nilai Kajian	Masa Manfaat (bulan)	Amortisasi per Bulan	Masa Pemakaian	Amortisasi 2018	Akumulasi Amortisasi s.d 2018	Amortisasi 2019	Akumulasi Amortisasi s.d 2019	Nilai Bersih ATB Dengan Kebijakan Baru
302	Dinas Lingkungan Hidup	Belanja Modal Jasa Konsultasi	Des	2017	Kajian	308.689.500,00	36	8.574.708,33	24	102.896.500,00	102.896.500,00	102.896.500,00	205.793.000,00	102.896.500,00
303	Dinas Lingkungan Hidup	Belanja Modal Jasa Konsultasi Penelitian SLHD	Des	2017	Kajian	339.544.000,00	36	9.431.777,78	24	113.181.333,33	113.181.333,33	113.181.333,33	226.362.666,67	113.181.333,33
304	Dinas Lingkungan Hidup	Belanja Modal Jasa Konsultasi Perencanaan	Des	2017	Kajian	95.111.000,00	36	2.641.972,22	24	31.703.666,67	31.703.666,67	31.703.666,67	63.407.333,33	31.703.666,67
305	Dinas Lingkungan Hidup	Belanja Modal Jasa Konsultasi Penelitian	Des	2017	Kajian	50.375.000,00	36	1.399.305,56	24	16.791.666,67	16.791.666,67	16.791.666,67	33.583.333,33	16.791.666,67
306	Dinas Lingkungan Hidup	Belanja Modal Jasa Konsultasi Penelitian	Des	2017	Kajian	70.000.000,00	36	1.944.444,44	24	23.333.333,33	23.333.333,33	23.333.333,33	46.666.666,67	23.333.333,33
307	Dinas Lingkungan Hidup	Belanja Modal Jasa Konsultasi Penelitian	Des	2017	Kajian	290.630.000,00	36	8.073.055,56	24	96.876.666,67	96.876.666,67	96.876.666,67	193.753.333,33	96.876.666,67
308	Dinas Lingkungan Hidup	Kajian Beban Pencemaran Sungai Code (Swakelola Tipe II)	Agustus	2018	Kajian	60.862.000,00	36	1.690.611,11	16	20.287.333,33	20.287.333,33	20.287.333,33	40.574.666,67	20.287.333,33
309	Dinas Lingkungan Hidup	Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (Swakelola tipe II)	Desember	2018	Kajian	131.957.000,00	36	3.665.472,22	12	-	-	43.985.666,67	43.985.666,67	87.971.333,33
310	Dinas Lingkungan Hidup	Penyusunan Laporan Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan (Swakelola tipe II)	November	2018	Kajian	136.184.000,00	36	3.782.888,89	13	3.782.888,89	3.782.888,89	45.394.666,67	49.177.555,56	87.006.444,44
311	Dinas Lingkungan Hidup	Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam (Swakelola tipe II)	Juli	2018	Kajian	51.953.000,00	36	1.443.138,89	17	7.215.694,44	7.215.694,44	17.317.666,67	24.533.361,11	27.419.638,89
312	Dinas Lingkungan Hidup	Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan LH (Swakelola tipe II)	September	2018	Kajian	139.500.000,00	36	3.875.000,00	15	11.625.000,00	11.625.000,00	46.500.000,00	58.125.000,00	81.375.000,00
313	Dinas Lingkungan Hidup	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) DLH 2018	November	2018	Kajian	91.110.000,00	36	2.530.833,33	13	2.530.833,33	2.530.833,33	30.370.000,00	32.900.833,33	58.209.166,67
314	Dinas Lingkungan Hidup	Kajian Daya Dukung Daya Tampung Air	Desember	2019	Kajian	75.994.000,00	36	2.110.944,44	-	-	-	-	-	75.994.000,00
315	Dinas Lingkungan Hidup	Kajian Beban Pencemaran Sungai Gajahwong (Swakelola Tipe II)	Desember	2019	Kajian	60.286.000,00	36	1.674.611,11	-	-	-	-	-	60.286.000,00
316	Dinas Lingkungan Hidup	SKM DLH	Desember	2019	Kajian	90.500.000,00	36	2.513.888,89	-	-	-	-	-	90.500.000,00
317	Dinas Lingkungan Hidup	Penyusunan Database Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Perusahaan	Desember	2019	Kajian	100.912.000,00	36	2.803.111,11	-	-	-	-	-	100.912.000,00
318	Dinas Lingkungan Hidup	Penyusunan Laporan Uji Kinerja Lalu Lintas dan Kualitas Udara Jalan Raya (Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan)	Desember	2019	Kajian	70.690.000,00	36	1.963.611,11	-	-	-	-	-	70.690.000,00
		<b>Sub Total DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>				<b>2.164.297.500,00</b>		<b>1.765.915.500,00</b>		<b>430.224.916,67</b>	<b>430.224.916,67</b>	<b>588.638.500,00</b>	<b>1.018.863.416,67</b>	<b>1.145.434.083,33</b>
319	TAPEM & KESRA	Penelitian Forum Pemantau Independen(FORPI)	Juli	2017	Kajian	49.300.000,00	36	1.369.444,44	29	16.433.333,33	23.280.555,56	16.433.333,33	39.713.888,89	9.586.111,11
320	TAPEM & KESRA	Pakta Integritas (Implementasi Kebijakan Sistem Online PPDB Berbasis Zonasi)	November	2018	Kajian	48.125.000,00	36	1.336.805,56	13	1.336.805,56	1.336.805,56	16.041.666,67	17.378.472,22	30.746.527,78
321	TAPEM & KESRA	Kajian Evaluasi Toko Jejaring	oktober	2019	Kajian	48.346.000,00	36	1.342.944,44	2	-	-	2.685.888,89	2.685.888,89	45.660.111,11
322	TAPEM & KESRA	Inventarisasi Unsur Buatan Toponimi	november	2019	Kajian	48.346.000,00	36	1.342.944,44	1	-	-	1.342.944,44	1.342.944,44	47.003.055,56
		<b>SUB TOTAL TAPEM &amp; KESRA</b>				<b>194.117.000,00</b>		<b>5.392.138,89</b>		<b>17.770.138,89</b>	<b>24.617.361,11</b>	<b>36.503.833,33</b>	<b>61.121.194,44</b>	<b>132.995.805,56</b>
323	Satpol PP	Kajian Perilaku Pelanggar 2018	Desember	2018	Kajian	49.563.500,00	36	1.376.763,89	12	-	-	16.521.166,67	16.521.166,67	33.042.333,33
		<b>SUB TOTAL Satpol PP</b>				<b>49.563.500,00</b>		<b>1.376.763,89</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16.521.166,67</b>	<b>16.521.166,67</b>	<b>33.042.333,33</b>

No	SKPD	Uraian	Bulan	Tahun	Klasifikasi Asset	Nilai Kajian	Masa Manfaat (bulan)	Amortisasi per Bulan	Masa Pemakaian	Amortisasi 2018	Akumulasi Amortisasi s.d 2018	Amortisasi 2019	Akumulasi Amortisasi s.d 2019	Nilai Bersih ATB Dengan Kebijakan Baru
												-		
324	BPKAD	Penyusunan Analisis Kelayakan Divestasi Penyertaan Modal pada PT Radio Swara Adiloka	Juli	2018	Kajian	75.000.000,00	36	2.083.333,33	17	10.416.666,67	10.416.666,67	25.000.000,00	35.416.666,67	39.583.333,33
325	BPKAD	Penyusunan Analisis Investasi Penambahan Penyertaan Modal pada BPR Bank Jogja	Desember	2018	Kajian	74.932.000,00	36	2.081.444,44	12	-	-	24.977.333,33	24.977.333,33	49.954.666,67
326	BPKAD	Kajian Analisis Investasi pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jogjatama Visesha	Desember	2019		99.830.500,00	36	2.773.069,44	0		-	-	-	99.830.500,00
327	BPKAD	Penilaian Aset tak Berwujud PT.RSA (Pekerjaan Audit Keuangan)	Desember	2019		72.600.000,00	36	2.016.666,67	0		-	-	-	72.600.000,00
328	BPKAD	Penilaian Aset tak Berwujud PT. RSA (Pekerjaan Penilaian Harga Saham)	Desember	2019		99.000.000,00	36	2.750.000,00	0		-	-	-	99.000.000,00
329	BPKAD	Kajian Analisis Investasi untuk pendirian BPR Syariah	Desember	2019		99.830.500,00	36	2.773.069,44	0		-	-	-	99.830.500,00
		<b>SUB TOTAL BPKAD</b>				<b>521.193.000,00</b>		<b>14.477.583,33</b>		<b>10.416.666,67</b>	<b>10.416.666,67</b>	<b>49.977.333,33</b>	<b>60.394.000,00</b>	<b>460.799.000,00</b>
330	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Konsultansi Teknologi Tepat guna IKM alumunium	Oktober	2018	Kajian	66.500.000,00	36	1.847.222,22	14	3.694.444,44	3.694.444,44	22.166.666,67	25.861.111,11	40.638.888,89
331	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Konsultansi Teknologi Tepat guna IKM batik	Oktober	2018	Kajian	66.500.000,00	36	1.847.222,22	14	3.694.444,44	3.694.444,44	22.166.666,67	25.861.111,11	40.638.888,89
332	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Konsultansi Teknologi Tepat guna IKM kulit	Oktober	2018	Kajian	66.500.000,00	36	1.847.222,22	14	3.694.444,44	3.694.444,44	22.166.666,67	25.861.111,11	40.638.888,89
333	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Konsultansi Teknologi Tepat guna IKM batik	Oktober	2018	Kajian	28.500.000,00	36	791.666,67	14	1.583.333,33	1.583.333,33	9.500.000,00	11.083.333,33	17.416.666,67
334	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Konsultansi Teknologi Tepat guna IKM alumunium	Oktober	2018	Kajian	28.500.000,00	36	791.666,67	14	1.583.333,33	1.583.333,33	9.500.000,00	11.083.333,33	17.416.666,67
335	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Konsultansi Teknologi Tepat guna IKM kulit	Oktober	2018	Kajian	28.500.000,00	36	791.666,67	14	1.583.333,33	1.583.333,33	9.500.000,00	11.083.333,33	17.416.666,67
336	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Kajian Pengembangan Pengelolaan BLUD UPT Logam	Desember	2018	Kajian	100.000.000,00	36	2.777.777,78	12	-	-	33.333.333,33	33.333.333,33	66.666.666,67
337	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Konsultasi Peneliti tepat guna IKM Perak	Desember	2019	Kajian	95.000.000,00	36	2.638.888,89	-	-	-	-	-	95.000.000,00
338	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Konsultasi Peneliti tepat guna penanganan limbah IKM Alumunium	Desember	2019	Kajian	95.000.000,00	36	2.638.888,89	-	-	-	-	-	95.000.000,00
		<b>SUB TOTAL Dinas Perindustrian dan Perdagangan</b>				<b>575.000.000,00</b>		<b>15.972.222,22</b>		<b>15.833.333,33</b>	<b>15.833.333,33</b>	<b>128.333.333,33</b>	<b>144.166.666,67</b>	<b>430.833.333,33</b>
339	Dinas Kebakaran	Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Oktober	2019	Kajian	48.840.000,00	36	1.356.666,67	2		-	2.713.333,33	2.713.333,33	46.126.666,67
		<b>SUB TOTAL Dinas Kebakaran</b>				<b>48.840.000,00</b>		<b>1.356.666,67</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.713.333,33</b>	<b>2.713.333,33</b>	<b>46.126.666,67</b>
340	DPMP	Kajian Potensi Investasi	Juli	2019		56.645.000,00	36	1.573.472,22	5		-	7.867.361,11	7.867.361,11	48.777.638,89
		<b>SUB TOTAL DPMP</b>				<b>56.645.000,00</b>		<b>1.573.472,22</b>	<b>5,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.867.361,11</b>	<b>7.867.361,11</b>	<b>48.777.638,89</b>
		<b>JUMLAH TOTAL</b>				<b>35.177.916.756,55</b>		<b>2.682.960.479,35</b>	<b>5,00</b>	<b>4.341.448.248,85</b>	<b>13.744.962.982,66</b>	<b>6.246.635.065,94</b>	<b>19.991.598.048,60</b>	<b>15.186.318.707,95</b>

**Rincian Bangunan Aset Bersejarah  
Milik Pemerintah Kota Yogyakarta**

<b>No.</b>	<b>Nama Bangunan</b>	<b>Alamat</b>
1	SMP Negeri 8 Yogyakarta	Jl. Prof. DR Kahar Muzakir 2
2	SD Negeri Ngupasan I dan II Yogyakarta	Jl. Reksobayan Ngupasan
3	SD Negeri Ungaran I	Jl. Pattimura Kotabaru
4	Kantor Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta	Jl. Suroto 11
5	SMP Negeri 6 Yogyakarta	Jl. RW Monginsidi 1
6	SMP Negeri 1 Yogyakarta	Jl. Cik Ditiro 29
7	SD Tumbuh	Jl. AM Sangaji 47
8	Pasar Beringharjo	Jl. Pabringan 1
9	SMP Negeri 5 Yogyakarta	Jl. Wardhani 5
10	Kompleks Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta	Jl. Hayam Wuruk 9-11
11	Taman Parkir Ngabean	Jl. Wakhid Hasyim 1-3
12	SD Negeri Sosrowijayan	Jl. Sosrowijayan 21
13	SMP Negeri 2	Jl. P. Senopati 28

REKAPITULASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PFK TAHUN 2019

NO	SKPD	Sisa 2018	PFK 10 %	PPh 21 GAJI	TAPERUM	Penerimaan Tahun 2019					Jumlah Penerimaan+Sisa PFK
						PPN	PPh 21	PPh 22	PPh 23	PPh Psi 4 (2)	
1	DINDIK					1.153.849.955,00	10.823.885.143,00	113.066.927,00	100.953.107,00	85.738.705,00	<b>12.277.493.837,00</b>
2	DINKES					1.742.474.120,00	96.617.100,00	139.764.623,00	22.348.668,00	20.087.876,00	<b>2.021.292.387,00</b>
3	RSUD					6.596.516.763,00	1.819.855.437,00	819.752.288,00	123.483.297,00	24.162.568,00	<b>9.383.770.353,00</b>
4	DPUPKP					15.577.614.877,00	25.039.590,00	146.869.447,00	55.270.747,00	3.331.951.789,00	<b>19.136.746.450,00</b>
5	POL PP					287.329.024,00	217.428.950,00	22.943.298,00	28.677.445,00	-	<b>556.378.717,00</b>
6	DISKAR					583.427.423,00	12.154.300,00	37.595.395,00	8.761.703,00	52.879.548,00	<b>694.818.369,00</b>
7	BPBD					631.614.359,00	45.146.431,00	19.328.828,00	8.542.630,00	75.400.712,00	<b>780.032.960,00</b>
8	DINSOS					266.626.810,00	165.147.930,00	14.687.195,00	36.134.458,80	7.294.203,00	<b>489.890.596,80</b>
9	DPMPPA					166.921.820,00	122.026.200,00	16.607.886,00	17.710.734,00	4.193.436,00	<b>327.460.076,00</b>
10	PETARUNG					260.266.150,00	33.015.750,00	3.485.298,00	19.133.057,00	19.935.247,00	<b>335.835.502,00</b>
11	DLH					1.666.869.046,00	58.159.054,00	95.296.387,00	81.206.183,00	109.104.079,00	<b>2.010.634.749,00</b>
12	CAPIL					267.317.361,00	40.038.720,00	22.068.644,00	16.521.248,00	811.082,00	<b>346.757.055,00</b>
13	KEC TR					252.767.206,00	52.082.150,00	9.332.279,00	7.817.692,00	41.295.107,00	<b>363.294.434,00</b>
14	KEC JT					191.003.779,00	42.636.544,00	4.515.024,00	14.215.632,00	29.721.304,00	<b>282.092.283,00</b>
15	KEC GK					334.133.789,20	58.557.750,00	10.416.312,00	10.802.820,00	52.083.554,00	<b>465.994.225,20</b>
16	KEC DN					166.698.601,00	36.705.910,00	4.370.259,00	2.252.856,00	29.747.623,00	<b>239.775.249,00</b>
17	KEC GT					160.731.028,00	21.271.150,00	1.758.554,00	8.120.950,00	25.562.082,00	<b>217.443.764,00</b>
18	KEC PA		-	-	-	123.606.266,00	40.245.000,00	9.322.454,00	3.484.672,00	10.765.812,00	<b>187.424.204,00</b>
19	KEC NG					139.823.692,00	12.434.100,00	553.910,00	479.947,00	26.864.782,00	<b>180.156.431,00</b>
20	KEC WB					218.481.098,00	33.327.660,00	3.542.891,00	18.024.474,00	38.432.342,00	<b>311.808.465,00</b>
21	KEC MJ					224.249.061,00	36.853.200,00	4.445.509,00	20.133.057,00	37.712.237,00	<b>323.393.064,00</b>
22	KEC KT					172.056.850,00	29.232.200,00	2.785.591,00	10.350.600,00	30.788.892,00	<b>245.214.133,00</b>
23	KEC GM					132.614.381,00	29.697.000,00	2.959.035,00	11.646.753,00	16.583.557,00	<b>193.500.726,00</b>
24	KEC MG					197.888.032,00	33.692.300,00	4.463.924,00	9.442.098,00	31.941.397,00	<b>277.427.751,00</b>
25	KEC UH					441.293.456,00	99.718.300,00	19.023.586,00	18.228.177,00	75.876.439,00	<b>654.139.958,00</b>
26	KEC KG					223.813.976,00	47.490.580,00	17.607.999,00	14.035.728,00	20.591.058,00	<b>323.539.341,00</b>
27	KB					163.000.548,00	190.265.775,00	6.315.248,00	19.762.798,00	3.483.527,00	<b>382.827.896,00</b>
28	DINHUB					698.097.928,00	35.211.796,00	24.258.420,00	46.220.402,00	59.389.564,00	<b>863.178.110,00</b>
	Jumlah Dipindahkan	-	-	-	-	<b>33.041.087.399,20</b>	<b>14.257.936.020,00</b>	<b>1.577.137.211,00</b>	<b>733.761.933,80</b>	<b>4.262.398.522,00</b>	<b>53.872.321.086,00</b>



Hutang PFK	PFK 10 %	PPh 21 GAJI	TAPERUM	Pengeluaran Tahun 2019					Jml Pengeluaran Th 2018
				PPN	PPh 21	PPh 22	PPh 23	PPh Psi 4 (2)	
				1.153.849.955,00	10.823.885.143,00	113.066.927,00	100.953.107,00	85.738.705,00	<b>12.277.493.837,00</b>
				1.742.474.120,00	96.617.100,00	139.764.623,00	22.348.668,00	20.087.876,00	<b>2.021.292.387,00</b>
				6.596.516.763,00	1.819.855.437,00	819.752.288,00	123.483.297,00	24.162.568,00	<b>9.383.770.353,00</b>
				15.577.614.877,00	25.039.590,00	146.869.447,00	55.270.747,00	3.331.951.789,00	<b>19.136.746.450,00</b>
				287.329.024,00	217.428.950,00	22.943.298,00	28.677.445,00	-	<b>556.378.717,00</b>
				583.427.423,00	12.154.300,00	37.595.395,00	8.761.703,00	52.879.548,00	<b>694.818.369,00</b>
				631.614.359,00	45.146.431,00	19.328.828,00	8.542.630,00	75.400.712,00	<b>780.032.960,00</b>
				266.626.810,00	165.147.930,00	14.687.195,00	36.134.458,80	7.294.203,00	<b>489.890.596,80</b>
				166.921.820,00	122.026.200,00	16.607.886,00	17.710.734,00	4.193.436,00	<b>327.460.076,00</b>
				260.266.150,00	33.015.750,00	3.485.298,00	19.133.057,00	19.935.247,00	<b>335.835.502,00</b>
				1.666.869.046,00	58.159.054,00	95.296.387,00	81.206.183,00	109.104.079,00	<b>2.010.634.749,00</b>
				267.317.361,00	40.038.720,00	22.068.644,00	16.521.248,00	811.082,00	<b>346.757.055,00</b>
				252.767.206,00	52.082.150,00	9.332.279,00	7.817.692,00	41.295.107,00	<b>363.294.434,00</b>
				191.003.779,00	42.636.544,00	4.515.024,00	14.215.632,00	29.721.304,00	<b>282.092.283,00</b>
				334.133.789,20	58.557.750,00	10.416.312,00	10.802.820,00	52.083.554,00	<b>465.994.225,20</b>
				166.698.601,00	36.705.910,00	4.370.259,00	2.252.856,00	29.747.623,00	<b>239.775.249,00</b>
				160.731.028,00	21.271.150,00	1.758.554,00	8.120.950,00	25.562.082,00	<b>217.443.764,00</b>
				123.606.266,00	40.245.000,00	9.322.454,00	3.484.672,00	10.765.812,00	<b>187.424.204,00</b>
				139.823.692,00	12.434.100,00	553.910,00	479.947,00	26.864.782,00	<b>180.156.431,00</b>
				218.481.098,00	33.327.660,00	3.542.891,00	18.024.474,00	38.432.342,00	<b>311.808.465,00</b>
				224.249.061,00	36.853.200,00	4.445.509,00	20.133.057,00	37.712.237,00	<b>323.393.064,00</b>
				172.056.850,00	29.232.200,00	2.785.591,00	10.350.600,00	30.788.892,00	<b>245.214.133,00</b>
				132.614.381,00	29.697.000,00	2.959.035,00	11.646.753,00	16.583.557,00	<b>193.500.726,00</b>
				197.888.032,00	33.692.300,00	4.463.924,00	9.442.098,00	31.941.397,00	<b>277.427.751,00</b>
				441.293.456,00	99.718.300,00	19.023.586,00	18.228.177,00	75.876.439,00	<b>654.139.958,00</b>
				223.813.976,00	47.490.580,00	17.607.999,00	14.035.728,00	20.591.058,00	<b>323.539.341,00</b>
				163.000.548,00	190.265.775,00	6.315.248,00	19.762.798,00	3.483.527,00	<b>382.827.896,00</b>
				698.097.928,00	35.211.796,00	24.258.420,00	46.220.402,00	59.389.564,00	<b>863.178.110,00</b>
-	-	-	-	<b>33.041.087.399,20</b>	<b>14.257.936.020,00</b>	<b>1.577.137.211,00</b>	<b>733.761.933,80</b>	<b>4.262.398.522,00</b>	<b>53.872.321.086,00</b>



NO	SKPD	PFK 10 %	PPh 21 GAJI	TAPERUM	Penerimaan Tahun 2019					Jumlah Penerimaan+Sisa PFK	
					PPN	PPh 21	PPh 22	PPh 23	PPh Psl 4 (2)		
	Jumlah pindahan	-	-	-	<b>33.041.087.399,20</b>	<b>14.257.936.020,00</b>	<b>1.577.137.211,00</b>	<b>733.761.933,80</b>	<b>4.262.398.522,00</b>	<b>53.872.321.086,00</b>	
29	KOMINFO				1.697.315.510,00	36.948.050,00	105.118.989,00	172.799.913,00	1.171.945,00	2.013.354.407,00	
30	KOPERASI				481.417.278,00	129.156.163,00	14.924.552,00	93.061.773,00	93.657.225,00	<b>812.216.991,00</b>	
31	DPMP				203.331.412,00	11.612.625,00	7.304.440,00	13.584.600,00	-	<b>235.833.077,00</b>	
32	DISPORA				245.431.806,00	114.252.420,00	19.328.372,00	32.829.560,00	29.505.891,00	<b>441.348.049,00</b>	
33	DISBUD				203.246.393,00	20.713.500,00	2.443.164,00	66.496.975,00	1.728.818,00	<b>294.628.850,00</b>	
34	DPK(ARSIP)				343.950.377,00	18.410.380,00	33.991.745,00	10.006.381,00	3.687.481,00	<b>410.046.364,00</b>	
35	KESBANG				52.583.427,00	119.463.000,00	7.611.622,00	5.692.934,00	12.142.272,00	<b>197.493.255,00</b>	
36	DPP(PERTANIAN)				491.592.130,82	64.078.400,00	31.447.323,00	31.314.943,00	39.276.438,00	<b>657.709.234,82</b>	
37	DISPAR				606.052.072,00	77.512.607,00	15.137.119,00	104.448.068,00	8.407.761,00	<b>811.557.627,00</b>	
38	PERINDAG				1.499.460.295,00	95.453.402,00	35.155.523,00	118.770.630,00	173.231.115,00	<b>1.922.070.965,00</b>	
39	BAPPEDA				224.065.733,18	63.055.000,00	7.635.073,00	29.325.841,64	1.852.654,00	<b>325.934.301,82</b>	
<b>40</b>	<b>SETDA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>979.277.785,00</b>	<b>167.153.332,00</b>	<b>42.780.720,00</b>	<b>78.894.749,00</b>	<b>70.078.394,00</b>	<b>1.338.184.980,00</b>	
	A. TAPEM				94.565.073,00	17.678.250,00	7.354.982,00	11.274.950,00	5.090.271,00	<b>135.963.526,00</b>	
	B. HUKUM				109.650.100,00	57.645.750,00	865.361,00	18.850.031,00	2.402.653,00	<b>189.413.895,00</b>	
	C. PROTOKOL				118.256.531,00	15.424.750,00	16.785.873,00	9.715.409,00	5.054.726,00	<b>165.237.289,00</b>	
	D. UMUM				395.405.998,00	225.000,00	8.384.187,00	16.844.894,00	42.595.499,00	<b>463.455.578,00</b>	
	E. P3ADK				79.640.370,00	615.000,00	2.676.383,00	9.564.217,00	2.617.273,00	<b>95.113.243,00</b>	
	F. DALBANG				45.570.253,00	5.165.000,00	802.216,00	2.998.525,00	5.894.320,00	<b>60.430.314,00</b>	
	G. ORGANISASI				74.359.494,00	57.743.332,00	2.620.466,00	4.352.543,00	3.644.344,00	<b>142.720.179,00</b>	
	H. BLP				61.829.966,00	12.656.250,00	3.291.252,00	5.294.180,00	2.779.308,00	<b>85.850.956,00</b>	
41	DPRD				311.324.948,00	2.524.249.372,00	44.257.649,00	91.050.472,00	4.622.509,00	<b>2.975.504.950,00</b>	
42	INSPEKTORAT				61.441.483,00	18.697.500,00	4.528.533,00	6.233.424,00	1.436.544,00	<b>92.337.484,00</b>	
43	BKPP				134.079.852,00	9.492.726.001,00	5.281.153,00	18.256.611,00	3.114.891,00	<b>9.653.458.508,00</b>	
44	SKPKD				-	-	-	-	-	-	
45	BPKAD				1.036.540.131,00	1.302.118.085,00	135.234.455,00	12.425.799,00	3.433.780,00	<b>2.489.752.250,00</b>	
	PFK 10%, PPh 21 Gaji, Taperum	32.685.579.727,00	1.518.919.114,00	465.165.000,00						<b>34.669.663.841,00</b>	
	<b>JUMLAH</b>	<b>-</b>	<b>32.685.579.727,00</b>	<b>1.518.919.114,00</b>	<b>465.165.000,00</b>	<b>41.559.614.605,20</b>	<b>28.394.072.857,00</b>	<b>2.081.706.021,00</b>	<b>1.613.261.673,44</b>	<b>4.697.603.968,00</b>	<b>113.015.922.965,64</b>

PFK	Hutang PFK Th 2018	Penerimaan Th 2019	Penyetoran Th 2019	Hutang PFK Th 2019
Hutang PFK 2018	-			
PFK 10%		32.685.579.727,00	32.685.579.727,00	
Taperum		465.165.000,00	465.165.000,00	
PPh 21 Gaji		1.518.919.114,00	1.518.919.114,00	
PPN		41.559.614.605,20	41.559.614.605,20	
PPh 21 Non Gaji		28.394.072.857,00	28.394.072.857,00	
PPh 22		2.081.706.021,00	2.081.706.021,00	
PPh 23		1.613.261.673,44	1.613.261.673,44	
PPh Pasal 4(2)		4.697.603.968,00	4.697.603.968,00	
Jumlah	-	<b>113.015.922.965,64</b>	<b>113.015.922.965,64</b>	-

Hutang PFK	PFK 10 %	PPh 21 GAJI	TAPERUM	Pengeluaran Tahun 2019					Jml Pengeluaran
				PPN	PPh 21	PPh 22	PPh 23	PPh Psl 4 (2)	Th 2018
-	-	-	-	<b>33.041.087.399,20</b>	<b>14.257.936.020,00</b>	<b>1.577.137.211,00</b>	<b>733.761.933,80</b>	<b>4.262.398.522,00</b>	<b>53.872.321.086,00</b>
				1.697.315.510,00	36.948.050,00	105.118.989,00	172.799.913,00	1.171.945,00	<b>2.013.354.407,00</b>
				481.417.278,00	129.156.163,00	14.924.552,00	93.061.773,00	93.657.225,00	<b>812.216.991,00</b>
				203.331.412,00	11.612.625,00	7.304.440,00	13.584.600,00	-	<b>235.833.077,00</b>
				245.431.806,00	114.252.420,00	19.328.372,00	32.829.560,00	29.505.891,00	<b>441.348.049,00</b>
				203.246.393,00	20.713.500,00	2.443.164,00	66.496.975,00	1.728.818,00	<b>294.628.850,00</b>
				343.950.377,00	18.410.380,00	33.991.745,00	10.006.381,00	3.687.481,00	<b>410.046.364,00</b>
				52.583.427,00	119.463.000,00	7.611.622,00	5.692.934,00	12.142.272,00	<b>197.493.255,00</b>
				491.592.130,82	64.078.400,00	31.447.323,00	31.314.943,00	39.276.438,00	<b>657.709.234,82</b>
				606.052.072,00	77.512.607,00	15.137.119,00	104.448.068,00	8.407.761,00	<b>811.557.627,00</b>
				1.499.460.295,00	95.453.402,00	35.155.523,00	118.770.630,00	173.231.115,00	<b>1.922.070.965,00</b>
				224.065.733,18	63.055.000,00	7.635.073,00	29.325.841,64	1.852.654,00	<b>325.934.301,82</b>
-	-	-	-	<b>979.277.785,00</b>	<b>167.153.332,00</b>	<b>42.780.720,00</b>	<b>78.894.749,00</b>	<b>70.078.394,00</b>	<b>1.338.184.980,00</b>
				94.565.073,00	17.678.250,00	7.354.982,00	11.274.950,00	5.090.271,00	<b>135.963.526,00</b>
				109.650.100,00	57.645.750,00	865.361,00	18.850.031,00	2.402.653,00	<b>189.413.895,00</b>
				118.256.531,00	15.424.750,00	16.785.873,00	9.715.409,00	5.054.726,00	<b>165.237.289,00</b>
				395.405.998,00	225.000,00	8.384.187,00	16.844.894,00	42.595.499,00	<b>463.455.578,00</b>
				79.640.370,00	615.000,00	2.676.383,00	9.564.217,00	2.617.273,00	<b>95.113.243,00</b>
				45.570.253,00	5.165.000,00	802.216,00	2.998.525,00	5.894.320,00	<b>60.430.314,00</b>
				74.359.494,00	57.743.332,00	2.620.466,00	4.352.543,00	3.644.344,00	<b>142.720.179,00</b>
				61.829.966,00	12.656.250,00	3.291.252,00	5.294.180,00	2.779.308,00	<b>85.850.956,00</b>
				311.324.948,00	2.524.249.372,00	44.257.649,00	91.050.472,00	4.622.509,00	<b>2.975.504.950,00</b>
				61.441.483,00	18.697.500,00	4.528.533,00	6.233.424,00	1.436.544,00	<b>92.337.484,00</b>
				134.079.852,00	9.492.726.001,00	5.281.153,00	18.256.611,00	3.114.891,00	<b>9.653.458.508,00</b>
				-	-	-	-	-	-
				1.036.540.131,00	1.302.118.085,00	135.234.455,00	12.425.799,00	3.433.780,00	<b>2.489.752.250,00</b>
	32.685.579.727,00	1.518.919.114,00	465.165.000,00						<b>34.669.663.841,00</b>
-	<b>32.685.579.727,00</b>	<b>1.518.919.114,00</b>	<b>465.165.000,00</b>	<b>41.559.614.605,20</b>	<b>28.394.072.857,00</b>	<b>2.081.706.021,00</b>	<b>1.613.261.673,44</b>	<b>4.697.603.968,00</b>	<b>113.015.922.965,64</b>



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**RINCIAN UTANG PFK**  
**Per 31 Desember 2019**

(dalam Rp)

No.	Uraian	Hutang PFK 2018	Penerimaan Tahun 2019	Penyetoran Tahun 2019	Hutang PFK 2019
1	Pajak Th 2017				-
2	PFK 10%		32.685.579.727,00	32.685.579.727,00	-
3	Taperum		465.165.000,00	465.165.000,00	-
4	PPh 21 Gaji		1.518.919.114,00	1.518.919.114,00	-
5	PPN		41.559.614.605,20	41.559.614.605,20	-
6	PPh 21 Non Gaji		28.394.072.857,00	28.394.072.857,00	-
7	PPh 22		2.081.706.021,00	2.081.706.021,00	-
8	PPh 23		1.613.261.673,44	1.613.261.673,44	-
9	PPh Pasal 4 (2)		4.697.603.968,00	4.697.603.968,00	-
	<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>113.015.922.965,64</b>	<b>113.015.922.965,64</b>	<b>-</b>

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**RINCIAN PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA**  
**Per 31 Desember 2019**

No.	Pihak Ketiga (Penyewa)	Lingkup Perjanjian	Perjanjian			Jangka Waktu	Berakhir	Tatakala		Realisasi		Jumlah Pendapatan s.d 2018	Jumlah Pendapatan 2019	Pendapatan Diterima Dimuka	
			No.	Tanggal	Nilai (Rp)			Tgl Jatuh Tempo	Nominal	Tgl Setor	Nominal			2020	2021 dst
1	Yayasan Pendidikan, Dakwah dan Sosial Al- Khairat Kota Yogyakarta	Sewa tanah dan bangunan gedung eks SDN Kotagede II untuk SD Islam Terpadu (SD-IT) Al- Khairat	003/641/PS.4/X/2016	24/10/2016	6.112.000,00	24 bulan	22 Oktober 2018	22 Oktober 2016	3.056.000	18 Oktober 2016	6.112.000,00	6.112.000,00	-	-	-
								10 September 2017	3.056.000						
2	Pimpinan Daerah Muhammadiyah	Sewa tanah dan bangunan eks SDN Gowongan, eks SDN Ledoksari, Eks SDN Keputran XII dan eks SDN Nitikan III untuk dikelola oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah	002/641/PS.4/X/2016	10/10/2016	16.898.000,00	24 bulan	10 Oktober 2018	08 Oktober 2016	8.449.000	10 Oktober 2016	16.898.000,00	16.898.000,00	-	-	-
								10 September 2017	8.449.000						
			002/641/PS.5/X/2018	10/10/2018	22.296.000,00	24 bulan	18 Oktober 2020	18 Oktober 2018	22.296.000	17 Oktober 2018	22.296.000,00	1.858.000,00	11.148.000,00	9.290.000,00	-
			405/III.0/2018												
3	Dharma Wanita Persatuan Kota YK	Sewa tanah dan bangunan gedung kantin di Komplek Balaikota Yogyakarta untuk kantin Dharma Wanita	004/641/PS.3/X/2016	27/10/2016	30.584.000,00	24 bulan	27 Oktober 2018	25 Oktober 2016	7.646.000	26 Oktober 2016	7.646.000,00	30.584.000,00	-	-	-
								30 April 2017	7.646.000	02 Mei 2017	7.646.000,00				
								31 Oktober 2017	7.646.000	20 Oktober 2017	7.646.000,00				
								30 April 2018	7.646.000	26 April 2018	7.646.000,00				
					34.353.000,00	18 bulan	27 April 2020			27 Juni 2019	34.353.000,00	3.817.000,00	22.902.000,00	7.634.000,00	-
4	Paguyuban Panca RW Gedongkuning	Sewa tanah dan bangunan di Jl. Semangu No. 12 Rejowinangun Yogyakarta untuk TK RK Gedongkuning	003/641/PS.1/X/2015	02/10/2015	1.088.000,00	24 bulan	01 Oktober 2017	30 September 2015	1.088.000	05 Nopember 2015	1.088.000,00	1.088.000,00	-	-	-
			001/641/PS.2/IV/2018	05/04/2018	1.280.000,00	24 bulan	05 April 2020	05 April 2020	1.280.000	04 April 2018	1.280.000,00	480.000,00	640.000,00	160.000,00	-
5	Yayasan Samara Bunda	Sewa tanah dan bangunan gedung bekas SDN Karangasari II untuk SD Pembayaran Sewa Gedung Ex SDN Karangasari	002/641/PS.4/X/2015	02/10/2015	2.464.000,00	24 bulan	01 Oktober 2017	30 September 2015	2.464.000	29 Oktober 2015	2.464.000,00	2.464.000,00	-	-	-
			001/641/PS.3/IX/2019	09/09/2019	6.000.000,00	36 Bulan	01 Oktober 2020	01 Oktober 2020	6.000.000,00	09 September 2019	6.000.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	-
6	Yayasan TK Buyung	Sewa tanah dan bangunan gedung milik Pemerintah Kota Yogyakarta yang terletak di Jl. Wiratama Tegarejo Yogyakarta untuk dipergunakan sebagai TK Buyung	004/641/PS.1/X/2015	02/10/2015	2.624.000,00	24 bulan	01 Oktober 2017	31 Oktober 2015	1.312.000	29 Oktober 2015	1.312.000,00	2.624.000,00	-	-	-
								30 September 2016	1.312.000	21 September 2016	1.312.000,00				
			003/641/PS.2/IV/2018	05/04/2018	3.600.000,00	24 bulan	05 April 2020	05 April 2020	3.600.000	04 April 2018	3.600.000,00	1.350.000,00	1.800.000,00	450.000,00	-

No.	Pihak Ketiga (Penyewa)	Lingkup Perjanjian	Perjanjian			Jangka Waktu	Berakhir	Tatakala		Realisasi		Jumlah Pendapatan s.d 2018	Jumlah Pendapatan 2019	Pendapatan Diterima Dimuka	
			No.	Tanggal	Nilai (Rp)			Tgl Jatuh Tempo	Nominal	Tgl Setor	Nominal			2020	2021 dst
7	Yayasan TK PKK Cokrodiningratan	Sewa tanah dan bangunan gedung milik Pemerintah Kota Yogyakarta yang	001/641/PS.1/X/2015	11/10/2015	590.000,00	24 bulan	11 Oktober 2017	09 Oktober 2015	590.000	29 Oktober 2015	590.000,00	590.000,00		-	-
			001/641/PS.2/IV/2018	05/04/2018	626.000,00	24 bulan	05 April 2020	05 April 2018	626.000	04 April 2018	626.000,00	234.750,00	313.000,00	78.250,00	-
8	PD BPR Bank Jogja	Sewa sebagian ruangan pada Dinas Perijinan, Kec. GK, Kec. MJ dan Kec. DN	002/641/PS/XII/2015	20/12/2015	258.108.328,00	60 bulan	20 Desember 2020	18 Desember 2015	58.108.328	14 Desember 2015	58.108.328,00	158.108.328,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-
		Sewa Bangunan Gedung Milik Pemerintah (Eks Kecamatan Jetis)	001/641/PS.1/VII/2018	0 Agustus 2018	462.200.000,00	60 Bulan	20 Agustus 2023	10 Desember 2016	50.000.000	23 Desember 2016	50.000.000,00				
			1093/101					10 Desember 2017	50.000.000	21 Desember 2017	50.000.000,00				
								10 Desember 2018	50.000.000	10 Desember 2018	50.000.000,00				
								10 Desember 2019	50.000.000	04 Desember 2019	50.000.000,00				
								20 Agustus 2023	92.440.000	16 Agustus 2018	92.440.000,00	30.813.333,33	92.440.000,00	61.626.666,67	-
								10 Agustus 2019	92.440.000	22 Agustus 2019	92.440.000,00				
									92.440.000	10 Agustus 2020					
									92.440.000	10 Agustus 2021					
									92.440.000	10 Agustus 2022					
		Sewa Gedung Eks Kantor		02/01/2020	6.750.000,00	24 Bulan	02 Januari 2022	02 Januari 2022	6.750.000,00	11 Desember 2019	6.750.000,00	-	-	3.375.000,00	3.375.000,00
9	PT. BPD DIY	Sewa sebagian ruangan pada Dinas Perijinan	001/641/PS.1/X/2016		305.304.000,00	60 bulan	02 Oktober 2021	01 Oktober 2016	61.304.000	28 September 2016	61.304.000,00	137.554.000,00	61.000.000,00	45.750.000,00	-
								30 September 2017	61.000.000	27 September 2017	61.000.000,00				
								30 September 2018	61.000.000	21 September 2018	61.000.000,00				
								30 September 2019	61.000.000	29 Oktober 2019	61.000.000,00				
								30 September 2020	61.000.000						
		Sewa Ruang ATM DPRD 5 tahun	002/641/PS.1/VII/2019	29/07/2019	8.900.000,00	60 Bulan	29 Juli 2024	29 Juli 2024	8.900.000,00	26 Juli 2019	8.900.000,00	-	741.666,67	1.780.000,00	6.378.333,33
10	TK PWS Surokarsan	Sewa tanah dan bangunan gedung eks SD Inpres Surokarsan I utk TK Persatuan Wanita Surokarsan	005/641/PS.3/X/2015	02/10/2015	4.020.800,00	24 bulan	01 Oktober 2017	30 September 2015	2.010.400	29 Desember 2015	2.010.400,00	4.020.800,00		-	-
								10 September 2016	2.010.400	10 Oktober 2016	2.010.400,00				
11	LPMK Kelurahan Sosromenduran	Sewa tanah dan bangunan Eks Kantor Kelurahan	006/641/PS.3/X/2015	02/10/2016	1.844.000,00	24 bulan	01 Oktober 2018	02 Oktober 2016	1.844.000	30 Oktober 2015	1.844.000,00	1.844.000,00		-	-
12	USEP Kota YK	Sewa tanah dan bangunan eks kelurahan Ngampilan	001/641/PS/II/2016	26/02/2016	2.801.000,00	12 bulan	26 Februari 2017	26 Februari 2016	1.401.000	25 Februari 2016	1.401.000	2.801.000,00		-	-
			001/641/PS/II/2016	27/02/2017	3.100.000,00	12 bulan	27 Februari 2018	10 September 2016	1.400.000	18 Agustus 2016	1.400.000				
								25 Februari 2017	1.550.000	21 Februari 2017	1.550.000,00	3.100.000,00		-	-
								11 September 2017	1.550.000	21 Agustus 2017	1.550.000,00				
13	Dharma Wanita Dinas Pendidikan	Sewa sebagian bangunan Dinas Pendidikan untuk Kantin	001/641/PS.1/VII/2016	11/07/2016	63.465.000,00	60 bulan	11 Juli 2021	11 Juli 2016	12.693.000	20 Juni 2016	12.693.000,00	31.732.500,00	12.693.000,00	6.346.500,00	-
								01 Mei 2017	12.693.000	12 Mei 2017	12.693.000,00				
								01 Mei 2018	12.693.000	19 April 2018	12.693.000,00				
								01 Mei 2019	12.693.000	29 April 2019	12.693.000,00				
								01 Mei 2020	12.693.000						



No.	Pihak Ketiga (Penyewa)	Lingkup Perjanjian	Perjanjian			Jangka Waktu	Berakhir	Tatakala		Realisasi		Jumlah Pendapatan s.d 2018	Jumlah Pendapatan 2019	Pendapatan Diterima Dimuka		
			No.	Tanggal	Nilai (Rp)			Tgl Jatuh Tempo	Nominal	Tgl Setor	Nominal			2020	2021 dst	
14	PT Hutchison 3 Indonesia	Sewa Rumija di wilayah Kota Yk untuk pemasangan	620/684	02/08/2016	4.650.000,00	60 bulan	01 Agustus 2021	02 Agustus 2016	4.650.000	01 Agustus 2016	4.650.000,00	2.247.500,00	930.000,00	930.000,00	542.500,00	
15	KPRI WIWARA	Sewa gedung KPRI WIWARA	001/641/PS.1/V/2016	31 Mei 2016	22.802.000,00	24 bulan	31 Mei 2018	29 Mei 2016	6.837.000	03 Mei 2016	6.837.000,00	22.802.000,00		-		
		Sewa Gedung KPRI WIWARA	001/641/PS.2/VII/2019/30/KPRI	12/07/2019	32.500.000,00	23 Bulan	21 April 2020	21 April 2020	32.500.000,00	11 Juli 2019	32.500.000,00	9.891.304,35	16.956.521,74	5.652.173,91	-	
16	PT. ULUM TIRTA SEGARA	Sewa Gedung dan Kolam PIH	130/004/II/2017	6 Februari 2016	102.000.000,00	24 bulan	16 Februari 2016	06 Februari 2017	102.000.000	13 Februari 2017	102.000.000,00	97.750.000,00	4.250.000,00	-	-	
		Sewa Gedung dan Kolam PIH	011/13/PS/III/2019/001/P-1/MUM/III/2019	06/03/2019	#####	36 bulan	06 Maret 2022	06 Maret 2019	153.000.000	05 Maret 2019	153.000.000,00	42.500.000,00	51.000.000,00	59.500.000,00		
17	Dharma Wanita Dinas Pendidikan	Sewa tempat foto copy Dinas Pendidikan	005/641/Ps.1/X/2016	17/10/2016	44.255.000,00	60 bulan	17 Oktober 2021	15 Oktober 2016	8.851.000	10 Oktober 2016	8.851.000,00	19.914.750,00	8.113.416,67	7.375.833,33	-	
								30 September 2017	8.851.000	22 Desember 2017	8.851.000,00					
								30 September 2018	8.851.000	15 Oktober 2018	8.851.000,00					
								30 September 2019	8.851.000	30 Desember 2019	8.851.000,00					
								30 September 2020	8.851.000							
18	Kantor Pos	Sewa sebagian ruang di Dinas Sosial	8540/Umum/Sarana/0916	01/08/2016	18.143.000,00	24 bulan	31 Juli 2018			01 Desember 2016	10.143.000,00	18.143.000,00				
		Sewa Ruang LE Pemkot selama 1 tahun	003/641/PS.3/VIII/2019/8275/umum/sarana/6/0718	31/07/2019	15.846.300,00	12 Bulan	01 Agustus 2020	01 Agustus 2020	15.846.300,00	29 Juli 2019	15.846.300,00	-	6.602.625,00	9.243.675,00	-	
19	Kantor Arpusda	Sewa lahan untuk usaha makanan dan minuman	02/MOU/KAPD/2016	7 Maret 2016	16.000.000,00	34 bulan	31 Desember 2018	5 Maret 2016	16.000.000	4 Maret 2016	16.000.000,00	15.999.999,99		-	-	
20	PT. Media Sarana Akses	Sewa Rumija di wilayah Kota Yk untuk pemasangan Jaringan Telekomunikasi	620/887	14/10/2016	348.609.965,00	60 bulan	13 Oktober 2021	14 Oktober 2016	348.609.965	14 Oktober 2016	348.609.965,00	156.874.484,25	69.721.993,00	69.721.993,00	52.291.494,75	
21	PT Telkom (Persero) Tbk Indonesia Diva Area Yk	Sewa gedung untuk penempatan perangkat telkom	119/1768	18/05/2017	5.810.000,00	60 bulan	17 Mei 2022	16 Mei 2017	5.810.000	16 Mei 2017	5.810.000,00	1.839.833,33	1.162.000,00	1.162.000,00	1.646.166,67	
22	PT Telkom (Persero) Tbk Indonesia Diva	Sewa Gedung di SD Petinggen untuk penempatan perangkat Telkom	555/3097	01/08/2017	13.470.000,00	60 bulan	31 Juli 2022	30 Juli 2017	13.470.000	09 Agustus 2017	13.470.000,00	3.816.500,00	2.694.000,00	2.694.000,00	4.265.500,00	
23	YPDS Al Khairaat	Sewa Tanah dan Gedung Milik Pemerintah Kota	003/641/PS.5/X/2018/020/YPDS/X/2018	2 Oktober 2018	8.834.000,00	24 Bulan	22 Oktober 2020	22 Oktober 2018	8.834.000	19 Oktober 2018	8.834.000,00	736.166,67	4.417.000,00	3.680.833,33	-	
24	TK PWS Surakarta	Sewa Bangunan Gedung Jl. Surakarta no 519	004/641/PS.4/IX/2018/475/24	September 2018	5.754.000,00	24 Bulan	6 September 2020	6 September 2020	5.754.000	12 November 2018	5.754.000,00	959.000,00	2.877.000,00	1.918.000,00	-	
25	Pemilik Usaha Anekringan	Sewa Gedung Milik Pemerintah Kota YK II	002/641/PS.1/XI/2018	November 2018	20.400.000,00	36 Bulan	01 Januari 2021	31 Desember 2021	20.400.000	14 November 2018	20.400.000,00	566.666,67	6.800.000,00	6.800.000,00	6.233.333,33	
26	Pemilik Usaha Anekringan	Sewa Tanah dan Bangunan Milik Pemkot YK (Jl. Mawien)	001/641/PS.1/XI/2018	November 2018	18.750.000,00	36 Bulan	19 November 2021	19 November 2021	18.750.000	16 November 2018	18.750.000,00	520.833,33	6.250.000,00	6.250.000,00	5.729.166,67	
27	LPMK Kelurahan Sosromenduran	Sewa Tanah dan Bangunan Eks Kantor Kelurahan	001/641/PS.4/XII/2018/005/EX/SMD/XII/2018	Desember 2018	9.300.000,00	60 Bulan	14 Desember 2023	14 Desember 2023	9.300.000	13 Desember 2018	9.300.000,00	155.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00	5.425.000,00	
28	Telekomsel Microcell	Sewa Lahan untuk menara Telekomsel Microcell	555/01/UH/III/2019	29 Maret 2019	1.254.000,00	36 Bulan	29 Maret 2022	29 Maret 2019	1.254.000,00	29 Maret 2019	1.254.000,00	-	313.500,00	418.000,00	522.500,00	

No.	Pihak Ketiga (Penyewa)	Lingkup Perjanjian	Perjanjian			Jangka Waktu	Berakhir	Tatakala		Realisasi		Jumlah Pendapatan s.d 2018	Jumlah Pendapatan 2019	Pendapatan Diterima Dimuka	
			No.	Tanggal	Nilai (Rp)			Tgl Jatuh Tempo	Nominal	Tgl Setor	Nominal			2020	2021 dst
29	Borobudur Fiber Indonesia	Sewa Lahan untuk menara Telkomsel Microcell	620/1083	04/04/2019	13.822.488,00	36 Bulan	04 April 2022	04 April 2022	13.822.488,00	29 Maret 2019	13.822.488,00	-	3.455.622,00	4.607.496,00	5.759.370,00
30		Sewa Lahan untuk menara Telkomsel Microcell	602/1178	08/04/2019	6.996.900,00	36 Bulan	08 April 2022	08 April 2019	6.996.900,00	05 April 2019	6.996.900,00	-	1.749.225,00	2.332.300,00	2.915.375,00
31	PT KOMET INFRA NUSANTARA	Sewa untuk Telekomunikasi	621/3135	24/09/2019	130.399.640,00	36 Bulan	24 September 2022	24 September 2022	130.399.640,00	02 September 2019	130.399.640,00	-	32.599.910,00	130.399.640,00	228.199.370,00
			621/3135	24/09/2019	391.198.920,00					23 September 2019	260.799.282,00				
		Sewa untuk Telekomunikasi	620/1485	13/05/2019	153.363.084,00	36 Bulan	13 Mei 2022	13 Mei 2022	153.363.084,00	02 Mei 2019	153.363.084,00	-	34.080.685,33	51.121.028,00	68.161.370,67
32	PT TOWER BERSAMA	Setoran dari PT Tower Bersama Kec UH	555/02/UH/VI/2019	18/06/2019	1.949.000,00	48 Bulan	17 Juni 2023	17 Juni 2023	1.949.000,00	15 Mei 2019	1.949.000,00	-	243.625,00	487.250,00	1.218.125,00
		Setoran dari PT Tower Bersama Kec WB			1.949.000,00					15 Mei 2019	1.949.000,00			1.949.000,00	
		Setoran dari PT Tower Bersama Kec MG			2.508.000,00					15 Mei 2019	2.508.000,00			2.508.000,00	
		Setoran dari PT Tower Bersama DLH			19.470.000,00					15 Mei 2019	19.470.000,00			19.470.000,00	
		Setoran dari PT Tower Bersama Dindik			2.247.750,00					15 Mei 2019	2.247.750,00			2.247.750,00	
		Setoran dari PT Tower Bersama			42.324.356,00					08 Juli 2019	42.324.356,00			42.324.356,00	
33	PT SARANA INSAN MUDA SELARAS	Sewa Aset untuk Pergelaran Fiber Optik 1 tahun	620/2585	12/08/2019	157.395.000,00	12 Bulan	11 Agustus 2020	11 Agustus 2020	157.395.000,00	06 Agustus 2019	157.395.000,00	-	65.581.250,00	91.813.750,00	-
34	PT PRADIPTA BHUMI KONSTRUKSI	Sewa Lahan untuk Direksi dan Barak Pekerja di Ex terminal Terban C Pekerjaan Pedestrian Jl J Sudirman	001/641/PS.1/VIII/2019/001/PBK-Penkot/Sudirman/VIII/19	07/08/2019	13.750.000,00	5 Bulan	06 Januari 2020	06 Januari 2020	13.750.000,00	07 Agustus 2019	13.750.000,00	-	13.750.000,00	-	-
35	Taman Pintar	Sewa Kios buku									3.073.250.000,00	2.008.395.833,00	161.750.000,00	161.750.000,00	741.354.167,00
36	Taman Pintar	Sewa Foodcourt									1.083.958.333,01	644.791.666,67	357.749.999,67	81.416.666,67	-
37	Kec. MG	Pendapatan Makam									80.054.999,67	23.865.000,00	26.500.000,00	14.790.833,00	14.899.166,67
38	Kec. TR	Pendapatan Makam									138.605.000,00	87.100.000,00	26.798.750,00	15.659.583,33	9.046.666,67
39	Kec. MJ	Pendapatan Makam									48.145.000,00	27.835.000,00	6.475.000,00	8.157.916,67	5.677.083,33
40	Kec. WB	Pendapatan Makam									170.980.000,00	104.685.000,00	28.907.916,67	21.788.750,00	15.598.333,33
41	Bank MANDIRI	Sewa Lahan ATM dan Neon Box	006/PKS/UPT.PB/2019	1 April 2019	42.695.000,00	1 Tahun	31 Maret 2020	31 Maret 2020	42.695.000	22 Mei 2019	42.695.000,00	-	32.025.000,00	10.670.000,00	-
42	Bank MEGA	Sewa Lahan ATM dan Neon Box	009/MOU/UPT.PB/2019	12 Juli 2019	26.820.000,00	1 Tahun	11 Juli 2020	11 Juli 2020	26.820.000	19 September 2019	26.820.000,00	-	13.381.500,00	13.438.500,00	-
43	BRI	Sewa Lahan ATM dan Neon Box	003/PKS/UPT.PB/2018	11 April 2018	26.795.000,00	1 Tahun	31 Maret 2020	31 Maret 2020	26.795.000	8 April 2019	26.795.000,00	-	20.100.000,00	6.695.000,00	-
44	BNI	Sewa Lahan ATM dan Neon Box	10/PKS/UPT.PB/2018 (Adendum)	29 Agustus 2018	26.795.000,00	1 Tahun	31 Mei 2020	31 Mei 2020	26.795.000	29 Mei 2019	26.795.000,00	-	15.633.667,00	11.161.333,00	-
45	BPD Cabang Senopati	Media Promosi Videotron	007/MOU/UPT.PB/2019	13 Mei 2019	29.376.000,00	357 Hari	13 Mei 2020	13 Mei 2020	29.376.000	15 Mei 2019	29.376.000,00	-	18.360.000,00	11.016.000,00	-
46	BRI	Media Promosi Videotron	008/MOU/UPT.PB/2019	22 Mei 2019	30.024.000,00	365 Hari	21 Mei 2020	21 Mei 2020	30.024.000	18 Juli 2019	30.024.000,00	-	18.360.000,00	11.664.000,00	-
47	Bank DANAMON	Sewa Lahan Kios	151/KIOS2/UPT.PB/1/2018	2 Januari 2018	21.867.000,00	1 Tahun	31 Desember 2019	31 Desember 2019	21.867.000	20 Februari 2019	21.867.000,00	-	21.867.000,00	-	-
48		Sewa Lahan Parabola	001/MOU/UPT.PB/2019	2 Januari 2019	6.240.000,00	1 Tahun	31 Desember 2019	31 Desember 2019	6.240.000	20 Februari 2019	6.240.000,00	-	6.240.000,00	-	-
49		Sewa Lahan Kios	109/KIOS2/UPT.PB/1/2018	2 Januari 2018	36.042.000,00	1 Tahun	31 Desember 2019	31 Desember 2019	36.042.000	20 Februari 2019	36.042.000,00	-	36.042.000,00	-	-
50		Sewa Lahan Kios	110/KIOS2/UPT.PB/1/2018	2 Januari 2018	19.454.000,00	1 Tahun	31 Desember 2019	31 Desember 2019	19.454.000	20 Februari 2019	19.454.000,00	-	19.454.000,00	-	-
51	Konter	Sewa Lahan Konter a.n Azuar Lantai 2 Blok Atrium No. 8	009/KONTER.02/UPT.PB/X/2019	1 Oktober 2018	1.992.000,00	3 Bulan	31 Desember 2019	31 Desember 2019	1.992.000	24 September 2019	1.992.000,00	-	1.992.000,00	-	-
52		Sewa Lahan Konter a.n Shinta Lantai 2 Blok Atrium No. 9	009/KONTER.02/UPT.PB/X/2019	1 Oktober 2018	1.821.000,00	3 Bulan	31 Desember 2019	31 Desember 2019	1.821.000	24 September 2019	1.821.000,00	-	1.821.000,00	-	-
53	LINK AJA	Media Promosi Spanduk dan Hanging Banner	Invoice Nomor 510/228	26 Agustus 2019	6.336.000,00	128 Hari	31 Desember 2019	31 Desember 2019	6.336.000	30 Agustus 2019	6.336.000,00	-	6.336.000,00	-	-
54	PT. Karya Anak Bangsa (GO JEK)	Media Promosi Spanduk	Invoice Nomor 510/147	20 Mei 2019	23.310.000,00	259 Hari	31 Desember 2019	31 Desember 2019	23.310.000	3 September 2019	23.310.000,00	-	23.310.000,00	-	-
55	PT. Dhompot Karya Anak Bangsa (GO PAY)	Media Promosi Gambar Mural	010/MOU/UPT.PB/2019	30 Agustus 2019	9.582.000,00	365 Hari	30 Agustus 2020	30 Agustus 2020	9.582.000	15 Nopember 2019	9.582.000,00	-	3.202.500,00	6.379.500,00	-
56	Kios	Sewa Lahan Kios C-37	109/KIOS2/UPT.PB/VII/1/2019	30 Agustus 2019	12.014.000,00	4 Bulan	31 Desember 2019	31 Desember 2019	12.014.000	30 Agustus 2019	12.014.000,00	-	12.014.000,00	-	-
57		Sewa Lahan Kios C-38	110/KIOS2/UPT.PB/VII/1/2019	30 Agustus 2019	6.485.000,00	4 Bulan	31 Desember 2019	31 Desember 2019	6.485.000	30 Agustus 2019	6.485.000,00	-	6.485.000,00	-	-

No.	Pihak Ketiga (Penyewa)	Lingkup Perjanjian	Perjanjian			Jangka Waktu	Berakhir	Tatakala		Realisasi		Jumlah Pendapatan s.d 2018	Jumlah Pendapatan 2019	Pendapatan Diterima Dimuka	
			No.	Tanggal	Nilai (Rp)			Tgl Jatuh Tempo	Nominal	Tgl Setor	Nominal			2020	2021 dst
58	Bank MANDIRI	Sewa Lahan ATM dan Billboard Lantai 2	011/PKS/UPT.PB/2019	31 Oktober 2019	13.695.000,00	1 Tahun	31 Oktober 2020	31 Oktober 2020	13.695.000	5-Dec-19	13.695.000,00	-	2.283.000,00	11.412.000,00	-
59	CV JAVADEKA MANDIRI	Sewa Lahan, Mobile Sellin, Listrik dan Servis Charge	013/MOU/UPT.PB/2019	11/12/2019	61.605.000,00		14/12/2020	14-Dec-20	61.605.000	13-Dec-19	61.605.000,00	-	2.985.000,00	58.620.000,00	-
60	BPD DIY	Sewa Sebagian Ruangan pada Gedung Rumah Sakit Pratama Yogyakarta untuk Digunakan Sebagai Kantor Kas BPD DIY	001/641/PS.1/VIII/2018 & 1857.1/OM.0005	21 Agustus 2018	71.400.000,00	3 tahun	21 Agustus 2021	17 Agustus 2018	71.400.000,00	15 Agustus 2018	71.400.000,00	7.933.333,33	23.800.000,00	23.800.000,00	15.866.666,67
61	BPD DIY	Sewa Lahan Pada Rumah Sakit Pratama untuk Penempatan Anjungan Tunai Mandiri	002/641/PS.1/VIII/2018 & 1858.1/OM.0005	21 Agustus 2018	19.800.000,00	3 tahun	21 Agustus 2021	17 Agustus 2018	19.800.000,00	15 Agustus 2018	19.800.000,00	2.200.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	4.400.000,00
62	Ade Suryo Setyawan	Sewa Sebagian Ruangan pada Gedung Rumah Sakit Pratama Yogyakarta untuk Digunakan Sebagai Tempat Usaha Fotokopi dan Food Court/Stand Makanan	445/007	2 Januari 2019	3.300.000,00	1 tahun	31 Desember 2019	31 Januari 2019	3.300.000,00	31 Januari 2019	3.300.000,00	-	3.300.000,00	-	-
<b>Jumlah</b>									<b>3.013.014.505</b>		<b>7.625.938.225,68</b>	<b>3.699.596.582,92</b>	<b>1.486.359.373,75</b>	<b>#####</b>	<b>1.259.004.689,09</b>

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**UTANG BELANJA**  
**Per 31 Desember 2019**

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2018	MUTASI		SALDO PER 31 DESEMBER 2019
			Penambahan	Pengurangan	
1	Utang Listrik	906.339.012,00	682.121.953,00	906.339.012,00	682.121.953,00
2	Utang Telepon	18.984.494,00	8.179.736,00	18.984.494,00	8.179.736,00
3	Utang Air (PDAM)	7.397.948,00	3.879.992,00	7.397.948,00	3.879.992,00
4	Utang Belanja Barang	5.470.551.829,87	1.930.320.847,00	5.470.551.829,87	1.930.320.847,00
5	Utang Belanja Modal	484.475.299,18	48.162.000,00	484.475.299,18	48.162.000,00
6	Utang Belanja Pegawai	5.464.766.237,50	3.624.591.532,00	5.464.766.237,50	3.624.591.532,00
7	Utang Belanja lainnya	20.965.998,00	217.880.927,00	20.965.998,00	217.880.927,00
	<b>Jumlah</b>	<b>12.373.480.818,55</b>	<b>6.515.136.987,00</b>	<b>12.373.480.818,55</b>	<b>6.515.136.987,00</b>

**REKAPITULASI HUTANG BELANJA PER 31 DESEMBER 2019**

NO	INSTANSI	Hutang Listrik	Hutang Telepon	Hutang Air	Hutang Blj Barang Jasa Lainnya	Hutang Blj Modal	Hutang Belanja Pegawai	Hutang Blj Lainnya	JUMLAH
1	DINDIK	-	-	-					-
2	DINKES	126.328.130,00	2.634.430,00	1.047.000,00			3.624.591.532,00	25.404.920,00	3.780.006.012,00
3	RSUD	-	402.000,00	-	1.871.569.847,00	48.162.000,00	-	192.067.107,00	2.112.200.954,00
4	DPUPKP	-	-	-					-
5	POL PP	-	-	-					-
6	DISKAR	-	-	-					-
7	BPBD	-	-	-					-
8	DINSOS	-	-	-					-
9	DPMPPA	-	-	-					-
10	PETARUNG	-	-	-					-
11	DLH	-	-	-					-
12	CAPIL	-	-	-					-
13	KEC TR	-	-	-					-
14	KEC JT	-	-	180.800,00					180.800,00
15	KEC GK	7.237.765,00	400.119,00	411.000,00					8.048.884,00
16	KEC DN	-	-	-					-
17	KEC GT	4.938.798,00	255.914,00	1.431.000,00					6.625.712,00
18	KEC PA	6.004.452,00	188.494,00	128.500,00					6.321.446,00
19	KEC NG	-	-	-					-
20	KEC WB	4.370.133,00	283.035,00	39.500,00					4.692.668,00
21	KEC MJ	-	-	-					-
22	KEC KT	-	-	-					-
23	KEC GM	-	-	-					-
24	KEC MG	5.303.390,00	295.044,00	-					5.598.434,00
25	KEC UH	7.737.527,00	479.330,00	79.400,00					8.296.257,00
26	KEC KG	5.232.328,00	554.000,00	411.292,00					6.197.620,00
27	KB	-	-	-					-
28	DINHUB	11.393.947,00	-	-	58.751.000,00			-	70.144.947,00
29	KOMINFO								-
30	KOPERASI								-
31	DPMP	-	-	-					-
32	DISPORA								-
33	DISBUD	-	-	-					-
34	DPK(ARSIP)		289.694,00						289.694,00
35	KESBANG	-	-	-					-
36	DPP(PERTANIAN)	-	-	-					-
37	DISPAR	100.512.305,00	336.478,00	44.500,00				408.900,00	101.302.183,00
38	PERINDAG			107.000,00					107.000,00
39	BAPPEDA	-	-	-					-

NO	INSTANSI	Hutang Listrik	Hutang Telepon	Hutang Air	Hutang Blj Barang Jasa Lainnya	Hutang Blj Modal	Hutang Belanja Pegawai	Hutang Blj Lainnya	JUMLAH
40	SETDA	-	-	-					-
41	A. TAPEM	-	-	-					-
42	B. HUKUM								-
43	C. PROTOKOL								-
44	D. UMUM	-	-	-					-
45	E. P3ADK	-	-	-					-
46	F. DALBANG	-	-	-					-
47	G. ORGANISASI	-	-	-					-
48	H. BLP								-
49	DPRD	20.341.479,00	1.228.395,00						21.569.874,00
50	INSPEKTORAT	-	-	-					-
51	BKPP	-	-	-					-
52	SKPKD								-
53	BPKAD	382.721.699,00	832.803,00	-					383.554.502,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>682.121.953,00</b>	<b>8.179.736,00</b>	<b>3.879.992,00</b>	<b>1.930.320.847,00</b>	<b>48.162.000,00</b>	<b>3.624.591.532,00</b>	<b>217.880.927,00</b>	<b>6.515.136.987,00</b>